RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian/Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJPN.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah kota untuk mencapai tujuan.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan:
    a. Renstra-PD;
    b. RKPD; dan
    c. Renja-PD.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
   a. merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun Renstra-PD Periode 2025-2029;
   b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap Kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
   c. merumuskan dan menetapkan berbagai Program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029; dan
   d. merumuskan Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi Kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:
a. penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program prioritas Wali Kota, dan arah Kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW;
b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan; dan
c. pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pengelolaan Pembangunan Daerah dan pelayanan publik.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Renstra-PD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya Visi dan Misi Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD.
(2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah, indikasi Program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana Program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang disebabkan terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan Kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (8/130/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat Visi, Misi, Sasaran Strategi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah Provinsi Jawa Barat.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan Daerah dan nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan tema periodisasi tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi. Hal ini menjadi landasan Daerah untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Daerah berfokus pada penguatan fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang lebih operasional dan terukur dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan"pemangku kepentingan" adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun RPJMD.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran visi dan misi kepala daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2030. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Bandung, 20 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG



MUHAMMAD FARHAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar xiii
Daftar Isi xiv
Daftar Gambar xvi
Daftar Tabel xviii

Bab I

PENDAHULUAN • I – 1

1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 2
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I – 5
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA ..... I – 8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 11

Bab II

GAMBARAN UMUM DAERAH • II – 1

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II – 2
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II – 2
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 44
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 71
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..... II – 87
2.1.5. Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II – 106
2.1.6. Kerjasama Daerah ..... II – 156
2.1.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... II – 159
2.1.8. Badan Usaha Milik Daerah ..... II – 166
2.1.9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga ..... II – 175
2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... II – 192
2.2.1. Gambaran Singkat mengenai Kondisi Keuangan Daerah dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir ..... II – 192
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan ..... II – 226
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... II – 246
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 246
2.3.2. Isu Strategis ..... II – 255

Bab III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH • III – 1

3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... III – 2
3.2.1. Visi ..... III – 3
3.2.2. Misi ..... III – 6
3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III – 13
3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III – 20
3.2.1. Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah . III – 20
3.2.2. Arah Kebijakan ..... III – 90
3.2.3. Dukungan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III – 98

Bab IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH • IV – 1

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... IV – 2
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV – 137
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV – 137
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... IV – 139

Bab V

PENUTUP • V – 1

5.1. KESIMPULAN ..... V – 2
5.2. KAIDAH PELAKSANAAN ..... V – 2
5.3. PEDOMAN TRANSISI ..... V – 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya ..... I – 10
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bandung ..... II – 2
Gambar 2.2. Tantangan dan Disparitas Pengembangan Bandung Bagian Barat dan Bandung Bagian Timur ..... II – 16
Gambar 2.3. Peta Kebutuhan Air Tahun 2023 Kota Bandung ..... II – 20
Gambar 2.4. Peta Ambang Batas Penyediaan Air Tahun 2023 ..... II – 20
Gambar 2.5. Peta Daya Dukung Penyedia Air Tahun 2023 ..... II – 21
Gambar 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 25
Gambar 2.7. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 26
Gambar 2.8. Jumlah Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Ton/hari) ..... II – 29
Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung 2020-2024 ..... II – 33
Gambar 2.10. Emisi GRK Agregat Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Gg CO2eq) ..... II – 34
Gambar 2.11. Peta Distribusi Spasial dari Emisi GRK di Kota Bandung ..... II – 35
Gambar 2.12. Kapasitas Kota Bandung Terhadap Bencana ..... II – 37
Gambar 2.13. Jumlah Jenis Flora dan Fauna di Kota Bandung ..... II – 38
Gambar 2.14. Jasa Ekosistem Keanekaragaman Hayati Kota Bandung ..... II – 38
Gambar 2.15. Efisiensi Keanekaragaman Hayati Kota Bandung ..... II – 39
Gambar 2.16. Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 40
Gambar 2.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 41
Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II – 50
Gambar 2.19. PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2020-2024 (juta rupiah) ..... II – 51
Gambar 2.20. Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II – 52
Gambar 2.21. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II – 54
Gambar 2.22. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 57
Gambar 2.23. IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 58
Gambar 2.24. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2020-2024 (dalam ribu rupiah) ..... II – 60
Gambar 2.25. Capaian Umur Harapan Hidup Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II – 61
Gambar 2.26. Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 61
Gambar 2.27. Jumlah Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 62
Gambar 2.28. Jumlah Rumah Sehat di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 63
Gambar 2.29. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 64
Gambar 2.30. Prevalensi Stunting Kota Bandung ..... II – 67
Gambar 2.31. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 67
Gambar 2.32. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bandung Tahun 2022-2024 ..... II – 69
Gambar 2.33. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 70
Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 71
Gambar 2.35. Perkembangan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 72
Gambar 2.36. Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 2020-2024 ..... II – 81
Gambar 2.37. Capaian Pelayanan Air Bersih di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 83
Gambar 2.38. Peta Kawasan Kumuh per Kelurahan di Kota Bandung ..... II – 84
Gambar 2.39. Grafik Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Kota Bandung (%) ..... II – 85
Gambar 2.40. Perbaikan Rumah Layak Huni Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 86
Gambar 2.41. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 88
Gambar 2.42. Indeks Pelayanan Publik Kota Bandung Tahun 2022-2024 ..... II – 91

Gambar 2.43. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024 ..... II – 91
Gambar 2.44. Evaluasi Kematangan Smart City Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 93
Gambar 2.45. Indeks Daya Saing Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024 ..... II – 94
Gambar 2.46. Persentase Pendanaan Non-APBD Melalui Kerjasama Daerah ..... II – 157
Gambar 2.47. Rekapitulasi Biaya Non-APBD Melalui Kerjasama Daerah Tahun 2020-2023 (dalam Miliar) ..... II – 158
Gambar 2.48. Ketercapaian TPB Kota Bandung Tahun 2019-2023 Berdasarkan 4 Kategori ..... II – 160
Gambar 2.49. Ketercapaian Indikator TPB Kota Bandung Berdasarkan Tujuan ..... II – 161
Gambar 2.50. Ketercapaian TPB di Kota Bandung Berdasarkan 4 Pilar ..... II – 161
Gambar 2.51. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Bandung ..... II – 162
Gambar 2.52. Ketercapaian TPB Pilar Sosial di Kota Bandung ..... II – 162
Gambar 2.53. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Bandung ..... II – 163
Gambar 2.54. Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi di Kota Bandung ..... II – 164
Gambar 2.55. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Lingkungan di Kota Bandung ..... II – 164
Gambar 2.56. Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan di Kota Bandung ..... II – 165
Gambar 2.57. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Bandung ..... II – 165
Gambar 2.58. Kontribusi Dana CSR/TJSL Terhadap Belanja Daerah Non-APBD Tahun 2020-2024 ..... II – 176
Gambar 2.59. Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 178
Gambar 2.60. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 ..... II – 191
Gambar 2.61. Metode Proyeksi Pendapatan Daerah ..... II – 228
Gambar 2.62. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung ..... II – 240
Gambar 2.63. Skenario Pembiayaan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... II – 245
Gambar 2.64. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan ..... II – 257
Gambar 2.65. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung ..... II – 266
Gambar 2.66. Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung ..... II – 266
Gambar 2.67. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Bandung ..... II – 267
Gambar 3.1 Kerangka Pikir RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III – 3
Gambar 3.2 Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 6
Gambar 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III – 13
Gambar 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Bandung dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III – 13
Gambar 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 24
Gambar 4.1 Rencana Tahapan Revitalisasi RSUD ..... IV – 135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2020-2024	II – 4
Tabel 2.2.	Temperatur Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 5
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung	II – 6
Tabel 2.4.	Ketersediaan, Ambang Batas, dan Kebutuhan Air bersih di Kota Bandung Tahun 2023	II – 18
Tabel 2.5.	Ketersediaan, Ambang Batas, dan Kebutuhan Pangan di Kota Bandung Tahun 2023	II – 22
Tabel 2.6.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bandung Tahun 2020–2024	II – 26
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 28
Tabel 2.8.	Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada tahun 2024	II – 30
Tabel 2.9.	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana di Kota Bandung	II – 32
Tabel 2.10.	Persentase Capaian Penurunan Emisi Kumulatif GRK terhadap Kondisi Baseline, Kota Bandung 2018-2024	II – 35
Tabel 2.11.	Capaian Penurunan Emisi Kumulatif GRK per Sektor di Kota Bandung Tahun 2024	II – 36
Tabel 2.12.	Upaya Penurunan Emisi Kumulatif GRK per Sektor	II – 36
Tabel 2.13.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 41
Tabel 2.14.	Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2024	II – 42
Tabel 2.15.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Bandung Tahun 2024	II – 43
Tabel 2.16.	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2024	II – 44
Tabel 2.17.	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II – 45
Tabel 2.18.	Distribusi PDRB Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)	II – 46
Tabel 2.19.	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)	II – 47
Tabel 2.20.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024	II – 49
Tabel 2.21.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2020–2024	II – 53
Tabel 2.22.	Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2020–2024	II – 55
Tabel 2.23.	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	II – 58
Tabel 2.24.	IPM Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 59
Tabel 2.25.	Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2024	II – 60
Tabel 2.26.	Prevalensi Stunting Kota Bandung dan Kabupaten/Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 dan 2024	II – 64
Tabel 2.27.	Masalah dan Intervensi Penanganan Stunting	II – 65
Tabel 2.28.	Angka Putus Sekolah di Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 68
Tabel 2.29.	Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2020-2024	II – 72
Tabel 2.30.	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 73
Tabel 2.31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 75
Tabel 2.32.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	II – 75
Tabel 2.33.	Indeks Inovasi Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 75
Tabel 2.34.	Jumlah Proyek PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 76
Tabel 2.35.	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 77
Tabel 2.36.	Indikator Kinerja Pariwisata Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 78
Tabel 2.37.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 79
Tabel 2.38.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 80
Tabel 2.39.	Livable City Index Tahun 2024	II – 82
Tabel 2.40.	Livable City Index Tahun 2018-2024	II – 83
Tabel 2.41.	Perbaikan Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2020-2024	II – 85

Tabel 2.42. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2020-2024 ..... II – 87
Tabel 2.43. Perbandingan Hasil Evaluasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 88
Tabel 2.44. Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 89
Tabel 2.45. Nilai IKM Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 90
Tabel 2.46. Rincian Aspek dalam Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024 ..... II – 92
Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 95
Tabel 2.48. Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan ..... II – 107
Tabel 2.49. Target SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025-2029 ..... II – 109
Tabel 2.50. Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan ..... II – 112
Tabel 2.51. Target SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025-2029 ..... II – 122
Tabel 2.52. Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ..... II – 133
Tabel 2.53. Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 ..... II – 135
Tabel 2.54. Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ..... II – 138
Tabel 2.55. Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029 ..... II – 139
Tabel 2.56. Realisasi SPM Bidang Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum ..... II – 140
Tabel 2.57. Target SPM Bidang Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Tahun 2025-2029 ..... II – 141
Tabel 2.58. Realisasi Bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran ..... II – 142
Tabel 2.59. Target Bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Tahun 2025-2029 ..... II – 145
Tabel 2.60. Realisasi Bidang Urusan Sosial ..... II – 148
Tabel 2.61. Target Bidang Urusan Sosial Tahun 2025-2029 ..... II – 151
Tabel 2.62. Rekapitulasi Realisasi Program Prioritas Pembangunan yang Dibiayai melalui Kerjasama Daerah Tahun 2023 ..... II – 156
Tabel 2.63. Kinerja Keuangan Perumda Tirtawening Tahun 2020-2024 ..... II – 167
Tabel 2.64. Kesehatan Perumda Tirtawening Tahun 2020-2024 ..... II – 168
Tabel 2.65. Kinerja Keuangan Perumda BPR Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 168
Tabel 2.66. Kesehatan Perumda BPR Kota Bandung Tahun 2020-2024 ..... II – 169
Tabel 2.67. Kinerja Keuangan PT Bandung Infra Investama Tahun 2020-2024 ..... II – 170
Tabel 2.68. Kesehatan PT Bandung Infra Investama Tahun 2020-2024 ..... II – 171
Tabel 2.69. Kinerja Keuangan Perumda Pasar Juara Tahun 2020-2024 ..... II – 172
Tabel 2.70. Kesehatan Perumda Pasar Juara Tahun 2020-2024 ..... II – 173
Tabel 2.71. Kinerja Keuangan Bank BJB Tahun 2020-2024 ..... II – 173
Tabel 2.72. Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan & Bantuan/ Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2024 ..... II – 176
Tabel 2.73. Capaian Kinerja Misi 1 ..... II – 180
Tabel 2.74. Capaian Kinerja Misi 2 ..... II – 182
Tabel 2.75. Capaian Kinerja Misi 3 ..... II – 186
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Misi 4 ..... II – 188
Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 ..... II – 189
Tabel 2.78. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 194
Tabel 2.79. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah) II – 195
Tabel 2.80. Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 197
Tabel 2.81. Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 198
Tabel 2.82. Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 199
Tabel 2.83. Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 200
Tabel 2.84. Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 201
Tabel 2.85. Realisasi Target Pendapatan Transfer Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 202

Tabel 2.86. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2020–2024 ..... II – 202
Tabel 2.87. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2020–2024 ..... II – 203
Tabel 2.88. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 204
Tabel 2.89. Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 205
Tabel 2.90. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 206
Tabel 2.91. Tingkat Capaian Realisasi terhadap Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Kota Bandung Tahun 2020–2024 (dalam miliar rupiah) ..... II – 207
Tabel 2.92. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 210
Tabel 2.93. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 212
Tabel 2.94. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Rupiah) ..... II – 214
Tabel 2.95. Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2020–2024 ..... II – 217
Tabel 2.96. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 221
Tabel 2.97. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 222
Tabel 2.98. Defisit Riil Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 223
Tabel 2.99. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 224
Tabel 2.100. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 224
Tabel 2.101. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 225
Tabel 2.102. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar rupiah) ..... II – 226
Tabel 2.103. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 229
Tabel 2.104. Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 231
Tabel 2.105. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 234
Tabel 2.106. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 235
Tabel 2.107. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 ..... II – 238
Tabel 2.108. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah) ..... II – 241
Tabel 2.109. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah ..... II – 250
Tabel 2.110. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum di Kota Bandung ..... II – 252
Tabel 2.111. Perumusan Isu Strategis Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... II – 290
Tabel 3.1. Matriks Keselarasan Misi RPJMD dan RPJPD Kota Bandung ..... III – 12
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 15
Tabel 3.3. Keterkaitan Misi RPJMD Kota Bandung dengan SDGs, RPJMN 2025–2029, dan RPJPD 2025–2045 ..... III – 18
Tabel 3.4. Highlight Indikasi Intervensi Lokasi Prioritas Kota Bandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III – 24
Tabel 3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 26
Tabel 3.6. Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 87
Tabel 3.7. Keterkaitan Program Prioritas Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung ..... III – 88
Tabel 3.8. Arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... III – 92
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 ..... IV – 3
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Tahun 2025–2029 ..... IV – 138
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bandung Tahun 2025–2029 ..... IV – 140



BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan metropolitan di Indonesia, tengah menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Laju urbanisasi meningkat sebesar 2,14% per tahun selama lima tahun terakhir, dengan kepadatan penduduk mencapai 16.885 jiwa/km^2 pada tahun 2024 (BPS Kota Bandung, 2024). Kota ini juga menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diproyeksikan menampung lebih dari 10 juta jiwa pada 2030. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap ruang kota, lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar.

Di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat sebesar 4,99% dan PDRB per kapita mencapai Rp 147 juta (BPS, 2024). Namun, pertumbuhan ini belum cukup menjawab berbagai tantangan mendasar. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi pada angka 7,4%, didominasi oleh kelompok usia produktif muda (Disnaker Kota Bandung, 2024). Rasio Gini mencapai 0,440, mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan (BPS, 2024).

Lingkungan hidup juga menghadapi tekanan besar. Pada Oktober 2024, indeks kualitas udara (AQI) Bandung mencapai angka 179, menempatkannya sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di Indonesia (IQAir, 2024). Konsentrasi PM2.5 tercatat sebesar 39 µg/m^3, hampir 8 kali lipat dari ambang aman WHO. Sekitar 70% polusi udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Sementara itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru mencakup 12,56% dari total luas wilayah kota, jauh dari target 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal pengelolaan sampah, dari total timbulan harian sekitar 1.600 ton, hanya 56% yang berhasil diangkut ke TPA Sarimukti dan hanya 6% yang diolah melalui skema 3R (DLH Kota Bandung, 2024).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kota Bandung menyimpan kekuatan strategis berupa bonus demografi: sebanyak 65,62% penduduk berada dalam usia produktif (BPS Kota Bandung, 2024). Ini merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial, jika diiringi kebijakan yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja inklusif dan berkelanjutan.

Capaian pembangunan pun menunjukkan arah positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,75, melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Reformasi birokrasi menguat, tercermin dalam peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,42 (kategori Baik), serta capaian Indeks *Liveable City* sebesar 74,2 yang telah melampaui target awal RPJMD sebelumnya. Momentum ini memperkuat perlunya transformasi peran pemerintah dari pelaksana program menjadi orkestrator pembangunan.

Komitmen terhadap transformasi ini juga diwujudkan melalui adopsi *strategis dynamic governance* sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang bersifat adaptif, inovatif, dan

responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen strategis yang mengaktualisasikan pendekatan *strategis dynamic governance*, yang dijabarkan melalui tiga pilar utama, yaitu: a). *Thinking Ahead*: penyusunan RPJMD berbasis proyeksi tren dan *scenario planning*; b). *Thinking Again*: sinkronisasi hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya; dan c). *Thinking Across*: pendekatan lintas perangkat daerah, lintas sektor, dan lintas wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran visi dan misi kepala daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 20 Februari 2025, telah dilantik **H. Muhammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung dan H. Erwin, S.E., M.Pd. sebagai Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2025-2030**. Maka sesuai Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dokumen ini akan menjadi Tahap I dari RPJPD Kota Bandung Tahun 2025–2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024.

RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dokumen RPJMD harus mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan tata ruang, memperhatikan dokumen strategis seperti RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi, dan RPJMN. Lebih dari itu, RPJMD di Bandung juga akan menjadi dokumen kolaboratif lintas-aktor dan lintas-level. Penyusunan RPJMD Kota Bandung 2025–2029 secara terintegrasi dan kolaboratif akan menghadirkan perubahan fundamental dalam cara pemerintah daerah merancang dan menjalankan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya normatif dan prosedural, tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman dan aspirasi masyarakat

kota. Kota Bandung menghadapi tantangan dan peluang antara lain bonus demografi, transformasi digital, perubahan iklim, pembangunan inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengarusutamaam gender. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 hadir bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan formal, melainkan sebagai peta jalan transformasi menuju Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD mengedepankan prinsip "Bandung sebagai kota orkestrator" di mana pemerintah tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi akselerator dan penghubung dari inisiatif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Terdapat 2 (dua) kerangka utama dalam proses penyusunan dokumen ini:

1. Pendekatan Teknokratis, Partisipatif, Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial.
    - Teknokratis: menggunakan data empirik, analisis statistik, dan pemodelan tren untuk merumuskan kebijakan yang rasional dan berbasis bukti.
    - Politis: menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
    - Atas-bawah dan bawah-atas: merupakan hasil perencanaan yang selaras antara kota, provinsi, dan nasional.
    - Partisipatif: melibatkan masyarakat sejak awal, baik melalui forum musrenbang tematik, penjaringan inisiatif masyarakat, hingga *crowdsourcing* ide kebijakan.
    - Holistik–Tematik: mengelompokkan prioritas pembangunan ke dalam tema-tema besar lintas sektor, seperti digitalisasi layanan, kota layak huni, ekonomi kreatif, dan ekologi perkotaan.
    - Integratif: menyelaraskan RPJMD dengan arah pembangunan nasional (RPJMN), jangka panjang (RPJPD), dan target global (SDGs), serta merangkul agenda prioritas kepala daerah.
    - Spasial: memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya sektoral, tetapi juga kontekstual sesuai karakter wilayah, potensi kelurahan, dan dinamika kawasan metropolitan Bandung Raya.
2. Prinsip nilai yang menjadi arah moral dan strategis pembangunan kota ke depan.
    - Inklusi Sosial

      Mewujudkan pembangunan yang berpihak pada semua masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, pekerja informal, anak jalanan, hingga masyarakat adat. Inklusi tidak hanya berarti akses, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam merancang dan mengawasi pembangunan kota.

- Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*)

  Mendorong model pembangunan yang menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, transportasi rendah emisi, dan ruang hijau yang terdistribusi merata. Kota tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029.

- Transformasi Digital

  Menjadikan digitalisasi sebagai *enabler* utama dalam tata kelola kota, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, serta partisipasi masyarakat. Bandung sebagai kota pelopor *smart city* di Indonesia ditantang untuk naik kelas menjadi kota dengan sistem pemerintahan berbasis AI, data terbuka, dan layanan publik yang mudah, cepat, dan transparan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 berlandaskan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 30;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5); dan
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5).

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan integratif dan sinkron dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Penjelasan hubungan RPJMD Kota Bandung dengan dokumen lainnya, sebagai berikut:

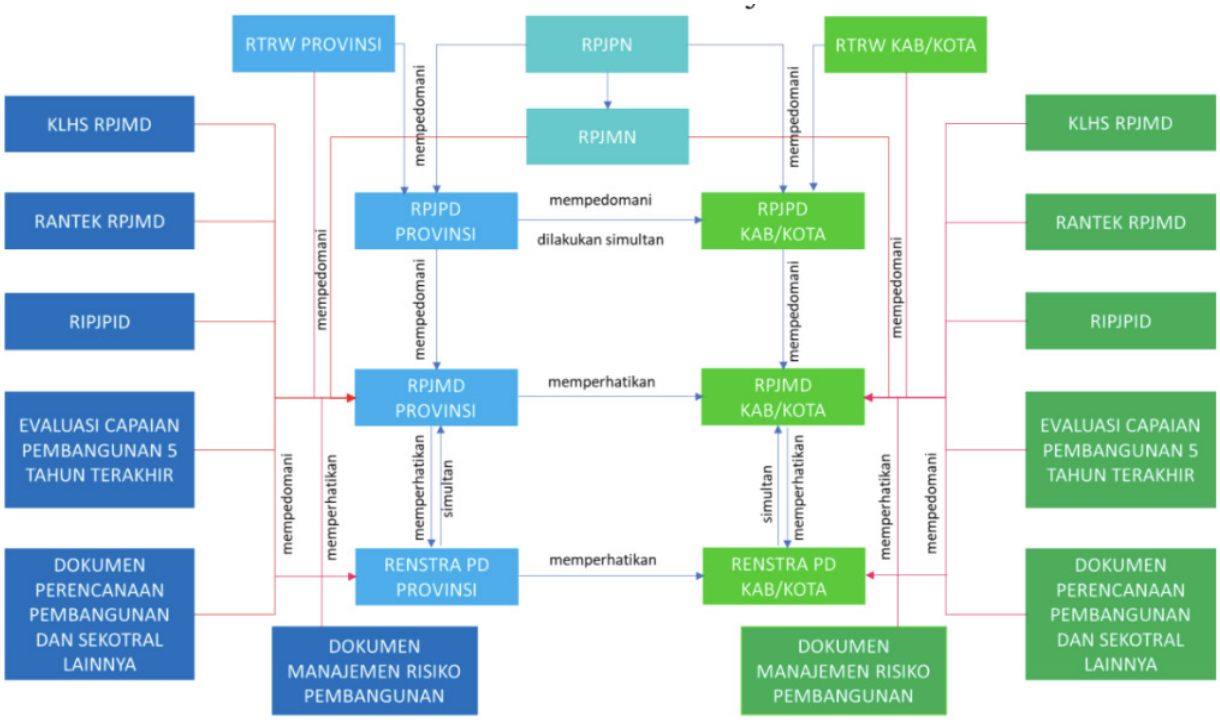
- **RPJPD Kota Bandung 2025–2045** sebagai arah pembangunan jangka panjang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memedomani visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045. Penyusunan rencana pembangunan Kota Bandung pada periode ini merupakan pelaksanaan dari Tahap I RPJPD (2025-2029).

- **RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029** sebagai arah pembangunan lintas level pemerintahan. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung sesuai karakteristik daerah dan kewenangan masing-masing. Melalui penyelarasan rencana pembangunan provinsi dan kota, diharapkan akan terwujud sinergi pembangunan.
- **RPJMN 2025–2029** sebagai arah pembangunan lintas level pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah, maka penyusunan RPJMD Kota Bandung memerhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Asta Cita dan *quick win* serta kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD.
- **RTRW Kota Bandung** sebagai dasar spasial dan ekologis pembangunan. Dokumen RPJMD kota disusun dengan mempedomani RTRW Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2043. Rencana pembangunan dalam RPJMD disusun dengan memperhatikan kebijakan, strategi, rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, dan arahan pemanfaatan ruang kota pada periode tahun berkenaan.
- **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)** sebagai turunan sektoral. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana pelayanan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD. Program dalam RPJMD akan dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Program tersebut dilengkapi dengan informasi indikator, target dan pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** sebagai dokumen tahunan. RPJMD Kota Bandung akan menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Bandung. Rencana pembangunan tahunan (RKPD dan Renja perangkat Daerah) merupakan pelaksanaan dari RKPD untuk mencapai target-target pada akhir periode pembangunan di tahun 2029.
- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** untuk memastikan pembangunan jangka menengah telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- **Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya** yang relevan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, antara lain Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Barat untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Keterkaitan RPJMD Kota Bandung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen strategis pembangunan Kota Bandung selama 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam mewujudkan visi "**Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani Serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional"**.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen ini, meliputi:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja daerah yang terukur;
2. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif terhadap isu strategis kota dan lingkungan dinamis;

3. Menyediakan rencana program pembangunan daerah;
4. Menentukan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sebagai tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah di Bandung Raya;
6. Menyusun kerangka kerja pembangunan yang menjamin kesinambungan, efisiensi, dan inovasi, termasuk melalui pemanfaatan inisiatif masyarakat;
7. Menjadi basis koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas; dan
8. Menyediakan kerangka evaluasi berbasis dampak, bukan sekadar output, serta mendorong reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Bandung 2025–2029 disusun dengan sistematika mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan diperkaya dengan pendekatan transformatif berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra utama dalam pembangunan kota. Berikut adalah penjelasan umum setiap bab:

Bab 1. Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.
4. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025 2029.
5. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab 2. Gambaran Umum Daerah

1. Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat:
    a. Aspek geografi dan demografi;
    b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
    c. Aspek Daya Saing Daerah;
    d. Aspek Pelayanan Umum;
    e. Capaian Standar Pelayanan Minimal;
    f. Capaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan

g. Kerjasama daerah;
h. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda; dan
i. Capaian Pembangunan Periode Sebelumnya.

2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat:
   a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
   b. Isu strategis daerah.

Bab 3. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran memuat:
   a. Visi dan Misi; dan
   b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat:
   a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
   b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab 4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Subbab Program Perangkat Daerah memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab 5. Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB

II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 luas wilayah Kota Bandung adalah sebesar 16.659 Ha. Letak Geografis Daerah Kota adalah 6° 50' 38" -6° 58' 50" lintang selatan dan 107° 33' 34" -107° 43' 50" bujur timur. Kota Bandung memiliki batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; dan

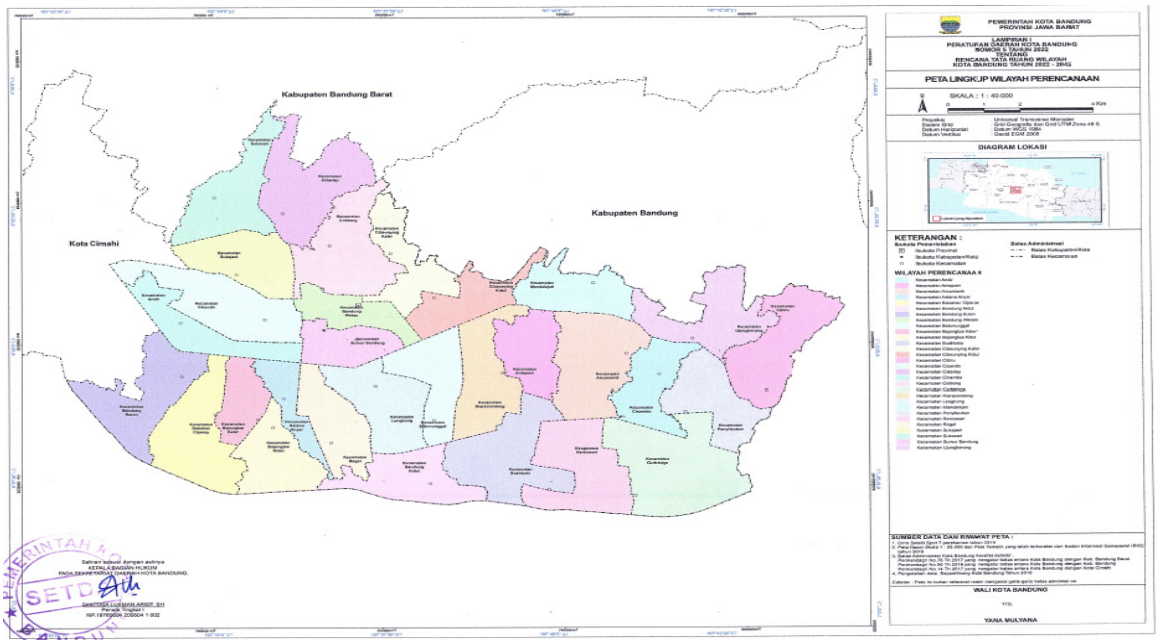
c. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.596 Rukun Warga (RW) dan 9.959 Rukun Tetangga (RT).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bandung terletak pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Adapun secara geografis, Kota Bandung berada di bagian tengah "Cekungan Bandung" yang memiliki dimensi luas sebesar 233.000 ha. Dari cekungan ini terletak lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan lima kecamatan lain dari Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bandung



Sumber: *Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042*

c. Kondisi Topografi

Kota Bandung berada pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara yaitu setinggi 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian utara memiliki kondisi permukaan tanah (topografi) yang berbukit sedangkan wilayah bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki kontur tanah yang relatif datar.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada sebuah *basin* atau Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh berbagai gunung berapi dengan ketinggian rata-rata setinggi 650 m sampai 2.000 m atau lebih. Secara keseluruhan, wilayah cekungan Bandung didominasi oleh daerah datar (kemiringan 0–8%), lalu 21% lainnya merupakan daerah landai (kemiringan 8%–15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% terakhir merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%). Pada dasar cekungan tersebut mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), dengan aliran ke Waduk Saguling dan berujung di Pantai Utara Jawa.

d. Kondisi Geologi

Kota Bandung dan sekitarnya memiliki kondisi geologis yang terbentuk sejak zaman kuarter, sehingga mempunyai kontur tanah yang alluvial sebagai hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian selatan serta timur Kota terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat, sedangkan di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Pada bagian tengah dan barat juga tersebar jenis tanah yang sama yaitu andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung sehingga dikelilingi oleh berbagai gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, dan (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

e. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh beberapa sungai besar yaitu 15 Sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedug, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cianjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) yakni fasilitas umum yang menyediakan tempat untuk mandi, mencuci, dan buang air (Sumber: DIKPLHD Tahun 2020).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, lokasi DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik, dan tempat kegiatan penting berlangsung seperti pertanian, dan lain-lain. Saat ini, kondisi sungai di Kota Bandung sebagian besar telah mengalami pencemaran. Tidak tegasnya regulasi yang ada terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Padahal Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini justru banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

f. Kondisi Klimatologi

Iklim normal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir Kota Bandung mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

g. Curah Hujan

Tingkat curah hujan Kota Bandung pada tahun 2024, bervariasi mulai dari yang terendah sebanyak 30 mm pada bulan Juni dan yang tertinggi pada bulan Januari sebanyak 335 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan yang terendah terjadi pada bulan Juni. Kondisi curah hujan tertinggi tersebut perlu diwaspadai sebagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, serta meluapnya sungai. Selengkapnya, kondisi curah hujan rata-rata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2020-2024

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	LPM (%)
2024	2.215	178	60,58
2023	1.751	143	58,92
2022	2.311,4	240	53.48
2021	2.170,7	230	55,97
2020	2.418,6	227	60,81

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2025*

h. Suhu

Suhu di Kota Bandung pada tahun 2024, tercatat tertinggi 32,5°C pada bulan Oktober dan terendah 19,1°C pada bulan Juli. Secara klimatologi, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk, karena dikelilingi oleh pegunungan. Rata-rata suhu harian sepanjang tahun 2024 adalah 24,6°C. Namun, tren peningkatan suhu yang diamati setiap tahunnya dapat dikaitkan dengan perubahan lingkungan dan pemanasan global. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Temperatur Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2024	24,6	32,50	19,10
2023	25,25	32,53	18,05
2022	25, 38	29,22	20,09
2021	23,58	29,33	20,15
2020	25,87	31,87	19,41

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2025*

i. Kelembapan Udara

Kelembapan udara rata-rata di Kota Bandung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika iklim lokal. Data yang dipublikasikan oleh *BMKG Stasiun Klimatologi Bandung* tahun 2024 mencatat bahwa kelembapan udara rata-rata selama tahun 2023 mencapai 76,5%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi 74,8% (BMKG, Laporan Iklim Tahunan Bandung Raya 2024). Angka-angka ini mengindikasikan kecenderungan iklim Kota Bandung yang terus berubah, terutama dalam kaitannya dengan pola hujan, suhu, dan tekanan udara.

Perubahan ini berdampak langsung terhadap sektor kesehatan, pertanian, dan infrastruktur kota. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat memperburuk kualitas udara dalam ruang dan mempercepat pertumbuhan jamur serta bakteri, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, terutama pada kelompok rentan. Di sisi lain, kelembapan rendah meningkatkan risiko dehidrasi, kekeringan lahan, serta potensi kebakaran, khususnya di kawasan Bandung Utara yang sensitif terhadap perubahan kelembapan dan suhu. Studi dari Pusat Studi Iklim dan Perkotaan Universitas Padjadjaran tahun 2024 juga menegaskan bahwa perubahan kelembapan di Bandung semakin berkorelasi dengan efek pulau panas perkotaan (*urban heat island*), terutama di kecamatan-kecamatan padat seperti Cicendo dan Sumur Bandung. Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan data kelembapan udara ke dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko lingkungan jangka menengah dan panjang.

j. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan eksisting di Kota Bandung diidentifikasi bahwa guna lahan terbesar ialah bangunan permukiman, yaitu seluas 7.622,22 Ha atau sebesar 45,69% dari luas wilayah Kota Bandung. Guna lahan bangunan permukiman kota berada tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Selain bangunan permukiman terdapat guna lahan bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran seluas 1.071,46 Ha atau sebesar 6,42% serta bangunan non permukiman lain seluas 878,05 Ha atau 5,26% dari luas wilayah Kota Bandung Selain itu, masih terdapat guna lahan sawah sebesar 6,37% yang sebagian besar di wilayah Timur Kota Bandung.

Data penggunaan lahan digunakan untuk memperoleh informasi penggunaan lahan eksisting di Kota Bandung. Data guna lahan eksisting merupakan salah satu pertimbangan untuk perencanaan tata ruang di Kota Bandung. Data ini bersumber dari Citra SPOT 7 tahun 2019. Berikut ini rincian guna lahan di Kota Bandung.

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung

Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bangunan Permukiman Kota	7.622,22	45,69
Perkebunan Lain	1.741,28	10,44
Jaringan Jalan Aspal / Beton / Tanah	1.518,59	9,10
Semak Belukar	1.237,60	7,42
Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	1.071,46	6,42
Sawah Dengan Padi Terus Menerus	1.061,79	6,37
Bangunan Non-Permukiman Lain	878,05	5,26
Hutan, Jalur Hijau, dan Taman Kota	651,71	3,91
Area Parkir	457,21	2,74
Sungai	126,35	0,76
Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Rendah	66,76	0,40
Danau Buatan Lainnya	64,78	0,39
Stadion dan Sarana Olahraga	48,90	0,29
Terminal Bandara	41,45	0,25
Saluran Air	29,70	0,18
Padang Golf	25,02	0,15
Kolam Ikan Air Tawar	11,35	0,07
Embung	6,04	0,04
Stasiun	6,01	0,04
Terminal Bus	4,82	0,03
Lapangan Diperkeras	2,92	0,02
Lahan Kosong/Tanah Terbuka	2,51	0,02
Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	1,93	0,01
Danau / Telaga Alami	1,91	0,01
Tegalan/Ladang	0,65	0,00
Jumlah	**16.681,01**	**100,00**

Sumber: *Citra Bandung SPOT 7, 2019*

Kota Bandung, dengan letaknya di Cekungan Bandung yang subur dan dikelilingi pegunungan, memiliki potensi besar sebagai pusat pembangunan berkelanjutan berbasis alam, budaya, dan teknologi. Keberhasilan kawasan Lembang dan Ciwidey sebagai destinasi agrowisata menunjukkan bagaimana kekuatan pertanian hortikultura dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, tanah vulkanik dari Gunung Tangkuban Parahu mendukung sektor hortikultura bernilai tinggi yang berkontribusi pada ketahanan

pangan dan ekonomi kreatif lokal. Namun, risiko geologis seperti sesar Lembang dan zona gempa Sukabumi - Padalarang, serta pencemaran Sungai Cikapundung oleh limbah industri, menunjukkan tantangan serius yang perlu ditangani dengan kebijakan mitigatif. Program "Citarum Harum" yang dijalankan lintas pemerintah telah mulai menunjukkan perbaikan kualitas air, namun upaya ini perlu diperkuat dengan peningkatan infrastruktur IPAL komunal dan pengendalian alih fungsi lahan di kawasan rawan seperti Gedebage dan Bandung Timur.

Kota Bandung membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur hijau seperti kolam retensi, sumur resapan, dan *vertical garden*. Ruang terbuka hijau yang saat ini baru 12% dari luas kota harus terus ditingkatkan agar mendekati target nasional sebesar 30%. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di Gedebage menjadi kawasan industri dan permukiman harus dikendalikan melalui perda zonasi ketat, mengingat 6,37% lahan sawah di Bandung menyumbang 15% kebutuhan pangan lokal. Inovasi seperti *urban farming* (Buruan SAE) di pekarang rumah penduduk atau gedung-gedung perkantoran bisa menjadi solusi efisiensi lahan dan air. Dengan kepadatan penduduk mencapai 16.600 jiwa/km^2, integrasi perumahan vertikal dengan halte Trans Metro Bandung dalam kerangka *transit-oriented development* (TOD) menjadi solusi untuk mengurangi tekanan lahan dan menciptakan mobilitas berkelanjutan. Langkah ini juga mendukung transformasi Bandung sebagai kota yang adaptif terhadap krisis iklim dan tantangan kependudukan ke depan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042, arahan dan potensi pengembangan wilayah berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri dari pengembangan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan.

1. Pengembangan Sumber Daya Alam Pertanian Perkotaan

Di tengah keterbatasan lahan, inovasi dalam pertanian perkotaan menjadi potensi yang sangat strategis. Salah satu contohnya adalah *Sein Farm* yang mengembangkan sistem pertanian modern berbasis teknologi seperti hidroponik, aquaponik, dan pertanian vertikal. Model ini tidak hanya menyediakan pangan segar dan sehat bagi warga, tetapi juga menjadi sarana edukasi, penelitian, dan wisata pertanian di tengah kota. Keberadaan inovasi semacam ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan pendekatan kreatif dan teknologi tepat guna.

Dengan seluruh potensi tersebut, Kota Bandung memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada pengelolaan terpadu, perlindungan ekosistem, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan kemitraan dengan wilayah sekitar untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kota Bandung memiliki lahan pertanian tanaman pangan seluas sekitar 233 hektar yang tersebar di Kecamatan Cibiru, Cidadap, dan Ujungberung. Untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 54 hektar di Kecamatan Ujung Berung dan Cibiru. Penetapan KP2B ini sejalan dengan arahan pengembangan pertanian dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, yang menekankan perlindungan dan pengembangan lahan pertanian secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Menurut Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha), tahun 2024 dan Laporan Kecamatan Ujung Berung Dalam Angka, BPS. 2024).

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) 2024 mencatat bahwa dari 702 hektar pertanian aktif di Kota Bandung, dengan penyumbang terluas di Kecamatan Gedebage yaitu 92 hektar melibatkan 311 petani aktif. Hal ini menunjukkan bahwa, sekalipun dalam tekanan alih fungsi lahan, potensi produktivitas lahan pertanian kota masih sangat tinggi jika dikelola secara tepat dan diberi dukungan kebijakan yang kuat.

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan lokal, mendukung transformasi pertanian urban, serta mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah telah mengembangkan *Sein Farm* (Sekemala *Integrated Farming*) sebagai kawasan pertanian terpadu yang representatif. Terletak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung*, Sein Farm* merupakan wujud konkret dari sinergi sektor pertanian, peternakan, perikanan, edukasi, dan wisata berbasis masyarakat.

Sein Farm dikembangkan dengan pendekatan pertanian terpadu berkelanjutan, mengintegrasikan kegiatan budidaya padi dan hortikultura, peternakan (domba, kambing, ayam), perikanan (lele dan nila dengan sistem bioflok), serta pemanfaatan teknologi hidroponik dan aquaponik. Kawasan ini tidak hanya difungsikan sebagai sentra produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan agrowisata, tempat masyarakat dapat belajar langsung mengenai praktik pertanian yang efisien, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Keunggulan strategis *Sein Farm* semakin diperkuat sejak ditetapkan sebagai pusat pengembangan sorgum nasional pada tahun 2024. Inisiatif ini selaras dengan agenda nasional dalam diversifikasi pangan dan pengurangan ketergantungan terhadap beras. *Sein Farm* juga memainkan peran penting dalam memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat secara langsung. Program seperti distribusi benih dan bibit, pelatihan pertanian,

pengelolaan limbah pertanian menjadi kompos, serta penyediaan fasilitas pembelajaran untuk sekolah dan komunitas menjadi bagian dari pendekatan *community-based urban farming*.

2. Pengembangan Sumber Daya Air

Kota Bandung memiliki potensi sumber daya air yang berasal dari Sungai Cikapundung, Cisangkuy, dan anak Sungai Citarum Hulu. Wilayah utara (Lembang, Cimenyan) menjadi daerah tangkapan air utama dengan sejumlah mata air yang berfungsi sebagai sumber air baku. Potensi ini mendukung kebutuhan air bersih, pertanian, dan energi mikrohidro, namun kualitasnya perlu dijaga karena ancaman pencemaran dan penurunan debit.

3. Pengembangan Keanekaragaman Hayati

Kota Bandung memiliki Taman Keanekaragaman hayati terletak di Kampung Cigagak Wetan, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, di kawasan Bandung Utara (KBU). Penetapan lokasi ini secara formal diatur melalui Keputusan Wali Kota Nomor 660/Kep.828-DLHK/2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019. Taman Kehati berfungsi sebagai: Ruang konservasi untuk tanaman langka dan endemik, Pusat pendidikan dan penelitian biodiversitas lokal, Ekowisata dan ruang terbuka hijau yang mendekatkan warga dengan alam.

Selain itu, kawasan Tahura Ir. H. Djuanda dan hutan kota lainnya menyimpan flora dan fauna khas pegunungan tropis. Terdapat potensi tanaman herbal, tanaman hias, dan tanaman pangan lokal yang dapat diolah menjadi produk industri kreatif. Pemanfaatan Pendidikan, penelitian, wisata alam, dan pengembangan produk herbal.

4. Pengembangan Kawasan Perumahan

Rencana pengembangan kawasan permukiman meliputi areal seluas lebih kurang 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH dan kawasan infrastruktur perkotaan. Untuk kawasan perumahan seluas lebih kurang 10.153 (sepuluh ribu seratus lima puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi kawasan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, serta fasilitas olah raga dengan areal seluas lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman Kota Bandung yang mencakup kurang lebih 10.615 hektar, dengan alokasi terbesar untuk kawasan perumahan sebesar ±10.153 hektar atau sekitar 60,6% dari total luas kota mencerminkan dominasi fungsi hunian dalam struktur ruang kota. Sisanya dialokasikan untuk fasilitas umum dan sosial (±442 ha), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebesar ±7 ha di Kecamatan Coblong, serta kawasan infrastruktur perkotaan (±13 ha) yang tersebar di kecamatan strategis seperti Gedebage, Regol, Kiaracondong, hingga Sumur Bandung. Distribusi yang timpang ini menunjukkan

bahwa pembangunan masih cenderung mengikuti pola *urban sprawl* yang konsumtif terhadap lahan, dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *compact city* yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks tata ruang berkelanjutan, ketimpangan alokasi ini mengancam keseimbangan ekologis kota, memperbesar risiko banjir akibat menurunnya daya resap tanah, serta memperburuk tekanan terhadap infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sistem sanitasi, yang saat ini belum menjangkau seluruh kawasan permukiman baru secara optimal.

Dengan proyeksi penduduk mencapai 2,7 juta jiwa pada tahun 2030 dan kepadatan saat ini mencapai 16.609 jiwa/km^2 tertinggi ketiga secara nasional setelah Jakarta dan Surabaya, penambahan 442 hektar fasilitas umum dan sosial menjadi sangat krusial untuk menjawab kebutuhan ruang hidup yang manusiawi dan inklusif. Di sisi lain, kawasan infrastruktur perkotaan seperti gardu induk listrik dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dikembangkan membutuhkan penataan ruang yang sensitif, termasuk perlindungan *buffer zone* (zona penyangga atau daerah penyangga yang berfungsi untuk memisahkan, meredakan, atau menetralisir potensi konflik) untuk menghindari konflik fungsi dan degradasi lingkungan. Proyeksi alih fungsi lahan yang terus meningkat di Bandung timur dan selatan mempertegas urgensi penguatan implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2022–2042 agar pengembangan kota tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga ekologis dan sosial, menjaga daya dukung lingkungan serta memastikan kualitas hidup warga dalam jangka panjang.

5. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Bandung mencakup area seluas kurang lebih 3.096 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan ini meliputi sektor jasa, perdagangan, dan penyediaan ruang bagi sektor informal. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung menggarisbawahi pentingnya pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru, khususnya di wilayah Kota Bandung bagian Barat, untuk menjaga keseimbangan tata ruang dan mencegah kepadatan berlebih di satu area tertentu.

Pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kota Bandung juga didukung oleh berbagai pusat perbelanjaan dan industri kreatif yang telah berkembang pesat, seperti kawasan Dago yang menjadi pusat bisnis dan hiburan dengan kafe serta restoran yang trendi, serta Jalan Cihampelas yang dikenal sebagai pusat penjualan pakaian sejak awal 1990-an. Adapun Teras Cihampelas, yang awalnya diresmikan sebagai proyek *skywalk* pertama di Indonesia pada tahun 2017, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi kawasan Cihampelas yang ikonik menjadi koridor pedestrian ramah pejalan kaki sekaligus pusat aktivitas ekonomi kreatif. Namun dalam perkembangannya, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan eksisting yang menghambat potensinya sebagai simpul ekonomi kreatif. Beberapa masalah utama antara lain adalah penurunan minat pengunjung akibat kurangnya

aktivasi ruang, keterbatasan variasi *tenant* yang sebagian besar bersifat homogen dan berskala kecil, serta lemahnya kurasi produk lokal yang seharusnya merepresentasikan kekuatan industri kreatif Bandung (menurut hasil penelitian "Kajian Kinerja Teras Cihampelas sebagai Ruang Publik di Kota Bandung" oleh Hasya & Damayanti tahun 2022).

Padahal, secara spasial dan historis, kawasan Cihampelas memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi belanja ikonik yang dikenal sejak era 1990-an lewat sentra penjualan jeans. Dengan rekayasa ulang tata kelola dan pendekatan berbasis komunitas kreatif, Teras Cihampelas sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi inkubator UMKM kreatif dan pusat promosi produk lokal khas Bandung, seperti fesyen, kerajinan, hingga kuliner khas. Untuk mendukung transformasi ini, diperlukan integrasi program revitalisasi dengan ekosistem kreatif kota mulai dari pelibatan pelaku kreatif lokal dalam kurasi ruang, pemberdayaan seniman jalanan untuk aktivasi atraksi budaya, hingga penyediaan ruang display digital dan ruang kerja komunal. Jika dikelola dengan visi *placemaking* berbasis warga, Teras Cihampelas dapat direposisi menjadi *creative district* yang menghubungkan ruang publik, ekonomi rakyat, dan identitas kota secara berkelanjutan.

Pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kota Bandung semakin berkembang dengan hadirnya berbagai kawasan ekonomi kreatif yang memadukan konsep tradisional dan modern. Salah satu contohnya adalah *The Hallway Space* yang terletak di lantai dua Pasar Kosambi, Jalan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung. Diresmikan pada 1 Oktober 2020, *The Hallway Space* berfungsi sebagai ruang kreatif bagi anak muda Bandung, menampung sekitar 50 *tenant* brand lokal dan 25 tenant kuliner. Tempat ini sering menjadi lokasi pameran seni dan pertunjukan musik, menjadikannya ikon baru dalam industri kreatif kota ini.

Selain itu, Pasar Cihapit, yang berlokasi di Jalan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, telah mengalami transformasi signifikan. Dulunya dikenal sebagai pasar tradisional, kini Pasar Cihapit menjadi destinasi kuliner yang menarik dengan berbagai kedai kekinian yang menawarkan berbagai makanan dan minuman. Kehadiran kedai-kedai seperti Seroja Bake dan Bakmi Tjo Kin menambah daya tarik pasar ini, menjadikannya tempat yang nyaman dan estetik bagi pengunjung. Transformasi ini mencerminkan upaya Kota Bandung dalam mengembangkan sektor perdagangan dan jasa melalui integrasi elemen kreatif dan tradisional, memperkuat posisinya sebagai kiblat ekonomi kreatif di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi tujuh kawasan industri dan perdagangan untuk produk khas Bandung, termasuk Pusat Industri dan Perdagangan Rajut Binong Jati, Pusat Perdagangan Tekstil Cigondewah, dan Pusat Perdagangan Jeans Cihampelas. Upaya pengembangan ini sejalan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung yang membagi wilayah kota menjadi delapan Sub Wilayah Kota (SWK), masing-masing dengan perencanaan spesifik untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan kota. Studi kasus penataan PKL di kawasan Pasar Cicadas dan Astanaanyar menunjukkan bahwa upaya penataan ruang publik untuk aktivitas perdagangan informal tidak dapat semata-mata dilakukan dengan pendekatan penertiban, melainkan harus berbasis kebutuhan sosial-ekonomi warga dan karakter spasial lokal. Kawasan Cicadas, misalnya, telah lama menjadi salah satu pusat perdagangan tradisional yang berkembang secara organik. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah melalui Dinas KUKM telah melakukan relokasi sebagian PKL ke dalam area pasar semi-modern, namun sebagian besar tetap memilih berdagang di trotoar karena faktor aksesibilitas dan potensi pelanggan yang lebih tinggi. Hal serupa terjadi di kawasan Astanaanyar, di mana penataan yang terlalu represif sempat menimbulkan gesekan sosial, sebelum akhirnya dilakukan pendekatan lebih humanis berbasis dialog antara pemerintah, pedagang, dan warga sekitar.

Oleh karena itu, implementasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Bandung harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Ini mencakup desain ruang yang fleksibel dan ramah bagi sektor informal, integrasi antara perdagangan modern dan tradisional, serta jaminan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas kaki lima. Ke depan, konsep *inclusive urban commerce* yang mengintegrasikan fungsi perdagangan formal dan informal dalam satu sistem tata ruang yang harmonis perlu menjadi pendekatan utama dalam RDTR maupun kebijakan pembangunan ekonomi perkotaan. Dengan demikian, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wadah pemberdayaan warga dan pelestarian wajah khas urbanitas Bandung.

6. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang.

Kawasan perkantoran seluas lebih kurang 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Andir, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.

Rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan mencakup area seluas ±274 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Andir, Arcamanik, Astana Anyar, dan lainnya. Distribusi perkantoran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di seluruh wilayah kota. Namun, pengembangan perkantoran pemerintahan menghadapi tantangan terkait keterbatasan lahan dan kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH). Kajian kebijakan pengembangan RTH di Kota Bandung menunjukkan bahwa kota ini masih memerlukan tambahan 3.108 hektar RTH untuk memenuhi ketentuan 30% RTH dari total luas wilayah.

Dengan demikian, pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan di Kota Bandung harus direncanakan secara strategis, mempertimbangkan distribusi yang merata, kebutuhan RTH, dan kapasitas infrastruktur, untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal.

7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada pengembangan industri non polutan dan pergudangan yang terdiri atas industri kecil dan menengah, sentra industri dan pergudangan. Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektar tersebar di Kecamatan Andir, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Regol dan Kecamatan Ujungberung.

Pengembangan industri kecil dan menengah serta pergudangan terdiri atas:

a. mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
b. mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Ujungberung, Cibiru dan Gedebage.
c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai dan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/ atau akses ke terminal peti kemas Gedebage.

Rencana pengembangan sentra industri terdiri atas:

a. Penetapan dan pengembangan industri rumah yang meliputi sentra industri kaos Surapati, sentra industri pakaian Cigondewah, sentra industri boneka Sukamulya, sentra industri rajut Binong Jati, sentra industri sepatu dan olahan kulit Cibaduyut, sentra industri tahu, tempe Cibuntu dan sentra industri potensial lain yang dikembangkan.
b. Pengembangan fasilitas Kota yang menunjang kegiatan sentra industri kecil.
c. Revitalisasi bangunan tua atau bersejarah menjadi bagian dari sentra industri kecil.

8. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata seluas sekitar 7 hektar yang mencakup Kecamatan Sukajadi, Sukasari, dan Cidadap memiliki peran strategis sebagai kantong destinasi wisata terpadu di wilayah utara Kota Bandung. Destinasi wisata alam Curug Aleh di Sukasari menyajikan pengalaman menikmati panorama alam di perkotaan yang kini disebut sebagai wisata *hidden gem*. Di samping itu, kawasan ini ditopang oleh keberadaan pusat kuliner, hotel butik, serta pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas seperti Paris Van Java dan Cihampelas *Walk* yang menjadi magnet wisatawan domestik dan mancanegara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 mencapai 8,5 juta orang, merupakan wisatawan domestik dan mancanegara, menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi lokal terhadap pergerakan wisatawan nusantara.

Di luar destinasi buatan, kawasan utara Bandung ini juga memiliki potensi wisata berbasis alam dan sejarah yang belum tergarap optimal. Misalnya, Curug Sigay di Gegerkalong, yang menyajikan air terjun tersembunyi di tengah pemukiman padat, Trekking Gang Bapa Ehom yang menghubungkan Teras Cikapundung dengan kawasan hijau Ciumbuleuit, serta Hutan Kota Babakan Siliwangi (*Forest Walk*) yang telah diakui sebagai hutan kota dunia oleh UNEP sejak 2011. Kawasan Cidadap menyimpan potensi edukasi lingkungan melalui Mata Air Cikendi, yang kini mulai ditata kembali sebagai ruang publik. Sementara itu, pengembangan destinasi baru seperti Bukit Mbah Garut di Cibiru, sebagai ruang terbuka hijau seluas 6 hektar dengan jalur refleksi dan rekreasi, menunjukkan bahwa potensi wisata Kota Bandung tidak hanya terpusat di utara, tetapi menyebar hingga ke wilayah timur yang bisa menjadi penyeimbang pariwisata kota.

Namun, agar kawasan-kawasan ini berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, RPJMD 2025–2029 harus mendorong reformasi pengelolaan pariwisata perkotaan. Tantangan kemacetan, keterbatasan kapasitas akomodasi, dan kurangnya akses transportasi publik yang terintegrasi menjadi isu utama yang perlu ditangani secara sistematis. Strategi pembangunan kawasan wisata harus memprioritaskan konsep *destination management* dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan akademisi. Pemerintah Daerah juga perlu memastikan bahwa pengembangan kawasan wisata sejalan dengan prinsip kota ramah lingkungan dan berketahanan, termasuk melalui digitalisasi promosi wisata, penguatan SDM pariwisata, serta pemanfaatan skema investasi publik-swasta. Dengan pendekatan ini, kawasan wisata seperti Sukajadi, Sukasari, Cidadap, dan kawasan potensial lainnya dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi hijau, penciptaan lapangan kerja, dan wajah baru Bandung sebagai kota tujuan wisata yang modern sekaligus berkelanjutan.

9. Pengembangan Kawasan Transportasi

Kota Bandung tengah mengembangkan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) seluas sekitar 37 hektar yang tersebar di sepuluh kecamatan:

Andir, Batununggal, Bojongloa Kidul, Cicendo, Cinambo, Gedebage, Kiaracondong, Panyileukan, Sukajadi, dan Coblong. Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan penggunaan lahan dengan sistem transportasi massal, guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, dan mendorong mobilitas berkelanjutan di wilayah perkotaan. Konsep TOD menekankan pada pengembangan kawasan yang memadukan hunian, komersial, dan fasilitas publik di sekitar simpul-simpul transportasi, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih memanfaatkan transportasi umum daripada kendaraan pribadi (Choerunnisa & Dirgahayani. 2020).

Penerapan konsep TOD di Bandung menjadi krusial mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas. Data dari *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan bahwa hingga Desember 2024, terdapat sekitar 2,37 juta unit kendaraan bermotor di Kota Bandung, dengan 1,8 juta di antaranya adalah sepeda motor. Peningkatan jumlah kendaraan ini memperparah kondisi lalu lintas dan menuntut solusi transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret dalam pengembangan TOD di Bandung adalah penetapan kota ini sebagai proyek percontohan pengembangan lahan berbasis TOD di Indonesia, khususnya di kawasan Gedebage. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan perkotaan. Namun, implementasi TOD di Bandung menghadapi tantangan, seperti potensi gentrifikasi yang dapat menggeser komunitas lokal akibat peningkatan nilai properti di sekitar kawasan TOD. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan yang inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa manfaat dari pengembangan TOD dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan kawasan berorientasi transit di Kota Bandung diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut.

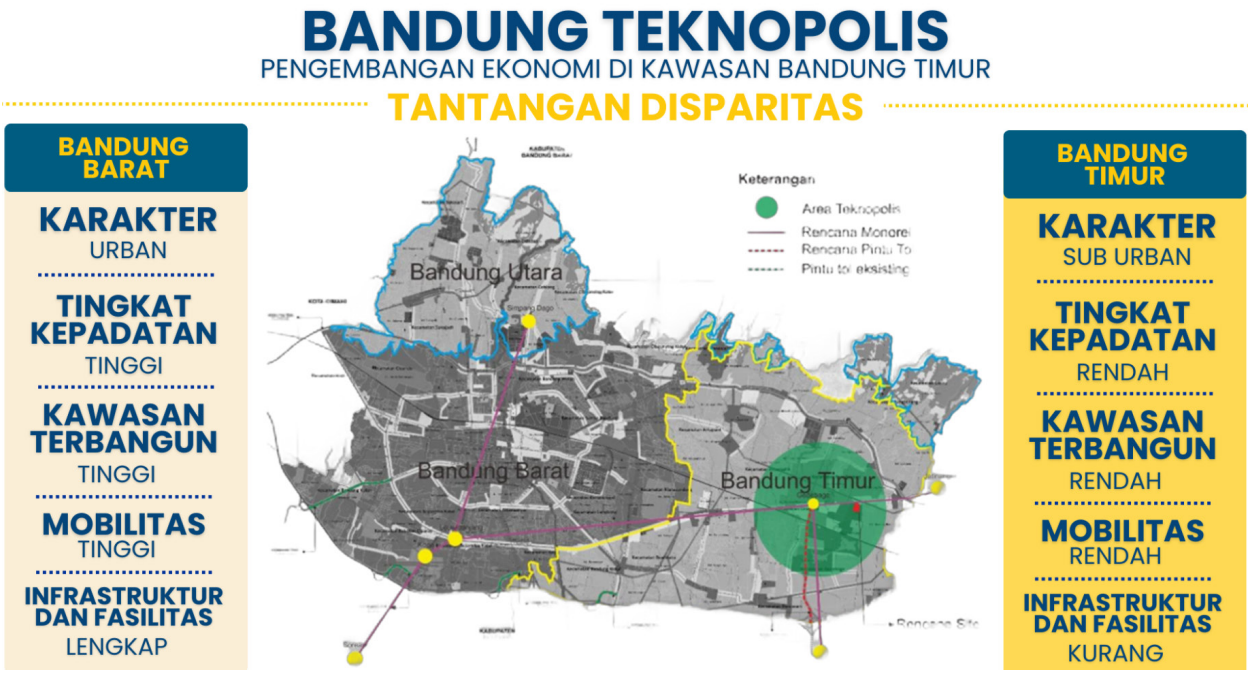
10. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas Lanud Husein Sastranegara, Kodam III/Siliwangi, Kodim 0618/BS, Den Interdam, Topdam, Kudam, Babinminvetcaddam, Jasda, Bintaldam, Kumdam, Paldam, Gudpalrah A.01, Rindam, Ajendam, Satsikmil Tipe B, Pomdam, Kesdam, Denkeslap 03.03.01, Zidam, Hubdam, Bekangdam, Den Ang III-44-13, Yon Arh-3, Yon Kav-4/Tank, Gupusmu I Ditpalad, Ku Pus II Ditkuad, Kodiklat TNI AD, Pussenif, Pusdikku, Pusdikkum, Secapa AD, SESKOAD, SESKO TNI, Dislitbang AD, Dispsi AD, Coklit Ditkuad, Ditajenad, Lafi AD Diskesad, Lanal Bandung, Denmadam, Bengrah A.01, Rumkit TK. IV 03.07.02, Disjarah, Gudkesrah 03.02.01, Pusen Kav, Pusenpur dan Mess Angkatan Laut.

11. Pengembangan Bandung Teknopolis

Pemerintah Daerah berencana akan membangun pusat kedua Kota Bandung yaitu di kawasan Bandung Timur. Secara khusus ada kawasan yang dikembangkan sebagai pusat primer atau sebagai pengembangan pusat pelayanan kota, yaitu kawasan Bandung Teknopolis yang berlokasi di Gedebage. Gedebage merupakan salah satu pusat primer terpadu yang nantinya akan menjadi pusat pelayanan kota setelah Alun-alun Bandung. Kawasan tersebut memiliki potensi lahan kosong dan ada beberapa opsi akses untuk membuka jalan tol baru, stasiun kereta api dan relokasi terminal bus dari Leuwi Panjang dan Cicaheum. Pusat primer di Gedebage juga akan berisi pusat pemerintahan, sarana gelanggang olahraga, dan kawasan komersial. Diharapkan masyarakat tidak harus jauh untuk pergi ke Bandung pusat untuk memenuhi kebutuhannya.

Gambar 2.2. Tantangan dan Disparitas Pengembangan Bandung Bagian Barat dan Bandung Bagian Timur



Sumber: *Bappelitbang, 2025*

Sejauh ini, pembangunan yang sudah mulai dikembangkan di Bandung Teknopolis Gedebage yaitu Stasiun Tegalluar yang merupakan stasiun akhir Kereta Cepat Jakarta-Bandung *Whoosh*, akses Tol Padaleunyi KM 149, percepatan pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Di kawasan ini juga terdapat beberapa potensi ekonomi, meliputi Masjid Raya Al Jabbar, Gelora Bandung Lautan Api, serta pengembangan kota mandiri Summarecon Bandung yang di dalamnya terdapat hunian di cluster, fasilitas komersial, perkantoran, perbelanjaan, fasilitas Pendidikan, serta area rekreasi Summarecon Mall Bandung. Potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi wisata religi, wisata olahraga dan wisata fauna dengan adanya kampung blekok.

Namun, dalam upaya mewujudkan Gedebage sebagai pusat pelayanan kota baru yang berkelas dunia, diperlukan perencanaan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga cermat

dan berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi dalam penelitian Nisak (2023), pengembangan Gedebage sebagai kawasan teknopolis harus benar-benar mengacu pada prinsip *smart growth* agar mampu menekan risiko urban sprawl, mengurangi ketimpangan spasial, dan memaksimalkan efisiensi penggunaan lahan yang saat ini sebagian besar masih berupa lahan terbuka atau sawah. Kawasan inti Teknopolis Gedebage yang mencakup ±588,95 hektar, tersebar di empat kelurahan (Cimincrang, Cisaranten Kidul, Rancabolang, dan Rancanumpang), dinilai strategis karena memiliki akses langsung ke jaringan transportasi regional seperti Kereta Cepat Whoosh, Tol Padaleunyi, dan rencana pengembangan TOD. Namun di sisi lain, kawasan ini juga berada di zona rawan bencana (potensi pergerakan tanah), sehingga perlu perhitungan intensitas bangunan dan tata ruang yang sensitif terhadap lingkungan.

Studi tersebut juga menekankan pentingnya penerapan kawasan guna campuran (*mixed land use*), hunian berimbang, dan pembangunan berbasis jaringan pejalan kaki (*walkable neighborhood*) sebagai kunci keberhasilan pengembangan Gedebage sebagai teknopolis. Saat ini, dominasi proyek hunian kelas menengah atas seperti cluster-cluster eksklusif di kota mandiri Summarecon berisiko menciptakan segregasi sosial jika tidak diimbangi dengan pembangunan rumah menengah dan sederhana secara proporsional sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013. Di samping itu, transformasi Gedebage sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi digital baru harus dibarengi dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal, penguatan konektivitas antar zona, dan partisipasi sektor swasta dalam kerangka kemitraan berorientasi jangka panjang. Maka, dalam konteks RPJMD maupun RTRW yang akan datang, perlu ditekankan bahwa Gedebage bukan hanya "pembentukan pusat kota kedua", tetapi menjadi simbol baru dari kota berbasis inovasi, keberlanjutan, dan pemerataan akses yang sejati.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) sangat berkaitan erat dengan jasa ekosistem, di mana nilainya diasumsikan memiliki hubungan berbanding lurus. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem yang tersedia, semakin besar pula kapasitas daya dukung lingkungannya. D3TLH mencakup kapasitas daya dukung untuk kebutuhan dasar manusia, seperti pangan dan air. Dalam perhitungan daya dukung ini, digunakan asumsi bahwa tidak ada aliran masuk atau keluar materi pangan dan air dari sistem, yang dikenal sebagai sistem tertutup (*closed system*). Asumsi ini memberikan kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana ekosistem mampu menopang kebutuhan manusia secara mandiri.

A. Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung air di Kota Bandung ditentukan dengan cara menghitung selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air di setiap wilayah. Berdasarkan

hasil perhitungan ini, status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) air diklasifikasikan menjadi dua kategori: terlampaui dan belum terlampaui. Kategori terlampaui mengindikasikan bahwa kebutuhan air di suatu wilayah telah melebihi ketersediaannya, yang mencerminkan defisit atau ketidakmampuan wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan airnya secara lokal. Sebaliknya, kategori belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan air masih mencukupi atau melebihi kebutuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Gedebage memiliki ketersediaan air tertinggi, mencapai 15.070.151,73 m^3 per tahun, dengan surplus yang signifikan dibandingkan kebutuhannya. Sebaliknya, Kecamatan Bandung Wetan memiliki ketersediaan air terkecil, yaitu 3.514.947,37 m^3 per tahun, meskipun masih dalam kondisi surplus dengan kebutuhan sebesar 2.983.639,24 m^3 per tahun. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Bandung mengalami defisit air, di mana kebutuhan melampaui ketersediaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan guna lahan eksisting.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Kota Bandung telah melampaui ambang batas daya dukung airnya. Kondisi ini memerlukan intervensi strategis, seperti penyediaan suplai air dari sumber eksternal melalui sistem perpipaan, termasuk distribusi yang disediakan oleh PDAM. Selain itu, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, perlindungan terhadap sumber air, serta optimalisasi infrastruktur distribusi perlu menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang terencana, Kota Bandung dapat mengatasi tantangan defisit air, memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan wilayah secara lebih efektif. Data detail per kecamatan dapat dilihat pada tabel hasil analisis yang disediakan.

Tabel 2.4. Ketersediaan, Ambang Batas, dan Kebutuhan Air bersih di Kota Bandung Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ tahun)	Kebutuhan Air (m3/ tahun)	Ambang Batas (jiwa)
1	Sukasari	7.335.921,06	7.308.794,28	315
2	Coblong	8.131.278,36	11.004.454,88	-33.332
3	Babakan Ciparay	8.063.424,26	13.296.081,06	-60.704
4	Bojongloa Kaler	3.771.646,62	11.047.267,67	-84.404
5	Andir	5.690.996,98	10.431.173,47	-54.990
6	Cicendo	7.913.137,87	13.007.923,15	-59.104
7	Sukajadi	5.891.832,35	9.518.980,13	-42.078
8	Cidadap	10.462.358,11	5.829.655,58	53.744
9	Bandung Wetan	3.514.947,37	2.983.639,24	6.164
10	Astana Anyar	3.118.503,83	6.712.361,77	-41.692
11	Regol	4.777.733,00	7.796.593,87	-35.022
12	Batununggal	5.504.284,49	11.001.361,49	-63.771
13	Lengkong	6.679.196,06	7.415.630,95	-8.543

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ tahun)	Kebutuhan Air (m3/ tahun)	Ambang Batas (jiwa)
14	Cibeunying Kidul	4.610.293,74	10.386.059,24	-67.004
15	Bandung Kulon	8.793.045,12	12.996.309,05	-48.762
16	Kiaracondong	6.194.803,70	11.935.388,50	-66.596
17	Bojongloa Kidul	6.135.979,14	8.388.259,64	-26.129
18	Cibeunying Kaler	5.880.430,62	6.785.357,29	-10.498
19	Sumur Bandung	3.989.428,36	4.582.744,47	-6.883
20	Antapani	4.865.067,51	7.301.200,78	-28.261
21	Bandung Kidul	7.571.015,47	6.062.550,00	17.500
22	Buahbatu	8.887.747,94	10.071.350,85	-13.731
23	Rancasari	9.225.061,95	8.670.610,58	6.432
24	Arcamanik	8.504.993,10	8.286.312,14	2.537
25	Cibiru	8.422.202,28	7.664.901,14	8.785
26	Ujungberung	8.901.576,21	8.963.667,50	-720
27	Gedebage	15.070.151,73	6.432.312,94	100.207
28	Panyileukan	7.103.444,20	4.609.226,85	28.935
29	Cinambo	5.393.994,73	3.057.458,30	27.106
30	Mandalajati	6.156.829,06	7.232.211,11	-12.475
JUMLAH		**206.561.325,21**	**250.779.837,93**	**-512.976**

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

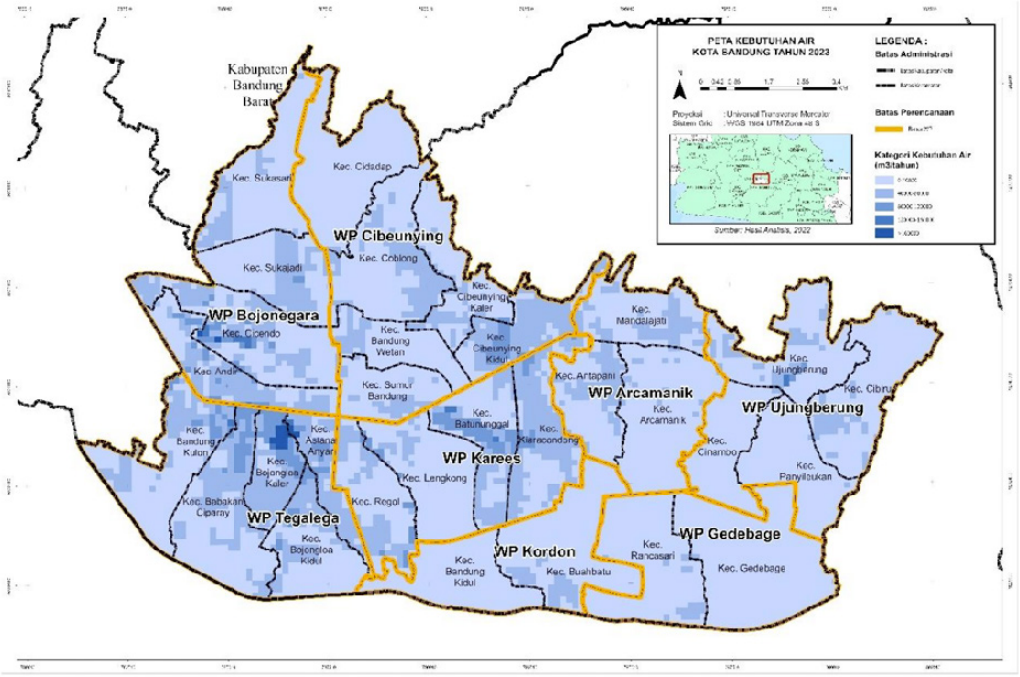
Berdasarkan analisis baseline, secara umum kebutuhan air di Kota Bandung sudah melebihi dibandingkan ketersediaan airnya sehingga sudah melebihi ambang batas penduduk dari aspek daya dukung air. Namun terdapat beberapa kecamatan yang ambang batas penduduknya masih belum terlampaui, dimana ketersediaan airnya masih memadai dibandingkan dengan kebutuhan airnya. Kecamatan-kecamatan tersebut sebagian besar berada di bagian utara Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Sukasari, Rancasari, Arcamanik, Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Gedebage, Panyileukan, Cinambo, Cibiru, dan Bandung Kidul.

Kecamatan-kecamatan ini umumnya berada di wilayah Cekungan Air Tanah imbuhan, yang berfungsi sebagai daerah resapan utama, sehingga daya dukung penyediaan air di wilayah tersebut relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan area Cekungan Air Tanah (CAT) imbuhan, yang berperan sebagai daerah resapan air. Keberadaan CAT ini memberikan kontribusi penting terhadap kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan air lokal.

Kondisi daya dukung air juga dianalisis secara spasial untuk memetakan daerah yang daya dukung airnya terlampaui dan belum terlampaui. Diketahui sebesar 84% wilayah di Kota Bandung atau seluas 15.501,74 Ha telah terlampaui dari segi daya dukung air. Sebesar 16% sisanya atau seluas 2.919,98 Ha belum terlampaui.

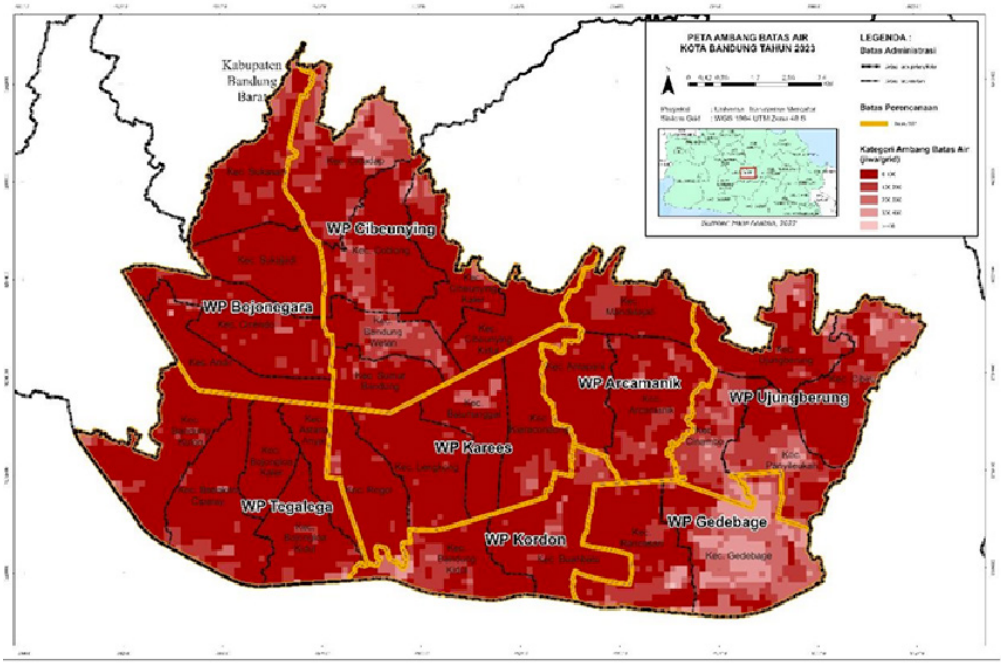
Tingginya jumlah penduduk di beberapa area serta kebutuhan air untuk lahan pertanian yang luas menjadi penyebab terlampauinya daya dukung air di Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan air seperti bekerja sama dengan wilayah lain yang dapat bertindak sebagai pemasok air. Adapun visualisasi terkait kawasan yang telah terlampaui dan yang belum terlampaui akan dimuat dalam gambar berikut.

Gambar 2.3. Peta Kebutuhan Air Tahun 2023 Kota Bandung



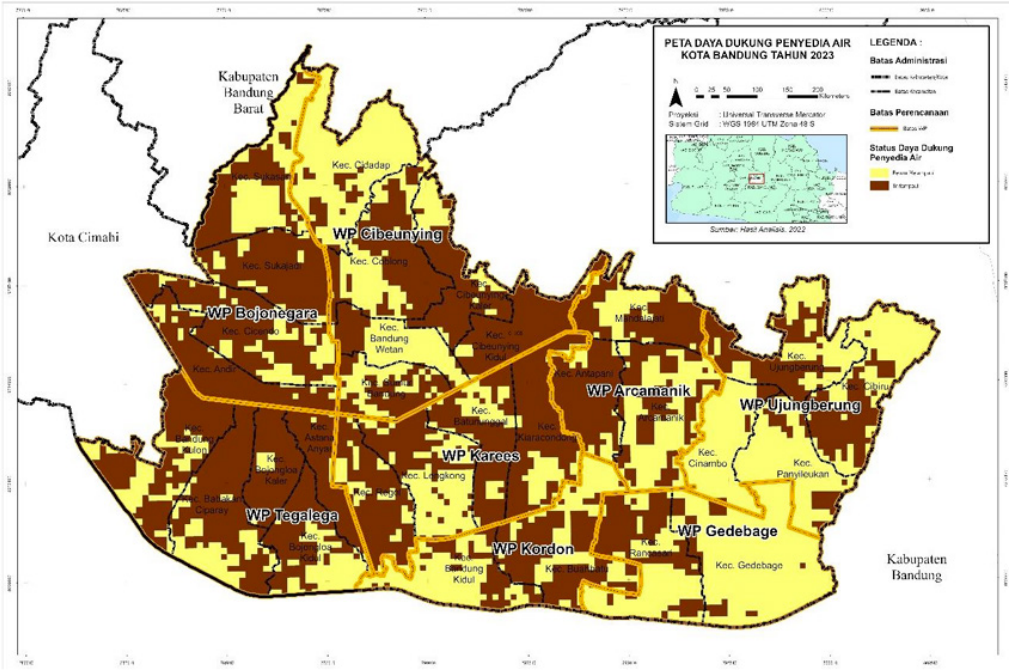
Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Gambar 2.4. Peta Ambang Batas Penyediaan Air Tahun 2023



Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Gambar 2.5. Peta Daya Dukung Penyedia Air Tahun 2023



Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Sumber mata air di Kota Bandung berdasarkan data DIKPLHD tahun 2020 terdapat 75 mata air yaitu Seke 06 I, Seke 06 II,Seke Goak I, Seke Goak II, Seke Gawir, Seke Sumu, Saka 10A, Seke Genjer, Seke Cigadung, Seke 03, Seke Tengah I, Seke Tengah II, Seke 14, Cisaratri, Seke Cisurupan, Seke 01, Seke Gan 001, Seke Galumpit, Cigagak Wetan, Seke Gan 01, Aki Budig, Ci Mandor, Cai Ileung, Krida Nusantara, Sumur Siuk, Seke Ciguria, Siti Salsah, Seke Cipaganti, Seke Mentor, Seke Cikiara, Sangiang I, Sangiang II, Cikendi (Pancuran VII), CI 10A, Seke 09, Cinutuk, Seke 06, Ciko, Seke Dago, Babakan Siliwangi II, Babakan Siliwangi I, Babakan Siliwangi III, Babakan Siliwangi IV, Seke 10A I, Seke 10A II, Seke Cijati, Seke Bitung, Seke Ciputri 12-15, Seke Ciputri 1-8, Seke Ciputri 9-11, Seke Mande, Seke Agung, Sumur Bandung, Seke Palaguna II, Seke Pendopo, Seke Cihong, Seke Siuk, Seke 05, Cibenta I, Cibenta II, Seke Tereup, Cikadai Meteng, Seke Situ 1-2, Cibarunai 1-2, Sumur PIN, Seke Banceuy, Seke Merdeka, Seke Maia, Seke Pasanggrahan, Seke Sasak Lema, Buka Tanah II, Babakan Batawi I-II, Buka Tanah I, Al-Hadi, Seke RTH. Mata air yang dimiliki & dikuasai Perumda Tirtawening Cipanjalu, Pasir Impun dan Cisurupan dengan kapasitas 20 Lt/det.

Kebijakan strategis pelayanan air bersih pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses air minum melalui layanan non perpipaan yang dilaksanakan oleh DPKP melalui Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 2.060 sambungan rumah dari APBD.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah supply air bersih serta pembangunan jaringan distribusi melalui kerja sama B to B, baik dengan skema jual beli air curah maupun skema terintegrasi (Hulu-Hilir).

3. Menurunkan tingkat kehilangan air dari ±40 % menjadi ±38,5% melalui skema kerja sama B to B dengan berbasis kontrak kinerja yang telah diimplementasikan melalui Kerjasama Perumda Tirtawening dengan PT Adaro.

B. Daya Dukung Pangan

Perhitungan Daya Dukung Penyedia Pangan dilakukan untuk menilai sejauh mana kemampuan setiap Wilayah Pengembangan (WP) di Kota Bandung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakatnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Gedebage memiliki ketersediaan pangan tertinggi, mencapai 4.412.992.809,03 kkal/tahun. Hal ini dapat dikaitkan dengan masih adanya tutupan lahan pertanian yang relatif signifikan di wilayah tersebut. Namun, ketika dibandingkan dengan kebutuhan pangan masyarakatnya yang mencapai 33.064.564.928,30 kkal/tahun, ketersediaan tersebut jauh dari mencukupi. Secara keseluruhan, tidak ada kecamatan di Kota Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya lahan penyedia pangan, seperti sawah dan ladang, yang semakin berkurang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya urbanisasi.

Kota Bandung, sebagai wilayah perkotaan yang padat penduduk, sangat bergantung pada suplai pangan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ketergantungan ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan pangan yang lebih baik, termasuk optimalisasi lahan yang masih tersedia, pengembangan teknologi pertanian perkotaan (urban farming), serta penguatan jaringan distribusi pangan dari wilayah penyangga. Informasi lebih rinci mengenai distribusi ketersediaan dan kebutuhan pangan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah, yang memberikan gambaran lebih mendetail terkait ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Bandung. Analisis ini penting untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Penentuan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan kebutuhan energi individu, yang diwakili oleh standar AKG sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

Tabel 2.5. Ketersediaan, Ambang Batas, dan Kebutuhan Pangan di Kota Bandung Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (m3/tahun)	Kebutuhan Pangan (m3/tahun)	Ambang Batas (jiwa)
1	Sukasari	1.826.130.442,37	60.134.064.088,52	2.327
2	Coblong	1.964.824.361,12	91.515.455.556,03	2.504
3	Babakan Ciparay	2.065.492.569,42	112.130.706.222,18	2.632
4	Bojongloa Kaler	936.768.932,33	97.250.243.030,58	1.194
5	Andir	1.419.088.766,14	78.827.502.190,72	1.808
6	Cicendo	1.967.215.841,38	75.812.751.783,78	2.507

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (m3/tahun)	Kebutuhan Pangan (m3/tahun)	Ambang Batas (jiwa)
7	Sukajadi	1.473.174.611,10	81.273.354.755,54	1.877
8	Cidadap	2.579.652.712,68	43.009.546.348,04	3.287
9	Bandung Wetan	845.128.419,97	23.490.636.852,65	1.077
10	Astana Anyar	770.989.371,76	57.343.742.614,72	982
11	Regol	1.187.982.328,92	65.146.285.073,52	1.514
12	Batununggal	1.357.717.543,84	94.774.416.333,47	1.730
13	Lengkong	1.643.201.043,61	56.846.962.998,60	2.094
14	Cibeunying Kidul	1.131.601.048,62	89.376.806.230,59	1.442
15	Bandung Kulon	2.209.417.840,91	109.991.484.319,57	2.815
16	Kiaracondong	1.528.941.503,45	102.074.793.777,26	1.948
17	Bojongloa Kidul	1.541.224.536,96	70.674.049.747,14	1.964
18	Cibeunying Kaler	1.479.185.311,93	56.269.988.133,57	1.885
19	Sumur Bandung	967.902.893,92	30.733.802.527,98	1.233
20	Antapani	1.217.970.445,17	63.352.340.202,93	1.552
21	Bandung Kidul	1.954.068.682,11	48.748.246.682,31	2.490
22	Buahbatu	2.294.169.994,27	83.842.183.137,82	2.923
23	Rancasari	2.455.044.236,94	69.952.025.067,30	3.128
24	Arcamanik	2.202.938.368,25	64.118.842.016,46	2.807
25	Cibiru	2.218.122.799,00	61.939.108.759,76	2.827
26	Ujungberung	2.391.511.039,40	71.797.011.240,38	3.047
27	Gedebage	4.412.992.809,03	33.064.564.928,30	5.623
28	Panyileukan	1.869.414.577,82	32.681.999.022,36	2.382
29	Cinambo	1.424.944.368,69	20.106.617.112,27	1.816
30	Mandalajati	1.613.888.755,90	59.127.097.091,01	2.057
JUMLAH		**52.950.706.157,00**	**2.005.406.627.845,35**	**67.475**

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum kebutuhan pangan di semua Kecamatan Kota Bandung melebihi ketersediaan pangan sehingga melampaui ambang batas penduduk dari aspek daya dukung pangan. Hal ini berarti kebutuhan pangan sudah melampaui kapasitas kebutuhan secara lokal. Untuk ambang batas terbesar terdapat pada Kecamatan Gedebage, dimana masih memiliki daya dukung penyediaan pangan yang belum terlampaui cukup luas. Hal ini disebabkan oleh keberadaan area pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih tersedia di Kecamatan tersebut, sehingga mampu menyumbang ketersediaan pangan lokal cukup besar. Namun, kontribusi LP2B belum cukup memenuhi kebutuhan pangan di tingkat Kota secara keseluruhan, mengingat minimnya lahan pertanian yang tersedia dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam pertanian perkotaan seperti *urban farming* atau pertanian vertikal untuk meningkatkan kapasitas penyediaan pangan di tengah keterbatasan lahan.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Energi

Berdasarkan data yang telah didapat dan hasil kalkulasi menggunakan SIGN-SMART, diketahui bahwa jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari sektor Energi pada tahun 2024 sebesar 4.465,14 Gg CO2eq dengan sebagian besar emisi berupa gas CO2. Kontribusi emisi terbesar untuk sektor energi berasal dari penggunaan bahan bakar untuk transportasi yang pada tahun 2024 menghasilkan emisi sebesar 4.031,99 Gg CO2eq atau sebanyak 90,30% dari total seluruh kegiatan di sektor energi.

Dalam rangka pengembangan ketahanan energi di Kota Bandung dilakukan upaya:

a. Pengembangan upaya pengurangan emisi GRK dari sektor kunci (transportasi, industri, dan konstruksi) melalui pembangunan rendah karbon
b. Pengembangan upaya efisiensi pemanfaatan energi di setiap sektor (domestik, industri, transportasi, dan konstruksi)
c. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis surya, air, dan biomassa, dan sebagainya untuk peningkatan bauran energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan energi
d. Pengembangan dan pengendalian sistem transportasi kota
e. Pengembangan sistem transportasi publik terpadu

2. Ketahanan Air

Secara umum kebutuhan air di Kota Bandung sudah melebihi dibandingkan ketersediaan airnya sehingga sudah melebihi ambang batas penduduk dari aspek daya dukung air.

Masih belum optimalnya sistem penyediaan air minum di Cekungan Bandung sehingga diperlukan kerjasama kabupaten kota untuk pemenuhan kebutuhan air yaitu melalui pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional di Cekungan Bandung melalui strategi atau upaya percepatan peningkatan pelayanan air minum dan komitmen kabupaten kota dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan air di Kota Bandung Upaya yang dapat dilakukan:

a. Peningkatan ketersediaan, kapasitas tampung, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air yang efisien dari hulu ke hilir secara terpadu
b. Peningkatan kapasitas infrastruktur penyediaan air berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, reservoir, dan instalasi pengolahan air minum untuk meningkatkan kapasitas layanan dan kontinuitas distribusi.
c. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran sumber air baku, serta integrasi pengelolaan lintas sektor antara hulu dan hilir.

3. Kemandirian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketahanan pangan (*food security*) merupakan isu yang penting khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bandung.

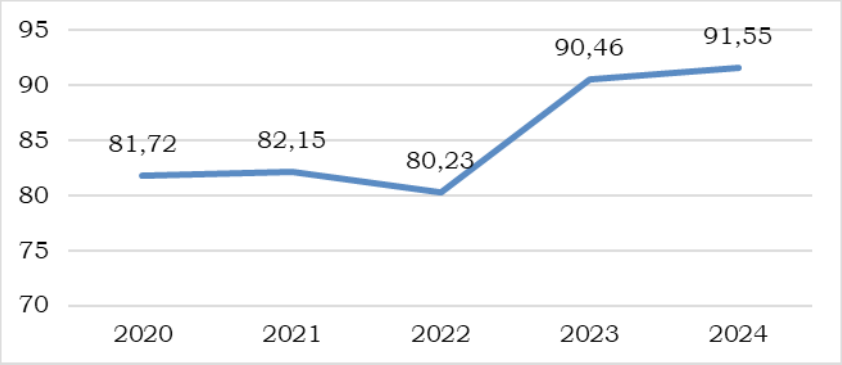
Konsep Kota Tahan Pangan adalah menggambarkan suatu wilayah dengan kondisi ketahanan pangan yang baik dilihat dari aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, maupun pemanfaatan pangan. Hal ini menjadi penting khususnya bagi Kota Bandung, mengingat kondisi ketahanan pangan yang mencukupi akan mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya agar tidak sampai terjadi kekurangan pangan.

Indesk Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Indeks Ketahanan Pangan Kota Bandung pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren peningkatan, kecuali di tahun 2022 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan mencapai 91,55 yang merarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 90,46. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kemampuan yang baik untuk menyediakan pangan, memberikan kemudahan dalam akses pangan, memanfaatkan pangan, menjaga stabilitas pasokan pangan bagi warga masyarakatnya.

Tantangan terbesar Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Pangan adalah besarnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Bandung tahun 2024, angka ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar Kota Bandung mencapai 94,01% atau kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik Kota Bandung sebesar 5,99%.

Gambar 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2020-2024



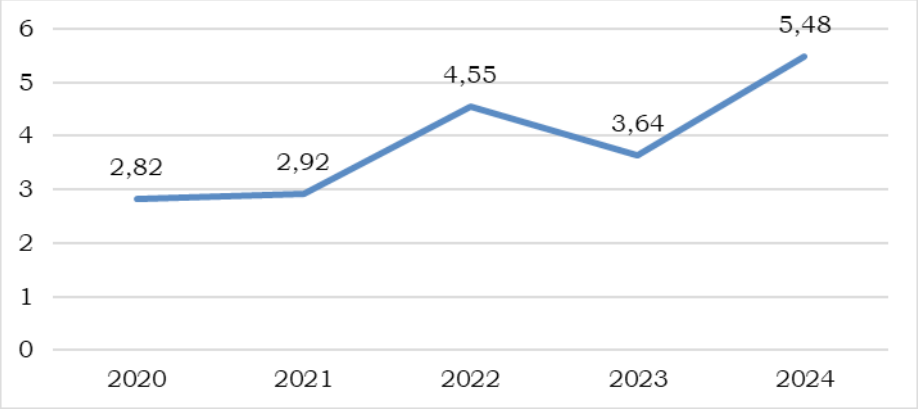
Sumber: *Badan Pangan Nasional, 2025*

4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Bandung pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dari 3,64 persen menjadi 5,48 persen. Artinya hingga tahun 2024, masih terdapat 5,48 persen penduduk Kota Bandung yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Gambar 2.7. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS RI, 2025*

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Tabel 2.6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bandung Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,50	85,1	85,70	89,10	90,73

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bandung mengalami fluktuatif. Tahun 2020, skor PPH mencapai 90,50, yang mencerminkan pola konsumsi pangan yang cukup ideal dan mendekati pola harapan.

Sementara pada Tahun 2021 terjadi penurunan skor menjadi 85,10, yang dapat disinyalir akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap akses dan ketersediaan pangan. Pada Tahun 2022, terjadi sedikit perbaikan dengan skor meningkat menjadi 85,70, menandakan adanya pemulihan konsumsi pangan masyarakat. Adapun pada Tahun 2023, skor PPH kembali meningkat secara signifikan menjadi 89,10, menunjukkan bahwa intervensi dan upaya peningkatan ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil positif. Selanjutnya pada Tahun 2024, skor PPH mencapai 90,73, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir dan menunjukkan konsumsi pangan masyarakat yang semakin mendekati pola konsumsi ideal.

Secara umum, tren skor PPH Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan arah yang positif, terutama setelah mengalami penurunan pada tahun 2021. Capaian tahun 2024 mengindikasikan bahwa strategi diversifikasi konsumsi pangan dan peningkatan akses pangan bergizi mulai menunjukkan hasil yang optimal.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, IKLH Kota Bandung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 adalah 43,90 dan di tahun 2024 naik menjadi 57,16. Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Bandung dalam kategori sedang.

Adapun penjelasan masing-masing komponen pembentuk IKLH berdasarkan kondisi tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator kinerja Indeks Kualitas Udara ditunjukkan dengan kualitas udara dengan capaian sebesar 83,36 poin, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
b. Indeks Kualitas Air tahun 2024 mencapai 48,59 yang berarti meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilainya lebih rendah dibandingkan indeks kualitas udara, sehingga tetap perlu perhatian bersama.
c. Indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan mencapai 23,42 poin yang diperoleh berdasarkan luas lahan yang tertutupi oleh pohon pelindung ataupun pohon produktif maka kualitas lahan dianggap lebih baik, dibandingkan dengan lahan yang hanya tertutupi tanaman perdu, semak atau rumput. Nilai ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yakni 26,94.

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	43,90	53,84	55,70	56,32	57,16
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	61,55	78,75	80,56	79,63	83,36
3	Indeks Kualitas Air	Poin	45,78	45,94	48,33	48,32	48,59
4	Indeks Kualitas Lahan	Poin	29,24	N/A	22,38	26,94	23,42

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2020 sampai 2024*

Nilai IKLH Kota Bandung Tahun 2024 sebesar 57,16 poin dicapai dari 3 komponen pendukungnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 48,59 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,36 poin dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 23,42 poin. Berdasarkan nilai di atas dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya capaian IKLH Kota Bandung adalah nilai IKA yang rendah dan nilai IKL yang sangat rendah. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan nilai IKLH difokuskan pada perbaikan kualitas air dan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH yang merupakan komponen utama IKL di Kota Bandung.

Kualitas air di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan nilai IKA dilakukan melalui upaya perbaikan infrastruktur sanitasi di perumahan pemukiman dan pembangunan IPAL-IPAL domestik. Sedangkan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan melalui pengelolaan PSU, penambahan dan pemeliharaan taman serta penambahan dan rumputisasi TPU. Strategi Peningkatan IKA:

a. Pembatasan pembuangan air limbah ke badan air,
b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah lebih diarahkan ke upaya pemanfaatan,
c. Pembinaan pelaku usaha melalui proper/properda,
d. pengawasan, sanksi adm dan denda baku mutu terhadap usaha kegiatan yg melanggar
e. memaksimalkan pengolahan air limbah domestik rumah tangga melalui Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas)
f. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan air limbah ke sungai melalui sosialisasi dan pendampingan

2. Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung

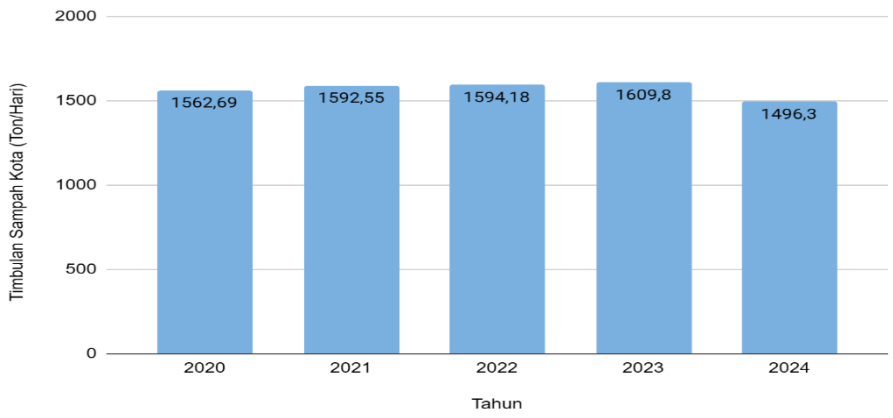
Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Bangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung adalah sebagai upaya untuk mengimplementasikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah baru Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dalam rangka melaksanakan percepatan pelayanan publik khususnya dalam pemberian Rekomendasi

Teknis Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dalam aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang langsung terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR-RI). Sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung diukur dari Jumlah Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis. Pada tahun 2024 terdapat 1.945 PBG, dibagi dengan Jumlah Seluruh Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebanyak 2.381 PBG, sehingga Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung pada tahun 2024 adalah sebesar 81,69%.

3. Persentase Penanganan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kota Bandung mencapai 1.496,3 ton/hari pada 2024. Sampah makanan menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi mencapai 44.52% dari dari total harian sampah yang diproduksi di Kota Bandung. Berdasarkan perhitungan DLH pada tahun 2024, realisasi pengurangan sampah mencapai 43,06 ton/hari, dengan rincian 16,24 ton/hari (62,29%) anorganik terolah dan 26,82 ton/hari (37,71%) organik terolah. Secara lengkap timbulan sampah di Kota Bandung dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam bagan berikut.

Gambar 2.8. Jumlah Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Ton/hari)



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2024*

Kondisi TPA Sarimukti sebagai TPA yang melayani kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah melebihi kapasitas. Rencana awal, TPA ini dirancang untuk menampung sampah sebesar 2.000 ton/hari, namun pengiriman sampah hingga saat ini terus meningkat hingga 4.000 ton/hari dengan volume tertinggi dari Kota Bandung sebesar 2.500 ton/hari.

Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah belum dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya yang akan berakhir di Tahun 2026, sedangkan TPA Legok Nangka diperkirakan baru dapat beroperasi Tahun 2029. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul-Angkut-Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan dan perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, dari Kumpul-Angkut-Buang menjadi diselesaikan di sumber sampah, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R *(Reduce, Reuse dan Recycle)*.

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah merupakan alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai kota khususnya Kota Bandung mengenai persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisir bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut.

Data timbulan sampah pada tahun 2024 berdasarkan perhitungan Kebijakan Strategis Daerah Kota Bandung tahun 2017-2025 adalah sebesar 655.726 ton dan ditargetkan terlayani sebesar 99,00%, dengan rincian target melalui capaian pengurangan sampah dari sumber sebesar 28% atau sebanyak 183.603,28 ton dan capaian penanganan sampah sebesar 71% atau sebanyak 465.565,46 ton dan diperkirakan sebesar 1% atau sebanyak 6.557 ton belum terlayani. Secara lengkap kinerja layanan pengelolaan sampah di Kota Bandung tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada tahun 2024

No.	Uraian	Target Dari Total Timbulan Sampah	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Realisasi Terhadap Total Timbulan Sampah	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7 =6/3*100
1	Capaian Pengurangan sampah dari sumber (rumus peningkatan)	28%	183.603,28	246,594	37,61%	134,32%
2	Capaian penanganan sampah Kota (rumus penurunan)	71%	465.565,46	403.949,15	61,60%	113,24%
3	Belum terlayani	1%	6.557,00	5.182,59	0,79%	-
Total timbulan Sampah			655.725,74	655.725,74	100,00%	

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup, 2024*

Untuk mencapai target kinerja indikator persampahan, Kota Bandung tidak hanya mengandalkan TPA Sarimukti. Upaya lainnya untuk penanganan sampah meliputi penempatan Kawasan Bebas Sampah (KBS), maggotisasi, kegiatan Bank Sampah, Pirolisis, TPS3R, TPST.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Kota Bandung memiliki ancaman kondisi geologis yang sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi gempa. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain:

1. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
4. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Andir yang merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Lengkong, Coblong, Bandung Kulon, Cicendo, Batununggal, Sukajadi, dan Cibeunying Kidul.
5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler.

Kawasan rawan bencana terdiri atas:

1. Kawasan rawan gerakan tanah/longsor yaitu Kawasan rawan gerakan tanah/longsor berupa kawasan gerakan tanah tinggi yang tersebar di bagian Utara Kota seluas lebih kurang 20,06 Ha.
2. Kawasan rawan genangan banjir yaitu Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh wilayah Kota meliputi 68 titik genangan.
3. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yaitu Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi merupakan kawasan rawan aliran lahar hujan di sepanjang Sungai Cibeurem dan Sungai Cikapundung seluas lebih kurang 40,42 (empat puluh koma empat dua) Ha.

Ketentuan khusus penanganan kawasan rawan bencana dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik jenis bencananya. Indikasi Program pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 terkait Penanganan kawasan rawan bencana tersusun dalam tabel berikut.

Tabel 2.9. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana di Kota Bandung

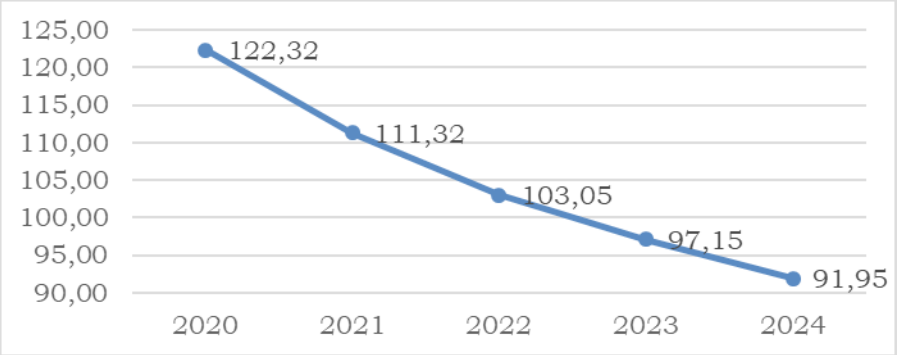
No		Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
1	Rawan bencana gerakan tanah dan longsor	a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah; b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing; c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan; d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing; e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.
2	Rawan bencana genangan banjir	a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir; b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan c. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.
3	Rawan bencana letusan gunung api	b. kawasan aliran lahar dingin; c. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; d. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana

Sumber: *Perda 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042*

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah indikator yang mengukur potensi kerugian akibat bencana berdasarkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai IRB, semakin besar risiko yang dihadapi. Berdasarkan hasil penilaian IRB oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Selama periode 2020–2024, IRB Kota Bandung menunjukkan tren penurunan konsisten.

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung 2020-2024



Sumber: *Indeks Risiko Bencana (IRB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025*

Tren penurunan IRB memberikan gambaran keberhasilan capaian dari berbagai upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Nilai 91,95 menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan upaya penanggulangan bencana di tahun-tahun mendatang guna meningkatkan ketangguhan masyarakat.

3. Emisi Gas Rumah Kaca

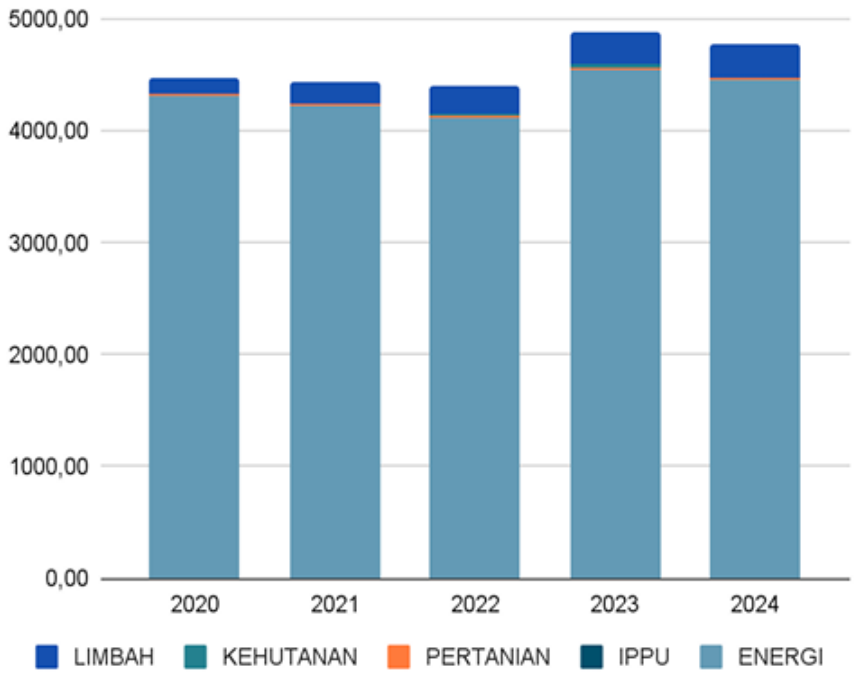
Beberapa aktivitas seperti penggunaan energi, proses industri, limbah dan bahkan sektor pertanian dapat berpotensi menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu perhitungan emisi GRK dilakukan pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat teridentifikasi berapa jumlah emisi GRK yang dihasilkan dalam satu tahun terakhir.

Emisi GRK pada tahun inventori 2020-2022 mengalami fluktiasi yang masif dimana tahun 2021 mengalami penurunan yang tajam, namun di tahun 2022 kembali meningkat mendekati nilai total emisi GRK pada tahun 2019. Sektor energi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hasil perhitungan emisi GRK pada tahun inventarisasi 2022. Hal ini disebabkan karena upgrading seperti menghitung emisi dari penggunaan energi pada industri, perhitungan pada sektor proses industri dan penggunaan produk, perhitungan limbah industri, dan perhitungan emisi dari perubahan penggunaan lahan dan potensi serapan CO2 dari hutan yang ada di Kota Bandung. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memahami potensi emisi GRK Kota Bandung lebih menyeluruh terhadap potensi-potensi penghasil emisi GRK. Meskipun begitu target penurunan emisi GRK dari tahun 2013 hingga tahun inventarisasi 2022 telah mencapai target 1,5% dari Kota Bandung yaitu 21,63%.

Estimasi GRK secara agregat 2024 diperkirakan sekitar 4.781,48 Gg CO2eq dengan penurunan emisi sebesar 98,13 Gg CO2eq dibanding tahun 2023. Secara agregat, kontributor emisi GRK berturut-turut dari sektor Energi (93,38%), Limbah (6,34%), Pertanian (0,27%), IPPU (0,01%) dan Kehutanan (0,005%).

Emisi GRK pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2023 dan kembali menurun hingga 2024. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya emisi dari sektor energi, adapun dari sektor limbah padat domestik terus meningkat dari 2020 dikarenakan limbah padat yang emisinya berdasarkan timbulan sampah tahun sebelumnya meningkat setiap tahunnya. Secara lebih lengkap emisi GRK agregat Kota Bandung dapat dilihat dalam gambar berikut.

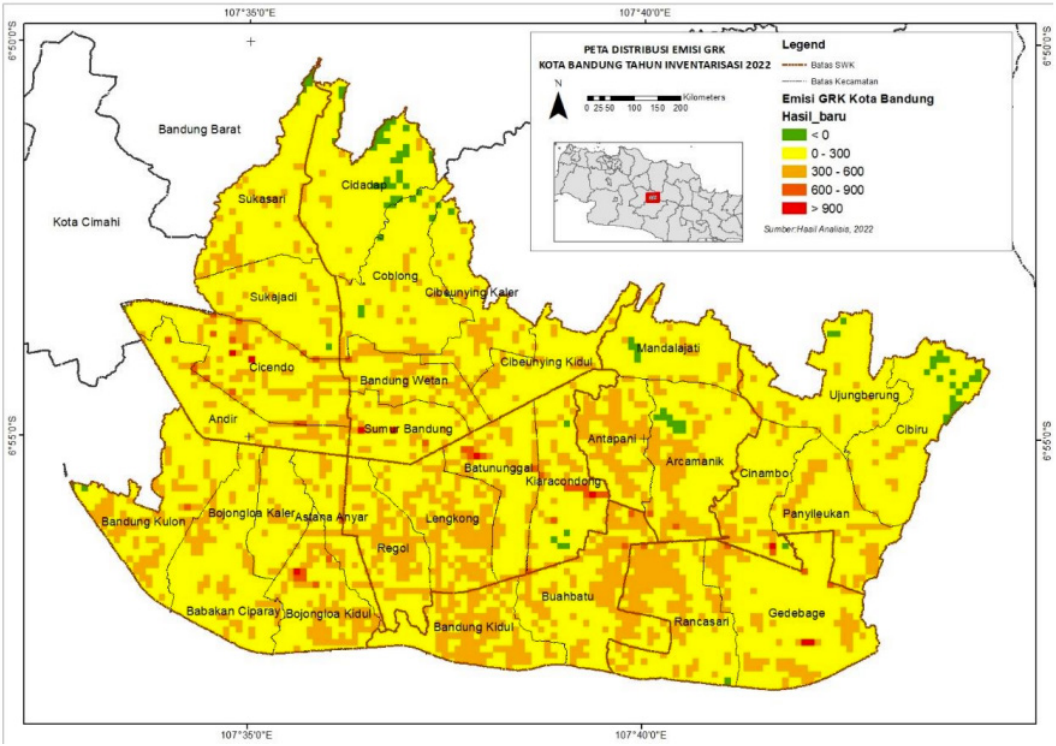
Gambar 2.10. Emisi GRK Agregat Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Gg CO2eq)



Sumber: *Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Bandung Tahun 2025, DLH Kota Bandung*

Kemudian apabila emisi GRK didistribusikan secara spasial, maka dapat diketahui bahwa emisi GRK cenderung tinggi pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Bandung. Analisis distribusi spasial ini sangat penting untuk mengidentifikasi lokasi spasial kecenderungan emisi GRK tersebut. Untuk melihat distribusi spasial kecenderungan emisi GRK tersebut dapat melihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11. Peta Distribusi Spasial dari Emisi GRK di Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045*

Secara umum, kondisi baseline emisi kumulatif GRK dari tahun 2018 sampai 2024 mengalami peningkatan. Kondisi kumulatif GRK Baseline (Business as Usual) pada tahun 2024 mencapai 11.195.725,82 Ton CO2eq. Adapun target penurunan emisi GRK pada tahun 2024 mencapai 44.362,19 Ton CO2eq (0,40%). Secara lebih lengkap persentase capaian penurunan emisi kumulatif GRK terhadap Kondisi Baseline Kota Bandung 2018-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10. Persentase Capaian Penurunan Emisi Kumulatif GRK terhadap Kondisi Baseline, Kota Bandung 2018-2024

Tahun	Kondisi Baseline (*Business As Usual*) (Ton CO2eq)	Target (Ton CO2eq)	Capaian Penurunan Emisi Kumulatif GRK (%)
2018	6.038.673,58	2.639,20	0,04
2019	6.848.564,55	3.246,03	0,05
2020	7.679.398,76	5.369,30	0,07
2021	8.530.614,80	9.133,35	0,11
2022	9.400.956,37	1.5219,48	0,16
2023	10.289.583,27	26.116,15	0,25
2024	11.195.725,82	44.362,19	0,40

Sumber: *data diolah, Bappeda Provinsi Jabar, 2024.*

Data tersebut, merupakan hasil dari akumulasi per sektor penghasil emisi yang ada di Kota Bandung, yaitu: Sektor Pertanian/ Peternakan, Persampahan, Limbah Cair, dan Sektor Energi-Transportasi.

Secara lebih rinci capaian penurunan emisi kumulatif GRK sebagai penyumbang terbesar di Kota Bandung adalah sektor Energi Transportasi dengan baseline sebesar 11.371.311,20 Ton CO2eq dengan penurunan emisi sebesar 24.402,96 Ton CO2eq (0,27%). Sektor berikutnya adalah emisi sektor Persampahan dengan baseline 1.440.354,65 Ton CO2eq dengan penurunan emisi 10.063,35 Ton CO2eq (0,70%). Secara lebih lengkap capaian penurunan Emisi Kumulatif GRK per Sektor di Kota Bandung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Capaian Penurunan Emisi Kumulatif GRK per Sektor di Kota Bandung Tahun 2024

No	Uraian	Baseline (Ton CO2eq)	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)	Capaian (%)
	Kota Bandung	11.195.725,82	44.362,19	0,40
1	Emisi GRK – AFOLU/Penggunaan Lahan	N/A	N/A	N/A
2	Emisi GRK – Lahan Gambut	N/A	N/A	N/A
3	Emisi GRK - Pertanian	33.999,62	6.392,12	18,80
4	Emisi GRK - Peternakan	2.021,70	388,27	19,21
5	Emisi GRK - Persampahan	1.440.354,65	10.063,35	0,70
6	Emisi GRK - Limbah Cair	602.600,61	3.115,49	0,52
7	Emisi GRK - Energi - Transportasi	11.371.311,20	24.402,96	0,27

Sumber: *data diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025*

Upaya yang telah dilakukan Kota Bandung dalam mengurangi emisi GRK adalah melalui dua strategi, yaitu berupa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam bentuk rencana aksi daerah untuk setiap emisi GRK yang dihasilkan. Secara rinci upaya penurunan emisi kumulatif GRK per sektor dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.12. Upaya Penurunan Emisi Kumulatif GRK per Sektor

Sektor	Strategi	Upaya
Energi-Transportasi	Adaptasi	Pelaksanaan Car Free Day
	Mitigasi	Pengoperasian Angkutan Umum Massal TMB
	Adaptasi	Pengadaan dan Pemasangan APILL Baru /Penanganan kemacetan di ruas dan simpang jalan di wilayah Kota Bandung
	Adaptasi	Penyediaan Titik Parkir
	Adaptasi	Transformasi mesin diesel ke listrik (damri)
	Mitigasi	Penggunakan energi baru terbarukan utk mengurangi energi fosil adalah dengan menggunakan energi listrik utk trabsportasi di Kota Bandung, Saat ini di sekitar kota bdg memiliki 13 titik SPKLU (stasiun pengisian ke daraan listrik umum)
Persampahan	Mitigasi	Pembangunan TPA
		POO Magot di Gedebage, Pengembangan 3 lokasi TPST Teknologi RDF, ISWMP, Kawasan Bebas Sampah 382 RW
		[SIPSN] Operasionalisasi TPS3R Ambon - Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST / TPS3R - TPS 3R / UPS
Semua Sektor	Mitigasi dan Adaptasi	132 Kampung Iklim yang tersebar di 151 Kelurahan Kota Bandung

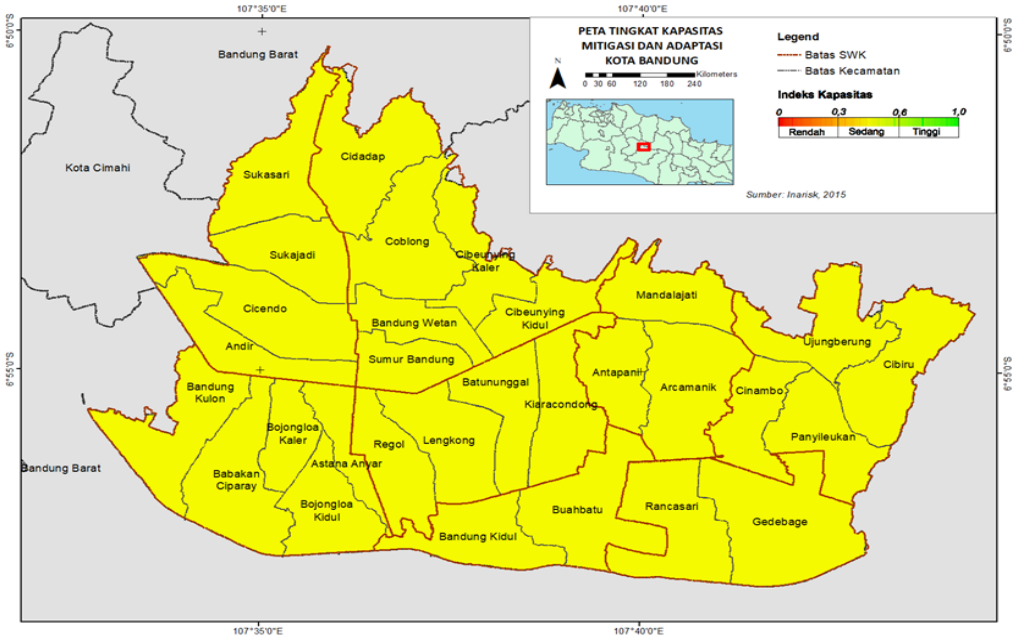
Sumber: *Bappenas, 2024*

4. Kapasitas Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi suatu langkah penting dalam meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko dampak perubahan iklim, seperti banjir, cuaca ekstrem, kenaikan air laut, maupun kekurangan air. Analisis kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui interpretasi data InaRISK tahun 2015 yang berlaku untuk semua jenis bencana karena data yang digunakan merepresentasikan kapasitas institusi pemerintah dan kesiapan infrastruktur di wilayah setempat.

Diketahui pada gambar berikut, tingkat kapasitas Kota Bandung tergolong sedang dan cenderung tinggi pada sisi utara. Artinya, kesiapan daerah dalam menghadapi bencana belum mencukupi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kerawanan beberapa jenis bencana cenderung tinggi dibandingkan wilayah sisi utara sehingga kedepannya kapasitas daerah perlu ditingkatkan kesiapannya.

Gambar 2.12. Kapasitas Kota Bandung Terhadap Bencana



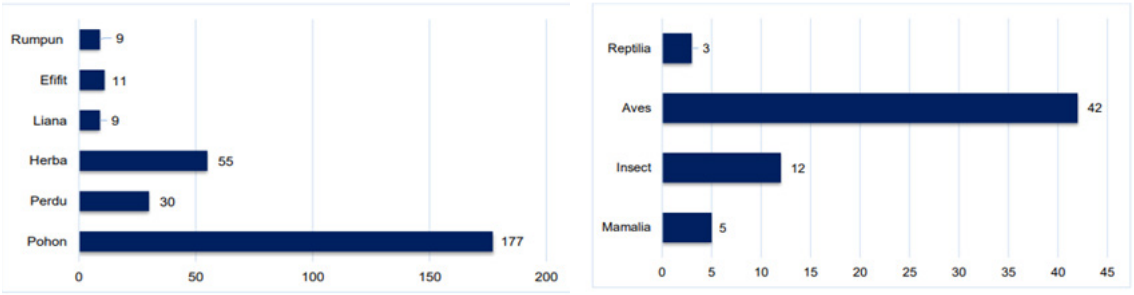
Sumber: *KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045*

5. Keanekaragaman Hayati

Potensi keanekaragaman hayati ditinjau berdasarkan kondisi jasa ekosistem pendukung biodiversitas dan data jenis flora dan fauna yang ada di Kota Bandung. Adapun untuk melihat efisiensi pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan melihat efisiensi berdasarkan jenis pola ruang.

Pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa jenis flora yang paling banyak di Kota Bandung adalah pohon dan jenis fauna yang paling banyak adalah aves/burung. Dengan demikian, jenis flora dan fauna ini perlu dipertahankan keberadaannya.

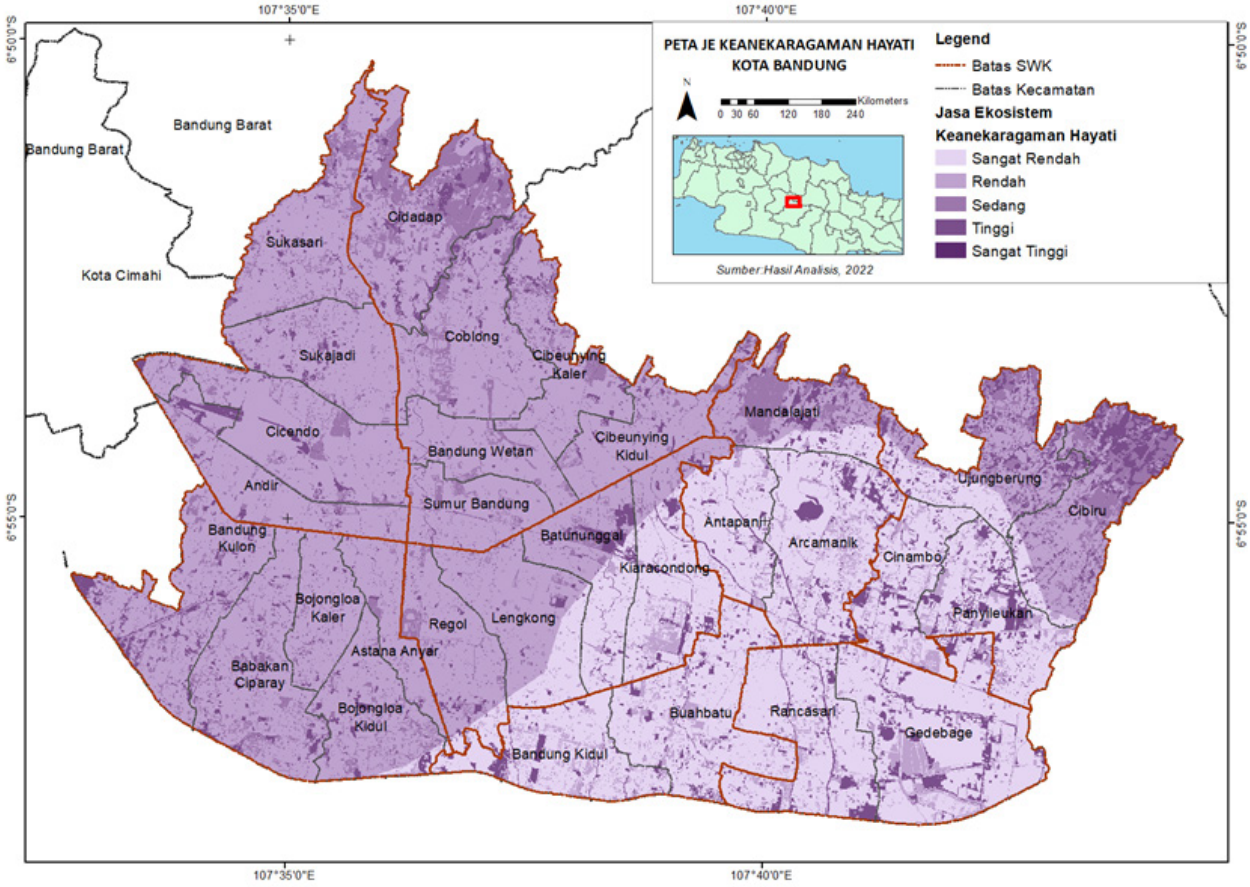
Gambar 2.13. Jumlah Jenis Flora dan Fauna di Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045*

Efisiensi jasa ekosistem keanekaragaman hayati secara umum tergolong rendah dan sangat rendah, dimana hanya pada beberapa titik yang tersebar dan tidak terpusat dengan efisiensi cenderung tinggi. Kondisi ini dapat menurun seiring dengan peningkatan pembangunan perkotaan sehingga kedepannya dapat mengancam perlindungan keanekaragaman hayati.

Gambar 2.14. Jasa Ekosistem Keanekaragaman Hayati Kota Bandung

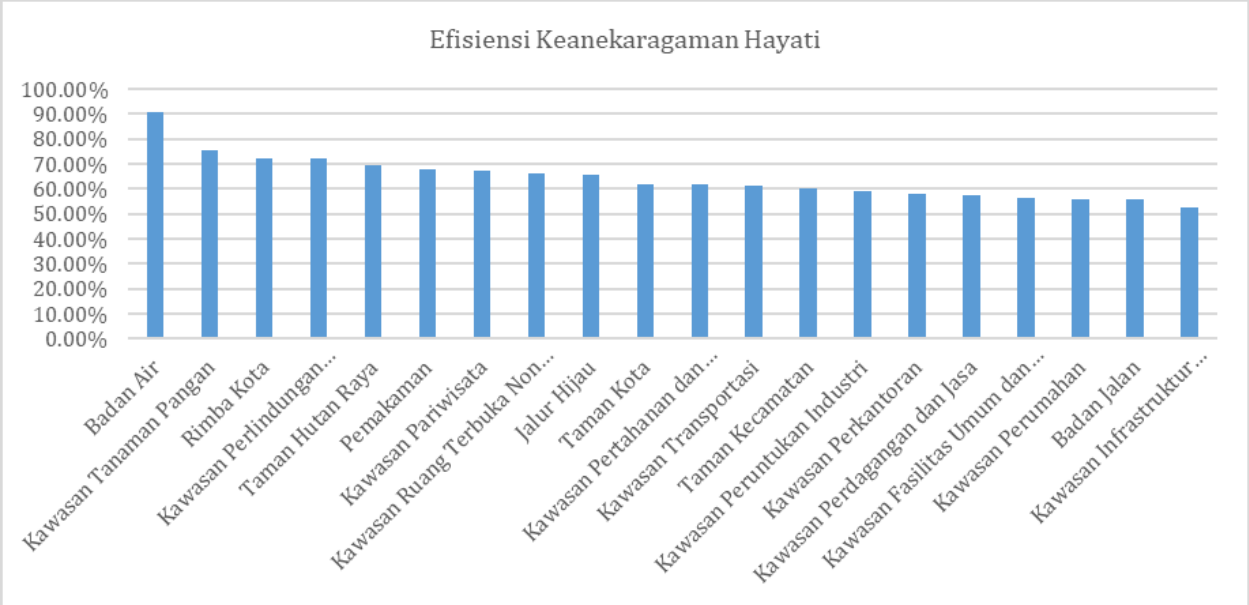


Sumber: *KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045*

Apabila dilihat dari jenis pola ruangnya, efisiensi keanekaragaman hayati di Kota Bandung secara umum berada pada badan air, kawasan tanaman pangan, rimba kota, kawasan perlindungan setempat, dan taman hutan raya. Namun, hal ini menjadi tantangan

tersendiri apabila Kota Bandung mengalami peningkatan pembangunan yang tidak terkendali sehingga potensi keanekaragaman hayati perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

Gambar 2.15. Efisiensi Keanekaragaman Hayati Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045*

6. Titik Banjir/Genangan

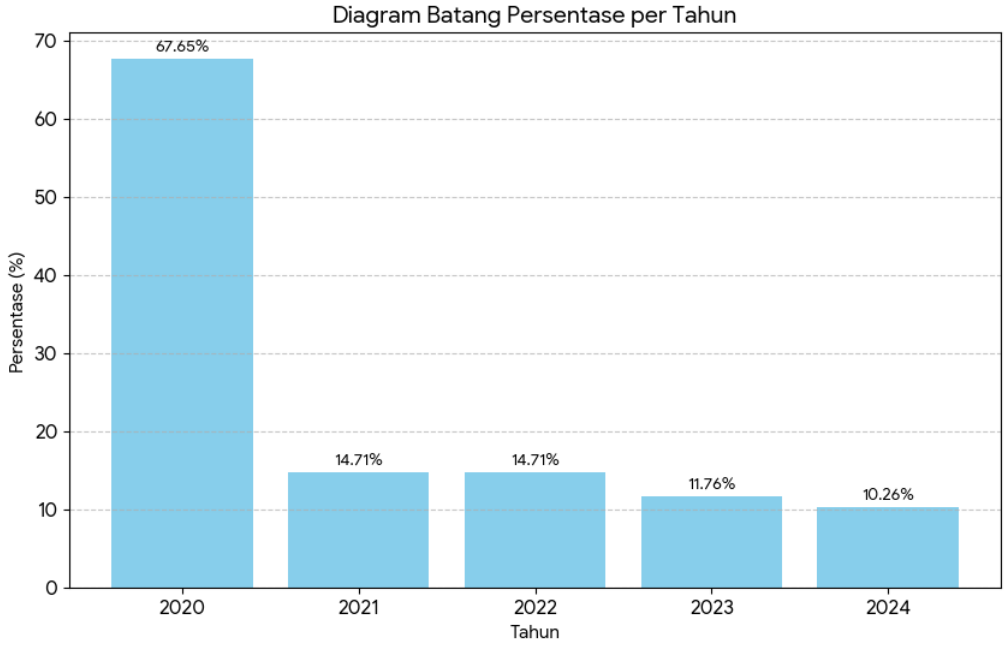
Limpasan air di badan jalan akibat air hujan atau seringkali disebut banjir Cileuncang. Penyebab terjadinya banjir Cincang adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan terbangun, sehingga terjadi perubahan tutupan lahan yang meningkatkan debit limpasan. Di Kota Bandung telah teridentifikasi 68 titik genangan yang masih berpotensi terjadi genangan.

Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebih palung sungai. Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Persentase Pengurangan Titik Genangan diperoleh dari perbandingan jumlah titik genangan yang sudah memenuhi kriteria keberhasilan terhadap 68 titik genangan yang sudah ditetapkan. Kriteria keberhasilan yang digunakan sesuai RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah Tinggi Genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Target kinerja persentase pengurangan titik genangan pada tahun 2024 adalah sebesar 91,18%, artinya dari 68 titik genangan target sebanyak 62 titik dapat diselesaikan

pada tahun 2024. Realisasinya, pada tahun 2024, jumlah titik genangan yang terselesaikan atau memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 61 titik genangan, dengan demikian realisasi kinerja persentase pengurangan titik genangan pada tahun 2024 adalah sebesar 61/68 = 89,71%. Maka kinerja indikator persentase pengurangan titik genangan tidak mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 89,71/91,18= 98,39%. Dari hasil pengukuran, sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan sebanyak 7 titik atau sebesar 10,26% dari jumlah titik genangan yang ditetapkan yakni 68 titik.

Gambar 2.16. Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKIP Kota Bandung Tahun 2022-2024 yang dikelola dalam SIPD, 2024*

Realisasi pada tahun 2024, jumlah titik genangan yang terselesaikan atau memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 61 dari 68 titik genangan, dengan demikian realisasi kinerja persentase pengurangan titik genangan pada tahun 2024 adalah sebesar 10,29% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,76%.

2.1.1.7. Demografi

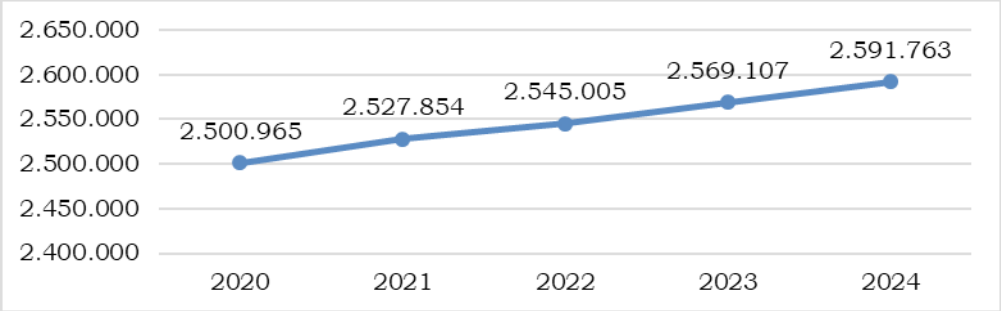
1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2020-2024, terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.500.965 jiwa, pada semester 2 (dua) tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.591.763 jiwa. Sebagai salah satu kota metropolitan terpadat di Indonesia, Bandung memiliki potensi SDM yang besar, terutama dengan mayoritas penduduknya berada dalam usia produktif (bonus demografi). Namun, potensi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan agar dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Daerah perlu memastikan akses yang merata

terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan dasar. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor industri kreatif, teknologi, dan jasa, menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengurangi angka pengangguran. Tantangan urbanisasi dan kepadatan penduduk juga menuntut pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti transportasi massal dan perumahan layak huni, serta pengendalian urbanisasi melalui pengembangan wilayah penyangga.

Di sisi lain, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi isu kritis yang perlu diatasi. Meskipun Kota Bandung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi, masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat di pusat kota dan pinggiran. Program-program inklusif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha, perlu diperluas untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk program kesehatan preventif seperti imunisasi dan edukasi kesehatan, menjadi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, Kota Bandung dapat memanfaatkan potensi kuantitas SDM-nya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kota Bandung digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 2.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun 2024*

Adapun informasi perkembangan kependudukan di Kota Bandung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.500.965	2.527.854	2.545.005	2.569.107	2.591.763
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	14.948	15.109	15.190	15.355	15.491
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0 ,82	1 ,07	0 ,68	0,94	0,88
a. Jenis Kelamin					
– Laki - Laki (orang)	1.256.205	1.267.661	1.275.897	1.287.427	1.298.551
– Perempuan (orang)	1.256.205	1.260.193	1.269.108	1.281.680	1.293.212
b. Angkatan Kerja (orang)	1.746.413	1.314.930	1.435.640	1.786.449	1.804.228
– Jumlah yang Bekerja (orang)	1.167.849	1.185.623	1.298.537	1.202.485	1.254.600

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
– Jumlah Pengangguran (orang)	147.081	153.505	137.098	116.430	100.310
– Tingkat Pengangguran (%)	11,19	11,46	9,55	8,83	7,40
c. Pendidikan (penduduk usia> 10 tahun dan ijazah tertinggi).					
– Tidak Mempunyai Ijazah (%)	4,37	2,00	2,79	2,40	17,09
– SD/MI/Sederajat (%)	17,74	15.52	17,25	16,99	20,45
– SMP/MTs/Sederajat (%)	20,82	20,62	21,62	22,37	13,30
– SLTA/Sederajat (%)	40,67	37.16	58,34	58,24	32,45
– Perguruan Tinggi (%)	11,78	14,78	N/A	N/A	16,71

Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun 2024*

2. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk tersebut berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung dan menjadi tantangan dalam proses pembangunan. Kepadatan tertsebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah. Distribusi jumlah penduduk per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sukasari	39.347	39.443	78.790	3,04%
2	Coblong	58.922	59.019	117.941	4,55%
3	Babakan Ciparay	75.838	72.883	148.721	5,74%
4	Bojongloa Kaler	64.109	62.276	126.385	4,88%
5	Andir	49.548	49.963	99.511	3,84%
6	Cicendo	49.051	48.779	97.830	3,77%
7	Sukajadi	52.241	52.363	104.604	4,04%
8	Cidadap	28.454	27.780	56.234	2,17%
9	Bandung Wetan	14.602	14.807	29.409	1,13%
10	Astana Anyar	36.808	37.045	73.853	2,85%
11	Regol	40.530	41.176	81.706	3,15%
12	Batununggal	61.848	61.479	123.327	4,76%
13	Lengkong	35.557	36.349	71.906	2,77%
14	Cibeunying Kidul	57.753	57.784	115.537	4,46%
15	Bandung Kulon	70.105	68.575	138.680	5,35%
16	Kiaracondong	66.650	66.413	133.063	5,13%
17	Bojongloa Kidul	45.557	44.473	90.030	3,47%
18	Cibeunying Kaler	35.899	36.541	72.440	2,80%
19	Sumur Bandung	20.224	20.191	40.415	1,56%
20	Antapani	40.851	41.499	82.350	3,18%
21	Bandung Kidul	31.388	31.695	63.083	2,43%
22	Buahbatu	53.784	54.280	108.064	4,17%

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
23	Rancasari	44.505	45.251	89.756	3,46%
24	Arcamanik	41.834	42.009	83.843	3,23%
25	Cibiru	40.283	39.169	79.452	3,07%
26	Ujungberung	47.431	47.143	94.574	3,65%
27	Gedebage	22.214	22.167	44.381	1,71%
28	Panyileukan	20.907	21.152	42.059	1,62%
29	Cinambo	13.531	13.118	26.649	1,03%
30	Mandalajati	38.780	38.390	77.170	2,98%
JUMLAH		**1.298.551**	**1.293.212**	**2.591.763**	**100,00%**

Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Babakan Ciparay yakni 5,74%, disusul dengan Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 5,35%, dan Kecamatan Kiaracondong 5,13%. Sementara jumlah keluarga pada masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Jumlah Kepala Keluarga Kota Bandung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Sukasari	20.409	6.064	26.473	3,10%
2	Coblong	30.640	9.192	39.832	4,67%
3	Babakan Ciparay	38.120	9.217	47.337	5,55%
4	Bojongloa Kaler	32.236	8.643	40.879	4,79%
5	Andir	25.651	8.077	33.728	3,95%
6	Cicendo	25.333	7.896	33.229	3,89%
7	Sukajadi	27.037	7.849	34.886	4,09%
8	Cidadap	14.924	3.886	18.810	2,20%
9	Bandung Wetan	7.652	2.695	10.347	1,21%
10	Astana Anyar	18.930	6.055	24.985	2,93%
11	Regol	21.044	6.952	27.996	3,28%
12	Batununggal	32.141	9.714	41.855	4,90%
13	Lengkong	18.549	6.167	24.716	2,90%
14	Cibeunying Kidul	29.938	8.662	38.600	4,52%
15	Bandung Kulon	35.747	8.268	44.015	5,16%
16	Kiaracondong	34.632	9.486	44.118	5,17%
17	Bojongloa Kidul	23.210	5.838	29.048	3,40%
18	Cibeunying Kaler	18.693	5.350	24.043	2,82%
19	Sumur Bandung	10.310	3.095	13.405	1,57%
20	Antapani	21.530	5.190	26.720	3,13%
21	Bandung Kidul	16.389	4.336	20.725	2,43%
22	Buahbatu	28.035	7.137	35.172	4,12%
23	Rancasari	23.035	5.980	29.015	3,40%

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
24	Arcamanik	21.791	5.041	26.832	3,14%
25	Cibiru	20.815	4.471	25.286	2,96%
26	Ujungberung	24.604	5.717	30.321	3,55%
27	Gedebage	11.607	2.589	14.196	1,66%
28	Panyileukan	11.109	2.376	13.485	1,58%
29	Cinambo	7.214	1.554	8.768	1,03%
30	Mandalajati	19.994	4.852	24.846	2,91%
JUMLAH		**671.319**	**182.349**	**853.668**	**100,00%**

Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun 2024*

3. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2024 yang mencapai 50,11% untuk laki-laki dan 49,89% untuk perempuan. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai generasi emas yang dapat berdampak pada peningkatan produktivitas pada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kualitas dan kuantitas SDM dari adanya bonus demografi perlu di persiapkan dengan baik. Pada tabel berikut menunjukkan secara rinci Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2024.

Tabel 2.16. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki +Perempuan
0-9	193.221	180.908	374.129
10-19	210.603	199.496	410.099
20-29	211.206	204.156	415.362
30-39	187.676	185.783	373.459
40-49	197.658	196.430	394.088
50-59	154.209	159.215	313.424
60+	143.978	167.224	311.202
Kota Bandung	**1.298.551**	**1.293.212**	**2.591.763**

Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB dapat dibagi

menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHB pada tahun 2020 sebesar 283.626,74 miliar rupiah meningkat menjadi 371.845,62 miliar rupiah pada tahun 2024.

Tabel 2.17. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	287,42	291,89	306,12	308,98	346,02
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	55.293,89	57.998,39	62.480,78	65.798,01	68.024,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	243,71	260,36	292,07	303,45	307,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	542,69	590,08	636,00	645,81	751,97
F	Konstruksi	23.988,72	25.485,81	27.531,36	28.926,83	28.708,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71.852,50	75.215,10	83.429,30	88.962,86	97.874,57
H	Transportasi dan Pergudangan	21.046,41	20.142,82	25.446,76	28.263,78	29.572,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.466,04	13.021,74	15.487,99	16.593,61	17.885,09
J	Informasi dan Komunikasi	40.212,77	43.934,97	47.324,83	51.607,61	52.383,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.158,07	19.012,22	20.427,51	21.350,20	21.949,95
L	Real Estate	3.329,27	3.664,30	3.990,05	4.222,43	4.408,25
M,N	Jasa Perusahaan	2.414,32	2.579,60	3.035,58	3.335,71	3.509,98
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.845,26	7.931,48	7.762,18	7.881,72	8.551,29

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	12.223,04	12.718,64	13.541,86	14.523,74	16.328,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.303,35	3.662,65	4.098,26	4.608,72	5.252,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10.419,28	10.606,21	12.360,76	13.950,99	15.990,62
PDRB		**283.626,74**	**297.116,26**	**328.151,44**	**351.284,45**	**371.845,62**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Struktur PDRB Kota Bandung menurut Lapangan Usaha cenderung tidak mengalami perubahan. Adapun tiga besar kategori lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung adalah Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor yang merupakan kategori dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2024 yaitu sebesar 26,32 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,29 persen. Informasi dan Komunikasi merupakan Lapangan Usaha ketiga dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 14,09 persen. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi 58.70 persen pada perekonomian Kota Bandung tahun 2024. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bandung tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Distribusi PDRB Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,50	19,52	19,04	18,73	18,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,20	0,19	0,18	0,20
F	Konstruksi	8,46	8,58	8,39	8,23	7,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,33	25,32	25,42	25,33	26,32
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	6,78	7,75	8,05	7,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,40	4,38	4,72	4,72	4,81
J	Informasi dan Komunikasi	14,18	14,79	14,42	14,69	14,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,40	6,40	6,23	6,08	5,90
L	Real Estate	1,17	1,23	1,22	1,20	1,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,85	0,87	0,93	0,95	0,94
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,77	2,67	2,37	2,24	2,30
P	Jasa Pendidikan	4,31	4,28	4,13	4,13	4,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,23	1,25	1,31	1,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,67	3,56	3,76	3,98	4,31
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Secara umum kondisi ekonomi Kota Bandung tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,99 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 5,07 persen. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2024 kembali mengalami perlambatan setelah perlambatan di tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang sebesar 5,71 persen. Perlambatan ekonomi pada tahun 2024 terjadi seiring perlambatan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi yang besar di antaranya Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp371,85 triliun. Secara nominal angka PDRB tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,56 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bandung tahun 2024 adalah Rp233,05 triliun atau secara nominal meningkat Rp11,08 triliun dari tahun 2023. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh tumbuhnya aktivitas perekonomian Kota Bandung di beberapa lapangan usaha, walaupun peningkatan tersebut tidak sebesar tahun 2023.

Perkembangan PDRB ADHK Kota Bandung Tahun 2020-2024 sebagai alat untuk menunjukkan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	173,71	171,98	171,48	168,33	176,16
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	38.204,35	39.247,99	40.283,92	41.196,68	41.511,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	159.09	168.74	179,24	184,18	186,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	293,36	315,84	312,90	306,93	316,99
F	Konstruksi	15.959,04	16.681,87	16.619,30	17.247,51	18.021,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50.409,94	51.772,63	54.261,26	56.411,59	59.462,37
H	Transportasi dan Pergudangan	10.987,44	10.756,43	12.139,21	13.205,91	14.442,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.084,90	8.179,17	9.319,18	9.857,75	10.598,37
J	Informasi dan Komunikasi	35.402,32	38.875,29	42.350,57	46.170,59	49.195,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.551,96	10.733,59	10.607,74	10.782,02	11.119,88

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	2.513,83	2.758,09	2.919,72	3.048,40	3.214,29
M,N	Jasa Perusahaan	1.442,42	1.516,41	1.673,78	1.791,44	1.882,77
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.267,39	4.252,02	4.175,10	4.208,92	4.602,72
P	Jasa Pendidikan	6.399,91	6.468,39	6.787,30	7.132,10	7.434,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.957,09	2.131,10	2.362,47	2.582,51	2.809,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.338,20	6.384,47	7.087,49	7.674,27	8.078,81
	PDRB	**193.144,95**	**200.414,03**	**211.250,67**	**221.969,13**	**233.053,80**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami fluktuasi yang erat kaitannya dengan kondisi regional dan nasional. Setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, perekonomian kota mulai menunjukkan pemulihan signifikan sejak 2021. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat mencapai 5,41%, sedikit di bawah pertumbuhan Provinsi Jawa Barat (5,45%) dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional (5,31%). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (13,94%), Transportasi dan Pergudangan (12,86%), serta Jasa Lainnya (11,01%), yang pulih seiring dengan dicabutnya PPKM dan dibukanya kembali aktivitas pariwisata dan perdagangan. Namun demikian, beberapa sektor masih menunjukkan kontraksi, seperti pertanian dan jasa keuangan, menandakan bahwa pemulihan belum merata dan memerlukan intervensi strategis yang lebih menyasar sektor-sektor tertinggal. Selanjutnya pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami penurunan kembali menjadi 4,99 persen di tahun 2024. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diakibatkan oleh menurunnya beberapa sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

Di sisi lain, penguatan ekonomi lokal tidak hanya bertumpu pada pergerakan PDRB semata, tetapi juga pada pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang. Potensi unggulan seperti keunggulan geografis, sumber daya manusia kreatif, serta ekosistem industri kreatif dan pariwisata di Kota Bandung dapat menjadi lokomotif pertumbuhan apabila dikelola secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Strategi pengembangan potensi unggulan harus berbasis pada karakteristik lokal dan data sektoral, seperti kontribusi sektor pariwisata dan industri kreatif dalam struktur PDRB. PDRB menjadi indikator penting untuk mengukur kontribusi sektor-sektor potensial tersebut terhadap perekonomian kota, namun tidak cukup untuk mencerminkan aspek kesejahteraan, distribusi pendapatan, atau keberlanjutan ekologis.

Oleh karena itu, dalam RPJMD Kota Bandung 2025–2029, penting untuk merancang kerangka kerja yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan PDRB, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi unggulan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan produktif, insentif investasi untuk sektor kreatif dan UMKM, serta penguatan sistem inovasi daerah yang melibatkan kampus dan pusat riset. Perlu juga dibangun sistem pemantauan PDRB sektoral berbasis spasial agar pemerintah dapat lebih adaptif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Dalam jangka panjang, pengembangan potensi unggulan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan ekonomi lokal akan memperkuat daya saing Kota Bandung di level regional dan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-6,70	-0,99	-0,29	-1,84	4,56
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	0,21	2,73	2,64	2,27	0,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-8,21	6,07	6,22	2,76	1,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,71	7,66	-0,93	-1,91	3,28
F	Konstruksi	-8,68	4,53	-0,38	3,78	4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-9,93	2,70	4,81	3,96	5,41
H	Transportasi dan Pergudangan	-23,61	-2,10	12,86	8,79	9,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-18,25	1,17	13,94	5,78	7,51
J	Informasi dan Komunikasi	32,26	9,81	8,94	9,02	6,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,27	1,72	-1,17	1,64	3,13
L	Real Estate	1,22	9,72	5,86	4,41	5,44
M,N	Jasa Perusahaan	-10,72	5,13	10,38	7,03	5,10
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,04	-0,36	-1,81	0,81	9,36
P	Jasa Pendidikan	4,46	1,07	4,93	5,08	4,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,77	8,89	10,86	9,31	8,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-14,18	0,73	11,01	8,28	5,27
PDRB		**-2,28**	**3,76**	**5,41**	**5,07**	**4,99**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola SIPD, 2025*

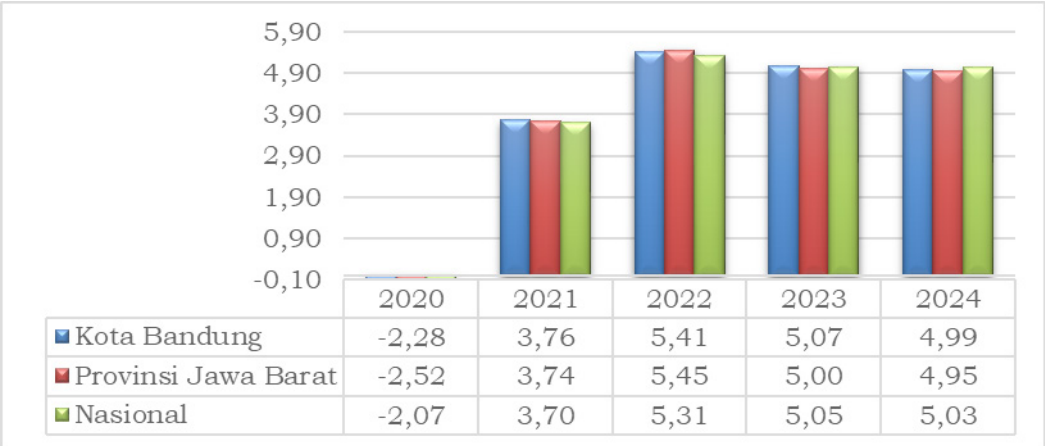
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks dan menggambarkan tantangan serta peluang baru bagi perumusan RPJMD 2025–2029. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung didominasi oleh sektor tersier seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta konstruksi, sementara sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami stagnasi bahkan penurunan.

Ketimpangan ini menandakan perlunya diversifikasi strategi ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada konsumsi dan jasa perkotaan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi melalui revitalisasi sektor pangan, pengembangan industri lokal bernilai tambah, serta integrasi ekonomi hijau dan sirkular. Lonjakan pada sektor informasi dan komunikasi yang hampir dua kali lipat selama lima tahun terakhir menunjukkan potensi besar dalam transformasi digital yang perlu diakomodasi melalui penguatan ekosistem teknologi, pendidikan vokasi, dan dukungan pada *startup* lokal. Sektor kesehatan yang tumbuh stabil pasca pandemi juga perlu didorong sebagai bagian dari ekonomi sosial yang berdaya guna bagi masyarakat.

Peningkatan di sektor konstruksi dan transportasi mencerminkan dampak pembangunan infrastruktur yang perlu lebih terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan kebijakan pengembangan kawasan strategis seperti TOD Gedebage. Dengan menggunakan data sektoral PDRB sebagai dasar, RPJMD Kota Bandung ke depan perlu berfokus pada pertumbuhan yang inklusif, merata antarwilayah dan antar sektor, serta mendorong transisi dari pemulihan ekonomi pasca pandemi ke akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung pada tahun 2024 yang sebesar 4,99 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama yang hanya 4,95 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 5,03 persen. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024



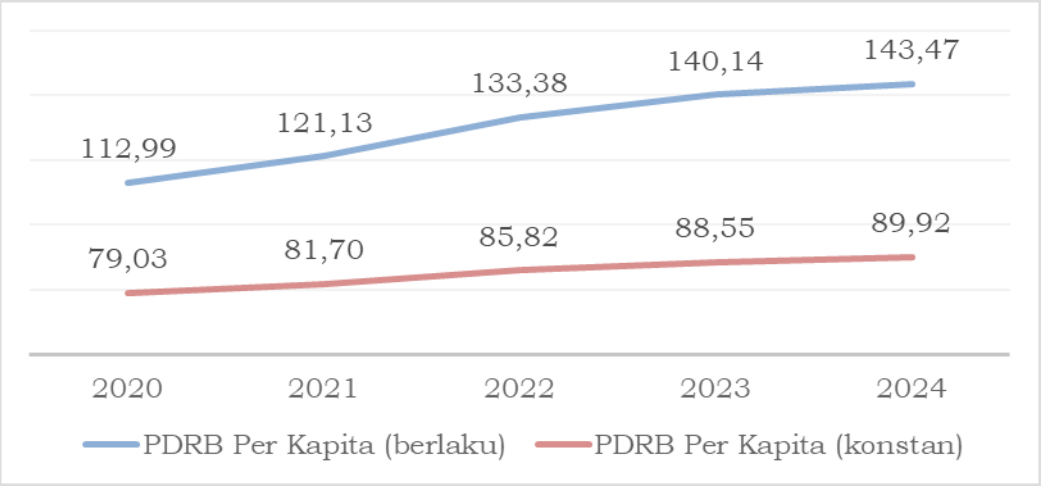
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	-2,28	3,76	5,41	5,07	4,99
Provinsi Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45	5,00	4,95
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: *BPS Jawa Barat dan BPS Kota Bandung, 2025, diolah dan LKPJ 2024*

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat adalah pendapatan perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila pendapatan per kapita (riil) meningkat. Perkembangan pendapatan perkapita Kota Bandung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.19. PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



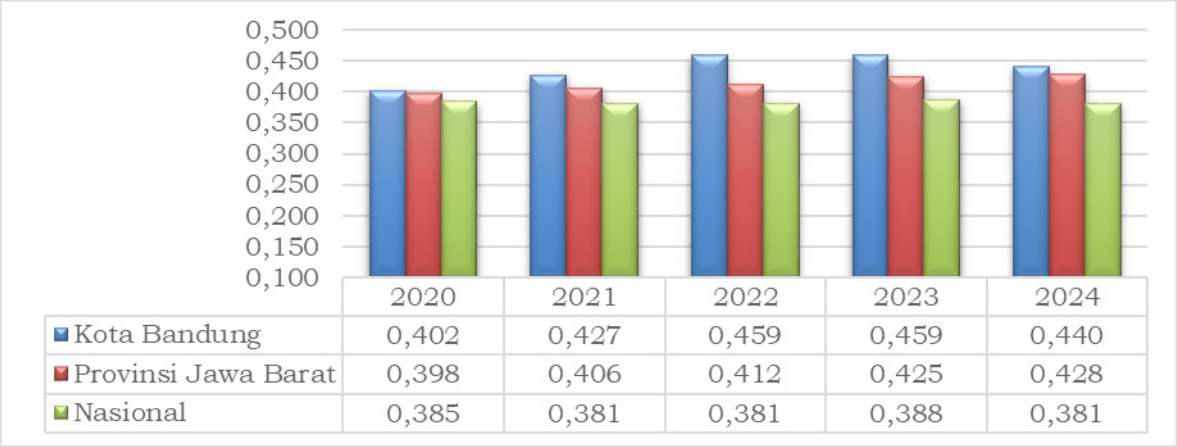
Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2024*

Nilai PDRB per kapita Kota Bandung ADHB tahun 2024 adalah 143,47 juta rupiah, berarti mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya nilai PDRB ADHB pada tahun tersebut. Angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Hal yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK, meningkat pada tahun 2024 menjadi 89,92 juta rupiah.

4. Gini Ratio

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, dapat menggunakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan, yaitu koefisien gini (*gini ratio*). Koefisien gini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Dimana nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Terjadinya kemerataan sempurna dilihat dari indeks gini bernilai 0 (nol), sementara ketimpangan sempurna dilihat dari hasil indeks gini bernilai 1 (satu).

Gambar 2.20. Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	0,402	0,427	0,459	0,459	0,440
Provinsi Jawa Barat	0,398	0,406	0,412	0,425	0,428
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: *BPS Kota Bandung dan BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Gambar diatas menunjukkan bahwa Gini Ratio Kota Bandung pada tahun 2024 sebesar 0,440 dengan kriteria Sedang, yang berarti meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial sebagai dampak pandemi masih memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan di Kota Bandung. Peningkatan gini ratio mengindikasikan semakin besarnya kesenjangan pendapatan antara masyarakat dan perlu menjadi perhatian bersama sebab posisi Kota Bandung berada pada tiga besar tertinggi se Jawa Barat, setelah Kota Sukabumi dan Kota Cirebon. Tingginya gini ratio pada ketiga kota tersebut disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan.

Gini Ratio Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, hal tersebut menunjukkan lebih besarnya kesenjangan pendapatan masyarakat di Kota Bandung. Perlu upaya-upaya nyata agar distribusi pengeluaran di masyarakat Kota Bandung lebih merata.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Angka kemiskinan di Kota Bandung masih menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan beberapa tahun terakhir. Kondisi kemiskinan di Kota Bandung dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,38 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 4,37 persen, namun pada tahun berikutnya terus menurun hingga menjadi 3,87 persen. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, namun angka kemiskinan pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada awal (2020). Angka

capaian 2024 masih dipengaruhi dampak pandemi COVID19 yang terjadi awal tahun 2020 dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat serta berdampak buruk pada berbagai sektor lainnya.

Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi lebih jauh pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2020–2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi.

Tabel 2.21. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/Bulan)
2020	100,02	3,38	1,02	0,20	500.452
2021	112,50	4,37	1,36	0,35	515.396
2022	109,82	4,25	1,21	0,30	545.675
2023	102,80	3,96	0,59	0,15	591.124
2024	101,10	3,87	0,60	0,14	614.707

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2024*

Selama periode 2020–2024, tingkat kemiskinan di Kota Bandung mengalami dinamika yang mencerminkan dampak pandemi, pemulihan ekonomi, serta efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 100,02 ribu jiwa. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 112,50 ribu. Kenaikan ini mencerminkan tekanan ekonomi akibat pembatasan aktivitas, hilangnya pendapatan, dan tingginya ketergantungan terhadap sektor informal. Memasuki periode pemulihan, jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren menurun, hingga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 101,10 ribu jiwa. Penurunan ini didukung oleh meningkatnya garis kemiskinan dari Rp 500.452 (2020) menjadi Rp 614.707 (2024), yang mencerminkan naiknya kebutuhan dasar hidup serta inflasi harga kebutuhan pokok.

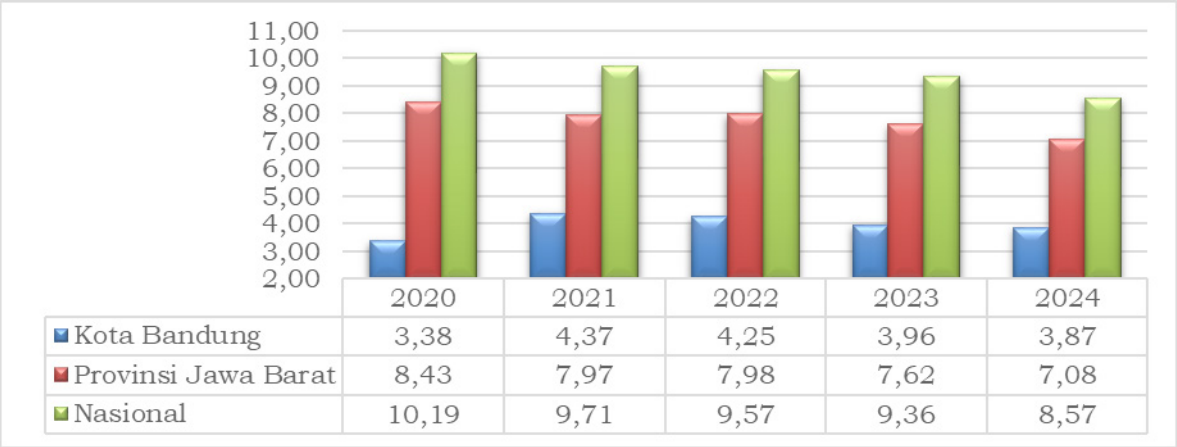
Dari sisi kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami fluktuasi. P1 sempat melonjak ke 1,36 pada 2021, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Namun, indikator ini membaik pada tahun 2024 menjadi 0,60, sedangkan P2 (yang menggambarkan ketimpangan antar warga miskin) turun menjadi 0,14, level yang relatif lebih moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data ini menegaskan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin mulai menurun, kedalaman dan ketimpangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama. Oleh karena

itu, RPJMD Kota Bandung 2025–2029 perlu memprioritaskan strategi pengurangan kemiskinan yang bersifat multidimensi dan terarah, melalui integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan data terpadu untuk intervensi yang lebih presisi.

Selanjutnya, angka kemiskinan di Kota Bandung sejak tahun 2020 sampai 2024 lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 angka kemiskinan di Kota Bandung hanya 3,87 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama mencapai 7,08 persen dan nasional mencapai 8,57 persen. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.21. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	3,38	4,37	4,25	3,96	3,87
Provinsi Jawa Barat	8,43	7,97	7,98	7,62	7,08
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: *BPS Kota Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Merujuk pada tabel di dibawah, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 22.210 KK atau 7,29% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 304.484 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik. Sementara Kecamatan Sumur Bandung merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 2.853 KK atau 0,94%.

Berdasarkan kondisi ini, maka untuk dapat menggerakkan perekonomian Kota Bandung, Pemerintah Daerah harus berfokus pada pengembangan sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan dan perindustrian, serta usaha mikro yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar, yang pada akhirnya dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada.

Tabel 2.22. Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2020–2024

KECAMATAN	2020		SK 24 DES 2021		SK 26 DES 2022		SK 29 DES 2022		SK 22 DES 2023		SK 27 DES 2024	
	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA
ANDIR	19121	5458	34375	13482	42655	15394	42657	15391	43198	15213	36911	13675
ANTAPANI	9204	2747	16401	6666	17814	6788	17812	6787	18075	6765	16257	6341
ARCAMANIK	13196	3830	22737	8934	24618	9015	24614	9011	24184	8763	19593	7665
ASTANAANYAR	12413	3614	22540	9060	25523	9556	25524	9556	25054	9265	21039	8366
BABAKAN CIPARAY	34774	9760	59961	22864	63615	23111	63587	23075	63932	22776	53841	20294
BANDUNG KIDUL	12383	3778	19024	7742	20718	7880	20718	7877	20789	7762	18165	7139
BANDUNG KULON	30331	8499	49914	19689	52459	19630	52433	19617	61274	22373	48239	18142
BANDUNG WETAN	3231	1014	7176	3043	8146	3202	8146	3199	8542	3237	7323	2866
BATUNUNGGAL	29117	8683	44026	18498	49829	19153	49829	19142	52226	19229	45992	17651
BOJONGLOA KALER	40140	11758	66173	23910	70126	24144	70109	24125	69727	23439	56078	20194
BOJONGLOA KIDUL	20720	5900	32237	12809	32470	12477	32472	12472	31873	12142	26540	10745
BUAHBATU	19476	5785	28061	11280	30608	11535	30604	11528	31839	11558	27179	10425
CIBEUNYING KALER	9856	2881	18218	7574	20380	7882	20380	7880	21549	8057	17874	7077
CIBEUNYING KIDUL	18862	5727	32053	13511	40149	15311	40149	15303	41304	15304	37135	14415
CIBIRU	14980	4433	26375	11326	28292	11205	28294	11201	28658	11051	25064	10004
CICENDO	13546	4007	29193	11530	31584	11872	31581	11861	31727	11736	24322	9702
CIDADAP	7275	2307	15171	5951	16702	6456	16703	6453	17313	6605	14768	5973
CINAMBO	5279	1551	9089	3663	9238	3553	9238	3551	9591	3538	8267	3267
COBLONG	20803	6306	37146	14653	39022	14694	38947	14641	40038	14712	30372	12164
GEDEBAGE	5977	1819	9917	4146	10739	4311	10727	4300	10992	4298	9656	3913
KIARACONDONG	30361	8851	51894	21058	54691	20810	54651	20769	55016	20384	45272	17942
LENGKONG	9027	2697	17228	6832	17832	6763	17820	6753	17838	6614	15099	5922
MANDALAJATI	12876	3931	26131	10540	28164	10742	28122	10708	29173	10804	23121	9292
PANYILEUKAN	5527	1631	9479	3912	10198	3987	10197	3983	10387	3958	8552	3439
RANCASARI	10705	3124	17814	7263	19781	7466	19337	7481	20037	7589	17365	6856
REGOL	14368	4764	21642	9177	21252	8174	22913	9120	23298	8972	21066	8396
SUKAJADI	18807	5543	37894	14131	40872	14630	40874	14621	41456	14462	33718	12574
SUKASARI	8206	2533	18634	7305	19116	7317	19116	7315	19604	7337	15573	6233
SUMUR BANDUNG	3898	1209	7166	3038	7716	3080	7719	3081	7519	3215	8134	3191
UJUNG BERUNG	18823	5581	31712	13066	33760	13293	33761	13290	33722	13021	26794	10995
JUMLAH	**473282**	**139721**	**819381**	**326653**	**888069**	**333431**	**889034**	**334091**	**909935**	**334179**	**759309**	**294858**

Sumber: *Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 7,40 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh sampai delapan orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (8,83 persen).

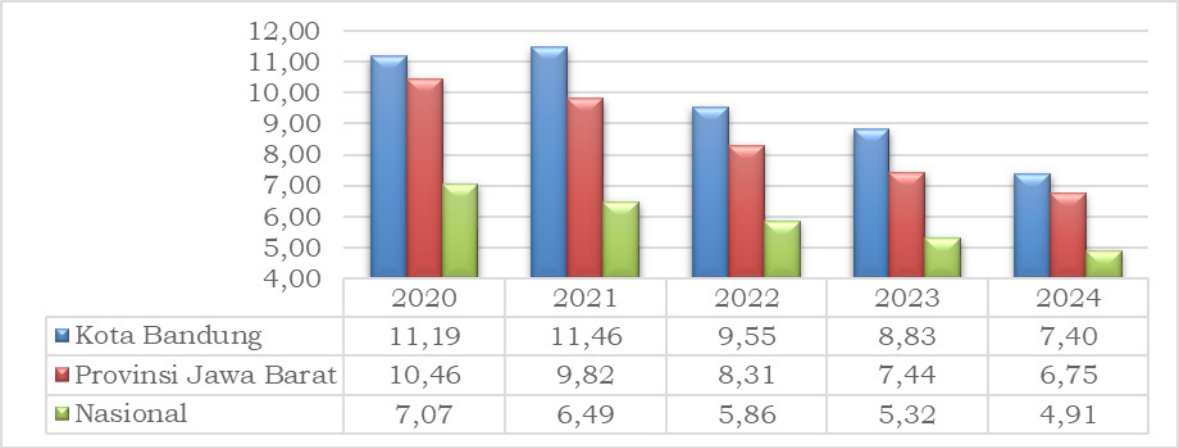
Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 7,23 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,68 persen. Jika dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki maupun yang perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,14 persen poin dan 0,27 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT Pada Agustus 2024 dari tamatan Sekolah Menengah Atas masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,94 persen. Sementara TPT yang paling rendah terjadi pergeseran yang pada Agustus 2023 di jenjang pendidikan Diploma I/II/III, sedangkan di Agustus 2024 menjadi pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 1,77 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan di jenjang pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami kenaikan TPT dalam setahun terakhir. Kenaikan TPT terbesar terjadi pada jenjang pendidikan Universitas yaitu sebesar 3,33 persen poin. Sedangkan penurunan TPT terbesar terjadi pada jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 7,93 persen poin.

Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa TPT di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. TPT Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai 7,40 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama hanya 6,75 persen dan nasional 4,91 persen. Dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung.

Gambar 2.22. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,40
Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: *BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025*

7. Indeks Pembangunan Manusia

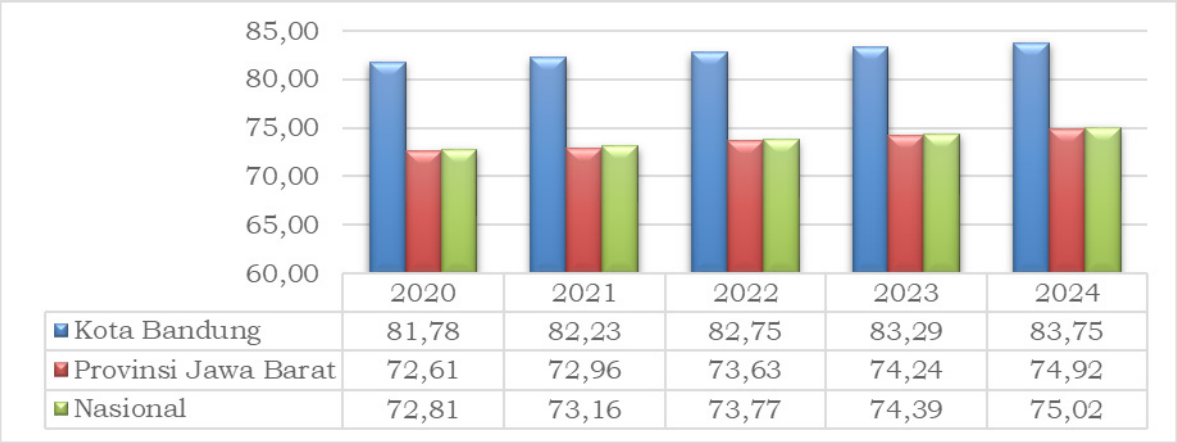
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggabungkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Pendidikan yang baik membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesadaran kesehatan. Kesehatan yang terjaga memungkinkan individu untuk berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu, pendapatan yang layak memungkinkan akses terhadap kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan, perluasan cakupan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menjaga keberlanjutan kualitas layanan dasar di tengah dinamika urbanisasi, tekanan sosial ekonomi, dan dampak pascapandemi. Berikut ini adalah perkembangan dan tren IPM Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencerminkan dinamika dan capaian pembangunan manusia selama periode tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung terus menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. IPM meningkat dari 81,78 pada tahun 2020 menjadi 83,75 pada tahun 2024, menempatkan Kota Bandung secara konsisten dalam kategori "tinggi" menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pembangunan yang relatif merata pada tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Bagi Kota Bandung, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah Daerah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan analisis komparasi diidentifikasi bahwa IPM Kota Bandung lebih tinggi dari IPM tingkat nasional, Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dan nasional.

Gambar 2.23. IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS RI, 2025*

Posisi IPM Kota Bandung sampai dengan tahun 2024 di regional Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat pertama/tertinggi. Perbandingan IPM seluruh kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.23. Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02	73,63
Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71	70,18
Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18	68,89
Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03	74,59
Garut	67,2	67,53	68,51	69,22	69,91
Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38	69,98
Ciamis	71,57	72	72,52	73,12	73,64
Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99	71,56
Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81	72,30
Majalengka	69,2	69,42	70,18	70,76	71,37
Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02	74,57
Indramayu	68,25	68,6	69,52	70,19	70,72
Subang	69,66	69,84	70,54	71,42	72,05
Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43	73,99
Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25	73,82
Bekasi	74,47	74,84	75,6	76,13	76,80
Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33	70,77

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36	79,03
Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69
Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75
Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45	78,09
Kota Bekasi	81,5	81,99	82,52	83,06	83,55
Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05
Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69	80,30
Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	73,08	73,3	73,93	74,45	75,01

Sumber: *BPS RI, 2025*

Di bidang pendidikan, indikator harapan lama sekolah meningkat dari 14,20 tahun (2020) menjadi 14,25 tahun (2024), mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 10,75 tahun menjadi 11,07 tahun, menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Dalam aspek kesehatan, umur harapan hidup naik dari 74,82 tahun (2020) menjadi 75,83 tahun (2024), menunjukkan perbaikan layanan kesehatan dasar, peningkatan kesadaran gaya hidup sehat, dan akses yang membaik terhadap fasilitas kesehatan kota.

Sementara itu, dari sisi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita per tahun meningkat signifikan dari Rp 16,88 juta (2020) menjadi Rp 18,80 juta (2024). Kenaikan ini menggambarkan membaiknya daya beli masyarakat meskipun Kota Bandung juga menghadapi tekanan inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 2.24. IPM Kota Bandung Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,20	14,21	14,23	14,24	14,25
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,82	74,99	75,26	75,53	75,83
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/ Orang/ Tahun	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795
Indeks Pembangunan Manusia		**81,78**	**82,23**	**82,75**	**83,29**	**83,75**

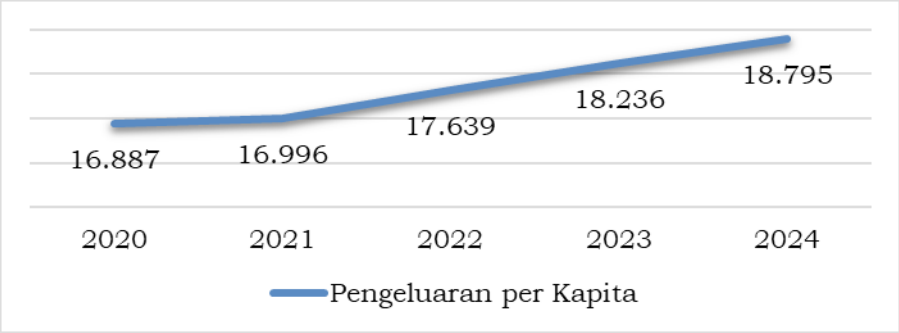
Sumber: *BPS RI, 2025*

8. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Sebagai salah satu indikator pembentuk IPM yang mengalami kenaikan yang cukup besar, pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai representasi dimensi standar hidup layak pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pengeluaran per kapita Kota Bandung pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.16.887 ribu dan terus menunjukkan

peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp.18.795 ribu. Kondisi ini menggambarkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan secara rata-rata. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.24. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2020-2024 (dalam ribu rupiah)



Sumber: *BPS RI, 2025*

Walau demikian, bila dikaitkan dengan kelas pendapatan maka terlihat ketimpangan yang masih cukup antara kelompok 40% termiskin dengan 20% terkaya. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran 40 persen terbawah mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya (kecuali pada tahun 2020) dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Tahun 2023 hanya terdapat penurunan di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Pandemi COVID-19 memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengeluaran makanan dan non makanan masyarakat Kota Bandung. Untuk menstabilkan IPM Kota Bandung, maka perlu segara mempersempit masalah ketimpangan yang terjadi antar golongan masyarakat. Perkembangan proporsi pengeluaran masyarakat menurut kelompok pengeluaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2024

Tahun	Kelompok Pengeluaran			Rata-Rata
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
2020	11,19	25,17	63,64	27,26
2021	10,05	24,56	65,39	26,92
2022	9,33	22,13	68,54	26,29
2023	9,21	22,19	68,61	26,3
2024	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2023*

Ket: Data Tahun 2024 belum tersedia.

2.1.2.2.Kesehatan untuk Semua

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

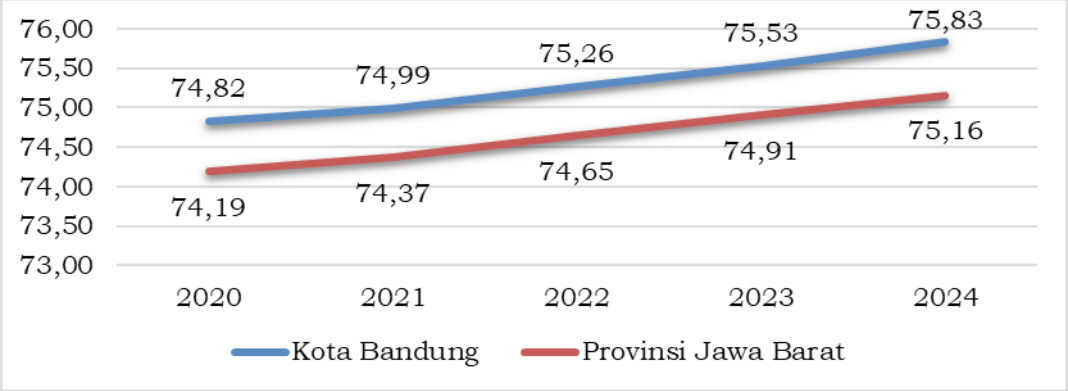
Salah satu parameter derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Umur Harapan Hidup. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH)

menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat.

Usia Harapan Hidup Kota Bandung pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 UHH di Kota Bandung sebesar 74,82 Tahun dan angka UHH terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 berada dinilai 75,83 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Bandung yang lahir di tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga umur 75 atau 76 tahun.

Kota Bandung memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Provinsi Jawa Barat. UHH di Jawa Barat tahun 2024 adalah 75,16 tahun, lebih rendah sekitar 0,67 tahun dibandingkan dengan UHH di Kota Bandung. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bandung dan Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.25. Capaian Umur Harapan Hidup Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

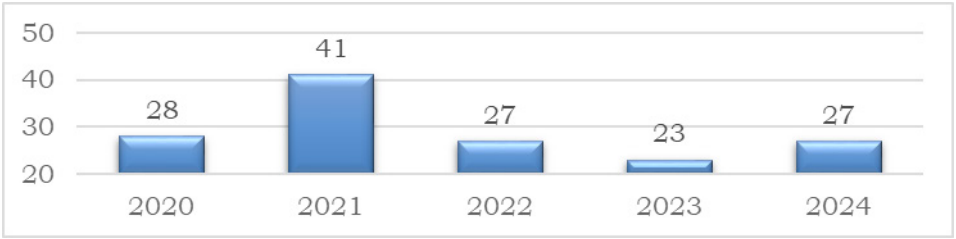


Sumber: *BPS RI, 2025*

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau *maternal mortality* erat kaitannya dengan perilaku hidup sehat, tingkat pengetahuan ibu hamil, status gizi, ketersediaan layanan kesehatan kehamilan, hingga pembiayaan persalinan. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 27 kasus kematian dari 37.338 kelahiran hidup. Terdapat peningkatan jumlah kasus kematian ibu bila dibandingkan dengan jumlah kasus kematian di tahun 2023 sebanyak 4 kasus kematian.

Gambar 2.26. Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Dengan demikian jumlah kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah kasus kematian bayi di Kota Bandung pada tahun 2024 sebanyak 244 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 87 kasus bila dibandingkan dengan jumlah kematian bayi di tahun 2023 yaitu sebanyak 157 kasus. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah Berat Badan Lahir Kurang (BBLR) dan Asfiksia. Sedangkan pada post-neo, tertinggi akibat penyebab lain-lain dan pneumonia.

Adapun capaian kinerja untuk angka kematian bayi adalah sebesar 86,73% dengan realisasi sebesar 6,78, dibawah target yang ditetapkan 6,33 per 1000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan dalam hal Angka Kematian Bayi, upaya Pemerintah Daerah telah menunjukkan hasil yang baik.

Gambar 2.27. Jumlah Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

Berkaitan dengan tingkat kematian bayi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan secara terus-menerus melakukan program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi. Hal ini dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Dalam rangka menekan jumlah kematian bayi, Pemerintah Daerah melakukan upaya operasional berupa penguatan Puskesmas dan jaringannya, manajemen program, dan sistem rujukan serta pembiayaan.

4. Cakupan Rumah Sehat

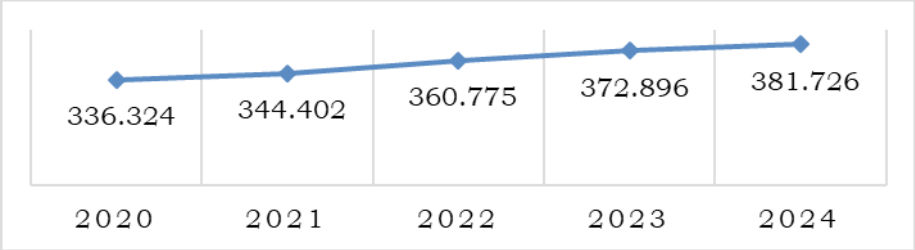
Peningkatan kualitas lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Capaian rumah sehat di tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 80,36%, telah melebihi target 80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,50%. Dibandingkan tahun 2023 capaian ini meningkat sebesar 2,27% dari capaian

78,09%. Peningkatan capaian kinerja didukung oleh adanya peningkatan jumlah rumah sehat di Kota Bandung sebanyak 8.830 rumah sehat, dari semula berjumlah 372.896 di tahun 2023.

Terdapat faktor pendorong capaian kinerja ini yang didorong adanya kemandirian masyarakat untuk melakukan perbaikan sarana rumahnya, kolaborasi lintas sektor, adanya perbaikan rumah melalui kegiatan "bedah rumah" dari berbagai sumber anggaran, peningkatan akses terhadap sanitasi dasar serta adanya peningkatan akses penduduk terhadap air minum yang aman.

Persentase layanan akses penduduk terhadap air bersih meningkat di mana persentase rumah tangga yang telah dapat mengakses air bersih sebesar 91,55% baik yang terdiri dari perpipaan maupun non perpipaan Sambungan Rumah (SR). Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 0,38% akses penduduk terhadap air bersih dari 91,30% tahun 2023 menjadi 91,68%.

Gambar 2.28. Jumlah Rumah Sehat di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

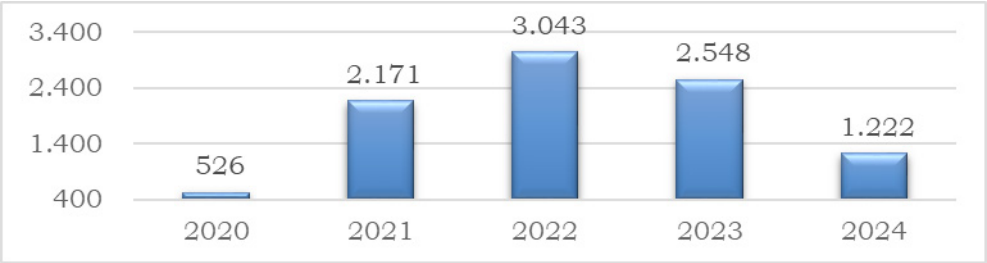
5. Persentase Balita Gizi Buruk

Selain stunting, gizi buruk juga mempengaruhi derajat Kesehatan masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 2548 balita dari seluruh sasaran balita 71.006. Untuk tahun 2024 jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 1.222 balita, terdapat penurunan sebanyak 1326 balita dari tahun sebelumnya. Pengukuran balita gizi buruk menggunakan Indikator antropometri, yaitu Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sebagai indikator baru dalam mengukur gizi buruk. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Faktor yang mendorong penurunan kasus ini diantaranya adanya sistem surveilans gizi melalui aplikasi e-PPGBM, partisipasi balita datang ke posyandu yang semakin meningkat, sehingga dapat dilakukan pemantauan pertumbuhan pada balita serta pendampingan balita balita bermasalah gizi, peran serta aktif kader posyandu di tiap wilayah yang tergabung FORKAGI, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga keterampilan kader semakin meningkat dalam penggunaan alat antropometri yang terstandar, kolaborasi dan dukungan lintas sektor, serta adanya edukasi

dan promosi kesehatan terkait gizi yang diberikan oleh tenaga Kesehatan untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan pemantauan kesehatan dan status gizi balita secara rutin.

Gambar 2.29. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun Anggaran 2024*

6. Penanganan Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, Kota Bandung memiliki angka prevalensi yang menunjukkan peningkatan dari 16,3% menjadi 22,8%. Prevalensi stunting tahun 2024 Kota Bandung melebihi prevalensi stunting Provinsi Jawa Barat yang mencapai 15,9% dengan target nasional tahun 2024 adalah 20,1%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting, sehingga diharapkan pada tahun 2025 prevalensi stunting di Kota Bandung akan menurun kembali. Hal-hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah yang nantinya dapat menjadi fokus dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting adalah peran serta masyarakat, peran serta kewilayahan dan kolaborasi perangkat daerah yang harus lebih optimal dan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.26. Prevalensi Stunting Kota Bandung dan Kabupaten/Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 dan 2024

Wilayah	2023	2024	Peningkatan/Penurunan
Jawa Barat	**21,7**	**15,9**	-5,8
Bogor	27,6	NA	NA
Sukabumi	27,0	20,5	-6,5
Cianjur	11,4	7,20	-4,2
Bandung	29,2	24,1	-5,1
Garut	24,1	14,2	-9,9

Wilayah	2023	2024	Peningkatan/Penurunan
Tasikmalaya	20,7	17,0	-3,7
Ciamis	25,4	NA	NA
Kuningan	23,4	22,7	-0.7
Cirebon	22,9	NA	NA
Majalengka	24,1	18,0	-6,1
Sumedang	14,4	17,0	+2,6
Indramayu	18,4	9,80	-8,6
Subang	18,7	22,4	+3,7
Purwakarta	24,0	14,5	-9,5
Karawang	17,1	17,6	+0,5
Bekasi	23,2	NA	NA
Bandung Barat	25,1	30,8	+5,7
Pangandaran	23,9	NA	NA
Kota Bogor	18,2	21,1	+2,9
Kota Sukabumi	26,9	NA	NA
Kota Bandung	**16,3**	**22,8**	+6,5
Kota Cirebon	19,9	14,9	-5,0
Kota Bekasi	10,3	11,7	+1,4
Kota Depok	14,3	12,5	-1,8
Kota Cimahi	24,5	22,3	-2,2
Kota Tasikmalaya	27,1	19,6	-7,5
Kota Banjar	23,6	18,8	4,8

Sumber: *SKI 2023 Dalam Angka dan SSGI 2024 Dalam Angka*

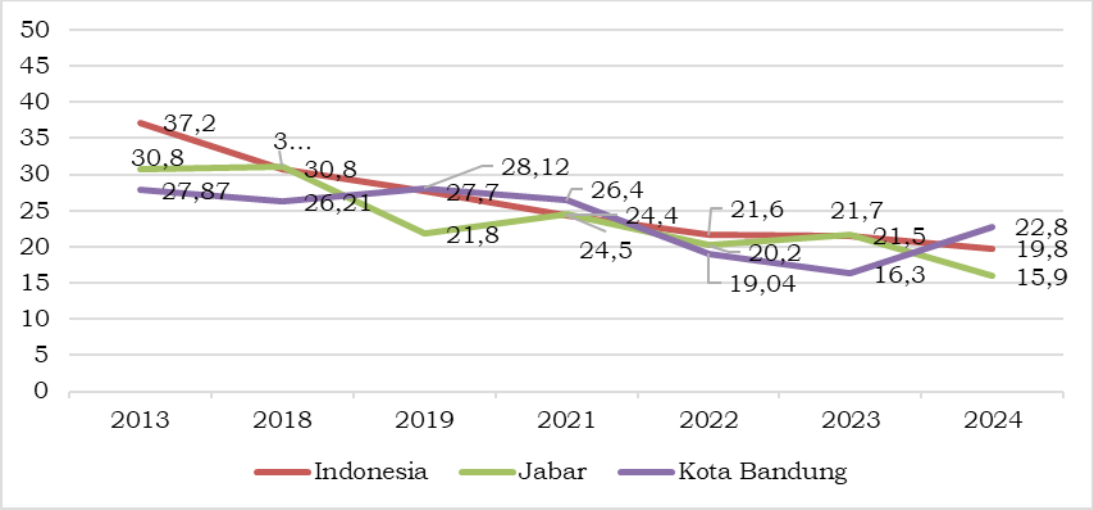
Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, dapat terlihat bahwa prevalensi Kota Bandung pada tahun 2024 sebesar 22,8% mengalami kenaikan sebesar 6,5 poin dari tahun 2023 sebesar 16,3%. Berdasarkan hasil analisia konvergensi stunting, penyebab masih tingginya stunting sebagian besar disebabkan oleh pola perilaku budaya asuh keluarga dan belum optimalnya intervensi terhadap keluarga risiko rawan stunting.

Tabel 2.27. Masalah dan Intervensi Penanganan Stunting

NO	MASALAH	HAMBATAN	INTERVENSI
1	Pola pengasuhan anak yang tidak sesuai: • ASI tidak eksklusif • MP-ASI tidak memenuhi aspek gizi seimbang • Pemantauan tumbuh kembang ke Posyandu tidak rutin • Balita tidak mendapatkan imunisasi dan suplementasi vitamin dengan lengkap	Pemahaman keluarga terkait pengasuhan anak masih rendah sehingga balita berisiko stunting tidak mendapatkan pemantauan berkala.	Meningkatkan pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan anak yang tepat dengan melibatkan seluruh pihak terkait seperti DPPKB, DP3A, Disdik, Dinkes, Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi serta Organisasi Masyarakat melalui berbagai media termasuk media massa dan media social

NO	MASALAH	HAMBATAN	INTERVENSI
2	Ditemukan keluarga dengan balita stunting dengan perilaku yang tidak sehat: • Perilaku anggota keluarga yang merokok (di dalam dan luar rumah) • Balita dengan penyakit penyerta tidak mendapat perawatan kesehatan sesuai ketentuan • Belum memiliki jamban sehat	Pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai PHBS dan perawatan kesehatan masih rendah.	Meningkatkan upaya edukasi bagi keluarga agar dapat memelihara kesehatan nya secara mandiri melalui kolaborasi semua pihak terkait termasuk unsur kewilayahan. Dalam rangka implementasi Perda KTR telah dilakukan deklarasi Kampung KTR di 3 Kelurahan (Margahayu Utara, Kebon Gedang, Cicadas) Dan akan ditingkatkan di kelurahan lainnya
3	Kapasitas kader dalam melakukan pendampingan keluarga dengan stunting/berisiko stunting belum optimal: • keterampilan kader dalam melakukan KIE harus ditingkatkan • refreshing cara pengukuran menggunakan antropometri terstandar	Penganggaran perangkat daerah untuk pelatihan kader tidak dapat menjangkau seluruh jumlah kader yang ada di wilayah Kota Bandung	Melaksanakan pelatihan - pelatihan bagi kader baik melalui anggaran perangkat daerah, kewilayahan maupun TJSL: • Pelatihan 25 keterampilan dasar kader • Pelatihan pengukuran dengan antropometri • Pelatihan konseling laktasi dan PMBA (pemberian makan bayi dan anak)
4	Pencatatan dan pelaporan bersifat *real-time* menggunakan berbagai aplikasi (ePPGBM, Elsimil, ePenting, dll) menyebabkan jangkauan data yang dihasilkan lebih luas sehingga menghasilkan temuan kasus balita stunting lebih banyak daripada sebelumnya.	Pemanfaatan aplikasi yang sudah ada perlu dimaksimalkan untuk peningkatan pemantauan balita stunting/berisiko stunting: • Balita yang belum memiliki NIK • Keluarga dengan balita yang tidak berKTP Kota Bandung tapi telah tinggal lama di wilayah Kota Bandung	• Mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya identitas kependudukan melalui sinergitas aparat kewilayahan, Disdukcapil dan pihak terkait lainnya. • Verifikasi dan validasi data oleh aparat kewilayahan secara berkala (Kasi Kessos Kecamatan dan Kelurahan, PKB Kecamatan Puskesmas, PBKK, TPK serta Kader)
5	Pemberian PMT tidak dapat dimulai dari awal tahun	Penatausahaan keuangan bersumberdana APBD memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang	• Melakukan koordinasi dan konsolidasi agar penatausahaan keuangan anggaran PMT bisa dimulai lebih awal • Mencari alternatif penganggaran PMT dari sumber lain (Baznas, TJSL, dsb)

Gambar 2.30. Prevalensi Stunting Kota Bandung



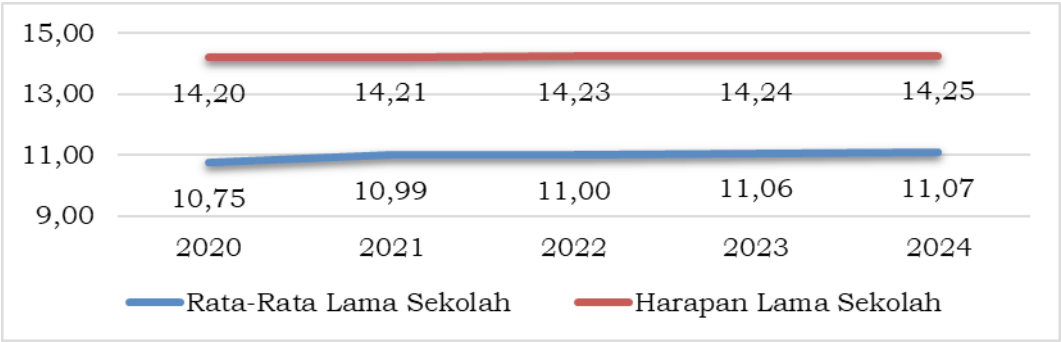
Sumber: *Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang dikelola dalam SIPD, 2024*

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 11,07 tahun. Variabel lama sekolah ini mengalami kenaikan 0,01 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 yang mencapai 11,06 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung baru mengenyam pendidikan selama 11,07 tahun setara dengan kelas X di jenjang SMA.

Gambar 2.31. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS RI, 2025*

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2024, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,25 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2023 yang sebesar 14,24. Ini berarti, pada tahun 2024 penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung diharapkan dapat bersekolah selama 14,25 tahun.

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung di tahun 2024 berada di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Terdapat selisih 1,45 tahun untuk angka harapan lama sekolah dan 2,20 tahun untuk komponen rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat adalah 12,80 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah 8,87 tahun. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bandung yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Tahun 2024, harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi kedua di Jawa Barat. Tertinggi pertama yaitu Kabupaten Ciamis dengan harapan lama sekolah sebesar 14,30 tahun di tahun 2024. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi keempat setelah Kota Bekasi (11,79), Kota Depok (11,59 tahun), dan Kota Cimahi (11,52).

Data Angka Putus Sekolah di Kota Bandung, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak tersedia, berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud Tahun 2024 pada Jenjang SD (7-12 Tahun) angka putus sekolah sebanyak 1.373 orang atau 0,69% dan Jenjang SMP (13-15 Tahun) sebanyak 1.822 orang.

Tabel 2.28. Angka Putus Sekolah di Kota Bandung Tahun 2020-2024

Anak Putus Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anak Putus Sekolah Jenjang SD (7-12 Tahun)	199.324	NA	NA	NA	1.373	0,69%
Anak Putus Sekolah Jenjang SMP (13 - 15 Tahun)	98.856	NA	NA	NA	1.822	1,84%

Sumber: *Pusdatin Kemendikbud, 2024*

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

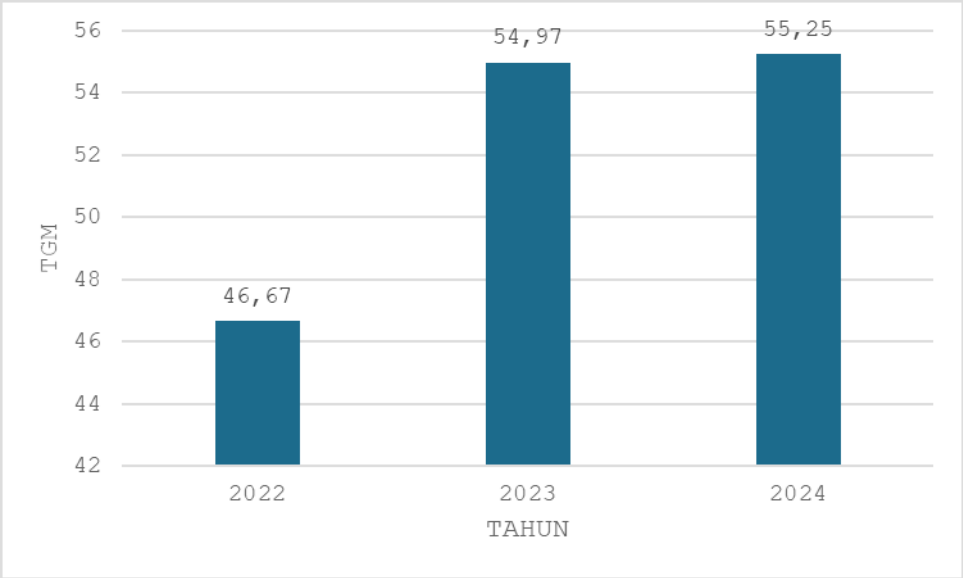
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil publikasi Perpustakaan Nasional RI, diketahui nilai IPLM Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai 87,78 dengan kategori Baik/Tinggi. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang mencapai 86,7 dengan kategori Baik/Tinggi. Ini berarti IPLM Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar 60,02 dengan kategori Sedang.

3. Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil publikasi Perpustakaan Nasional RI, diketahui skor tingkat kegemaran membaca

masyarakat di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan. Tingkat gemar membaca masyarakat Kota Bandung tahun 2024 mencapai 55,25. Namun bila dibandingkan dengan provinsi, maka nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bandung lebih rendah, sebab capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 75,07.

Gambar 2.32. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bandung Tahun 2022-2024



Sumber: *Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia, Perpusnas RI, 2024*

2.1.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Bandung selama periode tahu 2019 sampai tahun 2022 mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 yakni 51,83. Namun turun ke titik terendah pada periode ini ke 50,74. Nilai ini meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 berdampak sangat berat terhadap banyak sektor kehidupan termasuk pada sektor budaya dimana terdapat banyak aktivitas yang membutuhkan mobilitas manusia dan aktivitas yang mengundang kerumunan. Dimensi ekonomi budaya mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pandemi berdampak pada industri budaya yang masih tidak dapat berjalan seperti biasa serta terdapat beberapa sektor budaya yang mengurangi jumlah SDM. Pada tahun 2022 mencapai 51,75 yang berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50,95.

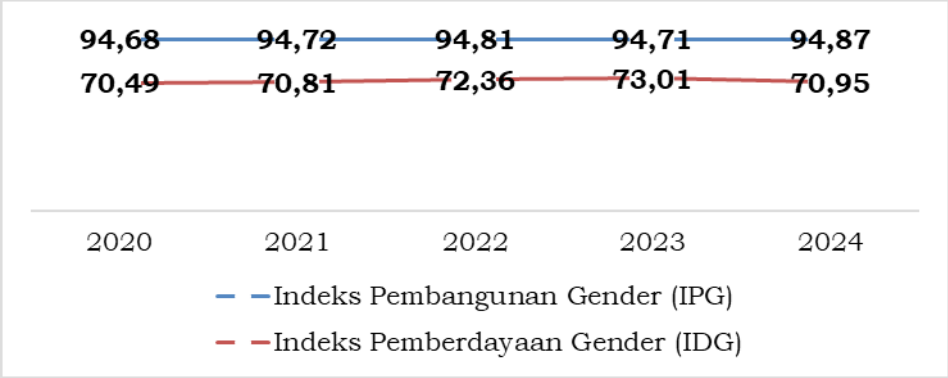
Selanjutnya, pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Bandung meningkat menjadi 58,88. Peningkatan yang cukup besar ini menjukkan semakin baiknya pembangunan kebudayaan di dalam masyarakat Kota Bandung.

2.1.2.5. Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam kualitas hidup di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara umum, IPM Kota Bandung tahun 2024 (83,75) mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 (83,29). Hal yang sama juga terjadi pada IPG Kota Bandung, yakni terjadi peningkatan sebesar 0,16 poin di tahun 2024 (94,87) dibandingkan tahun 2023 (94,71). Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mempunyai kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang cukup merata, serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan cukup kecil untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Gambar 2.33. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS Kota Bandung, 2025*

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi. Nilai IPG Kota Bandung mengalami penurunan tahun 2023 (73,01) ke 2024 (70,01). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kota Bandung masih harus diprioritaskan.

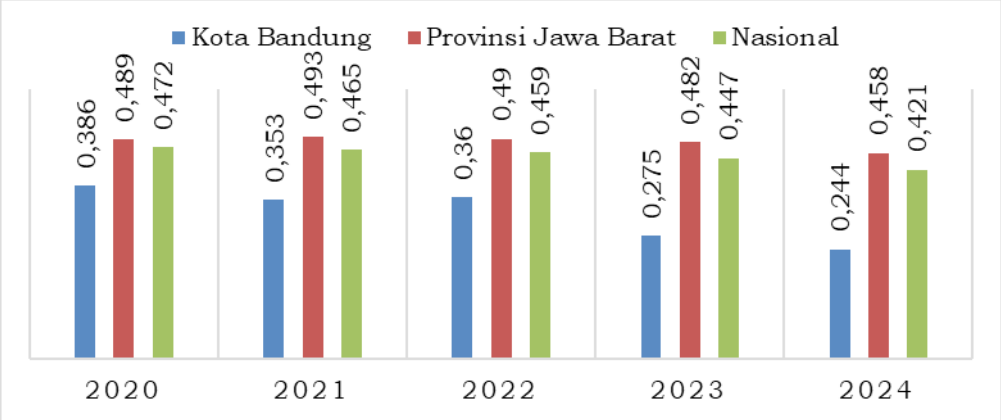
2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender.

Ketimpangan gender di Kota Bandung selama lima tahun terakhir kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2022 sempat mengalami sedikit kenaikan dibandigkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 dan 2024, IKG terus menurun. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kota Bandung semakin kecil.

Pada tahun 2024, IKG Kota Bandung mencapai 0,244, turun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 24 persen.

Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS RI, 2025*

Adapun penjelasan masing-masing komponen pembentuk IKG Kota Bandung tahun 2024, yaitu:

a. Dimensi kesehatan reproduksi memuat 2 indikator yaitu indikator MTF (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan) sebesar 0,010, dan MHPK (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun) mencapai 0,161.

b. Dimensi pemberdayaan memiliki 2 indikator, pertama adalah persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA untuk perempuan sebesar 58,30 persen dan laki-laki sebesar 63,51 persen. Indikator kedua yakni persentase keterwakilan legislatif untuk perempuan sebesar 16 persen dan laki-laki mencapai 84 persen.

c. Dimensi pasar tenaga kerja memiliki indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk laki-laki sebesar 83,93 persen dan perempuan sebesar 51,96 persen.

Capaian IKG tahun 2024 menempatkan Kota Bandung pada posisi 5 terendah untuk ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat. Nilai IKG Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir selalu jauh di bawah IKG Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2024, IKG Kota Bandung mencapai 0,244, sementara IKG Jawa Barat 0,458 dan IKG nasional 0,421.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Selama periode tahun 2020–2024, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah. Rasio ketergantungan

penduduk Kota Bandung mengalami lonjakan yakni 38,25 persen pada tahun 2020 menjadi 41,29 persen di tahun 2024. Rasio ketergantungan 41,29 persen berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Rasio ketergantungan laki-laki pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 40,66 persen.

Tabel 2.29. Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2020-2024

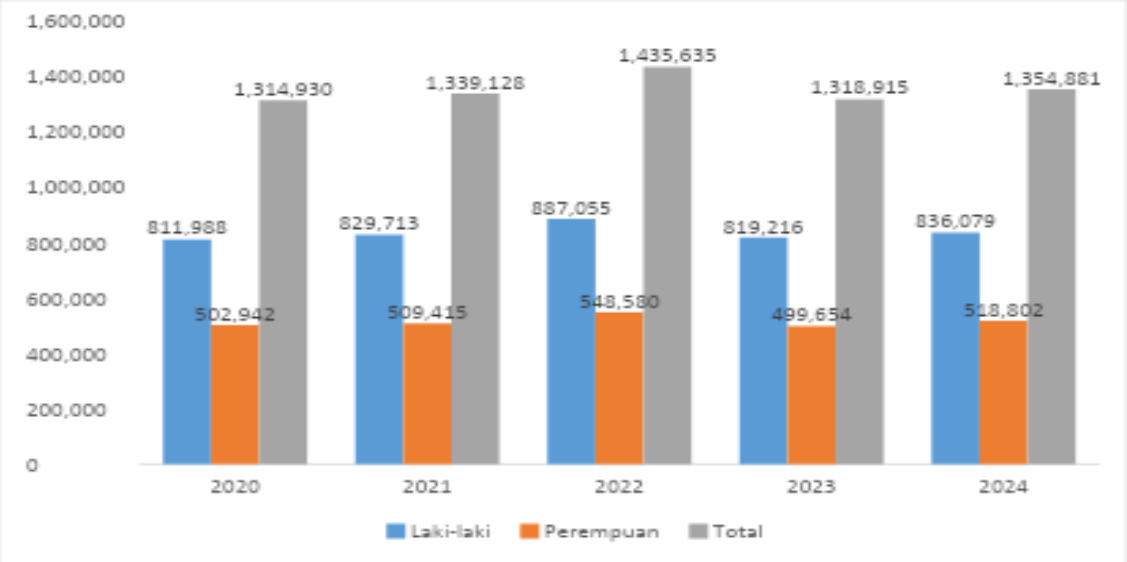
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-laki (%)	37,96	41,34	41,33	40,66	40,60
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan (%)	38,56	42,28	42,43	41,88	41,98
3	Rasio Ketergantungan Total (%)	38,25	41,81	41,87	41,26	41,29

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2025*

2. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah angkatan kerja Kota Bandung menunjukkan tren yang relatif meningkat dari tahun ke tahun, dengan beberapa fluktuasi, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.35. Perkembangan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2024 dan LPPD 2024*

Pada tahun 2019, jumlah total angkatan kerja tercatat sebanyak 1.288.260 jiwa, yang terdiri atas 792.991 laki-laki dan 495.269 perempuan. Tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 1.314.930 jiwa, terdiri dari 811.988 laki-laki dan 502.942 perempuan. Tahun 2021, jumlah angkatan kerja meningkat kembali menjadi 1.339.128 jiwa, dengan rincian 829.713 laki-laki dan 509.415 perempuan. Selanjutnya pada Tahun 2022, mencatatkan jumlah tertinggi selama periode ini yaitu 1.435.635 jiwa, yang terdiri atas 887.055 laki-laki dan 548.580

perempuan. Tahun 2023, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja menjadi 1.318.915 jiwa, terdiri dari 819.261 laki-laki dan 499.654 perempuan. Kemudian pada Tahun 2024, angka angkatan kerja kembali meningkat menjadi 1.354.881 jiwa, dengan rincian 836.079 laki-laki dan 518.802 perempuan.

Secara umum, tren jumlah angkatan kerja menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, masuk ke pasar kerja.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, angka tahun 2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan kembali. Selama periode ini, jumlah angkatan kerja laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibanding perempuan.

Adapun Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2020-2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan kerja	1.314.930	1.339.128	1.435.635	1.318.915	1.354.881
	- Bekerja	1.167.849	1.185.623	1.298.537	1.202.485	1.254.571
	- Pengangguran	147.081	153.505	137.098	116.430	100.310
2	Bukan angkatan kerja	717.169	711.270	632.303	650.550	639.731
	- Sekolah	191.618	-	-	171.872	172.517
	- Mengurus rumah tangga	414.355	-	-	399.472	408.816
	- Lainnya	111.196	-	-	79.206	58.398

Sumber: *BPS Kota Bandung BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2024 dan LPPD 2024*

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.314.930 orang. Di tahun tersebut, jumlah pengangguran mengalami lonjakan signifikan menjadi 147.081 orang, yang berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 11,19%. Peningkatan ini mencerminkan dampak awal pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Tahun 2021 menunjukkan tren serupa dengan peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 1.339.128 orang. Jumlah pengangguran juga naik menjadi 153.505 orang, sehingga TPT meningkat menjadi 11,46%, tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.

Adapun pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah angkatan kerja yang mencapai 1.435.635 orang. Namun, jumlah pengangguran menurun menjadi 137.098 orang. Penurunan ini turut menurunkan TPT menjadi 9,55%, menandakan mulai membaiknya kondisi pasar kerja pascapandemi.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana TPT kembali menurun menjadi 8,83%. Jumlah pengangguran menurun ke angka 116.430, sementara jumlah angkatan kerja sedikit menurun menjadi 1.318.915 orang. Penurunan TPT ini mengindikasikan efisiensi dalam penyerapan tenaga kerja meskipun jumlah angkatan kerja mengalami penurunan tipis.

Selanjutnya pada tahun 2024, angka pengangguran terus menurun menjadi 100.310 orang, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1.354.881 orang. TPT pun turun signifikan menjadi 7,40%, merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan TPT secara konsisten sejak 2021 menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan Kota Bandung.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 64,71%, menunjukkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian penduduk usia kerja tidak aktif dalam kegiatan ekonomi.

Pada 2021, terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,6% menjadi 65,31%, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan pembukaan kembali sektor informal dan formal. Peningkatan ini masih terbatas karena ketidakpastian ekonomi yang masih terasa.

TPAK mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 69,42% atau mengalami peningkatan sebesar 4,11%, bersamaan dengan lonjakan jumlah angkatan kerja. Hal ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, didorong oleh mulai stabilnya kondisi ekonomi lokal dan nasional.

Namun, pada tahun 2023, TPAK mengalami penurunan sebesar 2,45% menjadi 66,97%, yang mengindikasikan adanya penurunan keterlibatan sebagian penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti pergeseran preferensi kerja, peningkatan pendidikan, atau migrasi.

Pada tahun 2024, TPAK kembali mengalami peningkatan sebesar 0,96% menjadi 67,93%, menandakan adanya perbaikan partisipasi tenaga kerja yang selaras dengan menurunnya angka pengangguran dan TPT. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang kembali aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Tabel di bawah memuat gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2.31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,71%	65,31%	69,42%	66,97%	67,93%

Sumber: *Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025*

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat pada setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp170.404,81 miliar dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp228.942,72 miliar.

Tabel 2.32. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	170.404,81	175.952,72	193.443,20	214.184,06	228.942,72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.718,52	1.773,40	1.896,47	2.282,41	2.548,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	31.282,32	31.720,68	32.228,18	34.533,33	37.638,48
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	72.270,25	78.265,04	81.615,31	89.038,88	90.589,16
Perubahan Inventori	4.737,34	(2.624,91)	1.528,25	1.303,36	884,45
Net Ekspor (Ekspor–Impor)	3.213,50	12.029,34	17.440,04	9.942,43	11.242,49
Produk Domestik Regional Bruto	**283.626,74**	**297.116,26**	**328.151,44**	**351.284,45**	**371.845,62**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023 dan Kota Bandung Dalam Angka 2022*

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang memberi gambaran tingkat inovasi Pemerintah Daerah yang penghitugannya dipublikasikan setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan metode penghitungan pada tahun 2020 dengan tahun-tahun berikutnya. Dari predikat dapat dilihat pada tabel di bawah, Indeks Inovasi Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 mencapai kategori Sangat Inovatif, sementara untuk tahun 2022 dan 2023 mendapat kategori Inovatif. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pada nilai Indeks Inovasi Daerah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 57,15 dengan kategori Sangat Inovatif.

Tabel 2.33. Indeks Inovasi Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	2.040	NA	51,27	49,14	57,15
	Sangat Inovatif	NA	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: *Kementerian Dalam Negeri, 2025*

3. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Fokus investasi Kota Bandung didorong untuk mendukung Kota Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Kota Bandung. Sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah industri kreatif (seperti *e-commerce*, iklan, fashion dan pakaian, desain, dll), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor Industrial, dan serta perdagangan.

Kota Bandung terus menunjukkan daya tariknya sebagai kota dengan potensi investasi diberbagai bidang/sektor. Kota Bandung didukung oleh proyek-proyek yang didanai baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Data jumlah proyek dan realisasi investasi ini penting untuk memahami bagaimana investasi PMDN dan PMA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan nasional. Data ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan investasi dan mengidentifikasi sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Berikut gambaran mengenai jumlah proyek dan jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Release Data Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN SeJawa Barat oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.34. Jumlah Proyek PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Proyek PMDN/PMA	1.468	3.530	3.854	12.342	20.060

Sumber: *Release Data Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN SeJawa Barat oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah proyek investasi PMDN dan PMA di Kota Bandung mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mencerminkan meningkatnya daya tarik investasi daerah ini. Pada tahun 2020, jumlah proyek tercatat sebanyak 1.468. Capaian ini terjadi di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai daerah.

Tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang cukup tajam, dengan jumlah proyek meningkat menjadi 3.530, atau tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung.

Pertumbuhan berlanjut di tahun 2022, dengan jumlah proyek investasi meningkat menjadi 3.854. Kenaikan ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi serta mulai membaiknya koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendukung iklim investasi.

Lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika jumlah proyek melonjak menjadi 12.342. Ini merupakan lompatan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan drastis ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan efisiensi perizinan, pemanfaatan sistem OSS (*Online Single Submission*), serta promosi investasi yang lebih agresif.

Pada tahun 2024, tren peningkatan masih berlanjut dengan jumlah proyek mencapai 20.060. Ini mencerminkan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menegaskan posisi Kota Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi yang dinamis dan kompetitif di Indonesia.

Tabel 2.35. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (miliar)	10.626	11.446	7.788	8.540	10.791

Sumber: *Release Data Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN SeJawa Barat oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2025*

Dalam periode lima tahun terakhir, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Bandung menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang signifikan, mencerminkan daya saing kota ini sebagai tujuan investasi di Indonesia.

Pada tahun 2020, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp10,63 triliun. Ini merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk penanaman modal.

Tahun 2021 mencatatkan peningkatan menjadi Rp11,45 triliun, menunjukkan mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan perekonomian Kota Bandung. Namun, pada tahun 2022, realisasi investasi mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp7,79 triliun. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penundaan proyek, penyesuaian regulasi, maupun faktor eksternal seperti kondisi global dan nilai tukar. Meskipun jumlah proyek investasi melonjak tajam pada tahun 2023, nilai realisasi investasi hanya sedikit meningkat menjadi Rp8,54 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak proyek yang masuk adalah proyek skala kecil hingga menengah, sehingga kontribusi nilai totalnya tidak sebanding dengan lonjakan jumlah proyek.

Selanjutnya pada tahun 2024, nilai realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp10,79 triliun, menunjukkan pemulihan optimistis dan konsistensi dukungan terhadap investor. Hal ini juga memperlihatkan pergeseran dari kuantitas proyek menuju kualitas dan nilai investasi yang lebih besar.

4. Indikator Kinerja Pariwisata

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kota Bandung, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Peranan pariwisata dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor pariwisata yang dapat dikategorikan sebagai sebuah industri yang dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi sebuah daerah. Indikator kinerja Pariwisata Kota Bandung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36. Indikator Kinerja Pariwisata Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	3.244.600	3.741.680	4.536.204	7.752.507	8.554.688
2	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,29	3,29	3,41	3,52	N/A*

Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2024 dan LKPJ Kota Bandung Tahun 2022-2024*

*Tidak dilakukan perhitungan karena tidak menjadi target di RPD dan Renstra

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bandung berjumlah 3.244.600 orang pada tahun 2020 yang menunjukkan terjadinya perlambatan dalam capaian kunjungan wisatawan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 mulai terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebagai dampak adanya relaksasi sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 3.741.680 orang dan kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan kembali Jumlah Kunjungan Wisatawan hingga menjadi 8.554.688 orang. Adapun Indeks Daya Saing Pariwisata pada tahun 2020 - 2021 mencapai nilai 3,29 yang selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 dengan nilai masing-masing sebesar 3,41 dan 3,52.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

4. Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Sesuai karakteristik Kota Bandung, maka yang dihitung hanya pilar Ekonomi. Nilai Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai 82,61.

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)1. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung *(indirect input)* di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Aktivitas investasi dalam perekonomian Kota Bandung memiliki peranan yang cukup signifikan, hal ini dapat diamati dari peranan komponen PMTB dalam perekonomian Kota Bandung. Komponen ini memiliki kontribusi kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2024 proporsi pengeluaran PMTB terhadap PDRB Kota Bandung mencapai 24,36 persen.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi perekonomian Kota Bandung. Dalam lima tahun terakhir, proporsi PMTB Bangunan mencapai sekitar 70 persen dari total PMTB. Sedangkan komponen Non Bangunan yang terdiri dari Mesin dan Perlengkapannya, Kendaraan, Peralatan lainnya, Tanaman Menghasilkan produk berulang, hewan menghasilkan berulang, Produk kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang tidak diproduksi mempunyai peranan antara 27 hingga 32 persen pada periode tahun 2020-2024.

Nilai PMTB atas dasar harga berlaku di tahun 2024 mencapai 90,59 triliun rupiah, yang terdiri dari 61,65 triliun rupiah PMTB bangunan dan 28,94 triliun rupiah PMTB non bangunan. Sedangkan jika didasarkan harga konstan nilai PMTB di tahun 2024 adalah sebesar 60.14 triliun rupiah.

Komponen PMTB di tahun 2024 tumbuh sebesar 5,72 persen, melambat dibanding tahun 2023 yang sebesar 6,47 persen. PMTB bangunan tumbuh 6,34 persen di tahun 2024, sedangkan PMTB non bangunan tumbuh sebesar 4,35 persen.

Tabel 2.37. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	72.270,25	78.265,04	81.615,31	89.038,88	90.589,16
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	49.976,88	52.725,06	53.426,25	56.883,72	60.135,50

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,48	26,34	24,87	25,35	24,36
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	52.219,64	55.983,66	57.595,99	61.674,94	61.645,31
persentase	72,26	71,53	70,57	69,27	68,05
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	20.050,61	22.281,37	24.019,32	27.363,94	28.943,85
persentase	27,74	28,47	29,43	30,73	31,95
Total PMTB (Miliar Rp)	72.270,25	78.265,04	81.615,31	89.038,88	90.589,16
persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan1 (%)					
a. Bangunan	-8,68	4,53	-0,37	5,11	6,34
b. Non Bangunan	-12,29	7,92	5,43	9,58	4,35
Total PMTB	-9,74	5,50	1,33	6,47	5,72

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Menurut Pengeluaran 2020-2024 yang dikelola dalam SIPD*
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor sebagai komponen pada PDRB Pengeluaran merupakan pengurangan antara nilai ekpor dengan nilai impor. Ekspor meliputi ekspor luar negeri, ekspor ke provinsi lain, dan ekspor antar kabupaten/kota. Demikian pula dengan impor. Sehingga nilai net ekspor merupakan pengurangan dari nilai total ekspor dengan nilai total impor.

Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keterbatasan data komponen ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi atau antar kabupaten/kota menggunakan metode estimasi, yaitu dengan metode Cross-Hauling. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor dan impor. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.38. Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.682,56	12.029,34	17.440,04	9.942,43	11.242,49
b. ADHK (Miliar Rp)	5.777,33	12.148,78	13.518,41	12.324,02	12.667,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,30	4,05	5,31	2,83	3,02

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Menurut Pengeluaran 2020-2024 yang dikelola dalam SIPD*
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor menjadi nilai ekspor dan nilai impor dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode Cross Hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

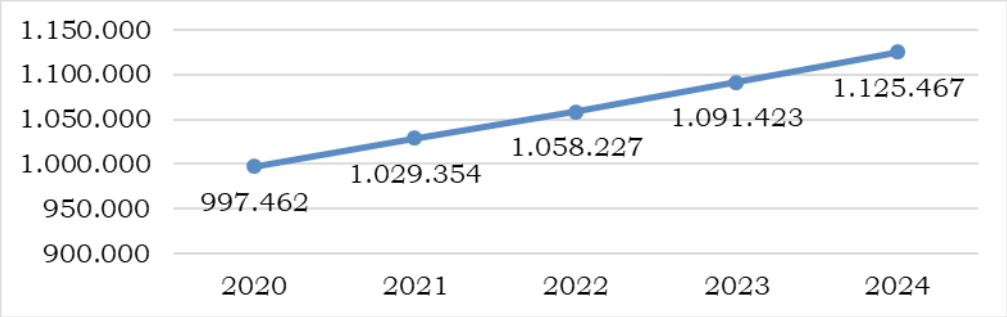
Pada tahun 2024 ini nilai nominal net ekspor atas dasar harga berlaku Kota Bandung bernilai positif, artinya nilai ekspor Kota Bandung lebih besar dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2024, nilai net ekspor Kota Bandung adalah 11,24 triliun rupiah atau 3,02 persen dari PDRB Kota Bandung. Bila dihitung berdasarkan harga harga konstan 2010 nilai net ekspor Kota Bandung tahun 2024 adalah sebesar 12,67 triliun rupiah.

2.1.3.5.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2024 sebanyak 1.125.467 pelanggan. Pelanggan listrik di Kota Bandung pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 128.005 pelanggan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 997.462 pelanggan. Adapun data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.36. Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 2020-2024



Sumber: *Kota Bandung Dalam Angka 2025 yang dikelola dalam SIPD*

2. Indeks Kota Layak *(Livable City Index)*

Livable City menggambarkan lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat untuk beraktivitas ditinjau dari aspek fisik (tata ruang, lingkungan, transportasi, infrastruktur utilitas) dan aspek non-fisik (pendidikan, kesehatan, ketentraman, sosial dan ekonomi). Indeks Livable City (ILC) adalah indikator yang digunakan mengetahui tingkat kenyamanan kota atas persepsi warga kotanya secara subjektif dan dibandingkan dengan data capaian kinerja objektif. *Livable City Index* Kota Bandung terdiri dari sembilan aspek dengan nilai sebagai berikut:

Berdasarkan data, diperoleh gambaran bahwa nilai *Livable City Index* (LCI) Kota Bandung tahun 2018 meningkat dari 7,5 ke 7,7 pada tahun 2019, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai Livable City Index (LCI) menjadi 7,46. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek transportasi, tata ruang, lingkungan dan keamanan. Sehubungan kondisi pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan dan refocusing anggaran menyebabkan survei Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur dengan target sebesar 7,625 poin pada tahun 2020 dan 7,775 pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya.

Hasil kajian terhadap Indeks *Livable City* tahun 2024 menunjukkan pencapaian 7,90. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan indikator subjektif dan objektif yang meliputi 9 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenteraman, sosial, tata ruang, lingkungan, transportasi, dan ekonomi. Nilai LCI pada tahun 2024 memiliki nilai yang sudah melampaui target dengan target nilai LCI berdasarkan RPD Kota Bandung tahun 2024-2026, yaitu 7.67.

Tabel 2.39. Livable City Index Tahun 2024

Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya			
Aspek	**Skor**	**Skor Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya**	**Target 2024**
Aspek Kesehatan	8,52	8,33	7,81
Aspek Pendidikan	8,58		
Aspek Ketenteraman	7,88		
Aspek Sosial	8,32		
Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur			
Aspek	**Skor**	**Skor Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur**	**Target 2024**
Aspek Tata Ruang	7,37	7,78	7,66
Aspek Lingkungan	8,2		
Aspek Transportasi	8,03		
Aspek Infrastruktur Utilitas	7,5		
Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi			
Aspek	**Skor**	**Skor Kelayakhunian Kota Aspek Ekonom**	**Target 2024**
Aspek Ekonomi	6,73	6,73	7,15

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung*

Hasil perhitungan nilai akhir LCI sangat dipengaruhi oleh nilai indikator objektif. Walaupun nilai kelayakhunian Kota Bandung sudah melampaui target, aspek-aspek penilaian yang digunakan, aspek aspek kelayakhunian Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai indikator objektif cenderung memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai indikator subjektif. Dalam arti lain, Masyarakat Kota Bandung masih memiliki harapan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelayakhunian Kota Bandung yang lebih baik. Dengan dihitungnya indeks ini, Pemerintah Daerah dapat menggunakan nilai untuk merencanakan langkah-langkah strategis sebagai Upaya untuk memperbaiki dan mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang nyaman.

Tabel 2.40. *Livable City Index* Tahun 2018-2024

No	ASPEK	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata Ruang	7,0	7,3	NA	NA	8,04	7,39	7,37
2	Lingkungan	7,1	7,4	NA	NA	6,60	6,51	8,2
3	Transportasi	6,6	6,7	NA	NA	7,64	8	8,03
4	Kesehatan	7,0	8,7	NA	NA	8,64	8,19	8,52
5	Pendidikan	7,0	8,8	NA	NA	7,69	7,77	8,58
6	Infrastruktur-Utilitas	8,8	7,9	NA	NA	7,53	8,33	7,5
7	Ekonomi	8,0	7,5	NA	NA	6,96	8,24	6,73
8	Keamanan	7,9	7,4	NA	NA	6,68	7,02	7,88
9	Sosial	7,9	7,5	NA	NA	7,41	7,98	8,32
	***Livable City* Index**	**7,5**	**7,7**	NA	NA	**7,46**	**7,71**	**7,90**

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung*

Tingkat capaian *Livable City Index (LCI)* dari tahun 2018-2024 mengalami peningkatan dari skor 7,5 menjadiskor 7,9, hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan skor 7,46. Pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan perhitungan skor LCI, karena tidak teranggarkan perangkat daerah terkait.

3. Cakupan Pelayanan Air Minum

Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Bandung pada tahun 2024 sebesar 91,68%, yaitu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 91,3% maka capaian ini meningkat 0,38%. Pada tahun 2024 mengalami penambahan sebanyak 6.657 Sambungan Baru yang terdiri dari Sambungan Baru Perpipaan sebanyak 4.597 Sambungan Perpipaan atau 69,05% dengan akumulasi sambungan langganan (SL) hingga tahun 2024 sebanyak 170.119 SL. Sedangkan untuk Non Perpipaan sebanyak 2.060 Sambungan Rumah atau 30,95%.

Gambar 2.37. Capaian Pelayanan Air Bersih di Kota Bandung Tahun 2020-2024

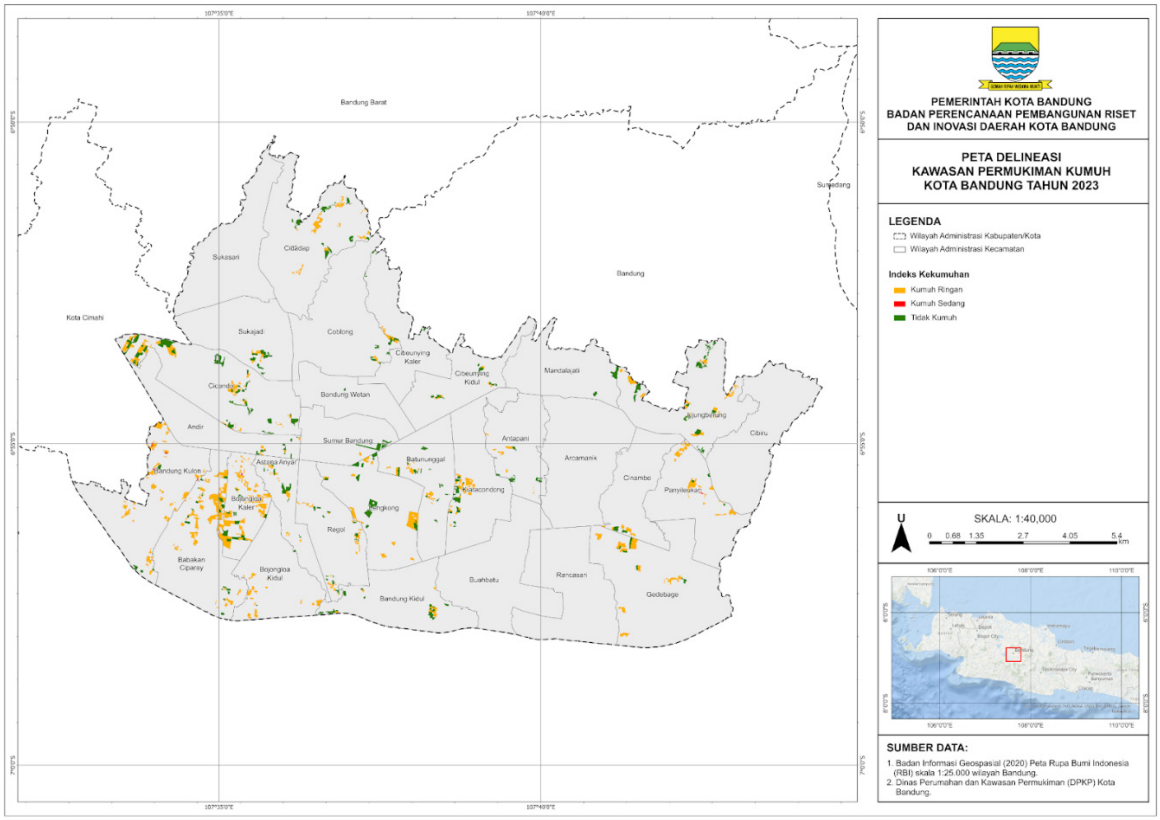


Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun 2020-2024*

4. Persentase Kepala Keluarga MBR yang menempati hunian yang layak

Indikator Kinerja Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak pada tahun 2024 tercapai sebesar 86,59% dengan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.036 unit yang terdiri dari 1.888 unit dengan pendanaan berasal dari APBD Kota Bandung, 100 unit dari APBD Provinsi Jabar dan 48 unit bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan asumsi 1 (satu) kepala keluarga MBR menempati 1 (satu) unit hunian yang layak, maka jumlah kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak pada tahun 2024 sama dengan jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Data eksisting jumlah rumah layak huni pada akhir tahun 2023 sebanyak 85.298 unit, diperoleh total jumlah rumah layak huni sebanyak 87.334 unit. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah kepala keluarga MBR di Kota Bandung adalah sebanyak 100.861 kepala keluarga sehingga persentase kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak dapat dihitung sebesar 86,59%.

Gambar 2.38. Peta Kawasan Kumuh per Kelurahan di Kota Bandung



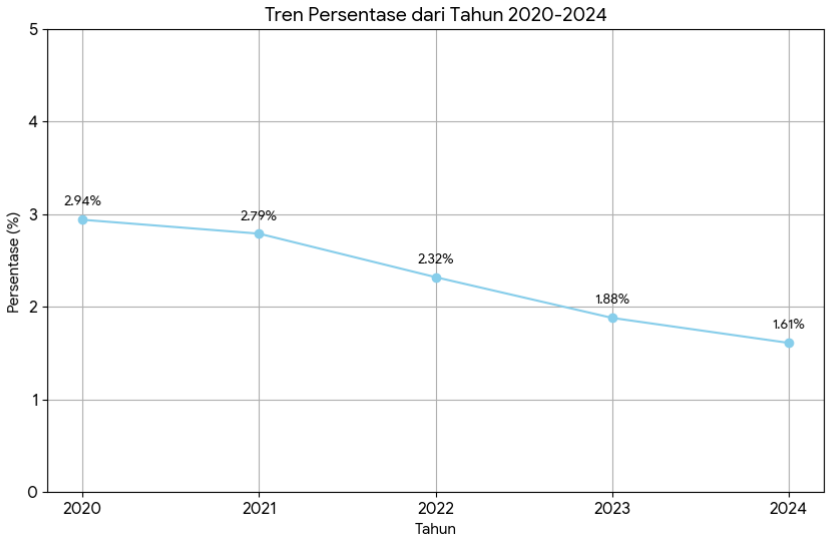
Sumber: *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023*

Wilayah kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung menyebutkan bahwa terdapat sebaran kawasan permukiman kumuh di 25 kecamatan, 63 kelurahan, dan 251 RW dengan total luas 491,9459 ha. Terdapat tiga kategori permukiman yang bisa disebut kumuh, yaitu kumuh berat, kumuh ringan, dan kumuh sedang.

Di Kota Bandung sudah tidak terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai kategori kumuh berat, yang ada hanya kumuh sedang dan kumuh ringan.

Penurunan luasan Kawasan kumuh di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.39. Grafik Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Kota Bandung (%)



Sumber: *DPKP Kota Bandung, diolah 2024*

Banyak kawasan kumuh di Bandung mengalami kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.

Faktor pertumbuhan penduduk yang terus bertambah berdampak pada kebutuhan rumah yang terus meningkat. Berbagai fungsi yang diemban Kota Bandung yaitu sebagai ibukota provinsi, kota Pendidikan, kota jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan akan kebutuhan rumah yang layak huni. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni juga dijadikan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bandung.

Perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41. Perbaikan Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2020-2024

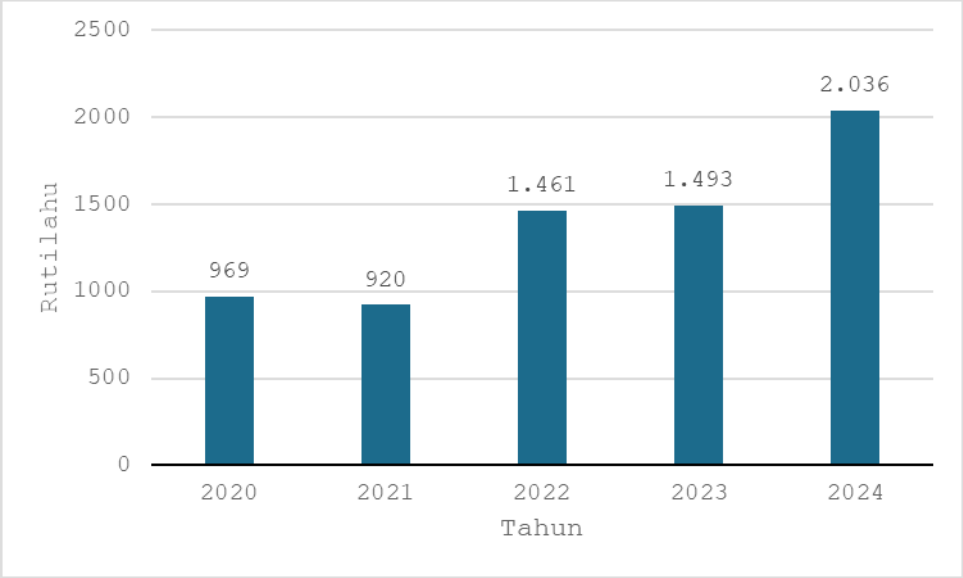
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	969	920	1.461	1.493	2.036

Sumber: *DPKP Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, 2024*

Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.036 unit yang terdiri dari 1.888 unit dari APBD Kota Bandung, 100 unit dari APBD Provinsi Jabar dan 48 unit bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan asumsi 1 (satu) kepala keluarga MBR menempati 1 (satu) unit hunian yang layak, maka jumlah kepala keluarga MBR menempati hunian yang layak di luar kawasan kumuh pada tahun 2024 sama dengan jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahunnya. Adapun perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.40. Perbaikan Rumah Layak Huni Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *DPKP Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Jumlah unit rutilahu yang diperbaiki dari tahun 2019-2024 mengalami tren yang beragam, berdasarkan data pengajuan keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung yaitu sebanyak 100.861 MBR. Perbaikan rumah tidak layak huni pada bagan diatas dicapai melalui sinergitas pembiayaan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, namun perbaikan MBR tidak disetujui apabila keluarga MBR tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan yang sah seperti bukti kepemilikan lahan atau sertifikat hak milik.

Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kawasan kumuh, selama kurun waktu 2024, Pemerintah Daerah telah membangun sarana air bersih sebanyak 2.060 SR (Sambungan Rumah) pada 103 lokasi, diantaranya sebanyak 240 SR pada 12 lokasi di kawasan kumuh, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dan Pekerjaan Pembangunan Septic Tank Individual pada Program Kawasan Permukiman yang terlaksana sebanyak 121 unit (296 SR) pada 58 lokasi, dimana sebanyak 141 SR pada 27 lokasi di 8 kelurahan berada pada kawasan kumuh, memperbaiki 150 ruas jalan lingkungan dimana 21 lokasi berada pada kawasan kumuh dan melakukan perbaikan terhadap drainase lingkungan sebanyak 116 lokasi dimana 19 lokasi diantaranya pada kawasan kumuh. Berdasarkan pencapaian penurunan luasan Kawasan kumuh di Kota Bandung, kinerja penurunan luasan Kawasan kumuh telah baik karena luasan Kawasan kumuh cenderung menurun setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Persentase luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau Kota

Bandung sampai tahun 2024 melalui serah terima PSU seluas 111.817,15 m^2 atau 11,18 Ha; pembangunan taman RW seluas 945 m^2 (0,094 Ha); pengadaan lahan untuk taman bermain dan RTH seluas 5.638 m^2 (0,56 Ha); pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyiangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal pemakaman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 35% dari luas areal pemakaman; serta PSU dari pemeliharaan taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota sebesar 26,38%.

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Tingkat Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan mempengaruhi kemampuan terhadap daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan harga barang dan jasa. Tingkat inflasi Kota Bandung selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu 2020–2024 tercatat angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,45% atau naik sebesar 5,80% di bandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat inflasi terrendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,63% atau turun sebesar 5,82%. Pada tahun 2024 angka inflasi menjadi 1,61%, angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 2.42. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2020-2024

Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	1,75	1,65	7,45	0,63	1,61
Provinsi Jawa Barat	2,18	1,74	6,04	2,48	1,64
Nasional	1,68	1,75	5,51	2,61	2,26

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2025 dan LKPJ Tahun 2024*

Melihat perbandingan tingkat inflasi di level nasional dan regional Jawa Barat, pada tahun 2024 Kota Bandung memiliki nilai inflasi yang jauh lebih rendah dibandingkan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

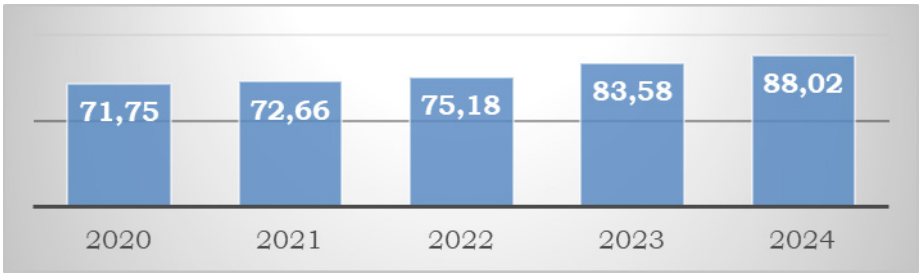
1. Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan Indeks Reformsi Kota Bandung menunjukkan peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 memperoleh Nilai 88,02 dengan kategori A-. Capaian tersebut diperoleh dari Penilaian Reformasi Birokrasi General dengan nilai 75,81, dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan Nilai 12,21 yang merupakan akumulatif dari 5 (lima) Tema yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Penanggulangan Stunting, Peningkatan Penggunaan PDN dan Pengendalian Inflasi.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 83,58 dengan Katagori A-, secara agregat nilai mengalami kenaikan sebesar 4,44 poin. Adapun perkembangan nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Bandung disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.41. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *KemenPANRB, tahun 2019 sampai dengan 2024*

Hasil evaluasi tahun 2023 dan 2024 tidak dapat dibandingkan dengan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dan 2024 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.43. Perbandingan Hasil Evaluasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Penilaian	Bobot	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Komponen Pengungkit**						
	I. Pemenuhan	20,00	13,70	14,26	14,64	N/A	N/A
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,65	6,82	7,32	N/A	N/A
	III. Reform	30,00	17,39	19,62	20,00	N/A	N/A
	Total Komponen Pengungkit	**60**	**37,65**	**40,70**	**41,96**	N/A	N/A
B	**Komponen Hasil**					N/A	N/A
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,46	8,53	8,61	N/A	N/A
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,05	8,64	9,60	N/A	N/A
	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,65	8,18	8,41	N/A	N/A
	Kinerja Organisasi	10,00	6,96	6,51	6,60	N/A	N/A

No	Penilaian	Bobot	2020	2021	2022	2023	2024
	Total Komponen Hasil	**40,00**	**34,10**	**31,96**	**33,22**	N/A	N/A
C	**RB General**	**100**	N/A	N/A	N/A	**69,72**	**75,81**
D	**RB Tematik**	**20**	N/A	N/A	N/A	**13,86**	**12,21**
E	**Indeks RB**	**120**	**71,75**	**72,66**	**75,18**	**83,58**	**88,02**
	Predikat		**BB**	**BB**	**BB**	**A-**	**A-**

Sumber: *KemenPANRB, 2025*

2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja AKIP Kota Bandung pada tahun 2021 berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Maret 2022 Nomor: B/294/AA.05/2021 Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memperoleh nilai 79,01 atau predikat BB mengalami peningkatan sebesar 0,04 dari capaian pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022-2024 nilai AKIP Kota Bandung mengalami perbaikan dengan memperoleh predikat A.

Tabel 2.44. Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,39	25,27	30	23,32	23,33	23,41
2	Pengukuran Kinerja	25	18,60	18,67	30	24,42	24,45	24,52
3	Pelaporan Kinerja	15	11,78	11,91	15	11,88	11,93	12,10
4	Evaluasi Kinerja	10	7,74	7,56	25	20,5	20,85	21,37
5	Capaian Kinerja	20	15,45	15,60	-	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**78,97**	**79,01**	**100**	**80,12**	**80,56**	**81,40**
	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**		**A**	**A**	**A**

Sumber: *Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEMENPANRB dan LKPJ Kota Bandung TA 2022-2024*

3. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai EPPD tahun 2020 dan 2021 terhadap LPPD tahun 2019 dan 2020 tidak dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk Nilai EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang dikeluarkan nilainya tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor:100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023.

EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Piagam Penghargaan tanggal 25 April 2020 adalah sebesar 3.4013 dengan Kategori Sangat Tinggi. Capaian ini sesuai dengan target tahun 2020 atau capaian kinerja sebesar 100,00%, dan berada pada kategori Sangat Tinggi bila dibandingkan capaian Tahun 2019 dengan nilai 3.3019. Pada tahun 2022 nilai EPPD mengalami penurunan menjadi 2.44 dari target 3.4033 atau kinerja penurunannya sebesar 71,70 Persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai EPPD mengalami kenaikan menjadi 3.3362. Nilai ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2021 yakni sebesar 2,44. Sedangkan Hasil PPD tahun 2024 belum diterbitkan.

4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pemerintah Daerah telah berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30. Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kota Bandung adalah minimal 85,00.

Adapun Nilai IKM Kota Bandung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45. Nilai IKM Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	96,67	68,33	90	100	100

Sumber: *LKIP Kota Bandung TA 2022-2024 yang dikelola dalam SIPD, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, pengukuran IKM untuk tahun 2024 yaitu persentase Perangkat Daerah/Instansi dengan Nilai Indeks Kepuasan "Baik" ditargetkan sebanyak 100% dengan indeks pelayanan publik perangkat daerah kategori baik (minimal 85) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah/Instansi. Sedangkan berdasarkan data IKM Semester II tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 yaitu sebanyak 60 dari 60 Perangkat Daerah sehingga mencapai target sebesar 100,00%.

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dan terdiri dari 9 unsur: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan. Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut sarana dan prasarana.

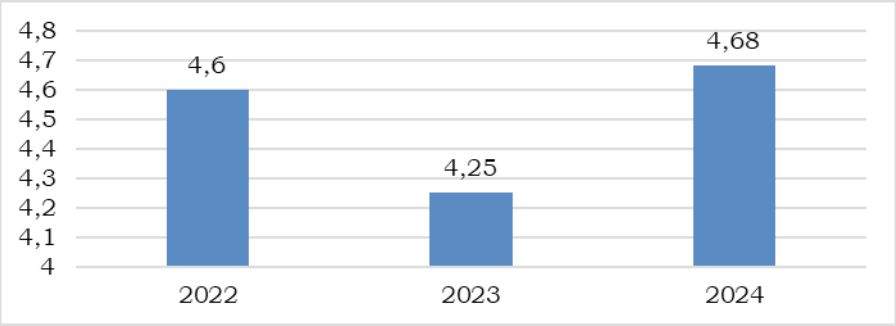
5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana

Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Data menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kota Bandung dari tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan. Walau demikian, capaian tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 4,68. Nilai ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 4,76.

Gambar 2.42. Indeks Pelayanan Publik Kota Bandung Tahun 2022-2024



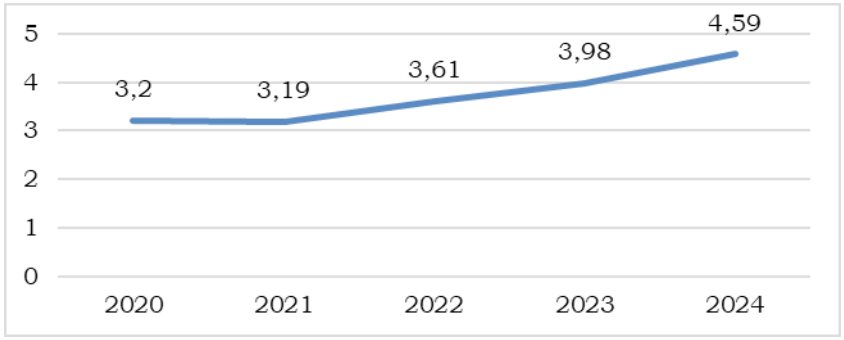
Sumber: *LKPJ Kota Bandung Tahun 2022-2024*

6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024, Indeks SPBE Kota Bandung menunjukkan kecenderungan peningkatan walaupun tahun 2021 empat mengalami penurunan. Jika tahun 2020 nilai Indeks SPBE sebesar 3,2 maka tahun 2024 mencapai 4,59 dengan kategori Memuaskan. Capaian indeks SPBE yang meningkat menunjukkan semakin baiknya tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan di Pemerintah Daerah.

Gambar 2.43. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024



Sumber: *LKjIP Kota Bandung Tahun 2020-2024*

Rincian masing-masing aspek SPBE tahun 2021 sampai 2024 dimuat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Rincian Aspek dalam Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024

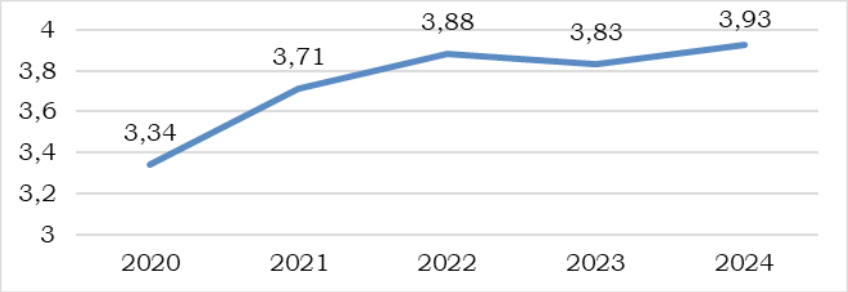
Aspek SPBE	Bobot	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Domain Kebijakan SPBE	**13**	**3,78**	**2,7**	**4,10**	**4,50**	**5**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13	3,78	2,7	4,10	4,50	5
Domain Tata Kelola SPBE	**25**	**2,71**	**3,1**	**3,00**	**3,80**	**4,8**
Perencanaan Strategis SPBE	10	2,5	2,75	2,75	3,75	4,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	3,33	3	2,50	3,50	5
Penyelenggara SPBE	5	2	4	4,50	4,50	5
Domain Manajemen SPBE	**16,5**	**-**	**1,27**	**2,55**	**3,09**	**4,18**
Penerapan Manajemen SPBE	12	-	1,25	2,50	3,13	4,88
Audit TIK	4,5	-	1,33	2,67	3,00	2,33
Domain Layanan SPBE	**45,5**	**4,52**	**4,07**	**4,20**	**4,26**	**4,51**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5	4,17	4,00	4,00	4,10	4,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18	4,17	4,17	4,50	4,50	4,83
Indeks SPBE		**3,11**	**3,19**	**3,61**	**3,98**	**4,59**
Predikat SPBE		**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Memuaskan**

Sumber: *Diskominfo Kota Bandung, 2025*

7. Tingkat Kematangan *Smart City*

Selain Indeks SPBE, terdapat indikator Berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 tahun 2023 pada Gambar 10 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Aplikasi Informatika ditemukan bahwa level kematangan *smart city* Kota Bandung tahun 2023 adalah 3,83 atau Predikat A. Bila dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 3,88 dengan predikat A atau terdapat penurunan sebesar 0,05. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan raihan opini BPK Kota Bandung dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022, menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2023. Namun pada tahun 2024, Tingkat Kematangan Smart City Kota Bandung meningkat menjadi 3,93. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Bandung mampu mengolah kegiatan antar perangkat daerah secara tertib dan benar.

Gambar 2.44. Evaluasi Kematangan *Smart City* Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *Diskominfo Kota Bandung, 2025*

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

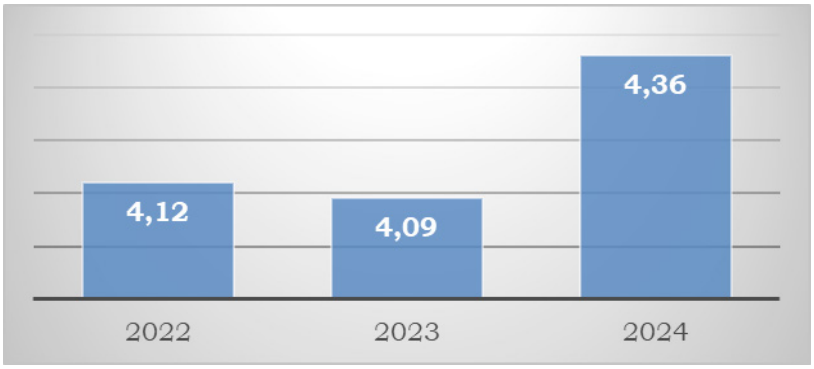
Indeks Daya Saing Daerah Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai 4,12, merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Capaian IDSD Kota Bandung berada diatas IDSD Jawa Barat dan nasional yang masing-masing sebesar 3,64 dan 3,26. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Bandung menjadi 4,09. Walaupun mengalami sedikit penurunan, namun capaian ini tetap menempatkan Kota Bandung di posisi pertama. Bahkan capaian Kota Bandung lebih tinggi dibanding Indeks Daya Saing Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 2024 IDSD Kota Bandung mencapai 4,36, yang berarti meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, posisi IDSD Kota Bandung tetap menempati posisi tertinggi di Jawa Barat, dan lebih tinggi dari UDSD provinsi dan nasional.

Pencapaian ini didukung oleh indikator-indikator yang terbagi kedalam 12 pilar. Nilai tertinggi ada pada Pilar 7 dan Pilar 10. Pilar 7 Pasar Produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Keterbukaan pasar tercermin dari daya saing usaha kecil dan menengah terhadap usaha skala lebih besar. Keterbukaan pasar produk mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing bisnis di suatu wilayah. Sedangkan Pilar 10 Ukuran Pasar

berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dengan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan keekonomian skala secara optimal. Ukuran pasar yang luas dapat meningkatkan produktivitas bisnis melalui optimalisasi keekonomian skala. Pilar lain yang cukup tinggi adalah Pilar 2 Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengukur sejauh mana pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan di suatu daerah.

Gambar 2.45. Indeks Daya Saing Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024



Sumber: *BRIN, 2025*

2. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Paada bagian ini memuat kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci IIKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Pencapaian indikator masing-masing urusan menggambarkan cakupan dan mutu pelayanan setiap urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dari data di bawah, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2024 penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagian telah cukup baik, namun tidak dipungkiri masih terdapat beberapa urusan yang masih perlu upaya besar untuk memberikan layanan lebih baik. Adapun capaian IKK selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	89,89	70,31	86,09	86,24	91,60	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	92,21	88,57	96,52	97,29	98,20	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	87,86	87,44	94,70	94,44	96,82	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	91,29	Dinas Pendidikan
	KESEHATAN							
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		0,28	0,27	0,24	2,64	2,61	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	88,89	86,49	89,47	92,68	97,61	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	84,73	89,07	95,48	100	97,57	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	84,02	87,82	99,60	100	92,75	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	81,81	88,40	99,12	100	95,32	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	46,85	56,72	91,70	100	99,91	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	36,22	55,10	67,27	77,53	82,12	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	6,89	19,74	88,77	78,67	43,50	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	31,85	47,08	89,08	59,41	60,91	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	18,99	19,78	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	115,35	92,78	98,70	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	92,23	94,72	98,93	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Persen	83,89	92,02	97,63	97,64	100	DSDABM
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DSDABM
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	83,01	79,24	83,01	82,13	90,81	DPKP
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	70,51	77,05	78,56	93,21	85,13	DPKP
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Persen	100	100	43,01	89,23	86,61	DISCIPTABINTAR
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	91,87	94,81	94,00	95,28	95,01	DSDABM
7	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	43,48	43,48	52,00	88	100	DSDABM DAN DISCIPTABINTAR
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	DSDABM DAN DISCIPTABINTAR
	PERUMAHAN RAKYAT							

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	DPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	80,28	100	100	100	DPKP
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	10,33	6,89	19,49	36,61	51,83	DPKP
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,17	1,15	0,87	0,67	0,65	DPKP
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	DPKP
	TRANTIBUMLINMAS							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	11.206	608.187	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggualangan Bencana
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	16.737	608.187	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggualangan Bencana
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	167	1.456	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggualangan Bencana
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	N/A	100	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggualangan Bencana
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	14 Menit 22 Detik	14,10	14,10	12,10	11,08	Dinas Kebakaran dan Penanggualangan Bencana

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	4,82	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	9,13	9,82	13,10	29,50	64,14	Dinas Ketenagakerjaan
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Tenaga Kerja	165.385.208,19	169.036.877,66	162.688.224,87	184.589.713,10	18575943 7,27	Dinas Ketenagakerjaan
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	73,81	68,04	67,64	72,31	2,230	Dinas Ketenagakerjaan
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	58,44	47,13	59,73	62,09	62,34	Dinas Ketenagakerjaan
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	7,48	18,71	2,08	16,61	17,04	DP3A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0,02	0,02	100	100	100	DP3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,01	14,11	0,02	18,18	15,38	DP3A

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PANGAN							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	134,29	111,79	27,07	33,33	262,97	DKPP
	PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	93,74	99,88	95,16	DISCIPTABINTAR
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	DPKP
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	100	100	93,74	99,88	95,16	DISCIPTABINTAR
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	100	100	100	DPKP
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	100	100	100	100	DPMPTSP
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	DPKP
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	43,90	53,84	55,70	56,32	57,16	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Persen	98,33	98,50	98,69	98,58	99,2	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	29,23	19,30	2,84	3,42	6,83	Dinas Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,63	99,24	97,64	97,77	100	DISDUKCAPIL
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	23,43	36,52	42,54	50,02	58,78	DISDUKCAPIL

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,02	95,27	94,18	97,12	96,91	DISDUKCAPIL
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	51,66	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	100	N/A	0	0	BAGTAPEM
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	0	100	N/A	0	0	BAGTAPEM
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,87	1,96	1,83	1,83	1,83	DPPKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,99	77,91	62,22	66,61	68,19	DPPKB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13,28	12,74	4,50	14,39	10,28	DPPKB
	PERHUBUNGAN							
1	Rasio konektivitas	Poin	84,61	84,62	84,62	85,00	85,00	Dinas Perhubungan
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Poin	0,34	0,43	0,65	0,61	0,69	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	95	1,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	10,98	29,45	74,63	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,05	100	88,21	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	KOPERASI DAN UKM							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	3,99	70,59	72,22	72,29	72,43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100	100	13,62	21,45	22,96	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Persen	116,49	7,73	-31,96	9,65	0,367	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,72	0,87	4,59	4,94	6,29	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	88,35	85,54	83,23	93,39	85,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	tidak ada kegiatan porda/ event Olahraga	194	117	94	298	Dinas Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	78	66,51	72,40	50,54	91,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	N/A	N/A	46,67	54,97	55,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	N/A	N/A	81,38	86,70	87,78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	62,49	83,77	92,33	94,60	92,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	78	87,83	90,83	93,00	92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	321906,21	899,97	100	101,32	101,32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-88.05	23,86	9,69	3,45	3,45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	-60,50	15,24	31,63	17,82	17,82	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	38,2	34,37	65,01	68,19	68,19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2288531913	11,4	0,21	4,72	4,72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	391.887.844.961	15,76	25,67	27,80	27,81	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	68,23	688,9	7,04	704,81	704,81	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	Tidak ada penambahan kasus	Tidak ada penambahan kasus	Terjadi kenaikan 2 kasus baru muncul	100	Tidak ada penambahan kasus	Dinas Pangan dan Pertanian
	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	88,98	66,90	86,59	64,35	56,62	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	72,17	83,99	92,55	78,29	81,41	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,42	1,81	0,80	4,47	34,5	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	100	100	100	107,68	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	25	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	Ada	Ada	125	100	125	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	UNSUR PENUNJANG							
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	17,46	17,45	16,74	15,39	15,1	BKAD
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	36.57	37.61	43.01	41.12	43.22	BKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	0	3	3	2	INSPEKTORAT
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	INSPEKTORAT
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	33,26	79,85	80,35	80,5	81,86	BKAD
6	Opini Laporan Keuangan		Ada	3	4	4	4	BKAD
	PENGADAAN							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	N/A	0	0	0	0	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	1,04	3,10	1,51	1,75	23,01	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	33,95	15,32	52,39	56,99	42,67	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	N/A	N/A	38.94	87,4	14,22	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	192,88	266,22	274,69	75,61	76,83	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,73	9,96	17,24	19,08	21,11	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,73	11,06	66,30	78,34	84,81	BKPSDM
	MANAJEMEN KEUANGAN							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-15.33	-13.01	-12.72	-13.71	-12.82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	91,11	8,85	40,01	32,1	25,07	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3	Assets Management		Ada	4	4	4	4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	3,66	9,46	10,54	11,33	11,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	85,7	86,98	87,34	100	87,18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2020 sampai tahun 2024*

2.1.5. Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Bandung tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang cukup positif dengan capaian tinggi di berbagai sektor pelayanan dasar. Penerapan SPM ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang bertujuan untuk menjamin layanan dasar yang merata kepada masyarakat, mengalokasikan anggaran secara lebih terukur, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam implementasinya, SPM di Kota Bandung mencakup enam bidang utama dengan target pencapaian 100% di setiap sektor. Bidang tersebut terdiri dari:

1. Bidang pendidikan secara spesifik telah mencapai realisasi sebesar 99,26%, yang terdiri dari pendidikan dasar usia dini (99,39%), pendidikan dasar sebesar 99,60% dan 98,81% untuk pendidikan kesetaraan. Meskipun hasilnya hampir mencapai target, tantangan masih ditemukan dalam akses layanan bagi PAUD dan pendidikan kesetaraan.
2. Bidang kesehatan terdiri dari berbagai layanan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif, kesehatan usia lanjut, serta pengobatan penyakit tertentu dengan total pencapaian 98,34%, meskipun terdapat tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan spesifik seperti ahli gizi dan tenaga farmasi.
3. Bidang pekerjaan umum, kebutuhan pokok air minum dan layanan pengolahan air limbah domestik telah tercapai 100%, meskipun keberlanjutan layanan dan pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi perhatian.
4. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan program relokasi juga telah mencapai target 100%, namun masih diperlukan strategi pencegahan perumahan tidak layak huni di masa mendatang.
5. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, layanan tanggap bencana, ketertiban umum, serta penyelamatan korban bencana telah memenuhi target, meskipun peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana masih menjadi tantangan.
6. Bidang sosial mengenai jenisa layanan SPM rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia, dan tuna sosial telah mencapai 100%, namun perlu diperhatikan kesinambungan program dan cakupan layanan yang lebih luas.

Meskipun capaian SPM di Kota Bandung tergolong tinggi, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan

layanan. Distribusi tenaga medis menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pemenuhan tenaga gizi, farmasi, dan laboratorium medis di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu kualitas infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi masih memerlukan pemeliharaan jangka panjang agar tetap optimal. Beberapa sektor seperti pendidikan kesetaraan dan layanan kesehatan khusus juga masih memiliki sedikit kesenjangan dalam cakupan penerima manfaat. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih dinamis untuk menjamin efektivitas layanan serta meningkatkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Realisasi target pencapaian 6 (enam) bidang SPM yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

1. Bidang Pendidikan

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48. Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					**99,26%**
1	**PENDIDIKAN DASAR USIA DINI**					**99,39 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
Jumlah yang harus dilayani:			51.300	51.300	0	100,00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						**19,39 %**
Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Satuan**	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**96,93 %**
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	79,21	20,79	79,21 %
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	85,96	85,97	0.01	100,00 %
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	78,30	74,03	4,27	94,55 %
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	81,91	80,81	1,1	98,66 %
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	8,25	8,25	0	100.00 %
	6. Indeks distribusi guru	%	23,08	23,08	0	100,00 %
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	0,36	0,36	0	100,00 %
	8. Proporsi PTK penggerak	%	62,09	62,09	0	100,00 %
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	1,79	1,79	0	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	**PENDIDIKAN DASAR**					**99,60 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
Jumlah yang harus dilayani:			325.166	325.166	0	100,00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19,60 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**97,98 %**
	SD					**97,92 %**
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	96,07	3,93	96,07 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99,10	0,9	99,10 %
	3. Kemampuan literasi	%	71,50	70,82	0,68	99,05 %
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	52,72	51,35	1,37	97,40 %
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,18	2,18	0	100,00 %
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	2	2	0	100,00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	79,76	74,53	5,23	93,44 %
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,27	73,84	2,43	96,81 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	%	62,38	56,84	5,54	91,12 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	23,09	23,09	0	100,00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0,34	0,34	0	100,00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	39,98	39,98	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	2,03	2,03	0	100,00 %
	SMP					**98,03 %**
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	103,45	-3,45	100.00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	97,86	2,14	97,86 %
	3. Kemampuan literasi	%	80,01	79,84	0,17	99,79 %
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	75,65	68,73	6,92	90,85 %
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,45	5,45	0	100,00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100,00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	78,93	74,15	4,78	93,94 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77,87	74,95	2,92	96,25 %

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	9. Indeks iklim inkusivitas	%	62,60	59,89	2,71	95,67 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	5,04	5,04	0	100,00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0,35	0,35	0	100,00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	46,54	46,54	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,77	0,77	0	100,00 %
3.	**PENDIDIKAN KESETARAAN**					**98,81 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
Jumlah Yang Harus Dilayani:			7.683	7.683	0	100,00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						**18,81 %**
Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Satuan**	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**94,04 %**
	1. Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100,00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	22,57	77,43	22,57 %
	3. Kemampuan literasi	%	65,05	65,05	0	100,00 %
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	54,71	54,71	0	100,00 %
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	1,86	1,86	0	100,00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,28	1,28	0	100,00 %
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	69,25	69,25	0	100,00 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62,07	62,07	0	100,00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56,45	56,45	0	100,00 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100,00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00 %

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.49. Target SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**%**	**99,26%**						
1.	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**%**	**99,39 %**						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**%**	**80,00 %**						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah yang harus dilayani:		Orang	51.300	51.412	51.550	51.650	51.800	51.920	52.000
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**%**	**19,39 %**						
Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		**%**	**96,93 %**						
	1. Angka partisipasi sekolah	%	79,21	68,53	71,56	74,60	77,64	80,86	83,65
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	85,97	75,06	75,47	75,88	76,29	76,70	77,11
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	74,03	-	-	-	-	-	-
	4. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	-	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72	95,22
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	80,81	-	-	-	-	-	-
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	8,25	-	-	-	-	-	-
	7. Indeks distribusi guru	%	23,08	-	-	-	-	-	-
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	0,36	-	-	-	-	-	-
	9. Proporsi PTK penggerak	%	62,09	-	-	-	-	-	-
	10. Pengalaman pelatihan guru	%	1,79	-	-	-	-	-	-
2.	**PENDIDIKAN DASAR**	**%**	**99,60 %**						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**%**	**80,00 %**						
Jumlah yang harus dilayani:		Orang	325.166	325.807	217.240	326.258	326.625	326.825	327.025
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**%**	19,60 %						
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**%**	**97,98 %**						
	SD	**%**	**97,92 %**						
	1. Angka partisipasi kasar	%	96,07	-	-	-	-	-	-
	2. Angka partisipasi sekolah	%	99,10	99,49	99,70	99,79	99,79	99,79	99,79
	3. Kemampuan literasi	%	70,82	73,35	75,85	78,35	80,85	83,35	85,85
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	51,35	61,02	63,92	66,82	69,72	72,62	75,52

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,18	-	-	-	-	-	-
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	2	-	-	-	-	-	-
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,53	77,15	78,05	78,95	79,85	80,75	81,65
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,84	74,60	75,60	76,60	77,60	78,60	79,60
	9. Indeks iklim inklusivitas	%	56,84	62,52	65,02	67,52	70,02	72,52	75,02
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	23,09	-	-	-	-	-	-
	11. Indeks distribusi guru	%	0,34	-	-	-	-	-	-
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	39,98	-	-	-	-	-	-
	13. Proporsi PTK penggerak	%	2,03	-	-	-	-	-	-
	SMP	**%**	**98,03 %**						
	1. Angka partisipasi kasar	%	103,45	-	-	-	-	-	-
	2. Angka partisipasi sekolah	%	97,86	99,59	99,76	99,83	99,83	99,83	99,83
	3. Kemampuan literasi	%	79,84	83,15	84,25	85,35	86,45	87,55	88,65
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	68,73	71,21	72,71	74,21	75,71	77,21	78,71
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,45	-	-	-	-	-	-
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	-	-	-	-	-	-
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,15	76,46	77,96	79,46	80,96	82,46	83,96
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,95	74,35	75,35	76,35	77,35	78,35	79,35
	9. Indeks iklim inkusivitas	%	59,89	64,88	67,28	69,68	72,08	74,48	76,88
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	5,04	-	-	-	-	-	-
	11. Indeks distribusi guru	%	0,35	-	-	-	-	-	-
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	46,54	-	-	-	-	-	-
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,77	-	-	-	-	-	-
3.	**PENDIDIKAN KESETARAAN**	**%**	**98,81 %**						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**%**	**80.00 %**						
Jumlah yang Harus Dilayani:		Orang	7.683	7.693	7.700	7.755	7.775	7.795	10.000

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**%**	**18,81 %**						
Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**%**	**94,04 %**						
	1. Angka partisipasi kasar	%	0	-	-	-	-	-	-
	2. Angka partisipasi sekolah	%	22,57	31,58	36,55	41,53	46,51	51,49	56,46
	3. Kemampuan literasi	%	65,05	-	-	-	-	-	-
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	54,71	-	-	-	-	-	-
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	1,86	-	-	-	-	-	-
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,28	-	-	-	-	-	-
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	69,25	-	-	-	-	-	-
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62,07	-	-	-	-	-	-
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56,45	-	-	-	-	-	-
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	-	-	-	-	-	-
	11. Indeks distribusi guru	%	0	-	-	-	-	-	-
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	-	-	-	-	-	-
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0	-	-	-	-	-	-

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

2. Bidang Kesehatan

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.50. Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					**98,34 %**
1.	**PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**					**97,91 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78,43 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	37.591	36.851	740	98,03 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,48 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**97,40 %**
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	37.766	37.304	462	98,78 %
	2. Tablet tambah darah	Tablet	3.398.940	3.357.360	41.580	98,78 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Orang	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	41.454	32.300	9.154	77,92 %
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	37.591	32.538	5.053	86,56 %
	11. Gel USG	Botol	2.517	2.169	348	86,17 %
	12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	300	286	14	95,33 %
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	14. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	492	5	98,99 %
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100,00 %
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	107	28	79,26 %
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	37.591	32.538	5.053	86,56 %
2.	**PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**					**94,10 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**74,21 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	37.591	34.869	2.722	92,76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,90 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**93,85 %**
	1. Formulir Partograf	Formulir	37.591	37.591	0	100,00 %
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	37.591	37.591	0	100,00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.591	37.591	0	100,00 %
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	37.591	37.591	0	100,00 %
	5. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	300	286	14	95,33 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Paket	497	502	-5	100,00 %
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100,00 %
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	100,00 %
3.	**PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**					**95,65 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76,05 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	35.967	34.190	1.777	**95,06 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18,73 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**93,65 %**
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	23.978	23.952	26	99,89 %
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	35.967	34.190	1.777	95,06 %
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	35.967	34.190	1.777	95,06 %
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	35.967	35.967	0	100,00 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	16.011	21.415	-5.404	100,00 %
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	35.967	35.967	0	100,00 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang	35.967	35.967	0	100,00 %
	8. Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	300	295	5	98,33 %
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	100,00 %
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100,00 %
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	160	134	26	83,75 %
	13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	100,00 %
	14. Kader Kesehatan	Orang	5.031	5.031	0	100,00 %
4.	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**					**99,86 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,93 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	141.819	141.702	117	99,92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,93 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**99,64 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	141.819	176.084	-34.265	100,00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	141.819	176.084	-34.265	100,00 %
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	141.819	124.285	17.534	87,64 %
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	16.054	15.170	884	94,49 %
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	84.273	82.571	1.702	97,98 %
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	23.978	31.099	-7.121	100,00 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	Vaksin	95.912	118.896	-22.984	100,00 %
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	47.956	53.732	-5.776	100,00 %
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	71.934	83.448	-11.514	100,00 %
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	23.978	29.532	-5.554	100,00 %
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	15.000	22.038	-7.038	100,00 %
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	15.000	21.881	-6.881	100,00 %
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	293.758	293.758	0	100,00 %
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	0	0	0	100,00 %
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	316	316	0	100,00 %
	16. Tenaga medis: Dokter	Orang	300	304	-4	100,00 %
	17. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	70,62 %
	18. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	79,26 %
	20. Guru PAUD	Orang	5.112	5.112	0	100,00 %
	21. Kader Kesehatan	Orang	5.031	5.031	0	100,00 %
5.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**					**94,93 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75,07 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	333.086	312.555	20.531	93,84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,86 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**99,29 %**
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	75.084	75.084	0	100,00 %
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	48.683	48.683	0	100,00 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	381.846	381.846	0	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	868	868	0	100.00 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	52	52	0	100.00 %
	6. Tenaga Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Orang	116.412	116.412	0	100.00 %
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Orang	80	80	0	100.00 %
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Orang	18.265	18.265	0	100.00 %
	9. Media promosi kesehatan	Orang	333.086	302.341	30.745	90,77 %
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Orang	91.902	88.560	3.342	96,36 %
	11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	300	304	-4	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	240	-52	100.00 %
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	868	868	0	100.00 %
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	5.031	5.031	0	100.00 %
6.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	736.411	736.411	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100,00 %**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	0	100.00 %
	2. Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	80	80	0	100.00 %
	3. Alat: Tensimeter	Unit	231	231	0	100.00 %
	4. Alat: Glukometer	Unit	231	231	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	80	80	0	100.00 %
	6. Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	80	80	0	100.00 %
	7. Alat: KIT IVA Tes	Unit	80	80	0	100.00 %
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	80	80	0	100.00 %
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	80	80	0	100.00 %
	10. Kuesioner PUMA	Unit	80	80	0	100.00 %
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	397	397	0	100,00 %
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	278	278	0	100,00%
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	118	118	0	100,00%
	c. Vasectomi Set	Unit	1	1	0	100,00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	736.411	736.411	0	100.00 %
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Orang	300	304	-4	100.00 %
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	497	502	-5	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	135	272	-137	100,00 %
	17. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	188	240	-52	100,00%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	240	-52	100,00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	5.031	5.031	0	100,00%
7.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**					**98,28 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78,42 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	193.397	189.568	3.829	98,02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,86 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**99,31 %**
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	80	80	0	100,00 %
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	80	80	0	100,00 %
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	80	80	0	100,00 %
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	714	714	0	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	193.397	193.397	0	100,00 %
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Paket	193.397	193.397	0	100,00 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	193.397	193.397	0	100,00 %
	8. Tenaga medis: Dokter	Orang	300	304	-4	100,00 %
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	100,00 %
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100,00 %
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	100,00 %
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	240	-52	100,00 %
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	5.031	5.031	0	100,00 %
8.	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI**					**99,73 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	231.130	231.130	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,73 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**98,65 %**
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	160	160	0	100.00 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	106.000	106.000	0	100.00 %
	3. Tensimeter	Unit	231	231	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	80	80	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	80	80	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	300	304	-4	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	135	272	-137	100.00
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	160	134	26	83,75%
	11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100.00
	12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	249	-52	100.00

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9.	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	42.042	42.042	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100,00 %**
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	42.042	42.042	0	100,00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	160	160	0	100.00 %
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	504.504	504.504	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	80	80	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	300	304	-4	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	5	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	161	264	-103	100.00 %
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	240	-52	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan: tenaga	Orang	135	272	-137	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	138	149	-11	100.00 %
10.	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	3.597	3.597	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	80	80	0	100.00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	11	11	0	100.00 %
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	80	80	0	100.00 %
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Media	80	80	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang	80	80	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	300	304	-4	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	80	80	0	100.00 %
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	80	80	0	100.00 %
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	13	13	0	100.00 %
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**99.92 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	53.615	53.615	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100.00 %**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53.613	53.613	0	100.00 %
	2. Reagen Zn TB	Kit	10.012	10.012	0	100.00 %
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	53.613	55.240	-1.627	100.00 %
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	167.301	167.301	0	100.00 %
	5. Catridge tes cepat molekuler	Test	53.613	53.613	0	100.00 %
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	29,454	29,454	0	100.00 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	125	125	0	100.00 %
	8. Tuberkulin	Vial	828	1.495	-667	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	9. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	300	283	17	94,33 %
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan: Kefarmasian	Orang	161	264	-103	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188	240	-52	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	138	149	-11	100.00 %
	14. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	6	29	-23	100.00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	5.031	5.031	0	100.00 %
12.	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)**					**99.76 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	41.454	41.454	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.76 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	98,78 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	41.454	41.454	0	100.00%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	41.454	41.454	0	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	41.454	41.454	0	100.00%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	41.454	41.454	0	100.00%
	5. Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	300	367	-67	100.00%
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	497	502	-5	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	514	1.077	-563	100.00%
	8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	138	149	-11	100.00%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	188	240	-52	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	180	158	22	87,78%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.51. Target SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	%	**98,34 %**						
1.	**PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**	%	**97,91 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**78,43 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	36.851	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33605
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,48 %**						
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**97,40 %**						
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	37.304	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
	2. Tablet tambah darah	Tablet	3.357.360	5.475.780	5.717.700	5.864.580	5.997.960	6.100.560	6.048.900
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Orang	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	32.538	4.563	4.765	4.888	4.999	5.084	5.041
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	32.300	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33605
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33605
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	32.538	32.538	31.765	32.581	33.322	33.892	33605
	11. Gel USG	Botol	2.169	2.028	2.118	2.173	2.222	2.260	2.241
	12. Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	286	286	286	301	316	332	348
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1131	1188	1247	1310
	14. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	492	492	508	533	560	588	617
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	107	107	115	121	127	133	140

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	32.538	30.421	31.765	32.581	33.322	33.892	33.605
2.	**PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**	**%**	**94,10 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**74,21 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	34.869	33.474	34.318	34.337	34.494	34.484	34.192
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,90 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	%	**93,85 %**						
	1. Formulir Partograf	Formulir	37.591	33.474	34.318	34.337	34.494	34.484	34.192
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	37.591	33.474	0	0	0	0	0
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.591	33.474	0	0	0	0	0
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	37.591	33.474	34.318	34.337	34.494	34.484	34.192
	5. Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	286	286	286	301	316	332	348
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Paket	502	492	508	533	560	588	617
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
3.	**PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**	**%**	**95,65 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**76,05 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	34.190	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**18,73 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**93,65 %**						
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	23.952	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	34.190	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	34.190	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	35.967	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	21.415	98.673	101.826	101.832	102.276	102.213	101.346

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	35.967	32.891	0	0	0	0	0
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang	35.967	32.891	33.942	33.944	34.092	34.071	33.782
	8. Tenaga medis: Dokter/ Dokter Spesialis Anak	Orang	295	295	295	301	316	332	348
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	134	95	107	112	118	124	130
	13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	14. Kader Kesehatan	Orang	5.031	10.005	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
4.	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	**%**	**99,86 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**79,93 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	141.702	70.720	132.080	142.835	141.581	140.510	139.386
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,93 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**99,64 %**						
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	176.084	70.720	132.080	142.835	141.581	140.510	139.386
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	176.084	70.720	132.080	142.835	141.581	140.510	139.386
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	124.285	70.720	132.080	142.835	141.581	140.510	139.386
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	15.170	15.168	11.800	12.154	12.165	12.530	12.905
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	82.571	82.571	166.000	170.980	176.109	181.393	186.834
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	31.099	32.891	36.399	19.492	20.467	35.384	35.084
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	Vaksin	118.896	32.891	36.399	12.995	13.645	35.384	35.084

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	53.732	32.891	36.399	41.224	41.224	35.384	35.084
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	83.448	32.891	36.399	41.224	41.224	35.384	35.084
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	29.532	32.891	36.399	41.224	41.224	35.384	35.084
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	22.038	32.891	36.399	41.224	41.224	35.336	34.962
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	21.881	32.891	36.399	41.224	41.224	35.336	34.962
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	293.758	200.659	327.591	164.894	164.894	318.360	315.512
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	0	80	80	80	80	80	80
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	316	522	306	321	337	353	370
	16. Tenaga medis: Dokter	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	17. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	18. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	20. Guru PAUD	Orang	5.112	4.495	4.752	4.847	4.944	5.043	5.144
	21. Kader Kesehatan	Orang	5.031	10.005	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
5.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**	**%**	**94,93 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**75,07 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	312.555	328.527	326.334	326.987	327.641	328.296	328.953
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,86 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**99,29 %**						
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	75.084	328.527	326.334	326.987	327.641	328.296	328.953
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	48.683	53.636	53.966	54.074	54.182	54.290	54.399
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	381.846	420.031	380.300	381.061	381.823	382.587	383.352
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	868	24.427	21.756	21.800	21.844	21.888	21.932
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	52	3.576	3.598	3.605	3.612	3.619	3.626

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Tenaga Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Orang	116.412	128.053	2.922.452	2.951.676	2.981.192	3.011.004	3.041.114
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Orang	80	80	80	80	80	80	80
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Orang	18.265	20.092	21.008	21.050	21.092	21.134	21.176
	9. Media promosi kesehatan	Orang	302.341	80	80	80	80	80	80
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Orang	88.560	34.853	34.558	34.567	34.832	35.246	35666
	11. Tenaga medis: Dokter/ Dokter gigi	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	12. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	286	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	868	30	80	80	80	80	80
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	5.031	5.003	2.004	3.006	4.008	5.010	6.012
6.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**	**%**	**100,00 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	736.411	736.411	743.555	750.767	758.049	765.402	772.827
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**Satuan**	**100,00 %**						
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	240	160	160	160	160	160	160
	2. Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	80	160	160	160	160	160	160
	3. Alat: Tensimeter	Unit	231	160	240	240	240	240	240
	4. Alat: Glukometer	Unit	231	160	160	160	160	160	160
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	80	80	80	80	80	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	80	736.411	743.555	750.767	758.049	765.402	772.827
	7. Alat: KIT IVA Tes	Unit	80	80	80	80	80	80	80
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	80	80	80	80	80	80	80
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	80	80	80	80	80	80	80
	10. Kuesioner PUMA	Unit	80	80	40.250	40.640	41.035	41.433	41.835
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	397						
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	278	80	80	80	80	80	80
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	118	80	80	80	80	80	80
	c. Vasectomi Set	Unit	1	7	7	7	7	7	7
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	736.411	736.411	743.555	750.767	758.049	765.402	772.827
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Orang	304	3.790	3.790	675.404	674.973	562.896	561.698
	14. Tenaga medis: Dokter	Orang	502	304	320	336	353	371	389
	15. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	1.077	492	508	533	560	588	617
	16. Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	272	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	17. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	240	107	115	121	127	133	140
	18. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	5.031	5.003	2.004	3.006	4.008	5.010	6.012
7.	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**	**%**	**98,28 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**78,42 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	189.568	203.369	203.369	207.436	244.042	256.244	269.055
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,86 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**99,31 %**						
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	80	80	80	80	80	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	80	80	80	80	80	80	80
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	80	80	80	80	80	80	80
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	714	203.369	203.369	238.000	243.587	253.000	278300
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	193.397	203.369	203.369	238.000	243.587	253.000	278300
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Paket	193.397	203.369	203.369	238.000	243.587	253.000	278.300
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	193.397	80	80	80	80	80	80
	8. Tenaga medis: Dokter	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	5.031	5.003	2.004	3.006	4.008	5.010	6.012
8.	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI**	**%**	**99,73 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80.00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	231.130	198.980	200.905	202.859	204.827	206.813	208.820
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**19,73 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**98,65 %**						
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160	160	160	160	160
	2. Obat Hipertensi	Paket	106.000	3	200.905	202.859	204.827	206.813	208.820
	3. Tensimeter	Unit	231	160	160	160	160	160	160

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	80	198.980	200.905	202.859	204.827	206.813	208.820
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	80	80	80	80	80	80	80
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	9. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	134	95	107	112	118	124	130
	11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	157	165	173	182	191	201
9.	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS**	**%**	**100,00 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80.00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	42.042	44.218	44.648	45.080	45.517	45.959	46.405
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**100,00 %**						
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	42.042	3	44.648	45.080	45.517	45.959	46.405
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	160	80	80	80	80	80	80
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	504.504	44.218	535.776	540.960	546.204	551.508	556.860
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	80	44.218	44.648	45.080	45.517	45.959	46.405

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	240	240	240	240	240	240
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	9. Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201
	11. Tenaga Kesehatan: tenaga	Orang	272	107	115	121	127	133	140
	12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	149	149	160	168	176	185	195
10.	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT**	**%**	**100.00 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80.00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	3.597	3.612	3.647	3.682	3.718	3.754	3.791
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20.00 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	%	**100.00 %**						
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	80	80	80	80	80	80	80
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	11	11	11	11	11	11	11
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	80	234.812	237.090	239.389	241.712	244.056	246.423
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Media	80	80	80	80	80	80	80
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang	80	80	80	80	80	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	304	304	320	336	353	371	389
	7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	80	80	80	80	80	80	80
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	80	80	80	80	80	80	80
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	13	80	15	20	40	60	80
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**%**	**99.92 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80.00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	53.615	55.513	55.513	47.783	42.272	38.082	34.851
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20.00 %**						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	**100.00 %**						
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53.613	80	80	80	80	80	80
	2. Reagen Zn TB	Kit	10.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	55.240	15.342	3.000	12.598	11.736	11.071	11.071
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	167.301	411.192	240.810	417.504	376.128	344.208	344.208
	5. Catridge tes cepat molekuler	Test	53.613	55.513	55.513	47.783	42.272	38.0852	34.851
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	29,454	80	80	80	80	80	80
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	125	80	80	80	80	80	80
	8. Tuberkulin	Vial	1.495	3.497	2.855	2.318	1.936	1.645	1.420
	9. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	283	281	281	289	298	307	316
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	11. Tenaga kesehatan: Kefarmasian	Orang	264	264	278	292	307	322	338
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	13. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	149	149	160	168	176	185	195
	14. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	29	29	29	30	32	34	36
	15. Kader Kesehatan	Orang	10.005	10.005	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
12.	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)**	**%**	**99.76 %**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80.00 %**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	41.454	43.431	52.312	56.110	58.835	61.866	63.661
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	19.76 %						
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	**%**	98,78 %						
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	41.454	56.642	80	80	80	80	80
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	41.454	56.642	52.312	56.110	58.835	61.866	63.661
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	41.454	56.642	52.312	56.110	58.835	61.866	63.661
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	41.454	56.642	80	80	80	80	80
	5. Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	367	367	367	385	404	424	446
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	502	492	508	533	560	588	617
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.077	1.077	1.077	1.131	1.188	1.247	1.310
	8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	149	149	160	168	176	185	195

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	240	157	165	173	182	191	201
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	158	158	158	158	158	158	158

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

3. Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 ada pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.52. Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					**100,00%**
1.	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	19.881	19.881	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	4.567	4.567	0	100,00%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	4.567	4.567	0	100,00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan non perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/ orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah (SR)	2.060	2.060	0	100,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan non perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah (SR)	2.060	2.060	0	100,00%
2	**PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.773	1.773	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	591	591	0	100.00%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot	Rumah Tangga	500	500	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	91	91	0	100,00%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.53. Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**%**	**100,00%**						
1.	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**100,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	19.881	13.410	10.290	10.802	11.336	11.893	12.476
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	JARINGAN PERPIPAAN								
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	4.567	2.478	3.010	3.161	3.319	3.484	3.659

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	4.567	2.478	3.010	3.161	3.319	3.484	3.659
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN								
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/ orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.060	200	420	440	460	480	500
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2.060	200	420	440	460	480	500
2	**PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**							

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.773	**792**	**57**	**60**	**63**	**66**	**66**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	%							
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	591	**263**	**19**	**20**	**21**	**22**	**22**
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	500	**224**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	91	**39**	**16**	**17**	**18**	**19**	**19**

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

4. Bidang Perumahan Rakyat

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.54. Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00%**
1.	**PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	352	352	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	88	88	-	100,00%
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	-	-	-	100,00%
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	-	-	-	100,00%
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	-	-	-	100,00%
2	**FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	60	60	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	-	-	-	-
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	-	-	-	-
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	-	-	-	-
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	15	15	-	100,00%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.55. Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**100,00%**						
1.	**PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	352	0	0	0	0	0	0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	88	0	0	0	0	0	0
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0	0	0	0
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0	0	0	0
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0	0	0	0
2	**FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	60	192	96	96	96	96	96
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**100,00%**						
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	-	0	0	0	0	0	0
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	-	0	0	0	0	0	0
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	-	0	0	0	0	0	0
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	-	0	0	0	0	0	0
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	15	48	24	24	24	24	24

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Realisasi capaian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum mencapai 100%. Pada tahun 2024 tidak ada masyarakat yang terdampak atau melaporkan diri untuk memperoleh layanan sebagai akibat dari penegakan perda dan/atau perkada di Kota Bandung. Lebih rinci realisasi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.56. Realisasi SPM Bidang Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					**100,00%**
1.	**PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	246	246	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	469	469	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dokumen	13	13	0	100,00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/ SDM)	Orang	14	14	0	100,00%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	0	1	100,00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat)	Orang	1	0	1	100,00%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.57. Target SPM Bidang Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM								
1.	**PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	246	150	150	150	150	150	150
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**100,00%**						
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	469	330	290	290	290	290	290

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dokumen	13	10	10	10	10	10	10
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	14	393	1003	180	180	180	180
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	0	0	0	0
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat)	Orang	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

b. Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sub Urusan Bencana dan Kebakaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target tahun 2025-2029 ada pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58. Realisasi Bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKSI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					**100,00%**
1.	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (KEBENCANAAN)**					**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.600	1.600	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/ legal)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1.600	1.600	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1.600	1.600	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	500	500	0	100,00%
2.	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KEBENCANAAN)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.600	1.600	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	24	24	0	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	300	300	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3.	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA** **(KEBENCANAAN)**					**100,00%**
	Tidak Terjadi Bencana					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR					**100,00%**
4.	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	65	65	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	0	100,00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	16	16	0	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	2.990	2.990	0	100,00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	294	294	0	100,00%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	65	65	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100,00%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.59. Target Bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TOTAL PENCAPAIAN	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKSI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		**100,00%**						
1.	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (KEBENCANAAN)**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	963.833	963.833	192.787	192.787	192.787	192.786	192.786
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1.600	963.833	192.787	192.787	192.787	192.786	192.786
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1.600	850	900	1000	1100	1200	1200
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	500	500	500	500	500	500	500

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TOTAL PENCAPAIAN	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KEBENCANAAN)**	%	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**100,00%**						
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	24	24	24	24	24	24	24
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	300	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
3.	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (KEBENCANAAN)**		**100,00%**						
	Tidak Terjadi Bencana								
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**100,00%**						
4.	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR)**		**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	65	353	983.310	988.904	994.538	1.000.212	1.005.926
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		20,00%						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TOTAL PENCAPAIAN	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**100,00%**						
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/ redkar)	Layanan	15	179	161	144	129	116	104
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	16	41	19	19	19	19	19
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	2.867	1.407	1.604	1.833	2.136	2.458	2.867
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	Orang	294	33	45	45	45	45	45
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	65	-	-	-	-	-	-
	6. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	895	895	809	720	645	580	520
	7. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	0	-	-	-	-	-	-
	8. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	35.000	35.800	32.200	28.800	25.800	23.200	20.800

Sumber: *Bapperida diolah, 2025*

6. Bidang Sosial

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60. Realisasi Bidang Urusan Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					**100,00%**
1.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	873	873	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	251	251	0	100.00 %
	2. Penyediaan Pemakanan	Orang	329	329	0	100.00 %
	3. Penyediaan layanan	Orang	272	272	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	259	258	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	642	642	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	112	112	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	302	302	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	238	238	0	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	108	108	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	103	103	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	162	162	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	82	82	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	Orang	34	34	0	100.00 %
2.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI**					**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	174	174	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	74	74	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	69	69	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	Orang	140	140	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	69	69	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	69	69	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	81	81	0	100.00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	0	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	44	44	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	41	41	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan	Orang	18	18	0	100.00 %
3.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	412	412	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	89	89	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	108	108	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	Orang	324	324	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	114	114	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	117	117	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	118	118	0	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	21	21	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	10	10	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	71	71	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	56	56	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100.00 %
4.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	495	495	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	160	160	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	481	481	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	Orang	473	473	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	349	349	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	49	49	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	486	486	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	119	119	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	17	0	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	25	25	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	71	71	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	42	42	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan	Orang	23	23	0	100.00 %
5.	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.041	8.041	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**Satuan**	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
	1. Penyediaan permakanan	Orang	8.041	8.041	0	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	Orang	342	342	0	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	350	350	0	100.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	217	217	0	100.00 %

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Tabel 2.61. Target Bidang Urusan Sosial Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM								
1.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	873	1.609	1.770	1.947	2.142	2.356	2.591

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	251	940	1034	1137	1251	1376	1514
	2. Penyediaan Pemakanan	Orang	329	204	224	247	272	299	329
	3. Penyediaan layanan kedaruratan	Orang	272	383	421	463	510	561	617
	4. Penyediaan sandang	Orang	258	200	220	242	266	293	322
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	642	1.140	1.254	1.379	1.517	1.669	1.836
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	112	173	190	209	230	253	279
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	302	210	231	254	280	307	338
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	238	52	57	63	69	76	84
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	108	68	75	82	91	100	110
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	103	1.007	1.108	1.218	1.340	1.474	1.622
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	162	485	534	587	646	710	781
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	82	89	98	108	118	130	143
	13. Layanan rujukan	Orang	34	321	353	388	427	470	517
2.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI**	%	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	218	92	101	111	122	135	148
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	%	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	93	92	101	111	122	135	148

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	90	33	36	40	44	48	53
	3. Penyediaan permakanan	Orang	168	67	74	81	89	98	108
	4. Penyediaan sandang	Orang	97	92	101	111	122	135	148
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	33	36	40	44	48	53
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	100	92	101	111	122	135	148
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	108	92	101	111	122	135	148
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	33	36	40	44	48	53
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	33	36	40	44	48	53
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	51	67	74	81	89	98	108
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	67	74	81	89	98	108
	12. Layanan rujukan	Orang	18	52	57	63	69	76	84
3.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI**	**%**	**100,00%**						0
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	455	496	546	600	660	726	799
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	%	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	96	465	512	563	619	681	749
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	140	111	122	135	148	163	179
	3. Penyediaan permakanan	Orang	366	176	194	213	234	258	283
	4. Penyediaan sandang	Orang	156	177	195	214	236	259	285
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	81	89	98	108	119	130
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	153	450	495	545	599	659	725
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	132	94	103	114	125	138	151
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	21	81	89	98	108	119	130
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	17	90	99	109	120	132	145
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	109	148	163	179	197	217	238
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	71	145	160	175	193	212	234
	13. Layanan rujukan	Orang	7	42	46	51	56	61	68
4.	**REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI**	%	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	495	511	562	618	680	748	823
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	20,00%						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	160	25	28	30	33	37	40
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	481	511	562	618	680	748	823
	3. Penyediaan permakanan	Orang	473	508	559	615	676	744	818
	4. Penyediaan sandang	Orang	349	346	381	419	461	507	557
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	49	14	15	17	19	20	23

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	486	395	435	478	526	578	636
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	119	15	17	18	20	22	24
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	5	6	6	7	7	8
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	25	16	18	19	21	23	26
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	71	23	25	28	31	34	37
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	42	102	112	123	136	149	164
	12. Layanan rujukan	Orang	23	48	53	58	67	70	77
5.	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**%**	**100,00%**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**%**	**80,00%**						
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.041	2957	3253	3578	6684	7352	8088
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	**%**	**20,00%**						
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	**%**	**100,00%**						
	1. Penyediaan permakanan	Orang	8.041	2957	3253	3578	6684	7352	8088
	2. Penyediaan sandang	Orang	342	1228	1351	1486	1634	1798	1978
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	0	0	0	0	0	0
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	350	95	105	115	126	139	153
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	217	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Bapperida diolah, 2025.*

2.1.6. Kerjasama Daerah

Pemerintah Daerah telah mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi dari pihak masyarakat dan swasta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan serta memperluas sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini akan mendukung proses pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan dari Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Terdapat skema kerjasama yang dilakukan, yaitu dengan swasta/badan usaha serta kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan pembiayaan pembangunan daerah.

1. Skema kerjasama dengan Swasta/Badan Usaha

   Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat termasuk Kota Bandung dalam rangka Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan san Pemrosesan AKhir Sampah (TPPAS) Regional Lengok Nangka. Saat ini, proses kerjasama ini telah mencapai tahap transaksi. Pemerintah Daerah terus berusaha untuk menyelesaikan proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan, dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proyek ini akan mencapai tahap transaksi pada Tahun 2023. Pembangunan ini dilakukan oleh KPBU dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 terkait dengan penyediaan 1 juta rumah susun.

2. Fasilitasi kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri

   Pembangunan daerah melalui dana Non APBD dan optimalisasi kerjasama daerah dengan berbagai pihak. Besaran pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama menurun sebesar Rp7,28 Miliar dari Tahun 2022. Saat ini besaran dana pembiayaan sebesar Rp2,45 Miliar. Mitra kerjasama yang telah dibangun dari pemerintah terdapat 2 pendanaan berasal dari pemerintah Jepang dan Korea Selatan dan 2 pendanaan lainnya berasal dari Institusi/Badan Usaha di Indonesia. Berikut ini, program prioritas pembangunan yang dibiayai melalui kerjasama pada Tahun 2023.

Tabel 2.62. Rekapitulasi Realisasi Program Prioritas Pembangunan yang Dibiayai melalui Kerjasama Daerah Tahun 2023

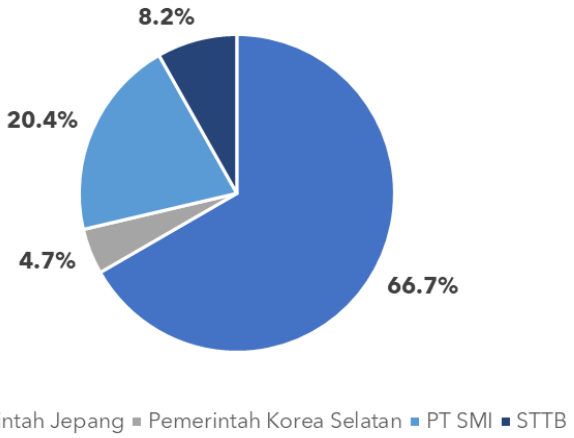
Mitra	Nilai Bantuan	Perangkat Daerah	Jenis Bantuan
Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang (Melalui pendanaan MOEJ)	Rp1.519.011.000,00/ (untuk 3 tahun) Rp506.337.000,00/tahun	Bappelitbang, DLH, DSDABM, DPKP, DISCIPTABINTAR	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kulaitas/Mutu Air Anak Sungai Citarum di Kota Bandung
Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang melalui program Bandung-Gesuido Project (BKG)	Rp3.382.500.000,00 (untuk pelaksanaan tahun 2023-2026) Rp1.127.500.000,00 / tahun dokumen kerja sama Minute of Meeting (MoM) telah ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2022	DLH, DSDABM, DPKP, Perumda Tirtawening	Pelatihan terkait Pembuatan Materi Edukasi mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik yang baik dan benar untuk peningkatan kompetensi staf dinas terkait dan Perumda Tirtawening serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pegnelolaan air limbah domestik

Mitra	Nilai Bantuan	Perangkat Daerah	Jenis Bantuan
Pemerintah Kota Daegu, Korea Selatan	Rp114.000.000,00 Biaya tersebut meliputi: KRW 1.600.000/ 2 Orang yang diperuntukan untuk jaminan kecelakaan, biaya pra pelatihan, upacara perpisahan (temasuk akomodasi dan makanan selama pra-program), biaya transportasi untuk urusan resmi selama program utama.	BKPSDM	Program Beasiswa K2H (Korea Heart to Heart) bagi 2 orang Aparatur Sipil Negara Kota Bandung
PT. SMI	Rp500.000.000,00	DPKP	Hibah bantuan teknis berupa studi kelayakan terkait tatakelola kawasan kumuh
Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB)	Rp201.500.000,00 (Estimasi harga dari E-Katalog)	● Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ● Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung ● Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ● Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung ● Bagian Hukum Setda Kota Bandung ● Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung	Pembuatan materi kampanye pencitraan produk siap eskpor berupa logo yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Memperindah ruang publik Logo Pemajuan Kebudayaan

Sumber: *LAKIP Kota Bandung 2023*

Bentuk kerjasama yang dilakukan pada tahun 2023, berfokus terkait dengan perbaikan kualitas/mutu air anak sungai Citarum, Pengelolaan air limbah domestik, Beasiswa studi Korea, studi kelayakan tatakelola kawasan kumuh dan kampanye pencitraan produk siap ekspor. Berikut secara persentase dari masing-masing mitra kerjasama daerah.

Gambar 2.46. Persentase Pendanaan Non-APBD Melalui Kerjasama Daerah



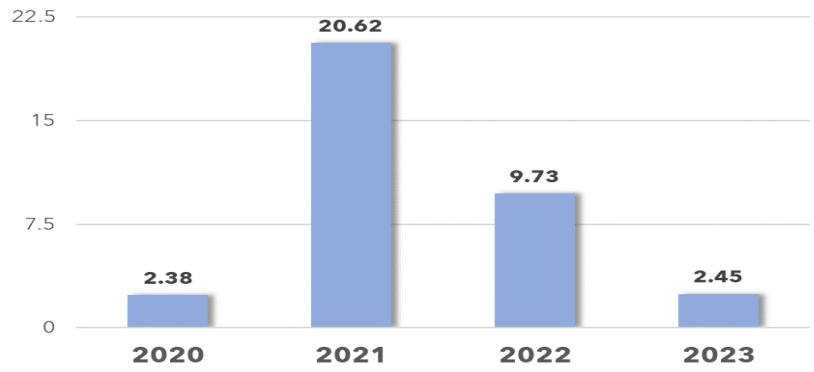
Sumber: *LAKIP Kota Bandung 2023*

Terdapat 4 mitra yang bekerjasama dalam peningkatan pembangunan daerah, yaitu Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang, Pemerintah Kota Daegu, Korea Selatan, PT SMI dan STTB. Pemerintah Jepang memiliki kontribusi pendanaan sebesar 66.7% dari total pendanaan. Pada hal ini, Pemerintah Jepang berfokus terkait dengan aspek *Sustainable Development*

Goals (SDGs) untuk perbaikan kualitas/mutu air anak sungai citarum dan pengelolaan air limbah domestik. Selanjutnya, dari PT SMI yang memiliki pendanaan sebesar 20,4% dari total pendanaan untuk studi kelayakan tatakelola kawasan kumuh. Berdasarkan dari kemitraan yang dilakukan menunjukkan pentingnya pembanguanan yang berkelanjutan dan inklusif dalam menangani tantangan perkotaan yang kompleks.

Kolaborasi antara mitra-mitra dalam peningkatan pembangunan daerah menggambarkan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Jepang, dengan kontribusi pendanaan yang signifikan, menunjukkan komitmen pada agenda SDGs, khususnya dalam meningkatkan kualitas air dan mengelola limbah domestik. Di sisi lain, peran PT SMI dalam menyediakan pendanaan untuk studi kelayakan menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam mengatasi masalah kawasan kumuh. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, kerjasama ini berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah, baik dari segi lingkungan maupun sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Gambar 2.47. Rekapitulasi Biaya Non-APBD Melalui Kerjasama Daerah Tahun 2020-2023 (dalam Miliar)



Sumber: *LAKIP Kota Bandung 2023*

Pendanaan Non-APBD melalui kerjasama daerah sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2023 cukup fluktuatif. Terutama pada Tahun 2021 memiliki jumlah pendanaan yang cukup tinggi mencapai Rp20,62 Miliar. Jumlah pendanaan ini cukup tinggi ddari tahun lainnya dikarenakan terdapat berbagai kerjasama dari Luar Negeri terkait dengan pengelolaan air limbah, pengembangan *platform* pangan berkelanjutan, program berencana pasca persalinan dan bantuan dalam perencanaan dan pengembangan multi moda transportasi massal. Kemudian pada Tahun 2022 nilainya mneurun menjadi Rp9,73 Miliar. Terdapat beberapa pendanaan dari nilai kerjasama sebelumnya yang masih bergulir sehingga keberlanjutan pembangunan masih terus diupayakan untuk terus dilanjutkan. Kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh Kota Bandung tidak hanya dioptimasikan untuk satu tahun berjalan tetapi dapat berkelanjutan dalam upaya mendapatkan sebuah dampak berkelanjutan. Selanjutnya, Tahun 2023 menurun menjadi Rp2,45 Miliar namun masih lebih tinggi dari Tahun 2020.

Fluktuasi pendanaan Non APBD melalui kerjasama daerah dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan dinamika dalam prioritas pembangunan dan ketersediaan sumber daya. Puncak pendanaan pada tahun 2021 menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mendukung program-program pembangunan yang kompleks, termasuk pengelolaan air limbah dan pengembangan platform pangan berkelanjutan. Namun, penurunan pendanaan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun masih relatif tinggi dibandingkan dengan tahun awal, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat pendanaan yang tinggi secara konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, penyesuaian anggaran, atau dinamika politik baik di tingkat lokal maupun internasional.

Meskipun terjadi fluktuasi, keberlanjutan upaya pembangunan tetap menjadi fokus, seperti yang tercermin dalam kelangsungan beberapa pendanaan dari tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya kesadaran akan pentingnya memperpanjang manfaat kerjasama yang sudah terjalin, serta memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak hanya berhenti setelah satu tahun anggaran. Dengan demikian, fluktuasi ini bisa menjadi titik awal untuk evaluasi mendalam terhadap strategi pendanaan dan kerjasama, agar dapat meningkatkan konsistensi pendanaan serta mengoptimalkan dampak pembangunan dalam jangka panjang.

2.1.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari rekapitulasi pencapaian TPB berdasarkan tujuan, rekapitulasi pencapaian TPB berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan peran para pihak dalam pencapaian TPB.

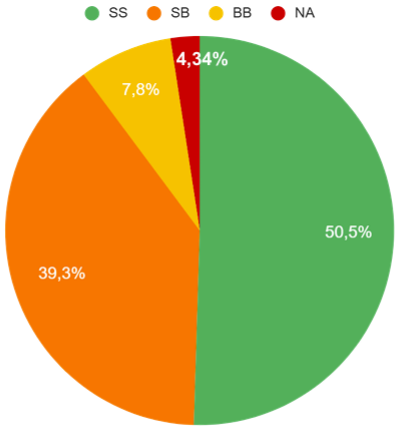
1. Rekapitulasi Ketercapaian TPB Berdasarkan Tujuan

Ketercapaian TPB dalam KLHS RPJMD Kota Bandung ditinjau berdasarkan data tahun 2019-2023. Berdasarkan kategori ketercapaiannya, ketercapaian TPB terbagi menjadi 4 kategori yaitu sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), sudah dilaksanakan dan belum tercapai (SB), belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB), serta indikator yang tidak ada data (NA). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh capaian TPB di Kota Bandung berdasarkan kategori ketercapaiannya meliputi 50,5% sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), 39,3% sudah dilaksanakan dan belum tercapai (SB), 7,8% belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB), serta 4,34% tidak ada data (NA) dari total 206 indikator.

Beberapa indikator yang belum tercapai dapat diindikasikan akibat adanya indikator baru yang belum pernah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau belum menjadi fokus utama sebagian perangkat daerah. Untuk indikator yang tidak ditemukan datanya, dapat diindikasikan akibat kurangnya dokumentasi secara berkala, belum dilakukan pengumpulan data yang memadai, maupun keterlambatan pemberian data sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada penyusunan dokumen ini. Berikut merupakan gambaran ketercapaian indikator TPB Kota Bandung berdasarkan 4 kategori.

Indikator yang belum tercapai (SB dan BB) sebagian besar disebabkan oleh keberadaan indikator baru yang belum menjadi prioritas atau belum diimplementasikan oleh perangkat daerah. Sementara itu, indikator yang tidak memiliki data (NA) umumnya disebabkan oleh minimnya dokumentasi yang berkesinambungan, belum optimalnya pengumpulan data, atau keterlambatan dalam menyediakan data sesuai jadwal yang ditetapkan selama penyusunan dokumen. Gambaran pencapaian indikator TPB di Kota Bandung sesuai dengan kategori tersebut memberikan pemahaman terhadap prioritas dan tantangan dalam proses implementasi TPB di masa depan.

Gambar 2.48. Ketercapaian TPB Kota Bandung Tahun 2019-2023 Berdasarkan 4 Kategori



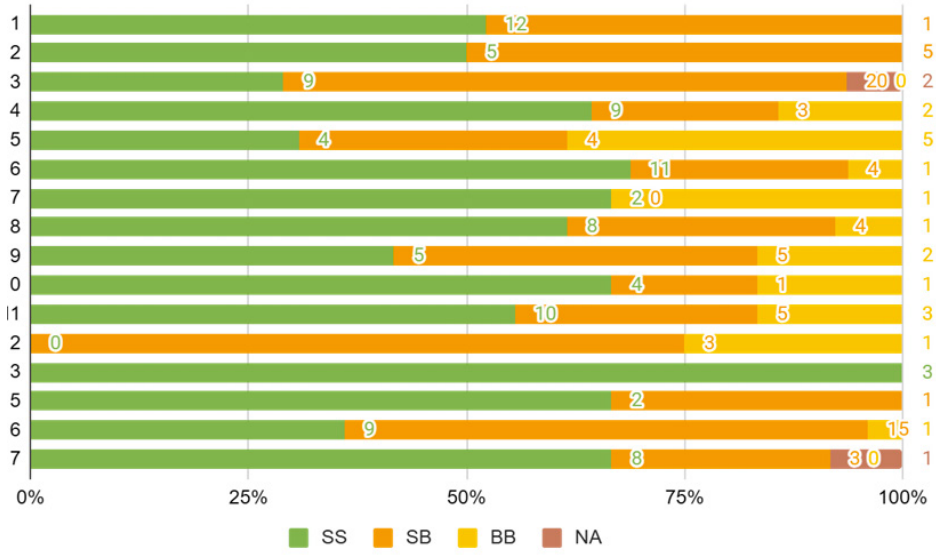
Gambar 4.2 Ketercapaian TPB Kota Bandung Tahun 2019-2023 Berdasarkan 4 Kategori

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Ketercapaian indikator juga digambarkan berdasarkan jenis tujuan pembangunan berkelanjutannya (TPB), yakni berdasarkan 16 tujuan yang relevan dengan Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa TPB 3 memiliki jumlah indikator terbanyak yaitu sebesar 31 indikator. Adapun jika dijabarkan secara kategorisasi, TPB 3 memiliki 10 indikator berkategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS), 19 indikator berkategori Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB), 0 indikator berkategori Belum Dilaksanakan dan belum Mencapai Target (BB), dan 2 indikator berkategori Tidak Ada Data (NA).

Secara keseluruhan, TPB dengan capaian indikator berkategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS) terbanyak adalah TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan total 12 indikator. TPB dengan capaian indikator berkategori Sudah Dilaksanakan namun Belum Mencapai Target (SB) terbanyak adalah TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan total masing-masing 19 indikator. TPB dengan capaian indikator berkategori Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai target (BB) terbanyak adalah TPB 5 (Kesetaraan Gender) dengan 4 indikator. Lalu, TPB dengan capaian indikator berkategori Tidak Ada Data (NA) terbanyak adalah TPB 3 (Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera) dengan 2 indikator. Berikut gambaran ketercapaian indikator TPB Kota Bandung berdasarkan jenis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Gambar 2.49. Ketercapaian Indikator TPB Kota Bandung Berdasarkan Tujuan

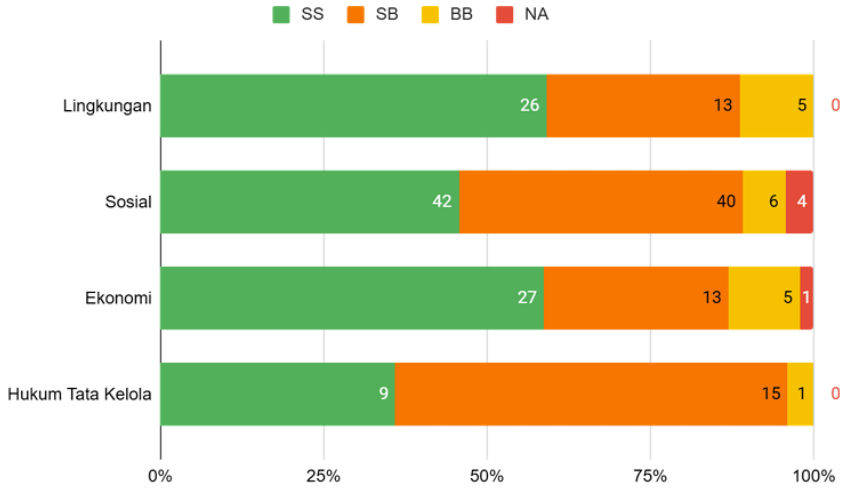


Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

2. Rekapitulasi Ketercapaian TPB Berdasarkan 4 Pilar

Ketercapaian setiap TPB dianalisis berdasarkan 4 pilar yang meliputi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa pilar sosial memiliki jumlah indikator terbanyak yang sudah mencapai target dibandingkan dengan pilar lainnya dengan total 39 indikator sudah tercapai. Namun, pilar sosial juga memiliki jumlah indikator terbanyak dalam kategori belum mencapai target yaitu 43 indikator serta kategori belum dilaksanakan yaitu 7 indikator. Begitupun dengan jumlah indikator terbanyak yang tidak ditemukan datanya, pilar sosial memiliki jumlah indikator terbanyak yaitu 2 indikator yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.50. Ketercapaian TPB di Kota Bandung Berdasarkan 4 Pilar



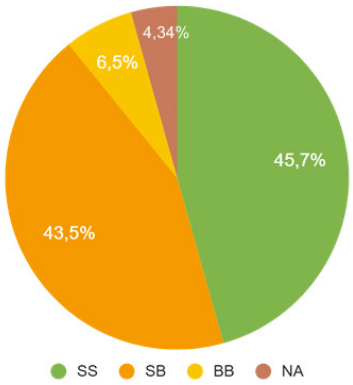
Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

A. Ketercapaian Pilar Sosial

Ketercapaian Pilar Sosial Pilar sosial mencakup 91 indikator yang terdiri dari lima tujuan pembangunan berkelanjutan: TPB 1 Tanpa Kemiskinan (23 indikator), TPB 2 Tanpa

Kelaparan (10 indikator), TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (31 indikator), TPB 4 Pendidikan Berkualitas (14 indikator), dan TPB 5 Kesetaraan Gender (13 indikator). Secara keseluruhan, hanya 42,9% indikator pilar sosial yang telah mencapai target. Sebanyak 47,3% indikator masih berada dalam kategori belum mencapai target, 7,7% indikator belum dilaksanakan, dan 2,2% indikator tidak memiliki data yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan indikator pilar sosial.

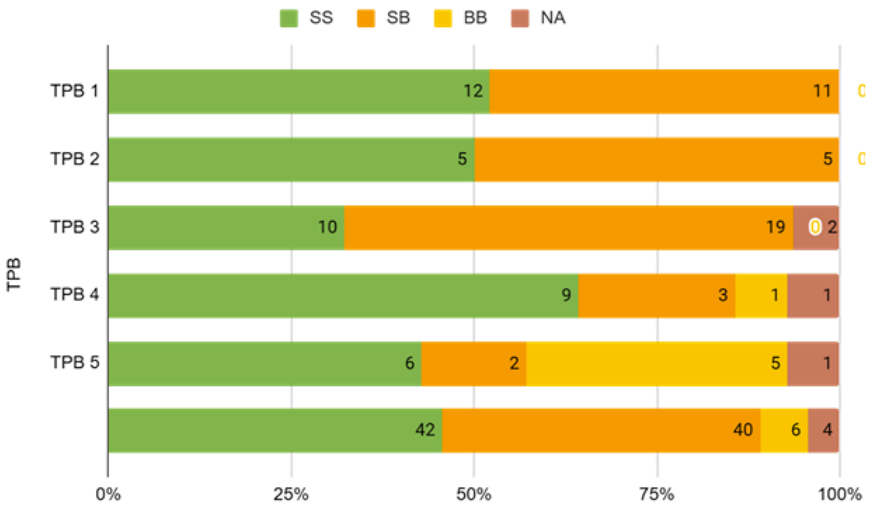
Gambar 2.51. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Berdasarkan hasil analisis, TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) mencatat persentase tertinggi untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, dengan total 10 indikator berhasil tercapai. Sementara itu, TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) memiliki jumlah indikator tertinggi dalam kategori belum mencapai target, yaitu sebanyak 19 indikator. Selanjutnya, TPB 5 (Kesetaraan Gender) mencatat jumlah indikator tertinggi dalam kategori belum dilaksanakan, dengan total 5 indikator. Adapun TPB 3 kembali mencatat persentase tertinggi untuk kategori indikator yang tidak memiliki data, yaitu sebanyak 2 indikator. Gambaran ini memberikan wawasan mengenai ketercapaian setiap TPB dalam pilar sosial dan menunjukkan area yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan pelaksanaannya.

Gambar 2.52. Ketercapaian TPB Pilar Sosial di Kota Bandung

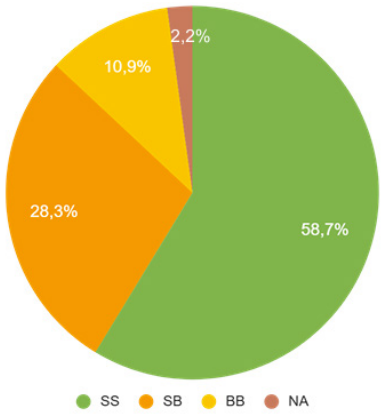


Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

B. Ketercapaian Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan total 46 indikator, yaitu TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau (3 indikator), TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (13 indikator), TPB 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (12 indikator), TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan (6 indikator), dan TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (12 indikator). Dalam pilar ini, semua indikator telah dilaksanakan, tetapi hanya 56,7% di antaranya yang berhasil mencapai target. Sebanyak 28,3% indikator masih belum mencapai target, dan 10,9% indikator belum dilaksanakan, sementara 2,2% indikator tidak memiliki data. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan pencapaian target.

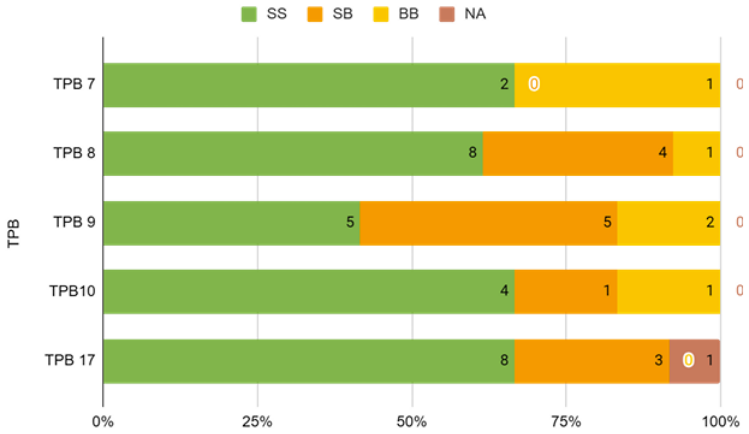
Gambar 2.53. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Hasil analisis menunjukkan bahwa TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) mencatat persentase tertinggi dalam kategori indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, masing-masing dengan 2, 4, dan 8 indikator yang berhasil tercapai. Sebaliknya, TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) memiliki jumlah indikator belum tercapai terbanyak, yaitu sebanyak 5 indikator. Selain itu, TPB 17 mencatat persentase tertinggi pada kategori indikator yang tidak memiliki data dengan 1 indikator. Adapun TPB 1 memiliki jumlah tertinggi untuk kategori indikator yang belum dilaksanakan, yaitu 1 indikator. Gambaran ini menunjukkan distribusi ketercapaian indikator TPB dalam pilar ekonomi dan area prioritas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Gambar 2.54. Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi di Kota Bandung

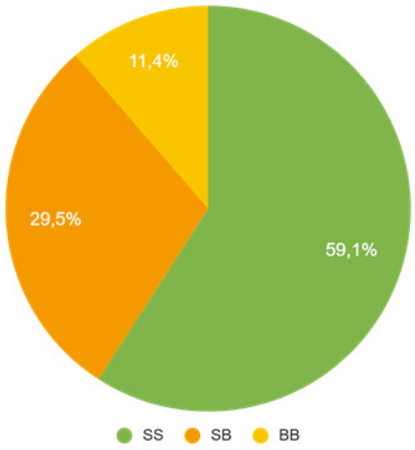


Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

C. Ketercapaian Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup 44 indikator yang tersebar dalam lima tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB): TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dengan 16 indikator, TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dengan 18 indikator, TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dengan 4 indikator, TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan 3 indikator, dan TPB 15 (Ekosistem Daratan) dengan 3 indikator. Dari hasil analisis, lebih dari setengah indikator pada pilar lingkungan telah mencapai target, yakni sebesar 59,1%. Namun, masih terdapat 29,5% indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, serta 11,4% indikator yang belum dilaksanakan sama sekali. Pencapaian ini mencerminkan bahwa pilar lingkungan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meski demikian, diperlukan upaya lebih intensif untuk meningkatkan pelaksanaan indikator yang belum tercapai, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi guna memastikan pencapaian target TPB di pilar lingkungan secara menyeluruh.

Gambar 2.55. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Lingkungan di Kota Bandung

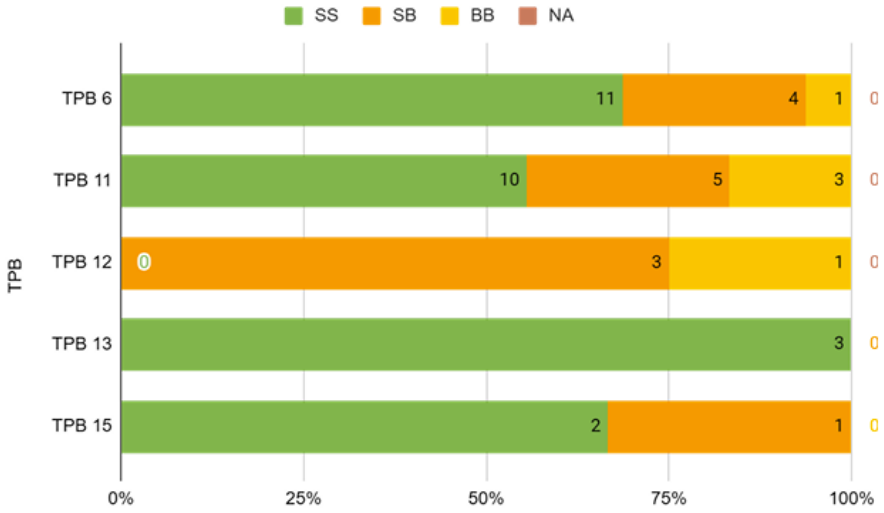


Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

Berdasarkan hasil analisis, TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) mencatat persentase tertinggi pada kategori indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, dengan 3

indikator berhasil tercapai. Sementara itu, TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) memiliki persentase tertinggi pada kategori indikator yang belum mencapai target, dengan total 3 indikator. Selain itu, TPB 12 juga menjadi yang tertinggi dalam kategori indikator yang belum dilaksanakan, dengan 1 indikator. Gambaran ini memberikan pandangan terkait pencapaian indikator TPB pada pilar lingkungan dan menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pencapaian target di TPB 12.

Gambar 2.56. Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan di Kota Bandung

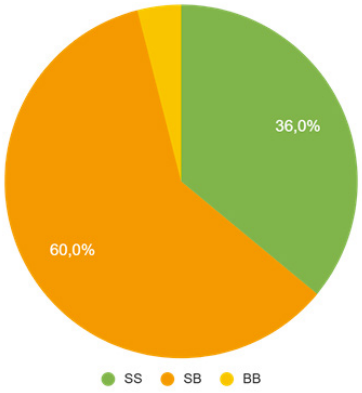


Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

D. Ketercapaian Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan total 25 indikator. Berdasarkan analisis, hanya 36% dari indikator pada pilar ini yang telah mencapai target, sementara 60% indikator berada dalam kategori belum mencapai target, dan 4% lainnya belum dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pencapaian target TPB pada pilar hukum dan tata kelola. Selain itu, diperlukan penyediaan data yang lebih akurat dan lengkap guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program terkait di pilar ini.

Gambar 2.57. Persentase Ketercapaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Bandung



Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029*

2.1.8. Badan Usaha Milik Daerah

Kota Bandung mengelola empat BUMD yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi regional, yaitu Perumda Tirtawening, Perumda BPR Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama, dan Perumda Pasar Juara, serta memiliki saham sebesar 1,18% di Bank BJB. BUMD ini berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Bandung, dengan masing-masing memiliki tantangan dan pencapaian yang berbeda. Kinerja keuangan dan operasional BUMD Kota Bandung pada tahun 2023 cukup bervariasi. Perumda Tirtawening mempertahankan tren positif dalam penyediaan air bersih, sementara Perumda BPR Kota Bandung masih menghadapi tantangan dengan ROA -8,0%, ROE -26%, dan BOPO 170%, meskipun NPL membaik menjadi 5,9%. PT Bandung Infra Investama mengalami peningkatan likuiditas dengan Cash Ratio naik signifikan ke 179,97, namun profitabilitas tetap rendah di kisaran ROI dan ROE 1%. Perumda Pasar Juara mencatat perbaikan kecil dalam ROI menjadi 0,5%, tetapi arus kas masih terhambat dengan Collecting Period 977 hari. Bank BJB mengalami penurunan ROE 14,6%, ROA 1,3%, dan NIM 5,2%, mencerminkan penurunan efisiensi operasional dan profitabilitas.

Sehingga proyeksi tahun 2024 mengarah pada kebutuhan setiap BUMD untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan keuangan guna menghadapi tantangan yang ada. Perumda Tirtawening diperkirakan akan terus mempertahankan kinerja stabil, sementara Perumda BPR Kota Bandung perlu mengoptimalkan strategi pemulihan keuangan agar dapat keluar dari kondisi kurang sehat. PT Bandung Infra Investama diharapkan dapat memanfaatkan momentum perbaikan likuiditas untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitas pengelolaan aset. Perumda Pasar Juara perlu mempercepat arus kas dengan memperbaiki sistem penagihan dan pengelolaan piutang. Bank BJB memerlukan strategi efisiensi operasional dan penguatan manajemen risiko untuk mengembalikan pertumbuhan laba. Dengan strategi yang lebih adaptif dan inovatif, BUMD Kota Bandung memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2024. Adapun penjelasan kinerja masing-masing BUMD dan Bank BJB, sebagai berikut:

1. Perumda Tirtawening

Perumda Tirtawening memainkan peran vital dalam menyediakan air bersih dan mengelola air limbah untuk Kota Bandung, menggunakan teknologi canggih untuk mengolah sumber air menjadi layak konsumsi dan mengelola limbah dengan efektif. Ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut Salinan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, Pemerintah Daerah memiliki kepemilikan penuh atas Perumda Tirtawening, menegaskan komitmen mereka dalam mengelola sumber daya air Kota Bandung.

Tabel 2.63. Kinerja Keuangan Perumda Tirtawening Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Profitabilitas					
Return on Investment	7,1%	7,5%	10,7%	7,4%	8,4%
Return on Equity	2,3%	2,3%	2,7%	0.9%	1,2%
Rasio Likuiditas					
Current Ratio	17	15,2	14	4,05	2,36
Cash Ratio	9,5	9,4	6,1	1,01	0,51
Rasio Aktivitas					
Collecting Period (hari)	145	133	178	145	153
Inventory Turnover (hari)	56	46	32	33	36
Total Assets Turnover	37,1%	40,4%	38,1%	43,1%	55,7%
Rasio Solvabilitas					
Equity to Assets Ratio	92,7%	92,0%	80,0%	89,0%	84,7%

Sumber: *Perumda Tirtawening Kota Bandung, 2025*

Rasio profitabilitas Perumda Tirtawening dari tahun 2020 hingga 2024 menampilkan dua indikator utama, yaitu *Return on Investment* (ROI) dan *Return on Equity* (ROE). ROI menunjukkan peningkatan dari 7,1% pada 2020 menjadi 10,7% pada 2022, namun mengalami penurunan kembali menjadi 7,4% pada 2023 sebelum naik lagi ke 8,4% di 2024. Hal ini menunjukkan fluktuasi efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total investasinya. Sementara itu, ROE relatif stagnan di kisaran 2,3% dari 2020 hingga 2021, meningkat sedikit menjadi 2,7% pada 2022, namun kemudian turun drastis menjadi 0,9% pada 2023 sebelum sedikit pulih ke 1,2% pada 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan dalam menghasilkan keuntungan dari modal sendiri perusahaan.

Rasio likuiditas yang ditunjukkan oleh *Current Ratio* dan *Cash Ratio* mengalami tren penurunan tajam dalam enam tahun terakhir. *Current Ratio* mencapai puncak 17,0 di 2020, terus menurun menjadi 14,0 pada 2022, dan turun drastis ke 4,05 pada 2023 serta hanya 2,36 pada 2024. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Demikian pula, *Cash Ratio* sebesar 9,5 di 2020, lalu merosot hingga hanya 0,51 pada 2024, menandakan penurunan kas yang cukup signifikan yang tersedia untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Dalam hal aktivitas operasional, Total Assets Turnover meningkat dari 37,1% pada 2020 menjadi 55,7% di tahun 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. *Collecting Period* mengalami peningkatan dari 145 hari pada 2020 menjadi 178 hari pada 2022, yang mengindikasikan penurunan efisiensi dalam penagihan piutang, meskipun sempat membaik menjadi 145 hari di 2023 dan kembali naik ke 153 hari pada 2024. Sementara itu, *Inventory Turnover* menunjukkan perbaikan signifikan dari 56 hari pada 2020 menjadi 32 hari pada 2022, namun kemudian sedikit meningkat kembali menjadi 36 hari di tahun 2024, yang tetap lebih efisien dibandingkan awal periode.

Rasio solvabilitas yang dilihat dari *Equity to Assets Ratio* menunjukkan tren fluktuatif. Dari 92,7% di tahun 2020, rasio ini menurun menjadi 80,0% di tahun 2022, yang mengindikasikan peningkatan ketergantungan perusahaan terhadap utang atau penurunan porsi ekuitas terhadap total aset. Namun, rasio ini sempat meningkat ke 89,0% di 2023, lalu menurun kembali menjadi 84,7% pada 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika struktur modal perusahaan dalam enam tahun terakhir.

Tabel 2.64. Kesehatan Perumda Tirtawening Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	BB	A	A	A	A
Skor	47	66	69,1	69	75,7

Sumber: *Perumda Tirtawening Kota Bandung, 2025*

Tabel tersebut menggambarkan evaluasi kesehatan Perumda Tirtawening selama periode 2020 hingga 2024. Awalnya, perusahaan ini memiliki indeks 'BB' pada Tahun 2020, yang masuk dalam kategori kurang sehat. Kemudian terjadi perbaikan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya, pada Tahun 2021 sampai 2024, perusahaan mencapai indeks 'A', yang menempatkannya dalam kategori sehat, menunjukkan peningkatan kesehatan perusahaan yang kuat.

2. Perumda BPR Kota Bandung

Perumda BPR Kota Bandung memiliki fokus utama dalam memberikan dukungan finansial kepada usaha kecil dan menengah, menyediakan kredit yang memudahkan pengembangan bisnis lokal. Sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal, bank ini menyediakan solusi finansial inovatif yang meningkatkan inklusi finansial bagi usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, Pemerintah Daerah memiliki kepemilikan modal sepenuhnya atas Perumda BPR Kota Bandung, menegaskan keterlibatan langsung pemerintah dalam pengembangan sektor finansial lokal.

Tabel 2.65. Kinerja Keuangan Perumda BPR Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Profitabilitas					
Return on Assets	0,3%	-6,8%	-4,1%	-8,3%	0,5%
Net Interest Margin	12,0%	7,1%	6,0%	8,3%	7,9%
Return on Equity	-0,8%	-17,5%	-10,2%	-26,0%	1,5%
Rasio Likuiditas					
Loan to Deposit Ratio	87,6%	85,0%	69,7%	87,32%	108,2%
Rasio Aktivitas					
BOPO	98,3%	157,8%	136,5%	170,0%	95,1%
Rasio Solvabilitas					
Capital Adequacy Ratio	31,8%	33,3%	53,7%	41,2%	40,6%
Non-performing Loans	7,5%	13,2%	7,7%	5,93%	12,9%

Sumber: *Perumda BPR Kota Bandung, 2025*

Rasio profitabilitas Perumda BPR Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika kinerja keuangan yang cukup signifikan dalam tiga indikator utama: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM). ROA mengalami fluktuasi, dimulai dari 0,3% pada tahun 2020, kemudian turun drastis ke -8,3% pada 2023 sebelum membaik menjadi 0,5% di 2024. ROE menunjukkan tren negatif dari -0,8% di 2020, turun hingga -26,0% pada 2023, lalu kembali positif di angka 1,5% pada 2024. Sementara itu, NIM yang merupakan indikator efisiensi pendapatan bunga bersih, menurun dari 12,0% pada 2020 menjadi 6,0% pada 2022, kemudian naik ke 8,3% pada 2023 dan sedikit turun ke 7,9% di 2024. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan tantangan profitabilitas yang cukup besar, meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan di tahun terakhir.

Likuiditas Perumda BPR Kota Bandung diukur melalui rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang juga menunjukkan pola fluktuatif. LDR sempat menurun dari 87,6% pada tahun 2020 menjadi 69,7% di 2022, yang mengindikasikan penurunan penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga. Namun, terjadi lonjakan kembali menjadi 87,32% di 2023 dan bahkan melewati ambang ideal dengan mencapai 108,2% pada 2024. Peningkatan LDR ini menandakan agresivitas dalam penyaluran kredit, namun juga perlu diwaspadai karena bisa menandakan tekanan terhadap likuiditas jika tidak diimbangi dengan kualitas kredit yang baik.

Rasio aktivitas yang ditunjukkan melalui BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mengalami ketidakseimbangan yang cukup besar selama periode lima tahun. Dari posisi efisien sebesar 98,3% pada tahun 2020, rasio ini melonjak menjadi 157,8% di tahun 2021, menurun menjadi 136,5% di 2022, namun kembali meningkat menjadi 170,0% pada 2023. Di tahun 2024, terjadi perbaikan signifikan dengan penurunan ke level 95,1%, yang kembali menunjukkan efisiensi operasional. Tingginya BOPO di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa beban operasional sempat jauh melampaui pendapatan yang dihasilkan, namun pembalikan tren di 2024 menjadi indikator positif.

Rasio solvabilitas Perumda BPR Kota Bandung dianalisis melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Loans* (NPL). CAR meningkat signifikan dari 31,8% di tahun 2020 menjadi 53,7% pada 2022, menurun sedikit menjadi 41,2% di 2023, dan stabil di 40,6% pada 2024. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki buffer modal yang kuat untuk menutupi risiko kerugian. Sementara itu, NPL sempat meningkat dari 7,5% pada 2020 ke 13,2% di 2021, membaik menjadi 5,93% di 2023, namun kembali naik tajam ke 12,9% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapitalisasi kuat, tantangan kualitas kredit masih menjadi perhatian utama, terutama pada tahun terakhir.

Tabel 2.66. Kesehatan Perumda BPR Kota Bandung Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	BB	BB	BBB	BBB	A
Skor	46	47	59,9	60,4	68,90

Sumber: *Perumda BPR Kota Bandung, 2025*

Tabel tersebut menggambarkan perkembangan kesehatan Perumda BPR Kota Bandung dari Tahun 2020 hingga 2024. Selama Tahun 2020 dan 2021, indeks kesehatan keuangan perusahaan ini tetap pada 'BB', yang dikategorikan sebagai kurang sehat. Namun, pada Tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan yang signifikan ke indeks 'BBB' dengan skor meningkat menjadi 59.9, diteruskan dengan peningkatan ke indeks A pada 2024 dengan skor 68.90 yang menandakan perbaikan substansial dalam kesehatan keuangan perusahaan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dan stabilitas yang lebih baik.

3. PT. Bandung Infra Investama (BII)

PT. Bandung Infra Investama terlibat dalam pengembangan infrastruktur besar di Kota Bandung, meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Perusahaan ini berfokus pada perencanaan dan implementasi solusi infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016, Pemerintah Daerah memiliki 70% kepemilikan modal atas PT. Bandung Infra Investama, memperkuat keterlibatan pemerintah dalam proyek infrastruktur penting kota.

Tabel 2.67. Kinerja Keuangan PT Bandung Infra Investama Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Profitabilitas					
Return on Investment	1,0%	0,4%	2,7%	1,0%	3,4%
Return on Equity	1,0%	0,3%	0,9%	0,9%	2,7%
Rasio Likuiditas					
Current Ratio	2843,6	5309	5,4	190,13	81,20
Cash Ratio	10,8	5.221,3	5,22	179,97	72,87
Rasio Aktivitas					
Total Assets Turnover	0,02%	0,08%	1,41%	1,48%	2,38%
Rasio Solvabilitas					
Equity to Assets Ratio	99,0%	100,0%	93,4%	99,8%	99,6%

Sumber: *PT Bandung Infra Investama, 2025*

Rasio profitabilitas PT BII pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif positif secara bertahap. *Return on Investment* (ROI) naik dari 1,0% pada 2020 ke 2,7% di 2022, sempat turun ke 1,0% pada 2023, dan meningkat signifikan menjadi 3,4% di 2024. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan pola yang hampir serupa: dari 1,0% pada 2020 turun ke 0,3% pada 2021, lalu meningkat bertahap menjadi 0,9% pada 2022 dan 2023, serta melonjak ke 2,7% pada 2024. Kenaikan kedua indikator pada 2024 mencerminkan perbaikan profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi dan modal sendiri.

Rasio likuiditas PT BII mengalami fluktuasi ekstrem, terutama pada *Current Ratio* dan *Cash Ratio*. *Current Ratio* sempat mencapai 5.309,0 pada 2021, namun turun drastis menjadi

5,4 pada 2022, naik ke 190,13 pada 2023, dan menurun lagi ke 81,20 pada 2024. *Cash Ratio* juga mengikuti pola yang tidak stabil: dari 10,8 pada 2020 melonjak ke 5.221,3 pada 2021, turun ke 5,22 di 2022, lalu naik ke 179,97 di 2023 dan turun lagi ke 72,87 di 2024. Fluktuasi tajam ini mengindikasikan adanya perubahan besar dalam struktur aset lancar, yang bisa disebabkan oleh realisasi investasi, pergeseran kas ke aset lain, atau restrukturisasi internal yang memengaruhi likuiditas jangka pendek.

Rasio aktivitas yang ditunjukkan melalui *Total Assets Turnover* memperlihatkan pertumbuhan efisiensi yang signifikan. Dari level sangat rendah, yaitu 0,02% pada 2020, rasio ini naik menjadi 0,08% di 2021, lalu melonjak menjadi 1,41% di 2022, 1,48% di 2023, dan 2,38% pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Data rasio aktivitas lain seperti *Collecting Period* dan *Inventory Turnover* tidak tersedia, kemungkinan karena sifat usaha PT BII yang berbasis investasi infrastruktur dan tidak menjalankan fungsi perdagangan barang atau layanan langsung.

Rasio solvabilitas PT BII tergolong sangat kuat dan stabil selama enam tahun terakhir. *Equity to Assets Ratio* tetap sangat tinggi di 2020, bahkan mencapai 100% pada 2021. Meskipun sempat menurun menjadi 93,4% di 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 99,8% pada 2023 dan sedikit turun ke 99,6% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendanaan aset berasal dari ekuitas, dengan ketergantungan yang sangat rendah terhadap utang. Struktur permodalan ini mencerminkan profil risiko yang sangat konservatif dan sehat dari sisi solvabilitas.

Tabel 2.68. Kesehatan PT Bandung Infra Investama Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	B	BBB	A	A	A
Skor	32,3	60	68,5	73	77,5

Sumber: *PT Bandung Infra Investama, 2025*

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan kesehatan keuangan PT. Bandung Infra Investama dari Tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan indeks 'B' pada Tahun 2020 yang dikategorikan sebagai kurang sehat. Namun, pada Tahun 2021, terjadi peningkatan ke 'BBB', dan pada Tahun 2022 sampai dengan 2024, indeksnya mencapai 'A', menandai peningkatan substansial dan memasukkannya ke dalam kategori sehat.

4. Perumda Pasar Juara

Perumda Pasar Juara mengelola pasar rakyat di Kota Bandung dengan tujuan menyediakan akses ke barang dan jasa berkualitas dengan harga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Efisiensi pengelolaan mereka memastikan stabilitas harga dan mendukung keberlangsungan pedagang lokal, berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal. Berdasarkan Salinan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, Pemerintah Daerah memiliki kepemilikan penuh atas Perumda Pasar Juara, menegaskan dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.69. Kinerja Keuangan Perumda Pasar Juara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Profitabilitas					
Return on Investment	10,8%	34,6%	-1,1%	0,5%	-0,1%
Return on Equity	-13,3%	-1,9%	-3,0%	-1,3%	-2%
Rasio Likuiditas					
Current Ratio	1,2	1,6	1,3	1,38	1,08
Cash Ratio	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
Rasio Aktivitas					
Collecting Period (hari)	192	506	1253	977	936
Total Assets Turnover	20,1%	5,7%	2,3%	3,5%	2,8%
Rasio Solvabilitas					
Equity to Assets Ratio	91,9%	91,4%	90,2%	88,2%	90%

Sumber: *Perumda Pasar Juara Kota Bandung, 2025*

Rasio profitabilitas Perumda Pasar Juara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi tajam, baik pada *Return on Investment* (ROI) maupun *Return on Equity* (ROE). ROI sempat melonjak signifikan dari 10,8% pada 2020 ke puncaknya 34,6% di 2021, namun kemudian menurun tajam menjadi -1,1% pada 2022, naik sedikit ke 0,5% di 2023, lalu kembali turun ke -0,1% pada 2024. Sementara itu, ROE menunjukkan tren negatif selama periode lima tahun terakhir: -13,3% pada 2020, dan terus berada di level negatif hingga -2% pada 2024. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam menghasilkan laba yang proporsional terhadap ekuitas yang dimiliki, serta kondisi keuangan yang tidak stabil.

Rasio likuiditas Perumda Pasar Juara dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan tekanan yang konsisten terhadap kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. *Current Ratio* 1,2 pada 2020, lalu mengalami sedikit fluktuasi dan berakhir di angka 1,08 pada 2024. Nilai ini masih di atas ambang batas minimum (1,0), namun menunjukkan ruang gerak yang makin sempit. Sementara itu, *Cash Ratio* sangat rendah sepanjang periode: dari 0,01 di 2020 hingga hanya 0,07 pada 2024. Rendahnya rasio kas ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kewajiban jangka pendek tidak dapat ditutupi langsung dengan kas, yang menandakan risiko likuiditas yang tinggi dan keterbatasan fleksibilitas keuangan perusahaan.

Rasio aktivitas menunjukkan efisiensi operasional yang menurun dalam enam tahun terakhir. *Collecting Period* meningkat drastis dari 192 hari pada 2020 menjadi 1.253 hari di 2022, meskipun sedikit membaik ke 936 hari di 2024. Durasi penagihan yang panjang ini mengindikasikan rendahnya efektivitas dalam mengelola piutang usaha. *Total Assets Turnover* juga menurun, dari 20,1% pada 2020 ke 2,8% di 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan menjadi semakin tidak efisien.

Rasio solvabilitas yang diukur melalui *Equity to Assets Ratio* relatif stabil namun cenderung menurun secara bertahap. Dimulai dari 91,9% pada 2020, lalu turun secara

perlahan menjadi 90,2% di 2022, 88,2% di 2023, dan 90% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan ketergantungan terhadap utang atau penurunan nilai ekuitas, walaupun struktur permodalan secara umum masih menunjukkan dominasi ekuitas terhadap total aset.

Tabel 2.70. Kesehatan Perumda Pasar Juara Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	B	B	B	BB	BBB
Skor	31,5	38,2	40	45,55	51,5

Sumber: *Perumda Pasar Juara Kota Bandung, 2025*

Tabel tersebut menunjukkan perubahan dalam kesehatan Perumda Pasar Juara dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks kesehatan perusahaan mulai pada 'B' pada tahun 2020 hingga 2022 berada dalam kategori kurang sehat. Selanjutnya mulai membaik di 2023 menjadi indeks BB dan 2024 mencapai indeks BBB dengan skor 51,5. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada penurunan lebih lanjut dalam kategori, perusahaan belum mengalami perbaikan signifikan dalam kesehatan keuangannya.

5. Bank BJB

Bank BJB, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, memainkan peranan penting dalam perekonomian regional Jawa Barat dan Banten. Meskipun Kota Bandung hanya memiliki 1,18% kepemilikan saham, dengan total 124.048.575 lembar saham, keikutsertaan bank dalam pembahasan ini dikarenakan kontribusi signifikan bank tersebut terhadap sektor-sektor ekonomi penting melalui layanan keuangan untuk perusahaan besar, UMKM, dan konsumen individu. Bank ini juga berperan kunci dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.71. Kinerja Keuangan Bank BJB Tahun 2020-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Return on Assets	1,68%	1,66%	1,7%	1,8%	1,3	
Net Interest Margin	5,75%	5,39%	5,8%	5,9%	5,2	
Return on Equity	16,51%	16,95%	19,0%	18,6%	14,6	
Profit (Loss to Income Ratio	12,54%	12,58%	14,3%	15,5%	11,3	
Earning per Share (EPS)	156,83	171,49	207,00	219,00	169,00	

Kinerja Laba Rugi Neraca Bank BJB dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang konsisten di semua rasio keuangan utama. *Return on Equity* (ROE) turun dari 19,0% di tahun 2021 menjadi 14,6% di tahun 2023, mengindikasikan penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari ekuitasnya. Serupa, *Return on Assets* (ROA) menurun dari 1,7% menjadi 1,3%, dan *Net Interest Margin* (NIM) dari 5,8% menjadi 5,2%, mencerminkan efisiensi operasional yang berkurang. Profit to Income Ratio juga turun dari 14,3% menjadi 11,3%, menunjukkan bahwa proporsi pendapatan yang diubah menjadi laba semakin menurun. Bank BJB mengalami penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan selama

periode yang diobservasi, menandakan potensi tantangan dalam menjaga pertumbuhan laba dan efisiensi operasional.

Tren Earnings Per Share (EPS) Bank BJB dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. EPS naik dari 207 pada tahun 2021 ke 219 pada tahun 2022, menandakan peningkatan laba per saham. Namun, terjadi penurunan signifikan di tahun 2023, turun menjadi 169. Penurunan ini bisa mengindikasikan penurunan laba bersih.

Analisis mengenai seluruh BUMD di Kota Bandung dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis kinerja keuangan Bank BJB menggambarkan tantangan dalam menjaga kinerja laba yang stabil. Meskipun ada peningkatan EPS pada Tahun 2022, penurunan di tahun berikutnya menunjukkan volatilitas dalam pendapatan perusahaan. Bank BJB harus mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola risiko keuangan untuk memperbaiki tren ini dan mengoptimalkan kembali stabilitas keuangannya di masa depan. Bank BJB menghadapi penurunan kinerja keuangan, namun tetap berperan penting dalam sektor keuangan regional Jawa Barat dan Banten. Bank ini perlu menguatkan strateginya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko keuangan guna mencapai stabilitas yang lebih baik di masa mendatang.
b. Analisis kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung dan Bank BJB memberikan gambaran yang berbeda terkait kinerja keuangan dan operasional entitas-entitas ini. Perumda Tirtawening berhasil mencapai kategori sehat dalam indeks kesehatan BUMD berkat peningkatan signifikan dalam profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Perusahaan ini mampu mengatasi tantangan keuangan, yang menjadi indikasi positif dari efektivitas manajemen.
c. Perumda BPR Kota Bandung menghadapi tantangan dalam kinerja keuangannya namun menunjukkan peningkatan menuju perbaikan dalam indeks kesehatan BUMD. Upaya meningkatkan profitabilitas dan solvabilitas memberikan sinyal positif meskipun perusahaan masih berada dalam kategori kurang sehat.
d. Perumda Pasar Juara menunjukkan upaya dalam mempertahankan stabilitas di tengah fluktuasi kinerja keuangan. Perusahaan ini terus mencari peluang untuk meningkatkan profitabilitas dan kesehatan operasionalnya guna mendukung ekonomi lokal.
e. PT Bandung Infra Investama menunjukkan tren positif dalam profitabilitas dan solvabilitas yang berhasil membawa perusahaan ini ke kategori sehat. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam efektivitas penggunaan aset dan pengelolaan operasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis kinerja BUMD Kota Bandung dan Bank BJB menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Masing-masing entitas telah menunjukkan kekuatan dan tantangan unik, tetapi penting

bagi mereka untuk terus fokus pada perbaikan strategi dan pengelolaan sumber daya agar dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan secara keseluruhan.

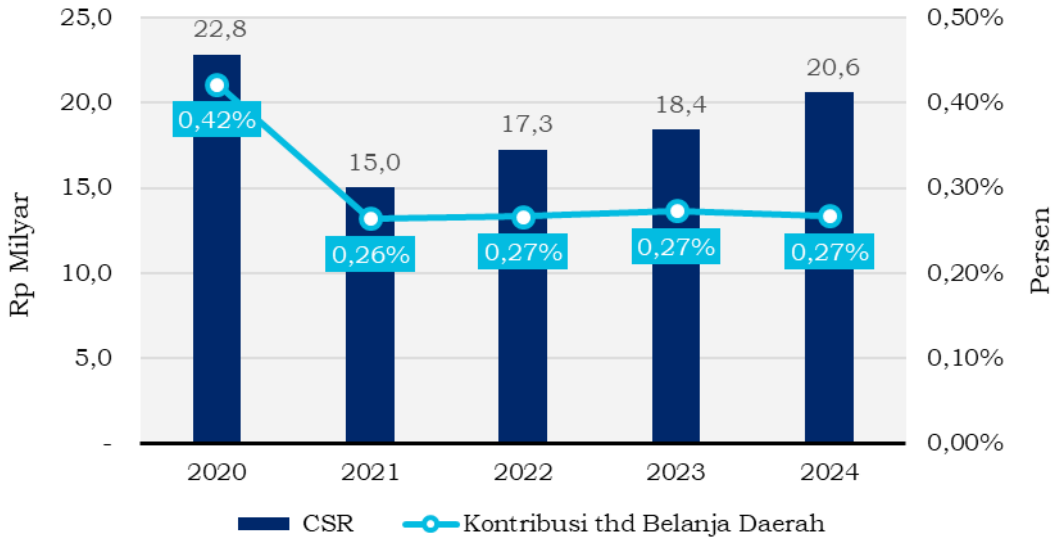
2.1.9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang dikenal secara luas sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. TJSL menyediakan dana tambahan yang bisa digunakan untuk berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. TJSL mampu mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Melalui kemitraan ini, dapat tercipta sinergi yang kuat dalam menangani berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih holistik.

Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bandung, berperan sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan TJSL dengan memastikan agar program-program yang dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan pembangunan. Peran ini dijalankan berdasarkan sejumlah regulasi yang menjadi pijakan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda TJSL. Meskipun tidak diperkenankan menerima dana TJSL dalam bentuk tunai, pemerintah tetap dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendukung program sosial secara langsung melalui kegiatan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap dana TJSL yang bersumber dari sektor swasta, meskipun dana tersebut berada di luar pos belanja APBD, guna memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan berkelanjutan.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi dana TJSL/CSR dari sektor swasta sebagai bagian dari pembangunan non-APBD yang dicatat oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, dana TJSL yang tercatat mencapai Rp22,8 miliar, dengan kontribusi sebesar 0,42% terhadap total belanja daerah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan nilai nominal dan persentase kontribusi, di mana pada tahun 2021 hanya tercatat Rp15,0 miliar atau setara 0,26%. Meskipun terjadi peningkatan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024, baik dari sisi nominal maupun kesinambungan program (Rp17,3 miliar di 2022, Rp18,4 miliar di 2023, dan Rp20,6 miliar di 2024), kontribusi terhadap total belanja daerah relatif stagnan pada kisaran 0,27%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun volume APBD Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun, besaran kontribusi TJSL cenderung belum mengikuti pertumbuhan yang seimbang.

Gambar 2.58. Kontribusi Dana CSR/TJSL Terhadap Belanja Daerah Non-APBD Tahun 2020-2024



Sumber: *Bappelitbang, 2025*

Sedangkan tinjauan per bidang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi dana TJSL perusahaan dan bantuan pihak ketiga telah diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori program, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012. Peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha yang berdomisili di Kota Bandung untuk menyelenggarakan program TJSL yang diselaraskan dengan tujuh agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Kemakmuran, (d) Lingkungan Hidup, (e) Seni Budaya, (f) Olahraga, dan (g) Agama. Seluruh dana yang tercatat pada tahun tersebut bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR), tanpa adanya pencatatan dana hibah. Total dana CSR yang dihimpun pada tahun 2024 mencapai Rp20.596.437.958, berasal dari 132 kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Tabel 2.72. Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan & Bantuan/ Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2024

No	Bidang	Hibah		CSR			Total	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Pihak Swasta	Jumlah (Rp)	%
1	Lingkungan Hidup		-	3,489,787,032	16.94	24	3,489,787,032	16.94
2	Sosial Ekonomi		-	10,685,195,876	51.88	62	10,685,195,876	51.88
3	Pendidikan		-	2,495,273,500	12.12	6	2,495,273,500	12.12
4	Kesehatan		-	2,238,862,550	10.87	67	2,238,862,550	10.87
5	Agama		-	1,299,337,000	6.31	7	1,299,337,000	6.31
6	Olahraga		-	183,482,000	0.89	0	183,482,000	0.89
7	Seni Budaya		-	204,500,000	0.99	5	204,500,000	0.99
Jumlah Total		**-**	**-**	**20,596,437,958**	**100**	**132****	**20,596,437,958**	**100**

Dari total tersebut, bidang Sosial Ekonomi menjadi penerima kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp10.685.195.876 atau 51,88% dari total dana. Hal ini mencerminkan fokus perusahaan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan

UMKM, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas. Kontribusi terbesar kedua tercatat pada bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp3.489.787.032 atau 16,94%, yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, bidang Pendidikan menerima alokasi dana sebesar Rp2.495.273.500 atau 12,12%, mencerminkan dukungan perusahaan terhadap peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan beasiswa, fasilitas sekolah, dan kegiatan literasi.

Pada urutan keempat, bidang Kesehatan mendapatkan dana sebesar Rp2.238.862.550 atau 10,87%, yang umumnya digunakan untuk peningkatan akses layanan kesehatan, penyuluhan, dan kegiatan promotif-preventif. Sementara itu, bidang Agama memperoleh alokasi sebesar Rp1.299.337.000 atau 6,31%, dan bidang Olahraga serta Seni Budaya masing-masing menerima kontribusi terkecil, yaitu Rp183.482.000 (0,89%) dan Rp204.500.000 (0,99%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program TJSL perusahaan di Kota Bandung tahun 2024 masih berfokus pada bidang sosial ekonomi dan lingkungan, sedangkan bidang olahraga dan seni budaya masih membutuhkan penguatan peran serta dunia usaha agar mendapatkan perhatian yang lebih seimbang dalam kerangka pembangunan inklusif.

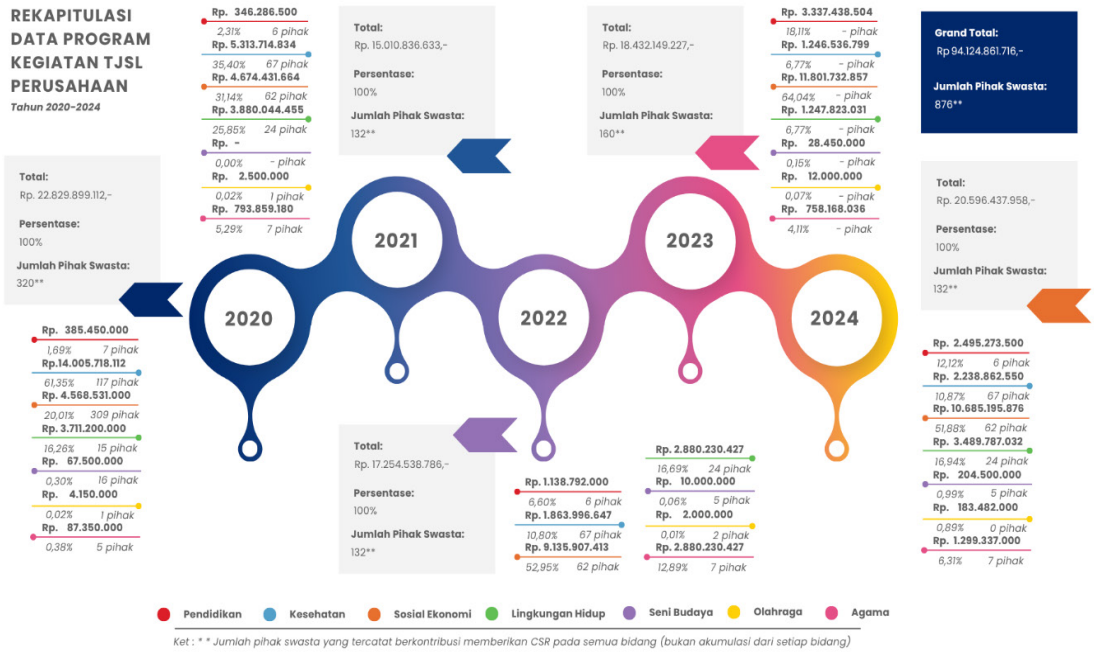
Meskipun program TJSL di Kota Bandung menunjukkan peningkatan kontribusi dalam beberapa sektor prioritas, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera direspons. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan alokasi dana antar bidang, di mana sektor Sosial Ekonomi memperoleh porsi terbesar, sementara bidang lain seperti Agama, Pendidikan, dan Kesehatan masih menerima proporsi yang relatif kecil. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kebutuhan akan strategi distribusi yang lebih adil agar seluruh agenda prioritas pembangunan daerah memperoleh manfaat secara merata. Selain itu, fluktuasi tingkat partisipasi dunia usaha juga menjadi persoalan tersendiri. Beberapa sektor mencatat tingginya jumlah kontributor, sementara sektor lainnya masih belum banyak diminati. Untuk itu, pemerintah perlu terus mendorong perluasan keterlibatan pelaku usaha di sektor-sektor yang masih kurang terakomodasi.

Sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Forum TJSL sebagai wadah koordinatif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Forum ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan TJSL dengan arah kebijakan pembangunan kota, sekaligus memperluas cakupan kontribusi dunia usaha agar lebih merata dan berkelanjutan. Pembentukan forum ini didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 539/Kep.2349-Bappelitbang/2022 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2022–2026, yang menjadi landasan formal pelaksanaan koordinasi lintas sektor. Meskipun Forum TJSL telah eksis secara kelembagaan, efektivitas pelaksanaannya masih perlu terus dipacu. Diperlukan penguatan peran forum ini sebagai motor penggerak agar program TJSL tidak hanya bersifat simbolik atau sektoral, tetapi benar-benar terarah, terukur, dan

mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kota Bandung.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bandung menunjukkan geliat partisipasi dunia usaha yang konsisten dan strategis dalam mendukung agenda pembangunan kota. Total dana CSR yang berhasil dihimpun sepanjang periode 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp94.124.861.716, dengan melibatkan sebanyak 876 pihak swasta yang memberikan kontribusi di berbagai bidang prioritas. Seluruh dukungan ini tersebar ke dalam tujuh sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, lingkungan hidup, agama, seni budaya, dan olahraga. Dari sisi kontribusi tahunan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan total Rp22,83 miliar dan partisipasi dari 320 entitas—jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, kontribusi terendah tercatat pada tahun 2021 dengan nilai Rp15,01 miliar dan hanya melibatkan 132 pihak swasta. Selepas tahun 2021, tren kontribusi kembali menguat secara bertahap, menandakan pulihnya komitmen sektor usaha pasca pandemi dan kembalinya perhatian terhadap program pembangunan sosial di tingkat kota.

Gambar 2.59. Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan di Kota Bandung Tahun 2020-2024



Sumber: *Buku Menu TJSL Kota Bandung Tahun 2024*

Jika ditinjau dari distribusi sektoral, bidang Sosial Ekonomi menjadi sektor yang paling dominan dengan total alokasi dana mencapai lebih dari Rp48,67 miliar, disusul oleh bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Ketiga bidang ini menjadi pilar utama dari program TJSL Kota Bandung dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, kontribusi untuk bidang Seni Budaya dan Olahraga masih relatif kecil dan belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan potensinya. Kesenjangan ini menjadi refleksi bahwa meskipun keterlibatan swasta sudah mengakar, namun pemerataan dukungan lintas bidang masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha memiliki peran sentral dalam membangun Kota Bandung yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, optimalisasi TJSL perlu diarahkan pada penguatan kualitas program, penyebaran yang lebih merata secara geografis, serta inovasi-inovasi tematik yang mampu menjawab tantangan kota di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi, membuka ruang partisipasi yang lebih luas, dan memperkaya pemetaan kebutuhan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap program TJSL memberikan dampak yang nyata, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh warga kota.

2.1.10. Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026

2.1.10.1.Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Status capaian indikator kinerja sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 per misi digambarkan dengan terdapat 24 indikator kinerja sasaran yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan 5 (lima) misi pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Dari 5 indikator tujuan di 5 Misi Kota Bandung, terdapat 4 indikator yang capaiannya diatas 100%.

Satu indikator tujuan di Misi 4 walaupun belum mencapai 100% namun angka capaiannya sudah besar yaitu 93,16%. Sedangkan untuk indikator sasaran, dari 24 indikator sasaran sudah sebanyak 16 indikator sasaran sudah mencapai kinerja 100% atau diatas 100%. Ada dua indikator sasaran yang belum diperoleh datanya (Opini BPK dan EPPD) namun diperoleh keyakinan yang cukup untuk kedua indikator sasaran tersebut dapat mencapai kinerja 100% atau lebih. Terdapat 3 indikator sasaran yang capaian kinerjanya diatas 90%, kemudian 1 indikator sasaran di atas 80%, dan hanya 2 indikator sasaran yang masih di bawah 80% capaian kinerjanya sehingga memerlukan perhatian khusus.

Lebih rinci mengenai capaian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing

Secara keseluruhan indikator sasaran pada Misi 1 telah melampaui capaian target RPJMD Kota Bandung 2018-2023. Hal ini berkontribusi pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung yang pada tahun 2023 mencapai nilai 83,29 poin dan masuk pada kategori tinggi (> 80). IPM Kota Bandung selalu menunjukan kecenderungan yang positif hingga 2019. Pada 2020 capaian IPM menurun 0,11 poin menjadi sebesar 81,51 dibanding capaian IPM tahun 2019 sebesar 81,62. Penurunan ini diakibatkan penurunan Pengeluaran per Kapita dampak dari Pandemi COVID-19. IPM Kota Bandung kembali menunjukkan kenaikan pada tahun 2021, dimana capaian IPM sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Misi 1

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realiasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
Tujuan Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri Dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya											
1	**Indeks Pembangunan Manusia**	**80,31**	**81,62**	**81,51**	**81,96**	**82,50**	**81,20**	**83,29**	102,53	**81,20**	102,53
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat											
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,18 Tahun	14,19 Tahun	14,20 Tahun	14,21 Tahun	14,23 Tahun	14,23 Tahun	**14,24 Tahun**	100,07	14,23 Tahun	100,07
2.	Angka Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	10,61 Tahun	10,74 Tahun	10,75 Tahun	10,99 Tahun	11,00 Tahun	10,78 Tahun	**11,06 Tahun**	102,60	10,78 Tahun	102,60
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat											
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,00 Tahun	74,14 Tahun	74,28 Tahun	74,46 Tahun	74,75 Tahun	73,98 Tahun	**75,04 Tahun**	101,43	73,98 Tahun	101,43
Sasaran 3: Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis											
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	N/A	7,49 Poin	6,5 Poin	N/A	7,05 Poin	6,80 Poin	**7,50 Poin**	110,29	6,8 Poin	110,29

Sumber: *Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023*

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 memperoleh Nilai 83,58 atau Predikat A. Capaian tersebut diperoleh dari Penilaian Reformasi Birokrasi General dengan Nilai 69,72 yang merupakan akumulatif dari 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama dan 26 (dua puluh enam) Indikator dengan Bobot 100 dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan Nilai 13,86 yang merupakan akumulatif dari 5 (lima) Tema yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Penanggulangan Stunting, Peningkatan Penggunaan PDN dan Pengendalian Inflasi dengan bobot 20**.**

Selanjutnya, Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung pada tahun 2023 adalah 3,83 katagori A, capaian kinerja ini melebihi target predikat B.

Tabel 2.74. Capaian Kinerja Misi 2

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
Tujuan Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien											
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	111,17	BB	111,17
2	Level Kematangan Smart City	Integrative	Integrative	B	A	A	B	A	132,07	B	132,07
Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi											
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	51,61	40,00%	95,00%	68,33%	90,00	100	100	100	100	100
2.	Nilai AKIP	A	BB	BB	BB	A	A	A	100	A	100
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	N/A	N/A	WTP	N/A
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)	3,11	3,72	3,20	3,19	3,61	3,35	3,98	118,81	3,35	118,81
5.	Nilai EPPD	3,4144	3,3019	3,4013	N/A	2,44	3,4044	3.3362	98,00	3,4044	98,00

Sumber: *Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023*

Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Indikator tujuan capaian misi 3 pertama adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2023 sebesar 5,07 persen sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2022, tapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,05 persen. Disamping itu pertumbuhan ekonomi Kota Bandung masih lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,00 persen dan Ekonomi Nasional sebesar 5,05 persen.

Membaiknya kegiatan pariwisata pengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung pasca pandemi Covid 19 memberikan multiplyer efek yang menggerakan berbagai sektor perekonomian di Kota Bandung. Khususnya jasa pariwisata, perdagangan, hiburan, dan KUKM. Meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa mendorong peningkatan produksi yang menyerap tenaga kerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang menganggur memperoleh pekerjaan kembali seiring dengan membaiknya perekonomian di Kota Bandung.

Pengeluaran per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp 18.236.000/kapita/tahun lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022, secara umum menunjukan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Meskipun kondisi ekonomi Kota Bandung belum pulih sepenuhnya, membaiknya daya beli masyarakat menjadi indikasi kesejahteraan masyarakat lebih baik. Tingkat inflasi tahun ke tahun yang rendah sebesar 0,63 persen cukup mendukung membaiknya daya beli masyarakat Kota Bandung. Hal tersebut juga berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan garis kemiskinan yang diindikasikan dengan mengecilnya indeks kedalaman kemiskinan dan mengecilnya kesenjangan antar orang miskin yang diindikasikan dengan indeks keparahan kemiskinan

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang kedua adalah Gini Ratio. Upaya menurunkan Gini Ratio di Kota Bandung diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran terbuka.

Namun berdasarkan data BPS tahun 2023 Gini Ratio masih tetap tidak berubah yaitu sebesar 0,459, atau nilainya sama dengan tahun 2022 yaitu 0,459. Upaya Pemerintah Daerah untuk mempekecil jurang kesejangan pendapatan masih harus terus ditingkatkan dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bukan hanya sekedar menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, tapi harus dibarengi juga meningkatkan pendapatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi harus terus meningkatkan keterlibatan masyarakat kurang mampu atau miskin agar dapat meningkatkan pendapatannya, bukan hanya sekedar keluar

dari garis kemiskinan tapi bisa naik kelas menjadi golongan orang mampu yang tidak rentan menjadi miskin. Secara makro diharapkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas mengecil. Dengan demikian Gini Ratio Kota Bandung akan dapat diturunkan secara signifikan.

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang ketiga adalah PDRB per kapita. Berdasarkan data BPS, PDRB Per kapita tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 88,55 juta per kapita melebihi target pada tahun 2023 sebesar Rp. 81,33 juta per kapita. Lebih tinggi jika dibandingkan realisasi PDRB per kapita tahun 2022 sebesar Rp 85,82 juta per kapita. Secara umum ini menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung meningkat, meskipun secara proposional tingkat pemerataanya belum baik. Hal ini juga menunjukan pemulihan ekonomi terus berlanjut meskipun kecepatannya melambat, paling tidak masih relatif stabil dikisaran 5 persen.

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang keempat adalah pengeluaran per kapita sebagai salah satu komponen pendukung capaian IPM sebagaimana tujuan pada Misi 1. Pada tahun 2023 realisasi pengeluaran per kapita sebesar Rp18.236.000/orang/tahun melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp17.227.000/orang/tahun atau capaian kinerjanya sebesar 105,85 persen. Dibandingkan dengan realisasi pengeluaran per kapita tahun 2022 sebesar Rp17.639.000/orang/tahun ada kenaikan sebesar Rp597.000/orang/tahun, atau meningkat sebesar 3,38 persen.

Peningkatan pengeluaran per kapita tidak terlepas dari keberhasilan pemulihan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, terkendalinya tingkat inflasi dan kolaborasi implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung yang sangat massif dan lebih tepat sasaran. Sehingga berdampak pada membaiknya daya beli masyarakat meskipun belum optimal pemerataannya.

Indikator sasaran capaian Misi 3 yang pertama adalah Indeks Daya Saing Pariwisata yang merupakan salah satu parameter yang diukur Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI). Penyusunan indeks diperoleh melalui survei dan mengacu pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan rentang skala indeks 0-5. Ada 4 (empat) aspek yang diukur untuk menentukan tingkat daya saing pariwisata, yaitu: aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, potensi wisata, dan infrastruktur.

Realisai indeks daya saing pariwisata pada tahun 2023 sebesar 3,52 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,31 atau capaian kinerjanya sebesar 106,59 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja nyata indeks daya saing pariwisata tahun 2022

sebesar 3,41 maka ada peningkatan sebesar 0,11 poin atau naik sebesar 3,22 persen. Jika dibandingkan target periode akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 3,31 poin, capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 106,59 persen.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program yang mendukung capaian Indeks Daya Saing Kota Bandung. Pada tahun 2023, urusan pariwisata menyelenggarakan 4 program, yaitu 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2) Program pemasaran pariwisata; 3) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program-program tersebut adalah Rp19,880,500,709 yang direalisasikan sebesar Rp19,409,049,547 atau 97,63%.

Indikator sasaran kedua capaian Misi 3 adalah Angka Kemiskinan. Angka kemiskinan menurun pada tahun 2023 sebesar 3,96 persen sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 3,14 persen atau capaian kinerjanya sebesar 73,88 persen. Tapi lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 4,25 persen atau ada penurunan sebesar 0,29 persen. Pada tahun 2023 standar garis kemiskinan meningkat sebesar Rp.591.124 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 545.675. Meskipun standar garis kemiskinan meningkat tapi indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan menurun. Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,59 poin, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,70 poin. Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,15 poin, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,17 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan penanggulanan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi cukup berhasil. Meskipun standar garis kemiskinan meningkat tapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun. Fakta ini menunjukan bahwa daya beli masyarakat membaik walaupun walaupun belum pulih sepenuhnya.

Selanjutnya Indikator sasaran ketiga capaian Misi 3 adalah Tingkat Pengangguran terbuka, Kesinambungan pemulihan ekonomi Kota Bandung berdampak baik pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2023 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,83 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 10,26 persen atau capaian kinerja sebesar 113,94 persen. Jika dibandingkan dengan TPT tahun 2022 sebesar 9,55 persen maka ada penurunan sebesar 0,72 persen. Jika dibandingkan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 10,26%, maka tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 113,94 persen.

Tabel 2.75. Capaian Kinerja Misi 3

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
Tujuan : Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,08%	6,79%	-2,28%	3,76%	5,41%	5,05%	5,07%	100,39	5,05%	100,30
2	Gini Ratio	0,423	0,39	0,402	0,427	0,459	0,399	0,459	84,96	0,399	84,96
3	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	73,92	78,81	76,95	81,70	85,82	81,33	88,55	108,87	81,33	108,87
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rupiah per orang)	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639	17.227	18.236	105,85	17.227	105,85
Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota											
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,34	3,41	3,29	3,29	3,41	3,31	3,52	106,59	3,31	106,59
2	Angka Kemiskinan	3,57%	3,38%	3,99%	4,37%	4,25%	3,14%	3,96	73,88	3,14%	73,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,01%	8,16%	11,19%	11,46%	9,55%	10,26%	8,83%	113,94	10,26%	113,94

Sumber: *Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023*

Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Kinerja Misi 4 difokuskan pada pembangunan ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, peningkatan layanan air bersih dan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung. Pencapaian target diukur berdasarkan pengolahan hasil data survey *Indeks Livable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur dilaksanakan survey primer melalui penyebaran kuesioner untuk data subyektif mengenai persepsi masyarakat dan pengolahan data sekunder berupa data obyektif realisasi capaian kinerja aspek *Indeks Livable City* yang diukur. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 7,59 dari target sebesar 8,00 atau mencapai atau mencapai 94,97%, dimana capaian tersebut menyumbang sebesar 94,97% dari target sebesar 8,00 pada akhir RPJMD tahun 2023.

Tingkat capaian *Indeks Livable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur didukung melalui pencapaian indikator Persentase Luasan RTH, Persentase Penurunan Titik Genangan, Persentase Penurunan Kemacetan, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Cakupan Pelayanan Air Minum, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, serta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Misi 4

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
I	**Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur**	**7,66**	**N/A**	**N/A**	**7,453**	**8,00**	**7,59**	**94,97**	**8,00**	**94,9725**
1	Persentase Luasan RTH	12,22	12,25	12,4	12,44	13,77	12,49	90,70	13,77	90,70
	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan 2020	63,30	60,76	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Penurunan Titik Genangan	N/A	67,65	14,71	14,71	41,18	11,76	171,43	41,18	171,43
	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	11	11	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Penurunan Kemacetan	-	24,35	20,87	14,78	7,83	7,83	100	7,83	100
4	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	4,28	2,94	2,79	2,32	2,16	1,88	112,96	2,16	112,96
5	Cakupan Pelayanan Air Minum	80,24	79,38	82,19	85,14	83,00	91,30	110	83,00	110
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,22	48,54	53,84	55,70	51,79	56,32	108,75	51,79	108,75
7	Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan	97,99	98,32	98,50	98,70	99,00	98,57	99,57	99,00	99,57

Sumber: *Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023*

2.1.10.2.Evaluasi RPD Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunnan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang encana Pembangunnan Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen ini merupakan memberi arahan kebijakan bagi pembangunan Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.22	75,83	100,81%
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.06	11,07	100,09%
		2.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.25	14,25	100,00%
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	3.1	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/ Orang/ Tahun	18.216	18,795	103,18%
		3.2	Angka Kemiskinan	Persen	4,2	3,87	107,86%
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77.11 (BB)	87,30	113,21%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	5.1	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah	236.687.605	233.053.790	98,46%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	6.1	Tingkat Penangguran Terbuka	Persen	9.27	7,4	120,17%
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	7.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7.81	8,33	106,66%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	8.1	Indeks Livebale City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7.66	7,78	101,57%
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	9.1	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks	7.15	6,73	94,13%

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada:

A. **Tujuan 1**: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pertama tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat', 'Meningkatnya Pendidikan Masyarakat' dan 'Meningkatnya Standar Hidup Layak'.

1) Umur Harapan Hidup, dengan capaian 100,81%
2) Rata-Rata Lama Sekolah, dengan capaian 100,09%
3) Harapan Lama Sekolah, dengan capaian 100%
4) Pengeluaran perkapita, dengan capaian 103,18%
5) Angka Kemiskinan, dengan capaian 102,37%

B. **Tujuan 2**: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel, mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel'.

1) Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian 113,21%

C. **Tujuan 3**: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan ketiga tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota' dan 'Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota'.

1) PDRB ADHK, dengan capaian 98,46%

2) Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan capaian 120,17%

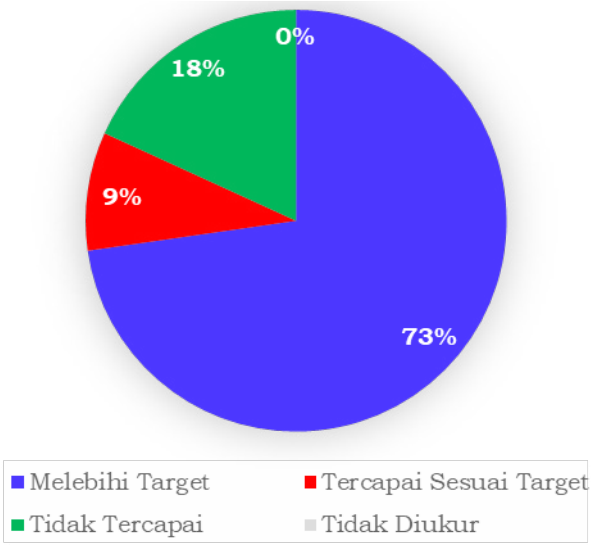
D. **Tujuan 4**: Meningkatkan Kelayakhunian Kota, memiliki makna terciptanya kota layak huni atau liveable city yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan keempat tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu: 'Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya', 'Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur', dan 'Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi'. Adapun rincian ketiga sasaran strategis RPD menggambarkan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan kota yang layak huni, diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Livable City Aspek Sosial Budaya, dengan capaian 106,66%

2) Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, dengan capaian 101,57%

3) Indeks Livable City Aspek Ekonomi, dengan capaian 94,13%

Gambar 2.60. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024



Keterangan:

Predikat	Kode Warna	Jumlah Indikator
Melebihi Target		8
Tercapai Sesuai Target		1
Tidak Tercapai		2
Tidak Diukur		0
Total		11

Sumber: *LPPD Kota Bandung Tahun 2024*

Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Program-program pembangunan 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bandung 2024-2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Pemerintah Kota Bandung sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Tujuan pada RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Berkenaan dengan Tujuan Pemerintah Kota Bandung, tercatat ada 4 (empat) Tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Gambaran Singkat mengenai Kondisi Keuangan Daerah dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan kewenangan daerah serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. APBD mencerminkan prioritas kebijakan, kapasitas fiskal, serta efektivitas tata kelola anggaran yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Analisis atas realisasi APBD selama periode 2020–2024 menjadi acuan strategis dalam menilai kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, menjamin kelangsungan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian nasional. Seluruh aktivitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup antara lain:

- Hak pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
- Kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- Penerimaan dan pengeluaran daerah;
- Pengelolaan kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah.

Dalam struktur APBD, terdapat tiga komponen utama yang menjadi objek analisis fiskal:

1. **Pendapatan Daerah,** yang merupakan hak pemerintah daerah dan menjadi indikator kapasitas fiskal. Estimasi pendapatan harus disusun secara rasional dan terukur, dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional, kondisi ekonomi makro, serta potensi riil sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. **Belanja Daerah,** yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan, termasuk program pembangunan daerah yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada masyarakat.
3. **Pembiayaan Daerah,** yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat pinjaman atau investasi jangka panjang, yang harus dikelola secara prudent demi menjaga keberlanjutan fiskal.

Hasil analisis terhadap postur APBD selama periode 2020–2024 menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah kebijakan fiskal Pemerintah Kota Bandung untuk periode perencanaan 2025–2029. Fokus kebijakan diarahkan pada:

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran;
- Penguatan sistem akuntabilitas dan monitoring berbasis kinerja;
- Perluasan ruang fiskal melalui inovasi pendanaan dan optimalisasi belanja prioritas.

Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020–2024

Komponen APBD Kota Bandung terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Selama lima tahun terakhir, Kota Bandung menunjukkan tren fiskal yang relatif positif dengan rata-rata capaian pendapatan mendekati 95%. Stabilitas ini mencerminkan perencanaan yang semakin presisi dan tata kelola pendapatan yang membaik.

Pendapatan Daerah: Konsolidasi Menuju Kemandirian, Total pendapatan meningkat dari Rp5,64 triliun (2020) menjadi Rp7,15 triliun (2024), dengan rata-rata capaian terhadap target 95,74%. Kinerja ini ditopang oleh pertumbuhan konsisten pada pajak daerah dan lonjakan signifikan retribusi (naik 10 kali lipat), yang membuka peluang baru dalam optimalisasi layanan publik.

Belanja Daerah: Stabil, Namun Belum Maksimal, Realisasi belanja berada di kisaran 85–87% dari target, mengindikasikan efisiensi fiskal sekaligus tantangan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dapat menjadi dasar peninjauan ulang proses pelaksanaan dan strategi percepatan program prioritas.

Penerimaan dan Pengeluaran: Disiplin Fiskal Terjaga, Kinerja penerimaan sangat baik, selalu mendekati atau melebihi 99–100% dari target, menandakan penguatan sisi penerimaan non-pendapatan. Pengeluaran daerah dikelola secara terkendali, mayoritas tahun mendekati 100%, menunjukkan konsistensi fiskal dan kepatuhan regulatif.

Tabel 2.78. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PENDAPATAN DAERAH			
2020	6.085,41	5.643,96	92,75
2021	6.012,15	5.838,24	97,11
2022	6.824,34	6.415,75	94,01
2023	7.284,36	6.905,93	94,80
2024	7.448,53	7.153,10	96,03
BELANJA DAERAH			
2020	6.382,75	5.407,13	84,71
2021	6.525,38	5.675,60	86,98
2022	7.412,92	6.473,48	87,33
2023	7.813,75	6.746,04	86,34
2024	8.133,18	7.067,21	86,89
PENERIMAAN DAERAH			
2020	231,28	241,60	104,46
2021	478,44	474,74	99,23
2022	599,48	598,02	99,76
2023	529,38	529,38	100,00
2024	684,64	648,80	100,02
PENGELUARAN DAERAH			
2020	0,00	0,00	100,00
2021	37,91	37,91	100,00
2022	10,91	10,91	100,00
2023	0,00	0,00	100,00
2024	4,61	4,46	96,7

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Penerimaan pajak daerah, Penerimaan retribusi daerah, Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa; dan transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan terdiri atas Dana bagi hasil; Dana alokasi umum; dan Dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari Bantuan/hibah; Dana darurat; dan Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.79. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN**	5.643,96	5.838,24	6.415,75	6.905,93	7.153,10	2,60
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.063,78	2.195,97	2.759,32	2.939,88	3.091,25	9,83
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.629,19	1.695,12	2.138,90	2.287,62	2.398,96	10,24
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	52,33	30,09	30,93	37,95	548,62	262,48
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,13	15,78	15,23	17,21	16,10	65,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	369,13	454,98	574,26	597,11	127,56	–23,10
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	3.352,26	3.417,76	3.652,22	3.965,85	4.056,95	2,43
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.493,60	2.456,73	2.575,34	2.746,66	2.942,18	3,18
04.02.02	Transfer Antar Daerah	858,66	961,03	1.076,88	1.219,19	1.114,76	6,80
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	227,91	224,51	4,20	0,19	4,89	–49,94
04.03.01	Pendapatan Hibah	227,91	6,00	4,20	0,00	4,46	–49,96
04.03.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	218,51	0,00	0,19	4,29	–54,79

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Dalam lima tahun terakhir, total pendapatan Kota Bandung menunjukkan tren kenaikan moderat sebesar 2,60% per tahun, naik dari Rp5,64 triliun (2020) menjadi Rp7,15 triliun (2024). Di balik angka ini, terdapat dinamika antar komponen pendapatan yang memunculkan tanda-tanda transformasi fiskal maupun kebutuhan penataan ulang kebijakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Konsolidasi dan Anomali

PAD tumbuh cukup signifikan (9,83%) dan menjadi tumpuan harapan kemandirian fiskal. Namun, pencapaian ini mengandung variasi ekstrem:

- Pajak Daerah naik stabil dengan 10,24% pertumbuhan rata-rata, mencerminkan performa konsisten sektor formal dan sistem pemungutan.
- Retribusi Daerah melonjak luar biasa (262,48%) dari Rp52,33 miliar (2020) menjadi Rp548,62 miliar (2024). Lonjakan ini memunculkan dugaan koreksi sistemik atau perluasan objek pemungutan secara agresif.
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik pesat (65,00%), meski nilainya tetap kecil, memberi sinyal pembaruan skema BUMD atau pemanfaatan aset.
- Lain-lain PAD yang Sah justru turun signifikan (–23,10%), dari Rp597,11 miliar (2023) ke Rp127,56 miliar (2024), menandakan hilangnya sumber pendapatan yang bersifat non-reguler atau tertutupnya pos-pos yang sebelumnya produktif.

Pendapatan Transfer: Stabil tapi Dominan

Rata-rata pertumbuhan hanya 2,43%, namun nominal tetap besar (Rp4,05 triliun pada 2024).

- Transfer Pemerintah Pusat tumbuh moderat (3,18%) dan relatif konsisten.
- Transfer Antar Daerah menunjukkan performa lebih baik (6,80%), meskipun pada 2024 justru menurun, menandakan fluktuasi kebutuhan koordinasi lintas wilayah atau pembaruan skema bagi hasil.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Menyusut Drastis

Komponen ini menurun tajam (–49,94%) dan nyaris menghilang di tahun 2023.

- Hibah turun dari Rp227,91 miliar ke Rp4,46 miliar, menandakan minimnya dukungan eksternal.
- Dana Darurat nol selama lima tahun, bisa menandakan minimnya penanganan kontinjensi atau belum adanya instrumen pengelolaan risiko daerah.
- Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan sempat menyentuh Rp218,51 miliar (2021), tapi nyaris nihil di tahun lainnya.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan kinerja yang relatif stabil dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata capaian berada di atas 90%, mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan pendapatan serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup konsisten.

Pada tahun 2020, di tengah tantangan akibat pandemi, target PAD sebesar Rp2.264,81 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp2.063,78 miliar, atau mencapai 91,12%. Hal ini mengindikasikan adaptabilitas fiskal dan strategi intensifikasi pendapatan yang mulai menunjukkan hasil positif. Tahun 2021 mencatat capaian serupa, yakni sebesar 91,13% dengan realisasi Rp2.195,97 miliar dari target Rp2.409,80 miliar. Kinerja ini mengonfirmasi konsistensi pelaksanaan kebijakan pendapatan serta upaya optimalisasi sumber daya lokal.

Peningkatan signifikan ditunjukkan pada tahun 2023, di mana capaian mencapai angka tertinggi sebesar 93,39%. Realisasi PAD tahun tersebut sebesar Rp2.939,88 miliar dari target Rp3.148,03 miliar, menandakan keberhasilan dalam ekstensifikasi objek pendapatan, peningkatan layanan pemungutan pajak, serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah.

Namun demikian, capaian tahun 2024 sedikit menurun menjadi 89,62% dengan realisasi sebesar Rp3.091,25 miliar dari target Rp3.499,12 miliar. Penurunan ini perlu menjadi perhatian khusus, baik dari aspek perencanaan, target rasionalisasi, maupun pengendalian implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, tren kinerja PAD Kota Bandung selama lima tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang relatif konsisten dan positif. Evaluasi terhadap penyebab fluktuasi capaian, serta penguatan strategi pemungutan dan digitalisasi proses pendapatan, menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kapasitas fiskal daerah pada periode selanjutnya.

Tabel 2.80. Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	2.264,81	2.063,78	91,12
2021	2.409,80	2.195,97	91,13
2022	3.042,80	2.759,32	90,68
2023	3.148,03	2.939,88	93,39
2024	3.499,12	3.091,25	89,62

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan kinerja positif dalam pemungutan Pajak Daerah. Capaian realisasi terhadap target secara umum berada di atas 89%, mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tahun 2020 dan 2021 masing-masing mencatat capaian sebesar 93,03% dan 93,72%, meskipun nominal target relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2024, capaian berada pada kisaran 89–90%, menandakan perlunya penguatan strategi intensifikasi serta pengawasan lapangan.

Puncak kinerja tercapai pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi sebesar 98,11%, menunjukkan optimalisasi sistem pemungutan dan sinergi antar perangkat daerah. Secara keseluruhan, kinerja Pajak Daerah periode ini menunjukkan stabilitas dan tren yang konstruktif dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Bandung. Tabel berikut memperlihatkan mengenai realisasi target pajak daerah Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.81. Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	1.751,23	1.629,19	93,03
2021	1.808,75	1.695,12	93,72
2022	2.386,80	2.138,90	89,61
2023	2.331,73	2.287,62	98,11
2024	2.658,12	2.398,96	90,25

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian Retribusi Daerah Kota Bandung menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan dan realisasi potensi pendapatan dari sektor retribusi.

Pada tahun 2020, dari target sebesar Rp62,04 miliar, berhasil direalisasikan sebesar Rp52,33 miliar, dengan capaian 84,35%. Kinerja ini mencerminkan upaya adaptif dalam optimalisasi pendapatan daerah di tengah tekanan pandemi. Namun capaian tahun 2021 menurun drastis menjadi 43,29%, dengan realisasi hanya Rp30,09 miliar dari target Rp69,51 miliar. Penurunan ini mengindikasikan hambatan struktural dan operasional, termasuk validasi objek retribusi, serta tantangan dalam pelaksanaan teknis pemungutan.

Pada tahun 2022, capaian meningkat menjadi 77,12%, dengan realisasi Rp30,93 miliar dari target Rp40,10 miliar. Peningkatan ini mencerminkan upaya konsolidasi sistem dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Tahun 2023 mencatat kinerja terbaik dalam periode ini, dengan capaian 90,82%—mendekati target Rp41,78 miliar, dan realisasi sebesar Rp37,95 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas tata kelola dan pelaksanaan yang lebih terarah.

Tahun 2024 mengalami lonjakan target yang signifikan menjadi Rp714,37 miliar, namun capaian realisasi sebesar Rp548,62 miliar atau 76,80% mencerminkan tantangan dalam menyesuaikan kapasitas pemungutan dengan skala target baru. Evaluasi mendalam diperlukan terhadap rasionalitas target, kesiapan regulasi pendukung, dan efektivitas pelaksanaan.

Secara keseluruhan, kinerja Retribusi Daerah Kota Bandung tahun 2020–2024 menuntut penguatan strategi intensifikasi berbasis layanan publik, perbaikan sistem informasi pendapatan, serta rasionalisasi perencanaan target yang lebih realistis dan berkelanjutan. Tabel berikut memperlihatkan mengenai realisasi target retribusi daerah Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.82. Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	62,04	52,33	84,35
2021	69,51	30,09	43,29
2022	40,10	30,93	77,12
2023	41,78	37,95	90,82
2024	714,37	548,62	76,8

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirtawening, PT. Bank Jabar Banten, Bank Bandung, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung (KPKB) Kota Bandung. Selama lima tahun terakhir, kinerja realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2020, capaian realisasi hanya sebesar 47,35% dengan realisasi Rp13,13 miliar dari target Rp27,74 miliar. Capaian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemulihan kinerja BUMD pada masa awal pandemi, serta perlunya penyesuaian sistem akuntabilitas dan transparansi. Memasuki tahun 2021, capaian meningkat signifikan menjadi 83,54%, mencerminkan adanya perbaikan kinerja operasional dan penguatan pengawasan terhadap entitas kekayaan daerah.

Pada tahun 2022, capaian mencapai 115,74%, melebihi target yang ditetapkan. Realisasi sebesar Rp15,23 miliar dari target Rp13,16 miliar menunjukkan adanya surplus pendapatan, yang dapat dikaitkan dengan efisiensi usaha BUMD dan peningkatan dividen atau kontribusi lainnya. Tahun 2023 mencatat capaian sebesar 92,73%, masih berada dalam kategori baik, dengan realisasi Rp17,21 miliar dari target Rp18,55 miliar. Kinerja ini memperlihatkan stabilitas kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah, meskipun masih terdapat deviasi minor yang perlu dimonitor.

Pada tahun 2024, capaian turun menjadi 83,77%, dengan realisasi Rp16,10 miliar dari target Rp19,22 miliar. Penurunan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor

eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja unit usaha daerah, termasuk aspek strategi bisnis, efektivitas pengelolaan aset, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara umum, tren realisasi selama tahun 2020–2024 menunjukkan potensi kontribusi yang menjanjikan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan beberapa tahun mencatat capaian mendekati atau melebihi target. Penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan rasionalisasi target berbasis kapasitas bisnis masing-masing entitas menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah Kota Bandung. Realisasi target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83. Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	27,74	13,13	47,35
2021	18,89	15,78	83,54
2022	13,16	15,23	115,74
2023	18,55	17,21	92,73
2024	19,22	16,10	83,77

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi ketiga setelah pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal pembentukan pendapatan asli daerah. Selama lima tahun terakhir, kinerja realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kota Bandung menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan variabelitas sumber penerimaan dan tantangan dalam perencanaan target yang akurat.

Pada tahun 2020, dari target Rp423,80 miliar, Pemerintah Kota Bandung merealisasikan sebesar Rp369,13 miliar, dengan capaian 87,10%. Tahun 2021 mencatat peningkatan capaian menjadi 88,75% dari target Rp512,66 miliar, menunjukkan stabilisasi pemungutan pendapatan yang bersifat insidental atau tidak langsung terkait pajak dan retribusi.

Capaian optimal terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi Rp574,26 miliar dari target Rp602,74 miliar, menghasilkan rasio capaian sebesar 95,28%. Kinerja ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas perangkat dan pelaksanaan program yang menghasilkan penerimaan non-konvensional dengan intensitas tinggi. Tahun 2023 mengalami penurunan capaian menjadi 78,99%, meskipun secara nominal target meningkat menjadi Rp755,97 miliar. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam pemenuhan target ambisius yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi operasional dan potensi penerimaan aktual.

Tahun 2024 menunjukkan anomali capaian yang sangat tinggi, yakni 222,25%, dengan realisasi Rp127,56 miliar dari target yang hanya sebesar Rp53,39 miliar. Lonjakan ini perlu dianalisis lebih lanjut, kemungkinan besar disebabkan oleh pendapatan insidental atau penerimaan satu kali seperti denda, jasa giro, atau pemanfaatan aset yang tidak terprediksi saat penetapan target.

Secara keseluruhan, kinerja Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan perlunya perbaikan akurasi perencanaan fiskal, identifikasi sumber penerimaan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem informasi pendapatan daerah. Lonjakan atau deviasi yang signifikan pada tahun tertentu menuntut penguatan mekanisme evaluasi dan rasionalisasi agar kontribusi komponen ini terhadap PAD tetap terukur, akuntabel, dan mendukung kemandirian fiskal Kota Bandung secara berkelanjutan.

Tabel 2.84. Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian (%)
2020	423,80	369,13	87,10
2021	512,66	454,98	88,75
2022	602,74	574,26	95,28
2023	755,97	597,11	78,99
2024	53,39	127,56	222,25

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

b. Pendapatan Transfer

Selama lima tahun terakhir, pendapatan transfer Pemerintah Kota Bandung menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan capaian rata-rata di atas 95%. Pada tahun 2020, capaian realisasi sebesar 93,32% menandakan tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Tahun 2021 dan 2024 mencatat capaian tertinggi masing-masing sebesar 101,35% dan 101,56%, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima melebihi target yang telah ditetapkan, diduga sebagai akibat dari penyesuaian alokasi atau kebijakan transfer yang bersifat insentif.

Capaian tahun 2022 dan 2023 berada di kisaran 95–96%, menandakan konsistensi aliran dana dan efektivitas mekanisme perencanaan anggaran transfer. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keandalan sumber pendapatan transfer dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Realisasi Target Pendapatan Transfer Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85. Realisasi Target Pendapatan Transfer Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun (1)	Target (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Capaian (%) (4)
2020	3.592,35	3.352,26	93,32
2021	3.372,37	3.417,76	101,35
2022	3.781,54	3.652,22	96,58
2023	4.136,33	3.965,85	95,88
2024	3.994,78	4.056,95	101,56

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Selama periode 2020–2024, kinerja realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Kota Bandung menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat capaian terendah sebesar 73,34%, diduga akibat dampak fiskal pandemi COVID-19 terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, tahun 2021 dan 2024 memperlihatkan lonjakan capaian masing-masing sebesar 120,56% dan 139,82%, mengindikasikan adanya penyesuaian alokasi atau penerimaan pajak yang melebihi proyeksi.

Realisasi tahun 2022 mendekati target dengan capaian 97,82%, menandakan perencanaan yang relatif akurat. Namun, penurunan capaian pada 2023 sebesar 83,32% menunjukkan perlunya penguatan estimasi dan koordinasi antarpemerintah terkait alokasi bagi hasil.

Secara umum, tren ini mencerminkan dinamika fiskal nasional yang memengaruhi distribusi keuangan ke daerah, serta pentingnya peningkatan ketepatan proyeksi dan transparansi dalam formulasi target Dana Bagi Hasil. Realisasi terhadap target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Capaian (%)
2020	476,08	349,17	73,34
2021	354,17	427,00	120,56
2022	374,73	366,57	97,82
2023	501,40	417,78	83,32
2024	311,34	435,33	139,82

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bandung selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat stabil dan mendekati target setiap tahunnya. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 100,00%, dengan tahun-tahun lainnya berada dalam rentang capaian 98,95% hingga 99,68%. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah pusat dalam menyalurkan DAU sesuai dengan alokasi yang direncanakan, sekaligus menunjang kepastian fiskal bagi Pemerintah Kota Bandung.

Kinerja realisasi DAU yang nyaris sempurna sepanjang lima tahun terakhir menjadi indikasi efektivitas mekanisme distribusi dan perencanaan anggaran intergovernmental transfer, serta memberikan fondasi fiskal yang solid dalam pelaksanaan program prioritas daerah. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2020–2024

Tahun	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)
2020	1.601,83	1.589,63	99,24
2021	1.566,04	1.566,04	100,00
2022	1.566,04	1.549,55	98,95
2023	1.648,41	1.643,14	99,68
2024	1.753,89	1.746,15	99,56

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke Daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bandung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pencapaian yang cukup variatif, dengan capaian tahunan berada di kisaran 84,56% hingga 95,69%. Tahun 2021 mencatat capaian terendah sebesar 84,56%, mengindikasikan kemungkinan adanya keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan atau penyesuaian alokasi di tingkat nasional.

Tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan konsistensi, dengan capaian mendekati target, khususnya tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 95,69% dan 95,45%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK.

Kinerja ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengoptimalkan pemanfaatan DAK untuk mendukung pembangunan sektoral sesuai prioritas nasional, meskipun tetap diperlukan penguatan kapasitas pelaksanaan agar serapan anggaran dapat

lebih maksimal. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2020–2024
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	490,96	457,50	93,18
2021	490,82	415,03	84,56
2022	741,40	659,22	88,92
2023	716,61	685,73	95,69
2024	748,02	713,99	95,45

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

Penerimaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode tahun 2020–2024, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 46,31% per tahun, dengan kecenderungan terjadi penurunan mulai tahun 2022. Hal ini disebabkan semula komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sedangkan mulai tahun 2022 komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya meliputi hibah, dana darurat; dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung menunjukkan dinamika yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020–2024. Tahun 2020 dan 2021 mencatat realisasi mendekati target, masing-masing sebesar 99,86% dan 97,62%, mencerminkan perencanaan yang terukur serta efektivitas pengelolaan sumber pendapatan sah daerah. Namun, tahun 2022 dan 2023 tidak memiliki target yang ditetapkan, meskipun tetap terjadi realisasi penerimaan sebesar Rp4,20 miliar dan Rp0,19 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya penerimaan insidental atau bersifat tidak terstruktur dalam penganggaran.

Menariknya, tahun 2024 menunjukkan lonjakan capaian sebesar 222,25%, dengan realisasi lebih dari dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Fenomena ini dapat mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan sah, pemanfaatan potensi non-reguler, atau adanya perubahan klasifikasi/akuntansi yang perlu ditindaklanjuti dalam evaluasi kebijakan fiskal daerah.

Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89. Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	228,25	227,91	99,86
2021	229,98	224,51	97,62
2022	0,00	4,20	0
2023	0,00	0,19	0
2024	57,39	127,56	222,25

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2020–2024, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020–2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, diperoleh nilai realisasi Belanja Daerah.

Selama periode 2020–2024, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung menunjukkan konsistensi dalam serapan belanja daerah dengan capaian tahunan berada pada kisaran 84,71% hingga 87,33%. Meski tidak mencapai target secara penuh, tren capaian menunjukkan peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 87,33%.

Stabilitas capaian di atas 84% mengindikasikan pengelolaan fiskal yang relatif terjaga, meskipun tetap diperlukan penguatan pada sisi implementasi kegiatan guna mendorong optimalisasi belanja daerah, termasuk belanja publik yang bersifat prioritas dan strategis, secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.90. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	6.382,75	5.407,13	84,71
2021	6.525,38	5.675,60	86,98
2022	7.412,92	6.473,48	87,33
2023	7.813,75	6.746,04	86,34
2024	8.133,18	7.067,21	86,89

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Realisasi Belanja 2020–2024 menunjukkan tren stabil dengan capaian rata-rata sebesar 86,44%. Komponen Belanja Operasi mendominasi struktur belanja daerah, dengan tingkat realisasi yang konsisten dan meningkat dari 86,0% (2020) menjadi 89,92% (2024), menghasilkan rata-rata 87,88%. Subkomponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa menunjukkan efisiensi yang baik, masing-masing mencapai rata-rata 88,80% dan 85,94%.

Belanja Hibah dan Subsidi juga memperlihatkan pencapaian tinggi, masing-masing di atas 95%, sementara Belanja Bantuan Sosial baru menunjukkan konsistensi pada tahun 2024 (94,51%). Di sisi lain, Belanja Modal mengalami fluktuasi, dengan rata-rata realisasi sebesar 83,01%. Beberapa subkomponen menunjukkan kendala, seperti Belanja Modal Gedung dan Bangunan (79,74%) dan Aset Lainnya (5,00%), yang perlu perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Belanja Tak Terduga mencatat capaian paling rendah, hanya mencapai rata-rata 40,66%, menandakan rendahnya kebutuhan atau efektivitas alokasi jenis belanja tersebut. Sebaliknya, Belanja Transfer mencatat performa baik, dengan realisasi rata-rata sebesar 95,34%.

Secara keseluruhan, efisiensi pelaksanaan anggaran menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat beberapa subkomponen yang memerlukan penguatan dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan untuk memastikan optimalisasi belanja daerah. Tingkat capaian realisasi terhadap anggaran menurut kelompok dan jenis belanja Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91. Tingkat Capaian Realisasi terhadap Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Kota Bandung Tahun 2020–2024 (dalam miliar rupiah)

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024			Rata2
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
5	**BELANJA**	**6.382,75**	**5.407,13**	**84,7**	**6.525,38**	**5.675,60**	**87,0**	**7.412,92**	**6.473,48**	**87,3**	**7.813,75**	**6.746,04**	**86,3**	**8.133,18**	**7.067,21**	**86,89**	**86,44**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**5.407,18**	**4.650,33**	**86,0**	**5.524,47**	**4.841,60**	**87,6**	**6.541,69**	**5.779,32**	**88,3**	**6.589,03**	**5.774,91**	**87,6**	**6.989.90**	**6.285,55**	**89,92**	**87,88**
05.01.01	Belanja Pegawai	2.479,28	2.169,32	87,5	2.495,45	2.236,01	89,6	2.861,52	2.480,31	86,7	2.854,90	2.506,72	87,8	2.742,01	2.533,76	92,41	**88,80**
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.521,47	2.084,52	82,7	2.706,87	2.296,42	84,8	3.083,71	2.720,79	88,2	3.345,01	2.896,02	86,6	3.721,10	3.251,56	87,38	**85,94**
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
05.01.04	Belanja Subsidi	140,15	139,15	99,3	79,94	79,94	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	100	**99,77**
05.01.05	Belanja Hibah	186,64	177,73	95,2	185,54	173,73	93,6	515,39	498,50	96,7	358,07	344,10	96,1	443,87	421,72	95,02	**95,32**
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	79,63	79,61	99,9	56,67	55,50	97,9	81,08	79,72	98,3	31,05	28,07	90,4	80,90	76,46	94,51	**96,20**
05.02	**BELANJA MODAL**	**667,42**	**558,48**	**83,7**	**831,21**	**721,57**	**86,8**	**773,79**	**644,17**	**83,2**	**1.104,23**	**921,08**	**83,4**	**1.002,88**	**781,38**	**77,91**	**83,01**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	21,82	20,87	95,6	42,50	40,73	95,8	59,62	35,91	60,2	44,32	41,64	94,0	114,09	63,22	55,41%	87,92
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408,29	353,81	86,7	409,75	350,90	85,6	365,93	317,17	86,7	444,31	366,15	82,4	325,11	262,09	80,62%	84,76
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78,94	51,12	64,8	210,33	183,10	87,1	202,26	165,81	82,0	412,09	339,54	82,4	401,46	313,62	78,12%	79,74

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024			Rata2
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	153,86	126,73	82,4	119,53	104,82	87,7	130,31	113,76	87,3	151,98	128,86	84,8	119,34	100,02	83,81%	85,40
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,52	5,95	131,7	49,09	42,02	85,6	15,66	11,52	73,6	50,96	44,87	88,1	42,88	42,44	98,97%	93,42
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,03	5,0	0,00	0,00	0,00%	1,00
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**272,40**	**165,21**	**60,6**	**135,95**	**83,65**	**61,5**	**69,99**	**22,53**	**32,2**	**93,04**	**22,76**	**24,5**	**93,04**	**22,76**	**24,5**	**40,66**
05.03.01	Belanja tak Terduga	272,40	165,21	60,6	135,95	83,65	61,5	69,99	22,53	32,2	93,04	22,76	24,5	93,04	22,76	24,5	**40,66**
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**35,75**	**33,11**	**92,6**	**33,75**	**28,79**	**85,3**	**27,45**	**27,45**	**100,0**	**27,45**	**27,29**	**99,4**	**27,45**	**27,29**	**99,4**	**95,34**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

Selama periode 2020–2024, rata-rata tingkat realisasi belanja Pemerintah Kota Bandung berada pada kisaran 86,44% dari total anggaran yang dialokasikan. Komponen *belanja operasi* menunjukkan kinerja paling konsisten dengan capaian rata-rata 87,88%, terutama ditopang oleh *belanja pegawai* (88,80%) dan *belanja barang dan jasa* (85,94%).

Adapun *belanja modal* menunjukkan variabilitas lebih tinggi, dengan rata-rata realisasi sebesar 83,01%, didominasi oleh belanja peralatan dan mesin serta pembangunan gedung dan jaringan. Sementara itu, *belanja tak terduga* tercatat sebagai komponen dengan kinerja terendah (rata-rata 40,66%), mengindikasikan tantangan dalam penyesuaian alokasi atau ketidakpastian eksekusi pada kategori tersebut. Capaian tertinggi terlihat pada *belanja subsidi dan hibah*, masing-masing dengan rata-rata realisasi di atas 95%, menunjukkan efektivitas penyaluran terhadap komitmen yang bersifat mandatori maupun bersyarat.

Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah Kota Bandung yang belum mencapai 90 persen memerlukan intervensi strategis yang menyeluruh. Selama lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Bandung perlu menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang didukung oleh data kebutuhan riil, analisis kapasitas pelaksana, serta penetapan jadwal kegiatan yang realistis. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengadaan akan dipastikan sejak awal tahun anggaran untuk meminimalkan keterlambatan pelaksanaan. Penerapan mekanisme *early procurement* dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah menjadi langkah penting agar kegiatan dapat dimulai tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir periode.

Selain itu, selama periode lima tahun tersebut, pengendalian dan evaluasi akan diperkuat melalui *real-time monitoring* dan sistem peringatan dini terhadap deviasi jadwal maupun anggaran. Evaluasi kinerja belanja akan dilakukan secara berkala menggunakan indikator *outcome* dan *output*, bukan hanya serapan, sehingga koreksi dapat dilakukan lebih cepat. Insentif bagi perangkat daerah dengan kinerja penyerapan tinggi dan pembinaan khusus bagi yang tertinggal akan diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas. Dengan kombinasi perencanaan presisi, pengendalian adaptif, serta evaluasi berbasis hasil, Pemerintah Kota Bandung menargetkan realisasi belanja daerah dapat melampaui 90 persen secara konsisten, memberikan dampak nyata pada kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Secara umum, pola realisasi belanja menunjukkan tren positif dengan tingkat konsistensi yang dapat dijadikan referensi dalam menyusun proyeksi alokasi belanja Tahun 2025–2030, termasuk dalam perencanaan belanja strategis dan penguatan efisiensi anggaran.

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan 2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA**	**5.407,13**	**5.675,60**	**6.473,48**	**6.746,04**	**7.067,21**	**6,94**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**4.650,33**	**4.841,60**	**5.779,32**	**5.774,91**	**6.285,55**	**7,94**
05.01.01	Belanja Pegawai	2.169,32	2.236,01	2.480,31	2.506,72	2.533,76	3,99
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.084,52	2.296,42	2.720,79	2.896,02	3.251,56	11,56
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	139,15	79,94	0,00	0,00	2,00	-49,56
05.01.05	Belanja Hibah	177,73	173,73	498,50	344,10	421,72	24,15
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	79,61	55,50	79,72	28,07	76,46	-1,02
05.02	**BELANJA MODAL**	**558,48**	**721,57**	**644,17**	**921,08**	**781,38**	**8,75**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	20,87	40,73	35,91	41,64	41,64	18,74
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353,81	350,90	317,17	366,15	366,15	0,87
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,12	183,10	165,81	339,54	339,54	58,91
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126,73	104,82	113,76	128,86	128,86	0,39
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,95	42,02	11,52	44,87	44,87	61,34
05.02.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-34,91
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**165,21**	**83,65**	**22,53**	**22,76**	**22,76**	**-34,91**
05.03.01	Belanja tak Terduga	165,21	83,65	22,53	22,76	22,76	-34,91
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**33,11**	**28,79**	**27,45**	**27,29**	**27,29**	**-4,67**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Audited)*

Selama lima tahun anggaran, total realisasi belanja Kota Bandung menunjukkan tren kenaikan moderat, tumbuh dari Rp5.407,13 miliar di tahun 2020 menjadi Rp7.067,21 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6,94%.

Komponen belanja operasi mendominasi struktur belanja dan mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 7,94%, terutama ditopang oleh peningkatan pada belanja barang dan

jasa (11,56%) dan belanja pegawai (3,99%). Subkomponen seperti belanja hibah juga menunjukkan pertumbuhan tinggi (24,15%), menandakan penguatan dukungan terhadap pihak ketiga dan komunitas penerima hibah. Sebaliknya, belanja subsidi dan bantuan sosial mengalami kontraksi signifikan, dengan pertumbuhan negatif masing-masing −49,56% dan −1,02%, mencerminkan perubahan kebijakan penyaluran atau realokasi anggaran.

Belanja modal tumbuh sebesar 8,75%, dengan lonjakan tertinggi pada belanja gedung dan bangunan (58,91%) serta aset tetap lainnya (61,34%), menunjukkan penguatan investasi infrastruktur kelembagaan. Namun, komponen belanja modal tanah dan peralatan dan mesin tumbuh lebih moderat, sedangkan belanja pada kategori aset lain-lain dan belanja tak terduga menurun secara signifikan.

Rendahnya realisasi pada beberapa kelompok belanja serta pertumbuhan negatif pada komponen strategis seperti subsidi, bantuan sosial, dan belanja tak terduga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan belanja ke depan agar efektivitas dan keseimbangan alokasi anggaran tetap terjaga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kebijakan pembiayaan daerah menunjukkan tren yang konsisten dalam hal penerimaan, dengan komponen utama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Total penerimaan pembiayaan daerah meningkat secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar **30,4%**, mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan APBD dan optimalisasi pengelolaan kas daerah.

Penerimaan pembiayaan melalui SiLPA mencatat pertumbuhan rata-rata 32,1%, menunjukkan bahwa surplus anggaran dari tahun sebelumnya telah menjadi sumber utama pembiayaan berkelanjutan. Sementara itu, komponen penerimaan lainnya seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah tidak terealisasi sepanjang periode tersebut, mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan minim eksposur terhadap risiko pembiayaan eksternal.

Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi dengan nilai realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp37,91 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah. Secara keseluruhan,

pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dengan tren rata-rata pertumbuhan negatif sebesar > -33%, mencerminkan pergeseran strategi fiskal menuju pembiayaan yang lebih efisien dan selektif.

Khusus penyertaan modal daerah, tren fluktuatif terjadi seiring dengan prioritas investasi pemerintah daerah terhadap entitas bisnis dan infrastruktur pelayanan publik, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp10,91 miliar. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2023 dan 2024 yang dapat diinterprestasikan sebagai bentuk pengendalian risiko fiskal dan peningkatan akuntabilitas investasi.

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir merepresentasikan pendekatan fiskal yang prudent, memanfaatkan surplus operasional secara optimal, dan meminimalkan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Pola ini perlu dipertahankan dan disesuaikan dalam perencanaan strategis ke depan guna menjaga stabilitas fiskal daerah dan mendorong efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Tabel 2.93. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

NO	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
06.01	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**241,60**	**474,74**	**598,02**	**529,38**	**689,27**	**30,4**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	231,28	474,74	598,02	529,38	689,27	**32,1**
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0,00**	**37,91**	**10,91**	**0,00**	**4,46**	**-33,0**
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	10,20	10,91	0,00	4,46	-14,5
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Audited)*

4. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan neraca Pemerintah Daerah tahun 2020–2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI					RATA2 PERTUMBUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	367.432.364.070,00	465.596.505.808,00	426.242.573.178,00	615.335.040.719,00	652.460.761.024,00	
4	Kas di Bendahara Penerimaan	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	179.068.520,00	0,00	1.092.600,000,00	0,00	0.00	
6	Kas di BLUD	101.177.654.772,10	130.370.906.267,88	100.130.807.033,01	72.820.596.958,01	96.683.169.539,91	
7	Kas di Bendahara FKTP	8.635.858.016,00	2.749.653.137,02	1.092.988.748,00	945.767.659,00	0,00	
8	Kas di Bendahara BOS	1.006.535.969,85	764.870.768,00	823.297.282,00	163.885.518,00	252.222.238.00	
	Kas Dana BOK Puskesmas					21.297.429.326,00	
9	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.713.121,00	291.274.694,92	
10	Setara Kas	21.984.600,00	0,00	19.103.412,00	0,00	0,00	
11	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	37.748.527.502,00	0,00	0,00	
12	Piutang Pendapatan	372.699.726.940,32	489.005.870.831,72	500.261.678.283,28	489.104.096.207,83	528.948.202.768,74	
13	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
14	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
15	Beban Dibayar Dimuka	4.167.537.145,98	6.562.142.173,33	7.139.629.757,10	7.409.166.431,39	2.659.840.877,07	
16	Persediaan	99.891.505.315,98	123.767.172.007,26	180.040.390.216,21	133.889.407.369,77	181.229.808.683,89	
17	**JUMLAH ASET LANCAR**	**955.218.995.350,23**	**1.218.817.120.993,21**	**1.253.498.995.411,60**	**1.319.679.673.984,00**	**1.483.822.709.152,53**	**11,3%**
18							
19	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
20	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**						
21	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Dana Bergulir	16.585.110,00	4.650.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
25	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	URAIAN	REALISASI					RATA2 PERTUMBUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
27	**JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**16.585.110,00**	**4.650.000,00**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	
28	**Investasi Jangka Panjang Permanen**						
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.380.747.116.308,80	2.258.738.634.261,00	2.077.730.902.303,00	2.076.195.661.017,00	2.083.973.529.115,90	
30	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	**JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen**	**2.380.747.116.308,80**	**2.258.738.634.261,00**	**2.077.730.902.303,00**	**2.076.195.661.017,00**	**2.083.973.529.115,90**	
32	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**	**2.380.763.701.418,80**	**2.258.743.284.261,00**	**2.077.735.002.303,00**	**2.076.199.761.017,00**	**2.083.973.529.115,90**	**-4,5%**
33							
34	**ASET TETAP**						
35	Tanah	33.447.009.328.243,00	33.526.083.221.082,00	35.948.830.338.622,00	42.522.562.431.991,00	53.917.266.933.408.00	
36	Peralatan dan Mesin	2.991.808.830.237,58	3.309.442.770.642,60	3.606.557.009.832,72	3.704.356.050.061,49	3.838.982.454.853,51	
37	Gedung dan Bangunan	3.966.620.548.028,81	4.058.426.579.996,16	4.146.701.668.614,98	4.440.051.988.133,63	4.599.278.005.338.63	
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.642.609.668.127,03	3.887.477.968.488,89	4.067.210.092.426,56	4.297.652.514.569,53	4.452.010.869.223,82	
39	Aset Tetap Lainnya	242.268.380.641,05	253.566.419.877,55	266.529.142.284,55	285.224.346.239,55	307.617.270.341,55	
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	214.268.533.490,40	195.918.680.267,57	191.496.362.598,17	211.931.682.091,17	309.482.197.476.59	
41	Akumulasi Penyusutan	-4.338.595.166.084,70	-5.025.021.812.209,70	-5.678.911.646.487,28	-5.737.598.026.389,76	-6.307.444.981.549.17	
42	**JUMLAH ASET TETAP**	**40.165.990.122.683,20**	**40.205.893.828.145,10**	**42.548.412.967.891,70**	**49.724.180.986.696,60**	**61.117.192.749.092,9**	**7,4%**
43							
44	**DANA CADANGAN**						
45	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	**JUMLAH DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
47							
48	**ASET LAINNYA**						
49	Tagihan Penjualan Angsuran	384.844.428,00	384.844.428,00	384.844.428,00	384.844.428,00	384.844.428,00	
50	Tuntutan Ganti Rugi	127.920.000,00	135.270.000,00	135.270.000,00	135.270.000,00	135.270.000,00	
51	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0	92.704.000.000,00	92.704.000.000,00	92.704.000.000,00	
51	Aset Tidak Berwujud	1.234.260.120,00	1.143.286.840,00	37.539.362.840,00	42.523.439.898,00	42.843.641.598,00	
52	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			-36.217.673.586,96	-37.830.638.191,48	-39.341.168.933,60	
52	Aset Lain-lain	298.002.237.589,96	43.196.651.059,05	349.875.345.596,32	590.617.465.266,42	641.805.109.911,59	

NO	URAIAN	REALISASI					RATA2 PERTUMBUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			-300.718.216.660,28	-410.140.572.707,84	-480.683.347.195,68	
54	**JUMLAH ASET LAINNYA**	**299.749.262.137,96**	**44.860.052.327,05**	**143.702.932.617,08**	**278.393.808.693,10**	**257.848.349.808,31**	**-2,5%**
55							
56	**JUMLAH ASET**	**43.801.722.081.590,10**	**43.728.314.285.726,30**	**46.023.349.898.223,40**	**53.398.454.230.390,70**	**64.942.841.437.169,60**	**6,7%**
57							
58	**KEWAJIBAN**						
59	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	19.103.412,00	11.713.121,00	346.274.694.92	
61	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Pendapatan Diterima Dimuka	48.681.082.560,25	47.766.574.032,10	56.825.865.257,27	66.485.905.751,13	75.438.689.036,91	
64	Utang Beban	104.766.918.530,50	117.600.839.634,60	91.859.141.199,40	64.346.330.632,62	38.386.366.988,96	
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.047.878.187,40	4.172.932.774,00	11.557.891.597,00	5.248.311.589,00	3.982.025.930,00	
66	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**168.495.879.278,15**	**169.540.346.440,70**	**160.262.001.465,67**	**136.092.261.093,75**	**118.153.356.650,79**	**-7,6%**
67							
68	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
69	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
72							
73	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**168.495.879.278,15**	**169.540.346.440,70**	**160.262.001.465,67**	**136.092.261.093,75**	**118.153.356.650,79**	**-6,9%**
74							
75	**EKUITAS**						
76	**EKUITAS**	**43.633.226.202.312,00**	**43.558.773.939.285,60**	**45.864.180.496.757,80**	**53.262.361.969.297,10**	**64.824.688.080.518,80**	**6,8%**
77							
78	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**43.801.722.081.590,10**	**43.728.314.285.726,30**	**46.024.442.498.223,50**	**53.398.454.230.390,90**	**64.942.841.437.169,60**	**7,2%**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2019-2024 (Audited)*

Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat didalam elemen utama neraca adalah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, posisi keuangan Pemerintah Daerah mengalami dinamika yang mencerminkan pendekatan fiskal yang adaptif dan cermat. Nilai total aset tercatat mengalami pertumbuhan rata-rata 6,7%, meningkat dari Rp43,80 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp64,94 triliun di akhir tahun 2024. Kenaikan ini didorong terutama oleh lonjakan nilai aset tetap, termasuk tanah, bangunan, dan jaringan infrastruktur yang tumbuh rata-rata 7,4% per tahun—menunjukkan fokus investasi pada penguatan aset pelayanan publik dan pembangunan fisik.

Aset lancar mencatat kenaikan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,3%, didorong oleh peningkatan nilai kas daerah dan piutang pendapatan yang stabil. Hal ini menggambarkan pengelolaan likuiditas yang semakin efektif dan meningkatnya kapasitas fiskal jangka pendek. Di sisi lain, komponen investasi jangka panjang menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata -4,5%, terutama pada penyertaan modal kepada entitas bisnis. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian portofolio investasi daerah dan penguatan prinsip kehati-hatian fiskal terhadap penempatan dana non-operasional.

Komponen kewajiban mengalami penurunan dengan rata-rata -6,9%, dari Rp168,50 miliar menjadi Rp118,15 miliar, yang berasal dari penurunan utang beban dan utang jangka pendek lainnya. Hal ini menunjukkan pengendalian kewajiban jangka pendek secara progresif, yang mendukung posisi fiskal yang lebih sehat. Struktur ekuitas mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,8%, seiring dengan akumulasi surplus dan penambahan aset bersih, yang menjadi fondasi penting bagi stabilitas fiskal jangka panjang.

Secara keseluruhan, komposisi aset, kewajiban, dan ekuitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan fiskal yang terukur, dengan penekanan pada penguatan aset tetap, pengendalian investasi non-strategis, dan pengurangan eksposur kewajiban jangka pendek. Strategi ini perlu terus dipertahankan dalam perencanaan keuangan strategis ke depan, dengan peningkatan kualitas belanja dan manajemen portofolio aset agar tercipta nilai publik yang berkelanjutan.

Rasio keuangan yang dapat dianalisis berdasarkan data neraca tahun 2020 sampai dengan 2024, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.95. Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2020–2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (%)	566,91	718,90	782,16	969,69	1255,84
2	Rasio Quick (%)	505,15	642,02	665,36	865,87	1102,46
3	Rasio Total Hutang Terhadap Aset (%)	0,38	0,39	0,35	0,25	0,18
4	Rasio Hutang Terhadap Modal (%)	0,39	0,39	0,35	0,26	0,18

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020-2024 (Audited).*

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan penguatan likuiditas dan pengendalian risiko fiskal yang signifikan. **Rasio lancar** mengalami peningkatan dari 566,91% pada tahun 2020 menjadi 1255,84% di tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan yang konsisten. Hal ini mencerminkan kapasitas daerah yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta pengelolaan aset lancar yang efisien.

Rasio cepat (*quick ratio*) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 505,15% menjadi 1102,46% pada akhir 2024. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah mampu membiayai kewajiban lancar secara langsung tanpa bergantung pada persediaan, menandakan tingkat likuiditas tinggi dan manajemen kas yang adaptif terhadap kebutuhan operasional.

Sementara itu, **rasio total hutang terhadap aset** menunjukkan penurunan dari 0,38% menjadi 0,18%, menandakan bahwa hanya sebagian sangat kecil dari total aset yang didanai melalui kewajiban. Rasio ini memperlihatkan struktur aset yang relatif independen dan rendah risiko keuangan eksternal.

Penurunan juga tercermin dalam **rasio hutang terhadap modal** yang turun dari 0,39% menjadi 0,18%. Rasio ini menegaskan bahwa ekuitas Pemerintah Daerah semakin dominan dalam mendanai aset, memperkuat posisi solvabilitas dan ketahanan fiskal jangka panjang.

Secara keseluruhan, tren rasio keuangan Kota Bandung selama empat tahun terakhir memperlihatkan tata kelola keuangan daerah yang pruden, adaptif, dan proaktif dalam menjaga likuiditas, efisiensi pembiayaan, serta kapasitas fiskal jangka panjang. Pendekatan ini patut dijadikan landasan bagi strategi fiskal ke depan, khususnya dalam mengarahkan belanja modal, pengelolaan aset, dan manajemen kas daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandung pada periode tahun 2020 hingga 2024 dilaksanakan dengan berlandaskan pada enam fungsi strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Keenam fungsi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang terintegrasi dalam siklus manajemen keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Kota Bandung secara konsisten menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk proses audit yang objektif dan kredibel.

Kebijakan fiskal yang diterapkan selama periode 2020–2024 bersifat terukur dan rasional, dengan penetapan estimasi pendapatan yang realistis dan penganggaran belanja secara tepat guna. Arah kebijakan pendapatan diarahkan pada penguatan sumber-sumber penerimaan melalui tiga pendekatan utama:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Digitalisasi sistem pemungutan Pajak Daerah dan optimalisasi manajemen data pendapatan.
- Penguatan regulasi dan tata kelola pajak daerah serta retribusi melalui penyempurnaan prosedur operasional.
- Penyesuaian tarif pajak dan retribusi berbasis potensi serta asas keadilan.
- Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pemungutan yang akurat dan efisien.
- Pembaruan basis data perpajakan dan peningkatan integrasi sistem informasi.
- Kampanye kesadaran pajak untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak.
- Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD yang berkelanjutan.

b. Optimalisasi Dana Transfer dan Perimbangan

- Intensifikasi penerimaan melalui rekonsiliasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara sinergis dengan pemerintah pusat.
- Penguatan koordinasi dengan instansi vertikal dan provinsi untuk memperbaiki estimasi dan realisasi dana transfer.
- Perencanaan penerimaan dana perimbangan berbasis kinerja dan kebutuhan sektoral prioritas.

c. Diversifikasi Pendapatan Non-Konvensional

- Pengembangan pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Peningkatan peran CSR sebagai sumber pendanaan program strategis non-APBD.
- Penguatan kelembagaan KPBU serta tata kelola pengendalian risiko pembiayaan alternatif.
- Perluasan jejaring dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan belanja daerah selama periode tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Bandung secara optimal, efisien, dan berbasis kinerja. Penyusunan belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja,

dengan penekanan pada hasil dan output terukur dari setiap perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas perencanaan serta efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, dengan fokus antara lain:

- Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi.
- Pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk perlindungan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- Pengendalian belanja umum melalui efisiensi operasional sesuai kapasitas dan kompleksitas perangkat daerah.

Secara menyeluruh, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Bandung pada periode 2020–2024 mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola keuangan yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam penyiapan arah kebijakan fiskal ke depan yang responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

6. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Bandung secara konsisten meningkatkan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal. Total belanja aparatur meningkat dari Rp2.325,37 miliar di tahun 2020 menjadi Rp2.766,78 miliar di tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,4%.

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan dari Rp2.169,32 miliar menjadi Rp2.533,77 miliar, mencerminkan pertumbuhan stabil sebesar 4,0%. Kenaikan ini diasosiasikan dengan penyesuaian terhadap kebijakan penggajian, peningkatan tunjangan, serta pemenuhan standar kesejahteraan aparatur.
2. Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar 3,0% per tahun, dari Rp73,08 miliar menjadi Rp82,34 miliar. Beberapa subkomponen menonjol mencerminkan pola kebutuhan aparatur:
   - Belanja Makanan dan Minuman Pegawai tumbuh sebesar 4,6%, mendukung pelaksanaan kegiatan harian dan produktivitas kerja.
   - Belanja Pakaian Dinas dan Atribut naik 3,9%, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan identitas kelembagaan.
   - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 9,7%, menunjukkan intensitas kegiatan tematik, seremoni, atau peringatan khusus.
   - Belanja Perjalanan Dinas mengalami pertumbuhan terbatas sebesar 2,6%, menunjukkan efisiensi perencanaan mobilitas pegawai.

b. Belanja Modal

Belanja Modal, mencakup pengadaan kantor, kendaraan dinas, meubelair, serta perangkat kerja lainnya, tumbuh dari Rp82,97 miliar menjadi Rp92,12 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan 2,6% per tahun. Tren ini menunjukkan pendekatan terukur dalam peremajaan dan pemenuhan aset penunjang operasional aparatur.

Tren realisasi belanja aparatur Kota Bandung memperlihatkan pendekatan yang konsisten dan bertanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Dominasi pertumbuhan belanja pegawai mengindikasikan fokus pada kesejahteraan dan kapasitas SDM, sementara pengendalian belanja modal dan barang/jasa mencerminkan efisiensi dan optimalisasi aset.

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	REALISASI BELANJA APARATUR					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
A	**BELANJA OPERASI**						
1	**Belanja Pegawai**	**2.169,32**	**2.236,01**	**2.480,31**	**2.506,72**	**2.533,77**	**4.0**
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**73,08**	**75,27**	**77,53**	**79,86**	**82,34**	**3.0**
06.00	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	3,73	3,84	3,96	4,08	4,47	4.6
07.00	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,48	2,55	2,63	2,71	2,89	3.9
08.00	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,92	1,98	2,04	2,10	2,78	9.7
09.00	Belanja Perjalanan Dinas	43,75	45,06	46,41	47,81	48,41	2.6
B	**BELANJA MODAL**						
12.00	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll)	82,97	85,46	88,02	90,66	92,12	2,6
TOTAL		**2.325,37**	**2.396,74**	**2.645,87**	**2.677,24**	**2.766,78**	**4,4**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020-2024 (Audited)*

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

Tabel 2.97. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1.	2020	2.325,37	5.407,13	43,01%
2.	2021	2.396,74	5.713,51	41,95%
3.	2022	2.645,87	6.484,39	40,80%
4.	2023	2.677,24	6.746,04	39,69%
5.	2024	2.766,78	7.071,67	39,12%

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

Selama lima tahun terakhir, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kota Bandung menunjukkan tren penurunan bertahap, yaitu dari 43,01% pada tahun 2020 menjadi 39,12% pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini dapat dilihat sebagai upaya perbaikan struktur belanja, proporsi yang tetap berada di kisaran 40% ke atas menandakan dominasi belanja aparatur yang cukup tinggi.

- Proporsi > 40% secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi fiskal Kota Bandung masih difokuskan untuk mendanai belanja aparatur, baik belanja pegawai maupun operasional institusional.
- Tren penurunan sekitar 1% per tahun menunjukkan adanya inisiatif rasionalisasi, namun belum cukup signifikan untuk mengubah struktur belanja secara mendasar.
- Komposisi belanja aparatur yang besar dapat mengurangi ruang fiskal bagi investasi publik, program pembangunan masyarakat, dan penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lingkungan.
- Jika tidak dikendalikan, tingginya porsi belanja aparatur berisiko menurunkan efisiensi anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah serta prioritas strategis kota.

Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat strategi efisiensi belanja aparatur dan mempercepat *refocusing* anggaran menuju belanja publik yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Evaluasi berkala terhadap proporsi dan efektivitas belanja aparatur perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja dan output kelembagaan yang terukur. Perlu didorong penguatan belanja modal dan program prioritas pembangunan berbasis layanan, dengan tetap menjaga kualitas aparatur melalui pendekatan non-fiskal seperti peningkatan sistem kerja digital dan kapasitas SDM.

7. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan defisit riil anggaran, sebagai berikut:

Tabel 2.98. Defisit Riil Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.643,96	5.838,24	6.415,75	6.905,93	7.153,10
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	5.407,13	5.675,60	6.473,48	6.746,04	7.067,21
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	37,91	10,91	0,00	4,4
	Defisit Riil	**236,84**	**124,74**	**-68,64**	**159,88**	**81,49**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

Analisis terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan Kota Bandung dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika fluktuatif terhadap posisi defisit riil anggaran. Secara umum, pendapatan daerah menunjukkan tren positif, namun tekanan belanja dan pembiayaan tetap menjadi faktor penentu terhadap keseimbangan fiskal tahunan.

- Tahun 2020–2021: Kota Bandung mencatat defisit riil positif, yang menandakan bahwa pengeluaran melebihi pendapatan daerah. Meskipun pendapatan meningkat, adanya pengeluaran pembiayaan di 2021 memperkecil surplus fiskal bersih.
- Tahun 2022: Satu-satunya tahun dengan surplus riil sebesar Rp68,64 miliar, sebagai hasil dari pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan total belanja dan pembiayaan. Ini menjadi titik balik yang patut dicatat dari segi efisiensi fiskal.
- Tahun 2023–2024: Defisit kembali muncul meskipun pendapatan terus tumbuh, menunjukkan bahwa tekanan belanja belum sepenuhnya terkendali. Namun, besaran defisit cenderung menurun, dari Rp159,88 miliar di 2023 menjadi Rp81,49 miliar di 2024.

Defisit riil yang fluktuatif mengindikasikan pentingnya pengendalian belanja dan evaluasi terhadap pembiayaan daerah agar keberlanjutan fiskal terjaga. Surplus di tahun 2022 menunjukkan potensi penguatan strategi pendapatan dan rasionalisasi belanja—model ini dapat direplikasi atau diperluas untuk mendukung *fiscal resilience*. Perlu peningkatan kualitas belanja daerah agar tidak hanya memengaruhi keseimbangan fiskal, tetapi juga menghasilkan output yang produktif dan bernilai publik tinggi.

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Bandung (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.99. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	231,28	474,74	598,02	529,38	689,26
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		**231,28**	**485,04**	**598,02**	**529,38**	**689,26**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

Selama lima tahun anggaran, Kota Bandung mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Realisasi SiLPA menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari Rp231,28 miliar di tahun 2020 menjadi Rp689,26 miliar pada tahun 2024, merefleksikan kapasitas fiskal yang relatif terjaga namun juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap saldo anggaran tahun sebelumnya.

Sementara itu, komponen pembiayaan lainnya seperti dana cadangan, penjualan kekayaan daerah, pinjaman daerah, penerimaan piutang, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak menjadi sumber signifikan, kecuali penerimaan kembali sebesar Rp10,32 miliar pada tahun 2021.

SiLPA sebagai satu-satunya sumber aktif selama lima tahun terakhir mengindikasikan kebutuhan diversifikasi instrumen pembiayaan untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka menengah. Kedepan, evaluasi atas akurasi perencanaan, efisiensi belanja, dan potensi pendapatan perlu ditingkatkan agar pembiayaan tidak semata bertumpu pada saldo tahun sebelumnya. Surplus riil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.643,96	5.838,24	6.415,75	6.905,93	7.153,10
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	5.407,13	5.675,60	6.473,48	6.746,04	7.067,21
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	37,91	10,91	0,00	4,4
A	**Defisit Riil**	**236,84**	**124,74**	**-68,64**	**159,88**	**81,49**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	231,28	474,74	598,02	529,38	689,26

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**241,60**	**474,74**	**598,02**	**529,38**	**689,26**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	478,44	599,48	529,38	689,27	770,69

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

b. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2019 hingga 2024 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Tabel di bawah memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2019 hingga 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

Tabel 2.101. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Jumlah SiLPA	231,28	100%	474,74	100%	598,02	100%	529,38	100%	689,26	100%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	231,28	100%	474,74	100%	598,02	100%	529,38	100%	689,26	100%

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
5.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Bandung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kota Bandung dapat diperkecil.

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2020–2024 (dalam miliar rupiah) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.102. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo Kas Neraca Daerah	234,38	231,28	474,74	598,02	529,38	689,26
	Dikurangi						
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0	0
3	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		**234,38**	**231,28**	**474,74**	**598,02**	**529,38**	**689,26**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020–2024 (Audited)*

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

2.2.2.Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan

adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin kesinambungan fiskal dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, proyeksi keuangan lima tahun ke depan menjadi instrumen strategis yang wajib dikaji secara komprehensif. Proyeksi ini berfungsi sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran yang berorientasi pada hasil, sekaligus sebagai alat ukur kemampuan daerah dalam memenuhi target-target pembangunan jangka menengah.

Analisis proyeksi keuangan memadukan tren historis realisasi pendapatan dan belanja, potensi penerimaan asli daerah, arah kebijakan nasional, serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Bandung dapat mengidentifikasi risiko fiskal, merancang strategi alokasi sumber daya yang efisien, serta memastikan kesinambungan program prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Bagian ini akan menyajikan estimasi atas potensi pendapatan, belanja operasional, belanja modal, dan pembiayaan daerah dalam lima tahun ke depan—dengan mempertimbangkan indikator makro, asumsi kebijakan fiskal, serta prioritas pembangunan strategis daerah.

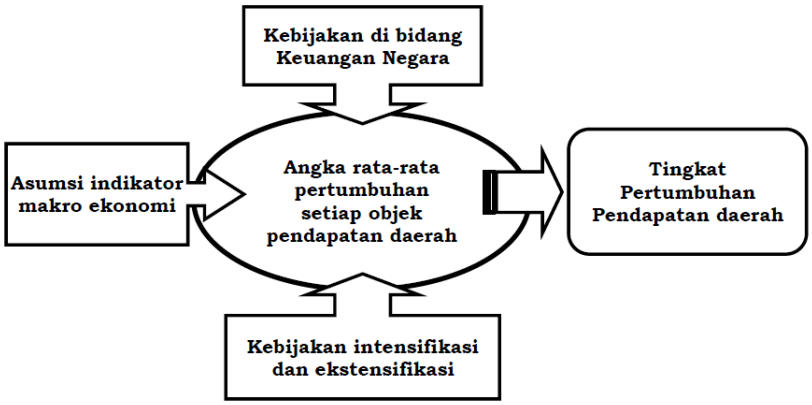
2.2.2.1.Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2025-2030

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi- asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.61. Metode Proyeksi Pendapatan Daerah



Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026–2030 disusun sebagai bagian integral dari perencanaan fiskal jangka menengah yang bertujuan memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Estimasi ini didasarkan pada analisis tren historis realisasi pendapatan, pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat, serta potensi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Bandung diproyeksikan menghadapi tantangan dan peluang dalam peningkatan pendapatan, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset dan BUMD. Asumsi makro seperti inflasi, PDRB, dan regulasi perpajakan nasional juga menjadi faktor penentu dalam perhitungan ini.

Proyeksi disusun dalam bentuk estimasi tahunan terhadap komponen utama pendapatan, yakni:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Transfer Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah)
- Lain-lain pendapatan yang sah

Estimasi disajikan dalam skenario moderat yang mempertimbangkan konsistensi kinerja fiskal, potensi kebijakan inovatif, dan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola pendapatan. Dengan pendekatan ini, proyeksi pendapatan tidak hanya menjadi angka prediktif, melainkan juga sebagai pijakan strategis untuk perencanaan belanja dan pembiayaan daerah secara terukur dan akuntabel.

Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2020–2024, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah,

lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;

c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

d. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/ Lembaga terkait di tingkat Kota dan Provinsi;

e. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;

f. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

h. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional; dan

i. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

Proyeksi pendapatan dalam Rancangan ini berlaku untuk periode 2025 sampai dengan tahun 2030, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.103. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	**PENDAPATAN**	**7.494,23**	**7.615,90**	**7.775,70**	**7.939,40**	**8.151,84**	**8.329,52**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**4.119,03**	**4.280,20**	**4.422,20**	**4.567,70**	**4.717,10**	**4.879,72**
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.379,07	3.522,80	3.634,50	3.749,80	3.879,07	4.015,23
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	650,61	674,9	699,4	723,9	749,31	776,24
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,16	20	20,7	21,5	22,27	22,56
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68,19	62,5	67,5	72,5	73,43	74,81
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.375,20**	**3.335,70**	**3.353,50**	**3.371,70**	**3.434,74**	**3.449,79**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.028,15	2.850,70	2.860,80	2.871,10	2.883,68	2.848,65
04.02.02	Transfer Antar Daerah	347,05	429	429	429	423,79	445,49
04.02.03	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0,00	0

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
04.03.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

Selama periode 2025–2030, pendapatan daerah Kota Bandung diproyeksikan mengalami tren peningkatan moderat, dari Rp7.494,23 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp8.329,52 miliar pada tahun 2030.

Komponen utama penyumbang pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tumbuh konsisten dengan dominasi *pendapatan pajak daerah*—naik dari Rp3.379,07 miliar (2025) menjadi Rp4.015,23 miliar (2030). Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain sah juga menunjukkan pertumbuhan gradual, meskipun dengan nominal yang jauh lebih kecil.

Di sisi lain, pendapatan transfer cenderung stagnan, dengan fluktuasi ringan pada transfer dari pemerintah pusat serta transfer antar daerah. Proyeksi tidak mencantumkan kontribusi dari bantuan keuangan maupun pendapatan hibah/dana darurat, menunjukkan minimnya diversifikasi sumber pendapatan eksternal di luar PAD dan transfer.

Secara keseluruhan, tren proyeksi pendapatan menandakan pergeseran gradual menuju peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD. Namun, keterbatasan pendapatan dari sumber lain di luar PAD dan transfer mengindikasikan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pembukaan opsi kerjasama pendanaan daerah ke depan.

2. Proyeksi Belanja Tahun 2025-2030

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai berdasarkan pada acress 2,5% dengan menjadikan tahun awal pada RKPD 2025, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan.

b. Belanja Hibah berdasarkan pada kebijakan tahun 2024.

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d. Belanja Tidak Terduga berdasarkan pada asumsi bahwa pandemik COVID-19 belum berakhir.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Belanja Pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung;

b. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;

c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;

d. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;

e. Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Tabel 2.104. Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	**BELANJA**	**7.809,36**	**7.903,25**	**8.044,57**	**8.189,29**	**8.337,53**	**8.482,33**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**6.954,03**	**7.060,77**	**7.169,57**	**7.280,50**	**7.393,60**	**7.508,94**
05.01.01	Belanja Pegawai	2.899,00	2.956,98	3.016,12	3.076,44	3.137,97	3.200,73
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.797,97	3.835,95	3.874,31	3.913,05	3.952,18	3.991,70
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	211,31	221,88	232,97	244,62	256,85	269,69
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	45,75	45,96	46,17	46,39	46,60	46,81
05.02	**BELANJA MODAL**	**772,00**	**802,88**	**835,00**	**868,40**	**903,13**	**939,26**
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**83,33**	**39,6**	**40**	**40,4**	**40,8**	**34,13**
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: *Hasil Analisis, 2024*

Proyeksi belanja Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari Rp7.809,36 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp8.482,33 miliar pada tahun 2030, mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional, investasi daerah, dan layanan publik secara berkelanjutan.

Komponen belanja operasi tetap menjadi porsi dominan, meningkat dari Rp6.954,03 miliar (2025) menjadi Rp7.508,94 miliar (2030). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan bertahap pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang menandakan konsistensi penguatan kapasitas aparatur dan pelayanan publik. Sub-komponen belanja subsidi belum diproyeksikan bukan karena mengabaikan potensi kebijakan subsidi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian fiskal dan penyesuaian terhadap dinamika regulasi serta kebutuhan sektoral yang belum terdefinisikan secara pasti. Beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut adalah :

a. Tidak Ada Program Subsidi yang Bersifat Tetap dan Berkelanjutan

   Belanja subsidi memerlukan dasar hukum dan program yang bersifat reguler dan berjangka panjang.

   Saat ini, Kota Bandung belum memiliki program subsidi yang memenuhi kriteria tersebut, seperti subsidi transportasi, energi, atau pangan yang terstruktur dalam RPJMD.

b. Ketergantungan pada Kebijakan Pusat dan Provinsi

   Sebagian besar skema subsidi di sektor strategis (misalnya BBM, listrik, pupuk, dan pangan) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator atau pelaksana teknis, sehingga tidak dapat memproyeksikan belanja subsidi secara mandiri tanpa kepastian alokasi dan regulasi dari pusat.

c. Fokus pada Belanja Sosial dan Hibah yang Lebih Terukur

   Pemerintah Kota Bandung lebih memprioritaskan belanja bantuan sosial dan hibah yang memiliki indikator kinerja dan sasaran penerima yang jelas. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau kelompok rentan dan mendukung inklusi sosial, dibandingkan subsidi yang bersifat umum dan berisiko tidak tepat sasaran.

d. Kehati-hatian Fiskal dan Pengendalian Risiko

   Subsidi memiliki potensi membebani APBD secara tidak proporsional jika tidak dirancang dengan mekanisme kontrol dan evaluasi yang kuat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung memilih untuk tidak memproyeksikan belanja subsidi hingga ada program yang benar-benar siap dijalankan dan didukung oleh regulasi serta kajian kelayakan fiskal. Pemerintah Kota Bandung tetap membuka ruang untuk mengembangkan skema subsidi daerah yang bersifat targeted dan berbasis data, khususnya pada sektor transportasi publik, UMKM, dan ketahanan pangan, apabila kajian

kelayakan dan dukungan regulatif telah tersedia. Proyeksi belanja subsidi akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) apabila program tersebut telah memenuhi syarat teknis dan fiskal.

Sub-komponen seperti belanja hibah dan bantuan sosial juga mengalami kenaikan moderat, mengindikasikan dukungan terhadap masyarakat dan kelembagaan eksternal tetap terjaga. Belanja modal menunjukkan tren penguatan investasi infrastruktur, dari Rp772,00 miliar (2025) menjadi Rp939,26 miliar (2030). Hal ini berpotensi mendukung capaian kinerja urusan wajib dan pilihan, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis sarana dan prasarana.

Sementara itu, belanja tak terduga menunjukkan penurunan signifikan, dari Rp83,33 miliar (2025) menjadi Rp34,13 miliar (2030), mengindikasikan optimalisasi perencanaan risiko atau pemangkasan alokasi cadangan fiskal. Tidak adanya alokasi untuk belanja transfer dalam seluruh proyeksi periode perlu diperhatikan dalam konteks kewajiban fiskal dan harmonisasi pendanaan antar wilayah.

Secara keseluruhan, tren proyeksi belanja memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada penguatan belanja layanan dasar, stabilisasi belanja pegawai, dan akumulasi investasi pembangunan strategis. Strategi belanja ke depan perlu diarahkan untuk menjaga efisiensi, relevansi, serta responsivitas terhadap dinamika kebutuhan daerah.

3. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2030

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk SiLPA. Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

2.2.2.2.Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan lima tahun ke depan. Proses ini tidak hanya sekadar menelusuri angka penerimaan dan belanja, tetapi juga memastikan adanya sinkronisasi antara ketersediaan sumber daya fiskal dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Langkah awal dalam analisis ini adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap seluruh potensi penerimaan daerah, baik yang bersifat padat data seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun penerimaan lain yang sah. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk membangun proyeksi fiskal tahunan yang mempertimbangkan tren historis, regulasi terbaru, dan asumsi makro yang relevan.

Setelah sumber penerimaan dihitung dan diproyeksikan, tahapan berikutnya adalah pengalokasian dana secara strategis ke dalam pos-pos pembiayaan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan. Ini mencakup:

- Belanja wajib dan mengikat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar)
- Belanja prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD
- Cadangan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Analisis ini juga mempertimbangkan efisiensi belanja, potensi defisit, serta mekanisme pembiayaan untuk menutup kesenjangan fiskal. Pendekatan yang digunakan dalam kerangka ini adalah skenario moderat, di mana proyeksi pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan asumsi realistik dan cerminan kapasitas aktual daerah, tanpa terlalu konservatif maupun ekspansif.

Dengan demikian, kerangka pendanaan jangka menengah menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga dapat dijalankan secara fiskal berdasarkan data yang terukur dan analisis yang akurat.

1. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.105. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	315,16	287,35	268,87	249,89	185,69	152,81
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Bandung selama periode 2025–2030 menunjukkan tren penurunan pada komponen penerimaan pembiayaan, dari Rp315,16 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp152,81 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini merefleksikan upaya konsolidasi fiskal serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan defisit, termasuk kemungkinan pembatasan penggunaan SILPA dan skema pinjaman daerah.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan hanya muncul pada tahun 2025 sebesar Rp4,62 miliar, dan tidak dialokasikan kembali dalam tahun-tahun selanjutnya. Hal ini

mengindikasikan terbatasnya kewajiban pembiayaan atau pelunasan pinjaman yang jatuh tempo, serta optimalisasi struktur pembiayaan daerah yang lebih efisien.

Secara umum, tren pembiayaan menunjukkan arah kebijakan yang berhati-hati dan berorientasi pada penguatan kapasitas pendanaan internal serta pengendalian risiko fiskal. Penurunan bertahap penerimaan pembiayaan perlu dikaji dalam konteks kemampuan pendapatan dan belanja daerah agar keseimbangan anggaran dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

b. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib akan diprioritaskan dalam penghitungan kerangka pendanaan Kota Bandung 2025-2030.

Tabel 2.106. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Mengikat**	**2.888,90**	**2.975,57**	**3.064,83**	**3.156,78**	**3.049,96**	**3.198,43**
1	Belanja Pegawai	2.899,00	2.956,98	3.016,12	3.076,44	3.137,97	3.200,73
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
B	**Belanja Wajib**	**2.617,46**	**2.643,63**	**2.670,07**	**2.696,77**	**2.678,93**	**2.712,36**
1	Pendidikan	1.184,96	1.196,81	1.208,78	1.220,87	1.208,78	1.226,90
2	Kesehatan	1.000,49	1.010,49	1.020,60	1.030,80	1.020,60	1.035,89
3	Peningkatan kapasitas SDM	9,12	9,21	9,3	9,39	9,49	9,48
4	Penguatan APIP	47,86	48,33	48,82	49,31	49,8	49,81
5	Kewilayahan	375,03	378,78	382,57	386,4	390,26	390,30
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan modal daerah	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Total Belanja Wajib Mengikat		**5.506,36**	**5.506,36**	**5.619,20**	**5.734,90**	**5.853,55**	**5.728,89**

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

Selama periode 2025–2030, total belanja wajib dan mengikat Kota Bandung menunjukkan konsistensi alokasi pada kisaran Rp5.506,36 miliar hingga Rp5.853,55 miliar. Proyeksi ini mencerminkan komitmen fiskal Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan belanja prioritas dan memenuhi kewajiban dasar pelayanan publik.

Pada kelompok belanja mengikat, yang mayoritas merupakan belanja pegawai, terlihat tren kenaikan yang stabil, dari Rp2.899,00 miliar (2025) menjadi Rp3.200,73 miliar (2030), menandakan kebutuhan berkelanjutan atas pembiayaan aparatur dan pelayanan administratif. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bandung senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan proyeksi APBD Kota Bandung periode 2026–2030, persentase belanja pegawai masih berada pada kisaran 38,4% hingga 38,8%. Meskipun angka ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UU 1/2022, Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan tren penurunan proporsi belanja aparatur secara bertahap sejak tahun 2020, serta terus melakukan upaya sistematis untuk menekan belanja pegawai melalui:

a. Optimalisasi struktur organisasi dan digitalisasi layanan publik, guna mengurangi kebutuhan SDM administratif.
b. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan output kelembagaan, untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja pegawai menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
c. Integrasi prinsip inklusi sosial dan kesetaraan gender (GESI) dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga belanja aparatur turut mendukung pelayanan publik yang adil dan responsif.

Lebih dari sekadar angka, belanja pegawai Kota Bandung diposisikan sebagai investasi sosial yang menopang transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berdampak. Pemerintah Kota Bandung juga terus berupaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah secara produktif, agar rasio belanja pegawai terhadap APBD dapat diturunkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Belanja bunga tidak dialokasikan, menunjukkan tidak adanya kewajiban pembayaran utang berbunga selama periode tersebut.

Sementara itu, kelompok belanja wajib, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kewilayahan, juga mengalami peningkatan moderat. Alokasi untuk pendidikan dan kesehatan dijaga di atas ambang minimal, masing-masing mencapai sekitar Rp1.226,90 miliar dan Rp1.035,89 miliar pada tahun 2030. Komponen penguatan APIP, kapasitas SDM, dan kewilayahan menunjukkan pertumbuhan bertahap, mendukung tata kelola, pembangunan kapasitas internal, dan pelayanan lintas wilayah.

Tidak terdapat proyeksi alokasi pada pengeluaran pembiayaan, seperti cicilan pokok utang, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan keuangan daerah missal untuk pelaksanaan Pilkada, menandakan pendekatan penganggaran yang konservatif dan berfokus pada belanja rutin serta pelayanan dasar. Hal ini bukan merupakan bentuk pengabaian, melainkan hasil dari pertimbangan fiskal, regulatif, dan strategis yang mendalam. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal kepada BUMD
   - o Belum ada proposal bisnis BUMD yang layak secara finansial dan berdampak strategis untuk dimasukkan dalam RPJMD.
   - o Pemerintah Kota Bandung menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal dan menghindari penyertaan modal yang tidak berbasis kajian kelayakan usaha dan risiko investasi.
   - o Penyertaan modal akan dipertimbangkan secara selektif melalui mekanisme perubahan RKPD atau APBD, apabila BUMD mengajukan rencana ekspansi yang a). mendukung pelayanan public, b). Memberikan kontribusi PAD, c). Telah melalui uji kelayakan dan persetujuan DPRD

b. Pencadangan Keuangan Daerah untuk Pilkada
   - o Pelaksanaan Pilkada merupakan agenda nasional yang dibiayai melalui mekanisme hibah kepada KPU dan Bawaslu, bukan belanja langsung daerah.
   - o Pencadangan anggaran untuk Pilkada dilakukan secara bertahap melalui APBD tahunan, sesuai dengan tahapan dan kebutuhan riil yang ditetapkan oleh penyelenggara.
   - o RPJMD bersifat makro dan strategis, sehingga alokasi pencadangan Pilkada tidak dimasukkan secara eksplisit, namun akan diakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan RKA-SKPD) menjelang tahun pelaksanaan.

Secara keseluruhan, proyeksi ini memperlihatkan disiplin fiskal dan komitmen terhadap pemenuhan belanja prioritas yang mengikat secara regulatif, serta keberlanjutan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan proyeksi SiLPA, dilakukan melalui analisis proyeksi pembiayaan daerah, untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun

ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;

b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB) /laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);

c. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;

d. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;

e. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;

f. Asumsi penyerapan belanja rata-rata per tahun berkisar 95% persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain; dan

g. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Sedangkan perhitungan proyeksi pendapatan perhitungan proyeksi belanja dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2025-2029 untuk mendanai pembangunan Kota Bandung. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2025-2030.

Tabel 2.107. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030

No	Uraian	APBD	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pendapatan Daerah	7.494,23	7.615,90	7.775,70	7.939,40	8.151,84	8.329,52
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	315,16	287,35	268,87	249,89	185,69	152,81
C	**KAPASITAS KEUDA**	**7.809,39**	**7.903,25**	**8.044,57**	**8.189,29**	**8.337,53**	**8.482,33**

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

Selama periode 2025–2030, kapasitas kemampuan keuangan daerah (Keuda) Kota Bandung menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dari Rp7.809,39 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp8.482,33 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan moderat pada pendapatan daerah serta penurunan bertahap pada penerimaan pembiayaan,

yang secara keseluruhan mencerminkan arah kebijakan fiskal yang berimbang dan berorientasi pada penguatan sumber pendanaan rutin.

Pendapatan daerah, sebagai komponen utama kapasitas keuangan, terus meningkat dari Rp7.494,23 miliar (2025) menjadi Rp8.329,52 miliar (2030). Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan bertahap dari Rp315,16 miliar menjadi Rp152,81 miliar, mengindikasikan upaya pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan defisit serta optimalisasi pendanaan internal melalui PAD dan transfer.

Tren tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya menjaga sustainabilitas fiskal dengan mengarahkan kapasitas keuangan ke arah pembiayaan mandiri dan responsif terhadap kebutuhan belanja publik secara berkelanjutan.

4. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2030

Proyeksi APBD tahun 2025 hingga tahun 2030 dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran. Kebijakan belanja akan diprioritaskan untuk belanja wajib dan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Dengan demikian, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya sebagaimana diatur oleh Pemerintah.

Kota Bandung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Pada Tahun 2022-2023, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung terhadap total pendapatan diatas 40 persen. Nilai ini tergolong tinggi dibandingkan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat bahkan nasional.

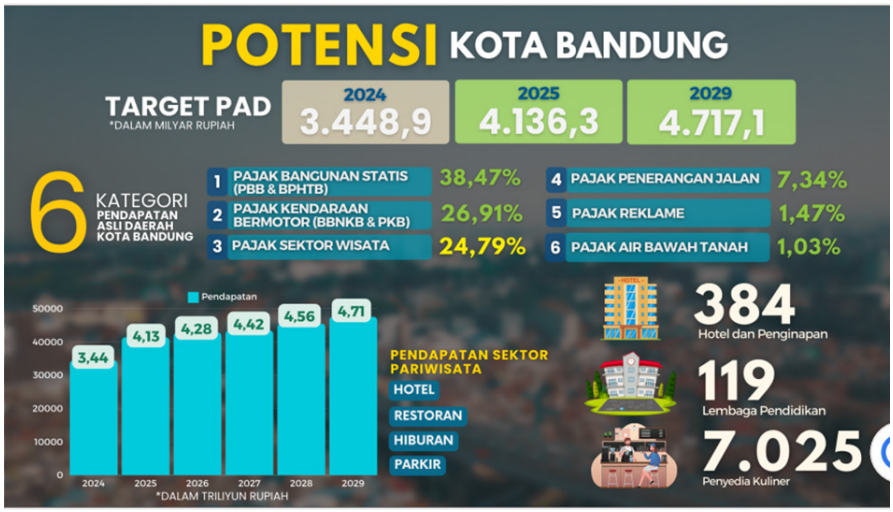
Sumber PAD yang paling dominan adalah pendapatan pajak daerah, yang menyumbang proporsi signifikan dari total pendapatan. Pada tahun 2022, pajak daerah menyumbang 33,3 persen dari total pendapatan daerah, dan pada tahun 2023, kontribusinya sedikit menurun menjadi 33,1 persen. Proporsi ini dihitung berdasarkan persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam setiap tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Sebagai Kota berbasis Pariwisata, Jasa dan Ekonomi kreatif, sumber pajak yang berasal dari sektor tersier seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir menyumbang kontribusi cukup besar yakni 31,79 persen pada Tahun 2023. Pasca melandainya pandemi COVID-19, keempat sektor ini menunjukan tren pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan model bisnis yang dijalankan membutuhkan interaksi langsung antara penyedia layanan atau produk dengan pelanggan dilakukan secara langsung, tanpa perantara digital. Barang dan layanan yang diberikan umumnya dikonsumsi langsung di lokasi. Segmen bisnis

yang dilayani umumnya menyasar kategori leisure yang erat dengan sektor pariwisata. Semakin tinggi tingkat pendapatan pelaku usaha pada sektor ini maka semakin tinggi pula pajak yang diperoleh pemerintah daerah.

Kota Bandung sebagai Kota Jasa dan Pariwisata memiliki berbagai potensi unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah Fasilitas Jasa dan Destinasi Pariwisata di Kota Bandung terdiri dari 384 hotel/ penginapan, 7.025 Pelaku Kuliner, 8 Kampung Wisata Kreatif, 45 Taman Tematik, dan 80 Fasilitas Olahraga. Selain itu terdapat 119 Lembaga pendidikan, 32 Fasilitas Kesehatan dan 32 Lembaga Keuangan.

Gambar 2.62. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung



Sumber: *Bapperida diolah, 2025*

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung pada periode tahun 2025-2030 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), jenis pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Air Tanah (PAT).
f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Secara rinci proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai komponen pembentuk APBD untuk pembangunan tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN**	**7.494,23**	**7.615,90**	**7.775,70**	**7.939,40**	**8.151,84**	**8.329,52**	**2,26%**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**4.119,03**	**4.280,20**	**4.422,20**	**4.567,70**	**4.717,10**	**4.879,72**	**3,33%**
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.379,07	3.522,80	3.634,50	3.749,80	3.879,07	4.015,23	3,33%
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	650,61	674,9	699,4	723,9	749,31	776,24	3,56%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,16	20	20,7	21,5	22,27	22,56	3,06%
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68,19	62,5	67,5	72,5	73,43	74,81	4,60%
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.375,20**	**3.335,70**	**3.353,50**	**3.371,70**	**3.434,74**	**3.449,79**	**0,84%**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.028,15	2.906,70	2.924,50	2.942,70	3.010,95	3.004,30	-0,02%
04.02.02	Transfer Antar Daerah	347,05	429	429	429	423,79	445,49	0,95%
04.02.03	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0,00	0	
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0
04.03.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0	0
5	**BELANJA**	**7.809,36**	**7.903,25**	**8.044,57**	**8.189,29**	**8.337,53**	**8.482,33**	**1,78%**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**6.954,03**	**7.060,77**	**7.169,57**	**7.280,50**	**7.393,60**	**7.508,94**	**1,55%**
05.01.01	Belanja Pegawai	2.899,00	2.956,98	3.016,12	3.076,44	3.137,97	3.200,73	2,00%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.797,97	3.835,95	3.874,31	3.913,05	3.952,18	3.991,70	1,00%
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	211,31	221,88	232,97	244,62	256,85	269,69	5,00%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	45,75	45,96	46,17	46,39	46,60	46,81	0,46%
05.02	**BELANJA MODAL**	**772,00**	**802,88**	**835,00**	**868,40**	**903,13**	**939,26**	**4,00%**
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**83,33**	**39,6**	**40**	**40,4**	**40,8**	**34,13**	**-3,65%**
05.03.01	Belanja tak Terduga	83,33	39,6	40	40,4	33,79	26,97	-9,16%
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	SURPLUS/(DEFISIT)	**-315,13**	**-287,35**	**-268,87**	**-249,89**	**-185,69**	**-152,81**	**-14,60%**

No	Uraian	APBD	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
06.01	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**315,16**	**287,3462353**	**268,87**	**249,89**	**185,69**	**152,81**	**-14,60%**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	315,16	287,35	268,87	249,89	185,69	152,81	-14,60%
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**4,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	PEMBIAYAN NETTO	**315,16**	**287,3462353**	**268,8663161**	**249,8930585**	**185,689056**	**152,810215**	**-14,60%**
	SILPA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: *Hasil proyeksi, 2025*

Skenario Moderat Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2025–2030

Karakteristik Skenario Moderat:

- Pertumbuhan pendapatan masih mengikuti tren historis, dengan sedikit peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah dan transfer pusat.
- Belanja daerah meningkat, namun tetap dalam batas kemampuan fiskal dan efisiensi belanja.
- Defisit fiskal ditutup dengan pembiayaan netto, menunjukkan pengelolaan fiskal yang realistis dan terukur.
- Penyesuaian belanja diarahkan pada prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

d. Pendapatan Daerah: Pertumbuhan Moderat dengan Dominasi PAD

Pendapatan daerah Kota Bandung diproyeksikan mengalami kenaikan bertahap, dari Rp7.494,23 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp8.329,52 miliar pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,26%. Peningkatan ini didorong oleh konsistensi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari *pendapatan pajak*, *retribusi daerah*, dan pendapatan sah lainnya.

Komponen pendapatan transfer, khususnya dari pemerintah pusat, justru mengalami penurunan tipis (−0,02%), menandakan urgensi peningkatan kemandirian fiskal dan diversifikasi sumber PAD. Proporsi PAD yang semakin dominan memberikan peluang bagi Pemda untuk meningkatkan efektivitas layanan dan kebijakan berbasis lokal, namun juga menuntut penguatan sistem pemungutan, kepatuhan, dan digitalisasi pendapatan.

e. Belanja Daerah: Stabil namun Belum Sejalan dengan Proyeksi Pendapatan

Total belanja daerah meningkat dari Rp7.809,36 miliar (2025) menjadi Rp8.482,33 miliar (2030), dengan rata-rata pertumbuhan 1,78% per tahun. Komponen terbesar adalah belanja operasi (±89%), yang didominasi oleh *belanja pegawai* dan *belanja barang dan jasa*. Meskipun tumbuh stabil, pertumbuhan belanja hibah (5%) dan belanja modal (4%) mencerminkan komitmen pembangunan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Komponen belanja tak terduga menunjukkan kontraksi tajam (−9,16%), yang bisa mengindikasikan optimisme terhadap stabilitas fiskal atau minimnya kebijakan kontinjensi di tahun-tahun mendatang.

Minimnya alokasi pada belanja subsidi, bunga, dan transfer menandakan ruang fiskal yang sempit, namun juga membuka peluang untuk reposisi belanja ke arah produktivitas dan nilai tambah sektor prioritas.

f. Surplus/Defisit dan Pembiayaan: Ketergantungan terhadap SILPA

APBD menunjukkan defisit struktural tiap tahun, dari −Rp315,13 miliar (2025) hingga −Rp152,81 miliar (2030), yang sepenuhnya ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya. Namun, rata-rata penurunan SILPA sebesar −14,60% menandakan tantangan dalam mempertahankan stabilitas fiskal tanpa sumber pembiayaan lain seperti pinjaman daerah atau hasil penjualan aset.

Tidak terdapat alokasi untuk pengeluaran pembiayaan sejak 2026, mencerminkan arah penganggaran yang konservatif dan rendah risiko, tetapi juga terbatas dalam inovasi fiskal jangka menengah. Ketergantungan pembiayaan pada SILPA perlu dikaji kembali dengan opsi peningkatan efisiensi belanja, penguatan PAD, dan pemanfaatan instrumen fiskal alternatif yang sah dan terkendali.

g. Keseimbangan Fiskal dan Risiko Keuangan

Tidak tersedianya alokasi pada pendapatan hibah, dana darurat, belanja subsidi, maupun pembiayaan cadangan menunjukkan bahwa instrumen tanggap risiko dan fleksibilitas fiskal belum dioptimalkan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan responsif Pemda terhadap dinamika ekonomi, bencana, atau kebijakan nasional yang berubah secara cepat.

Perlu penguatan mekanisme penganggaran berbasis risiko dan pembentukan cadangan fiskal strategis, agar daya tahan APBD lebih kuat terhadap guncangan eksternal.

2.2.2.3.Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan kewenangan kota. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, dibutuhkan pendanaan yang cukup. Kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari APBD kota terbatas dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kota. Untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pendanaan pembangunan selain APBD kota. Beberapa alternatif sumber pendanaan diluar APBD kota, antara lain:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR)
2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).
3. Kerjasama Daerah (Dalam dan Luar Negeri)
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
5. APBD Provinsi Jawa Barat
6. dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.2.2.4.Estimasi Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Kota Bandung, dengan populasi yang diperkirakan mencapai 2.579.837 jiwa, sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

di masa depan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tercatat sebesar Rp140,14 triliun pada tahun 2023, dan diproyeksikan akan meningkat pesat menjadi Rp622 triliun pada tahun 2029. Peningkatan ini diiringi dengan kenaikan PDRB per kapita, dari USD 7.883 pada tahun 2023, menjadi USD13.845 pada tahun 2029, dengan asumsi kurs Rp16.000 per USD.

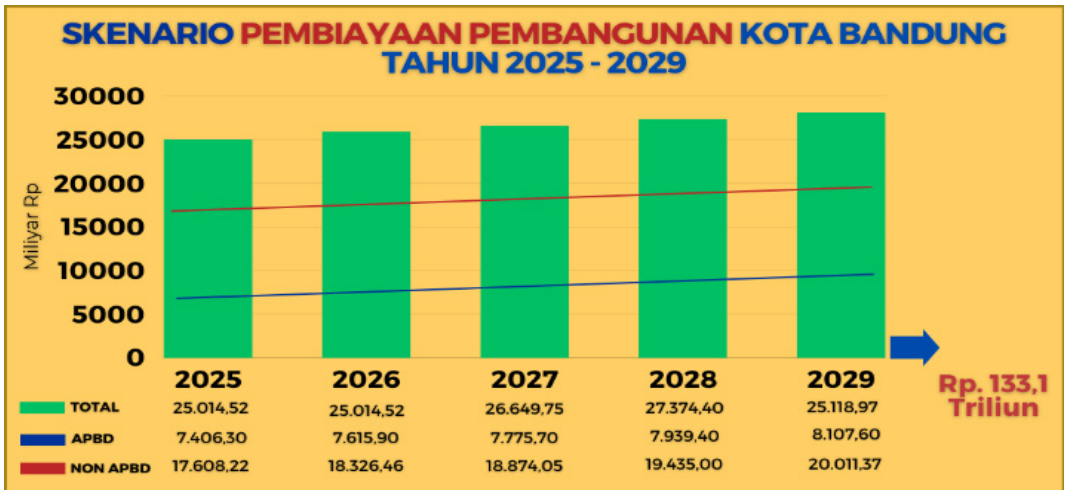
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung diproyeksikan sebesar Rp7,4 triliun, yang hanya mencakup 5,5% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan akan datang dari sumber-sumber di luar APBD, seperti pemerintah pusat dan sektor swasta.

Kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan Kota Bandung dalam periode lima tahun tersebut diperkirakan mencapai Rp 133,1 triliun. Ini mencakup berbagai proyek pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan inisiatif strategis lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ini, skenario pembiayaan pembangunan Kota Bandung dibagi menjadi beberapa sumber. Grafik dalam gambar menunjukkan distribusi antara APBD dan sumber pembiayaan non-APBD, yang secara bertahap meningkat setiap tahun. Pada tahun 2025, total pembiayaan diperkirakan sebesar Rp25,014 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp28,018 triliun pada tahun 2029. Kenaikan ini menandakan adanya kebutuhan dana yang besar untuk mendukung program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kota.

Secara keseluruhan, strategi pembiayaan Kota Bandung yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan untuk memenuhi target pembangunan pada tahun 2025 hingga 2030.

Gambar 2.63. Skenario Pembiayaan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2025-2029



Sumber: *Bapperida diolah, 2025*

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan Kota Bandung dalam lima tahun ke depan harus diarahkan secara lebih presisi dan berdampak luas, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan perkotaan, tekanan lingkungan, serta transformasi sosial-ekonomi yang cepat. Penyusunan RPJMD 2025–2029 menjadi momentum penting untuk menyusun ulang prioritas pembangunan dengan dasar pemahaman yang tajam terhadap berbagai permasalahan aktual dan potensi krisis yang mengintai kota.

Oleh karena itu, bab ini menguraikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi Kota Bandung saat ini dan berbagai isu strategis yang harus direspons secara transformatif, adaptif, dan kolaboratif. Seluruh analisis disusun berbasis data kinerja pembangunan 2020–2024, hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, serta pengamatan terhadap dinamika lokal, nasional, dan global yang mempengaruhi masa depan Kota Bandung.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Bandung 2018–2023 dan dan RPD 2024-2026 menunjukkan adanya sejumlah permasalahan struktural yang belum terselesaikan secara fundamental dan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan berdampak luas terhadap kualitas hidup warga serta kinerja pembangunan lintas sektor.

Berikut adalah lima permasalahan utama pembangunan Kota Bandung yang memerlukan respons strategis dan transformatif dalam periode RPJMD 2025–2029:

1. Kesenjangan Akses Layanan Dasar antar Wilayah dan Kelompok Masyarakat

Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung relatif tinggi, yaitu 83,75 pada tahun 2024 (BPS Kota Bandung, 2024), distribusi layanan pendidikan dan kesehatan masih belum merata. Ketimpangan terlihat dalam:

a. Rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2024 di Kota Bandung mencapai 11,07, namun memiliki pemerataan yang berbeda antar kecamatan; wilayah seperti Gedebage dan Cibiru berada di bawah rata-rata kota.
b. Distribusi pelayanan kesehatan yang timpang, dengan rasio Puskesmas dan tenaga kesehatan per penduduk yang belum merata. Pada tahun 2024 (LKPJ, 2024) rasionya mencapai 1:31.376 penduduk sementara standar minimal menurut WHO adalah 1:30.000 penduduk.
c. Akses layanan bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat urban miskin masih terbatas, baik dari sisi fisik maupun kualitas pelayanan.

Ketimpangan ini mencerminkan perlunya pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang adaptif terhadap konteks sosial dan geografis.

2. Ketimpangan Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Pertumbuhan kota yang cepat tidak diiringi dengan pengembangan infrastruktur yang merata dan berdaya dukung. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Bintar Kota Bandung (2024) mencatat:

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung hanya mencapai 12,56%.
b. Sistem drainase dan pengendalian banjir belum optimal, terbukti dari banjir berulang di kawasan Gedebage, Astanaanyar, Pagarsih, dan Pasteur.
c. Kawasan permukiman padat di pinggiran kota masih mengalami kekurangan akses air bersih, sanitasi layak, serta keterbatasan transportasi publik.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan infrastruktur masih bersifat proyek, belum berbasis kawasan dan ekosistem hidup warga.

3. Belum berkembangnya Modernisasi Ekonomi yang Inklusif

Mendorong transformasi ekonomi kota dari perdagangan dan industri pengolahan yang padat karya dan sebagian besar masih konvensional menjadi modern, padat modal serta berbasis teknologi/digitalisasi dan inovasi. Kota Bandung diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, industri, dan ekonomi kreatif di tingkat nasional yang inklusif.

Tingkat ekonomi Kota Bandung tergolong tinggi di Jawa Barat maupun Nasional. Struktur ekonomi lebih banyak bercorak jasa, yang didominasi sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan, namun pertumbuhan keduanya cenderung melambat. Sektor informasi -komunikasi dan Sektor penyediaan akomodasi, makan-minum cenderung meningkat bersama peran ekonomi kreatif. Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat – mirip dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, Nasional maupun global. Kinerja ekspor juga cenderung menurun.

Kesejahteraan dan pendapatan penduduk Kota Bandung tergolong tinggi di Jawa Barat maupun Nasional, namun kemerataan pendapatan cenderung turun, pengangguran yang cukup tingggi, juga indikasi kemiskinan ekstrim. Sementara tren struktur umur penduduk cenderung semakin didominasi usia produktif, produktif akhir dan menjelang usia lanjut. Persentase penduduk miskin tergolong rendah dan cenderung turun, namun ketimpangan pendapatan semakin meningkat, termasuk ketimpangan diantara penduduk miskin itu sendiri. Tingkat pengangguraan tergolong tinggi melebihi Jawa Barat dan Nasional. Tingkat pembentukan dan penanaman modal cenderung menurun, demikian juga nilai APBD riil melambat dengan kapasitas yang semakin mengecil.

4. Pengelolaan urbanisasi dan penataan ruang yang sesuai daya dukung dan daya tampung

Kota Bandung dihadapkan dengan isu pengelolaan urbanisasi yang cepat dan merencanakan tata ruang yang berkelanjutan. Perkembangan kota seiring dengan pertumbuhan dan mobilitas penduduk menjadi tantangan yang besar. Berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, membutuhkan ruang yang memadai dan layak.

Beberapa isu strategis terkait urbanisasi dan penataan ruang, yaitu a. tumpang tindih tata ruang yang berimplikasi pada tidak tertatanya struktur dan pola ruang kota; b. sengketa kepemilikan lahan akibat ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang berdampak pada ketidakpastian investasi dan konflik sosial; c. tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat sehingga menyebabkan aset lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara optimal; d. terbatasnya ruang terbuka hijau belum sesuai amanat undang-undang penataan ruang, sehingga berdampak pada penurunan kualitas resapan air, penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah, dan menurunnya kualitas udara; dan e. rendahnya nilai indeks kualitas tutupan lahan. Untuk merespon perkembangan kota dan urbanisasi, maka penataan dan pengendalian ruang perlu diefektifkan dengan menerapkan inovasi dan TIK.

Kemajuan kota dari berbagai aspek telah berimplikasi pada lingkungan hidup dan isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan, yaitu: a. ketidaksesuaian antara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan kebutuhan; b. masih tingginya persentase kawasan kumuh tanpa fasilitas pendukung yang baik sehingga berdampak pada memburuknya kondisi lingkungan; c. status daya dukung penyedia pangan yang melampaui ambang batas pelayanan mengharuskan Kota Bandung memenuhi kebutuhan pangannya dari luar wilayah; d. belum sesuainya daya dukung dengan kebutuhan air bersih di Kota Bandung; e. penurunan jasa layanan tanah dan resapan air yang beresiko pada penurunan permukaan tanah; f. belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3, termasuk kondisi daya tampung TPA Sarimukti yang telah melebihi kapasitas; g. ancaman bencana alam sesar lembang; h. ancaman banjir; dan i. pengelolaan penanganan kebakaran.

Penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) merujuk pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrous oksida (N_2O), menangkap panas dari matahari dan menyebabkan peningkatan suhu global.

Isu emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Bandung menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, berkontribusi terhadap emisi GRK akibat aktivitas perkotaan yang padat, seperti transportasi, industri, dan perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan. Jika tidak diatasi,

peningkatan emisi GRK dapat memperburuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta berkontribusi pada perubahan iklim yang berdampak luas.

Dalam mengukur efektivitas upaya penurunan GRK, salah satu indikator yang digunakan adalah intensitas GRK, yaitu jumlah emisi GRK yang dihasilkan per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Intensitas GRK mengukur efisiensi ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan emisi serendah mungkin. Semakin rendah intensitas GRK, semakin ramah lingkungan pertumbuhan ekonomi tersebut.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian ~~fiskal~~ keuangan daerah

Mengelola pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan bersih serta mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Beberapa isu dalam tata kelola pemerintahan, antara lain terkait penerapan dan penegakan regulasi, penataan kelembagaan, pelaksanaan program pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun belum menjawab isu strategis daerah, belum optimalnya manajemen SDM ASN, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, belum diterapkannya teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan secara optimal dan terintegrasi.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Struktur PAD Kota Bandung masih sangat bergantung pada sektor jasa konsumtif, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Data LKPJ 2024 menunjukkan:

a. Realisasi PAD tahun 2024 hanya mencapai 89,62% dari target, dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Daerah mencapai 90,25% dari target, Retribusi Daerah (75,80%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (83,77%) dari target.
b. Fluktuasi ekonomi seperti pandemi COVID-19 membuktikan bahwa sumber PAD ini sangat rentan terhadap perubahan mobilitas dan konsumsi masyarakat.
c. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dan minimnya inovasi pendapatan menjadi hambatan dalam memperkuat kemandirian fiskal kota.

Permasalahan ini menegaskan pentingnya strategi diversifikasi sumber PAD, pemanfaatan aset, dan penguatan fiskal berbasis digital.

Lebih lanjut, Kota Bandung masih sangat bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat (LKPJ, 2024), yang menyumbang lebih dari 38,14% dari total pendapatan daerah pada 2024. Ini menunjukkan:

a. Rasio kemandirian ~~fiskal~~ keuangan daerah Kota Bandung masih dalam kategori ~~sedang~~ rendah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Ini mencerminkan tingkat otonomi fiskal daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Tabel 2.109. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : *Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*

Berdasarkan data realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024, kemandirian keuangan Kota Bandung berkisar pada 36,57% – 43,22% termasuk dalam kategori rendah pola konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

b. Ketergantungan ini menyulitkan fleksibilitas daerah dalam mengambil kebijakan strategis, terutama jika terjadi penyesuaian dana transfer dari pusat.

c. Kapasitas inovasi fiskal (seperti PPP/KPBU, CSR, pemanfaatan aset) belum berkembang secara sistemik.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun strategi kemandirian fiskal jangka menengah melalui reformasi pendapatan dan efisiensi belanja.

Kelima permasalahan utama kota tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Bandung ke depan tidak bisa dilanjutkan dengan pendekatan konvensional yang bersifat sektoral, proyek-sentris, dan tidak berbasis wilayah. Permasalahan tersebut bersifat sistemik dan memerlukan:

a. Reformasi kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran,

b. Pendekatan spasial yang menjawab ketimpangan layanan, dan

c. Inovasi dalam pembangunan infrastruktur dan sosial berbasis ekosistem.

Dalam dokumen ini secara tegas menempatkan tantangan-tantangan tersebut dalam kerangka transformasi: dari kota birokratis menjadi kota kolaboratif; dari pembangunan fisik ke pembangunan manusia; dan dari ketergantungan fiskal ke arah kemandirian dan inovasi pembiayaan.

Disamping lima permasalahan utama tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan

tantangan yang dihadapi dan perlu ditangani. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Bandung disajikan dalam 4 (empat) kelompok yakni permasalahan pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Subbab ini memuat permasalahan pada aspek geografi dan demografi yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan di Kota Bandung. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, walaupun indeks risiko bencana Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.
2. Cenderung meningkatnya ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat.
3. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu penyebab menuurunkan kualitas lingkungan adalah menurunnya Indeks Kualitas Lahan.
4. Belum optimalnya ketaatan pemanfaatan ruang kota.

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memuat permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan di Kota Bandung. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum stabilnya Perekonomian Kota

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan menurun pada tahun 2024 menjadi 4,99 persen. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi nasional yang mencapai 5,03 persen.

2. Masih tingginya ketimpangan pendapatan

Gini Ratio di Kota Bandung pada tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 0,440. Meski terjadi penurunan pada tahun terakhir, namun capaian Gini Ratio Kota Bandung sejak tahun 2020 sampai 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3. Cenderung Meningkatnya Kemiskinan

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan kota. Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 3,38 persen.

4. Angka Pengangguran Masih Cukup Tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami penurunan, namun capaian TPT Kota Bandung pada periode tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Subbab ini memuat permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan di Kota Bandung. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Laju Inflasi di Kota Bandung mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, sempat menurun di tahun 2023 menjadi 0,63, namun meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 1,61.
2. Cenderung menurunnya literasi masyarakat yang mengindikasikan pengelolaan perpustakaan belum optimal.
3. Belum optimalnya upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Subbab ini memuat permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan di Kota Bandung. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.110. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum di Kota Bandung

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	a. Belum optimalnya Nilai Hasil Ujian SD b. Belum optimalnya Nilai Hasil Ujian SMP c. Meningkatnya Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI
2	Kesehatan	a. Tingginya rasio kematian ibu, diakibatkan oleh meningkatnya Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut b. Meningkatnya Kematian Bayi c. Kasus Balita Gizi Buruk pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 526 d. Belum optimalnya penanganan Stunting
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Menurunnya Layanan Air Bersih b. Menurunnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Belum optimalnya RTH yang berkualitas b. Rendahnya luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara c. Menurunnya Luasan RTH
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. Menurunnya Petugas Perlindungan Masyarakat b. Belum optimalnya Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif c. Belum optimalnya Kelurahan Siaga kebakaran dan Bencana
6	Sosial	a. Belum optimalnya fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya b. Kepuasan Masyarakat urusan sosial yang diukur oleh IKM pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 91,45

No	Urusan	Permasalahan
7	Tenaga Kerja	a. Angkatan Kerja Mengalami Penurunan b. Masih Tingginya Angka Pengangguran c. Menurunnya Lowongan Pekerjaan Baru d. Belum optimalnya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama e. Menurunnya Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi f. Belum optimalnya Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan g. Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja yang diukur oleh indikator TPAK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Masih terdapat ketimpangan gender b. Belum optimalnya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan c. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak
9	Pangan	a. Tingginya tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar Kota Bandung dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Bandung. b. Belum maksimalnya tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung. c. Masih adanya daerah rentan rawan pangan. d. Belum terjangkaunya pengawasan mutu dan keamanan pangan pada unit usaha pangan dan lokasi penjualan pangan segar yang ada di Kota Bandung
10	Lingkungan Hidup	Belum dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
11	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Belum optimalnya kualitas pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan Kelompok Tribina Aktif b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera, antara lain melalui program Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri dan Berkembang
13	Perhubungan	a. Menurunnya ketaatan kelaikan kendaraan yang ditunjukkan dengan menurunnya Uji KIR angkutan umum
14	Komunikasi dan Informatika	a. Menurunnya pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti b. Belum optimalnya penerapan SPBE pada lingkup Aplikasi, Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan, dan Infrastruktur
15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih kurang kompeten b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi c. Masih rendahnya tata kelola koperasi d. Masih rendahnya kepemilikan izin usaha koperasi (NIB, Izin USP, dan izin usaha lainnya sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi) e. Masih kurangnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha f. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap ekosistem digital g. Mash lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro h. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro i. Masih rendahnya legalitas usaha pelaku usaha mikro
16	Penanaman Modal	a. Menurunnya Investor PMDN/PMA b. Investasi PMDN/PMA pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 18.263,47 miliar

No	Urusan	Permasalahan
17	Kepemudaan dan Olah Raga	a. Menurunnya wirausahawan baru kepemudaan yang berkembang b. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda c. Menurunnya tempat kegiatan olahraga masyarakat
18	Statistik	a. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar. b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data daerah yang seharusnya menjadi sumber rujukan bagi data pembangunan daerah.
19	Persandian	a. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government untuk keamanan penyelenggaraan pemerintahan
20	Kebudayaan	a. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, dan pemnafaatan objek pemajuan kebudayaan b. Minimnya lembaga seni memenuhi standar sanggar seni
21	Perpustakaan	a. Minimnya pustakawan b. Menurunnya kunjungan pemustaka per tahun c. Belum optimalnya penyelenggaraan Kearsipan Secara Baku oleh perangkat daerah d. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi bagi masyarakat
22	Kearsipan	a. Menurunnya Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan
23	Kelautan dan Perikanan	a. Semakin berkurangnya lahan budidaya ikan akibat alih fungsi lahan b. Menurunnya minat generasi muda menjadi pelaku usaha bidang perikanan di Kota Bandung c. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran
24	Pariwisata	a. Kunjungan wisatawan meningkat, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 b. Belum optimalnya penerimaan daerah dari sektor pariwisata c. Belum optimalnya rumah/kampung kreatif/inkubasi /berkembang d. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata e. Masih rendahnya *Brand Awareness* Pariwisata Kota Bandung f. Menurunnya jasa usaha pariwisata yang memenuhi standar g. Masih sedikitnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi
25	Pertanian	a. Alih fungsi lahan yang meningkat sangat pesat dan juga belum optimalnya pemanfaatan lahan baik lahan tidur maupun lahan pekarangan b. Menurunnya minat generasi muda menjadi petani/peternak di Kota Bandung c. Kurangnya kompetensi SDM pertanian dan Peternakan d. Perlunya pencegahan dan pengendalian Kesehatan hewan
26	Perdagangan	a. Ekspor perdagangan meningkat, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum panedmi b. Belum optimalnya pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya c. Meningkatnya lonjakan harga barang kebutuhan pokok d. Rendahnya pertumbuhan ekspor
27	Perindustrian	a. Menurunnya Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil Formal b. Belum optimalnya pelaku IKM sentra industri yang memiliki daya saing
28	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	a. Belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi b. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Belum optimalnya pelayanan publik yang prima

No	Urusan	Permasalahan
29	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Menurunnya Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan b. Menurunnya PAD terhadap Pendapatan c. Belum optimalnya tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN d. Menurunnya penilaian Opini BPK pada tahun 2022 dan 2023 yang memperoleh WDP e. Belum optimalnya kepatuhan terhadap pengelolaan aset daerah f. Menurunnya Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah g. Menurunnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun h. Menurunnya Perangkat Daerah yang Pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik i. Menurunnya Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan j. Belum optimalnya Inovasi Daerah
30	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	a. Menurunnya Hasil Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention b. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sumber: *hasil analisis, 2025*

2.3.2.Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.3.2.1. Telaahan Isu global

Perkembangan Kota Bandung tidak saja dipengaruhi berbagai faktor internal, namun juga eksternal. Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain dinamika lingkungan di tingkat global/internasional, nasional, dan regional. Beberapa isu global yang dapat memengaruhi pembangunan di Kota Bandung, antara lain:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkay (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan mengantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 90 persen (8,8 miliar).

8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).** Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana seperti banjir, genangan, longsor, kekeringan, dan gempa megathrust.
10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.3.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 2.64. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: *RPJMN Tahun 2025-2029*

2.3.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah Kota Bandung merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung, memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

1. *Green* dan *blue economy*
2. Kualitas dan daya saing SDM
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastrutktur dasar
4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Keberlanjutan penataan ruang
6. Kualitas tata kelola pemerintahan

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah:

JABAR ISTIMEWA

Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

2.3.2.4. Telaahan RPJPD Kota Bandung

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045. Beberapa isu strategis pembangunan Kota Bandung untuk periode Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata
2. Kesehatan Berkualitas dan Merata
3. Modernisasi Ekonomi yang Inklusif
4. Penguatan Sosial Budaya
5. Kesetaraan Gender
6. Kondusifitas Daerah
7. Tata Kelola Pemerintahan
8. Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan
9. Urbanisasi dan Tata Ruang
10. Infrastruktur dan Transportasi yang Memadai

Pembangunan jangka panjang Kota Bandung diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Bandung Tahun 2025-2045:

BANDUNG KOTA JASA YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN

Visi Kota Bandung 2025-2045 merupakan cita-cita bersama dan memiliki makna bahwa pada tahun 2045, Kota Bandung akan menjadi:

- **Kota Jasa yang Kreatif**: Kota yang menyediakan berbagai layanan seperti layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sektor tersier lainnya secara inovatif didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang maju. Pengembangan kota

berorientasi pada pelayanan yang mendorong pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, seni, dan budaya, serta perbaikan kualitas hidup dengan tetap menjaga prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

- **Agamis**: Masyarakat Kota Bandung terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan nilai-nilai spiritual. Keberagaman ini merupakan modal sosial masyarakat yang harus tetap dipelihara untuk tetap rukun dan menjadi perekat dalam pelaksanaan pembangunan kota. Untuk itu, Kota Bandung akan menjadi rumah bagi semua pemeluk agama yang dijamin haknya untuk ibadah dengan aman dan nyaman serta menjunjung tinggi asas kebhinekaan, kesatuan dan persatuan agar terwujud kedamaian dalam bermasyarakat.
- **Maju**: Kota Bandung yang mendayagunakan seluruh sumber daya berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial budaya, dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang dinamis sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lahir dan batin.
- **Berkelanjutan**: Kota Bandung menjadi tempat hunian bagi masyarakat yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak, bermartabat, dan beradab serta memiliki akses pada pemanfaatan fasilitas serta sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan merata. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan atau ketangguhan terhadap perubahan iklim.

Visi RPJPD Kota Bandung 2025-2045 “Bandung Kota Jasa yang Kreatif, Agamis, Maju, dan Berkelanjutan” memiliki makna pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan daerah yang kreatif, unggul, maju, dan nyaman untuk dihuni dengan penataan kota dan pelayanan transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertaraf internasional di regional Jawa Barat. Kemajuan kota di berbagai sektor dalam kurun waktu 20 tahun kedepan tidak dimaknai hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi namun juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung, dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Misi RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif, Berkualitas, dan Berdaya Saing

Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif dan inovatif, berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera. Penduduk Bandung diharapkan menjadi SDM yang unggul dan memiliki hidup yang layak dan sejahtera, terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran.

2. Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Tangguh, dan Kreatif

Perekonomian kota dikembangkan dengan mengoptimalkan produktivitas sektor-sektor unggulan terutama berbasis jasa yang didukung oleh pemanfaatan inovasi dan IPTEK terutama teknologi digital, dan pendayagunaan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro, serta penguatan integrasi ekonomi domenstik dan global untuk transformasi ekonomi.

3. Misi 3: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Pembangunan jangka panjang pada pemerintahan daerah dilakukan dengan menitikberatkan pada penguatan dan transformasi tata kelola untuk pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi.

4. Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas Daerah

Bandung menjadi kota yang nyaman untuk dihuni dan menjadi tujuan investasi yang sangat menjanjikan di Pulau Jawa maupun tingkat nasional. Berbagai fasilitas, kemudahan investasi, kepastian hukum, dan SDM serta lingkungan yang lestari menjadi daya tarik yang ditawarkan Bandung.

5. Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan SDM dilakukan secara paripurna sehingga masyarakat Bandung tidak hanya unggul dari aspek pendidikan, kesehatan dan hidup layak secara ekonomi, namun juga memiliki fondasi agama dan nilai-nilai luhur yang kuat. Masyarakat Bandung diharapkan dapat mengembangkan dan mengekspresikan potensinya dan hak-hak dasar individu dengan tetap menegakkan nilai-nilai agama, norma sosial, dan budaya, sebagai insan yang beradab. Dengan kualitas SDM yang tangguh dan peka terhadap perkembangan zaman, maka diharapkan dapat menjadi insan yang peduli terhadap lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, resilien terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.

6. Misi 6: Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkualitas

Pembangunan sektoral dilakukan sejalan dengan pembangunan kewilayahan. Kota Bandung dibangun dengan memerhatikan rencana tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan kewilayahan yang memadukan berbagai aspek pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi daerah sekitar dan Provinsi Jawa Barat.

7. Misi 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif, dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan yang menjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat menjadi sebuah keniscayaan dalam membangum Kota Bandung yang maju dan berkelanjutan. Pembangunan jangka panjang diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan secara kuantitas, namun kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasana sudah bertaraf internasional untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

8. Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan kota dilakukan secara berkesinambungan antartahapan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah. Implementasi rencana pembangunan didukung dengan pengendalian dan evaluasi berbasis manajemen risiko serta pembiayaan yang memadai dan inovatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

2.3.2.5. Telaahan RTRW Kota Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Tujuan Penataan Ruang Kota yaitu **mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif yang bertaraf nasional**.

Selanjutnya, dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 ditetapkan kebijakan dan strategi tata ruang. Kebijakan perencanaan tata ruang meliputi:

1. kebijakan dan strategi Struktur Ruang Kota;
2. kebijakan dan strategi Pola Ruang Kota; dan
3. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kota.

Kebijakan Struktur Ruang Kota meliputi:

1. perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
2. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

3. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk melaksanakan rencana penataan ruang kota diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi untuk perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:
   a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;
   b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPPK;
   c. mengembangkan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan pusat pelayanan;
   d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan secara merata;
   e. menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
   f. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
2. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:
   a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
   b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
   c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
   d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
   e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat kegiatan;
   f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
   g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

3. Strategi untuk peningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional dilakukan melalui:
   a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
   b. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
   c. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
   d. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerja sama antardaerah;
   e. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
   f. memperluas jaringan prasarana air limbah;
   g. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
   h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
   i. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per wilayah dengan teknik yang ramah lingkungan;
   j. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
   k. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
   l. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
   m. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;
   n. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
   o. menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
   p. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
   q. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Kebijakan Pola Ruang Kota terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung; dan
b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

1. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung, meliputi:
   a. menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung khususnya di KBU;

b. mempertahankan dan merevitalisasi Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi Kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai dan jalur rel kereta api;

d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

e. meningkatkan ketersediaan RTH publik melalui inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur hijau jalan, pengadaan lahan untuk RTH publik, serta pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan;

f. melestarikan dan melindungi Kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap perubahan, kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural; dan

g. meminimalkan dampak resiko pada Kawasan rawan bencana.

2. Strategi Pola Ruang Kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun, meliputi:

a. mengembangkan Pola Ruang Kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;

b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Wilayah Bandung Timur yang terdiri atas: SWK Arcamanik; SWK Ujungberung; SWK Kordon; dan SWK Gedebage.

c. mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas: SWK Bojonagara; SWK Cibeunying; SWK Tegallega; dan SWK Karees.

d. membatasi pembangunan di KBU pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya atau yang bukan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH;

f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada Kawasan peruntukan lainnya; dan

g. menata Kawasan permukiman kumuh dengan pendekatan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi.

Kebijakan Kawasan Strategis Kota meliputi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif. Strategi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif.

a. menjalin kemitraan Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis;
c. mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong pengembangan kawasan yang didorong pengembangannya; dan
d. pengembangan tata bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan efektifitas dan estetika Ruang.

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota, yaitu pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat. Strategi Pemanfaatan Ruang Kota untuk pengembangan program perwujudan Tata Ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara swasta dan masyarakat.

a. melaksanakan Pemanfaatan Ruang Kota melalui KKPR;
b. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang;
c. mendorong kemitraan dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; dan
d. melaksanakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dengan sektoral dalam rangka mewujudkan RTR.

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yaitu penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten.

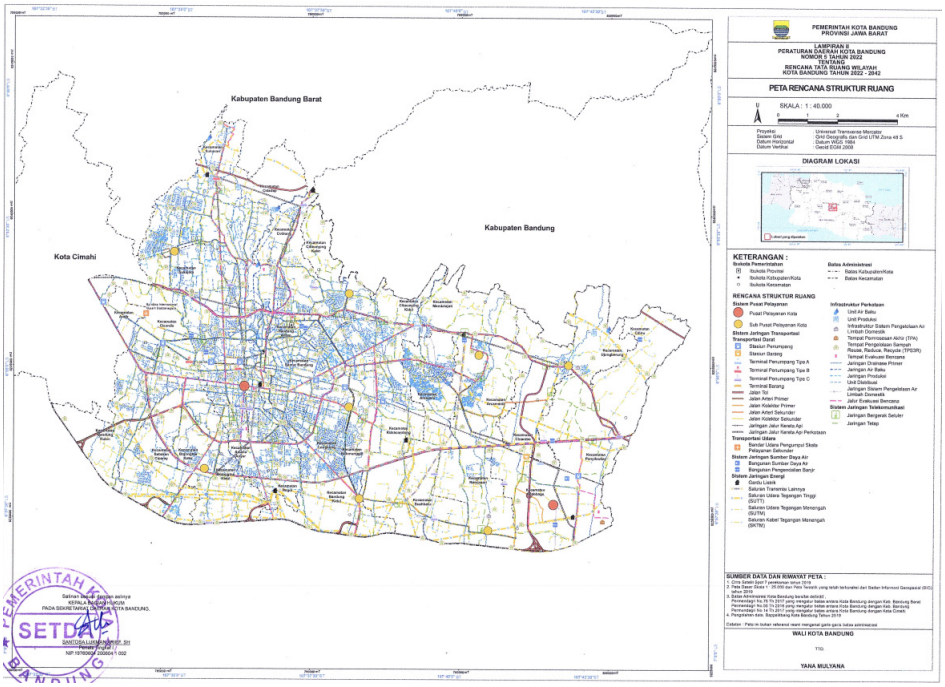
a. menyusun dan menetapkan peraturan zonasi yang terintegrasi dengan RDTR sesuai arahan KUZ;
b. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan Pemanfaatan Ruang Kota dan kegiatan yang berdampak penting;
c. mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong pembangunan yang dikembangkan dan menghambat pembangunan di wilayah yang dikendalikan;
d. menyusun dan mengembangkan mekanisme untuk pelaksanaan teknik pengaturan zonasi;
e. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan

f. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota.

Kawasan strategis di Kota Bandung meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN); b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan c. Kawasan Strategis Kota (KSK).

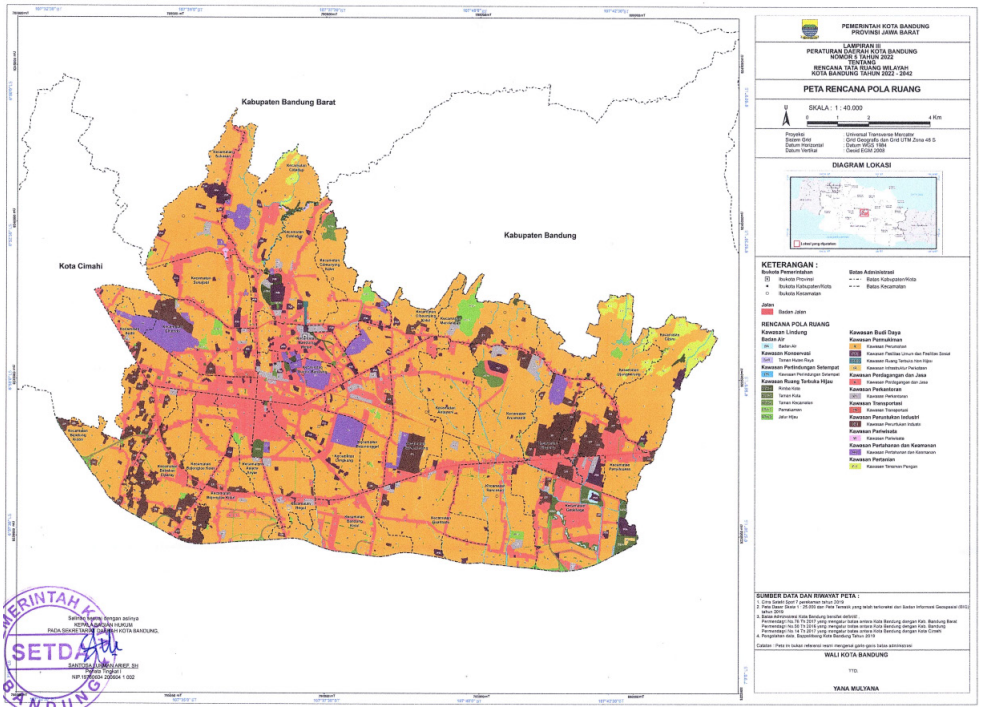
Peta wilayah Kota Bandung disertai dengan peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang disajikan pada halaman di bawah.

Gambar 2.65. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



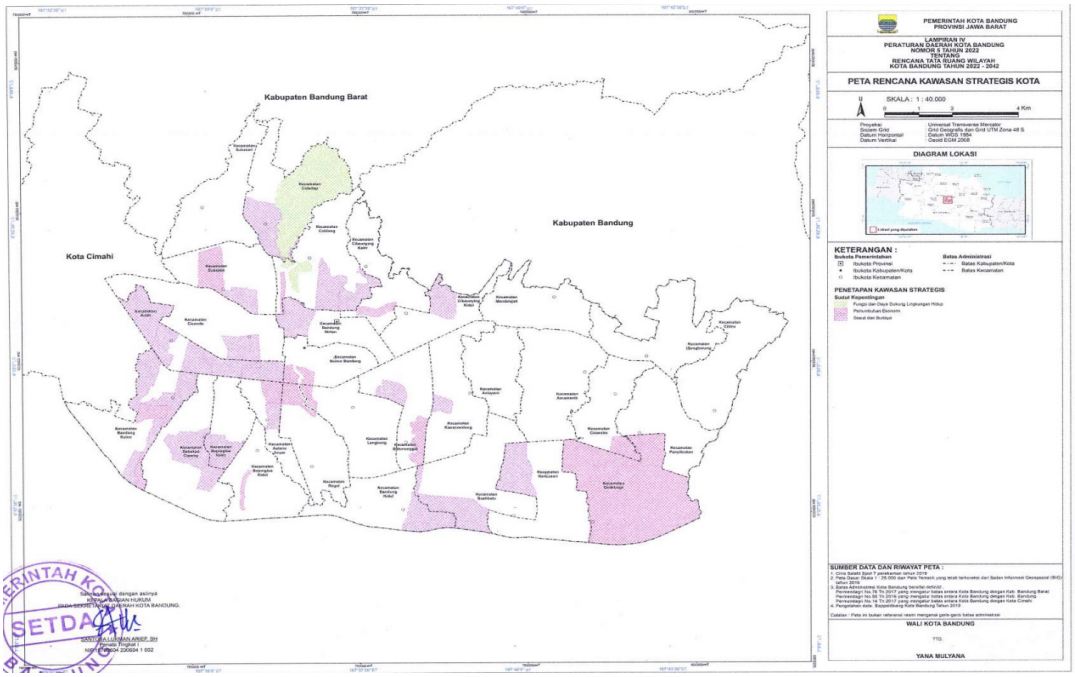
Sumber: *Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042*

Gambar 2.66. Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



Sumber: *Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042*

Gambar 2.67. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Bandung



Sumber: *Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042*

2.3.2.6. Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bandung diawali dengan identifikasi isu PB berdasarkan beberapa sumber diantaranya:

a. Isu berdasarkan capaian TPB yang ditentukan oleh TPB dengan gap capaian dan persentase ketersediaan data tertinggi;
b. Isu berdasarkan kondisi muatan lingkungan hidup Kota Bandung;
c. Isu berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandung;
d. Isu berdasarkan dokumen perencanaan Kota Bandung lainnya;
e. Isu strategis Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
f. Isu strategis nasional berdasarkan dokumen KLHS RPJPN, serta
g. Masukan pada agenda FGD 1

Dari ketujuh sumber tersebut didapatkan isu longlist yang kemudian disintesis menjadi 8 isu PB Strategis di Kota Bandung, yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali
2. Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.
3. Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir.

4. Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.
5. Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata
6. Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
7. Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.
8. Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Delapan isu PB strategis kemudian dilihat keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen Rankhir RPJPD Kota Bandung 2025-2045, Rantek RPJMD Kota Bandung 2025-2029, TPB, dan antar isu strategis. Selain itu diketahui juga antar isu strategis KLHS RPJMD Kota Bandung 2025-2029 memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa suatu isu dapat saling memengaruhi satu sama lain.

2.3.2.7. Telaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

1. Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah strategis di Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Bandung Raya. Sebagai wilayah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks, RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus melanjutkan pencapaian periode sebelumnya. Dokumen ini menjadi pedoman penting bagi arah kebijakan lima tahunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta daya saing daerah.

Visi: *"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas."*

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, agamis, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan kualitas lingkungan hidup.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
5. Meningkatkan ketertiban umum, kenyamanan, dan perlindungan masyarakat.

Sinkronisasi antarlevel pemerintahan menjadi perhatian penting. Program daerah diselaraskan dengan RPJMD Jawa Barat 2025–2029 sehingga akses pada dukungan provinsi dan pusat dapat maksimal.

Indikator kinerja makro—kemiskinan, IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi—menjadi ukuran utama capaian RPJMD. Dengan kerangka ini, Kabupaten Bandung menegaskan diri sebagai daerah yang progresif dan berkelanjutan.

Telaahan RPJMD ini menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Bandung yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

2. Kota Cimahi

Kota Cimahi sebagai kota kecil dengan luas wilayah terbatas namun padat penduduk memiliki peran penting dalam konstelasi Bandung Raya. Sebagai kota jasa dan pusat pendidikan vokasi, Cimahi menghadapi tantangan keterbatasan ruang serta kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif. RPJMD 2025–2029 disusun untuk memperkuat identitas Cimahi sebagai kota yang maju, agamis, serta berdaya saing dalam ekonomi kreatif.

Visi: *"CIMAHI MANTAP: Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif."*

Misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, sehat, cerdas, dan kompetitif.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM, ekonomi kreatif, dan teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang teladan, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan rasa aman, kebersihan, dan ketertiban kota.

RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan orientasi utama pada penguatan kualitas kota yang berdaya saing sekaligus nyaman dihuni. Visi yang diangkat adalah "CIMAHI MANTAP" yang merupakan akronim dari Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif. Visi ini menyatukan semangat pembangunan perkotaan yang humanis, religius, dan berdaya saing dalam kerangka metropolitan Bandung Raya.

Pada sektor sosial, RPJMD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya menurunkan angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan menjadi bagian dari agenda prioritas. Penekanan juga diberikan pada penguatan nilai-nilai religius dan keteladanan sosial, sesuai dengan semangat "Agamis" dan "Teladan" dalam visi pembangunan.

Dari sisi ekonomi, Cimahi diarahkan untuk memperkuat basis UMKM, industri kreatif, dan sektor jasa modern. Kota ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar di bidang pendidikan vokasi dan pusat pelatihan militer, yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan dalam bidang teknologi terapan dan pengembangan SDM produktif. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi ditujukan agar Cimahi tidak sekadar menjadi kota penyangga, tetapi juga pusat inovasi.

Infrastruktur perkotaan mendapat perhatian khusus, terutama terkait dengan persoalan kemacetan, transportasi publik, dan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya ruang kota yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan melalui penataan koridor jalan utama, pembangunan ruang terbuka hijau, serta sistem persampahan yang lebih modern dan terintegrasi.

Aspek keamanan dan kenyamanan juga menjadi bagian integral RPJMD. Visi "Aman" dan "Nyaman" diterjemahkan ke dalam program penguatan keamanan lingkungan, penanggulangan bencana perkotaan, serta mitigasi risiko banjir yang sering mengancam kawasan permukiman. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang menuntut jaminan rasa aman dan kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, RPJMD Cimahi menekankan pentingnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen utama untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Sinkronisasi dengan agenda pembangunan Jawa Barat dan nasional juga menjadi perhatian utama. Cimahi sebagai bagian dari kawasan Bandung Raya diarahkan agar terhubung dengan rencana besar provinsi dalam bidang transportasi massal, lingkungan hidup, dan penguatan kawasan metropolitan. Dengan demikian, RPJMD Cimahi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan regional.

Secara keseluruhan, RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 menampilkan pendekatan pembangunan perkotaan yang komprehensif, berimbang antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Telaahan ini menunjukkan bahwa Cimahi berusaha memperkuat identitasnya sebagai kota produktif dan nyaman dalam bingkai metropolitan, sekaligus tetap menekankan nilai agamis dan keteladanan sosial.

3. Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang menempati posisi strategis sebagai simpul baru pertumbuhan di Jawa Barat, terutama setelah beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati di wilayah terdekat. RPJMD Sumedang 2025–2029 dirancang untuk memanfaatkan momentum konektivitas tersebut, sehingga Sumedang dapat berkembang menjadi pusat ekonomi, pendidikan, sekaligus digital governance yang unggul.

Visi: *"Sumedang Mandala: Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan."*

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat religius dan taat hukum.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan layanan dasar.
3. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
4. Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian modern, UMKM, dan industri.
5. Mewujudkan birokrasi akuntabel, inovatif, dan berbasis digital.

RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD 2025–2045 bertajuk "Sumedang Mandala". Visi pembangunan lima tahunan diarahkan agar Sumedang menjadi daerah yang maju, mandiri, adil, dan berkelanjutan, dengan menjadikan sumber daya manusia dan tata kelola digital sebagai penggerak utama.

Aspek sosial menitikberatkan pada penguatan layanan pendidikan dan kesehatan. Target penurunan stunting, peningkatan kualitas sekolah, serta pengembangan layanan kesehatan berbasis digital menjadi prioritas. Selain itu, penguatan nilai religius dan taat hukum tetap diposisikan sebagai landasan moral pembangunan daerah.

Dari sisi ekonomi, RPJMD menargetkan pengembangan kawasan industri dan pertanian modern. Sumedang yang berada di jalur strategis tol Cisumdawu diarahkan untuk memanfaatkan potensi konektivitas dengan Cirebon, Majalengka, dan Bandung. UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan talenta muda juga mendapat perhatian agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Infrastruktur menjadi bidang penting yang mendukung transformasi ekonomi. Pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta penyediaan sarana prasarana dasar diarahkan untuk membuka akses ke kawasan industri dan mendukung pertanian modern. Pembangunan ini dikombinasikan dengan prinsip ramah lingkungan agar daya dukung alam tetap terjaga.

Dalam hal tata kelola, RPJMD Sumedang menegaskan komitmen pada birokrasi yang bersih, akuntabel, dan digital. Layanan publik berbasis aplikasi menjadi ciri khas yang membedakan Sumedang dari daerah lain, serta diharapkan menjadi model pemerintahan daerah yang modern dan efisien.

Sinkronisasi dengan RPJMD Jawa Barat dan RPJMN 2025–2029 dilakukan agar arah pembangunan Sumedang berkontribusi pada tujuan pembangunan skala provinsi dan nasional. Posisi Sumedang yang strategis sebagai pintu gerbang ke kawasan metropolitan Bandung Raya membuatnya relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

RPJMD Sumedang juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan visi "Sumedang Mandala" yang berorientasi hingga tahun 2045.

Dengan demikian, telaahan terhadap RPJMD Sumedang menunjukkan bahwa daerah ini berupaya menjadi pionir transformasi digital dalam pemerintahan daerah, sekaligus menyiapkan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jawa Barat bagian timur.

4. Kabupaten Subang

Kabupaten Subang memiliki potensi besar di bidang pertanian, pariwisata, serta industri maritim dengan hadirnya Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional. RPJMD Subang 2025–2029 diarahkan untuk menjadikan Subang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, dengan menyeimbangkan pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Visi: *"Terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju dan kompetitif, dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan, menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius."*

Misi:

1. Mewujudkan SDM unggul, sehat, cerdas, religius, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan kewilayahan.
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.

Sektor sosial ditempatkan sebagai prioritas melalui penguatan SDM unggul dan religius. Program pendidikan, kesehatan, dan pembinaan karakter masyarakat menjadi pondasi untuk mewujudkan visi pembangunan. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan sektor industri dan jasa.

Dari sisi ekonomi, Subang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. RPJMD menargetkan optimalisasi potensi lokal tersebut melalui pengembangan rantai pasok, peningkatan produktivitas, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, UMKM dan ekonomi kreatif juga didorong untuk memperluas lapangan kerja.

Infrastruktur tetap menjadi isu sentral. Perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta penyediaan fasilitas dasar lainnya dipandang penting untuk membuka akses dan menurunkan biaya logistik. Infrastruktur yang baik juga akan mendukung daya saing Subang dalam menghadapi kompetisi regional maupun nasional.

Dalam bidang tata kelola, RPJMD Subang mengarahkan agar birokrasi bekerja dengan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi ditujukan agar pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Sinkronisasi dengan RPJMD Jawa Barat dan RPJMN juga dipertegas. Subang berada di jalur strategis kawasan utara Jawa Barat yang terhubung dengan Pelabuhan Patimban,

sehingga posisi ini harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi.

Selain itu, RPJMD menekankan aspek pemerataan pembangunan kewilayahan. Upaya ini diarahkan agar ketimpangan antara desa dan kota dapat ditekan, sehingga pembangunan Subang bersifat inklusif dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, telaahan terhadap RPJMD Subang menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat daya saing daerah melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan nilai religius.

5. Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan metropolitan Bandung Raya dikenal dengan potensi pariwisata, pertanian, serta keberadaan waduk Cirata dan Saguling. Namun, wilayah ini juga menghadapi persoalan infrastruktur, kemiskinan, dan kerentanan bencana. RPJMD Bandung Barat 2025–2029 hadir untuk memberikan jawaban atas tantangan tersebut dengan mengusung visi pembangunan yang berlandaskan nilai agamis, aspiratif, dan adaptif.

Visi: *"Bandung Barat AMANAH: Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis."*

Misi:

1. Mewujudkan SDM unggul, agamis, sehat, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi sektor unggulan.
3. Memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang aspiratif, adaptif, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Aspek sosial menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan.

Pada sektor ekonomi, RPJMD menargetkan pertumbuhan yang inklusif dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal seperti pariwisata alam, pertanian, dan ekonomi kreatif. Upaya ini diarahkan agar ekonomi Bandung Barat lebih produktif, terbuka terhadap investasi, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pembangunan jalan, sarana air bersih, dan jaringan transportasi yang terhubung dengan kawasan Bandung Raya. Pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada mobilitas, tetapi juga pada penguatan akses pendidikan, kesehatan, dan kawasan wisata.

Tata kelola pemerintahan ditata agar lebih adaptif dan aspiratif. Digitalisasi layanan publik, penguatan transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah ditekankan sebagai strategi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif.

Sinkronisasi RPJMD KBB dengan RPJMD Jawa Barat dan RPJMN juga ditekankan. Dengan posisi geografis yang strategis, Bandung Barat diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di kawasan Bandung Raya sekaligus mengakses dukungan program provinsi dan pusat.

RPJMD Bandung Barat juga menekankan pentingnya pembangunan yang harmonis dengan lingkungan. Konsep berkelanjutan diwujudkan dalam penataan kawasan lindung, mitigasi bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Secara keseluruhan, telaahan terhadap RPJMD Bandung Barat memperlihatkan komitmen daerah untuk menghadirkan pembangunan yang agamis, inklusif, dan berkelanjutan. Visi AMANAH bukan hanya slogan, melainkan prinsip yang mengikat arah kebijakan pembangunan agar lebih responsif, aspiratif, dan adaptif terhadap tantangan global maupun kebutuhan lokal.

2.3.2.8. Isu Strategis RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal daerah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahan kota, KLHS RPJMD, dan lingkungan dinamis baik global, nasional, regional dan kota, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi

Kota Bandung saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, fenomena ini juga disertai dengan tantangan berupa peningkatan kepadatan dan kebutuhan permukiman yang semakin tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami urbanisasi pesat.

Implikasi Kebijakan:

a. Pengelolaan Perkotaan dan Permukiman
   1) Pengembangan hunian vertikal yang lebih terjangkau dan berbasis komunitas untuk mengurangi tekanan urbanisasi.
   2) Pemanfaatan teknologi *smart city* untuk mengelola kepadatan dan distribusi penduduk di kota.

b. Investasi pada SDM dan Kesehatan

1) Peningkatan layanan kesehatan berbasis preventif dan sistem jaminan sosial yang adaptif.

2) Program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja usia menengah untuk tetap produktif di era digital.

c. Kebijakan Inklusi Lansia dan Pengelolaan Tenaga Kerja

1) Penguatan kebijakan *active aging* agar lansia tetap berkontribusi dalam ekonomi dan sosial.

2) Mendorong kebijakan tenaga kerja fleksibel bagi pekerja senior untuk mempertahankan keseimbangan produktivitas.

d. Peningkatan Produktivitas Generasi Muda

1) Memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pendidikan berbasis industri.

2) Insentif bagi sektor yang menciptakan lapangan kerja berbasis inovasi dan teknologi agar tetap kompetitif dalam jangka panjang.

Kota Bandung perlu mengelola bonus demografi dengan optimal sebelum memasuki fase penuaan populasi yang tidak terhindarkan. Strategi utama adalah mengurangi tekanan permukiman, memastikan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi lansia, serta menjaga keseimbangan tenaga kerja melalui pendidikan dan *reskilling*. Jika transisi ini dikelola dengan baik, Bandung dapat tetap menjadi kota yang kompetitif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan demografi di masa depan.

2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi

Kota Bandung saat ini menjadi pusat ekonomi digital dan industri kreatif, didorong oleh ekosistem *startup*, industri *fashion*, kuliner, serta inovasi berbasis teknologi. Tren ini semakin mengukuhkan Bandung sebagai kota yang berorientasi pada ekonomi inovatif, di mana bisnis berbasis digital dan platform online semakin mendominasi berbagai sektor ekonomi.

Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, muncul ketimpangan ekonomi yang signifikan. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap ekosistem digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan pekerja informal yang masih bergantung pada sistem ekonomi konvensional. Jika tidak diantisipasi, pertumbuhan ekonomi yang pesat ini bisa memperlebar jurang ekonomi antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tertinggal dalam ekonomi tradisional.

Implikasi Kebijakan:

a. Pemerataan Akses Digital untuk UMKM dan Pekerja Informal
   1) Program literasi digital berbasis komunitas untuk memastikan UMKM dan pekerja informal dapat memanfaatkan ekonomi digital.
   2) Insentif bagi pelaku usaha kecil yang bertransformasi ke platform digital.

b. Peningkatan Inovasi Berbasis Teknologi
   1) Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah untuk riset dan pengembangan AI serta teknologi tinggi.
   2) Fasilitasi bagi *startup* teknologi agar bisa bersaing di pasar global.

c. Transformasi Tenaga Kerja & Pendidikan
   1) Program *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja agar lebih siap menghadapi era ekonomi AI dan otomatisasi.
   2) Integrasi kurikulum berbasis industri digital di tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

d. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Berbasis AI dan *Smart Industry*
   1) Membangun kawasan ekonomi berbasis inovasi dan AI sebagai pusat pertumbuhan industri baru.
   2) Kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung investasi di sektor teknologi tinggi dan inovasi.

Bandung memiliki potensi besar sebagai kota berbasis ekonomi digital dan inovasi teknologi, tetapi harus memastikan bahwa transformasi ini tidak memperlebar ketimpangan ekonomi. Strategi utama adalah mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang sesuai, memastikan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan membangun infrastruktur yang mendukung inovasi berbasis AI serta teknologi tinggi. Jika transisi ini dikelola dengan baik, Bandung bisa menjadi hub ekonomi digital nasional dengan daya saing global dalam 15 tahun ke depan.

3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Kawasan Berorientasi Transit

Saat ini, Bandung sedang mengalami perkembangan sistem transportasi publik, dengan berbagai inisiatif seperti pengembangan MRT/LRT, Bus Rapid Transit (BRT), dan integrasi angkutan umum. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang semakin memburuk, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam perubahan perilaku masyarakat. Kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama, didorong oleh minimnya integrasi layanan transportasi publik, aksesibilitas yang belum merata, serta kebiasaan warga yang masih mengutamakan kenyamanan kendaraan pribadi.

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), sistem transportasi publik mulai berkembang lebih baik dengan operasional MRT/LRT dan ekspansi jalur BRT. Namun, kemacetan masih belum sepenuhnya terselesaikan, terutama jika tidak ada kebijakan tegas yang membatasi pertumbuhan kendaraan pribadi. Integrasi layanan transportasi dan peningkatan fasilitas bagi pejalan kaki serta pesepeda menjadi faktor kunci dalam mengubah perilaku mobilitas warga.

Implikasi Kebijakan:

a. Transformasi Infrastruktur Transportasi Publik
    1) Mempercepat pembangunan MRT/LRT dan ekspansi jalur BRT untuk menjangkau lebih banyak area.
    2) Meningkatkan integrasi sistem pembayaran dan rute transportasi publik agar lebih efisien dan mudah diakses.
b. Perubahan Perilaku Masyarakat terhadap Transportasi Publik
    1) Kampanye dan insentif bagi warga yang menggunakan transportasi publik secara rutin.
    2) Pengurangan subsidi bahan bakar untuk kendaraan pribadi dan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan di pusat kota (*congestion pricing*).
c. Penguatan Konsep Transit-Oriented Development (TOD)
    1) Pengembangan pusat permukiman dan komersial di sekitar stasiun MRT/LRT untuk mendorong penggunaan transportasi publik.
    2) Pengaturan ulang tata ruang kota agar lebih mendukung mobilitas berbasis transportasi umum dan pejalan kaki.
d. Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan & Pejalan Kaki
    1) Revitalisasi trotoar dan jalur sepeda agar lebih nyaman dan aman.
    2) Insentif bagi penggunaan kendaraan listrik dan transportasi hijau.

Transformasi transportasi Bandung menuju kota berbasis transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan bergantung pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta perubahan perilaku warga. Dalam 5–10 tahun ke depan, MRT/LRT dan sistem BRT akan mulai mengubah pola mobilitas masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan besar dari dominasi kendaraan pribadi. Dalam 15 tahun ke depan, sistem *Transit-Oriented Development* (TOD) harus menjadi strategi utama agar transportasi publik benar-benar menjadi pilihan utama dan kemacetan bisa dikendalikan. Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, Bandung bisa menjadi kota dengan transportasi yang lebih terintegrasi, ramah lingkungan, dan efisien dalam jangka panjang.

4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan

Kota Bandung saat ini mulai mengimplementasikan berbagai kebijakan hijau, seperti peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta program revitalisasi sungai seperti Citarum Harum. Namun, dampaknya masih relatif kecil karena pertumbuhan kota yang cepat, konversi lahan hijau yang terus terjadi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), implementasi kebijakan hijau akan semakin terasa, tetapi belum cukup untuk secara signifikan mengurangi dampak polusi udara dan lingkungan. Meskipun program penghijauan dan pengelolaan sampah semakin diperkuat, pertumbuhan kendaraan bermotor, emisi industri, serta urbanisasi yang terus meningkat tetap menjadi tantangan utama. Kualitas udara tetap menjadi perhatian serius, terutama jika transisi ke energi hijau dan transportasi ramah lingkungan tidak segera dipercepat.

Implikasi Kebijakan:

a. Meningkatkan Ruang Hijau dan Konservasi Alam
   1) Memastikan minimal 30% wilayah kota menjadi ruang hijau untuk mengurangi efek pemanasan kota.
   2) Mendorong pengembangan kebun kota dan ekosistem hijau berbasis komunitas di setiap kecamatan.
   3) Menjalankan program adopsi pohon dan penghijauan kota berbasis warga agar masyarakat terlibat aktif.

b. Pengendalian Polusi Udara & Percepatan Transportasi Berkelanjutan
   1) Regulasi ketat terhadap emisi kendaraan dan industri melalui kebijakan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil.
   2) Insentif bagi kendaraan listrik dan pengurangan kendaraan berbahan bakar bensin secara bertahap.
   3) Memperbanyak transportasi publik berbasis energi hijau (MRT/LRT listrik, bus listrik, sepeda kota, dll.).

c. Pengelolaan Sampah & Energi Berbasis Sirkular
   1) Penguatan ekonomi sirkular dengan sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan komunitas.
   2) Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam fasilitas umum dan industri.
   3) Mengembangkan teknologi waste-to-energy untuk mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi alternatif.

d. Mitigasi Perubahan Iklim & Kesiapan Kota terhadap Bencana Lingkungan

1) Mengintegrasikan sistem drainase cerdas dan konservasi air perkotaan untuk mengurangi risiko banjir.

2) Mengembangkan kebijakan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, termasuk adaptasi suhu ekstrem.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kualitas lingkungan melalui program sensor udara berbasis komunitas.

Masa depan lingkungan Kota Bandung sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan hijau dan efektivitas mitigasi polusi. Dalam 5–10 tahun ke depan, kota ini akan menjadi lebih hijau, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam kualitas udara dan dampak perubahan iklim. Dalam 15 tahun ke depan, Bandung bisa menjadi kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, atau sebaliknya, mengalami degradasi lingkungan yang mengancam kualitas hidup warganya jika tidak ada kebijakan yang tegas. Oleh karena itu, investasi pada ekosistem hijau, transportasi berkelanjutan, serta edukasi masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga Bandung tetap layak huni dan berdaya saing dalam jangka panjang.

5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia

Saat ini, Bandung mengalami digitalisasi yang pesat dalam sektor pendidikan dan kesehatan, dengan semakin banyaknya platform pembelajaran daring, layanan kesehatan berbasis teknologi, serta integrasi sistem digital dalam administrasi pendidikan dan rumah sakit. Inovasi ini telah meningkatkan aksesibilitas layanan bagi sebagian masyarakat, tetapi ketimpangan masih menjadi tantangan utama. Masyarakat dengan akses internet dan perangkat digital yang baik bisa mendapatkan manfaat maksimal, sementara kelompok ekonomi bawah, daerah pinggiran, dan kelompok rentan masih kesulitan mengakses layanan digital.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), inklusi pendidikan akan semakin meningkat, dengan lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mengadopsi sistem pembelajaran hybrid serta pemanfaatan teknologi AI dalam personalisasi pendidikan. Namun, biaya layanan kesehatan cenderung meningkat, terutama karena meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan modern, obat-obatan yang lebih mahal, serta meningkatnya jumlah pasien akibat perubahan pola hidup masyarakat urban.

Implikasi Kebijakan:

a. Memastikan Akses Pendidikan yang Merata dan Berorientasi Masa Depan

1) Memperluas akses internet dan infrastruktur digital untuk sekolah di daerah pinggiran dan kelompok ekonomi bawah.

2) Mengembangkan kurikulum berbasis industri digital dan keterampilan masa depan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif.

3) Memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau melalui beasiswa berbasis prestasi dan kebutuhan.

b. Meningkatkan Akses Kesehatan yang Terjangkau dan Berkelanjutan

1) Mendorong telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan primer agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

2) Mengembangkan model asuransi kesehatan berbasis komunitas dan koperasi kesehatan untuk mengurangi beban biaya kesehatan.

3) Mengintegrasikan kebijakan kesehatan preventif berbasis edukasi masyarakat untuk mengurangi penyakit akibat gaya hidup tidak sehat.

c. Menyiapkan Sistem Kesehatan untuk Populasi Lansia

1) Memperkuat sistem pelayanan kesehatan geriatrik di puskesmas dan rumah sakit.

2) Mendorong pembangunan fasilitas perawatan jangka panjang bagi lansia yang tidak memiliki keluarga pengasuh.

3) Meningkatkan kesadaran tentang aging population agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan demografi ini.

d. Mendorong Gaya Hidup Sehat dan Preventif

1) Mengintegrasikan program kesehatan di tempat kerja dan lingkungan pendidikan untuk mengedukasi pola hidup sehat sejak dini.

2) Membangun lebih banyak ruang publik yang mendukung aktivitas fisik, seperti taman olahraga, jalur sepeda, dan gym komunitas.

3) Menjalankan kampanye kesehatan mental agar warga lebih sadar akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan.

Pendidikan dan kesehatan di Bandung mengalami transformasi pesat menuju digitalisasi, tetapi tantangan ketimpangan ekonomi, biaya kesehatan yang meningkat, dan kesiapan menghadapi populasi lansia menjadi isu utama. Dalam 5–10 tahun ke depan, Bandung harus memastikan bahwa akses pendidikan dan kesehatan semakin inklusif, sehingga semua warga dapat memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi ini.

6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global

Bandung telah lama dikenal sebagai pusat industri kreatif di Indonesia, terutama dalam sektor fashion, kuliner, desain, musik, seni, dan digital kreatif. Ekosistem industri kreatif di kota ini berkembang pesat dengan adanya komunitas kreatif yang kuat, dukungan pemerintah daerah, serta kemudahan akses terhadap pasar digital global.

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), industri kreatif Bandung akan semakin berorientasi ekspor, dengan lebih banyak produk kreatif lokal yang menembus pasar internasional melalui *e-commerce*, marketplace global, dan program ekspor kreatif yang

difasilitasi oleh pemerintah dan swasta. Tren ini didorong oleh kolaborasi antara pelaku industri kreatif dengan teknologi digital, memungkinkan brand lokal untuk bersaing di tingkat global. Namun, tantangan utama di fase ini adalah ketimpangan akses modal dan pemasaran digital bagi pelaku usaha kreatif kecil, yang masih menghadapi kesulitan dalam ekspansi internasional.

Implikasi Kebijakan:

a. Mendorong Ekspansi Industri Kreatif ke Pasar Internasional
   1) Mengembangkan program ekspor kreatif berbasis digital, membantu pelaku industri kreatif lokal menembus pasar global.
   2) Menyediakan insentif bagi industri kreatif yang mampu menembus pasar ekspor, termasuk fasilitasi bea cukai dan proteksi HKI.
   3) Meningkatkan akses modal dan mentoring bagi UMKM kreatif agar mereka dapat bersaing di pasar global.

b. Membangun Infrastruktur dan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan
   1) Mengembangkan *Creative District* atau Zona Ekonomi Kreatif yang menjadi pusat kolaborasi bagi seniman, desainer, pengusaha kreatif, dan *startup* digital.
   2) Memastikan investasi dalam pendidikan kreatif, dengan membangun lebih banyak pusat pelatihan, inkubator bisnis kreatif, dan program akselerasi *startup* kreatif.
   3) Menyediakan ruang-ruang publik untuk kreator, seperti studio seni, makerspace, serta ruang pameran dan pertunjukan gratis atau terjangkau.

c. Memastikan Regulasi dan Perlindungan bagi Pelaku Industri Kreatif
   1) Mengembangkan kebijakan perlindungan HKI yang lebih ketat, memastikan bahwa karya kreatif Bandung tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain.
   2) Meningkatkan regulasi yang mendukung ekonomi kreatif berbasis *gig economy*, memberikan perlindungan bagi pekerja lepas kreatif dan memastikan keberlanjutan karir mereka.
   3) Membangun sistem digitalisasi pencatatan HKI berbasis blockchain, sehingga karya kreatif bisa lebih aman dalam perdagangan internasional.

d. Menjadikan Bandung sebagai Kota Kreatif Kelas Dunia
   1) Mengembangkan festival dan event kreatif internasional, menarik lebih banyak perhatian dunia terhadap industri kreatif Bandung.
   2) Mempromosikan Bandung sebagai hub *startup* kreatif dan teknologi, menarik lebih banyak talenta global untuk bekerja dan berinovasi di kota ini.
   3) Memastikan konektivitas global yang lebih baik, termasuk peningkatan infrastruktur digital dan transportasi, sehingga Bandung lebih mudah diakses oleh pelaku industri kreatif global.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Bandung akan semakin berorientasi ekspor dalam industri kreatif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses modal dan pemasaran global. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, Bandung dapat menjadi kota yang tidak hanya menciptakan inovasi kreatif, tetapi juga menarik perhatian dunia sebagai pusat industri kreatif yang kompetitif secara global.

7. Integrasi Smart City dan Dominasi *Artificial Intelligence* & *Internet of Things*

Kota Bandung saat ini mengalami perkembangan pesat dalam teknologi dan inovasi, didorong oleh semakin banyaknya *startup* digital, adopsi teknologi di berbagai sektor, serta meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya digitalisasi. Ekosistem teknologi berbasis komunitas dan universitas semakin berkembang, dengan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan solusi berbasis data dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence - AI*).

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), integrasi teknologi dalam layanan publik akan semakin kuat, dengan lebih banyak aspek pemerintahan yang terdigitalisasi melalui konsep *Smart City*. Sistem manajemen lalu lintas berbasis AI, layanan kesehatan digital, serta administrasi publik yang semakin otomatis akan menjadi ciri utama perkembangan teknologi di kota ini. Namun, tantangan utama adalah pemerataan akses digital, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki literasi digital atau akses perangkat yang memadai.

Implikasi Kebijakan:

a. Memastikan Akses dan Literasi Digital bagi Semua Masyarakat
   1) Memperluas akses internet gratis di ruang publik dan daerah pinggiran.
   2) Program literasi digital untuk UMKM, lansia, dan masyarakat rentan agar tidak tertinggal dalam era digital.
   3) Insentif bagi perusahaan teknologi yang menyediakan program pelatihan bagi pekerja di sektor tradisional.

b. Mendorong Ekosistem *Smart City* yang Berorientasi pada Layanan Warga
   1) Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis AI dan blockchain untuk transparansi administrasi.
   2) Meningkatkan integrasi layanan publik berbasis aplikasi, seperti pajak, perizinan, kesehatan, dan pendidikan.
   3) Memastikan keamanan data dan privasi warga dengan regulasi yang kuat dan infrastruktur keamanan siber yang memadai.

c. Meningkatkan Adopsi AI dan IoT dalam Pengelolaan Kota
   1) Implementasi sistem manajemen lalu lintas berbasis AI untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.

2) Pemanfaatan IoT dalam pengelolaan energi dan lingkungan, seperti smart grid untuk efisiensi listrik dan sistem deteksi kualitas udara otomatis.

3) Pengembangan transportasi otonom dan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi mobilitas.

d. Menjaga Keseimbangan antara Teknologi dan Kesejahteraan Sosial

1) Mengantisipasi disrupsi pekerjaan akibat otomatisasi dengan program reskilling dan upskilling bagi pekerja terdampak.

2) Membangun model ekonomi baru yang berbasis inovasi sosial dan ekonomi digital inklusif.

3) Menerapkan kebijakan digital ethics dan responsible AI agar teknologi tetap digunakan untuk kesejahteraan warga, bukan hanya efisiensi bisnis atau keuntungan segelintir pihak.

Bandung berada di jalur yang tepat untuk menjadi kota berbasis teknologi dan inovasi dalam 15 tahun ke depan, tetapi perlu memastikan bahwa transformasi digital ini inklusif, aman, dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 5–10 tahun ke depan, Bandung akan menjadi *Smart City* yang lebih terintegrasi, tetapi menghadapi tantangan dalam keamanan data dan pemerataan akses digital. Dalam 15 tahun ke depan, AI dan IoT akan mendominasi berbagai sektor, menjadikan Bandung sebagai kota cerdas dengan efisiensi tinggi, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat. Jika transisi ini dikelola dengan baik, Bandung bisa menjadi kota digital unggulan dengan daya saing global dalam jangka panjang.

Keamanan di Kota Bandung mengalami perubahan yang signifikan, dengan peningkatan infrastruktur keamanan fisik seperti CCTV berbasis AI, patroli keamanan berbasis data, serta kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan. Kota ini menjadi lebih aman dalam hal kejahatan konvensional, seperti pencurian dan tindak kriminal jalanan, berkat pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan. Namun, di sisi lain, ancaman siber semakin meningkat, seiring dengan semakin luasnya penggunaan layanan digital dalam kehidupan masyarakat.

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), keamanan digital akan menjadi tantangan besar. Masyarakat semakin bergantung pada layanan online, dari administrasi pemerintahan, transaksi keuangan, hingga data kesehatan dan pendidikan. Kejahatan siber seperti phishing, pencurian identitas, dan peretasan sistem pemerintahan atau bisnis diprediksi meningkat, terutama jika regulasi dan perlindungan data belum optimal. Fokus utama dalam periode ini adalah memperkuat kebijakan keamanan siber dan meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman digital.

Sistem *smart city* berbasis AI akan memiliki mekanisme deteksi dini terhadap ancaman siber, sementara masyarakat sudah terbiasa dengan sistem keamanan digital

seperti identitas digital terenkripsi, transaksi berbasis *blockchain*, serta manajemen data pribadi yang lebih aman. Tantangan utama di era ini adalah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan digital, memastikan bahwa teknologi keamanan tidak disalahgunakan untuk pengawasan berlebihan (*mass surveillance*).

Implikasi Kebijakan:

a. Meningkatkan Sistem Keamanan Siber di Kota Bandung
   1) Memastikan infrastruktur digital pemerintahan memiliki keamanan berlapis (*multi-layered cyber security*).
   2) Mengembangkan sistem enkripsi dan otentikasi biometrik dalam layanan publik untuk mencegah kebocoran data.
   3) Menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk memperkuat kapasitas keamanan siber.

b. Meningkatkan Literasi Digital & Kesadaran Keamanan Siber Masyarakat
   1) Menyelenggarakan kampanye edukasi keamanan siber, khususnya bagi UMKM, pelajar, dan pekerja informal yang lebih rentan terhadap serangan digital.
   2) Memasukkan kurikulum literasi digital dan keamanan siber dalam pendidikan formal dan pelatihan profesional.
   3) Menyediakan pusat bantuan keamanan siber bagi masyarakat untuk menangani kasus penipuan digital dan pencurian identitas.

c. Regulasi Perlindungan Data & Kebijakan Keamanan Siber yang Transparan
   1) Menerapkan hukum perlindungan data pribadi yang kuat, sehingga perusahaan dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan data masyarakat.
   2) Mengembangkan audit keamanan digital secara berkala untuk sistem layanan publik berbasis teknologi.
   3) Memastikan bahwa penggunaan AI dalam keamanan siber tetap menghormati hak privasi warga.

d. Mempersiapkan Infrastruktur Keamanan Siber Jangka Panjang
   1) Mengembangkan *Cyber Security Command Center* yang dapat mendeteksi serangan siber secara *real-time* dan memberikan respon cepat.
   2) Mengintegrasikan teknologi *blockchain* dalam transaksi digital dan sistem identitas warga untuk mengurangi risiko pemalsuan data.
   3) Mendorong ekosistem *startup* keamanan siber lokal agar Bandung menjadi pusat inovasi *cyber security* di Indonesia.

Dalam 5 tahun ke depan, Bandung akan semakin aman dari kejahatan fisik, tetapi rentan terhadap ancaman siber yang meningkat akibat digitalisasi yang cepat. Jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, Bandung dapat menjadi kota dengan sistem keamanan digital yang kuat, aman dari kejahatan siber, dan tetap menghormati hak digital warganya.

8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bandung telah mengembangkan sistem *e-government* yang semakin terintegrasi. Digitalisasi layanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan lainnya secara lebih efisien, sehingga mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan efektivitas layanan pemerintahan.

Dalam 5 tahun ke depan (2025–2029), sistem *e-government* akan semakin terintegrasi, dengan lebih banyak layanan publik yang dapat diakses secara digital. Pelayanan publik berbasis aplikasi, sistem perizinan *online*, serta adopsi tanda tangan digital akan mempercepat birokrasi dan mengurangi praktik korupsi di sektor administratif. Namun, tantangan dalam tahap ini adalah kesenjangan akses digital, di mana kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan *e-government*. Selain itu, keamanan data publik menjadi isu utama, mengingat semakin banyaknya informasi pribadi yang dikelola dalam sistem digital.

Implikasi Kebijakan:

a. Mempercepat Integrasi *e-Government* dan Digitalisasi Layanan Publik
    1) Mengembangkan platform layanan digital terintegrasi untuk administrasi kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, dan layanan sosial.
    2) Meningkatkan aksesibilitas layanan *e-government* bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan digital, dengan pusat layanan digital di setiap kecamatan.
    3) Memastikan bahwa setiap warga memiliki identitas digital yang aman, dengan sistem otentikasi berbasis biometrik.
b. Meningkatkan Transparansi dan Keterbukaan Data Publik
    1) Menerapkan kebijakan *open data governance*, di mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah secara *real-time*.
    2) Memanfaatkan *blockchain* dalam pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi.
    3) Mengembangkan sistem pemantauan kebijakan berbasis data, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan *feedback* langsung terhadap kebijakan pemerintah.

c. Mengembangkan Pemerintahan Berbasis AI dan *Data-Driven Policy*

1) Menerapkan sistem AI dalam pengelolaan pelayanan publik, seperti chatbot AI untuk administrasi kependudukan dan analisis *big data* untuk deteksi kebutuhan sosial.

2) Memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan diawasi oleh manusia, dengan regulasi yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

3) Mengembangkan sistem pengambilan keputusan berbasis data, yang memungkinkan pemerintah merancang kebijakan dengan analisis prediktif terhadap tren sosial dan ekonomi.

d. Meningkatkan Keamanan Data dan Perlindungan Privasi Warga

1) Memastikan bahwa sistem keamanan digital pemerintah memiliki standar yang tinggi, dengan enkripsi data dan sistem proteksi terhadap kebocoran informasi.

2) Mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi yang kuat, sehingga informasi warga tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga.

3) Melibatkan komunitas dan akademisi dalam audit teknologi pemerintahan, untuk memastikan bahwa sistem AI dan *e-government* tetap berfungsi secara transparan dan adil.

Bandung sedang mengalami percepatan digitalisasi pemerintahan, dengan sistem *e-Government* yang semakin terintegrasi dalam 5 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, pemerintahan berbasis data dan keterbukaan informasi akan menjadi norma, dengan kebijakan yang lebih transparan dan berbasis bukti. Dalam 15 tahun ke depan, AI akan menjadi bagian utama dari sistem pemerintahan, membantu dalam pengambilan keputusan dan efisiensi administrasi publik.

Jika transisi ini dilakukan dengan baik, Bandung bisa menjadi kota percontohan dalam pemerintahan berbasis teknologi dan keterbukaan data. Namun, tantangan utama yang harus diantisipasi adalah kesetaraan akses digital, keamanan data, dan pengawasan penggunaan AI agar tetap transparan dan akuntabel. Dengan strategi yang tepat, Bandung bisa menjadi kota pintar dengan sistem pemerintahan yang lebih efisien, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan

Kota Bandung telah lama menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia, terutama bagi wisatawan domestik dari Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Dengan kekayaan alam, industri kreatif, dan budaya lokal yang khas, Bandung memiliki daya tarik kuat untuk berkembang sebagai pusat wisata berkelanjutan. Namun, tantangan utama dalam beberapa tahun terakhir adalah pengelolaan jumlah wisatawan yang semakin meningkat, yang berdampak pada kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, dan ketimpangan manfaat ekonomi wisata.

Dalam 5 tahun ke depan, pariwisata Bandung diproyeksikan akan pulih sepenuhnya setelah pandemi global, dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun internasional. Destinasi wisata berbasis alam, industri kreatif, dan gastronomi lokal akan semakin berkembang, menarik lebih banyak wisatawan yang mencari pengalaman unik. Namun, tantangan utama adalah manajemen pengunjung, terutama di destinasi populer seperti Lembang, Dago, dan kawasan wisata belanja. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan wisatawan dapat memperburuk masalah kemacetan, pencemaran lingkungan, dan kapasitas daya tampung destinasi.

Implikasi Kebijakan:

a. Meningkatkan Manajemen Pengunjung untuk Wisata yang Lebih Terkontrol
   1) Mengembangkan sistem reservasi berbasis digital untuk destinasi wisata populer, guna membatasi jumlah wisatawan dalam satu waktu tertentu.
   2) Menerapkan kebijakan "car-free tourism zones" di beberapa area untuk mengurangi kemacetan dan polusi akibat lonjakan wisatawan.
   3) Mengembangkan pusat informasi wisata digital untuk mengarahkan wisatawan ke destinasi alternatif guna mengurangi beban pada tempat wisata utama.

b. Memastikan Pariwisata Berbasis Keberlanjutan dan Lingkungan
   1) Menerapkan standar hijau dalam industri pariwisata, termasuk kewajiban bagi hotel dan restoran untuk menggunakan energi terbarukan dan mengurangi limbah plastik.
   2) Meningkatkan insentif bagi destinasi yang menerapkan prinsip ecotourism dan pariwisata berbasis komunitas.
   3) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan air limbah di kawasan wisata untuk mencegah degradasi lingkungan.

c. Mengoptimalkan Pariwisata Budaya dan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Global
   1) Mempromosikan Bandung sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan industri kreatif, bukan hanya wisata belanja atau kuliner.
   2) Mengembangkan wisata sejarah dan heritage tour dengan revitalisasi bangunan bersejarah dan jalur wisata tematik.
   3) Meningkatkan kolaborasi antara pariwisata dan industri kreatif, misalnya melalui festival seni dan fashion yang menarik wisatawan internasional.

d. Mengintegrasikan Pariwisata dengan Ekonomi Sirkular dan Pemberdayaan Lokal
   1) Mendorong wisata berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyedia layanan wisata.
   2) Mengembangkan sistem pariwisata yang mendukung UMKM dan ekonomi kreatif, dengan konsep belanja langsung dari pengrajin atau produsen lokal.

3) Menerapkan kebijakan pajak wisata yang dialokasikan untuk konservasi budaya dan lingkungan, guna memastikan dampak ekonomi pariwisata tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Bandung akan mengalami pemulihan pariwisata dengan tantangan utama pada pengelolaan jumlah wisatawan. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, Bandung dapat menjadi model kota wisata berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada jumlah wisatawan, tetapi juga pada dampak sosial, budaya, dan ekologisnya.

10. Pemajuan Budaya

Kota Bandung memiliki kekayaan budaya lokal yang kuat, mulai dari seni pertunjukan tradisional, arsitektur khas Sunda, hingga kuliner dan filosofi kehidupan masyarakatnya. Dengan statusnya sebagai pusat inovasi dan industri kreatif di Indonesia, Bandung menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian budaya lokal sambil tetap beradaptasi dengan tren global.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), upaya pelestarian dan penguatan budaya lokal akan semakin intensif, dengan lebih banyak inisiatif yang mempromosikan budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Kota ini akan semakin banyak mengadakan festival budaya, revitalisasi situs bersejarah, serta program edukasi budaya di sekolah-sekolah. Namun, tantangan dalam tahap ini adalah menarik minat generasi muda terhadap budaya lokal, mengingat banyak dari mereka yang lebih terpapar pada tren budaya global melalui media digital.

Implikasi Kebijakan:

a. Memperkuat Program Pelestarian Budaya Lokal di Kehidupan Sehari-hari
   1) Meningkatkan edukasi budaya di sekolah dengan memasukkan kurikulum berbasis budaya Sunda.
   2) Membangun pusat kebudayaan dan museum interaktif yang menarik bagi generasi muda.
   3) Mendorong penggunaan bahasa Sunda dalam berbagai aspek kehidupan publik agar tidak punah di generasi mendatang.

b. Meningkatkan Integrasi Budaya Lokal dengan Industri Kreatif
   1) Memastikan bahwa desain produk, musik, kuliner, dan fesyen berbasis budaya lokal mendapatkan perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
   2) Mendorong festival dan event budaya berbasis ekonomi kreatif, sehingga budaya lokal tidak hanya lestari tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

3) Mengembangkan program inkubasi untuk pengusaha kreatif berbasis budaya, agar lebih banyak bisnis yang membawa elemen budaya lokal ke dalam pasar global.

c. Mempromosikan Budaya Bandung secara Global

1) Menginisiasi festival budaya internasional di Bandung untuk menarik perhatian global terhadap kekayaan budaya lokal.

2) Menjalin kerja sama budaya dengan kota-kota kreatif dunia, seperti Paris, Tokyo, atau Seoul, untuk memperkenalkan budaya Bandung di luar negeri.

3) Mempromosikan Bandung sebagai destinasi wisata budaya, dengan konsep yang lebih terintegrasi antara sejarah, seni, dan industri kreatif.

d. Menjaga Keaslian Budaya di Tengah Adaptasi Modern

1) Menyusun kebijakan perlindungan warisan budaya, termasuk regulasi tentang penggunaan elemen budaya dalam produk komersial.

2) Mengembangkan platform digital untuk dokumentasi dan distribusi budaya, agar generasi mendatang tetap memiliki akses ke warisan budaya yang autentik.

3) Mendorong kolaborasi antara seniman tradisional dan kreator digital untuk menciptakan karya berbasis budaya yang tetap relevan dengan tren global.

Dalam 5 tahun ke depan, Bandung akan semakin fokus dalam penguatan program budaya lokal, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menarik minat generasi muda. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, Bandung dapat menjadi pusat budaya kreatif yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mengadaptasikannya dengan cara yang relevan, menarik, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kaitan antara berbagai aspek yang ditelaah dalam perumusan isu strategis Kota Bandung tahun 2025-2029, dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 2.111. Perumusan Isu Strategis Kota Bandung Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)	
Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan *labor/talent pool*.	Kesenjangan Akses Layanan Dasar antar Wilayah dan Kelompok Masyarakat	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.	*Green* dan *blue economy*	1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi
Terdapat banyak perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.	Ketimpangan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).	Kualitas dan daya saing SDM	2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi
Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki bandara.	Belum berkembangnya Modernisasi Ekonomi yang Inklusif	Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir.	Perkembangan teknologi	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.	Kesenjangan pembangunan dan infrastrutktur dasar	3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Kawasan Berorientasi Transit

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)	
Kota Bandung dilayani oleh jaringan seluler 4G dan sistem interkoneksi kelistrikan yang besar	Pengelolaan urbanisasi dan penataan ruang yang sesuai daya dukung dan daya tampung	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan
Sebagai ibukota Proivnsi Jawa Barat memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas perkotaan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian fiskal daerah	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.	Keberlanjutan penataan ruang	5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia
Memiliki daya tarik dan potensi investasi yang sangat besar antara lain di bidang Perdagangan, Pariwisata dan MICE, Jaaa, Telekomunikasi dan Teknologi, Seni dan Budaya, Manufaktur, Makanan dan Minuman, dan Fesyen		Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.	Tata kelola keuangan global	Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).	Kualitas tata kelola pemerintahan	6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)	
Merupakan kota dengan perpaduan yang harmonis antara modernitas dan tradisi		Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.	Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*	Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.		7. Integrasi *Smart City* dan Dominasi *Artificial Intelligence* & *Internet of Things*
		Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong kantong kemiskinan tinggi.		8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Perubahan iklim			9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan
			Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*			10. Pemajuan Budaya

Sumber: *hasil analisis, 2025*



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini merupakan bagian krusial dalam dokumen RPJMD yang menjabarkan arah pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2025–2029. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual dan operasional terhadap upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan partisipatif.

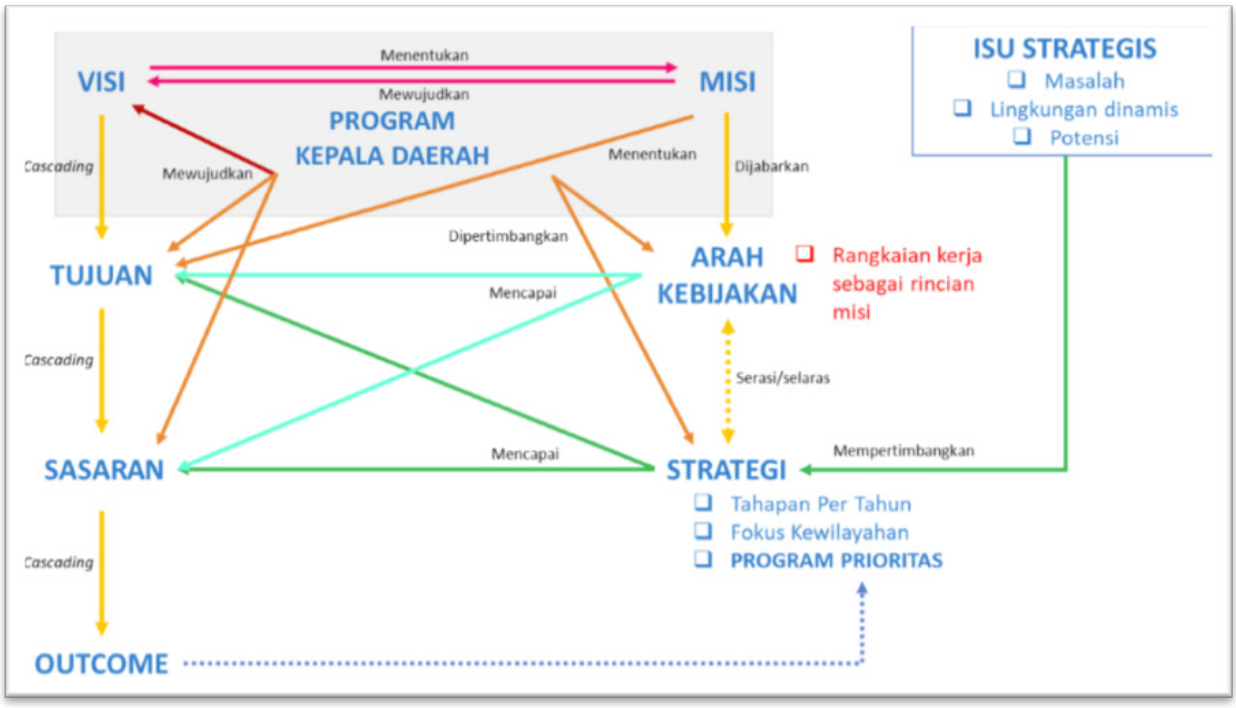
Visi dan misi yang ditetapkan merupakan hasil dari proses perencanaan yang memperhatikan dinamika pembangunan lokal, nasional, dan global. Dalam konteks global, perlu ditegaskan bahwa krisis iklim, transisi energi, dan tantangan ketahanan sosial-ekologis menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung ke depan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus menjawab kebutuhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penguatan ketahanan kota (*urban resilience*), serta transisi menuju kota hijau dan rendah karbon.

Selain itu, proses perumusan dalam bab ini juga mengakomodasi aspirasi masyarakat, masukan dari para pemangku kepentingan, serta penajaman isu-isu strategis yang berkembang. Dengan demikian, Bab 3 ini menjadi titik pijak sekaligus arah kompas bagi seluruh perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat menengah, RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029 harus selaras dengan RPJPD Kota Bandung Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Oleh karena itu, rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam bab ini dirancang secara teknokratik, sistematis, dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk memperjelas logika perencanaan, penting pula ditegaskan adanya keterhubungan hierarkis antara setiap elemen utama dalam dokumen ini, yaitu:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Gambar tersebut memastikan bahwa setiap rumusan dalam dokumen RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait, saling menguatkan, dan bermuara pada pencapaian outcome pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi warga Kota Bandung.

3.2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, yang menjadi arah utama pembangunan jangka menengah. Visi ini memuat gambaran besar masa depan Kota Bandung sebagai kota yang menjawab tantangan zaman dan bersinergi dengan arah pembangunan nasional dan global.

Rumusan visi Kota Bandung Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memerhatikan visi RPJPD Kota Bandung Tahun 2025–2045. Visi RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 adalah “BANDUNG KOTA JASA YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN”. Lebih lanjut, visi Kota Bandung juga telah selaras dengan tujuan Penataan Ruang yang dimuat dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 yaitu “mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif yang bertaraf nasional”.

Dengan memperhatikan visi RPJPD dan tujuan penataan ruang, ditetapkan Visi Kota Bandung Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL"

Adapun penjabaran makna visi adalah sebagai berikut:

Unggul:	Kota dengan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing. Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna.
Terbuka:	Kota yang terbuka untuk menerima kritik, gagasan dan bersifat kolaboratif, partisipatif, dan transparan; menjamin akses informasi, ruang partisipasi, serta keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan sebagai ciri kota modern yang inklusif dalam pembangunan secara kolaboratif dengan entitas pemerintahan secara vertikal dan horizontal dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan.
Amanah:	Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, menjunjung tinggi etika pelayanan publik, menjamin perlindungan terhadap kelompok marginal, berorientasi melayani, amanah dalam pengelolaan aset, sumber daya alam dan pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem merit.
Maju:	Kota yang berinovasi dan adaptif terhadap perubahan global, berbasis teknologi, ilmu pengetahuan, dan tata kelola berbasis data. Pembangunan kota yang progresif dan terencana secara ilmiah dan akuntabel dalam hal-hal baru untuk melakukan lompatan pembangunan, baik melalui pemanfaatan digitalisasi maupun social engineering yang berfokus pada keadilan bagi masyarakat rentan. Perwujudan kebudayaan dan kesenian sebagai warisan nilai luhur dalam menghadapi era *borderless global community*, pengembangan Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata termaju di Indonesia yang mengutamakan pelestarian lingkungan hidup berbasis *public private partnership*.

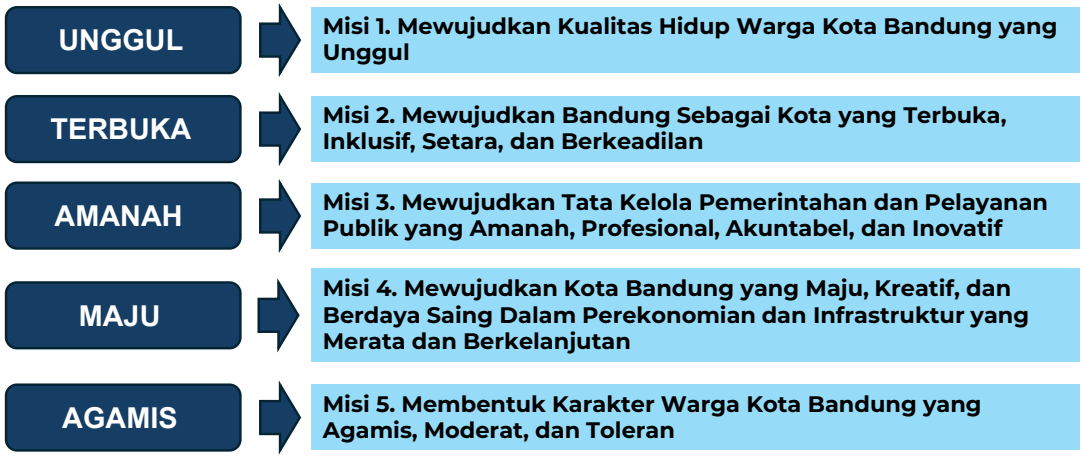
Agamis:	Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas, toleransi, harmoni sosial dalam praktik keagamaan yang moderat dan solutif. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual, serta penguatan karakter warga Bandung yang cageur, bageur, pinter jeung singer.
Berorientasi Melayani:	Pergeseran paradigma birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan menjadi birokrasi yang berorientasi melayani dengan *i*mplikasi berupa penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan, kebijakan berbasis *scientific certaincy*, penguatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan evaluasi, pengembangan kompetensi aparatur dalam *soft skills* seperti empati, komunikasi, dan problem solving, serta perubahan indikator kinerja dari *input & process-based* ke *outcome & impact-based*.
Berkelanjutan:	Pembangunan kota dilakukan dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Berkelanjutan adalah tentang hidup bernegara yang dijalani dengan prinsip keadilan lintas generasi, berpikir jauh ke depan, untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan resilien.
Mendukung Pembangunan Nasional:	Pembangunan selain dalam rangka mewujudkan visi kota, juga ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi. Sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan diharapkan dapat mengakselerasi seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Visi menegaskan tekad Kota Bandung untuk membangun dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola yang melayani dan responsif. Visi ini juga menjadi jawaban atas tantangan multidimensional, seperti urbanisasi yang cepat dan tidak merata; kualitas pelayanan publik yang belum merata; ketimpangan sosial dan spasial antar wilayah; persoalan tata lingkungan dan pengelolaan sampah; rendahnya partisipasi dan literasi digital masyarakat dalam proses pembangunan; dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan daerah pasca berbagai dinamika kelembagaan. Dengan rumusan tersebut, arah pembangunan Kota Bandung tidak hanya menyasar pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada transformasi sosial, penguatan nilai-nilai budaya, dan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.2.2.Misi

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Penjabaran operasional dari visi pembangunan yang menggambarkan langkah strategis pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Setiap misi dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis, dinamika lokal, serta arahan pembangunan nasional dan global.

Gambar 3.2 Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029



Sumber: *Hasil Analisa, 2025*

Misi pembangunan Kota Bandung Tahun 2025–2029 terdiri atas 5 (lima), yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul

Sebagai kota yang memiliki potensi sumber daya besar, Kota Bandung perlu mendorong masyarakat yang berkualitas sebagai penggerak pembangunan daerah. Kearifan lokal yang ditunjang tingkat toleransi yang tinggi dengan semangat kreativitas warga kota yang mampu menjadi sektor penguat pembangunan daerah sekaligus menjadi modal kemajuan sebuah negara. Pertumbuhan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya yang unggul, berdaya saing dan mampu menghasilkan karya-karya nyata dalam multi sektor. Dengan demikian arah pembangunan misi pertama adalah sebagai berikut:

1. Unggul dalam SDM dan daya saing

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui reformasi sistem pendidikan kota, integrasi kurikulum berbasis *future skills* (*digital literacy, critical thinking, green economy*), dan perluasan program beasiswa prestasi maupun afirmasi untuk kelompok marjinal. Inovasi pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan penguatan *ecosystem* of learning berbasis komunitas (*community learning center*) juga menjadi strategi utama.

2. Unggul dalam Pembangunan Manusia.

   Kunci utama peningkatan pembangunan manusia ada pada tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan intervensi lintas sektor untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Ini mencakup perluasan PAUD berbasis komunitas, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah, intervensi nutrisi anak terintegrasi dengan Posyandu digital, serta jaminan sosial minimum berbasis data warga terverifikasi.

3. Unggul dalam mewujudkan kepastian jaminan kesehatan, serta memastikan pemenuhan nutrisi bergizi untuk anak-anak dan golongan rentan.

   Fokus diarahkan pada reformasi sistem pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu berbasis digital, serta peluncuran Peta Digital Risiko Kurang Gizi yang terhubung dengan intervensi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, dan pangan).

Misi 2: Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai daerah urban dan metropolitan dengan konsep inklusivisme, yang merupakan salah satu sektor pendorong dalam kemajuan suatu daerah, dengan mengupayakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi penting karena persoalan keterbukaan sebuah kota merupakan gambaran besar kemajuan daerah dan bangsa yang saling berkolaborasi. Dengan demikian arah pembangunan misi kedua adalah sebagai berikut:

1. Kota yang membuka diri bagi semua kalangan baik suku, agama dan golongan, sebagai ciri kota modern yang inklusif

   Inklusivitas harus menjadi napas dari setiap kebijakan pembangunan Kota Bandung. Pemerintah kota perlu merumuskan dan menerapkan Kebijakan Kota Inklusif (*Inclusive City Policy*) yang melindungi dan memberi ruang ekspresi serta partisipasi aktif kepada seluruh kelompok warga tanpa diskriminasi termasuk penyandang disabilitas, perempuan, lansia, anak-anak, kelompok minoritas agama dan etnis, serta masyarakat adat. Inovasi seperti forum warga tematik, desain kota universal (*universal design*), dan anggaran responsif inklusi perlu menjadi bagian dari praktik perencanaan kota sehari-hari.

2. Kota yang membuka diri untuk pembangunan

   Pemerataan pembangunan perlu didasarkan pada data spasial berbasis ketimpangan sosial-ekonomi antar kecamatan. Pemerintah harus menyusun peta ketimpangan pembangunan untuk memandu intervensi prioritas di wilayah tertinggal (misal: Bandung Timur atau kawasan padat-kumuh). Arah ini juga menuntut penerapan

pendekatan perencanaan berbasis keadilan spasial dan sosial (social-spatial justice), serta pelibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan pengawasan proyek.

3. Kota yang terbuka untuk menerima kritik, gagasan, serta bersifat partisipatif dan kolaboratif dengan warganya.

   Arah ini menuntut penguatan ruang partisipasi warga yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi substansial. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital partisipatif seperti Bandung Ngadengeun (misalnya, sistem pengaduan, polling kebijakan, open proposal warga) dan mengaktifkan Dewan Warga Tematik di tingkat RW/Kelurahan. Perlu pula diberi ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan kampus untuk terlibat dalam co-design kebijakan dan evaluasi layanan publik.

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif

Pengelolaan pemerintah daerah harus ditunjang oleh integritas dan profesionalitas masing-masing aparatur sipil negara di Kota Bandung. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menghadirkan proses pembangunan yang sinergis dan integratif. Prioritas pembangunan birokrasi menjadi prioritas agar negara hadir. Kolaborasi multi sektor dari pemerintah, akademisi, dan swasta harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Bandung ke depan. Dengan demikian arah pembangunan misi ketiga adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang berorientasi melayani

   Pemerintahan berorientasi pelayanan memerlukan transformasi struktural dan kultural di tubuh birokrasi Kota Bandung. Reformasi birokrasi tidak cukup dengan pemangkasan prosedur, tetapi harus menyasar pada budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Langkah strategisnya mencakup pengembangan sistem digital government berbasis *service journey*, pembentukan unit pelayanan berbasis warga (*citizen-centered unit*), serta penguatan kompetensi ASN melalui *adaptive leadership training*.

2. Amanah dalam pengelolaan aset, sumber daya alam dan pengelolaan anggaran baik anggaran dari pusat maupun daerah

   Integritas dalam pengelolaan keuangan dan aset publik harus diwujudkan melalui transparansi berbasis sistem digital dan pelibatan publik. Selain itu pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.

3. Anti Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) serta anti suap

   Komitmen anti korupsi harus dilaksanakan bukan hanya dalam bentuk pengawasan dan sanksi, tetapi juga melalui perbaikan sistem.

4. Penguatan *merit system*

   Merit system yang sejati tak hanya berbasis kompetensi dan kinerja, tapi juga menghapus diskriminasi, memperluas akses, dan menghargai keberagaman. Pemerintah Kota Bandung perlu mengembangkan sistem karier ASN berbasis data analytics dan rekam jejak proyek nyata. Selain itu, sistem penghargaan ASN berbasis inovasi pelayanan dan keberpihakan sosial dapat memotivasi ASN untuk bekerja dengan orientasi kebermanfaatan publik.

5. Amanah dalam Pelayanan Publik

   Reformasi birokrasi berbasis digital perlu dikawal secara sistemik melalui pendekatan *smart governance*. Pelayanan publik harus bertransformasi dari sekadar administratif menjadi proaktif, inklusif, dan personalisasi. Penguatan sistem kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan, integrasi layanan melalui *one citizen* ID, serta pemanfaatan AI-*based citizen service* assistant dapat diterapkan untuk mendekatkan pelayanan publik ke warga. Selain itu, mendorong *co-creation* layanan publik antara OPD dan warga dapat mempercepat inovasi layanan yang responsif dan relevan.

Misi 4: Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Aksesibilitas dan mobilitas manusia dari sektor jasa dan produksi sangat ditentukan oleh infrastruktur yang baik. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit ekonomi dan pembangunan sehingga peningkatan sumber daya manusia yang produktif mampu meningkatkan daya saing global. Peningkatan mata rantai industri kecil-menengah hingga besar harus mampu meningkatkan daya dorong ekonomi dan memperluas lapangan kerja baru.

Peningkatan skala ekonomi bisnis skala kecil dan menengah harus mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui penerapan teknologi dan digitalisasi. Sektor investasi harus mampu memberikan daya agresif pembangunan Kota Bandung ke depan. Proses perizinan dan investasi dipermudah agar pembangunan bisa berjalan secara terencana dan dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian arah pembangunan misi keempat adalah sebagai berikut:

1. Inovasi dalam hal-hal baru untuk melakukan lompatan pembangunan, baik melalui Teknologi Informasi maupun *social engineering*

   Rekayasa sosial (*social engineering*) juga penting, seperti kampanye perubahan perilaku sadar sampah, budaya antri, hingga program “Warga Inisiator Lingkungan” sebagai katalisator keterlibatan warga.

2. Pengembangan Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata yang termaju di Indonesia.

   Investasi di sektor MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition), wellness tourism,* dan wisata edukasi berbasis sains juga menjadi pengungkit pertumbuhan baru.

3. Pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah berbasis Public-Private Partnership dan koordinasi pelestarian hulu dan aliran sungai.

   Pengelolaan sampah berbasis *public-private partnership* (PPP) dapat difokuskan pada pembangunan TPS regional berbasis teknologi RDF/PLTSa dan skema *extended producer responsibility*.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas.

   Menekankan pada pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi yang efektif dan efisien seperti pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung dan aksesibilitas ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sejalan dengan rencana struktur ruang yang mengutamakan konektivitas antar wilayah, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas.

5. Peningkatan Infrastruktur Publik

   Menekankan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur, ruang publik dan dan fasilitas umum, termasuk trotoar, taman tematik, dan Penerangan Jalan Umum (PJU), untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak yang diselaraskan dengan RTRW untuk optimalisasi pembangunan wilayah.

6. Maju dalam peningkatan kualitas ekonomi.

   Fokus diarahkan pada perluasan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM berbasis digitalisasi. Pemerintah perlu hadir sebagai enabler dalam membangun ekosistem kewirausahaan inklusif melalui inkubasi usaha komunitas, integrasi koperasi digital, dan perluasan platform pemasaran daring. Penguatan sektor informal melalui pendekatan *empowerment* berbasis data spasial juga akan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Misi 5: Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran

Pembangunan sumber daya manusia di Kota Bandung diarahkan tidak hanya untuk mencetak individu yang produktif dan kompeten, tetapi juga untuk memperkuat karakter spiritual dan moral sebagai modal dalam menghadapi persaingan global. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang plural dan demokratis, Kota Bandung berkomitmen untuk menumbuhkan kehidupan beragama yang harmonis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi dan toleransi.

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sistem pemerintahan yang dianut tetap demokratis, bukan teokratis. Nilai toleransi yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa, termasuk di Kota Bandung, merupakan aset penting dalam menjaga kohesi sosial dan keberagaman. Oleh karena itu, pembangunan di Kota Bandung difokuskan pada peningkatan kualitas hidup seluruh umat beragama, melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan semangat tersebut, arah pembangunan diarahkan untuk membentuk karakter warga Kota Bandung yang agamis, berpikiran terbuka, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian arah pembangunan misi kelima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudkan kesalehan sosial dengan nilai-nilai agama yang universal sebagai dasar berkehidupan

   Kesalehan tidak hanya diukur dari ritual individual, tetapi dari kontribusi warga dalam kehidupan sosial yang adil, toleran, dan beradab. Kota Bandung dapat memperkuat program-program penguatan karakter berbasis nilai-nilai agama yang inklusif.

2. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual

   Setiap pembangunan fisik harus dipertimbangkan nilai dan dampak spiritualnya. Misalnya, pembangunan taman, ruang publik, dan fasilitas kota dapat dilengkapi dengan ruang refleksi spiritual atau ruang ekspresi keberagaman.

   Pembangunan karakter masyarakat Kota Bandung diarahkan pada pembentukan insan yang sehat jasmani dan rohani (cageur), berperilaku baik dan berakhlak mulia (bageur), menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan (bener), cerdas secara intelektual dan emosional (pinter), serta tangguh dan cekatan dalam menghadapi perubahan zaman (singer). Nilai-nilai ini merupakan warisan budaya lokal Sunda yang sarat makna dan relevansi dalam membentuk identitas warga Kota Bandung yang unggul dan berdaya saing.

   Penguatan karakter ini tidak hanya penting dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan global. Melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik melalui pendidikan formal, pembinaan sosial, maupun penguatan peran keluarga dan komunitas.

3. Mengoptimalkan lembaga keagamaan sebagai basis terdepan dalam pemberdayaan umat

   Lembaga keagamaan harus dilibatkan secara aktif sebagai mitra pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

4. Peningkatan toleransi dan moderasi beragama

   Kota Bandung harus menjadi teladan dalam merawat keberagaman melalui strategi moderasi beragama. Pemerintah Daerah mendorong penguatan nilai-nilai toleransi melalui pendidikan multikultural, dialog antar umat beragama, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Pendekatan moderasi beragama difokuskan pada pembinaan keagamaan yang menekankan sikap saling menghormati, tidak ekstrem, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

5. Perwujudan kebudayaan dan kesenian sebagai warisan nilai luhur dalam menghadapi era *borderless global community*.

   Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karaktcr bangsa diarahkan untuk mcmperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan ratryat. warisan budaya, baik warisan budaya maupun warisan budaya tak benda yang melimpah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan Kota Bandung. Penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya perlu dijadikan haluan dalam pembangunan dengar menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045. Setiap misi RPJMD mendukung satau atau lebih dari satu misi RPJPD kota. Adapun keselarasan antara misi RPJMD dengan misi RPJPD Kota Bandung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Matriks Keselarasan Misi RPJMD dan RPJPD Kota Bandung

MISI RPJPD 2025-2045	MISI RPJMD 2025-2029
Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul
Misi 4: Mewujudkan Kondusifitas Daerah	Misi 2: Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan
Misi 3: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif
Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Tangguh, dan Kreatif	Misi 4: Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
Misi 6: Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkualitas	
Misi 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif, dan Ramah Lingkungan	
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan	
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan	Misi 5: Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran

Sumber: *hasil analisis, 2025*

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Bandung selaras dan saling mendukung dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Keselarasan ini diharapkan dapat saling menguatkan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Gambaran keselarasan misi dapat dilihat pada gambar di bawah.

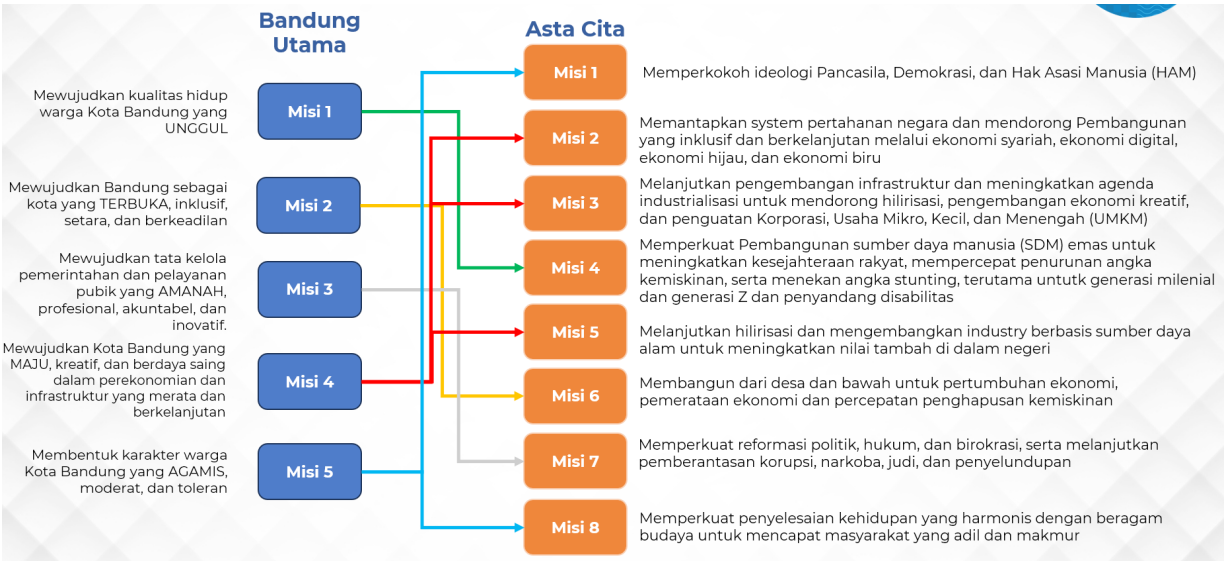
Gambar 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029



Sumber: *hasil analisis, 2025*

Selain selaras dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat, Misi pembangunan Kota Bandung juga disusun dengan memperhatikan Misi RPJMN. Keselarasan dengan Misi RPJMN merupakan awal dari sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal ini merupakan bentuk pendekatan perencanaan pembangunan *top-down* dan *bottom-up*.

Gambar 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Bandung dan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: *hasil analisis, 2025*

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bandung Tahun 2025–2029, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai penjabaran arah strategis yang lebih operasional. Tujuan merupakan arah pembangunan jangka menengah yang menggambarkan hasil-hasil utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misi. Tujuan diturunkan dari visi dengan memerhatikan misi. Setiap tujuan dikaitkan secara langsung dengan misi yang relevan.

Tujuan RPJMD menjadi dasar dalam perumusan sasaran strategis. Sasaran merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan yang dapat diukur dan dipantau pencapaiannya setiap tahun. Setiap sasaran dirancang untuk dapat diukur, dievaluasi, serta dijadikan tolok ukur kinerja pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan pembangunan serta keterkaitan antara RPJMD, RPJPD, RPJMN, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), setiap misi RPJMD dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah yang terukur. Setiap tujuan dan sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin akuntabilitas dan keberhasilan pembangunan jangka menengah, setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bandung 2025–2029 dirinci ke dalam indikator kinerja yang bersifat *ultimate outcome*. Indikator tersebut menggambarkan dampak dan perubahan nyata yang diharapkan terjadi di masyarakat sebagai hasil dari program dan kebijakan pembangunan daerah. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Konsistensi terhadap indikator pada RPJPD Kota Bandung 2025–2045;
- Keselarasan dengan RPJMN 2025–2029, dan SDGs;
- Relevansi dengan isu strategis dan tantangan pembangunan aktual Kota Bandung;
- Ketersediaan data dan kelayakan pengukuran yang dapat dilaporkan secara berkala; dan
- Konektivitas langsung terhadap capaian hasil pembangunan dari setiap misi, tujuan, dan sasaran.

Indikator kinerja dan target tahunan menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Target-target tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, penganggaran program prioritas, serta monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bandung secara berkala. Dengan pendekatan ini, kesinambungan, akuntabilitas, dan keterukuran pembangunan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 yang disajikan berdasarkan pokok visi dan misi.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

NO.	MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
							2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
UNGGUL													
1	**Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul**	**1.1**	**Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**1**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Skor**	**83,75**	**83,97**	**84,30**	**84,56**	**84,82**	**85,09**	**85,30**
		1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,84	75,87	76,05	76,22	76,39	76,57	76,72
		1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,07	11,08	11,09	11,11	11,13	11,15	11,17
				2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,3	14,31
		1.1.3	Meningkatnya standar hidup yang layak	1	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/ Tahun	18.795	18.969	19.152	19.334	19.425	20.110	20.373
TERBUKA													
2	**Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan**	**2.1**	**Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan**	**1**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**Skor**	**4,258**	**4,263**	**4,268**	**4,273**	**4,278**	**4,283**	**4,288**
				2	**Gini Ratio**	**Skor**	**0,440**	**0,440**	**0,430**	**0,430**	**0,420**	**0,410**	**0,400**
		2.1.1	Meningkatnya Pembangunan inklusif	1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	57,15	58,15	59,15	61,15	63,15	65,14	67,15
				2	Indeks Ketenteraman	Skor	7,56	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,67
				3	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,87	3,68	3,58	3,48	3,38	3,28	3,18
				4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,40	7,35	7,23	7,11	6,99	6,87	6,75

NO.	MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
							2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AMANAH													
3	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif**	**3.1**	**Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori & Nilai**	**A- (88,02)**	**A- (89,52)**	**A- (91,02)**	**A- (92,52)**	**A- (94,02)**	**A- (95,52)**	**A- (97,52)**
		3.1.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	75,81	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
MAJU													
4	**Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan**	**4.1**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Ramah Lingkungan yang Didukung Infrastruktur Berkualitas**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,99**	**5,10**	**5,35**	**5,59**	**5,84**	**6,08**	**6,33**
				2	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah/ Kapita**	**147,08**	**154,04**	**161,19**	**168,33**	**175,48**	**182,62**	**189,77**
				3	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**Ton Co2eq IDR Miliar**	**0,97**	**1,13**	**1,31**	**1,46**	**1,62**	**1,79**	**1,95**
		4.1.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan	1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi	Skor	82,61	82,68	82,69	82,7	82,72	82,73	82,74
				2	Indeks Pembangunan Kepariwisataan	Skor	N/A	4,01	4,14	4,26	4,39	4,51	4,64
				3	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Miliar Rp	10.791,00	11.077,05	11.363,22	12.022,39	12.737,01	13.512,31	14.362,51

NO.	MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
							2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
				4	Indeks Kapasitas Fiskal	Skor	1,846	2,061	2,275	2,323	2,402	2,476	2,553
		4.1.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	44.362,19	71.790,19	109.952,00	162.070,42	239.181,24	388.294,46	580.143,54
				2	Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur	Nilai	7,63	7,69	7,76	7,83	7,89	7,96	8,03
				3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,08	51,32	51,57	51,82	52,07	52,33	52,58
				4	Indeks Risiko Bencana	Nilai	95,15	93,15	91,15	89,15	87,15	85,15	83,15
AGAMIS													
5	**Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran**	**5.1**	**Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Moderat dan Toleran**		**Indeks Harmoni Indonesia**	**Skor**	**N/A**	**6,81**	**6,86**	**6,91**	**6,96**	**7,01**	**7,06**
		5.1.1	Meningkatnya pembangunan kebudayaan serta keharmonisan dan kerukunan beragama	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	58,88	58,91	58,94	58,99	59,02	59,05	59,08
				2	Indeks Harmoni Religius	Skor	N/A	7,06	7,11	7,16	7,21	7,26	7,31
				3	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Skor	3,98	4,00	4,07	4,08	4,09	4,10	4,11

Sumber: *hasil analisis, 2025*

Indikator-indikator di atas akan digunakan sebagai rujukan dalam proses evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan serta menjadi dasar dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD tahunan. Dengan menetapkan outcome yang jelas dan terukur, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat mengarahkan pembangunan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi warga kota.

Untuk menjamin konsistensi arah dan substansi perencanaan, RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029 disusun dengan memastikan keterkaitan dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan jangka panjang daerah. Tabel berikut merangkum keterkaitan misi RPJMD Kota Bandung dengan SDGs, RPJMN 2025–2029, RPJPD 2025–2045, serta strategi menjaga keselarasannya secara tematik dan substansial:

Tabel 3.3. Keterkaitan Misi RPJMD Kota Bandung dengan SDGs, RPJMN 2025–2029, dan RPJPD 2025–2045

Misi RPJMD Kota Bandung 2025–2029	Keterkaitan dengan SDGs	Keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029	Keterkaitan dengan RPJPD 2025–2045	Strategi Menjaga Keselarasan
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 3 (Kesehatan) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) SDG 5 (Kesetaraan Gender)	Misi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Sinkronisasi data indikator SDGs dan IPM; integrasi program lintas sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; penguatan kolaborasi dengan Bappenas dan Provinsi melalui forum koordinasi SDGs.
Misi 2: Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh)	Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif, Berkualitas, dan Berdaya Saing Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas Daerah	Penguatan perencanaan berbasis spasial dan sosial; pelibatan komunitas rentan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan; peningkatan kapasitas kelurahan sebagai simpul keadilan sosial.
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	SDG 16 (Institusi yang Kuat) SDG 17 (Kemitraan Global)	Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dao penyelundupan.	Misi 3: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	Digitalisasi tata kelola (SPBE), sistem reward-punishment ASN, penguatan MCP KPK, pelatihan kolaboratif lintas-OPD, serta monitoring keterbukaan data publik.

Misi RPJMD Kota Bandung 2025–2029	Keterkaitan dengan SDGs	Keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029	Keterkaitan dengan RPJPD 2025–2045	Strategi Menjaga Keselarasan
Misi 4: Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan)	Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kelyirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilaitambah di dalam negeri.	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Tangguh, dan Kreatif Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan Misi 6: Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkualitas Misi 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif, dan Ramah Lingkungan	Harmonisasi roadmap ekonomi kreatif dan UMKM daerah dengan strategi industri kreatif nasional; percepatan infrastruktur dasar berbasis kawasan; implementasi *green economy* dan *smart city*.
Misi 5: Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran	SDG 11 (Kota Inklusif) SDG 16 (Kerukunan dan Toleransi)	Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, sena peningkatan toleranst antarumat beragama untuk mencapar masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan	Program penguatan karakter berbasis sekolah dan komunitas; pelibatan lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial; peningkatan peran FKUB dan forum lintas budaya

Sumber: *hasil analisis, 2025*

Tabel ini mencerminkan bagaimana arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kota Bandung telah dirancang untuk saling melengkapi dan saling menguatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan regional. Untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, Pemerintah Kota Bandung menerapkan prinsip "*One Planning Framework*" melalui integrasi vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar perangkat daerah), dengan dukungan sistem perencanaan digital yang akuntabel dan adaptif.

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan tujuan/sasaran RPJMD. Strategi lima tahunan Kota Bandung menggarisbawahi kerangka umum pencapaian sasaran RPJMD.

Penentuan strategi RPJMD Kota Bandung menekankan beberapa aspek, yaitu:

1. ***Human-Centered***: fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

   Strategi *human-centered development* menempatkan manusia sebagai subjek utama dan tujuan akhir pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada perluasan capabilities (kemampuan) individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Kota Bandung diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, memperluas akses terhadap kesempatan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

   Implementasi strategi ini mencakup:

   a. Peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang inklusif dan berkeadilan.

   b. Penguatan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, dengan kurikulum kontekstual, teknologi pembelajaran modern, dan dukungan pelatihan vokasi berbasis potensi lokal.

   c. Pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan terjangkau, termasuk layanan promotif dan preventif berbasis komunitas.

   d. Pembentukkan dan Pengembangan Balai Latihan Bahasa Kerja (BLK) mandiri di kewilayahan yang berfokus pada bahasa yang mendukung kebutuhan tenaga kerja luar negeri, membuka lapangan kerja baru, menyelenggarakan *job-fair* di 30 kecamatan.

   e. Inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat miskin, melalui kebijakan afirmatif dan fasilitasi akses terhadap layanan publik.

   f. Melalui strategi ini, pembangunan Kota Bandung tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memperluas kebebasan nyata warga untuk menentukan arah hidup mereka secara bermartabat.

2. **Tata Kelola Adaptif**: transformasi birokrasi menuju pelayanan berbasis digital dan transparan.

   Strategi tata kelola adaptif diarahkan untuk mendorong transformasi birokrasi melalui digitalisasi, penyederhanaan layanan, dan transparansi. Birokrasi tidak lagi hanya menjadi pelaksana, tetapi juga fasilitator dan mitra masyarakat dalam menciptakan solusi bersama. Dalam konteks ini, penerapan sistem *smart governance*, meritokrasi ASN, dan pelibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan akan diperluas. Hal ini juga mencakup penguatan sistem informasi berbasis dashboard kinerja real-time, monitoring MCP, serta integrasi platform keterbukaan informasi untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas tata kelola pemerintahan.

3. **Ekonomi Berkelanjutan**: pembangunan ekonomi kreatif, industri hijau, dan pemberdayaan UMKM.

   Strategi ekonomi berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada inovasi, industri kreatif, dan pemberdayaan UMKM. Perhatian khusus diberikan kepada ekonomi hijau dan penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis digital. Pemerintah akan menciptakan insentif bagi inisiatif ekonomi berbasis komunitas, memperluas akses pasar, serta mendorong investasi publik-swasta untuk mempercepat pengembangan sektor strategis. Dukungan terhadap sektor informal dan pelaku ekonomi mikro juga akan diperkuat melalui pembinaan terintegrasi dan pembukaan akses terhadap pembiayaan inklusif.

4. **Ketahanan Sosial dan Lingkungan**: respons terhadap krisis iklim, pengurangan risiko bencana, dan perkuatan jaring pengaman sosial.

   Strategi ketahanan sosial dan lingkungan menekankan pentingnya daya tahan kota terhadap berbagai guncangan sosial, ekonomi, dan bencana iklim. Hal ini mencakup penguatan sistem perlindungan sosial, mitigasi risiko bencana, serta pelestarian lingkungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan data spasial. Upaya-upaya ini akan menjadi bagian dari sistem tanggap darurat terpadu dan terukur. Selain itu, strategi ini juga mencakup pembangunan infrastruktur tahan iklim, penataan ruang hijau kota, dan optimalisasi pengelolaan air serta energi berbasis rendah karbon.

5. **Partisipatif dan Inovatif**: memastikan bahwa inovasi yang berasal dari komunitas dan warga kota menjadi sumber utama pembelajaran dan dasar pengambilan kebijakan.

   Strategi partisipatif dan inovatif menjadi ruh dari seluruh pendekatan. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi inisiatif warga, komunitas, pelaku usaha, dan akademisi untuk menyampaikan, menguji, dan merealisasikan inovasi pembangunan. Pemerintah akan mengembangkan platform inkubasi inovasi daerah, serta menyusun kebijakan yang memungkinkan praktik co-creation antara masyarakat dan pemerintah sebagai dasar orkestrasi kebijakan pembangunan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kelembagaan pengelolaan

inovasi kolaboratif lintas OPD, pelatihan masyarakat sipil, serta regulasi pendukung yang menjamin keberlanjutan inovasi berbasis warga.

Kelima penekanan utama ini menjadi acuan dalam memilih langkah-langkah yang tepat. Strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung akan diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pengerahan seluruh sumber daya secara koloboratif dan sinergi akan dilakukan di setiap tahapan pembangunan.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan jangka menengah yang menjadi fokus pembangunan tahunan, diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2025, pembangunan Kota Bandung difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar dan fondasi pembangunan kota. Tahapan ini diarahkan untuk memperkuat prasarana dasar perkotaan seperti jaringan jalan, penerangan jalan, sistem drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, persampahan, serta fasilitas publik yang merata. Selain itu, dilakukan pula penguatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi. Fondasi pembangunan yang kuat menjadi pijakan awal bagi terciptanya kota yang lebih layak huni, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap dinamika urbanisasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pada tahun 2026, perhatian pembangunan dititikberatkan pada penguatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Kota Bandung menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari wajib PAUD hingga pemenuhan standar sekolah 12 tahun, serta perbaikan mutu pendidikan menengah dan tinggi berbasis kebutuhan industri. Layanan kesehatan diperkuat melalui pendekatan preventif, pemerataan akses, serta pemanfaatan teknologi digital. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan generasi muda yang produktif dapat berkembang secara optimal di tengah momentum bonus demografi, sekaligus menyiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi transisi demografi menuju masyarakat dengan proporsi lansia yang meningkat.

Dalam mengingkatkan pelayanan kepada masyarakat, fokus pembangunan diarahkan juga untuk peningkatan pelayanan publik berorientasi melayani dengan pemanfaatan teknologi. Penyelenggaraan pelayanan yang responsif, cepat, transparan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Pemanfaatan teknologi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi melayani. Melalui integrasi *e-government* dan konsep *smart city*, berbagai layanan publik dikembangkan dalam bentuk digital agar lebih sederhana, cepat, dan transparan.

Selanjutnya, **tahun 2027** diarahkan pada peningkatan produktivitas, daya saing ekonomi, dan iklim investasi. Pembangunan pada tahap ini mendorong penguatan sektor unggulan Kota Bandung, terutama ekonomi kreatif, UMKM, serta digitalisasi ekonomi.

Peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dioptimalkan melalui kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur ekonomi, serta penciptaan iklim usaha yang kompetitif. Dengan strategi tersebut, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, peningkatan PDRB per kapita, serta perluasan lapangan kerja dapat dicapai.

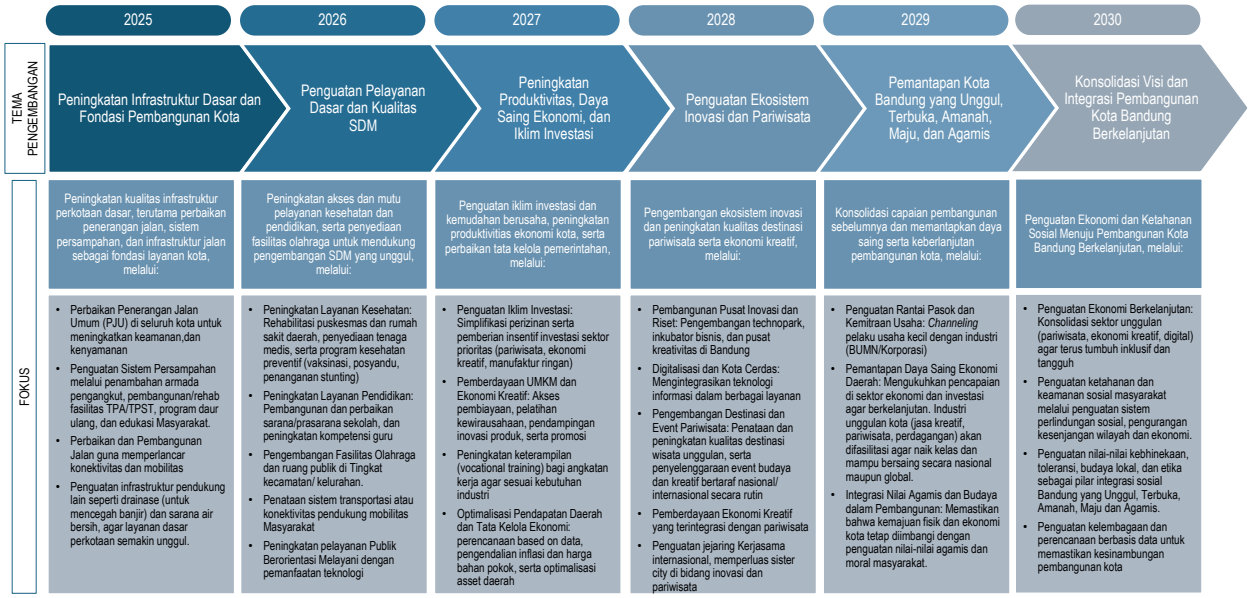
Pada tahun 2028, fokus pembangunan diarahkan engembangan ekosistem inovasi dan peningkatan kulitas destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Bandung mengembangkan pusat riset, kawasan kreatif, serta ruang-ruang kolaborasi yang menghubungkan perguruan tinggi, industri, dan komunitas. Di sisi lain, sektor pariwisata diperkuat melalui pengembangan destinasi berbasis budaya, ekowisata, dan industri kreatif yang berkelanjutan. Kota Bandung memiliki posisi strategis sebagai pusat kreativitas dan pariwisata di Indonesia. Identitas sebagai *kota kreatif* tumbuh dari ekosistem inovasi yang kuat, yang didukung oleh keberadaan perguruan tinggi, komunitas kreatif, industri mode, desain, kuliner, musik, hingga teknologi digital. Tahapan ini sekaligus menegaskan posisi Bandung sebagai kota inovasi dan kota wisata unggulan, dengan daya tarik global yang berbasis kreativitas, keberlanjutan, dan identitas budaya lokal.

Memasuki **tahun 2029**, pembangunan difokuskan pada pemantapan Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Tahap ini menjadi fase konsolidasi capaian pembangunan sebelumnya dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan sosial budaya saling terintegrasi. Upaya penguatan kohesi sosial, toleransi, dan karakter masyarakat yang moderat menjadi perhatian utama. Selain itu, tata kelola pemerintahan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta integritas birokrasi diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Pada tahun 2030, pembangunan Kota Bandung diarahkan pada konsolidasi visi dan integrasi pembangunan kota berkelanjutan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian RPJMD sekaligus menyelaraskan pembangunan menuju target jangka panjang dalam RPJPD 2045. Fokus utama meliputi konsolidasi indikator pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola agar sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan berorientasi pada penguatan ekonomi hijau, mitigasi perubahan iklim, transportasi ramah lingkungan, serta integrasi konsep kota cerdas yang inklusif. Dengan konsolidasi tersebut, Kota Bandung diproyeksikan mampu mewujudkan visi sebagai kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis secara berkelanjutan.

Penahapan pembangunan Kota Bandung jangka menengah dimuat dalam gambar berikut.

Gambar 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029



Sumber: *hasil analisis, 2025*

Mengingat pencapaian sasaran RPJMD memerlukan strategi yang tepat, tidak hanya terkait perencanaan sektoral namun juga aspek spasial, maka pada tabel di bawah dimuat arahan pengembangan kota. Sebagai bentuk sinergi perencanan pembangunan nasional dan daerah, maka di bawah ini dimuat *highlight* Indikasi Intervensi lokasi prioritas Kota Bandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pendekatan spasial menekankan intervensi pembangunan yang adil dan proporsional berbasis kawasan.

Tabel 3.4. *Highlight* Indikasi Intervensi Lokasi Prioritas Kota Bandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Pemantapan dan penataan WM Bandung, antara lain melalui:
	– Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Bandung
	– Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
	– Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
	– Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
	– Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
	– Penyusunan *metropolitan statistic area*
	– Penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Bandung
	Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung
	Pembangunan BRT Cekungan Bandung
	Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Pembangunan TPST Regional Bandung Raya
	Pcningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Bandung, termasuk penerapan SIH3 dan FEWS
	Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung
	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Bandung (PHTC)
	Pembangunan SPAM Regional Bandung
	Elektrifikasi jalur KA Komuter Bandung Raya segmen Cicalengka Padalarang
	Pengembangan *World Class Research University* Berbasis potensi wilayah pada Institut Teknologi Bandung
	Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek-Bandung
	Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki)
	Preservasi jatan ruas Bandung-Lembang-Tangkubanperahu, Soreang-Ciwidey-Rancaupas-Rancabali, Ciwidey-Pangalengan
	Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di WM Bandung (PHTC)
	Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefence* pada Lembaga Farmasi Puskesad dan Lembaga Biologi vaksin Puskesad
	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismic

Sumber: *RPJMN Tahun 2025-2029*

Selanjutnya, setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan visi Kota Bandung sebagai kota unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Penjabaran ini memperjelas bagaimana perencanaan pembangunan lima tahunan akan dijalankan secara konkret melalui strategi lintas sektor dan program prioritas yang terukur dan berdampak nyata bagi warga. Pemerintah Kota Bandung menempatkan diri sebagai fasilitator utama dalam mengkoordinasikan transformasi lintas OPD, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media. Setiap program dirancang untuk bukan hanya menghasilkan output, tetapi membentuk ekosistem yang kolaboratif, berkelanjutan, dan transformatif.

Berikut disajikan tabel program prioritas pembangunan daerah Kota Bandung periode Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
VISI: MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL							
Misi 1. Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul							
	1.1 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**			
		1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata		**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**			
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu			
				Jumlah Kematian Balita			
				Prevalensi Stunting			
				Angka Bebas Populasi Penyakit Tidak Menular (PTM)			
				Angka Bebas Populasi Penyakit Menular (PM)			
			Meningkatnya Kesehatan Ibu	Cakupan KF lengkap sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
				Persentase Anemia pada Ibu Hamil			
				Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6			
			Menurunnya Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Status Gizi	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Indeks Kesehatan Lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Terkendalinya Penyakit Tidak Menular	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
				Cakupan Hipertensi dalam pengendalian			
				Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian			
			Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
			Terkendalinya penyakit menular	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
				Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate)			
				Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV)			
				Persentase kematian Dengue			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Daan Makanan Minuman	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Kesehatan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				Persentase fasyankes yang terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Persentase fasyankes terakreditasi paripurna			
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Kebugaran Fisik Masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga			
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase SDM Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Keolahragaan	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Ruang Terbuka Olahraga			
				Persentase Literasi Fisik Olahraga			
				Persentase Partisipasi Olahraga			
				Persentase Kebugaran Jasmani Masyarakat			
				Persentase Performa Olahraga			
				Persentase Dimensi Ekonomi Olahraga			
			Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Urusan Olahraga dan Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Diduga Kasus Penyakit Zoonosa			
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis	Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Optimasi layanan kesehatan prima	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Unit Usaha produk Asal hewan yang Memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		1.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata			**Rata-Rata Lama Sekolah**			
					Harapan Lama Sekolah			
			Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah (5-6)			
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan			
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12			
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15			
				Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Rasio Penduduk Usia PAUD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah Jenjang PAUD			
				Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Kesetaraan	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi SMA ke atas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
					Persentase Anak Tidak Sekolah			
				Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Dasar	Rasio Penduduk Usia SD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah Jenjang SD			
				Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Rasio Penduduk Usia SMP terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah Jenjang SMP			
			Pendidikan Bermutu		Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan			
					Indeks Standar Pelayanan Minimal			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Iklim Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
				Iklim Keamanan SD			
				Iklim Kebinekaan SD			
				Iklim Inklusivitas SMP			
				Iklim Keamanan SMP			
				Iklim Kebinekaan SMP			
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Skor Kemampuan Literasi SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
				Skor Kemampuan Numerasi SD			
				Skor Kemampuan Literasi SMP			
				Skor Kemampuan Numerasi SMP			
				Skor Kemampuan Literasi Dasar PAUD			
				Persentase Peserta Didik yang memahami muatan lokal (mulok)	Program Pengembangan Kurikulum	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
				Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten			
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4			
			Meningkatnya Indeks Distribusi Guru	Indeks Distribusi Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Pendidikan
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			
			Koleksi Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah judul Koleksi perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah pemustaka perputakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				Jumlah tenaga perpustakaan			
			Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bandung Pintar	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
		1.1.3 Meningkatnya standar hidup yang layak		**Pengeluaran Per Kapita**			
		1.1.3.1 Meningkatnya Kualitas pembangunan Gender		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Data Gender dan Anak	Efektivitas Kebijakan Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DP3A
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan	Indeks Pembangunaan Keluarga (Ibangga)			
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DPPKB
				Indeks Pengasuhan Remaja			
				Cakupan Pemantauan 1.000 HPK			
			Menjaga angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* (TFR)) pada *replacement level*	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* (TFR)) Per Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15-49 Tahun	Program Pengendalian Penduduk	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DPPKB
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) 15-19)			
			Meningkatnya akses, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DPPKB
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)			
			Meningkatnya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DPPKB

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul	DPPKB
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda			
			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Optimasi peranan Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga untuk membentuk karakter yang unggul	Dispora
				Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda			
			Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Optimasi peranan Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga untuk membentuk karakter yang unggul	Dispora
				Persentase pemuda yang memberikan saran/ pendapat dalam rapat			
				Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi			
		1.1.3.2 Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan		**Indeks Ketahanan Pangan**			
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan			
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment* (PoU))			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Kecukupan Energi Energi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Angka Kecukupan Protein			
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya pangan	Persentase Jumlah Cadangan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Penanganan Daerah rentan Rawan pangan	Persentase Daerah rentan Rawan pangan ditangani	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Misi 2. Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan							
	2.1 Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan			**Indeks Daya Saing Daerah** **Gini Ratio**			
		2.1.1 Meningkatnya pembangunan inklusif		**Indeks Inovasi Daerah** **Indeks Ketenteraman** **Tingkat Kemiskinan** **Tingkat Pengangguran Terbuka**			
		2.1.1.1 Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah		**Indeks Inovasi Daerah**			
			Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah	**Persentase inovasi yang memenuhi kriteria matang** **Persentase rancangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*)**			
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	PRAKARSA Bandung UTAMA	Bapperida
			Meningkatnya hasil riset yang digunakan dalam perumusan kebijakan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	PRAKARSA Bandung UTAMA	Bapperida
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik kecamatan	**Persentase Kelurahan UTAMA** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan / Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PRAKARSA Bandung UTAMA	Kecamatan
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PRAKARSA Bandung UTAMA	Kecamatan
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PRAKARSA Bandung UTAMA	Kecamatan
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
		2.1.1.2 Meningkatnya Ketenteraman Daerah		**Indeks Ketenteraman**			
			Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	**Indeks Ketertiban Umum**			
				Indeks Perlindungan Masyarakat			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya kondusivitas daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan Perda			
			Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling	Persentase Satlinmas Aktif	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya kondusivitas daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terjaganya kondusivitas daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	**Persentase Satlinmas Aktif Kecamatan**			
			Meningkatnya Penyelenggara-an Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya kondusivitas daerah	Kecamatan
				Persentase Satkamling Aktif Kelurahan			
		2.1.1.3 Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan**			
			Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	**Indeks Kesejahteraan Sosial**			
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase warga miskin dan rentan yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem	Dinas Sosial
				Persentase warga miskin dan rentan yang memperoleh solusi permasalahan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	Capaian Layanan Standar Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem	Dinas Sosial
			Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem	Dinas Sosial
				Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Sosial	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem	Dinas Sosial
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
		2.1.1.4 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		**Tingkat Pengangguran Terbuka**			
			Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	**Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Berlaku)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Konstan)			
				Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja			
				Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi			
			Meningkatnya Kesempatan dan Penempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Persentase Tenaga Kerja Formal			
				Jumlah Lowongan Kerja Baru			
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal			
			Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan	Program Hubungan Industrial	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan			
				Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan			
				Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial			
				Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama			
			Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif							
	3.1 Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**Indeks Reformasi Birokrasi**			
		3.1.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak		**Nilai Reformasi Birokrasi General**			
			Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**			
			Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efisien	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Nilai Penerapan SPBE Lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan			
				Nilai Penerapan SPBE Lingkup Infrastruktur			
				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
			Meningkatnya Kualitas Data yang Terverifikasi	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Indeks Pembangunan Statistik			
			Meningkatnya Keamanan Informasi di Seluruh Perangkat Daerah	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Layanan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan			
				Nilai Layanan Informasi Masyarakat Melalui Radio			
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata			
			Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkat-nya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya pengelolaan kearsipan	**Nilai Pengawasan Kearsipan**			
				Tingkat Digitalisasi Arsip			
			Meningkatnya nilai aspek pengawasan	Nilai aspek pengawasan internal	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya nilai aspek kebijakan	Nilai aspek kebijakan	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya nilai aspek pembinaan	Nilai aspek pembinaan	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya nilai aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun	Nilai aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya nilai aspek pengelolaan arsip statis	Nilai aspek pengelolaan arsip statis	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya nilai aspek sumber daya kearsipan	Nilai aspek sumber daya kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Mewujudkan ASN Kota Bandung yang professional dan kompeten, melalui manajemen ASN yang mengedepankan meritokrasi melalui transformasi budaya dan digital	**Indeks Sistem Merit** **Hasil Survei BerAKHLAK** **Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Nilai Penerapan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian Nilai Penerapan Pengembangan Karir Nilai Penerapan Manajemen Kinerja, Penghargaan Disiplin Nilai Penerapan Pengembangan Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BKPSDM

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Hasil Survei BerAKHLAK Hasil Evaluasi Organisasi	Program Pengembangan Kompetensi SDM	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BKPSDM
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BKPSDM
			Terwujudnya sistem kerja yang adaptif dan efektif pasca penyederhanaan birokrasi guna mendukung kinerja organisasi secara optimal	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan	**Nilai AKIP**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	**Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja** **Indeks Kepuasan Masyarakat**			
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Sasaran RPJPD/ RPJMD/ RKPD yang di Cascading Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BAPPERIDA
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya Terukur Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BAPPERIDA
				Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BAPPERIDA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pembangunan daerah	**Nilai AKIP Komponen Pelaporan Kinerja**			
			Meningkat-nya kualitas pelaporan kinerja pem-bangunan daerah	Nilai AKIP Pelaporan Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Nilai AKIP Komponen Evaluasi Kinerja**			
			Meningkat-nya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja in-ternal	Skor komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	**Opini BPK** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			
			Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BKAD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset, baik milik pemerintah maupun Perumda untuk peningkatan PAD	BKAD
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset, baik milik pemerintah maupun Perumda untuk peningkatan PAD	BKAD
			Meningkatnya ketaatan organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset	Tindak Lanjut Rekomendasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	**Indeks Pelayanan Publik**			
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Persentase PD yang memenuhi kriteria pelayanan Prima Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan		**Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan**			
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan			
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan			
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan			
				Terselenggaran-ya Pengelolaan Informasi Kepen-dudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi ber-basis data dan atau geospasial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital			
			Meningkatnya kepuasan terhadap layanan penanaman modal		**IKM terhadap Layanan Penanaman Modal**			
				Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	DPMPTSP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi	Persentase Data dan Informasi PMPTSP	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	DPMPTSP
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	DPMPTSP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	**IKM Sekretariat Daerah**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	IKM Sekretariat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan	IKM atas layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan tata usaha, perlengkapan dan RT	IKM atas layanan tata usaha, perlengkapan dan RT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Bagian Umum Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	**IKM Sekretariat Dewan**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkat-nya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Sekretariat DPRD
			Meningkat-nya kualitas Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,	**Indeks Tata Kelola Pengadaan**			
			Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	**Indeks Kualitas Kebijakan**			
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan transparansi kebijakan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Tata Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Kerja Sama	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Perekonomian	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Organisasi	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah	**Indeks Reformasi Hukum**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Terwujudnya sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel melalui reformasi regulasi dan penegakan hukum yang berintegritas.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang urgensi dan pokok pikirannya selaras dengan sistematika dan materi muatannya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
					persentase SDM perancang peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan			
					Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah yang ditindaklanjuti			
			Terwujudnya organisasi yang yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu memberikan pelayanan prima		**Tingkat maturitas SPIP Terintegrasi**			
					Survey Penilaian Integritas (SPI)			
					Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)			
				Meningkatnya kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Skor komponen kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
				Meningkatnya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya ketaatan organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset	Tindak Lanjut Rekomendasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Sasaran RPJPD/ RPJMD/ RKPD yang di Cascading	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BAPPERIDA
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti			
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya Terukur	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BAPPERIDA
				Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti			
			Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	BKAD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset, baik milik pemerintah maupun Perumda untuk peningkatan PAD	BKAD
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD	Persentase PD yang memenuhi kriteria pelayanan Prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data dan atau geospasial	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kapabilitas APIP sebagai Assurance dan Consulting	**Level Kapabilitas APIP**			
			Meningkat-nya kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Skor komponen kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
			Meningkat-nya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan *good governance* bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perumda	Inspektorat
Misi 4. Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan							
	4.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Ramah Lingkungan yang Didukung Infrastruktur Berkualitas			**Laju Pertumbuhan Ekonomi** **PDRB Per Kapita** **Penurunan Intensitas Emisi GRK**			
		4.1.1 Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan		**Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi** **Indeks Pembangunan Kepariwisataan** **Realisasi Investasi PMDN/PMA** **Indeks Kapasitas Fiskal**			
		4.1.1.1 Meningkatnya Nilai Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi		**Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi**			
			Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	**Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**			
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Konstan) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Berlaku)	Program Pelatihan Kerja dan Priduktivitas Tenaga Kerja	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian	**Produktivitas Pertanian**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Lahan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggu-langan Bencana Pertanian	Cakupan areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Program Penyuluhan Pertanian	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Produktivitas Perikanan	**Produktivitas Perikanan Budidaya**			
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4.1.1.2 Meningkatnya Indeks Pembangunan Kepariwisataan		**Indeks Pembangunan Kepariwisataan**			
			Meningkatnya daya saing ekosistem kota kreatif	**Persentase peningkatan usaha ekraf**			
			Meningkatnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA 2. Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM ekraf	Tingkat kepuasan pemberi kerja	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA 2. Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya Penanaman Modal	**Realisasi PMDN dan PMA**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Kondusifitas Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	DPMPTSP
			Meningkatnya Skala Usaha Mikro		**Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya**			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
				Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha	Program Pengembangan UMKM	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
				Meningkatnya Keberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Keberdayaan Usahanya	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
					Persentase SDM Usaha Mikro yang Kualitasnya Meningkat			
				Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
					Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya keberlanjutan usaha mikro		**Persentase usaha mikro yang berlanjut usahanya**			
				Meningkatnya keberdayaan Usaha Non Formal	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kesehatan Koperasi		**Tingkat Kesehatan Koperasi**			
				Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
				Meningkatnya Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
				Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
				Meningkatnya Keberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan		**Jumlah Kunjungan Wisatawan (Lokal dan Mancanegara)**			
				Meningkatnya Kepatuhan Standar Usaha Pariwisata	Persentase usaha jasa pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwista	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Kompetensi Daya Saing Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA 2. Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA 2. Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Brand Equity/Awareness Citra Pariwisata Kota	Program Pemasaran Pariwisata	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar usaha destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwista	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	**Persentase Pelaku Usaha Perdagangan Berdaya Saing**			
				Persentase Pelaku Industri Kecil Menengah Berdaya Saing			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
			Meningkatnya Daya Saing Perdagangan Produk Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Terstandardisasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Stabilnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		4.1.1.3 Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA		**Nilai Investasi PMDN/ PMA**			
			Meningkatnya Kondusifitas Iklim PM	**Persentase Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Penanaman Modal**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Kemudahan dan Insentif PM	Persentase Kebijakan yang Mendukung Kemudahan dan Insentif PM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	DPMPTSP
					Presentase Peningkatan kemudahan penanaman modal			
			Meningkatnya Minat Penanaman Modal		**Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal**			
				Terpetakannya Potensi dan Peluang PM	Persentase Peningkatan Potensi dan Peluang PM yang Terpetakan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	DPMPTSP
				Terfasilitasinya Kemitraan Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Standar Sertifikasi	Program Pengembangan UMKM	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
					Persentase Kemitraan Usaha Mikro yang Ditindaklanjuti			
					Persentase SDM Usaha Mikro yang Kualitasnya Meningkat			
				Meningkatnya Promosi PM	Persentase Potensi Penanaman Modal yang Terpromosikan	Program Promosi Penanaman Modal	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA	DPMPTSP
			Meningkatnya Kesehatan Koperasi		**Tingkat Kesehatan Koperasi**			
				Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
			Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
			Meningkatnya Keberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	DKUKM
		4.1.1.4 Meningkatnya Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)		**Indeks Kapasitas Fiskal**			
		4.1.1.4.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		**Persentase Peningkatan PAD**			
			Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	**Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			
			Meningkatnya Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Jumlah Pendapatan 9 Jenis Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/ Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).				
				Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya Retribusi Daerah		**Persentase Peningkatan Retribusi Daerah**			
				Meningkatnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DPMPTSP
				Meningkatnya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Jumlah Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya Retribusi Kebersihan	Jumlah Pendapatan Retribusi Kebersihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Lingkungan Hidup

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Retribusi Sewa Hunian Rusun dan Rekreasi dan Olahraga (SOR/GOR)	Jumlah Pendapatan Retribusi Sewa Hunian Rusun; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Program Pengembangan Perumahan	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DPKP
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DPKP
			Meningkatnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (SOR/GOR)	Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (SOR/GOR)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dispora
			Meningkatnya Retribusi Rumah Potong Hewan	Jumlah Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DKPP
			Meningkatnya Retribusi Sewa Alat Berat dan Jasa Laboratorium	Jumlah Pendapatan Retribusi Sewa Alat Berat dan Jasa Laboratorium	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DSDABM
					Program Penyelenggaraan Jalan	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	DSDABM
			Meningkatnya Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jumlah Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Program Penempatan Tenaga Kerja	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Persentase Peningkatan Pendapatan Dividen Perusahaan Daerah**			
			Meningkatnya Pendapatan Deviden	Jumlah Pendapatan Deviden	-	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BUMD (Perumda Pasar, Perumda Tirtawening, PD BPR, BJB, PT.BII, KPKB)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**			
			Meningkatnya Hasil Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Hasil Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BKAD
			Meningkatnya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pendapatan BLUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinkes, RSUD, RSUD BK, RSKGM, DLH, Dishub
		4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		**Penurunan Emisi GRK Kumulatif**			
				Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
				Indeks Risiko Bencana			
		4.1.2.1 Menurunnya Emisi GRK Kumulatif		**Penurunan Emisi GRK Kumulatif**			
			Meningkatnya Mitigasi Emisi Sektor Energi Transportasi	**Penurunan Emisi GRK Sektor Energi - Transportasi**			
			Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan	Rasio Pengguna angkutan umum dengan pengguna angkutan pribadi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan Cashless Payment	Dishub
			Meningkatnya Mitigasi Emisi Sektor Persampahan	**Penurunan Emisi GRK Sektor Persampahan**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya pengurangan sampah rendah emisi karbon	Persentase Pengurangan Sampah Rendah Emisi Karbon	Program Pengelolaan Persampahan	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya pengolahan sampah rendah emisi karbon	Persentase Pengolahan Sampah Rendah Emisi Karbon	Program Pengelolaan Persampahan	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya Mitigasi Emisi GRK Sektor Air Limbah Domestik	**Penurunan Emisi GRK Sektor Air Limbah Domestik**			
			Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah Domestik Rendah Emisi Karbon	Persentase Pengelolaan Air Limbah Domestik Rendah Emisi Karbon	Program Kawasan Permukiman	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
		4.1.2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Kota		**Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur**			
		4.1.2.2.1 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Tata Ruang		**Indeks Livable City Aspek Tata Ruang**			
			Meningkatnya Perencanaan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis Bangunan	**Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis Tata Bangunan**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Bangunan yang Memenuhi Standar Administrasi dan Teknis	Persentase Perencanaan Bangunan yang Memenuhi Standar Teknis dan Administratif	Program Penataan Bangunan Gedung	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
			Meningkatnya Penyelengga-raan Bangunan Gedung Negara yang Memenuhi Standar Teknis	Persentase Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang memenuhi ketentuan Standar Teknis	Program Penataan Bangunan Gedung	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
			Meningkatnya Wilayah yang Terencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Wilayah Terencana yang Telah Memiliki Arahan Pengaturan Pemanfaatan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
			Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/analis	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	**Persentase Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun Tepat Waktu	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Penataan Ruang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DICIPTABINTAR
		4.12.2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur**			
		4.1.2.2.2.1 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur Aspek Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kebinamargaan**			
			Optimalnya Preservasi Jalan	**Tingkat Kemantapan Jalan**			
			Tertanganinya jalan dalam kondisi tidak mantap melalui pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan	Persentase panjang jalan tidak mantap yang ditingkatkan kondisinya	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DSDABM
			Terkendalinya kualitas bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan kewenangan kota yang dikendalikan kualitas bahan konstruksinya	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DSDABM

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Terpeliharanya kualitas infrastruktur jalan secara merata dan berkelanjutan	Persentase panjang jalan mantap yang dipelihara rutin	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DSDABM
				Terehabilitasinya Ruas-Ruas Jalan yang membutuhkan penanganan segera (insidentil)	Persentase Panjang Jalan Tidak Mantap yang direhabilitasi secara swakelola	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DSDABM
			Meningkatnya Kualitas Trotoar		**Persentase Trotoar Inklusif**			
				Meningkatnya cakupan penyelenggaraan trotoar inklusif secara merata dan berkelanjutan	Persentase Trotoar Inklusif	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DSDABM
			Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) dalam Upaya Pengurangan Banjir dan Genangan		**Persentase Genangan Tertangani**			
				Meningkatnya Kapasitas Resapan Air	Persentase Kapasitas Resapan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	DSDABM
				Meningkatnya Kapasitas Parkir Air	Persentase Kapasitas Parkir air (Kolam Retensi)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	DSDABM
				Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai	Persentase Kapasitas Aliran Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	DSDABM

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian bencana hidro-meteorologi peningkatan ket-angguhan kota	DSDABM
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengendalian bencana hidro-meteorologi peningkatan ket-angguhan kota	DSDABM
			Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	DSDABM
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Sumber Daya Air dan Kebinamargaan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	DSDABM
		4.12.2.2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Perumahan Permukiman		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur Perumahan Permukiman**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hunian Layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman		**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**			
					Persentase Luasan Kawasan Kumuh			
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
					Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menempati Hunian yang Layak	Program Pengembangan Perumahan	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
				Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman	Persentase penurunan kumuh kriteria jalan lingkungan	Program Kawasan Permukiman	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
					Persentase penurunan kumuh kriteria drainase lingkungan			
					Persentase penurunan kumuh kriteria akses aman air minum tidak tersedia			
					Persentase penurunan kumuh kriteria Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku			
					Persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Infrastruktur di Perumahan dan Kawasan Permukiman		**Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik** **Cakupan Pelayanan Air Bersih** **Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik** **Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik**			
				Meningkatnya Kualitas Jalan Permukiman	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DPKP
				Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
				Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Setempat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
				Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman	Persentase Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum	DPKP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perumahan Permukiman		**Indeks Kepuasan Masyarakat**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	DPKP
		412223 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Transportasi		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur Transportasi**			
			Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	**Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan** **Persentase Peningkatan Pengguna Sarana Angkutan Umum**			
			Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan	Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan Rasio Pengguna angkutan umum dengan pengguna angkutan pribadi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan Cashless Payment	Dishub

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perhubungan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan Cashless Payment	Dishub
		4.12.22.4 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Kebakaran		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur Kebakaran**			
			Meningkatnya ketangguhan kebakaran kota	**Indeks Ketangguhan Kebakaran/*Fire Resilience Index***			
			Meningkatnya Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	Persentase Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Terstandarisasi	Persentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Terstandarisasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya keberhasilan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Kebakaran	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan permukiman, kawasan kumuh dengan prioritas rawan sanitasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		412225 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Persampahan		**Indeks Livable City Aspek Infrastruktur Persampahan**			
			Meningkatnya pengelolaan persampahan	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya parameter input pengelolaan sampah	Nilai Parameter Input Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya parameter proses pengelolaan sampah	Nilai Parameter Proses Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya parameter output (capaian target/kapasitas, efisiensi anggaran) pengelolaan sampah	Nilai total parameter output pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
				Persentase pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga			
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		412.23 Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Lingkungan Hidup		**Indeks Livable City Aspek Lingkungan Hidup**			
			Meningkatnya Kualitas RTH Publik	**Persentase Luasan RTH Publik Terpelihara**			
			Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari pertamanan dan dekorasi kota	Persentase Luasan RTH Publik Taman, Median dan Jalur Hijau Jalan Terpelihara	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	DPKP
			Meningkatnya Kualitas RTH Publik Pemakaman	Persentase Terpeliharanya RTH Publik Pemakaman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	Diciptabintar
			Meningkatnya Kualitas RTH Publik Taman Keanekaraga-man Hayati	Persentase Luasan RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati Terpelihara	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	**Persentase Luasan RTH Publik**			
			Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik dari Serah Terima PSU Perumahan dan Pengadaan Lahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Optimasi Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh serta Urban Farming	DPKP
				Persentase Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Optimasi Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh serta Urban Farming	DPKP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Pemakaman	Persentase Penambahan Perluasan RTH Publik Pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis	Diciptabintar
			Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Taman Keanekaraga-man Hayati	Persentase Penambahan Luasan Lahan RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
		4.1.2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			
			Meningkatnya Kuali-tas Air dan Udara	**Indeks Kualitas Air**			
				Indeks Kualitas Udara			
			Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Daya Dukung Air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air dan udara	Indeks Respon Lingkungan Hidup Aspek Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
				Indeks Respon Lingkungan Hidup Aspek Udara			
			Meningkatnya pengawasan sebagai implementasi pelaksanaa pengendalian pencemaran air dan udara	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya penanganan kasus perencanaan sebagagai implementasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara	Persentase Penyelesaian Kasus pencemaran sesuai SOP	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya konservasi lahan	Persentase tumbuh tanaman di lokasi konservasi Persentase Konservasi Daerah Tangkapan Air	Program Pengelolaan Keankeragaman Hayati	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya pelibatan pemangku kepentingan	Persentase Peningkatan Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
			Meningkatnya inovasi pengendalian pencemaran air dan udara	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang dinilai terkait pengelolaan lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Optimasi penanganan sampah Bandung UTAMA dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH
		4.1.2.4 Meningkatnya Ketangguhan Kota		**Indeks Risiko Bencana**			
			Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	**Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas ketahanan daerah dimensi generik	**Nilai Ketahanan Dimensi Generik**			
			Meningkatnya kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana	Nilai kualitas kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya kualitas kajian resiko dan perencanaan terpadu	Nilai kualitas kajian resiko dan perencanan terpadu	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	Nilai pengembangan sistem informasi diklat dan logistik	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	Nilai penanganan tematik kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya kualitas ketahanan daerah dimensi spesifik	**Nilai Ketahanan Dimensi Spesifik**			
			Meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Nilai efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Nilai kualitas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya pengembangan sistem pemulihan bencana	Nilai kualitas pengembangan sistem pemulihan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Kebencanaan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota	BPBD
Misi 5. Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Moderat dan Toleran							
	5.1 Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Moderat dan Toleran			**Indeks Harmoni Indonesia**			
		5.1.1 Meningkatnya pembangunan kebudayaan serta keharmonisan dan kerukunan beragama		**Indeks Pembangunan Kebudayaan** **Indeks Harmoni Religius** **Indeks Perlindungan Kebhinnekaan**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan		**Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Ekonomi, Ekspresi dan Warisan Budaya** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			
				Meningkatnya Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya partisipasi dan apresiasi publik terhadap budaya	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam pertunjukan kebudayaan/ kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang dicatat/ditetapkan dalam register warisan budaya takbenda	Program Pengembangan Kebudayaan	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang datang berkunjung ke situs sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah kunjungan ke Museum Sejarah Kota Bandung	Program Pengelolaan Permuseuman	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase Objek diduga cagar budaya yang ditetapkan atau register	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik			
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan		**Indeks Harmoni Religius**			
					Indeks Perlindungan kebhinnekaan			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
				Meningkatnya Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol
				Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Stabilitas Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol
				Meningkatnya kualitas Organisasi Masyarakat	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Organisasi Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (INTERVENSI/PROGRAM NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol
			Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis	Bakesbangpol

Sumber: *hasil analisis, 2025*

Program prioritas yang dimuat pada tabel tersebut, selanjutnya akan dirinci menjadi kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah. Program-program tersebut dilaksanakan selain untuk mencapai target sasaran strategis RPJMD, juga dalam rangka melaksanakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Program prioritas kepala daerah bersifat sangat penting, mendesak, dan berdaya ungkit bagi perwujudan visi dan misi dan akan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2025-2029

Pokok Visi	Misi	No	Program Prioritas Kepala Daerah
Unggul	**Misi 1**: Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul	1	Optimasi layanan kesehatan prima
SDM berkualitas dan berdaya saing		2	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul
		3	Optimasi peranan Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga untuk membentuk karakter yang unggul
		4	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat
		5	Pelaksanaan Bandung Pintar
Terbuka	**Misi 2**: Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	6	PRAKARSA Bandung UTAMA
Inklusif dalam riset, pola pikir, tata kelola wilayah, serta ramah investasi		7	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem
		8	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja
		9	Terjaganya kondusivitas daerah
Amanah	**Misi 3**: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	10	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial
Tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik yang andal		11	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan good governance bagi perangkat daerah serta *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Perumda
		12	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset, baik milik pemerintah maupun Perumda untuk peningkatan PAD
Maju	**Misi 4:** Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	13	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		14	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif
Ekonomi berkelanjutan, termasuk ekonomi kreatif, merata dan kompetitif		15	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi *(Tourism, Trading and Investment)* UTAMA
		16	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan Jalan Umum
		17	Penataan Transportasi Publik, *Smart Parking dan Cashless Payment*
		18	Optimasi Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh serta Urban Farming
		19	Optimasi pengelolaan sampah dan lingkungan hidup Bandung UTAMA
		20	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota *(Bandung resilience culture)*

Pokok Visi	Misi	No	Program Prioritas Kepala Daerah
		21	Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis
Agamis	**Misi 5**: Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran	22	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis
Karakter masyarakat dan budaya yang religius		23	Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban

Sumber: *hasil analisis, 2025*

Keterkaitan program prioritas Wali Kota Bandung dengan program prioritas Gubernur Jawa Barat Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. Hubungan keterkaitan ini memberikan gambaran perlunya kolaborasi dan sinergi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengendalian dan evaluasi. Sinkronisasi program prioritas Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pencapaian visi pembangunan daerah serta kontribusi nyata terhadap pembangunan provinsi. Dengan adanya sinkronisasi program prioritas antara kedua kepala daerah, diharapkan terwujud sinergi antara kebijakan provinsi dan kota. Sinergi ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam mengatasi isu strategis RPJMD, mempercepat pencapaian target kinerja, serta menciptakan dampak pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bandung.

Tabel 3.7. Keterkaitan Program Prioritas Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR JABAR	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA BANDUNG
1	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Optimasi layanan kesehatan prima
2	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional	
3	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	Optimasi ketahanan dan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk masyarakat
4	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	Optimasi moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis
		Optimasi ekosistem pemajuan kebudayaan untuk membentuk karakter masyarakat berkeadaban
5	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya kondusivitas daerah
6	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	Pelaksanaan Bandung Pintar
7	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat.	Penguatan ketahanan keluarga berkualitas yang unggul
		Optimasi peranan Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga untuk membentuk karakter yang unggul

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR JABAR	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA BANDUNG
8	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif
9	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	
10	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	
11	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	
12	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA
13	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja
14	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Optimasi pelaksanaan merit sistem dan good governance bagi perangkat daerah serta Good Corporate Governance (GCG) bagi Perumda
15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan berbasis Kearifan Lingkungan	Optimasi Industri Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (Tourism, Trading and Investment) UTAMA
16	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif
17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan Jalan Umum
		Penataan Transportasi Publik, *Smart Parking* dan *Cashless Payment*
		Optimasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis
		Optimasi Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh serta *Urban Farming*
18	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	PRAKARSA Bandung UTAMA
19	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Optimasi pengelolaan sampah dan lingkungan hidup Bandung UTAMA
20	Program Pengurangan Risiko Bencana	Pengendalian bencana hidrometeorologi peningkatan ketangguhan kota (Bandung resilience culture)
21	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas).	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktrem
21	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial
22	Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	PRAKARSA Bandung UTAMA

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR JABAR	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA BANDUNG
23	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional.	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset, baik milik pemerintah maupun Perumda untuk peningkatan PAD
		Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: *hasil analisis, 2025*

3.2.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Bandung ditekankan melalui pendekatan tematik. Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi sektoral, dan transformasi berkelanjutan yang menjadi basis penajaman strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2025–2029. Adapun arahan kebijakan tematik dibagi berdasarkan 12 sektor strategis yang saling terkait, meliputi:

1. **Demografi – Mengubah Bonus Demografi Menjadi Daya Ungkit Produktivitas**
   Kota Bandung tengah berada dalam momentum bonus demografi yang dapat menjadi kekuatan utama pembangunan, dengan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi. Untuk itu, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, vokasi, dan penyediaan lapangan kerja yang layak. Pengelolaan migrasi, pengendalian urbanisasi, dan penyediaan hunian yang terjangkau juga menjadi isu strategis, untuk menghindari tekanan sosial dan infrastruktur akibat pertumbuhan penduduk yang tidak merata.
2. Ekonomi dan Kesejahteraan – Menumbuhkan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Tangguh

   Pembangunan ekonomi Kota Bandung diarahkan pada transformasi ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta penciptaan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan mengatasi ketimpangan antar wilayah serta meningkatkan pendapatan per kapita warga Bandung. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga dilakukan melalui program kewirausahaan komunitas, akses keuangan inklusif, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri masa depan.
3. Infrastruktur dan Tata Ruang – Menyusun Kota yang Terhubung, Tertata, dan Resilien

   Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, perbaikan layanan transportasi publik, dan integrasi transportasi ramah lingkungan. Tata ruang kota dirancang untuk menghindari konversi lahan yang tidak terkendali.

   Revitalisasi pusat kota, pembangunan vertikal yang efisien, dan pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) menjadi prioritas utama dalam merancang kota yang efisien, sehat, dan resilien terhadap bencana.

4. **Lingkungan Hidup – Menuju Bandung Tangguh Iklim dan Rendah Emisi**
   Pendekatan ini menekankan pada penguatan ketahanan kota terhadap dampak krisis iklim, melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem. Peningkatan ruang terbuka hijau, konservasi daerah resapan air, dan pengurangan emisi menjadi langkah utama.

   Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan teknologi, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur publik, juga menjadi strategi krusial dalam menekan jejak karbon kota.

5. Pendidikan dan Kesehatan – Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Adaptif

   Penguatan pendidikan dasar, peningkatan keterampilan abad 21, dan digitalisasi sekolah menjadi strategi utama untuk mendorong anak-anak Bandung tumbuh dalam ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkualitas. Di sisi kesehatan, intervensi diarahkan pada penguatan layanan primer seperti puskesmas, digitalisasi layanan posyandu, dan intervensi gizi terpadu untuk menekan stunting dan penyakit tidak menular.

6. Teknologi dan Inovasi – Mewujudkan Bandung Sebagai Kota Cerdas dan Inovatif

   Pengembangan Bandung sebagai smart city dilakukan melalui integrasi layanan publik digital, penguatan open data, dan infrastruktur digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pusat inovasi warga, inkubasi startup, dan kemitraan dengan perguruan tinggi akan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis teknologi dan solusi perkotaan cerdas.

7. Keamanan dan Ketahanan Sosial – Menguatkan Kota Aman dan Tangguh Sosial

   Kebijakan diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, keamanan publik, dan kesiapsiagaan bencana. Program preventif berbasis komunitas dan peningkatan literasi digital menjadi pilar utama. Intervensi terhadap kelompok rentan juga diperkuat melalui program padat karya, pelatihan keterampilan hidup, dan perlindungan berbasis data warga.

8. **Regulasi dan Kebijakan – Mendorong Tata Kelola Berbasis Data dan Kolaborasi**
   Transformasi tata kelola difokuskan pada perencanaan berbasis bukti, penguatan sistem pengawasan digital, dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah kota akan mengembangkan regulasi dinamis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

9. **Politik – Mengarusutamakan Demokrasi Partisipatif dan Stabilitas Kebijakan**
   Mendorong tata kelola yang stabil dan inklusif, melalui pelibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan pembangunan. Demokrasi deliberatif di tingkat lokal diperkuat. Fokus pada harmonisasi kebijakan antar-lembaga dan keberlanjutan arah pembangunan lintas periode kepemimpinan menjadi prioritas strategis.

10. **Industri Kreatif – Menjadi Episentrum Ekonomi Kreatif Nasional**
Kebijakan diarahkan pada pengembangan ekosistem industri kreatif yang kompetitif secara global, melalui dukungan infrastruktur, pembiayaan, dan promosi. Kolaborasi dengan komunitas kreatif dan perguruan tinggi serta integrasi budaya lokal dalam produk kreatif menjadi kekuatan ekonomi baru Bandung.

11. Budaya – Menjadikan Budaya Lokal sebagai Sumber Daya Kota

Budaya bukan hanya warisan, tetapi sumber daya pembangunan. Pemerintah kota akan mengarusutamakan kebudayaan dalam perencanaan kota, kurikulum pendidikan, dan identitas visual ruang publik. Pemberdayaan komunitas seni, revitalisasi situs budaya, dan pengembangan festival budaya menjadi sarana membangun kohesi sosial dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

12. Pariwisata – Mewujudkan Bandung sebagai Destinasi Berkelas Dunia yang Berkelanjutan

Pariwisata berbasis komunitas, budaya, dan alam akan menjadi fokus pengembangan ke depan. Daya dukung lingkungan dan daya tampung kawasan akan dijadikan acuan utama perencanaan pariwisata. Pemerintah kota juga akan mendorong integrasi promosi digital, infrastruktur pariwisata inklusif, dan sistem manajemen destinasi cerdas.

Penentuan arah kebijakan memerhatikan beberapa prinsip yaitu penguatan kapasitas lokal, pemanfaatan teknologi, dan pengarusutamaan keberlanjutan serta inklusivitas. Arah kebijakan RPJMD Kota Bandung tahun 2025-2029 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.8. Arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul	Perwujudan masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik dan membudayakan perilaku hidup sehat	
		Pemantapan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi	
		Perluasan akses layanan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat	
		Pemenuhan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	
		Pemantapan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	
		Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
		Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar.	
		Pemantapan *New Zero Stunting*	
		Perluasan pemantauan hasil eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	
		Optimalisasi ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
		Perwujudan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	
		Pemenuhan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/ atau bagi yang memiliki prestasi.	
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		Pemenuhan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat	
		Optimalisasi penerapan dan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	
		Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	
		Optimalisasi manajemen talenta dan prestasi peserta didik sampai ke tingkat nasional dan internasional	
		Pemenuhan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kompetensi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	
		Penuntasan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	
		Kemandirian masyarakat lokal untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	
		Pemantapan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	
		Pemantapan dan pemerataan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	
		Optimalisasi layanan sekolah terbuka dan pesantren, serta penguatan sekolah berbasis asrama	
		Optimalisasi ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	
		Pemerataan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		Penurunan ketimpangan gender dalam pembangunan.	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
2	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Optimalisasi penuntasan kemiskinan	
		Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif	
		Pemantapan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand.	
		Pemerataan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	
		Pemenuhan bantuan sosial secara tepat sasaran	
		Pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua	
		Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	
		Perwujudan kota yang aman dan tertib	
		Optimalisasi Penegakan hukum	
		Optimalisasi kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
		Pemantapan dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/ pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	Penerapan regulasi di daerah yang mendukung investasi dan meningkatkan daya saing daerah	
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	
		Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
		Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	
		Perwujudan e-government dan smart city	
		Pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Perwujudan pemda yang akuntabel dan berorinetasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional.	
		Optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	
		Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.	
		Penguatan integritas partai politik	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
4	Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah	
		Pemantapan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi produk pangan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	
		Optimalsasi pemanfaatan lahan terbatas melalui metode budidaya pertanian perkotaan (*urban farming*) seperti vertikultur, hidroponik, akuaponik, aeroponik, tanaman buah dalam pot (tabulampot), dan metode lain yang sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan	
		Optimaliasi dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD)	
		Pemantapan kualitas tanah dan hasil pertanian melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang terjangkau serta ramah lingkungan	
		Optimalisasi pengolahan hasil panen menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi di level petani dan pembentukan daerah agrowisata yang hijau dan asri dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas, kesejahteraan dan peluang usaha tani	
		Pemerataan akses pinjaman keuangan digital dan non digital bagi pendirian atau peningkatan skala usaha pertanian perkotaan melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi	
		Pemantapan penyediaan infastruktur dasar yang merata bagi petani perkotaan di seluruh wilayah dan fasilitasi infrastruktur lanjutan milik bersama di wilayah tertentu guna menciptakan iklim tani yang produktif dan berdaya saing	
		Optimalisasi peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk segar dan olahan pertanian melalui jejaring media *online* dan *offline*	
		Pemantapan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan	
		Optimalisasi pemanfaatan lahan terbatas melalui metode perikanan budidaya perkotaan bagi petambak seperti bioflok, akuakultur, akuaponik, budidaya ikan dalam ember (budikdamber) dan metode lain yang sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan produk perikanan secara mandiri dan berkelanjutan	
		Optimalisasi pengolahan hasil perikanan budidaya konsumsi menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi di level petambak dan pembentukan daerah agrowisata yang hijau dan asri dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas, kesejahteraan dan peluang usaha petambak	
		Pemerataan akses pinjaman keuangan digital dan non digital bagi pendirian atau peningkatan skala usaha perikanan budidaya melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi	
		Optimalisasi peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk segar dan olahan perikanan budidaya melalui jejaring media *online* dan *offline*	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Pemantapan penyediaan infastruktur dasar yang merata bagi petambak di seluruh wilayah dan fasilitasi infrastruktur lanjutan milik bersama di wilayah tertentu guna menciptakan iklim perikanan budidaya yang produktif dan berdaya saing	
		Pemantapan pemanfaatan teknologi digital sebagai basis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan sumber daya perikanan budidaya oleh petambak dengan insentif dan disinsentif sebagai bentuk timbal balik (*feedback*) monitoring/ evaluasi	
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	
		Pemantapan kualitas air dan hasil perikanan budidaya melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang terjangkau serta ramah lingkungan	
		Pemantapan pengembangan kawasan industri pengolahan dan manufaktur untuk industri kecil menengah (IKM) yang terpadu, ramah lingkungan dan berbasis klaster industri unggulan.	
		Optimalisasi kolaborasi antarpelaku usaha IKM untuk proses produksi yang bersifat massal, dapat dilakukan melalui koperasi, kesepakatan/ perjanjian atau asosiasi. Kolaborasi dapat dilakukan per segmen proses produksi untuk kemudian segmen lain dilanjutkan oleh masing-masing pelaku.	
		Perwujudan integrasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	
		Pendayagunaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	
		Optimalisasi *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.	
		Optimalisasi pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik	
		Perwujudan daya tarik wisata bertaraf internasional	
		Pemantapan pemasaran pariwisata bertaraf internasional	
		Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
		Pendayagunaan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique* & *high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	
		Implementasi riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	
		Pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau secara berkelanjutan	
		Pemantapan deregulasi, pemberian kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Pemantapan dan pemerataan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/ atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area weak *coverage* di kawasan perkotaan.	
		Optimalisasi ekosistem digital dalam rangka transformasi digital.	
		Pendayagunaan rantai nilai global untuk perkembangan kota jasa dan optimalisasi pengembangan sektor unggulan	
		Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	
		Peningkatan kontribusi UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	
		Perwujudan UMKM yang mandiri dan berdaya saing	
		Optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka meningkatkan daya saing, produktivitas dan akuntabilitas BUMD	
		Optimalisasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	
		Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular* economy pada kawasan perkotaan.	
		Optimalisasi pelestarian hutan kota dan ekosistem alami, serta ruang terbuka hijau (RTH)	
		Perwujudan kota dengan pengelolaan risiko bencana yang baik	
		Perwujudan kota dengan ketahanan daerah yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim	
		Optimalisasi tingkat ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
		Pemerataan akses dan layanan infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas serta TIK	
		Optimalisasi akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	
		Optimalisasi infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan	
		Pemerataan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang memenuhi standar	
		Pemantapan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/ atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	
		Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Optimalisasi pengembangan multi-infrastructure backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	
		Pendayagunaan jalan daerah untuk peningkatan perekonomian daerah dan mendukung konektvitas nasional	
		Optimalisasi jalan tol interregional dan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	
		Optimalisasi Elektrifikasi jalur KA dan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	
		Pendayagunaan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.	
		Optimalisasi koordinasi pembangunan ketenagalistrikan	
		Pemantapan implementasi dan monev pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	
		Optimalisasi penerapan dan monev panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	
		Pemantapan implementasi dan monev rencana tata ruang	
		Penuntasan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*)	
		Penuntasan pelaksanaan reforma agraria.	
		Pendayagunaan hasil kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan perkotaan	
		Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	
		Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
5	Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran	Optimalisasi penerapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila.	
		Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	

Sumber: *hasil analisis, 2025*

3.2.3. Dukungan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen RPJMD ini selain ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota, juga untuk mendukung pembangunan nasional. Sinergi pembangunan pusat dan daerah juga dinyatakan dalam bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kota terhadap berbagai kebijakan nasional, sesuai karakteristik dan kewenangan kota. Selain mendukung Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, Pemerintah Daerah Kota juga mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan pengawasan Kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Program Strategis Nasional, meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
    1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
    2) Sekolah Rakyat; dan
    3) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
    1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
    2) Makan Bergizi Gratis.
d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
    1) Pengendalian Inflasi;
    2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
    3) Kemudahan perizinan di daerah.
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka keselarasan program strategis nasional dan program prioritas kepala daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Strategis Nasional Jaminan Kesehatan Nasional diselaraskan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Optimasi Layanan Kesehatan Prima, untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
2. Program Strategis Nasional Perluasan Akses Pendidikan diimplementasikan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Pelaksanaan Bandung Pintar, yang memberikan kesempatan belajar setara bagi seluruh warga dengan dukungan sarana, prasarana, dan beasiswa.

3. Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) diharmonisasikan dengan Program Prioritas Kepala Daerah: Optimasi Ketahanan dan Akses Pangan yang Cukup dan Terjangkau, guna menjamin ketersediaan pangan sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
4. Program Strategis Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disinergikan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, yang dikombinasikan dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru dan Penyerapan Tenaga Kerja untuk mempercepat perbaikan taraf hidup warga.
5. Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat diselaraskan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja, guna meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pendidikan berbasis komunitas yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
6. Program Strategis Nasional Kemudahan Perizinan di Daerah diimplementasikan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi, untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan mendorong investasi daerah.
7. Program Strategis Nasional Pengendalian Inflasi disinergikan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan sektor ekonomi lokal, yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.
8. Program Strategis Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharmonisasikan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM, untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas yang mandiri dan inklusif.
9. Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah diselaraskan melalui Program Prioritas Kepala Daerah: Pengembangan hunian layak dan terjangkau, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah

Program Strategis Nasional tersebut dijalankan dengan pendekatan kolaborasi multipihak, pemanfaatan infrastruktur *smart city*, dan pengukuran dampak berbasis data untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.

Dalam rangka implementasi dan optimalisasi Program Strategis Nasional di Kota Bandung dilengkapi dengan kebijakan berupa Tim Pelaksana, Roadmap, Rencana Kerja/ Aksi Tahunan yang berbasis pada Data dan Pemetaan Kinerja Sasaran serta mitigasi atas perencanaan dan monitoring/evaluasi berkala.



BAB

IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan program perangkat daerah dan penguatan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan arah pembangunan Kota Bandung periode 2025–2029. Selain memuat daftar program prioritas dan indikator kinerja perangkat daerah beserta target dan pagu indikatifnya, bab ini juga menyajikan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). Penyajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap upaya pembangunan memiliki arah yang jelas, dasar yang terukur, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah tahun 2025–2029 disusun untuk menjawab permasalahan struktural dan tantangan transformatif yang dihadapi Kota Bandung secara sistemik, sekaligus untuk pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inovatif. Program yang direncanakan untuk pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana program perangkat daerah yang dimuat pada tabel di bawah dilengkapi dengan outcome yang akan dicapai, indikator kinerja dan target per tahun. Pencapaian target kinerja membutuhkan pendanaan yang mencukupi dan bersifat indikatif. Pendanaan pembangunan kota selain mengandalkan APBD, juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun non pemerintah.

Rencana program perangkat daerah Kota Bandung sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.964.660.047.289,57		1.999.790.627.479,11		2.035.766.409.852,66		2.072.617.225.075,54		2.108.612.894.559,30	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.132.245.166.948,94		1.135.057.898.434,70		1.166.554.984.431,20		1.192.818.452.347,27		1.215.627.521.560,15	
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Dinas Pendidikan Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,10	86,13	86,45	1.132.245.166.948,94	86,50	1.135.057.898.434,70	86,55	1.166.554.984.431,20	86,60	1.192.818.452.347,27	86,65	1.215.627.521.560,15	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					830.244.440.340,63		862.453.767.044,41		866.818.515.321,46		877.286.217.123,27		890.347.189.613,90	
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas	Angka Putus Sekolah Jenjang PAUD (%)	0,00	0,00	0,00	36.613.257.464,00	0,00	41.763.912.234,00	0,00	42.443.414.632,50	0,00	43.251.233.260,92	0,00	44.074.442.820,77	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Penduduk Usia PAUD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan PAUD (Rasio)	19,48	19,47	19,46		19,45		19,44		19,43		19,42		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Kesetaraan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas	Persentase Anak Tidak Sekolah (%)	3,37	3,35	3,34	4.017.290.857,00	3,33	6.816.898.584,45	3,32	6.975.805.275,17	3,31	7.142.657.300,43	3,30	7.317.851.926,95	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi SMA ke atas (%)	58,08	58,09	58,10		58,12		58,13		58,15		58,17		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Dasar Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah Jenjang SD (%)	0,69	0,66	0,64	160.437.283.472,31	0,61	179.082.062.981,93	0,59	179.082.062.981,93	0,56	184.872.437.981,93	0,54	185.277.606.731,93	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Penduduk Usia SD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SD (Rasio)	30,20	30,18	30,16		30,15		30,13		30,11		30,09		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP (%)	1,84	1,79	1,74	254.395.542.067,32	1,69	253.567.587.966,32	1,64	255.834.111.051,02	1,59	258.213.960.289,96	1,54	260.712.801.990,84	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Penduduk Usia SMP terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SMP (Rasio)	34,82	34,72	34,63		34,54		34,45		34,35		34,26		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas	Iklim Inklusivitas Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas (Nilai)	60,02	62,52	65,02	512.556.100,00	67,52	756.511.350,00	70,02	794.336.917,50	72,52	834.053.763,38	75,02	875.756.451,54	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas (Nilai)	76,25	77,15	78,05		78,95		79,85		80,75		81,65		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas (Nilai)	73,60	74,60	75,60		76,60		77,60		78,60		79,60		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,02	62,52	65,02	353.975.400,00	67,52	577.500.000,00	70,02	606.375.000,00	72,52	636.693.750,00	75,02	668.528.437,50	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	76,25	77,15	78,05		78,95		79,85		80,75		81,65		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	73,60	74,60	75,60		76,60		77,60		78,60		79,60		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	62,48	64,88	67,28	208.104.000,00	69,68	840.000.000,00	72,08	882.000.000,00	74,48	926.100.000,00	76,88	972.405.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	74,96	76,46	77,96		79,46		80,96		82,46		83,96		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	73,35	74,35	75,35		76,35		77,35		78,35		79,35		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas	Skor Kemampuan Literasi Dasar PAUD (Nilai)	69,90	70,00	70,70	59.362.747.850,00	71,20	59.701.799.648,31	72,10	59.972.794.897,72	72,90	60.257.339.910,51	73,50	60.556.112.173,66	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD (Nilai)	70,85	73,35	75,85	191.151.808.480,00	78,35	191.732.983.200,00	80,85	191.959.058.432,25	83,35	192.196.437.426,11	85,85	200.215.295.968,67	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	58,12	61,02	63,92		66,82		69,72		72,62		75,52		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	82,05	83,15	84,25	118.098.772.950,00	85,35	119.433.559.837,50	86,45	119.685.190.329,37	87,55	119.949.402.345,84	88,65	120.226.824.963,14	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	69,71	71,21	72,21		74,21		75,71		77,21		78,71		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten (%)	98,59	98,65	98,87	5.093.101.700,00	99,05	8.180.951.241,90	99,23	8.583.365.804,00	99,40	9.005.901.094,19	99,58	9.449.563.148,90	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten (%)	99,47	99,50	99,56		99,62		99,68		99,74		99,80		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	80,82	92,72	93,22		93,72		94,22		94,72		95,22		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.823.820.000,00		1.915.011.000,00		2.010.761.550,00		2.111.299.627,50		2.216.864.608,88	
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik yang memahami mulok Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (%)		90,00	92,00	759.170.000,00	92,50	797.128.500,00	93,00	836.984.925,00	94,00	878.834.171,25	95,00	922.775.879,82	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik yang memahami mulok Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (%)		90,00	92,00	759.170.000,00	92,50	797.128.500,00	93,00	836.984.925,00	94,00	878.834.171,25	95,00	922.775.879,81	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Iklim Pendidikan Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas	Persentase Peserta Didik yang memahami mulok Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD Dikmas (%)		90,00	92,00	305.480.000,00	92,50	320.754.000,00	93,00	336.791.700,00	94,00	353.631.285,00	95,00	371.312.849,25	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					346.620.000,00		363.951.000,00		382.148.550,00		401.255.977,50		421.318.776,37	
Meningkatnya Indeks Distribusi Guru Lingkup Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Nilai)	0,68	0,70	0,71	346.620.000,00	0,73	363.951.000,00	0,74	382.148.550,00	0,76	401.255.977,50	0,77	421.318.776,37	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.584.997.527.016,60		1.613.339.266.240,08		1.642.362.875.781,71		1.672.092.421.652,70		1.701.132.075.201,81	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.047.395.476.242,35		1.124.632.698.486,70		1.124.782.698.486,70		1.119.782.698.486,70		1.124.782.698.486,71	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	90,05	90,06	545.543.481.905,35	90,07	621.884.517.635,70	90,08	612.477.915.215,70	90,09	556.045.040.141,70	90,09	540.242.773.101,71	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Sekretariat Dinas Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat RSUD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup RSUD Kota Bandung (%)	100,00	100,00	100,00	140.763.970.154,00	100,00	114.786.100.490,00	100,00	126.878.994.418,00	100,00	135.642.269.535,00	100,00	143.382.054.523,00	1.02.0.00.0.00.02.0006 - RSUD
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lungkup RSUD Bandung Kiwari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup RSUD Kota Bandung RSUD Bandung Kiwari (%)	100,00	100,00	100,00	190.418.902.200,00	100,00	215.268.229.620,00	100,00	216.795.052.582,00	100,00	220.474.557.840,00	100,00	226.522.013.624,00	1.02.0.00.0.00.02.0007 - RSUD Bandung Kiwari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup RSKGM	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup RSUD Kota Bandung RSKGM (%)	100,00	100,00	100,00	38.571.840.592,00	100,00	40.596.569.350,00	100,00	36.533.454.880,00	100,00	75.523.549.579,00	100,00	82.538.575.847,00	1.02.0.00.0.00.02.0008 - RSKGM
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup UPTD Laboratorium	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Laboratorium (%)	100,00	100,00	100,00	6.100.000.000,00	100,00	6.100.000.000,00	100,00	6.100.000.000,00	100,00	6.100.000.000,00	100,00	6.100.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0010 - UPT Laboratorium
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD P2KT	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD P2KT (%)	100,00	100,00	100,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0009 - UPT Pelayanan Keselamatan Terpadu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani. (%)	100,00	100,00	100,00	1.094.282.000,00	100,00	1.094.282.000,00	100,00	1.094.282.000,00	100,00	1.094.282.000,00	100,00	1.094.282.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	100,00	100,00	100,00	988.719.000,00	100,00	988.719.000,00	100,00	988.719.000,00	100,00	988.719.000,00	100,00	988.719.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	100,00	100,00	100,00	2.067.851.000,00	100,00	2.067.851.000,00	100,00	2.067.851.000,00	100,00	2.067.851.000,00	100,00	2.067.851.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	100,00	100,00	100,00	910.000.000,00	100,00	910.000.000,00	100,00	910.000.000,00	100,00	910.000.000,00	100,00	910.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	100,00	100,00	100,00	3.642.281.000,00	100,00	3.642.281.000,00	100,00	3.642.281.000,00	100,00	3.642.281.000,00	100,00	3.642.281.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	100,00	100,00	100,00	1.606.800.000,00	100,00	1.606.800.000,00	100,00	1.606.800.000,00	100,00	1.606.800.000,00	100,00	1.606.800.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Babakansari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	100,00	100,00	100,00	1.930.000.000,00	100,00	1.930.000.000,00	100,00	1.930.000.000,00	100,00	1.930.000.000,00	100,00	1.930.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	100,00	100,00	100,00	1.667.820.000,00	100,00	1.667.820.000,00	100,00	1.667.820.000,00	100,00	1.667.820.000,00	100,00	1.667.820.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	100,00	100,00	100,00	832.823.091,00	100,00	832.823.091,00	100,00	832.823.091,00	100,00	832.823.091,00	100,00	832.823.091,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	100,00	100,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	100,00	100,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cetarip	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan ((%) dan Satuan orang)	100,00	100-0	100-0	1.065.000.000,00	100-0	1.065.000.000,00	100-0	1.065.000.000,00	100-0	1.065.000.000,00	100-0	1.065.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	775.000.000,00	100,00	775.000.000,00	100,00	775.000.000,00	100,00	775.000.000,00	100,00	775.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	1.567.000.000,00	100,00	1.567.000.000,00	100,00	1.567.000.000,00	100,00	1.567.000.000,00	100,00	1.567.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	100,00	100,00	100,00	1.185.500.000,00	100,00	1.185.500.000,00	100,00	1.185.500.000,00	100,00	1.185.500.000,00	100,00	1.185.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	100,00	100,00	100,00	2.520.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	100,00	100,00	100,00	909.000.000,00	100,00	909.000.000,00	100,00	909.000.000,00	100,00	909.000.000,00	100,00	909.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	100,00	100,00	100,00	2.045.000.000,00	100,00	2.045.000.000,00	100,00	2.045.000.000,00	100,00	2.045.000.000,00	100,00	2.045.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	100,00	100,00	100,00	911.160.000,00	100,00	911.160.000,00	100,00	911.160.000,00	100,00	911.160.000,00	100,00	911.160.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	100,00	100,00	100,00	732.301.186,00	100,00	732.301.186,00	100,00	732.301.186,00	100,00	732.301.186,00	100,00	732.301.186,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	100,00	100,00	100,00	1.563.000.000,00	100,00	1.563.000.000,00	100,00	1.563.000.000,00	100,00	1.563.000.000,00	100,00	1.563.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Cijerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	100,00	100,00	100,00	1.191.157.244,00	100,00	1.191.157.244,00	100,00	1.191.157.244,00	100,00	1.191.157.244,00	100,00	1.191.157.244,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	100,00	100,00	100,00	1.000.650.000,00	100,00	1.000.650.000,00	100,00	1.000.650.000,00	100,00	1.000.650.000,00	100,00	1.000.650.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	100,00	100,00	100,00	1.386.270.000,00	100,00	1.386.270.000,00	100,00	1.386.270.000,00	100,00	1.386.270.000,00	100,00	1.386.270.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Cinambo	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	100,00	100,00	100,00	1.560.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	100,00	100,00	100,00	567.200.000,00	100,00	567.200.000,00	100,00	567.200.000,00	100,00	567.200.000,00	100,00	567.200.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	100,00	100,00	100,00	2.367.201.391,00	100,00	2.367.201.391,00	100,00	2.367.201.391,00	100,00	2.367.201.391,00	100,00	2.367.201.391,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	100,00	100,00	100,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	100,00	100,00	100,00	1.857.600.000,00	100,00	1.857.600.000,00	100,00	1.857.600.000,00	100,00	1.857.600.000,00	100,00	1.857.600.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Dago	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	100,00	100,00	100,00	2.779.782.000,00	100,00	2.779.782.000,00	100,00	2.779.782.000,00	100,00	2.779.782.000,00	100,00	2.779.782.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	100,00	100,00	100,00	1.102.450.000,00	100,00	1.102.450.000,00	100,00	1.102.450.000,00	100,00	1.102.450.000,00	100,00	1.102.450.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	100,00	100,00	100,00	4.592.551.000,00	100,00	4.592.551.000,00	100,00	4.592.551.000,00	100,00	4.592.551.000,00	100,00	4.592.551.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingup UPTD Puskesmas Girimande	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	100,00	100,00	100,00	512.000.000,00	100,00	512.000.000,00	100,00	512.000.000,00	100,00	512.000.000,00	100,00	512.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	100,00	100,00	100,00	1.494.500.000,00	100,00	1.494.500.000,00	100,00	1.494.500.000,00	100,00	1.494.500.000,00	100,00	1.494.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	100,00	100,00	100,00	2.059.530.000,00	100,00	2.059.530.000,00	100,00	2.059.530.000,00	100,00	2.059.530.000,00	100,00	2.059.530.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	100,00	100,00	100,00	3.429.463.811,00	100,00	3.429.463.811,00	100,00	3.429.463.811,00	100,00	3.429.463.811,00	100,00	3.429.463.811,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	100,00	100,00	100,00	871.500.000,00	100,00	871.500.000,00	100,00	871.500.000,00	100,00	871.500.000,00	100,00	871.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Jatihandap	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	100,00	100,00	100,00	929.500.000,00	100,00	929.500.000,00	100,00	929.500.000,00	100,00	929.500.000,00	100,00	929.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	100,00	100,00	100,00	683.635.000,00	100,00	683.635.000,00	100,00	683.635.000,00	100,00	683.635.000,00	100,00	683.635.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	100,00	100,00	100,00	2.976.580.000,00	100,00	2.976.580.000,00	100,00	2.976.580.000,00	100,00	2.976.580.000,00	100,00	2.976.580.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	100,00	100,00	100,00	1.946.458.500,00	100,00	1.946.458.500,00	100,00	1.946.458.500,00	100,00	1.946.458.500,00	100,00	1.946.458.500,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	100,00	100,00	100,00	810.999.000,00	100,00	810.999.000,00	100,00	810.999.000,00	100,00	810.999.000,00	100,00	810.999.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	100,00	100,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	100,00	100,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	100,00	100,00	100,00	3.678.409.509,00	100,00	3.678.409.509,00	100,00	3.678.409.509,00	100,00	3.678.409.509,00	100,00	3.678.409.509,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	100,00	100,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	100,00	100,00	100,00	1.710.000.000,00	100,00	1.710.000.000,00	100,00	1.710.000.000,00	100,00	1.710.000.000,00	100,00	1.710.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	100,00	100,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	100,00	100,00	100,00	2.836.000.000,00	100,00	2.836.000.000,00	100,00	2.836.000.000,00	100,00	2.836.000.000,00	100,00	2.836.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	100,00	100,00	100,00	1.661.425.000,00	100,00	1.661.425.000,00	100,00	1.661.425.000,00	100,00	1.661.425.000,00	100,00	1.661.425.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	100,00	100,00	100,00	764.900.000,00	100,00	764.900.000,00	100,00	764.900.000,00	100,00	764.900.000,00	100,00	764.900.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	100,00	100,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	100,00	100,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	100,00	100,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	100,00	100,00	100,00	1.562.000.000,00	100,00	1.562.000.000,00	100,00	1.562.000.000,00	100,00	1.562.000.000,00	100,00	1.562.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	100,00	100,00	100,00	3.569.200.000,00	100,00	3.569.200.000,00	100,00	3.569.200.000,00	100,00	3.569.200.000,00	100,00	3.569.200.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	100,00	100,00	100,00	1.262.396.000,00	100,00	1.262.396.000,00	100,00	1.262.396.000,00	100,00	1.262.396.000,00	100,00	1.262.396.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	100,00	100,00	100,00	1.077.244.000,00	100,00	1.077.244.000,00	100,00	1.077.244.000,00	100,00	1.077.244.000,00	100,00	1.077.244.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	100,00	100,00	100,00	1.972.000.000,00	100,00	1.972.000.000,00	100,00	1.972.000.000,00	100,00	1.972.000.000,00	100,00	1.972.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah liangkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	1.193.358.000,00	100,00	1.193.358.000,00	100,00	1.193.358.000,00	100,00	1.193.358.000,00	100,00	1.193.358.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Puter	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	100,00	100,00	100,00	2.476.815.000,00	100,00	2.476.815.000,00	100,00	2.476.815.000,00	100,00	2.476.815.000,00	100,00	2.476.815.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	100,00	100,00	100,00	1.052.218.000,00	100,00	1.052.218.000,00	100,00	1.052.218.000,00	100,00	1.052.218.000,00	100,00	1.052.218.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	100,00	100,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Salam	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	100,00	100,00	100,00	861.279.300,00	100,00	861.279.300,00	100,00	861.279.300,00	100,00	861.279.300,00	100,00	861.279.300,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	100,00	100,00	100,00	1.215.683.000,00	100,00	1.215.683.000,00	100,00	1.215.683.000,00	100,00	1.215.683.000,00	100,00	1.215.683.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	100,00	100,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	100,00	100,00	100,00	796.906.000,00	100,00	796.906.000,00	100,00	796.906.000,00	100,00	796.906.000,00	100,00	796.906.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	100,00	100,00	100,00	1.530.000.000,00	100,00	1.530.000.000,00	100,00	1.530.000.000,00	100,00	1.530.000.000,00	100,00	1.530.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukajadi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	100,00	100,00	100,00	799.400.000,00	100,00	799.400.000,00	100,00	799.400.000,00	100,00	799.400.000,00	100,00	799.400.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	100,00	100,00	100,00	2.916.000.000,00	100,00	2.916.000.000,00	100,00	2.916.000.000,00	100,00	2.916.000.000,00	100,00	2.916.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	100,00	100,00	100,00	3.244.251.000,00	100,00	3.244.251.000,00	100,00	3.244.251.000,00	100,00	3.244.251.000,00	100,00	3.244.251.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	100,00	100,00	100,00	1.432.902.150,00	100,00	1.432.902.150,00	100,00	1.432.902.150,00	100,00	1.432.902.150,00	100,00	1.432.902.150,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	100,00	100,00	100,00	720.000.000,00	100,00	720.000.000,00	100,00	720.000.000,00	100,00	720.000.000,00	100,00	720.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	100,00	100,00	100,00	2.210.000.000,00	100,00	2.210.000.000,00	100,00	2.210.000.000,00	100,00	2.210.000.000,00	100,00	2.210.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	100,00	100,00	100,00	958.000.000,00	100,00	958.000.000,00	100,00	958.000.000,00	100,00	958.000.000,00	100,00	958.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	100,00	100,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	100,00	100,00	100,00	1.660.000.000,00	100,00	1.660.000.000,00	100,00	1.660.000.000,00	100,00	1.660.000.000,00	100,00	1.660.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	100,00	100,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	100,00	100,00	100,00	1.290.000.000,00	100,00	1.290.000.000,00	100,00	1.290.000.000,00	100,00	1.290.000.000,00	100,00	1.290.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	100,00	100,00	100,00	2.779.329.209,00	100,00	2.779.329.209,00	100,00	2.779.329.209,00	100,00	2.779.329.209,00	100,00	2.779.329.209,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					529.202.287.428,25		478.569.794.994,88		507.443.404.536,51		542.172.950.407,50		566.212.603.956,60	
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup Bidang Kesmas	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup Bidang Kesmas (%)	90,42	91,00	91,50	2.030.965.331,00	92,00	2.095.808.603,00	92,50	2.095.808.603,00	93,00	2.095.808.603,00	93,50	2.095.808.603,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup Bidang Kesmas (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup Bidang Kesmas (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Citarip (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Citarip (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Citarip (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Dago	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Kesehatan Ibu Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	86,56	87,15	87,55	76.161.199,00	88,12	78.592.823,00	88,57	78.592.823,00	88,98	78.592.823,00	89,14	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	90,42	91,00	91,50		92,00		92,50		93,00		93,50		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Puter	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Salam	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Suka jadi	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Kesehatan Ibu lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Cakupan KF lengkap sesuai standar Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	90,42	91,00	91,50	76.161.199,00	92,00	78.592.823,00	92,50	78.592.823,00	93,00	78.592.823,00	93,50	78.592.823,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	9,24	9,14	9,00		8,84		8,63		8,48		8,20		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Persentase Capaian Ibu Hamil Mendapatkan pemeriksaan K6 Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	86,56	87,15	87,55		88,12		88,57		88,98		89,14		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Menurunnya Kematian Bayi lingkup Bidang Kesmas	Jumlah Kematian Bayi Lingkup Bidang Kesmas (Orang)	244,00	242,00	241,00	1.565.450.272,00	239,00	1.643.626.678,00	237,00	1.643.626.678,00	235,00	1.643.626.678,00	233,00	1.643.626.678,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup Bidang P2P	Jumlah Kematian Bayi Lingkup Bidang P2P (Orang)	244,00	242,00	241,00	1.150.980.540,00	239,00	1.150.980.540,00	237,00	1.150.980.540,00	235,00	1.150.980.540,00	233,00	1.150.980.540,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Jumlah Kematian Bayi lingkup UPTD Pukesmas Cipamokolan (%)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Dago	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Dago (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Puter	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Puter (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Salam	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Menurunnya Kematian Bayi lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Jumlah Kematian Bayi Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (Orang)	244,00	242,00	241,00	101.866.155,00	239,00	104.797.769,00	237,00	104.797.769,00	235,00	104.797.769,00	233,00	104.797.769,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Status Gizi lingkup Bidang Kesmas	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup Bidang Kesmas (%)	4,80	4,70	4,60	3.332.916.764,00	4,40	3.332.916.764,00	4,30	3.332.916.764,00	4,20	3.332.916.764,00	4,10	3.332.916.764,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Dago	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Puter	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Salam	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Status Gizi lingkup PTD Puskesmas Sarijadi	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Suka jadi	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Status Gizi lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	4,80	4,70	4,60	124.984.377,00	4,40	124.984.377,00	4,30	124.984.377,00	4,20	124.984.377,00	4,10	124.984.377,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup Bidang kesmas	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup Bidang kesmas (%)	0,00	66,90	69,00	274.606.922,00	70,60	274.606.922,00	72,70	274.606.922,00	74,70	274.606.922,00	77,00	274.606.922,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Dago	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Puter	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Salam	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Indeks Kesehatan Lingkungan Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	0,00	66,90	69,00	10.297.759,00	70,60	10.297.759,00	72,70	10.297.759,00	74,70	10.297.759,00	77,00	10.297.759,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup Bidang Kesmas	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup Bidang Kesmas (%)	20,00	20,00	25,00	1.691.042.318,00	30,00	1.691.042.318,00	40,00	1.691.042.318,00	50,00	1.691.042.318,00	60,00	1.691.042.318,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup Bidang Yankes	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup Bidang Yankes (%)	20,00	20,00	25,00	60.000.000,00	30,00	60.000.000,00	40,00	60.000.000,00	50,00	60.000.000,00	60,00	60.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Dago	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Puter	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Salam	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	20,00	20,00	25,00	65.664.088,00	30,00	65.664.088,00	40,00	65.664.088,00	50,00	65.664.088,00	60,00	65.664.088,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup Bidang Kesmas	Persentase lanjut usia yang mandiri Bidang Kesmas (%)	74,30	75,00	77,00	2.105.708.640,00	79,00	2.105.708.640,00	82,00	2.105.708.640,00	83,00	2.105.708.640,00	84,00	2.105.708.640,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cetarip	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Dago	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Puter	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Salam	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Kesehatan Lanjut Usia lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Persentase lanjut usia yang mandiri Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	74,30	75,00	77,00	9.930.938,00	79,00	9.930.938,00	82,00	9.930.938,00	83,00	9.930.938,00	84,00	9.930.938,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup Bidang P2P	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup Bidang P2P (%)	2,00	5,00	10,00	2.643.996.698,00	15,00	2.812.026.758,00	20,00	2.812.026.758,00	25,00	2.812.026.758,00	30,00	2.812.026.758,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup Bidang P2P (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup Bidang P2P (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong ()	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	2,00	5,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	9,40	10,00	15,00	90.727.377,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	35,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	2,00	5,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Dago	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	2,00	5,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Kopo lingkup	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Puter	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	9,40	10,00	15,00	90.727.377,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	35,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	2,00	5,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Salam	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Terkendalinya Penyakit Tidak Menular lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	2,00	5,00	10,00	90.727.377,00	15,00	97.028.505,00	20,00	97.028.505,00	25,00	97.028.505,00	30,00	97.028.505,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Terkendalinya penyakit menular lingkup Bidang P2P	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup Bidang P2P (%)	83,00	85,00	87,00	3.526.202.528,75	89,00	3.786.905.464,45	91,00	3.786.905.464,45	93,00	3.786.905.464,45	95,00	3.786.905.464,45	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup Bidang P2P (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase kematian Dengue Lingkup Bidang P2P (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup Bidang P2P (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	100,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Cakupan Diabetes Melitus dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	2,00	5,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Cakupan Hipertensi dalam pengendalian Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	9,40	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	3,30	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran g	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran g (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran g
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran g (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran g
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran g (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran g
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ciboleran g (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Ciboleran g
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Dago	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	96,77	97,31	97,96		98,61				99,26		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,21		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas PasawahanPersentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir JatiAngka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		95,00		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas PasundanAngka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Puter	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas RusunawaAngka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Salam	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	96,77	97,31	97,96	123.202.593,00	98,61	130.758.955,00	99,26	130.758.955,00	99,91	130.758.955,00	100,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,61		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Terkendalinya penyakit menular lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Succes Rate) Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	83,00	85,00	87,00	123.202.593,00	89,00	130.758.955,00	91,00	130.758.955,00	93,00	130.758.955,00	95,00	130.758.955,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (treatment coverage) Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	96,77	97,31	97,96		98,61		99,26		99,91		100,00		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Persentase kematian Dengue Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	0,40	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
	Persentase ODHIV Dalam Pengobatan ARV (on ARV) Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	50,40	51,00	51,00		52,00		52,00		53,00		53,00		1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang SDK	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lingkup Bidang SDK (%)	52,50	53,00	53,50	223.400.512.599,50	54,00	106.388.978.144,43	54,50	106.388.978.145,06	55,00	114.888.978.145,05	55,50	121.317.486.123,15	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang Yankes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lingkup Bidang Yankes (%)	52,50	53,00	53,50	92.700.000,00	54,00	260.000.000,00	54,50	260.000.000,00	55,00	260.000.000,00	55,50	260.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar Lingkup Bidang Yankes	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup Bidang Yankes (%)	55,08	57,26	57,46	21.428.335.078,00	57,66	22.278.400.804,00	57,86	22.278.400.804,00	58,06	22.278.400.804,00	58,27	22.278.400.804,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Kota Bandung	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup RSUD Kota Bandung (%)	55,08	57,26	57,46	29.388.960.663,00	57,66	86.849.971.067,00	57,86	161.016.365.280,00	58,06	200.829.964.913,00	58,27	204.530.690.518,00	1.02.0.00.0.00.02.0006 - RSUD
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Bandung Kiwari	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup RSUD Bandung Kiwari (%)	55,08	57,26	57,46	43.668.444.528,00	57,66	47.712.663.346,00	57,86	84.763.817.879,00	58,06	96.768.199.667,00	58,27	110.678.619.633,00	1.02.0.00.0.00.02.0007 - RSUD Bandung Kiwari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSKGM	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup RSKGM (%)	55,08	57,26	57,46	132.932.374.755,00	57,66	132.932.374.755,00	57,86	50.588.435.550,00	58,06	25.000.000.000,00	58,27	25.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0008 - RSKGM
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD P2KT	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD P2KT (%)	55,08	57,26	57,46	2.175.000.000,00	57,66	3.000.000.000,00	57,86	3.000.000.000,00	58,06	3.000.000.000,00	58,27	3.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0009 - UPT Pelayanan Keselamatan Terpadu
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Laboratorium	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Laboratorium (%)	55,08	57,26	57,46	500.000.000,00	57,66	500.000.000,00	57,86	500.000.000,00	58,06	500.000.000,00	58,27	500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0010 - UPT Laboratorium
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cetarip (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Dago	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Puter	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Salam	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar UPT lingkup Puskesmas Sukagalih	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Talaga BodasPersentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)	55,08	57,26	57,46	4.724.548,00	57,66	21.875.000,00	57,86	21.875.000,00	58,06	21.875.000,00	58,27	21.875.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Lingkup Sekretariat	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN Lingkup Sekretariat (%)	46,00	50,00	55,00	4.912.884.912,00	60,00	5.912.884.912,00	65,00	6.003.384.912,00	70,00	6.003.384.912,00	73,00	6.003.384.912,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang SDK	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN Lingkup Bidang SDK (%)	46,00	50,00	55,00	90.500.000,00	60,00	90.500.000,00	65,00	0,00	70,00	0,00	73,00	0,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Kota Bandung	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN Lingkup RSUD Kota Bandung (%)	46,00	50,00	55,00	1.625.982.159,00	60,00	1.625.982.159,00	65,00	1.625.982.159,00	70,00	1.625.982.159,00	73,00	1.625.982.159,00	1.02.0.00.0.00.02.0006 - RSUD
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Bandung Kiwari	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN Lingkup RSUD Bandung Kiwari (%)	46,00	50,00	55,00	2.000.000.000,00	60,00	500.000.000,00	65,00	500.000.000,00	70,00	500.000.000,00	73,00	500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0007 - RSUD Bandung Kiwari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSKGM	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN Lingkup RSKGM (%)	46,00	50,00	55,00	0,00	60,00	50.000.000,00	65,00	50.000.000,00	70,00	50.000.000,00	73,00	50.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0008 - RSKGM
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					5.794.305.845,00		7.286.415.257,50		7.286.415.257,50		7.286.415.257,50		7.286.415.257,50	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang SDK	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar Lingkup Bidang SDK (%)	62,50	62,50	62,57	1.377.871.845,00	63,75	2.370.181.257,50	65,00	2.370.181.257,50	66,25	2.370.181.257,50	67,50	2.370.181.257,50	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang P2P	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar Lingkup Bidang P2P (%)	62,50	62,50	62,57	3.164.301.000,00	63,75	3.164.301.000,00	65,00	3.164.301.000,00	66,25	3.164.301.000,00	67,50	3.164.301.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup Bidang Kesmas	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar Lingkup Bidang Kesmas (%)	62,50	62,50	62,57	251.933.000,00	63,75	251.933.000,00	65,00	251.933.000,00	66,25	251.933.000,00	67,50	251.933.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Kota Bandung	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Kota Bandung (%)	62,50	62,50	62,57	1.000.000.000,00	63,75	1.000.000.000,00	65,00	1.000.000.000,00	66,25	1.000.000.000,00	67,50	1.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0006 - RSUD
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Bandung Kiwari	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar lingkup RSUD Bandung Kiwari (%)	62,50	62,50	62,57	100.000,00	63,75	200.000.000,00	65,00	200.000.000,00	66,25	200.000.000,00	67,50	200.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0007 - RSUD Bandung Kiwari
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar lingkup RSKGM	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar lingkup RSKGM (%)	62,50	62,50	62,57	100.000,00	63,75	300.000.000,00	65,00	300.000.000,00	66,25	300.000.000,00	67,50	300.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0008 - RSKGM
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					375.100.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Lingkup Bidang SDK	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan PIRT Patuh Regulasi Lingkup Bidang SDK (%)	100,00	100,00	100,00	375.100.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.230.357.501,00		2.230.357.501,00		2.230.357.501,00		2.230.357.501,00		2.230.357.501,00	
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup Bidang Kesmas	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup Bidang Kesmas (%)		17,00	19,00	557.589.341,00	21,00	557.589.341,00	23,00	557.589.341,00	25,00	557.589.341,00	30,00	557.589.341,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ahmad Yani (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0040 - UPT Puskesmas Ahmad Yani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Antapani	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Antapani (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0065 - UPT Puskesmas Antapani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Arcamanik (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0035 - UPT Puskesmas Arcamanik
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Astanaanyar	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Astana Anyar (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0049 - UPT Puskesmas Astana Anyar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Surabaya (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0037 - UPT Puskesmas Babakan Surabaya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakan Tarogong (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0054 - UPT Puskesmas Babakan Tarogong
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babakansari (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0036 - UPT Puskesmas Babakan Sari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babatan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Babatan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - UPT Puskesmas Babatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Balai Kota (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0031 - UPT Puskesmas Balaikota
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Campaka Arum	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cempaka Arum (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0083 - UPT Puskesmas Cempaka Arum
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Caringin	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Caringin (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - UPT Puskesmas Caringin
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Citarip	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Citarip (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0052 - UPT Puskesmas Citarip
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0056 - UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0057 - UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibiru (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0077 - UPT Puskesmas Cibiru
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibolerang (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0059 - UPT Puskesmas Cibolerang
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cibuntu (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0061 - UPT Puskesmas Cibuntu
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cigadung (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0033 - UPT Puskesmas Cigadung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cigondewah (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0063 - UPT Puskesmas Cigondewah
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Baru (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0043 - UPT Puskesmas Cijagra Baru
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijagra Lama (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0044 - UPT Puskesmas Cijagra Lama
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cijerah (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0062 - UPT Puskesmas Cijerah
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cikutra Lama (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0026 - UPT Puskesmas Cikutra Lama
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cilengkrang (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0078 - UPT Puskesmas Cilengkrang
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cinambo (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0076 - UPT Puskesmas Cinambo
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipadung (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0079 - UPT Puskesmas Cipadung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipaku (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - UPT Puskesmas Cipaku
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Cipamokolan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0084 - UPT Puskesmas Cipamokolan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ciumbuleuit (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0011 - UPT Puskesmas Ciumbuleuit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Dago	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Dago (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - UPT Puskesmas Dago
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Derwati	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Derwati (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0085 - UPT Puskesmas Derwati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Garuda	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Garuda (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0058 - UPT Puskesmas Garuda
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Girimande	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Girimande (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0071 - UPT Puskesmas Girimande
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Griya Antapani (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0064 - UPT Puskesmas Griya Antapani
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Gumuruh (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0039 - UPT Puskesmas Gumuruh
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0017 - UPT Puskesmas Ibrahim Aji
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Jajaway (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0066 - UPT Puskesmas Jajaway
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Jatihandap (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0068 - UPT Puskesmas Jatihandap
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Karangsetra (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0013 - UPT Puskesmas Karangsetra
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Kopo	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Kopo (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0055 - UPT Puskesmas Kopo
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Kujang Sari (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0088 - UPT Puskesmas Kujangsari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ledeng (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0012 - UPT Puskesmas Ledeng
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Lio Genteng (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0050 - UPT Puskesmas Liogenteng
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Mandala Mekar (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0069 - UPT Puskesmas Mandala Mekar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Margahayu Raya (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0027 - UPT Puskesmas Margahayu Raya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Mengger	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Mengger (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0089 - UPT Puskesmas Mengger
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Moch. Ramdan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0046 - UPT Puskesmas Moch. Ramdhan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Neglasari (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0067 - UPT Puskesmas Neglasari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Padasuka (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0034 - UPT Puskesmas Padasuka
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pagarsih (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0048 - UPT Puskesmas Pagarsih
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pamulang (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0070 - UPT Puskesmas Pamulang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Panghegar (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0080 - UPT Puskesmas Panghegar
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Panyileukan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0081 - UPT Puskesmas Panyileukan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasawahan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0090 - UPT Puskesmas Pasawahan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Jati (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0075 - UPT Puskesmas Pasirjati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Kaliki (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0018 - UPT Puskesmas Pasirkaliki
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasir Luyu (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0047 - UPT Puskesmas Pasirluyu
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasirlayung (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0072 - UPT Puskesmas Pasirlayung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pasundan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0045 - UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Pelindung Hewan (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0051 - UPT Puskesmas Pelindung Hewan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Puter	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Puter (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - UPT Puskesmas Puter
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Riung Bandung (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0082 - UPT Puskesmas Riung Bandung
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Rusunawa (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0073 - UPT Puskesmas Rusunawa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Salam	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Salam (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0028 - UPT Puskesmas Salam
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sarijadi (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0014 - UPT Puskesmas Sarijadi
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sekejati (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0087 - UPT Puskesmas Sekejati
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sekeloa (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0086 - UPT Puskesmas Sekeloa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sindang Jaya (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0032 - UPT Puskesmas Sindang Jaya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukajadi	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Suka Jadi (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0015 - UPT Puskesmas Sukajadi
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukagalih (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0038 - UPT Puskesmas Sukagalih
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukahaji (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0060 - UPT Puskesmas Sukahaji
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukapakir (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0053 - UPT Puskesmas Sukapakir
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukaraja (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - UPT Puskesmas Sukaraja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukarasa (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - UPT Puskesmas Sukarasa
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Sukawarna (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0016 - UPT Puskesmas Sukawarna
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Suryalaya (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0042 - UPT Puskesmas Suryalaya
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Talaga Bodas (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0041 - UPT Puskesmas Talagabodas
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Tamansari (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0029 - UPT Puskesmas Tamansari
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Tamblong (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0030 - UPT Puskesmas Tamblong
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat Lingkup UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah (%)		17,00	19,00	20.909.602,00	21,00	20.909.602,00	23,00	20.909.602,00	25,00	20.909.602,00	30,00	20.909.602,00	1.02.0.00.0.00.02.0074 - UPT Puskesmas Ujungberung Indah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					562.337.780.399,69		562.671.427.591,40		573.419.258.861,56		584.309.049.543,49		590.162.379.891,19	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					175.709.862.737,01		186.224.413.838,00		183.086.040.308,00		186.245.039.883,00		189.882.035.116,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,40	81,46	81,52	96.009.381.361,12	81,58	97.867.027.000,00	81,64	99.593.053.000,00	81,70	101.379.490.000,00	81,76	103.228.453.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai (%)	100,00	100,00	100,00	367.143.907,47	100,00	316.000.000,00	100,00	316.000.000,00	100,00	316.000.000,00	100,00	316.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0010 - UPT Daerah Aliran Sungai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi (%)	100,00	100,00	100,00	607.544.654,89	100,00	608.000.000,00	100,00	608.000.000,00	100,00	608.000.000,00	100,00	608.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0014 - UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD OP Bojonegara	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Bojonegara (%)	100,00	100,00	100,00	171.573.429,81	100,00	167.000.000,00	100,00	167.000.000,00	100,00	167.000.000,00	100,00	167.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0015 - UPT Bojonegara
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD OP Cibeunying	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Cibeunying (%)	100,00	100,00	100,00	139.203.956,46	100,00	141.000.000,00	100,00	141.000.000,00	100,00	141.000.000,00	100,00	141.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPT Cibeunying
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD OP Gedebage	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Gedebage (%)	100,00	100,00	100,00	233.441.577,95	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPT Gedebage
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD OP Karees	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Karees (%)	100,00	100,00	100,00	163.603.583,52	100,00	158.000.000,00	100,00	158.000.000,00	100,00	158.000.000,00	100,00	158.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPT Karees
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Lingkup UPTD OP Tegallega	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Tegallega (%)	100,00	100,00	100,00	266.235.087,99	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPT Tegallega
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD OP Ujungberung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD OP Ujungberung (%)	100,00	100,00	100,00	243.352.910,39	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	100,00	182.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0008 - UPT Ujungberung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan (%)	100,00	100,00	100,00	7.528.403.076,21	100,00	7.530.000.000,00	100,00	7.530.000.000,00	100,00	7.530.000.000,00	100,00	7.530.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0011 - UPT Peralatan dan Perbengkelan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,75	82,85	83,00	55.720.567.668,81	83,10	63.920.237.616,00	83,20	58.946.582.116,00	83,30	60.010.262.616,00	83,40	59.881.582.116,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal (%)	100,00	100,00	100,00	97.291.892,39	100,00	98.000.000,00	100,00	98.000.000,00	100,00	98.000.000,00	100,00	98.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0013 - UPT Produksi Campuran Aspal
Meningkatnya Kualitas RTH Publik Pemakaman Lingkup UPTD I	Persentase Terpeliharanya RTH Publik Pemakaman (%)	36,00	37,00	38,00	3.238.787.360,00	39,00	3.400.000.000,00	40,00	3.400.000.000,00	41,00	3.500.000.000,00	42,00	3.950.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0006 - UPT pengelolaan pemakaman 1
Meningkatnya Kualitas RTH Publik Pemakaman Lingkup UPTD II	Persentase Terpeliharanya RTH Publik Pemakaman (%)	36,00	37,00	38,00	3.228.468.000,00	39,00	3.400.000.000,00	40,00	3.400.000.000,00	41,00	3.500.000.000,00	42,00	4.100.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0007 - UPT pengelolaan pemakaman 2
Meningkatnya Kualitas RTH Publik Pemakaman Lingkup UPTD III	Persentase Terpeliharanya RTH Publik Pemakaman (%)	36,00	37,00	38,00	4.763.745.962,00	39,00	5.027.563.692,00	40,00	5.097.563.692,00	41,00	5.147.563.692,00	42,00	5.750.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0008 - UPT pengelolaan pemakaman 3
Meningkatnya Kualitas RTH Publik Pemakaman Lingkup UPTD IV	Persentase Terpeliharanya RTH Publik Pemakaman (%)	36,00	37,00	38,00	2.931.118.308,00	39,00	3.062.585.530,00	40,00	3.101.841.500,00	41,00	3.160.723.575,00	42,00	3.425.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0009 - UPT pengelolaan pemakaman 4
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					89.411.982.286,86		91.084.785.000,00		91.211.653.000,00		91.342.961.000,00		91.478.865.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Resapan Air lingkup Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kapasitas Resapan Air (%)	5,47	7,80	10,13	14.932.300.152,11	12,47	15.100.000.000,00	14,80	15.100.000.000,00	17,14	15.100.000.000,00	19,47	15.100.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Meningkatnya Kapasitas Parkir Air lingkup Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Kapasitas Parkir air (Kolam Retensi) (%)	56,55	84,28	91,61	13.841.694.819,28	98,93	14.536.000.000,00	106,26	14.536.000.000,00	113,59	14.536.000.000,00	120,91	14.536.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai lingkup Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Kapasitas Aliran Sungai (%)	100,00	100,00	100,00	57.135.780.469,92	100,00	57.824.000.000,00	100,00	57.824.000.000,00	100,00	57.824.000.000,00	100,00	57.824.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA (%)	100,00	100,00	100,00	3.502.206.845,55	100,00	3.624.785.000,00	100,00	3.751.653.000,00	100,00	3.882.961.000,00	100,00	4.018.865.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0010 - UPT Daerah Aliran Sungai
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4.295.910.994,00		4.500.000.000,00		4.700.000.000,00		4.800.000.000,00		5.100.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan air bersih lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air bersih (%)	90,81	90,86	90,88	4.295.910.994,00	90,88	4.500.000.000,00	90,92	4.700.000.000,00	90,94	4.800.000.000,00	90,96	5.100.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.077.405.219,00		3.200.000.000,00		3.400.000.000,00		3.600.000.000,00		3.800.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan air limbah domestik lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Setempat (%)	59,01	59,04	59,05	3.077.405.219,00	59,08	3.200.000.000,00	59,08	3.400.000.000,00	59,10	3.600.000.000,00	59,12	3.800.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					45.461.346.444,17		46.369.873.000,00		46.762.724.000,00		47.162.324.000,00		47.568.911.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan lingkup Bidang Drainase dan Trotoar	Persentase Cakupan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik (%)	29,93	30,32	30,72	34.749.536.900,00	31,12	35.360.000.000,00	31,52	35.360.000.000,00	31,91	35.360.000.000,00	32,31	35.360.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Meningkatnya kualitas drainase lingkungan lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik (%)	15,78	15,90	16,02	5.388.265.254,00	16,15	5.500.000.000,00	16,27	5.700.000.000,00	16,39	5.900.000.000,00	16,52	6.100.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Bojonegara	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Bojonegara (%)	100,00	100,00	100,00	494.095.296,00	100,00	511.389.000,00	100,00	529.288.000,00	100,00	547.814.000,00	100,00	566.989.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0015 - UPT Bojonegara
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Cibeunying	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Cibeunying (%)	100,00	100,00	100,00	1.105.469.100,00	100,00	1.144.162.000,00	100,00	1.184.208.000,00	100,00	1.225.656.000,00	100,00	1.268.555.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPT Cibeunying

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Gedebage	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Gedebage (%)	100,00	100,00	100,00	784.013.503,89	100,00	811.455.000,00	100,00	839.857.000,00	100,00	869.253.000,00	100,00	899.678.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPT Gedebage
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Karees	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Karees (%)	100,00	100,00	100,00	875.586.908,67	100,00	906.233.000,00	100,00	937.952.000,00	100,00	970.781.000,00	100,00	1.004.759.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPT Karees
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Tegallega	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Tegallega (%)	100,00	100,00	100,00	732.861.346,26	100,00	758.512.000,00	100,00	785.061.000,00	100,00	812.539.000,00	100,00	840.979.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPT Tegallega
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan lingkup UPTD OP Ujungberung	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan lingkup UPTD OP Ujungberung (%)	100,00	100,00	100,00	1.331.518.135,35	100,00	1.378.122.000,00	100,00	1.426.358.000,00	100,00	1.476.281.000,00	100,00	1.527.951.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0008 - UPT Ujungberung
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					36.239.104.234,37		16.981.943.328,94		23.156.919.015,45		14.272.765.792,21		17.629.082.360,72	
Meningkatnya Kualitas Bangunan yang Memenuhi Standar Administrasi dan Teknis Lingkup Bidang Cipta Karya	Persentase Kenaikan Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Mengajukan Permohonan PBG Dan SLF (%)	10,00	10,00	0,00	2.201.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	3.900.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
	Persentase Perencanaan Bangunan yang Memenuhi Standar Teknis dan Administratif (%)	0,00	0,00	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Memenuhi Standar Teknis Lingkup Bidang Bina Konstruksi	Persentase Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang memenuhi ketentuan Standar Teknis (%)	100,00	100,00	100,00	34.038.104.234,37	100,00	13.481.943.328,94	100,00	19.456.919.015,45	100,00	10.372.765.792,21	100,00	13.529.082.360,72	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					293.000.000,00		910.000.000,00		1.018.270.000,00		965.205.301,00		2.750.000.000,00	
Meningkatnya Wilayah yang Terencana Tata Bangunan dan Lingkungan Lingkup Bidang Cipta Karya	Persentase Wilayah Kota Bandung yang Termutakhirkan Data Bangunan Gedung (%)	55,00	87,00	0,00	293.000.000,00	0,00	910.000.000,00	0,00	1.018.270.000,00	0,00	965.205.301,00	0,00	2.750.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
	Persentase Wilayah Terencana yang Telah Memiliki Arahan Pengaturan Pemanfaatan Ruang (%)	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					202.567.425.984,28		206.408.934.754,46		212.465.695.063,11		218.643.066.667,28		224.558.486.414,47	
Meningkatnya cakupan rehabilitasi jalan tidak mantap secara swakelola	Persentase Panjang Jalan Tidak Mantap yang direhabilitasi secara swakelola (%)	100,00	100,00	100,00	5.808.281.744,65	100,00	6.011.572.000,00	100,00	6.221.978.000,00	100,00	6.439.748.000,00	100,00	6.665.140.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0013 - UPT Produksi Campuran Aspal
Meningkatnya kualitas jalan lingkungan lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	14,51	14,87	15,24	6.318.891.816,00	15,61	6.500.000.000,00	15,98	6.700.000.000,00	16,35	6.900.000.000,00	16,72	7.100.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap melalui pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan	Persentase panjang jalan tidak mantap yang ditingkatkan kondisinya (%)	6,77	2,99	3,52	128.354.320.244,45	4,35	130.209.858.754,46	4,38	134.915.847.063,11	4,42	139.702.170.667,28	4,43	144.184.854.414,47	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Terkendalinya kualitas bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan kewenangan kota yang dikendalikan kualitas bahan konstruksinya (%)	100,00	100,00	100,00	135.390.153,21	100,00	140.129.000,00	100,00	145.034.000,00	100,00	150.111.000,00	100,00	155.365.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0014 - UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Bojonegara	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Bojonegara (%)	100,00	100,00	100,00	3.235.139.971,58	100,00	3.348.370.000,00	100,00	3.465.563.000,00	100,00	3.586.858.000,00	100,00	3.712.399.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0015 - UPT Bojonegara
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Cibeunying	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Cibeunying (%)	100,00	100,00	100,00	5.041.326.035,49	100,00	5.217.773.000,00	100,00	5.400.396.000,00	100,00	5.589.410.000,00	100,00	5.785.040.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPT Cibeunying
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Gedebage	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Gedebage (%)	100,00	100,00	100,00	4.426.585.357,79	100,00	4.581.516.000,00	100,00	4.741.870.000,00	100,00	4.907.836.000,00	100,00	5.079.611.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPT Gedebage
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Karees	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Karees (%)	100,00	100,00	100,00	5.069.971.833,03	100,00	5.247.421.000,00	100,00	5.431.081.000,00	100,00	5.621.169.000,00	100,00	5.817.910.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPT Karees
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Tegallega	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Tegallega (%)	100,00	100,00	100,00	3.453.960.069,54	100,00	3.574.849.000,00	100,00	3.699.969.000,00	100,00	3.829.468.000,00	100,00	3.963.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPT Tegallega
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan Lingkup UPTD OP Ujungberung	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin lingkup UPTD OP Ujungberung (%)	100,00	100,00	100,00	4.596.565.998,54	100,00	4.757.446.000,00	100,00	4.923.957.000,00	100,00	5.096.296.000,00	100,00	5.274.667.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0008 - UPT Ujungberung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan penyelenggaraan trotoar inklusif secara merata dan berkelanjutan	Persentase Trotoar Inklusif (%)	61,38	61,99	62,58	36.126.992.760,00	62,85	36.820.000.000,00	63,14	36.820.000.000,00	63,42	36.820.000.000,00	63,70	36.820.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					780.000.000,00		477.500.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi Lingkup Bidang Bina Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis (%)	95,00	95,00	100,00	780.000.000,00	100,00	477.500.000,00	100,00	455.000.000,00	100,00	455.000.000,00	100,00	455.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.501.742.500,00		6.513.977.670,00		7.162.957.475,00		16.822.686.900,00		6.940.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang Lingkup Bidang Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dan Perencanaan Lainnya (Dokumen)	2,00	2,00	0,00	1.857.791.100,00	0,00	2.950.000.000,00	0,00	3.450.000.000,00	0,00	12.950.000.000,00	0,00	2.900.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
	Persentase Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun Tepat Waktu (%)	0,00	18,00	45,00		54,00		64,00		82,00		100,00		1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung Lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan (%)	81,00	82,00	82,50	2.643.951.400,00	83,00	3.563.977.670,00	83,50	3.712.957.475,00	84,00	3.872.686.900,00	84,50	4.040.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					245.304.972.413,93		259.502.394.570,61		263.635.233.807,79		267.988.053.656,60		277.023.619.725,87	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					57.041.920.578,43		57.414.000.000,00		58.626.000.000,00		59.598.000.000,00		60.716.000.000,00	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,00	85,00	85,80	48.885.374.562,43	85,80	49.214.000.000,00	85,82	50.226.000.000,00	85,88	50.998.000.000,00	85,90	51.916.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah lingkup UPTD Sarana dan Prasarana	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD Sarana dan Prasarana (%)	100,00	100,00	100,00	8.156.546.016,00	100,00	8.200.000.000,00	100,00	8.400.000.000,00	100,00	8.600.000.000,00	100,00	8.800.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0010 - UPT Sarana dan Prasarana
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					16.335.552.377,46		19.138.394.570,61		20.384.233.807,79		20.550.000.000,00		21.207.619.725,87	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman lingkup Bidang Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menempati Hunian yang Layak lingkup Bidang Perumahan (%)	86,59	88,13	89,32	10.335.552.377,46	91,30	12.938.394.570,61	93,29	13.884.233.807,79	95,27	13.850.000.000,00	97,25	14.207.619.725,87	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman lingkup UPTD Rusunawa	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menempati Hunian yang Layak lingkup UPTD Rusunawa (%)	86,59	88,13	89,32	6.000.000.000,00	91,30	6.200.000.000,00	93,29	6.500.000.000,00	95,27	6.700.000.000,00	97,25	7.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0009 - UPT Rusunawa
Meningkatnya Penyelenggaraan SLF Rumah Tinggal yang Memenuhi Standar Teknis Lingkup Bidang Cipta Karya	Jumlah dokumen rumah tinggal yang memenuhi standar teknis (Dokumen)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					45.152.330.457,34		45.200.000.000,00		45.450.000.000,00		45.800.000.000,00		46.150.000.000,00	
Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Persentase penurunan kumuh kriteria akses aman air minum tidak tersedia (%)	23,87	23,83	23,79	35.588.330.457,34	23,75	35.600.000.000,00	23,71	35.750.000.000,00	23,67	36.000.000.000,00	23,63	36.250.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kumuh kriteria drainase lingkungan (%)	36,72	36,56	36,39		36,23		36,06		35,90		35,74		1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kumuh kriteria Jalan lingkungan (%)	29,74	28,31	27,15		25,99		24,99		24,19		23,59		1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penurunan kumuh kriteria Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku (%)	9,69	9,68	9,67		9,66		9,65		9,64		9,63		1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman lingkup Bidang Perumahan	Persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung (%)	15,25	15,24	15,23	9.564.000.000,00	15,22	9.600.000.000,00	15,21	9.700.000.000,00	15,20	9.800.000.000,00	15,19	9.900.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					46.575.169.000,00		46.750.000.000,00		46.975.000.000,00		48.440.053.656,60		48.950.000.000,00	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman lingkup Bidang Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni lingkup Bidang Perumahan (%)	93,20	93,53	93,72	46.243.970.000,00	93,90	46.400.000.000,00	94,09	46.600.000.000,00	94,27	48.040.053.656,60	94,46	48.500.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni lingkup Bidang Kawasan Permukiman (%)	93,20	93,53	93,72	331.199.000,00	93,90	350.000.000,00	94,09	375.000.000,00	94,27	400.000.000,00	94,46	450.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					80.200.000.000,70		91.000.000.000,00		92.200.000.000,00		93.600.000.000,00		100.000.000.000,00	
Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah lingkup Bidang Pertanahan dan PSU	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik dari Serah Terima PSU Perumahan dan Pengadaan Lahan (%)	0,07	0,02	0,02	29.000.000.000,70	0,03	29.300.000.000,00	0,03	29.900.000.000,00	0,05	31.000.000.000,00	0,05	32.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota lingkup Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara lingkup Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota (%)	26,38	26,65	26,75	40.000.000.000,00	26,80	40.200.000.000,00	26,85	40.400.000.000,00	26,90	40.500.000.000,00	26,95	40.600.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota lingkup UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon (%)	26,38	26,65	26,75	3.400.000.000,00	26,80	3.500.000.000,00	26,85	3.700.000.000,00	26,90	3.800.000.000,00	26,95	4.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0011 - UPT Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon
Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota lingkup UPTD Pembibitan Tanaman	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara lingkup UPTD Pembibitan Tanaman (%)	26,38	26,65	26,75	1.800.000.000,00	26,80	1.900.000.000,00	26,85	2.000.000.000,00	26,90	2.000.000.000,00	26,95	2.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0008 - UPT Pembibitan Tanaman
Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota lingkup UPTD Tegallega	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara lingkup UPTD Tegallega (%)	26,38	26,65	26,75	6.000.000.000,00	26,80	6.100.000.000,00	26,85	6.200.000.000,00	26,90	6.300.000.000,00	26,95	6.400.000.000,00	1.04.2.10.1.03.0.2.0007 - UPT Tegallega
Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Pemakaman Lingkup Bidang Bina Konstruksi	Persentase Penambahan Perluasan RTH Publik Pemakaman (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	1.03.1.04.0.00.05.0000 - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					173.137.029.886,21		176.232.936.641,48		179.403.327.425,66		182.650.831.086,85		185.822.974.436,43	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					119.075.606.451,36		121.209.897.030,39		123.390.245.748,80		125.625.741.351,02		127.795.331.885,76	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,85	85,35	85,40	17.470.652.416,83	85,45	17.783.049.544,54	85,50	18.102.962.595,21	85,55	18.430.656.836,73	85,60	18.750.746.732,66	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,85	85,35	85,40	42.692.929.565,48	85,45	43.461.402.297,73	85,50	44.243.073.130,60	85,55	45.045.871.042,43	85,60	45.816.010.514,25	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	100,00	100,00	100,00	58.912.024.469,05	100,00	59.965.445.188,12	100,00	61.044.210.022,99	100,00	62.149.213.471,86	100,00	63.228.574.638,85	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,00	83,05	83,10		83,15		83,20		83,25		83,30		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					28.790.086.724,76		29.304.889.502,85		29.832.077.855,84		30.372.088.921,68		30.899.568.699,98	
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum Lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	18.054.255.773,00	100,00	18.377.088.459,00	100,00	18.707.688.136,00	100,00	19.046.328.932,00	100,00	19.377.111.362,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penegakan Perda (%)	45,00	60,25	73,51		86,75		100,00		100,00		100,00		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan Lingkup Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	1.616.521.543,00	100,00	1.645.426.971,00	100,00	1.675.027.831,00	100,00	1.705.348.668,00	100,00	1.734.965.891,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum Lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	930.800.139,00	100,00	947.444.011,00	100,00	964.488.315,00	100,00	981.947.184,00	100,00	999.000.910,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	45,00	60,25	73,51	8.188.509.269,76	86,75	8.334.930.061,85	100,00	8.484.873.573,84	100,00	8.638.464.137,68	100,00	8.788.490.536,98	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					7.012.540.939,49		7.137.933.946,87		7.266.343.768,75		7.397.876.880,93		7.526.357.686,68	
Meningkatnya kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana Lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai kualitas kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana (Nilai)	0,62	85,00	0,95	25.150.000,00	0,95	25.599.713,47	0,95	26.060.246,54	0,95	26.531.981,08	0,95	26.992.768,73	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas kajian resiko dan perencanaan terpadu Lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai kualitas kajian resiko dan perencanan terpadu (Nilai)	0,60	1,00	1,00	854.522.000,00	1,00	869.801.922,70	1,00	885.449.463,12	1,00	901.477.596,01	1,00	917.133.786,26	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik Lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai pengembangan sistem informasi diklat dan logistik (Nilai)	0,75	0,62	0,72	4.502.742.349,59	0,73	4.583.257.017,46	0,73	4.665.708.777,54	0,73	4.750.165.997,78	0,73	4.832.663.336,50	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan tematik kawasan rawan bencana Lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai penanganan tematik kawasan rawan bencana (Nilai)	0,73	0,58	0,58	663.711.510,00	0,63	675.579.502,36	0,73	687.733.025,24	0,73	700.182.156,20	0,73	712.342.397,45	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana Lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Nilai)	0,73	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,77	0,00	0,82	0,00	0,85	0,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai kualitas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Nilai)	0,57	0,53	0,53	850.990.079,90	0,53	866.206.847,44	0,53	881.789.713,27	0,53	897.751.598,50	0,53	913.343.078,41	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pengembangan sistem pemulihan bencana Lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai kualitas pengembangan sistem pemulihan bencana (Nilai)	0,40	0,45	0,45	115.425.000,00	0,45	117.488.943,44	0,45	119.602.543,04	0,45	121.767.551,36	0,45	123.882.319,33	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					18.258.795.770,60		18.580.216.161,37		18.914.660.052,27		19.255.123.933,22		19.601.716.164,01	
Meningkatnya Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	Persentase Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung (%)	0,00	1.513,00	3.277,00	1.347.664.400,00	5.294,00	1.371.922.359,20	7.479,00	1.396.616.961,67	100,00	1.421.756.066,98	100,00	1.447.347.676,18	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran (%)	36,42	47,02	60,26	1.072.335.600,00	73,51	1.091.637.640,80	86,75	1.111.287.118,33	100,00	1.131.290.286,46	100,00	1.151.653.511,62	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Terstandarisasi	Persentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Terstandarisasi (%)	42,34	49,08	55,95	6.282.798.336,00	63,93	6.395.888.706,05	74,50	6.511.014.702,76	85,73	6.628.212.967,41	100,00	6.747.520.800,82	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (%)	100,00	100,00	100,00	8.467.187.434,60	100,00	8.619.596.808,42	100,00	8.774.749.550,97	100,00	8.932.695.043,49	100,00	9.093.483.553,66	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap Lingkup UPTD Damkarmatan Wilayah Selatan	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	100,00	203.600.000,00	100,00	207.264.800,00	100,00	210.995.565,80	100,00	214.793.486,59	1.05.0.00.0.00.02.0009 - UPT DKPB Wilayah Selatan
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (UPTD Damkarmatan Wilayah Timur)	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	100,00	203.600.000,00	100,00	207.264.800,00	100,00	210.995.566,40	100,00	214.793.486,59	1.05.0.00.0.00.02.0008 - UPT DKPB Wilayah Timur
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap Lingkup UPTD Damkarmatan Wilayah Barat	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	100,00	203.600.000,00	100,00	207.264.800,00	100,00	210.995.566,40	100,00	214.793.486,60	1.05.0.00.0.00.02.0007 - UPT DKPB Wilayah Barat
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap Lingkup UPTD Damkarmatan Wilayah Utara	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	100,00	203.600.000,00	100,00	207.264.800,00	100,00	210.995.566,40	100,00	214.793.486,60	1.05.0.00.0.00.02.0006 - UPT DKPB Wilayah Utara
Meningkatnya layanan keberhasilan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100,00	100,00	100,00	288.810.000,00	100,00	286.770.646,90	100,00	291.932.518,54	100,00	297.187.303,88	100,00	302.536.675,35	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					53.453.790.464,25		54.409.611.128,96		55.388.427.762,12		56.391.051.986,13		57.370.409.700,90	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.936.326.610,25		33.525.269.347,96		34.128.381.381,12		34.746.162.808,13		35.349.608.237,79	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,95	86,00	86,05	32.936.326.610,25	86,10	33.525.269.347,96	86,15	34.128.381.381,12		34.746.162.808,13		35.349.608.237,79	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.805.012.103,00		2.855.169.230,00		2.906.533.081,00		2.959.146.245,00		3.010.538.489,48	
Meningkatnya peranan sosial masyarakat miskin dan rentan (Bidang Pemberdayaan sosial)	Persentase warga miskin dan rentan yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (%)		18,00	19,00	2.076.773.027,00	20,00	2.113.908.328,00	21,00	2.151.937.062,00	22,00	2.190.890.762,00	23,00	2.229.012.261,26	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan (Bidang Pemberdayaan sosial)	Persentase warga miskin dan rentan yang memperoleh solusi permasalahan (%)			100,00	728.239.076,00	100,00	741.260.902,00	100,00	754.596.019,00	100,00	768.255.483,00	100,00	781.526.228,22	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.374.687.377,00		8.524.437.267,00		8.677.789.971,00		8.834.872.647,00		8.988.310.122,63	
Meningkatnya peranan sosial masyarakat miskin dan rentan (Bidang Rehabiltiasi Sosial)	Capaian Layanan Standar Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	100,00	100,00	100,00	5.100.991.130,00	100,00	5.192.203.235,00	100,00	5.285.609.800,00	100,00	5.381.288.278,00	100,00	5.474.746.476,63	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya peranan sosial masyarakat miskin dan rentan lingkup UPT Pusat Kesejahteraan Sosial	Capaian Layanan Standar Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	100,00	100,00	100,00	3.273.696.247,00	100,00	3.332.234.032,00	100,00	3.392.180.171,00	100,00	3.453.584.369,00	100,00	3.513.563.646,00	1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPT Pusat Kesejahteraan Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					8.286.020.632,00		8.434.185.049,00		8.585.914.136,00		8.741.333.704,00		8.893.146.665,10	
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Data dan Informasi)	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		34,00	34,20	6.444.647.171,00	34,40	6.559.885.527,00	34,60	6.677.896.388,00	34,80	6.798.777.607,00	35,00	6.917.076.337,46	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan (Bidang Pemberdayaan Sosial)	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi (%)		25,00	25,00	1.841.373.461,00	25,00	1.874.299.522,00	25,00	1.908.017.748,00	25,00	1.942.556.097,00	25,00	1.976.070.327,64	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.051.743.742,00		1.070.550.235,00		1.089.809.193,00		1.109.536.582,00		1.128.806.185,90	
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Capaian layanan standar pelayanan Bidang Kebencanaan (%)	100,00	100,00	100,00	595.408.302,00	100,00	606.054.947,00	100,00	616.957.739,00	100,00	628.125.717,00	100,00	639.055.104,48	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya peranan sosial masyarakat miskin dan rentan (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Persentase wilayah siap siaga bencana (%)	7,00	14,00	21,00	456.335.440,00	28,00	464.495.288,00	35,00	472.851.454,00	42,00	481.410.865,00	49,00	489.751.081,42	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					146.194.918.808,77		148.809.066.903,04		151.486.108.455,57		154.228.263.235,47		156.906.784.634,08	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.897.745.079,00		25.092.632.333,00		26.347.263.951,00		27.664.627.148,00		29.047.858.505,00	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,10	86,20	86,30	23.897.745.079,00	86,40	25.092.632.333,00	86,50	26.347.263.951,00	86,60	27.664.627.148,00	86,70	29.047.858.505,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					476.360.407,50		82.252.177,88		86.364.786,77		90.683.026,11		95.217.177,41	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Lingkup Bidang Penempatan Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100,00	100,00	100,00	476.360.407,50	100,00	82.252.177,88	100,00	86.364.786,77	100,00	90.683.026,11	100,00	95.217.177,41	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					60.744.831.716,96		60.575.462.275,74		60.476.366.215,81		60.299.234.014,63		59.905.223.892,80	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Lingkup Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja (Harga Berlaku) (%)	1,44	1,44	1,45	1.370.270.000,00	1,46	1.507.297.000,00	1,47	1.658.026.700,00	1,48	1.823.829.370,00	1,49	2.006.212.307,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja (Harga Konstan) (%)	0,63	0,63	0,64		0,65		0,66		0,67		0,68		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Berlaku) (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	296.385.796,00	300.653.752,00	305.013.231,00		309.466.424,00		314.015.581,00		318.663.011,00		323.411.090,00		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Harga Konstan) (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	185.759.437,27	186.688.234,46	187.621.675,63		188.559.784,01		189.502.582,93		190.450.095,84		191.402.346,32		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten Lingkup bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja (%)	0,63	0,51	0,55	59.374.561.716,96	0,59	59.068.165.275,74	0,63	58.818.339.515,81	0,67	58.475.404.644,63	0,70	57.899.011.585,80	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi (%)	34,47	39,09	39,13		39,58		40,00		40,38		40,50		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja (%)	30,00	31,43	32,03		32,65		33,28		33,94		34,00		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					56.362.258.863,01		57.873.625.099,89		58.872.508.983,81		59.899.754.076,73		60.957.123.591,86	
Meningkatnya Kesempatan dan penempatan Kerja Lingkup Bidang Penempatan Kerja	Jumlah Lowongan Kerja Baru (Lowongan)	19.868,00	3.000,00	3.000,00	56.362.258.863,01	3.000,00	57.873.625.099,89	3.000,00	58.872.508.983,81	3.000,00	59.899.754.076,73	3.000,00	60.957.123.591,86	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)	51,00	52,00	53,00		54,00		55,00		56,00		57,00		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,03	0,03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,04		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Tenaga Kerja Formal (%)	56,54	56,57	56,60		56,63		56,66		56,69		56,72		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					4.713.722.742,30		5.185.095.016,53		5.703.604.518,18		6.273.964.970,00		6.901.361.467,01	
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja Lingkup Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	68,30	61,26	61,30	3.072.172.950,00	61,45	3.379.390.245,00	61,60	3.717.329.269,50	61,75	4.089.062.196,45	62,00	4.497.968.416,10	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	71,06	71,10	71,20		71,30		71,40		71,50		71,50		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industiral Lingkup Bidang hubungan Industrial dan Persyaratan kerja	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	90,79	81,00	81,00	1.641.549.792,30	81,00	1.805.704.771,53	82,00	1.986.275.248,68	82,00	2.184.902.773,55	82,00	2.403.393.050,91	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan (%)	0,77	0,93	1,02		1,10		1,19		1,29		1,38		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan (%)	21,60	21,60	21,82		22,22		22,61		22,98		23,33		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan (%)	0,21	0,28	0,32		0,36		0,39		0,43		0,46		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial (%)	0,43	0,70	0,68		0,66		0,63		0,61		0,58		2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					28.363.773.425,53		28.870.953.188,35		29.390.335.124,91		29.922.349.900,17		30.442.018.946,71	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.843.582.500,42		17.515.335.125,35		17.515.335.124,91		17.515.335.125,17		17.515.335.124,71	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,40	87,70	88,00	17.843.582.500,42	88,30	17.515.335.125,35	88,60	17.515.335.124,91	88,90	17.515.335.125,17	89,20	17.515.335.124,71	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.540.339.800,00		2.280.618.063,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,96	53,60	53,65	3.540.339.800,00	53,70	2.280.618.063,00	53,75	2.600.000.000,00	53,80	2.600.000.000,00	53,85	2.600.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.201.329.868,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Rasio)	15,62	14,84	14,07	449.576.000,00	13,30	850.000.000,00	12,52	850.000.000,00	11,75	950.000.000,00	10,98	950.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan lingkup UPTD PPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Rasio)	15,62	14,84	14,07	751.753.868,00	13,30	600.000.000,00	12,52	600.000.000,00	11,75	600.000.000,00	10,98	600.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0007 - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					2.704.780.125,11		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.232.014.775,00		2.232.014.775,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (Indeks)	76,87	76,90	76,93	2.704.780.125,11	76,96	2.000.000.000,00	76,99	2.000.000.000,00	77,02	2.232.014.775,00	77,05	2.232.014.775,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					270.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Data Gender dan Anak Lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	Efektivitas Kebijakan Data Gender dan Anak (%)	1,50	3,01	4,51	270.000.000,00	6,02	750.000.000,00	7,52	750.000.000,00	9,02	750.000.000,00	10,53	900.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.132.460.000,00		2.350.000.000,00		2.550.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	66,98	67,27	67,57	1.132.460.000,00	67,74	2.350.000.000,00	68,06	2.550.000.000,00	68,25	2.750.000.000,00	68,56	2.750.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.671.281.132,00		2.525.000.000,00		2.525.000.000,00		2.525.000.000,00		2.894.669.047,00	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	89,06	89,42	89,71	920.495.000,00	90,69	1.980.000.000,00	90,90	1.980.000.000,00	91,80	1.980.000.000,00	92,03	1.980.000.000,00	2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak lingkup UPTD PPA	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	89,06	89,42	89,71	750.786.132,00	90,69	545.000.000,00	90,90	545.000.000,00	91,80	545.000.000,00	92,03	914.669.047,00	2.08.2.13.0.00.04.0007 - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					46.431.221.599,09		46.870.467.613,37		48.405.957.078,09		48.380.832.012,21		48.871.741.378,28	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.480.957.078,09		40.380.957.078,09		40.380.957.078,09		40.380.957.078,09		40.380.957.078,28	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,35	85,55	85,75	40.480.957.078,09	86,00	40.380.957.078,09	86,25	40.380.957.078,09	86,50	40.380.957.078,09	86,75	40.380.957.078,28	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					179.686.700,00		266.510.535,28		2.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.321.810.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Pangan Lingkup Bidang Ketersediaan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan pangan (%)	0,00	100,00	100,00	179.686.700,00	100,00	266.510.535,28	100,00	2.200.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.321.810.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.759.532.503,00		5.055.000.000,00		4.805.000.000,00		5.430.000.300,00		5.782.050.300,00	
Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Lingkup Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan	Persentase Nilai AKE (? 10%) Lingkup Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan (%)	96,14	100,00	100,00	1.040.583.677,00	100,00	1.135.000.000,00	100,00	1.040.000.000,00	100,00	1.310.000.000,00	100,00	1.379.630.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Persentase Nilai AKP (? 10%) Lingkup Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan (%)	110,17	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Lingkup Bidang Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Lingkup Bidang Ketersediaan Pangan (Nilai)	94,88	94,90	95,15	3.718.948.826,00	95,40	3.920.000.000,00	95,65	3.765.000.000,00	95,80	4.120.000.300,00	96,00	4.402.420.300,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					628.108.818,00		688.000.000,00		575.000.000,00		700.000.000,00		746.220.000,00	
Meningkatnya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Lingkup Bidang Ketersediaan Pangan	Persentase Daerah rentan Rawan pangan ditangani (%)	33,33	58,33	66,67	628.108.818,00	75,00	688.000.000,00	83,33	575.000.000,00	91,67	700.000.000,00	100,00	746.220.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					382.936.500,00		480.000.000,00		445.000.000,00		569.874.634,12		640.704.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Lingkup Bidang Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan pangan (%)	100,00	100,00	100,00	382.936.500,00	100,00	480.000.000,00	100,00	445.000.000,00	100,00	569.874.634,12	100,00	640.704.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah Lingkup Bidang Pertanahan dan PSU	Persentase Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan (%)	100,00	100,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					364.781.431.622,46		371.304.180.101,49		377.983.858.560,91		384.826.005.705,91		391.509.376.635,46	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.462.018.851,30		77.496.368.930,96		78.793.811.100,25		84.125.308.008,01		89.290.475.449,02	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,85	80,85	80,95	25.462.018.851,30	81,00	25.508.449.365,96	81,10	26.138.579.541,25	81,15	30.706.053.907,01	81,20	35.871.221.348,01	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Bojonagara	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD OP Bojonegara (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Tegalega	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD OP Tegallega (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Cibeunying	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD OP Cibeunying (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Karees	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD OP Karees (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Kordoba	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD Persampahan Wilayah Kordoba (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Ubermanik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup UPTD Persampahan Wilayah Ubermanik (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pendapatan BLUD (Rupiah)	0,00	123.440.821.234,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	47.787.919.565,00	47.787.919.565,00	48.455.231.559,00	48.455.231.559,00	49.219.254.101,00	49.219.254.101,00	49.219.254.101,00	49.219.254.101,01	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.095.411.332,50		1.100.888.389,15		1.106.392.831,06		1.111.924.795,15		1.117.484.419,19	
Meningkatnya Penanganan Kasus Pencemaran sebagai Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Persentase Penyelesaian Kasus sesuai SOP (%)	100,00	100,00	100,00	1.095.411.332,50	100,00	1.100.888.389,15	100,00	1.106.392.831,06	100,00	1.111.924.795,15	100,00	1.117.484.419,19	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					6.120.875.484,65		6.151.479.862,07		6.182.237.261,39		6.213.148.447,69		6.244.214.189,93	
Meningkatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Kali Bersih aspek perencanaan lingkup Bidang Tata Lingkungan (%)	44,72	46,06	47,21	3.706.518.759,65	48,16	3.725.051.353,45	48,88	3.743.676.610,22	49,37	3.762.394.993,27	49,62	3.781.206.968,23	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Langit Biru aspek perencanaan lingkup Bidang Tata Lingkungan (%)	52,79	53,32	53,85		54,39		54,93		55,48		56,04		2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Kali Bersih aspek pelaksanaan lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH (%)	44,72	46,06	47,21	2.414.356.725,00	48,16	2.426.428.508,62	48,88	2.438.560.651,17	49,37	2.450.753.454,42	49,62	2.463.007.221,70	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Langit Biru aspek pelaksanaan lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH (%)	52,79	53,32	53,85		54,39		54,93		55,48		56,04		2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.802.978.687,11		2.816.993.580,54		2.831.078.548,45		2.845.233.941,19		2.859.460.110,90	
Meningkatnya konservasi lahan	Persentase Konservasi Daerah Tangkapan Air (%)	33,01	37,80	42,60	1.000.000.000,00	47,40	1.005.000.000,00	52,15	1.010.025.000,00	54,90	1.015.075.125,00	59,65	1.020.150.500,00	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase tumbuh tanaman di lokasi konservasi (%)	98,00	98,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati	Persentase Penambahan Luasan Lahan RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati (%)	0,00	0,00	7,67	901.489.343,56	27,74	905.996.790,27	23,66	910.526.774,23	15,55	915.079.408,09	5,00	919.654.805,45	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan RTH Publik Taman Keanekaragaman Hayati Terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	901.489.343,55	100,00	905.996.790,27	100,00	910.526.774,22	100,00	915.079.408,10	100,00	919.654.805,45	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					764.301.093,00		768.122.598,46		771.963.211,46		775.823.027,51		779.702.142,65	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3 (%)	60,00	70,00	80,00	764.301.093,00	90,00	768.122.598,46	100,00	771.963.211,46	100,00	775.823.027,51	100,00	779.702.142,65	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga (%)	5,00	7,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					904.500.000,00		909.022.500,00		913.567.612,50		918.135.450,56		922.726.127,81	
Meningkatnya Pengawasan sebagai Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara aspek perencanaan lingkup Bidang Tata Lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup aspek perencanaan lingkup Bidang Tata Lingkungan (%)	37,50	40,00	54,48	301.500.000,00	57,46	303.007.500,00	66,79	304.522.537,50	80,97	306.045.150,19	100,00	307.575.375,94	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengawasan sebagai Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara aspek pelaksanaan lingkup Bidang Tata Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup aspek pelaksanaan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH (%)	37,50	40,00	54,48	603.000.000,00	57,46	606.015.000,00	66,79	609.045.075,00	80,97	612.090.300,37	100,00	615.150.751,87	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.256.250.000,00		1.262.531.250,00		1.268.843.906,25		1.275.188.125,78		1.281.564.066,41	
Meningkatnya Pelibatan Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Lembaga/ Kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	6,90	10,34	7,61	1.256.250.000,00	7,99	1.262.531.250,00	8,39	1.268.843.906,25	8,81	1.275.188.125,78	9,25	1.281.564.066,41	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.708.500.000,00		1.717.042.500,00		1.725.627.712,50		1.734.255.851,06		1.742.927.130,32	
Meningkatnya Inovasi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang dinilai terkait pengelolaan lingkungan (%)	9,30	13,95	10,25	1.708.500.000,00	10,77	1.717.042.500,00	11,30	1.725.627.712,50	11,87	1.734.255.851,06	12,46	1.742.927.130,32	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kasus Pencemaran sebagai Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Persentase Penyelesaian Kasus sesuai SOP (%)	100,00	100,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					248.406.596.173,90		277.821.730.490,31		283.130.336.377,05		284.566.988.058,96		286.010.822.999,23	
Meningkatnya Pengurangan Sampah Rendah Emisi Karbon	Persentase Pengurangan sampah (%)	18,00	0,00	19,10	3.437.781.930,44	19,67	3.454.970.840,09	20,26	3.472.245.694,29	20,87	3.489.606.922,76	21,00	3.507.054.957,38	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengolahan Sampah Rendah Emisi Karbon	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,38	0,00	19,75	38.227.072.122,58	22,39	38.418.207.483,00	25,37	38.610.298.520,42	28,75	38.803.350.013,02	32,58	38.997.366.763,08	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Parameter Input Pengelolaan Sampah	Nilai Parameter Input Pengelolaan Sampah (Nilai)	26,00	0,00	26,00	41.748.386.439,85	27,00	41.957.128.371,96	28,00	42.166.914.013,82	28,00	42.377.748.583,89	28,00	42.589.637.326,81	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Parameter Proses Pengelolaan Sampah	Nilai Parameter Proses Pengelolaan Sampah (Nilai)	10,00	10,00	10,00	4.185.414.370,32	10,00	4.206.341.442,28	10,00	4.227.373.149,49	10,00	4.248.510.015,24	10,00	4.269.752.565,32	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Bojonagara	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Bojonagara (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,85	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Cibeunying	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah CIbeunying (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,85	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Kordoba	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Kordoba (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,85	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Ubermanik	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Ubermanik (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,86	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Tegalega	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Tegalega (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,86	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Karees	Nilai Total Parameter Output Pengelolaan Sampah lingkup UPTD Persampahan Wilayah Karees (Poin)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27.012.154.621,85	21,00	27.707.643.571,29	22,00	27.849.681.789,15	23,00	27.992.430.198,09	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD BLUD Pengelolaan Sampah	Nilai Parameter Output (Capaian Target/Kapasitas, Efisiensi Anggaran) Pengelolaan Sampah lingkup UPTD BLUD Pengelolaan Sampah (Poin)	16,00	17,00	19,00	160.807.941.310,71	20,00	27.712.154.621,86	21,00	28.407.643.571,29	22,00	28.549.681.789,15	23,00	28.692.430.198,10	2.11.1.03.0.00.01.0006 - UPT Pengelolaan Sampah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					32.632.446.183,13		33.215.955.156,60		33.813.502.698,64		34.425.584.288,14		35.023.462.149,44	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.211.133.827,13		29.649.921.424,60		30.091.354.633,64		30.534.919.888,14		30.782.637.953,44	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Bidang Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,75	85,76	85,77	29.211.133.827,13	85,79	29.649.921.424,60	85,81	30.091.354.633,64	85,84	30.534.919.888,14	85,87	30.782.637.953,44	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					169.224.643,00		184.454.861,00		201.055.799,00		219.150.820,00		238.874.394,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk Lingkup Bidang Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)		4,92	6,00	169.224.643,00	7,00	184.454.861,00	8,00	201.055.799,00	9,00	219.150.820,00	9,50	238.874.394,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		60,90	63,00		66,00		69,00		72,00		75,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					280.687.200,00		305.949.048,00		333.484.462,00		363.498.064,00		396.212.890,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100,00	100,00	280.687.200,00	100,00	305.949.048,00	100,00	333.484.462,00	100,00	363.498.064,00	100,00	396.212.890,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.971.400.513,00		3.075.629.823,00		3.187.607.804,00		3.308.015.516,00		3.605.736.912,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Kependudukan Lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)		100,00	100,00	250.191.923,20	100,00	258.968.031,10	100,00	268.396.577,10	100,00	278.534.906,45	100,00	303.603.047,99	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Kependudukan Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)		5,00	6,00	2.721.208.589,80	7,00	2.816.661.791,90	8,00	2.919.211.226,90	9,00	3.029.480.609,55	9,50	3.302.133.864,01	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					48.097.828.517,98		48.957.877.880,73		49.838.619.062,28		50.740.782.362,13		51.622.010.410,01	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.258.930.878,44		20.468.980.241,19		20.549.721.422,74		20.730.154.082,71		20.906.399.692,29	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,95	84,10	84,20	20.258.930.878,44	84,40	20.468.980.241,19	84,50	20.549.721.422,74	84,60	20.730.154.082,71	84,70	20.906.399.692,29	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					854.131.227,98		1.004.131.227,98		1.204.131.227,98		1.429.672.052,93		1.672.009.766,13	
Menjaga angka kelahiran total (Total fertility Rate/ TFR) pada replacement level lingkup Bidang Pengendalian penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	9,70	9,49	9,28	854.131.227,98	9,08	1.004.131.227,98	8,88	1.204.131.227,98	8,69	1.429.672.052,93	8,50	1.672.009.766,13	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wus Usia 15-49 Tahun Minimal (Rata-rata Anak per Wanita)	1,83	1,83	1,83		1,83		1,83		1,83		1,83		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					12.166.023.312,00		12.466.023.312,00		12.866.023.312,00		13.226.888.631,95		13.513.287.747,44	
Meningkatnya akses, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi lingkup Bidang Keluarga Berencana	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	20,80	20,15	19,52	7.316.360.560,00	18,91	7.466.360.560,00	18,32	7.666.360.560,00	17,75	7.846.793.220,00	17,20	7.956.946.725,89	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	80,85	82,02	83,21		84,42		85,65		86,89		88,15		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan lingkup Bidang Penggerakan dan Penyuluhan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan (%)	45,03	46,70	48,43	4.849.662.752,00	50,23	4.999.662.752,00	52,09	5.199.662.752,00	54,03	5.380.095.411,95	56,03	5.556.341.021,55	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					14.818.743.099,56		15.018.743.099,56		15.218.743.099,56		15.354.067.594,54		15.530.313.204,15	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) lingkup Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan 1000HPK (Persentase)	80,04	82,54	85,04	14.818.743.099,56	87,54	15.018.743.099,56	90,04	15.218.743.099,56	92,54	15.354.067.594,54	95,04	15.530.313.204,15	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,39	57,40	58,41		59,42		60,43		61,44		65,45		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Remaja (Indeks)	86,26	87,28	88,30		89,32		90,32		91,36		92,38		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					267.398.116.013,26		272.179.528.945,28		277.075.977.286,08		282.091.521.108,91		286.990.676.165,22	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					120.156.055.381,56		122.304.596.013,24		124.504.828.112,58		126.758.576.082,71		128.960.024.451,32	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,45	84,60	84,75	95.573.463.631,24	84,90	97.064.582.876,31	85,05	98.541.216.758,80	85,20	100.136.130.981,57	85,35	100.815.503.907,06	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup BLUD Angkutan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup BLUD Angkutan (%)	100,00	100,00	100,00	7.734.065.750,32	100,00	7.651.009.136,93	100,00	7.552.382.353,78	100,00	7.439.561.101,14	100,00	8.183.517.211,26	2.15.0.00.0.00.01.0007 - UPT Angkutan
Meningkatnya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Lingkup BLUD Parkir	Jumlah Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Unit)	1.423.100,00	2.740.507,00	1.684.853,00	16.848.526.000,00	1.758.900,00	17.589.004.000,00	1.841.123,00	18.411.229.000,00	1.918.288,00	19.182.884.000,00	1.996.100,00	19.961.003.333,00	2.15.0.00.0.00.01.0008 - UPT Parkir
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					147.242.060.631,70		149.874.932.932,04		152.571.149.173,50		155.332.945.026,20		158.030.651.713,90	
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan lingkup BLUD Angkutan	Rasio Pengguna Angkutan Umum dengan Pengguna angkutan pribadi lingkup BLUD Angkutan (Rasio)	1:3350	1:3303	1:3257	13.948.918.098,73	1:3213	14.284.996.194,43	1:3169	14.629.572.024,44	1:3126	14.982.448.997,57	1:3084	15.242.652.992,62	2.15.0.00.0.00.01.0007 - UPT Angkutan
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan Lingkup Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani Lingkup Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan (%)	0,50	0,50	0,87	20.644.191.477,46	1,24	20.417.762.137,18	1,74	20.236.379.094,11	2,61	20.097.091.926,32	2,98	20.446.123.223,46	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi (Indeks (Skala 0-100))	8,80	8,53	8,29	76.937.124.707,77	8,05	79.080.336.396,92	7,81	81.190.041.514,31	7,58	83.273.891.187,14	7,34	84.720.129.994,56	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi (%)	0,50	0,50	0,87		1,24		1,74		2,61		2,98		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan lingkup Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan pada Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Indeks)	8,80	8,53	8,29	15.213.859.076,42	8,05	15.580.414.012,91	7,81	15.956.237.291,52	7,58	16.341.114.491,40	7,34	16.624.914.774,98	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan pada Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Indeks)	1,00	0,96	0,92		0,88		0,84		0,80		0,76		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum Lingkup Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	36,24	36,24	36,25		36,25		36,25		36,26		36,27		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Rasio Pengguna angkutan umum dengan pengguna angkutan pribadi lingkup Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Rasio)	1:3.350	1:3.303	1:3.257		1:3.213		1:3.169		1:3.126		1:3.084		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan Lingkup Bidang Pengendalian Operasional	Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani Lingkup Bidang Pengendalian Operasional (%)	0,50	0,50	0,87	15.337.777.464,25	1,24	15.707.318.026,90	1,74	16.086.202.422,30	2,61	16.474.214.485,15	2,98	16.760.326.350,11	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan Lingkup UPT Teminal	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum lingkup UPT Terminal (%)	36,24	36,24	36,25	5.160.189.807,07	36,25	4.804.106.163,70	36,25	4.472.716.826,82	36,26	4.164.183.938,62	36,27	4.236.504.378,17	2.15.0.00.0.00.01.0006 - UPT Terminal
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					35.144.146.428,90		35.772.549.265,36		36.416.179.432,64		37.075.579.862,85		37.718.927.033,54	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.915.764.527,90		25.361.079.328,36		25.818.344.183,64		26.288.043.363,85		26.738.293.631,54	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,00	84,60	84,70	24.915.764.527,90	84,80	25.361.079.328,36	84,90	25.818.344.183,64	85,00	26.288.043.363,85	85,10	26.738.293.631,54	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.353.563.400,00		5.449.392.185,00		5.546.936.305,00		5.646.226.464,00		5.747.293.918,00	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata (Nilai)	88,51	88,50	88,60	5.353.563.400,00	88,70	5.449.392.185,00	88,80	5.546.936.305,00	88,90	5.646.226.464,00	88,90	5.747.293.918,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Layanan Informasi Masyarakat Melalui Radio (Nilai)	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Layanan Informasi (Nilai)	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (Nilai)	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		5,00		5,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.874.818.501,00		4.962.077.752,00		5.050.898.944,00		5.141.310.035,00		5.233.339.484,00	
Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efesien	Nilai Penerapan Lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Nilai)	31,50	16,20	16,20	4.874.818.501,00	16,20	4.962.077.752,00	16,20	5.050.898.944,00	16,20	5.141.310.035,00	16,20	5.233.339.484,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi (Nilai)	45,45	10,00	10,00		10,00		10,00		10,30		10,30		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Infrastruktur (Nilai)	7,40	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nilai)	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		4,00		4,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					34.613.411.194,58		35.232.342.301,41		35.866.164.193,43		36.515.402.427,76		37.149.574.691,19	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.031.313.523,92		22.588.756.020,00		23.222.577.912,02		23.871.816.146,02		24.505.988.409,02	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,45	84,45	84,55	21.031.313.523,92	84,60	22.588.756.020,00	84,65	23.222.577.912,02	84,70	23.871.816.146,02	84,75	24.505.988.409,02	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam Lingkup Bidang Pemberdayaan Koperasi	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					2.901.738.810,00		1.797.348.086,00		1.797.348.086,00		1.797.348.086,00		1.797.348.086,00	
Meningkatnya Kepatuhan Koperasi lingkup Bidang Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan (%)	19,85	20,14	21,94	2.901.738.810,00	23,49	1.797.348.086,00	24,89	1.797.348.086,00	26,44	1.797.348.086,00	28,13	1.797.348.086,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					541.568.528,00		795.725.380,80		795.725.380,80		795.725.380,80		795.725.380,80	
Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas Lingkup UPTD Balatkop dan UMKM	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat (%)	29,17	62,50	6,56	541.568.528,00	7,50	795.725.380,80	7,50	795.725.380,80	8,44	795.725.380,80	8,44	795.725.380,80	2.17.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.374.228.500,00		2.157.698.415,00		2.157.698.415,00		2.157.698.415,00		2.157.698.415,00	
Meningkatnya Keberdayaan Usaha Koperasi lingkup Bidang Pemberdayaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset (%)	8,06	8,47	9,56	1.374.228.500,00	10,13	2.157.698.415,00	10,69	2.157.698.415,00	11,25	2.157.698.415,00	11,95	2.157.698.415,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					7.454.598.158,50		5.622.853.578,25		5.622.853.578,25		5.622.853.578,68		5.622.853.578,25	
Meningkatnya Keberdayaan Usaha Mikro lingkup Bidang Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Keberdayaan Usahanya lingkup Bidang Usaha Mikro (%)	6,92	15,55	15,83	5.206.080.142,50	16,30	2.526.688.156,75	16,76	2.526.688.156,75	17,23	2.526.688.156,75	17,70	2.526.688.156,75	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya keberdayaan Usaha Non Formal lingkup Bidang Usaha Non Formal	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat lingkup Bidang Usaha Non Formal (%)	7,74	8,31	10,22	1.656.941.961,00	11,18	2.245.431.761,00	12,14	2.245.431.761,00	12,78	2.245.431.761,43	13,58	2.245.431.761,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya SDM usaha mikro yang berkualitas Lingkup UPTD Balatkop dan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro yang Kualitasnya Meningkat lingkup UPTD Balatkop dan UMKM (%)	29,17	62,50	31,11	591.576.055,00	35,56	850.733.660,50	35,56	850.733.660,50	40,00	850.733.660,50	40,00	850.733.660,50	2.17.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.309.963.674,16		2.269.960.821,36		2.269.960.821,36		2.269.960.821,26		2.269.960.822,12	
Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro lingkup Bidang Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha (%)	3,45	6,90	15,00	1.309.963.674,16	16,67	2.269.960.821,36	18,33	2.269.960.821,36	20,00	2.269.960.821,26	22,22	2.269.960.822,12	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					36.267.797.593,20		36.916.311.199,10		37.580.427.311,80		38.260.696.608,01		38.925.179.838,51	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.105.034.326,65		29.429.853.412,59		31.934.579.822,96		31.159.543.369,61		33.468.172.676,47	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,30	85,50	85,75	30.105.034.326,65	86,00	29.429.853.412,59	86,25	31.934.579.822,96	86,50	31.159.543.369,61	86,75	33.468.172.676,47	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					758.428.725,17		433.414.829,68		463.771.300,60		453.140.853,09		487.352.422,16	
Meningkatnya Kemudahan dan Insentif PM Lingkup Bidang Penanaman Modal	Persentase Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Penanaman Modal (%)	100,00	100,00	100,00	758.428.725,17	100,00	433.414.829,68	100,00	463.771.300,60	100,00	453.140.853,09	100,00	487.352.422,16	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.756.607.892,61		1.537.913.667,15		1.620.697.444,60		1.550.341.589,02		1.624.070.176,43	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Promosi PM lingkup Bidang Penanaman Modal	Persentase Potensi Penanaman Modal yang Terpromosikan (%)	100,00	100,00	100,00	1.756.607.892,61	100,00	1.537.913.667,15	100,00	1.620.697.444,60	100,00	1.550.341.589,02	100,00	1.624.070.176,43	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					727.765.234,89		700.605.115,03		723.080.398,36		671.814.688,58		692.936.608,61	
Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Publik lingkup Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penyelenggaraan pelayanan penanaman modal (%)	100,00	100,00	100,00	727.765.234,89	100,00	700.605.115,03	100,00	723.080.398,36	100,00	671.814.688,58	100,00	692.936.608,61	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					713.587.990,06		713.421.062,26		760.481.108,62		734.566.610,04		775.944.639,85	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Ketentuan Penanaman Modal Lingkup Bidang Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang patuh memenuhi ketentuan penanaman modal (%)	55,00	60,00	65,00	713.587.990,06	70,00	713.421.062,26	75,00	760.481.108,62	80,00	734.566.610,04	85,00	775.944.639,85	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					2.206.373.423,82		4.101.103.112,39		2.077.817.236,66		3.691.289.497,67		1.876.703.314,99	
Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi lingkup sekretariat	Persentase data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang tersedia (%)	100,00	100,00	100,00	2.206.373.423,82	100,00	4.101.103.112,39	100,00	2.077.817.236,66	100,00	3.691.289.497,67	100,00	1.876.703.314,99	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					149.724.429.216,50		152.401.689.372,62		155.143.361.393,12		157.951.718.636,90		160.694.906.231,67	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.192.941.409,50		44.983.995.060,62		45.793.706.971,12		46.622.835.469,90		47.428.900.496,67	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,20	87,70	88,20	44.192.941.409,50	88,70	44.983.995.060,62	89,20	45.793.706.971,12	89,70	46.622.835.469,90	90,00	47.428.900.496,67	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					12.056.729.676,00		12.269.738.010,00		12.489.034.907,00		12.715.086.439,00		12.936.328.943,00	
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Lingkup Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan (%)	45,20	45,20	45,70	6.510.634.025,00	46,20	6.625.658.525,00	46,70	6.744.078.850,00	47,20	6.866.146.677,00	47,70	6.985.617.629,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Lingkup Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan (%)	25,50	25,50	26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Bidang Pembinaan Pemuda	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Lingkup Bidang Pembinaan Pemuda (%)	45,20	45,20	45,70	5.546.095.651,00	46,20	5.644.079.485,00	46,70	5.744.956.057,00	47,20	5.848.939.762,00	47,70	5.950.711.314,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Pengangguran Terbuka Lingkup Bidang Pembinaan Pemuda (%)	25,50	25,50	26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					91.031.504.777,00		92.660.968.713,00		94.328.866.149,00		96.036.218.627,00		97.707.248.832,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga	Persentase Kebugaran Jasmani Masyarakat (%)	46,00	46,00	46,20	17.295.985.908,00	46,40	17.605.584.055,00	46,60	17.922.484.568,00	46,80	18.246.881.539,00	47,00	18.564.377.279,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Literasi Fisik Olahraga (%)	51,00	51,00	51,40		51,80		52,20		52,60		53,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Partisipasi Olahraga (%)	52,00	52,00	52,40		52,80		53,20		53,60		54,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Lingkup Bidang Pembinaan dan Infrastruktur Olaharaga	Persentase Dimensi Ekonomi Olahraga (%)	42,00	42,00	42,40	73.735.518.869,00	42,80	75.055.384.658,00	43,20	76.406.381.581,00	43,60	77.789.337.088,00	44,00	79.142.871.553,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Performa Olahraga (%)	30,00	30,00	30,40		30,80		31,20		31,60		32,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Ruang Terbuka Olahraga (%)	6,00	6,00	6,20		6,40		6,60		6,80		7,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase SDM Olahraga (%)	25,00	25,00	25,40		25,80		26,20		26,60		27,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					2.443.253.354,00		2.486.987.589,00		2.531.753.366,00		2.577.578.101,00		2.622.427.960,00	
Meningkatnya Kualitas Pemuda Lingkup Bidang Pembinaan Pemuda	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (%)	27,50	27,50	28,00	2.443.253.354,00	28,50	2.486.987.589,00	29,00	2.531.753.366,00	29,50	2.577.578.101,00	30,00	2.622.427.960,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (%)	27,50	27,50	28,00		28,50		29,00		29,50		30,00		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					650.000.000,00		661.635.000,00		673.478.267,00		685.533.527,00		697.804.578,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					650.000.000,00		661.635.000,00		673.478.267,00		685.533.527,00		697.804.578,00	
Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi	Indeks Pembangunan Statistik (Nilai)	3,04	3,04	3,05	650.000.000,00	3,06	661.635.000,00	3,07	673.478.267,00	3,07	685.533.527,00	3,09	697.804.578,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik (Nilai)	4,50	4,50	5,80		5,80		5,80		5,80		5,80		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					335.700.000,00		341.709.030,00		347.825.622,00		354.051.700,00		360.389.226,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					335.700.000,00		341.709.030,00		347.825.622,00		354.051.700,00		360.389.226,00	
Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian (Nilai)	1,30	1,30	3,70	335.700.000,00	3,70	341.709.030,00	3,70	347.825.622,00	3,70	354.051.700,00	3,70	360.389.226,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					41.685.539.821,21		42.431.999.656,71		43.196.545.291,41		43.979.863.515,04		44.744.607.243,19	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.464.964.403,21		36.100.697.996,27		36.751.913.331,23		37.419.228.179,59		38.070.472.916,44	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,00	87,21	83,65	26.963.913.265,74	83,85	27.448.328.148,56	83,95	27.944.666.063,24	84,00	28.453.450.460,78	84,05	28.949.587.243,09	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Sekretariat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup UPT Padepokan Seni, Kreativitas dan Kebudayaan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup UPT Padepokan Seni, Kreativitas dan Kebudayaan (%)	100,00	100,00	100,00	8.501.051.137,47	100,00	8.652.369.847,71	100,00	8.807.247.267,99	100,00	8.965.777.718,81	100,00	9.120.885.673,35	2.22.3.26.0.00.03.0002 - UPT Padepokan Seni, Kreativitas dan Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.567.403.578,00		3.630.903.361,69		3.695.896.531,87		3.762.422.669,44		3.827.512.581,62	
Meningkatnya partisipasi dan apresiasi publik terhadap budaya Lingkup Bidang Produk Budaya dan Kesenian	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam pertunjukan kebudayaan/kesenian (%)	81,50	81,00	29,00	2.968.303.578,00	29,50	3.021.139.381,69	30,05	3.075.217.776,63	31,00	3.130.571.696,60	31,40	3.184.730.586,95	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan Lingkup Bidang Pengkajian Budaya	Persentase warisan budaya takbenda yang dicatat/ditetapkan dalam register warisan budaya takbenda (%)	37,70	24,51	24,10	599.100.000,00	24,35	609.763.980,00	24,50	620.678.755,24	25,50	631.850.972,84	26,50	642.781.994,67	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					685.683.100,00		697.888.259,18		710.380.459,02		723.167.307,28		735.678.101,70	
Meningkatnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Lingkup Bidang Produk Budaya dan Kesenian	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan (%)	1,18	0,73	1,21	685.683.100,00	1,23	697.888.259,18	1,25	710.380.459,02	1,28	723.167.307,28	1,30	735.678.101,70	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					337.296.240,00		343.300.113,07		349.445.185,10		355.735.198,43		361.889.417,36	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya Lingkup Bidang Pengkajian Budaya	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang datang berkunjung ke situs sejarah (%)	12,65	8,69	8,34	337.296.240,00	8,56	343.300.113,07	8,86	349.445.185,10	9,16	355.735.198,43	9,46	361.889.417,36	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.461.784.500,00		1.487.804.264,10		1.514.435.960,43		1.541.695.807,72		1.568.367.145,19	
Meningkatnya pelestarian cagar budaya Lingkup Bidang Pengkajian Budaya	Persentase Objek diduga cagar budaya yang ditetapkan atau register (%)		1,07	1,05	1.461.784.500,00	1,15	1.487.804.264,10	1,25	1.514.435.960,43	1,35	1.541.695.807,72	1,45	1.568.367.145,19	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					168.408.000,00		171.405.662,40		174.473.823,76		177.614.352,58		180.687.080,88	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya Lingkup Bidang Pengkajian Budaya	Jumlah kunjungan ke Museum Sejarah Kota Bandung (Orang)			3.250,00	168.408.000,00	3.250,00	171.405.662,40	3.850,00	174.473.823,76	4.000,00	177.614.352,58	4.250,00	180.687.080,88	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					22.579.041.568,20		22.894.621.944,24		23.195.963.670,05		23.615.660.031,05		24.025.740.111,98	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.192.603.855,20		21.495.603.855,00		21.690.149.357,67		22.082.741.061,05		22.466.148.351,90	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan asministrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,30	83,40	83,50	21.192.603.855,20	83,60	21.495.603.855,00	83,70	21.690.149.357,67	83,80	22.082.741.061,05	83,90	22.466.148.351,90	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.386.437.713,00		1.399.018.089,24		1.505.814.312,38		1.532.918.970,00		1.559.591.760,08	
Meningkatnya Koleksi perpustakaan sesuai SNP lingkup Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah judul Koleksi perpustakaan (Judul/eksemplar)	115,00	117.300,00	119.646,00	413.050.000,00	122.039,00	415.050.000,00	124.480,00	423.410.400,00	126.969,00	431.031.787,20	129.508,00	438.531.740,30	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai SNP lingkup bidang pengelolaan perpustakaan	Jumlah pemustaka perpustakaan lingkup bidang pengelolaan perpustakaan (Orang)	233,67	248.673,00	263.673,00	216.736.092,00	278.673,00	220.736.092,00	293.693,00	232.581.980,74	308.673,00	236.768.456,39	323.673,00	240.888.227,53	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai SNP lingkup bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca	Jumlah pemustaka perpustakaan lingkup bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca (Orang)	233,67	248.673,00	263,67	223.101.883,00	278,67	223.682.259,24	293,69	223.682.259,24	308,67	227.708.539,91	323,67	231.670.668,50	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai SNP lingkup bidang pengelolaan perpustakaan	Jumlah tenaga Perpustakaan lingkup bidang pengelolaan perpustakaan (Orang)	19,00	22,00	24,00	108.741.800,00	26,00	123.741.800,00	28,00	200.331.734,40	30,00	203.937.705,62	32,00	207.486.221,70	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai SNP lingkup bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca	Jumlah tenaga Perpustakaan lingkup bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca (Orang)	19,00	22,00	24,00	424.807.938,00	26,00	415.807.938,00	28,00	425.807.938,00	30,00	433.472.480,88	32,00	441.014.902,05	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.516.796.006,90		1.632.079.359,85		1.771.967.458,97		1.804.232.881,05		1.835.626.533,19	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.516.796.006,90		1.632.079.359,85		1.771.967.458,97		1.804.232.881,05		1.835.626.533,19	
Meningkatnya nilai aspek pengawasan lingkup bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsiapan	Nilai aspek pengawasan lingkup bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsiapan (Nilai)		26,80	27,02	306.311.461,25	28,00	326.522.461,00	28,80	339.214.640,69	29,60	342.606.787,09	30,00	348.568.145,19	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya nilai aspek kebijakan lingkup bidang Pengelolaan Kearsipan	Nilai aspek kebijakan lingkup bidang Pengelolaan Kearsipan (Nilai)		7,28	7,69	153.981.222,65	7,94	165.573.711,71	8,10	217.298.301,40	8,35	219.471.284,42	8,40	223.290.084,77	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya nilai aspek Pembinaan lingkup Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan	Nilai aspek Pembinaan lingkup Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan (Nilai)		11,76	18,14	176.127.400,00	12,08	194.127.400,00	12,55	205.760.419,20	12,71	207.818.023,39	13,00	211.434.057,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya nilai aspek pengelolaan arsip in aktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan	Nilai aspek pengelolaan arsip in aktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan (Nilai)		4,80	4,80	271.639.400,00	4,80	300.967.280,00	4,80	328.575.018,24	4,80	331.860.768,42	4,80	337.635.145,79	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya nilai aspek pengelolaan arsip statis lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan	Nilai aspek pengelolaan arsip statis lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan (Nilai)		14,07	14,07	454.896.073,00	14,07	457.596.073,00	14,07	461.256.841,58	14,07	471.578.438,33	14,07	479.783.903,15	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya nilai aspek sumber daya kearsipan lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan	Nilai aspek sumber daya kearsipan lingkup Bidang Pengelolaan Kearsipan (Nilai)		11,29	10,35	153.840.450,00	10,35	187.292.434,14	10,35	219.862.237,86	10,35	230.897.579,40	10,35	234.915.197,29	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.536.126.307,60		1.965.000.000,00		1.935.000.000,00		2.120.000.000,00		2.245.599.280,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					934.448.861,80		1.235.000.000,00		1.205.000.000,00		1.280.000.000,00		1.359.579.280,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Lingkup Bidang Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya Lingkup Bidang Perikanan (Ton)	928,58	930,00	932,50	513.911.729,66	935,00	785.000.000,00	937,50	765.000.000,00	940,00	810.000.000,00	942,50	866.420.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Lingkup UPT Balai Benih Ikan	Produksi Perikanan Budidaya Lingkup UPT Balai Benih Ikan (Ton)	928,58	930,00	932,50	420.537.132,14	935,00	450.000.000,00	937,50	440.000.000,00	940,00	470.000.000,00	942,50	493.159.280,00	2.09.3.27.3.25.02.0008 - UPT BALAI BENIH IKAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					330.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		470.000.000,00		493.010.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup Bidang Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	20,73	20,73	25,91	330.000.000,00	31,09	400.000.000,00	36,27	400.000.000,00	41,45	470.000.000,00	46,63	493.010.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					271.677.445,80		330.000.000,00		330.000.000,00		370.000.000,00		393.010.000,00	
Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Lingkup Bidang Perikanan	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	15,56	16,30	17,07	271.677.445,80	17,88	330.000.000,00	18,73	330.000.000,00	19,62	370.000.000,00	20,55	393.010.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					13.171.700.438,00		13.406.156.705,80		13.646.126.910,83		13.891.757.195,22		14.132.084.594,71	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					924.723.728,00		941.183.810,36		958.031.000,56		975.275.558,57		992.147.825,74	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata Lingkup Bidang Kepariwisataan	Persentase kampung wisata yang memenuhi standar destinasi berkelanjutan (%)			16,70	562.361.864,00	33,30	572.371.905,18	42,90	582.617.362,28	50,00	593.104.474,80	63,30	603.365.182,22	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Kepatuhan Standar Usaha Pariwisata Lingkup Bidang Kepariwisataan	Persentase usaha jasa pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata (%)	58,79	38,30	39,10	362.361.864,00	41,00	368.811.905,18	41,88	375.413.638,28	42,66	382.171.083,77	43,44	388.782.643,52	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.499.799.156,00		3.562.095.580,98		3.625.857.091,88		3.691.122.519,53		3.754.978.939,12	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata Lingkup Bidang Pemasaran	Brand Equity/Awareness Citra Pariwisata Kota (Nilai)	4,13	3,94	11,00	3.499.799.156,00	12,00	3.562.095.580,98	13,00	3.625.857.091,88	14,00	3.691.122.519,53	15,00	3.754.978.939,12	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1.572.759.277,00		1.600.754.392,13		1.629.407.895,75		1.658.737.237,87		1.687.433.392,09	
Meningkatnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (%)	92,00	50,00	55,00	1.572.759.277,00	58,00	1.600.754.392,13	60,00	1.629.407.895,75	60,00	1.658.737.237,87	61,50	1.687.433.392,09	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					7.174.418.277,00		7.302.122.922,33		7.432.830.922,64		7.566.621.879,25		7.697.524.437,76	
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM ekraf Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif	Tingkat kepuasan pemberi kerja (%)	88,90	70,00	60,00	5.759.951.859,00	70,00	5.862.479.002,09	70,00	5.967.417.376,23	75,00	6.074.830.889,00	75,00	6.179.925.463,38	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Kompetensi Daya Saing Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lingkup Bidang Kepariwisataan	Tingkat Kompetensi Daya Saing Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)		70,00	70,00	1.414.466.418,00	70,00	1.439.643.920,24	70,00	1.465.413.546,41	75,00	1.491.790.990,25	75,00	1.517.598.974,38	2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.183.945.563,98		7.302.000.000,00		6.806.410.916,90		7.681.000.000,00		8.074.950.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.563.577.050,43		2.805.000.000,00		2.565.000.000,00		2.936.000.000,00		3.047.850.000,00	
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian Lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Populasi Ternak Lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ekor)	3.160,00	3.380,00	3.580,00	540.764.250,00	3.780,00	651.000.000,00	3.980,00	590.000.000,00	4.180,00	725.000.000,00	4.380,00	771.420.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Pertanian Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	15.125,00	15.350,00	15.500,00	895.174.034,43	15.650,00	1.004.000.000,00	15.800,00	875.000.000,00	15.950,00	991.000.000,00	16.100,00	1.037.420.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian Lingkup UPT TPHP	Produksi Pertanian Lingkup UPT TPHP (Ton)	15.125,00	15.350,00	15.500,00	1.127.638.766,00	15.650,00	1.150.000.000,00	15.800,00	1.100.000.000,00	15.950,00	1.220.000.000,00	16.100,00	1.239.010.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0011 - UPT PEMBIBITAN TANAMAN PANGAN, HORTIKLUTURA DAN PETERNAKAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					147.185.116,00		258.000.000,00		155.000.000,00		300.000.000,00		346.420.000,00	
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pemanfaatan Lahan Pertanian (%)	57,44	51,00	54,00	147.185.116,00	57,00	258.000.000,00	61,00	155.000.000,00	64,00	300.000.000,00	67,00	346.420.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.015.191.966,44		2.350.000.000,00		2.285.000.000,00		2.500.000.000,00		2.642.840.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Lingkup Bidang Keamanan Pangan	Persentase Unit Usaha produk Asal hewan yang Memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Lingkup Bidang Keamanan Pangan (%)	8,33	16,70	33,30	694.410.270,00	50,00	400.000.000,00	66,67	375.000.000,00	83,33	400.000.000,00	100,00	423.210.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis Lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	1.119.081.844,20	100,00	650.000.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	823.210.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Lingkup UPT Klinik Hewan	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis Lingkup UPT Klinik Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	534.039.174,24	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	650.000.000,00	100,00	673.210.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0010 - UPT KLINIK HEWAN
Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis Lingkup UPT Rumah Potong Hewan	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis Lingkup UPT Rumah Potong Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	667.660.678,00	100,00	700.000.000,00	100,00	680.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	723.210.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0009 - UPT RUMAH POTONG HEWAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					192.456.130,11		235.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		273.210.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	53,00	57,00	64,00	192.456.130,11	71,00	235.000.000,00	78,00	230.000.000,00	85,00	250.000.000,00	93,00	273.210.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.265.535.301,00		1.654.000.000,00		1.571.410.916,90		1.695.000.000,00		1.764.630.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut (%)	19,07	20,47	22,79	1.265.535.301,00	25,12	1.654.000.000,00	27,44	1.571.410.916,90	29,77	1.695.000.000,00	32,09	1.764.630.000,00	2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					33.705.668.121,55		34.308.367.646,94		34.925.567.443,02		35.557.779.285,18		36.175.320.264,53	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.345.053.943,83		23.762.492.721,96		24.189.974.607,14		24.627.854.061,57		25.055.572.254,88	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,10	82,60	82,90	23.345.053.943,83	83,20	23.762.492.721,96	83,50	24.189.974.607,14	83,80	24.627.854.061,57	84,00	25.055.572.254,88	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					3.329.245.033,49		3.388.776.100,85		3.449.739.418,63		3.512.185.536,84		3.573.182.554,63	
Stabilnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lingkup Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting (%)	1,00	15,00	15,00	3.329.245.033,49	15,00	3.388.776.100,85	15,00	3.449.739.418,63	15,00	3.512.185.536,84	15,00	3.573.182.554,63	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					2.799.404.085,52		2.849.460.933,70		2.900.722.093,25		2.953.230.069,29		3.004.519.565,59	
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan Produk Ekspor lingkup Bidang Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)	0,37	0,40	0,71	2.799.404.085,52	1,01	2.849.460.933,70	1,32	2.900.722.093,25	1,62	2.953.230.069,29	1,92	3.004.519.565,59	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					692.950.514,00		705.341.337,00		718.030.268,00		731.027.830,00		743.723.776,00	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen lingkup Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian	Persentase Alat UTTP yang Terstandardisasi (%)	103,84	100,00	100,00	252.185.939,00	100,00	262.223.125,00	100,00	270.445.436,00	100,00	274.445.436,00	100,00	280.389.979,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Perlindungan Konsumen lingkup UPT Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP yang Terstandardisasi (%)	103,84	100,00	100,00	440.764.575,00	100,00	443.118.212,00	100,00	447.584.832,00	100,00	456.582.394,00	100,00	463.333.797,00	3.31.3.30.0.00.02.0008 - KEPALA UPT METROLOGI LEGAL
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					3.539.014.544,71		3.602.296.553,43		3.667.101.056,00		3.733.481.787,48		3.798.322.113,43	
Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Dalam Negeri lingkup Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing (%)	87,40	90,88	66,80	3.539.014.544,71	67,89	3.602.296.553,43	68,98	3.667.101.056,00	70,06	3.733.481.787,48	71,15	3.798.322.113,43	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.430.701.574,00		4.509.928.062,00		4.591.060.651,00		4.674.166.614,00		4.755.344.052,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.430.701.574,00		4.509.928.062,00		4.591.060.651,00		4.674.166.614,00		4.755.344.052,00	
Meningkatnya Daya Saing Industri lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing (%)	66,06	70,83	73,19	2.270.151.264,00	74,94	2.127.078.651,00	76,69	2.167.000.279,00	77,86	2.174.005.350,00	79,03	2.175.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Daya Saing Industri lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing (%)	66,06	70,83	73,19	1.557.194.310,00	74,94	1.752.849.411,00	76,69	1.774.060.372,00	77,86	1.830.161.264,00	79,03	1.890.344.052,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Daya Saing Industri lingkup UPT BI	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing (%)	66,06	70,83	73,19	603.356.000,00	74,94	630.000.000,00	76,69	650.000.000,00	77,86	670.000.000,00	79,03	690.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0007 - KEPALA UPT BALAI INDUSTRI DAN PROMOSI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					298.499.782.962,07		303.837.332.619,26		309.303.297.708,34		314.902.210.538,67		320.371.197.167,32	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					214.078.405.643,47		217.550.652.263,00		220.964.784.009,45		224.306.680.167,20		227.292.948.453,10	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah (Lingkup Bagian Perkapeg)	IKM Sekretariat Daerah (Nilai)	90,74	85,00	85,15	200.512.558.022,47	85,25	202.500.291.419,00	85,35	204.500.340.247,45	85,40	206.257.146.441,70	85,45	209.441.996.655,75	4.01.0.00.0.00.01.0012 - Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,95	82,41	83,95		83,95		83,96		83,96		83,97		4.01.0.00.0.00.01.0012 - Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0012 - Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan (Lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	IKM Atas layanan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (Nilai)	91,03	85,00	85,15	2.328.031.063,60	85,25	2.560.834.169,96	85,35	2.816.917.586,96	85,40	3.098.609.345,65	85,45	3.408.470.280,22	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Meningkatnya kualitas pelayanan tata usaha, perlengkapan dan RT (Lingkup Bagian Umum)	IKM atas layanan tata usaha, perlengkapan dan Rumah Tangga (Nilai)	88,19	85,00	85,15	324.801.316,40	85,25	357.281.448,04	85,35	357.281.448,04	85,40	393.009.592,85	85,45	432.310.552,13	4.01.0.00.0.00.01.0009 - Bagian Umum
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup Bagian Organisasi	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Organisasi (%)	100,00	100,00	100,00	1.365.119.900,00	100,00	1.501.631.900,00	100,00	1.651.795.010,00	100,00	1.816.974.600,00	100,00	1.998.672.100,00	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah (Lingkup Bagian Organisasi)	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	89,16	85,00	85,15	185.000.000,00	85,25	200.000.000,00	85,35	215.000.000,00	85,40	225.000.000,00	85,45	235.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
	Persentase PD yang memenuhi kriteria pelayanan Prima (%)	5,00	16,00	31,00		55,00		78,00		94,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)	93,00	93,00	93,15		93,25		93,35		93,45		93,50		4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
Terwujudnya sistem kerja yang adaptif dan efektif pasca penyederhanaan birokrasi guna mendukung kinerja organisasi secara optimal (Lingkup Bagian Organisasi)	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Nilai)	4,00	4,00	4,00	319.248.325,00	4,00	351.173.158,00	5,00	386.290.473,00	5,00	424.919.521,00	5,00	467.411.473,00	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Lingkup Bagian Tata Pemerintahan)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	90,73	90,74	90,75	1.310.367.326,00	90,76	1.441.404.058,00	90,77	1.585.544.464,00	90,78	1.744.098.911,00	90,79	1.918.508.802,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Tata Pemerintahan
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Tata Pemerintahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	90,73	90,74	90,75	1.909.630.304,00	90,76	2.100.593.334,00	90,77	2.310.652.668,00	90,78	2.541.717.935,00	90,79	854.059.820,00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Lingkup Bagian Hukum)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	90,73	90,74	90,75	945.524.141,00	90,76	1.040.076.555,00	90,77	1.144.084.211,00	90,78	1.258.492.632,00	90,79	1.384.341.895,00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Lingkup Bagian Kerja Sama)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	90,73	90,74	90,75	795.749.799,00	90,76	875.324.779,00	90,77	962.857.257,00	90,78	1.059.142.982,00	90,79	1.165.057.281,00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Kerjasama
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Kerjasama
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lingkup Bagian Perekonomian)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Perekonomian dan Pembangunan (Nilai)	90,73	90,74	90,75	821.388.214,00	90,76	892.267.452,00	90,77	936.880.825,00	90,78	983.724.866,00	90,79	1.032.911.109,00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Perekonomian
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Perekonomian
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lingkup Bagian Admnistrasi Pembangunan)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Perekonomian dan Pembangunan (Nilai)	90,73	90,74	90,75	796.686.990,00	90,76	871.460.384,00	90,77	952.994.854,00	90,78	1.045.283.878,00	90,79	1.149.793.076,00	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Administrasi Pembangunan
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Perekonomian dan Pembangunan (Nilai)	90,73	90,74	90,75	1.514.733.023,00	90,76	1.783.166.915,00	90,77	1.961.483.607,00	90,78	2.157.631.968,00	90,79	2.373.395.164,00	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta optimalnya tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lingkup Bagian Organisasi)	Capaian Nilai Kumulatif IKM lingkup Assisten Adminsitrasi Umum (Nilai)	90,73	90,74	90,75	949.567.219,00	90,76	1.075.146.691,00	90,77	1.182.661.358,00	90,78	1.300.927.494,00	90,79	1.431.020.245,00	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
	Persentase keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Asisten Adminstrasi Umum (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Organisasi
Terenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta terpenuhinya Gaji ASN secara tepat waktu (Lingkup Sekretariat Daerah)	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepat Waktu (%)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Gaji ASN Tepat Waktu (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					78.038.095.322,00		79.265.070.160,00		80.614.742.483,00		82.099.382.034,00		83.732.485.543,00	
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah (Lingkup Bagian Hukum)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan transparansi kebijakan (%)	100,00	100,00	100,00	1.136.985.378,00	100,00	1.250.683.916,00	100,00	1.375.752.308,00	100,00	1.513.327.538,00	100,00	1.664.660.292,00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah (lingkup Bagian Tata Pemerintahan)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Tata Pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00	3.638.160.989,00	100,00	4.001.977.087,00	100,00	4.402.174.796,00	100,00	4.842.392.276,00	100,00	5.326.631.503,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Tata Pemerintahan
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah (lingkup Bagian Kerja Sama)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Kerja Sama Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	4.667.559.074,00	100,00	5.134.314.982,00	100,00	5.647.746.480,00	100,00	6.212.521.128,00	100,00	6.833.773.241,00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Kerjasama
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah (lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat (%)	100,00	100,00	100,00	65.768.346.946,00	100,00	65.768.346.946,00	100,00	65.768.346.946,00	100,00	65.768.346.946,00	100,00	65.768.346.946,00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Terwujudnya sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel melalui reformasi regulasi dan penegakan hukum yang berintegritas. (Lingkup Bagian Hukum)	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang urgensi dan pokok pikirannya selaras dengan sistematika dan materi muatannya (%)	100,00	100,00	100,00	2.827.042.935,00	100,00	3.109.747.229,00	100,00	3.420.721.953,00	100,00	3.762.794.146,00	100,00	4.139.073.561,00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
	Persentase SDM perancang peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					6.383.281.996,60		7.021.610.196,26		7.723.771.215,89		8.496.148.337,47		9.345.763.171,22	
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Lingkup Bagian PBJ)	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	23,88	23,89	23,97	256.000.000,00	23,99	281.600.000,00	24,01	309.760.000,00	24,10	340.736.000,00	25,00	374.809.600,00	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Lingkup Bagian PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	18,84	19,53	22,33	921.900.000,00	25,81	1.014.090.000,00	27,21	1.115.499.000,00	28,60	1.227.048.900,00	30,00	1.349.753.790,00	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya kualitas UKPBJ (Lingkup Bagian PBJ)	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	40,00	40,00	40,00	1.887.000.000,00	40,00	2.075.700.000,00	40,00	2.283.270.000,00	40,00	2.511.597.000,00	40,00	2.762.756.700,00	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah (lingkup Bagian Perekonomian)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Perekonomian (%)	100,00	100,00	100,00	1.653.355.996,60	100,00	1.818.691.596,26	100,00	2.000.560.755,89	100,00	2.200.616.831,47	100,00	2.420.678.514,62	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Perekonomian
Meningkatnya kualitas perumusan dan publikasi kebijakan daerah lingkup (Bagian Administrasi Pembangunan)	Persentase kebijakan daerah yang memenuhi kirteria perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup Administrasi Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	1.665.026.000,00	100,00	1.831.528.600,00	100,00	2.014.681.460,00	100,00	2.216.149.606,00	100,00	2.437.764.566,60	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Administrasi Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					184.254.902.743,85		187.549.610.978,53		190.923.586.181,78		194.379.626.011,31		197.755.466.319,70	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					121.954.950.033,18		124.135.657.154,20		126.368.829.624,89		128.656.319.190,24		130.890.726.151,82	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Bagian Program dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,50	87,85	87,86	77.611.065.796,50	87,88	78.998.848.775,42	87,89	80.420.020.250,66	87,90	81.875.758.639,62	97,91	83.298.298.353,79	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Bagian Umum	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00	44.343.884.236,68	100,00	45.136.808.378,78	100,00	45.948.809.374,23	100,00	46.780.560.550,62	100,00	47.592.427.798,03	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					62.299.952.710,67		63.413.953.824,33		64.554.756.556,89		65.723.306.821,07		66.864.740.167,88	
Meningkatnya kualitas Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Funsi DPRD lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100,00	100,00	100,00	27.385.047.605,65	100,00	27.874.725.526,48	100,00	27.376.186.570,95	100,00	28.889.843.543,36	100,00	29.391.580.791,32	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kualitas Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Funsi DPRD lingkup Bagian Persidangan dan Per Undang- Undangan	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N (%)	100,00	100,00	100,00	34.914.905.105,02	100,00	35.539.228.297,85	100,00	37.178.569.985,94	100,00	36.833.463.277,71	100,00	37.473.159.376,56	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.01 - PERENCANAAN					43.984.776.583,82		45.257.041.933,75		46.249.090.061,70		46.911.619.183,36		47.854.132.788,44	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.594.250.506,67		33.367.755.212,11		33.696.482.431,67		33.816.478.726,23		34.322.435.767,96	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,35	85,95	85,99	32.594.250.506,67	86,06	33.367.755.212,11	86,13	33.696.482.431,67	86,22	33.816.478.726,23	86,30	34.322.435.767,96	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.624.625.956,95		3.768.818.259,80		4.005.107.755,38		4.187.983.848,00		4.321.747.231,17	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	3.624.625.956,95	100,00	3.768.818.259,80	100,00	4.005.107.755,38	100,00	4.187.983.848,00	100,00	4.321.747.231,17	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Sasaran RPJPD/ RPJMD/ RKPD yang di Cascading (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					7.765.900.120,20		8.120.468.461,84		8.547.499.874,65		8.907.156.609,13		9.209.949.789,31	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerja Terukur Lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	80,00	91,80	95,08	2.113.029.494,20	96,72	2.185.133.927,12	98,36	2.282.958.725,58	100,00	2.312.179.304,07	100,00	2.361.622.890,15	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	87,51	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerja Terukur Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan (%)	80,00	91,80	95,08	2.522.090.290,00	96,72	2.653.058.592,00	98,36	2.793.851.687,50	100,00	2.945.329.254,25	100,00	3.005.186.607,34	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan (%)	87,51	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerja Terukur Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (%)	80,00	91,80	95,08	3.130.780.336,00	96,72	3.282.275.942,72	98,36	3.470.689.461,57	100,00	3.649.648.050,81	100,00	3.843.140.291,82	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (%)	87,51	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					307.327.411.830,12		312.822.810.538,22		318.450.422.348,56		324.214.913.605,92		329.845.636.312,77	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					138.382.843.091,95		158.259.598.501,23		165.316.205.506,34		172.944.992.352,44		181.090.924.591,57	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah BKAD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,55	85,65	85,70	34.231.385.241,11	85,75	52.970.819.799,48	85,80	58.267.901.751,82	85,85	64.094.691.957,36	85,90	70.504.161.153,10	5.02.2.10.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.02.2.10.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat Bapenda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,25	81,10	81,33	104.151.457.850,84	81,56	105.288.778.701,75	81,79	107.048.303.754,52	82,02	108.850.300.395,08	82,25	110.586.763.438,47	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					137.674.435.473,27		117.713.863.267,99		109.592.530.885,22		99.470.813.805,48		93.288.593.528,40	
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	137.674.435.473,27	100,00	117.713.863.267,99	100,00	109.592.530.885,22	100,00	99.470.813.805,48	100,00	93.288.593.528,40	5.02.2.10.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					13.119.722.864,90		17.649.348.769,00		23.861.685.957,00		31.627.107.448,00		34.789.818.192,80	
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	8.425.541.064,90	100,00	11.241.464.552,00	100,00	15.789.248.414,00	100,00	21.467.720.019,50	100,00	23.614.492.021,45	5.02.2.10.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
meningkatnya kepatuhan pengelolaan barang milik daerah	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)	0,00	0,00	4,00	4.694.181.800,00	4,00	6.407.884.217,00	4,00	8.072.437.543,00	4,00	10.159.387.428,50	4,00	11.175.326.171,35	5.02.2.10.0.00.02.0006 - UPTD Pemanfaatan Tanah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					18.150.410.400,00		19.200.000.000,00		19.680.000.000,00		20.172.000.000,00		20.676.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Lingkup Bidang P2D	Jumlah Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah Lingkup Bidang P2D (Rp)	2.398.963.730.198,00	3.184.061.178.296,00	3.343.150.984.429,00	5.626.843.170,00	3.508.169.149.308,00	5.626.843.170,00	3.684.005.245.420,00	5.626.843.170,00	3.867.461.114.334,00	5.908.185.328,50	4.058.418.482.886,00	6.144.512.741,64	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Lingkup Bidang PAD 1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	2.398.963.730.198,00	3.184.061.178.296,00	3.343.150.984.429,00	5.047.571.111,50	3.508.169.149.308,00	5.416.844.250,00	3.684.005.245.420,00	5.577.160.711,50	3.867.461.114.334,00	5.117.287.606,50	4.058.418.482.886,00	5.157.964.695,94	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Lingkup Bidang PAD 2	Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	2.398.963.730.198,00	3.184.061.178.296,00	3.343.150.984.429,00	5.795.914.118,50	3.508.169.149.308,00	5.795.914.118,50	3.684.005.245.420,00	5.795.914.118,50	3.867.461.114.334,00	6.332.440.965,00	4.058.418.482.886,00	6.447.173.018,42	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari jasa Perhotelan, Makanan dan Minuman, Kesenian/Hiburan, Jasa Parkir dan Jasa Tenaga Listrik. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Lingkup Bidang Pengendalian	Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	2.398.963.730.198,00	3.184.061.178.296,00	3.343.150.984.429,00	1.680.082.000,00	3.508.169.149.308,00	2.360.398.461,50	3.684.005.245.420,00	2.680.082.000,00	3.867.461.114.334,00	2.814.086.100,00	4.058.418.482.886,00	2.926.649.544,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					139.501.174.755,13		141.708.526.195,83		143.628.580.583,16		146.026.482.444,30		148.618.463.367,74	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					132.676.641.424,43		134.731.119.367,83		136.218.292.011,16		137.867.847.007,30		139.966.063.346,73	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		84,50	85,10	132.676.641.424,43	85,60	134.731.119.367,83	86,00	136.218.292.011,16	86,50	137.867.847.007,30	87,00	139.966.063.346,73	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6.824.533.330,70		6.977.406.828,00		7.410.288.572,00		8.158.635.437,00		8.652.400.021,01	
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang PPIK	Nilai Penerapan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian Lingkup Bidang PPIK (Nilai)	112,00	100,00	102,00	2.295.402.724,70	104,00	2.191.819.691,70	104,00	2.528.989.692,97	104,00	2.772.715.129,62	104,00	2.964.120.291,34	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang MP	Nilai Penerapan Pengembangan Karir Lingkup Bidang MP (Nilai)	150,00	102,50	102,50	1.148.105.106,00	102,50	1.235.510.361,30	107,50	1.260.220.568,53	107,50	1.449.253.653,80	110,00	1.554.779.743,41	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang PKAP	Nilai Penerapan Manajemen Kinerja, Penghargaan Disiplin Lingkup Bidang PKAP (Nilai)	119,00	114,00	114,00	1.209.247.350,00	114,00	1.269.709.717,50	114,00	1.295.103.911,85	116,00	1.424.614.303,04	116,00	1.495.845.018,19	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang PKA	Nilai Penerapan Pengembangan Kompetensi Lingkup Bidang PKA (Nilai)		48,00	50,50	2.171.778.150,00	53,00	2.280.367.057,50	53,00	2.325.974.398,65	55,50	2.512.052.350,54	55,50	2.637.654.968,07	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					11.026.111.334,00		11.510.376.136,00		12.346.695.246,00		12.772.209.687,00		12.938.125.961,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					11.026.111.334,00		11.510.376.136,00		12.346.695.246,00		12.772.209.687,00		12.938.125.961,00	
Meningkatnya Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK Lingkup Bidang PKA	Hasil Evaluasi Organisasi (Persentase)	15,00	15,62	16,25	11.026.111.334,00	16,87	11.510.376.136,00	17,50	12.346.695.246,00	18,12	12.772.209.687,00	18,75	12.938.125.961,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Hasil Survei BerAKHLAK (Persentase)	67,84	67,88	67,92		67,96		67,98		68,00		68,08		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.000.000.000,00		1.550.000.000,00		1.400.000.000,00		1.600.000.000,00		1.500.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.250.000.000,00		750.000.000,00		600.000.000,00		850.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya hasil riset yang digunakan dalam perumusan kebijakan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah (%)	54,17	56,06	58,90	1.250.000.000,00	62,69	750.000.000,00	67,42	600.000.000,00	73,11	850.000.000,00	79,73	750.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya kualitas inovasi daerah lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Difasilitasi (%)	0,00	50,00	75,00	750.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	750.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					46.056.429.562,37		46.879.976.157,22		47.723.336.355,40		48.587.209.460,56		49.431.035.861,17	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.877.375.792,37		43.277.375.793,22		43.577.375.793,40		44.077.375.793,56		44.577.375.793,17	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,20	86,40	86,60	42.877.375.792,37	86,70	43.277.375.793,22	86,80	43.577.375.793,40	86,90	44.077.375.793,56	87,00	44.577.375.793,17	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.936.399.000,00		2.336.399.000,00		2.536.399.000,00		2.736.399.000,00		2.836.399.000,00	
Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Skor komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Nilai)	21,37	21,57	21,77	394.489.000,00	21,97	394.489.000,00	22,17	394.489.000,00	22,37	394.489.000,00	22,37	394.489.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result) (Nilai)	1,20	1,20	1,20	1.541.910.000,00	1,40	1.941.910.000,00	1,60	2.141.910.000,00	1,60	2.341.910.000,00	1,60	2.441.910.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.242.654.770,00		1.266.201.364,00		1.609.561.562,00		1.773.434.667,00		2.017.261.068,00	
Meningkatnya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result) (Nilai)	1,20	1,20	1,20	1.242.654.770,00	1,40	1.266.201.364,00	1,60	1.609.561.562,00	1,60	1.773.434.667,00	1,60	2.017.261.068,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					900.374.876.661,83		916.474.706.171,20		932.961.879.441,73		949.850.067.429,77		966.346.354.671,15	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					507.694.701.631,57		517.637.308.121,41		527.292.337.373,97		536.510.880.166,49		548.827.558.078,20	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Sukasari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,60	82,60	84,15	13.369.067.800,54	84,30	13.550.345.845,81	84,50	13.756.070.037,08	84,75	13.986.302.003,05	85,00	14.205.267.280,11	7.01.0.00.0.00.01.0.0000 - Kecamatan Sukasari
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.01.0.0000 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Gegerkalong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Gegerkalong (%)	100,00	100,00	100,00	156.209.988,00	100,00	164.609.988,00	100,00	178.809.988,00	100,00	186.609.988,00	100,00	195.309.988,00	7.01.0.00.0.00.01.0.0003 - Kelurahan Gegerkalong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Isola	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Isola (%)	100,00	100,00	100,00	108.636.912,29	100,00	130.936.912,29	100,00	146.086.912,29	100,00	153.886.912,29	100,00	162.386.912,29	7.01.0.00.0.00.01.0.0004 - Kelurahan Isola
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sarijadi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sarijadi (%)	100,00	100,00	100,00	150.295.429,00	100,00	168.695.429,00	100,00	174.095.429,00	100,00	181.895.429,00	100,00	191.495.429,00	7.01.0.00.0.00.01.0.0005 - Kelurahan Sarijadi
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukarasa	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukarasa (%)	100,00	100,00	100,00	153.743.088,00	100,00	172.593.088,00	100,00	187.343.088,00	100,00	195.143.088,00	100,00	204.743.088,00	7.01.0.00.0.00.01.0.0006 - Kelurahan Sukarasa
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cidadap	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	83,55	84,00	13.267.605.971,36	84,20	13.626.366.458,25	84,60	13.993.758.318,30	85,00	14.370.086.188,21	85,20	14.017.681.139,40	7.01.0.00.0.00.02.0.0000 - Kecamatan Cidadap
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.02.0.0000 - Kecamatan Cidadap
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Ciumbuleuit	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Ciumbuleuit (%)	100,00	100,00	100,00	93.757.524,00	100,00	93.757.524,00	100,00	93.757.524,00	100,00	93.757.524,00	100,00	193.757.524,00	7.01.0.00.0.00.02.0.0003 - Kelurahan Ciumbuleuit
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Hegarmanah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Hegarmanah (%)	100,00	100,00	100,00	86.386.090,79	100,00	86.386.090,79	100,00	86.386.090,79	100,00	86.386.090,79	100,00	106.386.090,79	7.01.0.00.0.00.02.0.0002 - Kelurahan Hegarmanah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Ledeng	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Ledeng (%)	100,00	100,00	100,00	110.277.096,00	100,00	110.277.096,00	100,00	110.277.096,00	100,00	110.277.096,00	100,00	110.277.096,00	7.01.0.00.0.00.02.0.0004 - Kelurahan Ledeng
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Sukajadi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,10	83,55	84,00	17.250.332.771,22	84,45	17.458.215.099,34	84,90	17.772.155.373,38	85,35	18.093.864.054,11	85,80	18.407.187.586,48	7.01.0.00.0.00.03.0.0000 - Kecamatan Sukajadi
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kecamatan Sukajadi (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.03.0.0000 - Kecamatan Sukajadi
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah - Kelurahan Sadangserang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sadangserang (%)	100,00	100,00	100,00	344.581.876,37	100,00	397.553.207,34	100,00	451.798.968,85	100,00	507.364.140,82	100,00	561.639.888,94	7.01.0.00.0.00.06.0.0004 - Kelurahan Sadangserang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipedes	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipedes (%)	100,00	100,00	100,00	211.352.463,00	100,00	234.580.305,45	100,00	238.817.661,10	100,00	243.132.092,86	100,00	247.525.012,20	7.01.0.00.0.00.03.0.0003 - Kelurahan Cipedes
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pasteur	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pasteur (%)	100,00	100,00	100,00	240.573.231,96	100,00	249.425.030,75	100,00	253.938.521,50	100,00	258.534.326,69	100,00	263.213.960,14	7.01.0.00.0.00.03.0.0002 - Kelurahan Pasteur
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukabungah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukabungah (%)	100,00	100,00	100,00	214.926.411,62	100,00	223.563.547,50	100,00	227.617.214,43	100,00	231.745.089,47	100,00	235.948.545,61	7.01.0.00.0.00.03.0.0006 - Kelurahan Sukabungah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukagalih	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukagalih (%)	100,00	100,00	100,00	203.628.956,46	100,00	243.143.231,42	100,00	247.534.719,74	100,00	252.006.058,55	100,00	256.558.709,27	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Sukagalih
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukawarna	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukawarna (%)	100,00	100,00	100,00	213.637.662,00	100,00	253.367.217,99	100,00	257.961.410,21	100,00	262.639.661,78	100,00	267.403.526,65	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Sukawarna
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cicendo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,00	86,00	86,87	17.228.446.744,19	86,89	17.536.512.931,38	86,91	17.851.990.843,98	86,93	18.175.142.072,32	86,95	18.490.794.378,46	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Arjuna	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Arjuna (%)	100,00	100,00	100,00	71.007.825,62	100,00	72.277.534,39	100,00	73.577.790,93	100,00	74.909.673,40	100,00	76.210.648,71	7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Arjuna
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Husen Sastranegara	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Husen Sastranegara (%)	100,00	100,00	100,00	66.815.678,98	100,00	68.010.426,93	100,00	69.233.919,18	100,00	70.487.170,21	100,00	71.711.338,79	7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Husen Sastranegara
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerahLingkup Kelurahan Pajajaran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pajajaran (%)	100,00	0,00	0,00	71.784.305,06	0,00	73.067.898,27	0,00	74.382.373,28	0,00	75.728.820,04	0,00	77.044.021,68	7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Pajajaran
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pamoyanan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pasirkaliki (%)	100,00	100,00	100,00	66.668.576,70	100,00	67.860.694,28	100,00	69.081.492,86	100,00	70.331.984,72	100,00	71.553.458,16	7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Pamoyanan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pasirkaliki	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pasirkaliki (%)	100,00	100,00	100,00	89.813.472,76	100,00	91.419.450,03	100,00	93.064.065,33	100,00	94.748.682,31	100,00	96.394.206,73	7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Pasir Kaliki
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukaraja	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukaraja (%)	100,00	100,00	100,00	100.035.505,30	100,00	101.824.265,31	100,00	103.656.060,88	100,00	105.532.410,91	100,00	107.365.219,08	7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sukaraja
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Andir	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	87,85	87,85	15.686.737.476,00	87,85	16.021.590.460,00	87,85	16.252.334.431,00	87,85	16.545.463.744,00	87,85	16.835.091.954,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Campaka	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Campaka (%)	100,00	100,00	100,00	261.237.318,02	100,00	260.824.789,26	100,00	272.880.007,30	100,00	277.748.283,07	100,00	282.632.597,00	7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Campaka
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Ciroyom	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Ciroyom (%)	100,00	100,00	100,00	290.675.301,00	100,00	287.600.084,00	100,00	301.176.545,00	100,00	306.609.650,00	100,00	311.972.858,00	7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Ciroyom
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Dunguscariang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Dunguscariang (%)	100,00	100,00	100,00	319.359.667,00	100,00	315.981.711,00	100,00	330.894.173,00	100,00	336.865.668,00	100,00	342.761.686,00	7.01.0.00.0.00.05.0003 - Kelurahan Dungus Cariang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Garuda	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Garuda (%)	100,00	100,00	100,00	290.675.301,00	100,00	287.600.084,00	100,00	301.176.545,00	100,00	306.609.650,00	100,00	311.972.858,00	7.01.0.00.0.00.05.0006 - Kelurahan Garuda
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Kebon Jeruk	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Kebon Jeruk (%)	100,00	100,00	100,00	261.818.395,00	100,00	258.911.088,00	100,00	271.274.792,00	100,00	276.168.041,00	100,00	280.999.399,00	7.01.0.00.0.00.05.0005 - Kelurahan Kebon Jeruk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Maleber	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Maleber (%)	100,00	100,00	100,00	328.494.224,00	100,00	325.021.113,00	100,00	340.358.679,00	100,00	346.499.425,00	100,00	352.564.845,00	7.01.0.00.0.00.05.0002 - Kelurahan Maleber
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Coblong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	87,10	87,10	18.639.919.890,63	87,10	18.692.891.221,58	87,10	18.747.136.983,11	87,10	18.802.702.155,05	87,10	18.856.977.903,14	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipaganti	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipaganti (%)	100,00	100,00	100,00	333.561.595,42	100,00	386.532.926,38	100,00	440.778.687,90	100,00	496.343.859,87	100,00	550.619.607,99	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Cipaganti
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Dago	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Dago (%)	100,00	100,00	100,00	372.015.897,42	100,00	424.987.228,39	100,00	479.232.989,90	100,00	534.798.161,87	100,00	589.073.909,99	7.01.0.00.0.00.06.0005 - Kelurahan Dago
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Lebakgede	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Lebakgede (%)	100,00	100,00	100,00	349.367.814,35	100,00	402.339.145,32	100,00	456.584.906,83	100,00	512.150.078,80	100,00	566.425.826,92	7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Lebakgede
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi (%)	100,00	100,00	100,00	367.289.529,74	100,00	420.260.860,71	100,00	474.506.622,22	100,00	530.071.794,19	100,00	584.347.542,31	7.01.0.00.0.00.06.0007 - Kelurahan Lebak Siliwangi
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sekeloa	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sekeloa (%)	100,00	100,00	100,00	330.028.894,53	100,00	383.000.225,50	100,00	437.245.987,01	100,00	492.811.158,98	100,00	547.086.907,10	7.01.0.00.0.00.06.0006 - Kelurahan Sekeloa
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Bandung Wetan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,10	87,00	87,10	12.559.386.960,58	87,20	12.783.964.516,03	87,30	13.014.110.350,97	87,40	13.249.530.082,68	87,50	13.479.621.217,42	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cihapit	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cihapit (%)	100,00	100,00	100,00	68.464.442,70	100,00	69.688.672,61	100,00	70.867.002,64	100,00	72.223.140,60	100,00	73.482.886,35	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Cihapit
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Citarum	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Citarum (%)	100,00	100,00	100,00	69.413.049,40	100,00	70.654.241,59	100,00	71.911.919,18	100,00	73.223.825,81	100,00	74.501.025,92	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Citarum
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Tamansari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Tamansari (%)	100,00	100,00	100,00	74.241.380,00	100,00	75.568.908,78	100,00	76.851.909,68	100,00	78.317.231,76	100,00	79.683.273,15	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Taman Sari
Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Sumur Bandung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,81	86,85	87,00	13.502.799.708,25	87,10	14.805.245.875,29	87,20	15.052.871.821,29	87,30	15.211.311.064,52	87,40	15.325.650.696,14	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Babakan Ciamis	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Babakan Ciamis (%)	100,00	100,00	100,00	123.215.308,89	100,00	127.197.461,98	100,00	178.469.436,60	100,00	179.754.130,96	100,00	188.307.587,23	7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Babakan Ciamis
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Braga	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Braga (%)	100,00	100,00	100,00	92.080.253,20	100,00	93.001.055,73	100,00	149.431.066,29	100,00	150.425.376,95	100,00	158.978.833,22	7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Braga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Kebon Pisang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Kebon Pisang (%)	100,00	100,00	100,00	104.169.858,23	100,00	105.211.556,81	100,00	156.263.672,38	100,00	157.326.309,10	100,00	165.879.765,37	7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Kebon Pisang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Merdeka	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Merdeka (%)	100,00	100,00	100,00	106.344.085,60	100,00	107.407.526,46	100,00	158.481.601,72	100,00	159.566.417,74	100,00	168.119.874,01	7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Merdeka
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,35	85,30	85,35	15.770.125.228,21	85,40	15.400.212.639,27	85,45	15.571.445.423,05	85,50	15.840.507.729,96	85,60	16.174.913.391,27	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	95,00	95,00	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cicadas	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cicadas (%)	0,00	95,00	100,00	118.645.476,00	100,00	137.628.752,15	100,00	143.133.902,24	100,00	147.427.919,32	100,00	151.850.756,89	7.01.0.00.0.00.09.0004 - Kelurahan Cicadas
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cikutra	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup kelurahan Cikutra (%)	0,00	95,00	100,00	225.914.359,22	100,00	262.060.656,70	100,00	272.543.082,96	100,00	280.719.375,45	100,00	289.140.956,72	7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Cikutra
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Padasuka	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup kelurahan Padasuka (%)	0,00	95,00	100,00	104.621.811,00	100,00	121.361.300,76	100,00	126.215.752,79	100,00	130.002.225,37	100,00	133.902.292,14	7.01.0.00.0.00.09.0002 - Kelurahan Padasuka
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pasirlayung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasirlayung (%)	0,00	95,00	100,00	280.714.331,00	100,00	325.628.623,96	100,00	338.653.768,92	100,00	348.813.381,99	100,00	359.277.783,45	7.01.0.00.0.00.09.0007 - Kelurahan Pasirlayung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukamaju	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Sukamaju (%)	0,00	95,00	100,00	122.081.979,00	100,00	141.615.095,64	100,00	147.279.699,47	100,00	151.698.090,45	100,00	156.249.033,16	7.01.0.00.0.00.09.0005 - Kelurahan Sukamaju
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukapada	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Sukapada (%)	0,00	95,00	100,00	277.307.601,04	100,00	321.676.817,21	100,00	334.543.889,89	100,00	344.580.206,59	100,00	354.917.612,79	7.01.0.00.0.00.09.0006 - Kelurahan Sukapada
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cibeunying Kaler	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,35	83,75	83,78	14.361.460.469,88	83,82	14.225.921.760,00	83,89	14.626.905.083,00	83,91	14.440.819.270,00	83,92	13.831.036.309,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kelurahan Cigadung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cigadung (%)	100,00	100,00	100,00	460.211.539,00	100,00	460.211.539,00	100,00	470.211.539,00	100,00	490.211.539,51	100,00	488.211.539,00	7.01.0.00.0.00.10.0005 - Kelurahan Cigadung
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kelurahan Neglasari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Neglasari (%)	100,00	100,00	100,00	557.746.223,00	100,00	557.746.223,00	100,00	567.746.223,99	100,00	577.746.223,00	100,00	529.746.223,00	7.01.0.00.0.00.10.0004 - Kelurahan Neglasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Cihaurgeulis	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis (%)	100,00	100,00	100,00	446.142.662,88	100,00	446.142.662,88	100,00	456.142.662,00	100,00	446.142.662,00	100,00	436.142.462,00	7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Cihaur Geulis
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukaluyu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukaluyu (%)	100,00	100,00	100,00	717.919.112,00	100,00	717.919.112,00	100,00	720.919.112,00	100,00	732.919.112,00	100,00	696.467.898,00	7.01.0.00.0.00.10.0003 - Kelurahan Sukaluyu
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Astana Anyar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	85,95	86,10	15.282.165.270,54	86,25	15.283.502.283,56	86,85	15.304.641.489,08	871,00	15.348.517.082,13	871,00	15.362.445.751,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibadak	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cibadak (%)	100,00	100,00	100,00	152.228.789,00	100,00	152.228.789,00	100,00	172.228.789,00	100,00	202.228.789,00	100,00	202.228.789,00	7.01.0.00.0.00.11.0006 - Kelurahan Cibadak
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Karanganyar	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup kelurahan Karanganyar (%)	100,00	100,00	100,00	88.994.074,00	100,00	88.994.074,00	100,00	108.994.074,00	100,00	138.994.074,00	100,00	138.994.074,00	7.01.0.00.0.00.11.0004 - Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Karasak	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Karasak (%)	100,00	100,00	100,00	61.087.823,00	100,00	61.087.823,00	100,00	81.087.823,00	100,00	111.087.823,00	100,00	111.087.823,00	7.01.0.00.0.00.11.0002 - Kelurahan Karasak
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Nyengseret	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Nyengseret (%)	100,00	100,00	100,00	124.791.205,00	100,00	124.791.205,00	100,00	144.791.205,00	100,00	174.791.205,00	100,00	174.791.205,00	7.01.0.00.0.00.11.0003 - Kelurahan Nyengseret
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Panjunan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Panjunan (%)	100,00	100,00	100,00	134.957.794,00	100,00	134.957.794,00	100,00	154.957.794,00	100,00	184.957.794,00	100,00	184.957.794,00	7.01.0.00.0.00.11.0005 - Kelurahan Panjunan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	99.281.520,00	100,00	99.281.520,00	100,00	119.281.520,00	100,00	149.281.520,00	100,00	149.281.520,00	7.01.0.00.0.00.11.0007 - Kelurahan Pelindung Hewan
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Bojongloa Kaler	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,50	85,52	85,55	15.988.482.457,55	85,57	16.001.670.831,86	85,59	16.110.506.327,45	85,60	16.504.821.514,48	85,61	16.885.690.639,42	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Babakan Asih	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Babakan Asih (%)	100,00	100,00	100,00	324.568.092,16	100,00	345.878.727,53	100,00	368.291.804,85	100,00	391.250.031,65	100,00	413.675.498,73	7.01.0.00.0.00.12.0005 - Kelurahan Babakan Asih
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Babakan Tarogong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Babakan Tarogong (%)	100,00	100,00	100,00	324.280.153,60	100,00	337.029.820,20	100,00	405.922.717,75	100,00	422.321.451,18	100,00	338.339.641,95	7.01.0.00.0.00.12.0003 - Kelurahan Babakan Tarogong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Jamika	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Jamika (%)	100,00	100,00	100,00	278.136.184,32	100,00	367.896.052,16	100,00	487.107.261,30	100,00	406.785.741,41	100,00	377.071.918,27	7.01.0.00.0.00.12.0004 - Kelurahan Jamika
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kopo	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Kopo (%)	100,00	100,00	100,00	250.424.122,88	100,00	411.930.701,44	100,00	397.149.895,24	100,00	345.535.962,96	100,00	350.671.713,56	7.01.0.00.0.00.12.0002 - Kelurahan Kopo
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Suka Asih	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Suka Asih (%)	100,00	100,00	100,00	319.712.061,44	100,00	333.861.402,89	100,00	349.476.348,40	100,00	375.714.321,88	100,00	401.343.427,12	7.01.0.00.0.00.12.0006 - Kelurahan Suka Asih
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Bojongloa Kidul	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,85	86,85	86,90	17.508.429.523,25	86,95	17.730.177.720,39	87,00	18.006.940.447,92	87,10	18.287.535.397,20	87,15	18.565.749.712,95	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibaduyut	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Kelurahan Cibaduyut (%)	100,00	100,00	100,00	285.655.219,67	100,00	314.174.729,93	100,00	323.683.824,43	100,00	334.948.191,43	100,00	343.975.489,43	7.01.0.00.0.00.13.0004 - Kelurahan Cibaduyut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	277.170.987,51	100,00	294.750.497,77	100,00	303.759.592,27	100,00	317.923.959,27	100,00	330.146.994,27	7.01.0.00.0.00.13.0006 - Kelurahan Cibaduyut Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	284.924.071,24	100,00	301.443.581,50	100,00	310.452.676,00	100,00	322.217.043,00	100,00	331.244.341,00	7.01.0.00.0.00.13.0007 - Kelurahan Cibaduyut Wetan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kebonlega	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Kebonlega (%)	100,00	100,00	100,00	262.832.089,54	100,00	278.727.724,80	100,00	300.911.307,30	100,00	317.575.954,30	100,00	333.064.156,30	7.01.0.00.0.00.13.0003 - Kelurahan Kebon Lega
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Mekarwangi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Kelurahan Mekarwangi (%)	100,00	100,00	100,00	269.052.524,62	100,00	296.719.660,33	100,00	306.471.916,83	100,00	319.170.495,83	100,00	332.301.008,83	7.01.0.00.0.00.13.0005 - Kelurahan Mekarwangi
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Situsaeur	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Situsaeur (%)	100,00	100,00	100,00	277.205.476,45	100,00	291.974.986,71	100,00	306.693.097,21	100,00	319.021.732,21	100,00	333.049.030,21	7.01.0.00.0.00.13.0002 - Kelurahan Situsaeur
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kecamatan Babakan Ciparay	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,01	85,35	85,90	21.315.821.569,49	86,25	20.003.411.756,37	86,85	22.106.515.295,80	87,35	20.811.549.591,33	88,15	21.227.780.583,16	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kecamatan Babakan Ciparay (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Babakan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Babakan (%)	100,00	100,00	100,00	106.946.972,39	100,00	449.987.277,38	100,00	106.946.972,39	100,00	450.326.617,32	100,00	447.111.107,38	7.01.0.00.0.00.14.0003 - Kelurahan Babakan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Babakan Ciparay	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Babakan Ciparay (%)	100,00	100,00	100,00	115.886.011,75	100,00	487.598.945,05	100,00	115.886.011,75	100,00	487.966.648,33	100,00	484.482.373,70	7.01.0.00.0.00.14.0002 - Kelurahan Babakan Ciparay
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Cirangrang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cirangrang (%)	100,00	100,00	100,00	41.638.575,01	100,00	175.197.376,63	100,00	41.638.575,01	100,00	175.329.494,74	100,00	174.077.572,88	7.01.0.00.0.00.14.0007 - Kelurahan Cirangrang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Margahayu Utara	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Margahayu Utara (%)	100,00	100,00	100,00	72.321.443,67	100,00	304.297.810,44	100,00	72.321.443,67	100,00	304.527.284,48	100,00	302.352.839,37	7.01.0.00.0.00.14.0005 - Kelurahan Margahayu Utara
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Margasuka	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Margasuka (%)	100,00	100,00	100,00	69.970.381,10	100,00	294.405.541,22	100,00	69.970.381,10	100,00	294.627.555,41	100,00	292.523.798,27	7.01.0.00.0.00.14.0006 - Kelurahan Margasuka
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Sukahaji	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Sukahaji (%)	100,00	100,00	100,00	124.185.401,71	100,00	522.519.240,68	100,00	124.185.401,71	100,00	522.913.277,71	100,00	519.179.470,34	7.01.0.00.0.00.14.0004 - Kelurahan Sukahaji
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Bandung Kulon	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,60	86,70	87,00	24.508.714.946,68	87,10	24.559.874.080,40	87,20	24.612.264.045,22	87,30	24.665.928.282,30	87,40	24.718.347.207,88	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Caringin	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Caringin (%)	100,00	100,00	100,00	197.292.199,68	100,00	248.451.333,40	100,00	300.841.298,25	100,00	354.505.535,32	100,00	406.924.460,90	7.01.0.00.0.00.15.0005 - Kelurahan Caringin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibuntu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cibuntu (%)	100,00	100,00	100,00	172.841.311,89	100,00	224.000.445,62	100,00	276.390.410,47	100,00	330.054.647,54	100,00	382.473.573,12	7.01.0.00.0.00.15.0003 - Kelurahan Cibuntu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler (%)	100,00	100,00	100,00	182.675.184,88	100,00	233.834.318,60	100,00	286.224.283,45	100,00	339.888.520,52	100,00	392.307.446,10	7.01.0.00.0.00.15.0006 - Kelurahan Cigondewah Kaler
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	159.327.764,48	100,00	210.486.898,20	100,00	262.876.863,05	100,00	316.541.100,12	100,00	368.960.025,70	7.01.0.00.0.00.15.0009 - Kelurahan Cigondewah Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu (%)	100,00	100,00	100,00	147.218.033,81	100,00	198.377.167,53	100,00	250.767.132,38	100,00	304.431.369,45	100,00	356.850.295,03	7.01.0.00.0.00.15.0008 - Kelurahan Cigondewah Rahayu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cijerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cijerah (%)	100,00	100,00	100,00	135.517.090,88	100,00	186.676.224,60	100,00	239.066.189,45	100,00	292.730.426,52	100,00	345.149.352,10	7.01.0.00.0.00.15.0002 - Kelurahan Cijerah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Gempolsari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Gempolsari (%)	100,00	100,00	100,00	90.319.835,98	100,00	141.478.969,70	100,00	193.868.934,55	100,00	247.533.171,62	100,00	299.952.097,20	7.01.0.00.0.00.15.0007 - Kelurahan Gempolsari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Warung Muncang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Warung Muncang (%)	100,00	100,00	100,00	155.533.288,04	100,00	206.692.421,76	100,00	259.082.386,61	100,00	312.746.623,68	100,00	365.165.549,25	7.01.0.00.0.00.15.0004 - Kelurahan Warung Muncang
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamtaan Regol	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,10	85,20	85,40	17.803.129.039,88	85,60	18.121.471.265,59	85,80	18.447.472.446,81	86,00	18.781.402.899,47	86,20	19.107.584.291,06	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Ancol	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Ancol (%)	100,00	100,00	100,00	211.472.789,50	100,00	215.254.187,60	100,00	219.126.561,90	100,00	223.093.123,30	100,00	226.967.638,20	7.01.0.00.0.00.16.0003 - Kelurahan Ancol
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Balonggede	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Balonggede (%)	100,00	100,00	100,00	242.643.287,20	100,00	246.982.052,80	100,00	251.425.204,20	100,00	255.976.425,70	100,00	260.422.033,30	7.01.0.00.0.00.16.0005 - Kelurahan Balonggede
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Ciateul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Ciateul (%)	100,00	100,00	100,00	271.979.535,00	100,00	276.842.869,50	100,00	281.823.210,30	100,00	286.924.687,00	100,00	291.907.780,90	7.01.0.00.0.00.16.0007 - Kelurahan Ciateul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cigereleng	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cigereleng (%)	100,00	100,00	100,00	148.526.765,90	100,00	151.182.610,30	100,00	153.902.351,40	100,00	156.688.244,20	100,00	159.409.488,80	7.01.0.00.0.00.16.0002 - Kelurahan Cigereleng
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Ciseureuh	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Ciseureuh (%)	100,00	100,00	100,00	264.261.109,30	100,00	268.986.428,60	100,00	273.825.433,80	100,00	278.782.137,20	100,00	283.623.817,40	7.01.0.00.0.00.16.0006 - Kelurahan Ciseureuh
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pasirluyu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pasirluyu (%)	100,00	100,00	100,00	378.796.693,60	100,00	385.570.052,60	100,00	392.506.370,80	100,00	399.611.400,00	100,00	406.551.552,60	7.01.0.00.0.00.16.0008 - Kelurahan Pasirluyu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pungkur	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pungkur (%)	100,00	100,00	100,00	269.607.821,00	100,00	274.428.746,20	100,00	279.365.657,40	100,00	284.422.648,30	100,00	289.362.288,70	7.01.0.00.0.00.16.0004 - Kelurahan Pungkur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kecamatan Lengkong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	85,35	85,35	18.152.287.630,84	85,35	18.482.643.658,47	85,35	18.819.604.589,85	85,35	19.158.730.523,74	85,35	19.484.559.420,71	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Burangrang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Burangrang (%)	100,00	100,00	100,00	158.001.664,23	100,00	160.877.132,55	100,00	163.810.143,70	100,00	166.761.973,41	100,00	169.598.062,67	7.01.0.00.0.00.17.0004 - Kelurahan Burangrang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cijagra	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cijagra (%)	100,00	100,00	100,00	118.380.923,00	100,00	120.535.334,45	100,00	122.732.859,19	100,00	124.944.483,53	100,00	127.069.390,66	7.01.0.00.0.00.17.0002 - Kelurahan Cijagra
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cikawao	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cikawao (%)	100,00	100,00	100,00	163.947.651,30	100,00	166.931.330,49	100,00	169.974.717,99	100,00	173.037.632,23	100,00	175.980.450,43	7.01.0.00.0.00.17.0008 - Kelurahan Cikawao
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan (%)	100,00	100,00	100,00	107.509.143,75	100,00	109.465.699,96	100,00	111.461.410,06	100,00	113.469.924,88	100,00	115.399.686,38	7.01.0.00.0.00.17.0003 - Kelurahan Lingkar Selatan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Malabar	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Malabar (%)	100,00	100,00	100,00	160.772.892,54	100,00	163.698.794,38	100,00	166.683.248,30	100,00	169.686.850,84	100,00	172.572.682,94	7.01.0.00.0.00.17.0007 - Kelurahan Malabar
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Paledang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Paledang (%)	100,00	100,00	100,00	101.055.929,53	100,00	102.895.043,86	100,00	104.770.961,87	100,00	106.658.916,00	100,00	108.472.843,96	7.01.0.00.0.00.17.0005 - Kelurahan Paledang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Turangga	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Turangga (%)	100,00	100,00	100,00	181.662.764,91	100,00	184.968.841,01	100,00	188.341.077,10	100,00	191.734.949,88	100,00	194.995.749,81	7.01.0.00.0.00.17.0006 - Kelurahan Turangga
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Batununggal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	95,00	95,00	18.296.238.907,50	95,00	18.360.091.187,00	95,00	18.433.178.516,00	95,00	18.435.826.843,00	0,00	18.509.131.470,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Binong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Binong (%)	100,00	100,00	100,00	227.539.206,00	100,00	267.539.206,00	100,00	307.539.206,00	100,00	357.539.206,00	100,00	397.539.206,00	7.01.0.00.0.00.18.0009 - Kelurahan Binong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cibangkong	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cibangkong (%)	100,00	100,00	100,00	185.184.219,00	100,00	225.184.219,00	100,00	265.184.219,00	100,00	315.184.219,00	100,00	355.184.219,00	7.01.0.00.0.00.18.0004 - Kelurahan Cibangkong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Gumuruh	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Gumuruh (%)	100,00	100,00	100,00	243.687.419,00	100,00	283.687.419,00	100,00	323.687.419,00	100,00	373.687.419,00	100,00	413.687.419,00	7.01.0.00.0.00.18.0002 - Kelurahan Gumuruh
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kacapiring	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Kacapiring (%)	100,00	100,00	100,00	271.844.749,00	100,00	311.844.749,00	100,00	351.844.749,00	100,00	401.844.749,00	100,00	441.844.749,00	7.01.0.00.0.00.18.0005 - Kelurahan Kacapiring
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kebon Gedang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Kebon Gedang (%)	100,00	100,00	100,00	338.288.400,00	100,00	378.288.400,00	100,00	418.288.400,00	100,00	468.288.400,00	100,00	508.288.400,00	7.01.0.00.0.00.18.0007 - Kelurahan Kebon Gedang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kebonwaru	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Kebonwaru (%)	100,00	100,00	100,00	289.830.120,00	100,00	329.830.120,00	100,00	369.830.120,00	100,00	419.830.120,00	100,00	459.830.120,00	7.01.0.00.0.00.18.0006 - Kelurahan Kebon Waru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Maleer	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Maleer (%)	100,00	100,00	100,00	282.340.322,00	100,00	322.340.322,00	100,00	362.340.322,00	100,00	412.340.322,00	100,00	452.340.322,00	7.01.0.00.0.00.18.0003 - Kelurahan Maleer
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Samoja	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Samoja (%)	100,00	100,00	100,00	331.792.438,00	100,00	371.792.438,00	100,00	411.792.438,00	100,00	461.792.438,00	100,00	501.792.438,00	7.01.0.00.0.00.18.0008 - Kelurahan Samoja
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Ujung Berung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,37	83,37	83,37	16.999.583.206,90	83,38	17.307.791.254,23	83,38	17.629.429.158,34	83,39	18.014.970.914,19	83,39	18.436.924.814,93	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Cigending	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cigending (%)	100,00	100,00	100,00	233.817.673,00	100,00	233.817.673,00	100,00	233.817.673,00	100,00	233.817.673,00	100,00	233.817.673,00	7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Cigending
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Pasanggrahan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasanggrahan (%)	100,00	100,00	100,00	266.668.495,00	100,00	266.668.495,00	100,00	266.668.495,00	100,00	266.668.495,00	100,00	266.668.495,00	7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Pasangrahan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Pasir Endah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasir Endah (%)	100,00	100,00	100,00	219.437.560,00	100,00	219.437.560,00	100,00	219.437.560,00	100,00	219.437.560,00	100,00	219.437.560,00	7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Pasir Endah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Pasirjati	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasirjati (%)	100,00	100,00	100,00	257.787.922,00	100,00	257.787.922,00	100,00	257.787.922,00	100,00	257.787.922,00	100,00	257.787.922,00	7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Pasirjati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Pasirwangi	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasirwangi (%)	100,00	100,00	100,00	248.483.728,00	100,00	248.483.728,00	100,00	248.483.728,00	100,00	248.483.728,00	100,00	248.483.728,00	7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Pasirwangi
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Kiaracondong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	85,65	85,65	16.736.171.514,06	85,65	16.973.565.120,82	85,65	17.179.505.632,27	85,65	17.490.483.740,87	85,65	17.794.245.411,97	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Babakan Sari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Babakan Sari (%)	100,00	100,00	100,00	258.774.550,84	100,00	303.234.618,02	100,00	279.116.279,15	100,00	284.168.755,88	100,00	289.103.986,78	7.01.0.00.0.00.20.0006 - Kelurahan Babakansari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Babakan Surabaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Surabaya (%)	100,00	100,00	100,00	173.904.635,04	100,00	253.957.187,38	100,00	278.075.168,74	100,00	283.108.799,62	100,00	288.025.622,01	7.01.0.00.0.00.20.0004 - Kelurahan Babakan Surabaya
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cicaheum	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cicaheum (%)	100,00	100,00	100,00	206.026.894,99	100,00	232.313.350,32	100,00	237.463.478,27	100,00	241.761.968,86	100,00	245.960.710,34	7.01.0.00.0.00.20.0005 - Kelurahan Cicaheum
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kebon Jayanti	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Jayanti (%)	100,00	100,00	100,00	379.519.133,31	100,00	275.815.096,05	100,00	391.231.397,56	100,00	398.313.347,57	100,00	405.230.956,59	7.01.0.00.0.00.20.0003 - Kelurahan Kebon Jayanti
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kebon Kangkung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Kebon Kangkung (%)	100,00	100,00	100,00	277.804.259,08	100,00	273.241.233,67	100,00	298.328.189,28	100,00	303.728.434,08	100,00	309.003.362,90	7.01.0.00.0.00.20.0007 - Kelurahan Kebon Kangkung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukapura	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Sukapura (%)	100,00	100,00	100,00	268.498.174,68	100,00	296.781.402,62	100,00	279.957.921,80	100,00	285.025.633,69	100,00	289.975.746,23	7.01.0.00.0.00.20.0002 - Kelurahan Sukapura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kecamatan Arcamanik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,45	84,70	84,75	15.513.381.836,37	84,80	15.153.266.376,06	84,85	15.471.003.166,88	84,90	15.742.313.111,86	85,00	16.033.458.549,27	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Kelurahan Cisaranten Bina Harapan (%)	100,00	100,00	100,00	69.946.406,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	7.01.0.00.0.00.21.0003 - Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Kelurahan Cisaranten Endah (%)	100,00	100,00	100,00	54.714.358,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	7.01.0.00.0.00.21.0005 - Kelurahan Cisaranten Endah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Kelurahan Cisaranten Kulon (%)	100,00	100,00	100,00	76.961.140,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	7.01.0.00.0.00.21.0004 - Kelurahan Cisaranten Kulon
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukamiskin	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukamiskin (%)	100,00	100,00	100,00	175.846.938,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	7.01.0.00.0.00.21.0002 - Kelurahan Sukamiskin
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cibiru	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,85	85,00	85,15	14.259.854.140,64	85,30	14.473.929.972,52	85,45	14.845.289.147,98	85,60	15.208.924.057,74	85,75	15.590.494.044,77	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Cipadung	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cipadung (%)	100,00	100,00	100,00	87.022.852,00	100,00	95.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	112.000.000,00	100,00	112.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0003 - Kelurahan Cipadung
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Cisurupan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Cisurupan (%)	100,00	100,00	100,00	100.993.607,70	100,00	100.993.607,70	100,00	100.993.607,70	100,00	100.993.607,70	100,00	100.993.607,70	7.01.0.00.0.00.22.0005 - Kelurahan Cisurupan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Palasari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Palasari (%)	100,00	100,00	100,00	92.429.020,00	100,00	110.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	115.000.000,00	100,00	115.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0002 - Kelurahan Palasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah lingkup Kelurahan Pasirbiru	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Pasirbiru (%)	100,00	100,00	100,00	85.964.219,36	100,00	95.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	110.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0004 - Kelurahan Pasirbiru
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Antapani	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,10	82,10	82,50	13.533.674.673,56	83,00	13.626.198.715,22	83,50	13.718.527.423,12	84,00	13.810.718.630,07	84,50	17.626.964.973,94	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Antapani Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Antapani Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	233.560.800,00	100,00	233.560.800,00	100,00	233.560.800,00	100,00	233.560.800,00	100,00	233.560.800,00	7.01.0.00.0.00.23.0005 - Kelurahan Antapani Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Antapani Kulon	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Antapani Kulon (%)	100,00	100,00	100,00	187.175.235,00	100,00	187.175.235,00	100,00	187.175.235,00	100,00	187.175.235,00	100,00	187.175.235,00	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Antapani Kulon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Antapani Tengah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Antapani Tengah (%)	100,00	100,00	100,00	226.324.410,00	100,00	226.324.410,00	100,00	226.324.410,00	100,00	226.324.410,00	100,00	226.324.410,00	7.01.0.00.0.00.23.0004 - Kelurahan Antapani Tengah
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Antapani Wetan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Antapani Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	200.856.443,30	100,00	200.856.443,30	100,00	200.856.443,30	100,00	200.856.443,30	100,00	200.856.443,30	7.01.0.00.0.00.23.0003 - Kelurahan Antapani Wetan
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Rancasari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,95	83,95	83,95	15.559.147.856,56	84,00	15.837.364.890,70	84,05	16.122.275.513,27	84,10	16.414.115.968,56	84,15	16.699.184.087,32	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipamokolan	Persentase layanan administrasi perkntoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipamokolan (%)	0,00	100,00	100,00	87.027.595,68	100,00	88.583.757,99	100,00	90.177.359,82	100,00	91.809.722,56	100,00	93.404.205,31	7.01.0.00.0.00.24.0002 - Kelurahan Cipamokolan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Derwati	Persentase layanan administrasi perkntoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Derwati (%)	0,00	100,00	100,00	74.579.480,56	100,00	75.913.055,00	100,00	77.278.713,74	100,00	78.677.589,17	100,00	80.044.002,83	7.01.0.00.0.00.24.0003 - Kelurahan Derwati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Manjahlega	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Manjahlega (%)	100,00	100,00	100,00	93.569.943,24	100,00	95.243.090,92	100,00	96.956.492,65	100,00	98.711.569,15	100,00	100.425.918,03	7.01.0.00.0.00.24.0004 - Kelurahan Manjahlega
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Mekarjaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Mekarjaya (%)	100,00	100,00	100,00	90.520.373,24	100,00	92.138.990,79	100,00	93.796.550,45	100,00	95.494.426,66	100,00	97.152.902,61	7.01.0.00.0.00.24.0005 - Kelurahan Mekarjaya
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Buahbatu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00	85,80	86,00	13.569.787.918,71	86,10	13.999.913.307,17	86,20	14.340.677.458,15	86,30	14.740.299.504,46	86,40	15.049.619.743,97	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cijawura	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cijawura (%)	100,00	100,00	100,00	189.900.614,00	100,00	207.650.614,00	100,00	182.900.614,00	100,00	182.900.614,00	100,00	182.900.614,00	7.01.0.00.0.00.25.0004 - Kelurahan Cijawura
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Jatisari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Jatisari (%)	100,00	100,00	100,00	150.797.445,00	100,00	156.797.445,00	100,00	157.797.445,00	100,00	157.797.445,00	100,00	157.797.445,00	7.01.0.00.0.00.25.0005 - Kelurahan Jatisari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Margasari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Margasari (%)	100,00	100,00	100,00	188.706.200,00	100,00	196.206.200,00	100,00	199.226.200,00	100,00	199.726.200,00	100,00	197.226.200,00	7.01.0.00.0.00.25.0003 - Kelurahan Margasari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sekejati	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sekejati (%)	100,00	100,00	100,00	215.836.257,00	100,00	231.836.257,00	100,00	237.336.257,00	100,00	237.336.257,00	100,00	238.336.257,00	7.01.0.00.0.00.25.0002 - Kelurahan Sekejati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kecamatan Bandung Kidul	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,60	83,80	83,80	13.350.988.998,94	83,90	13.783.914.148,75	83,90	14.227.254.989,97	84,00	14.681.379.135,22	84,00	15.124.965.051,53	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Batununggal	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup Kelurahan Batununggal (%)	0,00	0,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	100,00	279.616.465,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - Kelurahan Batununggal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Kujangsari	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Kujangsari (%)	100,00	100,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	100,00	222.856.178,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - Kelurahan Kujangsari
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Mengger	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Mengger (%)	100,00	100,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	100,00	247.420.788,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - Kelurahan Mengger
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Wates	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Wates (%)	100,00	100,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	100,00	271.839.167,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - Kelurahan Wates
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Gedebage	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,60	83,80	83,80	14.283.605.738,00	83,90	14.538.964.930,02	83,90	14.800.203.602,65	84,00	15.067.814.820,87	84,00	16.236.705.395,58	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cimincrang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup kelurahan Cimincrang (%)	100,00	100,00	100,00	402.793.874,00	100,00	409.997.331,00	100,00	417.377.283,00	100,00	424.918.003,00	100,00	432.301.800,00	7.01.0.00.0.00.27.0002 - Kelurahan Cimincrang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cisaranten Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup kelurahan Cisaranten Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	477.002.555,82	100,00	485.572.496,00	100,00	494.609.788,00	100,00	503.905.655,08	100,00	509.044.276,52	7.01.0.00.0.00.27.0003 - Kelurahan Cisaranten Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Rancabolang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik lingkup kelurahan Rancabolang (%)	100,00	100,00	100,00	425.023.472,00	100,00	432.628.287,00	100,00	440.415.000,00	100,00	448.366.538,00	100,00	456.158.200,00	7.01.0.00.0.00.27.0004 - Kelurahan Rancabolang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Rancanumpang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup kelurahan Rancanumpang (%)	100,00	100,00	100,00	389.585.245,00	100,00	396.554.667,00	100,00	403.692.651,00	100,00	410.990.310,00	100,00	418.125.200,00	7.01.0.00.0.00.27.0005 - Kelurahan Rancanumpang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kecamatan Panyileukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	88,00	88,00	88,00	15.859.222.450,55	88,10	16.527.277.150,66	88,10	16.720.028.475,77	88,20	17.025.152.469,93	88,20	17.200.778.173,89	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	95,00	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul (%)	100,00	95,00	95,00	194.973.818,00	95,00	294.973.818,00	95,00	282.973.818,00	95,00	284.973.818,00	95,00	319.973.818,00	7.01.0.00.0.00.28.0004 - Kelurahan Cipadung Kidul
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon (%)	100,00	95,00	95,00	136.988.145,00	95,00	236.988.145,00	95,00	279.988.145,00	95,00	285.988.145,00	95,00	320.988.145,00	7.01.0.00.0.00.28.0002 - Kelurahan Cipadung Kulon
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	147.582.057,80	100,00	247.582.057,80	100,00	281.782.057,80	100,00	284.782.057,80	100,00	319.782.057,80	7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Cipadung Wetan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Mekarmulya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Mekarmulya (%)	100,00	95,00	95,00	128.213.837,20	95,00	228.213.837,20	95,00	285.713.837,20	95,00	292.713.837,20	95,00	327.713.837,20	7.01.0.00.0.00.28.0005 - Kelurahan Mekarmulya
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Cinambo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,20	86,85	86,71	12.903.675.519,05	86,72	12.988.776.657,83	86,73	13.034.654.359,54	86,74	13.246.512.502,86	86,75	13.452.526.123,69	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu (%)	100,00	100,00	100,00	126.628.536,00	100,00	131.628.536,00	100,00	181.628.536,00	100,00	191.628.536,00	100,00	201.628.536,00	7.01.0.00.0.00.29.0005 - Kelurahan Babakan Penghulu
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	142.563.876,00	100,00	192.563.876,00	100,00	242.563.876,00	100,00	252.563.876,00	100,00	262.563.876,00	7.01.0.00.0.00.29.0004 - Kelurahan Cisaranten Wetan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pakemitan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pakemitan (%)	100,00	100,00	100,00	155.045.650,45	100,00	205.045.650,45	100,00	255.045.650,45	100,00	265.045.650,45	100,00	275.045.650,45	7.01.0.00.0.00.29.0002 - Kelurahan Pakemitan
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sukamulya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sukamulya (%)	100,00	100,00	100,00	99.621.977,00	100,00	149.621.977,00	100,00	199.621.977,00	100,00	209.621.977,00	100,00	219.621.977,00	7.01.0.00.0.00.29.0003 - Kelurahan Sukamulya
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan Mandalajati	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,60	87,60	87,70	13.545.996.368,34	87,75	13.713.338.494,70	87,80	13.891.924.345,12	87,85	14.082.150.757,97	87,90	14.261.001.166,27	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Jatihandap	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Jatihandap (%)	95,00	95,00	95,00	235.919.182,00	95,00	394.565.032,52	95,00	235.919.182,52	95,00	235.919.182,52	95,00	235.919.182,88	7.01.0.00.0.00.30.0002 - Kelurahan Jatihandap
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Karang Pamulang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Karang Pamulang (%)	95,00	95,00	95,00	370.140.836,00	95,00	211.494.986,00	95,00	211.494.986,00	95,00	211.494.986,00	95,00	211.494.986,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - Kelurahan Karangpamulang
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Pasir Impun	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Pasir Impun (%)	95,00	95,00	95,00	201.715.004,00	95,00	201.715.003,74	95,00	201.715.003,74	95,00	360.360.853,74	95,00	360.360.853,74	7.01.0.00.0.00.30.0004 - Kelurahan Pasir Impun
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Kelurahan Sindangjaya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Sindangjaya (%)	95,00	95,00	95,00	215.480.984,00	95,00	215.480.983,74	95,00	374.126.833,74	95,00	215.480.983,74	95,00	215.480.983,74	7.01.0.00.0.00.30.0005 - Kelurahan Sindang Jaya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					161.702.299.768,68		162.357.783.558,88		164.333.396.611,56		168.328.276.887,35		171.820.956.737,72	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Gegerkalong	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Gegerkalong (%)	0,00	0,00	100,00	919.386.109,00	100,00	929.886.109,00	100,00	938.686.109,00	100,00	946.186.109,00	100,00	957.686.109,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Gegerkalong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Isola	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Isola (%)	0,00	0,00	100,00	682.662.231,55	100,00	692.862.231,55	100,00	713.862.231,55	100,00	721.362.231,55	100,00	732.862.231,55	7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Isola
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sarijadi	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sarijadi (%)	0,00	0,00	100,00	1.237.516.300,00	100,00	1.246.716.300,00	100,00	1.262.716.300,00	100,00	1.270.216.300,00	100,00	1.281.716.300,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Sarijadi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukarasa	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukarasa (%)	0,00	0,00	100,00	622.048.488,00	100,00	632.148.488,00	100,00	653.148.488,00	100,00	660.648.488,00	100,00	672.148.488,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Sukarasa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukasari	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	0,00	100,00	487.473.616,50	100,00	518.088.229,33	100,00	523.601.750,19	100,00	567.674.140,54	100,00	594.027.635,71	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cidadap	Persentase Kelurahan Unggul (%)	66,67	100,00	100,00	230.573.285,00	100,00	230.573.285,00	100,00	230.573.285,00	100,00	230.573.285,00	100,00	430.573.285,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Cidadap
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Ciumbuleuit	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Ciumbuleuit (%)	0,00	0,00	100,00	914.351.476,00	100,00	914.351.476,00	100,00	914.351.476,00	100,00	914.351.476,00	100,00	914.351.476,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Ciumbuleuit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Hegarmanah	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Hegarmanah (%)	0,00	0,00	100,00	929.668.420,00	100,00	929.668.420,00	100,00	929.668.420,00	100,00	929.668.420,00	100,00	929.668.420,00	7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Hegarmanah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Ledeng	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Ledeng (%)	0,00	0,00	100,00	524.935.904,00	100,00	524.935.904,00	100,00	524.935.904,00	100,00	524.935.904,00	100,00	524.935.904,00	7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Ledeng
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipedes	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cipedes (%)	100,00	100,00	100,00	1.114.477.537,17	100,00	1.087.318.617,20	100,00	1.106.890.352,31	100,00	1.126.814.378,65	100,00	1.146.403.520,50	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Cipedes
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Pasteur	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Pasteur (%)	100,00	100,00	100,00	1.180.905.622,60	100,00	1.149.579.651,29	100,00	1.170.272.085,01	100,00	1.191.336.982,54	100,00	1.212.087.531,74	7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Pasteur
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukabungah	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukabungah (%)	100,00	100,00	100,00	1.063.693.296,70	100,00	1.019.841.258,42	100,00	1.038.198.401,07	100,00	1.056.885.972,29	100,00	1.075.216.403,31	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Sukabungah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukagalih	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukagalih (%)	100,00	100,00	100,00	687.816.818,90	100,00	638.171.318,72	100,00	649.658.402,46	100,00	661.352.253,71	100,00	672.563.077,80	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Sukagalih
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukawarna	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukawarna (%)	100,00	100,00	100,00	811.504.925,00	100,00	779.829.129,73	100,00	793.866.054,07	100,00	808.155.643,04	100,00	822.008.928,61	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Sukawarna
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Sukajadi	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	336.363.056,90	100,00	612.910.113,82	100,00	623.888.426,84	100,00	635.665.800,09	100,00	647.107.784,49	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sukajadi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraaan Pemerintahan lingkup Kelurahan Pajajaran	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pajajaran (%)	100,00	100,00	100,00	1.019.325.875,59	100,00	1.037.552.697,81	100,00	1.056.218.036,84	100,00	1.075.337.369,75	100,00	1.094.013.026,83	7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Pajajaran
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	683.901.984,51	100,00	696.131.007,81	100,00	708.654.247,65	100,00	721.482.088,11	100,00	734.012.250,69	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Arjuna	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Arjuna (%)	100,00	100,00	100,00	1.013.247.478,64	100,00	1.031.365.611,58	100,00	1.049.919.646,30	100,00	1.068.924.967,70	100,00	1.087.489.258,93	7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Arjuna
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Husen Sastranegara	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Husen Sastranegara (%)	100,00	100,00	100,00	1.144.163.600,19	100,00	1.164.622.677,15	100,00	1.185.573.976,45	100,00	1.207.034.870,65	100,00	1.227.997.751,66	7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Husen Sastranegara
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Pamoyanan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pamoyanan (%)	100,00	100,00	100,00	929.403.050,16	100,00	946.021.939,73	100,00	963.040.661,07	100,00	980.473.325,88	100,00	997.501.455,03	7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Pamoyanan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Pasirkaliki	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasirkaliki (%)	100,00	100,00	100,00	923.707.120,39	100,00	940.224.159,62	100,00	957.138.580,20	100,00	974.464.407,36	100,00	991.388.178,10	7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Pasir Kaliki
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Sukaraja	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sukaraja (%)	100,00	100,00	100,00	1.055.134.662,57	100,00	1.074.001.790,71	100,00	1.093.322.840,71	100,00	1.113.113.833,32	100,00	1.132.445.563,83	7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sukaraja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Andir	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	492.043.383,00	100,00	501.206.009,00	100,00	510.240.494,00	100,00	519.469.613,00	100,00	528.497.834,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Campaka	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Campaka (%)	0,00	0,00	100,00	1.056.927.434,00	100,00	1.075.369.807,09	100,00	1.094.769.825,08	100,00	1.114.557.677,13	100,00	1.133.952.969,03	7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Campaka
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Ciroyom	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Ciroyom (%)	0,00	0,00	100,00	589.276.279,00	100,00	599.797.813,00	100,00	610.610.055,00	100,00	621.653.086,00	100,00	632.462.653,00	7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Ciroyom
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Dunguscariang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Dunguscariang (%)	0,00	0,00	100,00	676.363.735,00	100,00	688.435.615,00	100,00	700.847.176,00	100,00	713.525.702,00	100,00	725.915.359,00	7.01.0.00.0.00.05.0003 - Kelurahan Dungus Cariang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Garuda	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Garuda (%)	0,00	0,00	100,00	589.276.279,00	100,00	599.797.813,00	100,00	610.610.055,00	100,00	621.653.086,00	100,00	632.462.653,00	7.01.0.00.0.00.05.0006 - Kelurahan Garuda
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebon Jeruk	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kebon Jeruk (%)	0,00	0,00	100,00	1.056.861.265,00	100,00	1.075.728.579,00	100,00	1.095.127.119,00	100,00	1.114.937.807,00	100,00	1.134.311.423,00	7.01.0.00.0.00.05.0005 - Kelurahan Kebon Jeruk
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Kelurahan Maleber	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Maleber (%)	0,00	0,00	100,00	1.062.587.595,00	100,00	1.081.558.215,00	100,00	1.101.059.208,00	100,00	1.120.978.370,00	100,00	1.140.468.170,00	7.01.0.00.0.00.05.0002 - Kelurahan Maleber
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipaganti	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cipaganti (%)	100,00	100,00	100,00	1.048.777.960,28	100,00	1.070.929.607,78	100,00	1.093.614.198,96	100,00	1.116.850.543,60	100,00	1.139.547.674,63	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Cipaganti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Dago	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Dago (%)	100,00	100,00	100,00	1.533.051.227,62	100,00	1.555.202.875,12	100,00	1.577.887.466,30	100,00	1.601.123.810,94	100,00	1.623.820.941,97	7.01.0.00.0.00.06.0005 - Kelurahan Dago
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Lebakgede	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Lebakgede (%)	100,00	100,00	100,00	1.173.364.328,22	100,00	1.195.515.975,72	100,00	1.218.200.566,90	100,00	1.241.436.911,54	100,00	1.264.134.042,57	7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Lebakgede
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi (*)	100,00	100,00	100,00	917.941.527,97	100,00	940.093.175,47	100,00	962.777.766,65	100,00	986.014.111,29	100,00	1.008.711.242,32	7.01.0.00.0.00.06.0007 - Kelurahan Lebak Siliwangi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sadangserang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sadangserang (%)	100,00	100,00	100,00	1.787.016.553,62	100,00	1.809.168.201,12	100,00	1.831.852.792,30	100,00	1.855.089.136,94	100,00	1.877.786.267,97	7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Sadangserang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sekeloa	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sekeloa (%)	100,00	100,00	100,00	1.337.427.767,62	100,00	1.359.579.415,12	100,00	1.382.264.006,30	100,00	1.405.500.350,94	100,00	1.428.197.481,97	7.01.0.00.0.00.06.0006 - Kelurahan Sekeloa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	874.158.934,00	100,00	896.310.581,50	100,00	918.995.172,67	100,00	942.231.517,32	100,00	964.928.648,35	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Bandung Wetan	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	204.502.924,48	100,00	208.159.692,68	100,00	211.865.029,76	100,00	215.895.630,80	100,00	219.492.988,84	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cihapit	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cihapit (%)	100,00	100,00	100,00	817.220.291,91	100,00	831.833.213,39	100,00	847.283.905,14	100,00	862.085.685,94	100,00	877.122.539,31	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Cihapit
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Citarum	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Citarum (%)	100,00	100,00	100,00	657.186.966,01	100,00	668.938.291,36	100,00	680.845.696,79	100,00	693.266.530,44	100,00	705.262.313,30	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Citarum
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Tamansari	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Tamansari (%)	100,00	100,00	100,00	1.661.329.804,61	100,00	1.691.036.460,48	100,00	1.721.137.677,58	100,00	1.752.536.810,88	100,00	1.783.105.279,29	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Taman Sari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	374.897.101,40	100,00	354.997.287,41	100,00	354.997.287,41	100,00	355.878.516,71	100,00	379.331.616,71	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan Ciamis	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Babakan Ciamis (%)	4,00	0,00	50,00	800.873.835,00	75,00	785.981.087,90	75,00	785.981.087,90	100,00	810.185.236,97	100,00	833.638.336,97	7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Babakan Ciamis
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Braga	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Braga (%)	4,00	0,00	50,00	737.923.746,80	75,00	752.701.498,81	75,00	752.701.498,81	100,00	776.236.727,93	100,00	799.689.827,93	7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Braga
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebon Pisang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kebon Pisang (%)	50,00	0,00	50,00	1.108.549.000,00	75,00	1.056.433.004,54	75,00	1.056.433.004,54	100,00	1.096.274.236,92	100,00	1.119.727.336,92	7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Kebon Pisang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Merdeka	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Merdeka (%)	4,00	0,00	50,00	919.227.746,40	75,00	844.887.121,34	75,00	844.887.121,34	100,00	870.275.281,47	100,00	893.728.381,47	7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Merdeka
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cicadas	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cicadas (%)	0,00	0,00	100,00	993.068.704,94	100,00	1.092.375.575,43	100,00	1.146.994.354,21	100,00	1.181.404.184,83	100,00	1.210.939.289,45	7.01.0.00.0.00.09.0004 - Kelurahan Cicadas
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cikutra	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cikutra (%)	0,00	0,00	100,00	1.210.664.364,15	100,00	1.331.730.800,57	100,00	1.398.317.340,59	100,00	1.440.266.860,81	100,00	1.476.273.532,33	7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Cikutra
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Padasuka	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Padasuka (%)	0,00	0,00	100,00	1.055.485.715,00	100,00	1.161.034.286,50	100,00	1.219.086.000,83	100,00	1.255.658.580,85	100,00	1.287.050.045,37	7.01.0.00.0.00.09.0002 - Kelurahan Padasuka
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Pasirlayung	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasirlayung (%)	0,00	0,00	100,00	999.098.551,24	100,00	1.099.008.406,36	100,00	1.153.958.826,68	100,00	1.188.577.591,48	100,00	1.218.292.031,27	7.01.0.00.0.00.09.0007 - Kelurahan Pasirlayung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukamaju	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sukamaju (%)	0,00	0,00	100,00	871.993.683,77	100,00	959.193.052,15	100,00	1.007.152.704,75	100,00	1.037.367.285,90	100,00	1.063.301.468,04	7.01.0.00.0.00.09.0005 - Kelurahan Sukamaju
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Sukapada	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sukapada (%)	0,00	0,00	100,00	1.062.728.027,98	100,00	1.169.000.830,78	100,00	1.227.450.872,32	100,00	1.264.274.398,49	100,00	1.295.881.258,45	7.01.0.00.0.00.09.0006 - Kelurahan Sukapada
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	16,67	33,33	743.139.118,03	50,00	757.433.291,57	66,67	772.581.957,40	83,33	825.759.416,12	100,00	850.532.198,61	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cibeunying Kaler	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	465.698.287,00	100,00	439.492.411,00	100,00	416.474.642,54	100,00	470.506.709,00	100,00	782.865.326,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Lingkup Kelurahan Cigadung	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cigadung (%)	100,00	100,00	100,00	595.615.640,00	100,00	695.615.640,00	100,00	475.615.640,00	100,00	755.615.641,00	100,00	935.615.641,00	7.01.0.00.0.00.10.0005 - Kelurahan Cigadung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis (%)	100,00	100,00	100,00	523.628.000,46	100,00	633.628.000,46	100,00	393.628.000,46	100,00	645.628.123,00	100,00	875.628.123,06	7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Cihaur Geulis
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sukaluyu	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukaluyu (%)	100,00	100,00	100,00	523.628.000,66	100,00	633.627.999,12	100,00	393.628.000,00	100,00	685.236.972,00	100,00	875.628.123,00	7.01.0.00.0.00.10.0003 - Kelurahan Sukaluyu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Neglasari	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Neglasari (%)	100,00	100,00	100,00	562.725.120,00	100,00	562.725.120,00	100,00	362.725.120,00	100,00	572.725.116,00	100,00	752.725.116,00	7.01.0.00.0.00.10.0004 - Kelurahan Neglasari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Nyengseret	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Nyengseret (%)	0,00	0,00	100,00	649.544.835,00	100,00	659.544.835,00	100,00	672.044.835,00	100,00	672.044.835,00	100,00	672.044.835,00	7.01.0.00.0.00.11.0003 - Kelurahan Nyengseret
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Astana Anyar	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	0,00	100,00	202.462.205,00	100,00	202.462.205,00	100,00	222.462.205,00	100,00	222.462.205,00	100,00	302.462.205,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cibadak	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup kelurahan Cibadak (%)	0,00	0,00	100,00	808.998.111,00	100,00	818.998.111,00	100,00	828.998.111,00	100,00	831.498.111,00	100,00	831.498.111,00	7.01.0.00.0.00.11.0006 - Kelurahan Cibadak
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Karanganyar	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Karanganyar (%)	0,00	0,00	100,00	677.052.030,00	100,00	687.052.030,00	100,00	697.052.030,00	100,00	699.552.030,00	100,00	699.552.030,00	7.01.0.00.0.00.11.0004 - Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Karasak	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Karasak (%)	0,00	0,00	100,00	677.822.803,00	100,00	687.822.803,00	100,00	697.822.803,00	100,00	700.322.803,00	100,00	700.322.803,00	7.01.0.00.0.00.11.0002 - Kelurahan Karasak
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Panjunan	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup kelurahan Panjunan (%)	0,00	0,00	100,00	535.522.786,00	100,00	545.522.786,00	100,00	555.522.786,00	100,00	558.022.786,00	100,00	558.022.786,00	7.01.0.00.0.00.11.0005 - Kelurahan Panjunan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan (%)	0,00	0,00	100,00	823.285.600,00	100,00	833.285.600,00	100,00	843.285.600,00	100,00	845.785.600,00	100,00	845.785.600,00	7.01.0.00.0.00.11.0007 - Kelurahan Pelindung Hewan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Babakan Asih	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Babakan Asih (%)	100,00	100,00	100,00	978.589.664,58	100,00	823.128.624,44	100,00	730.740.612,97	100,00	638.537.746,60	100,00	746.153.942,97	7.01.0.00.0.00.12.0005 - Kelurahan Babakan Asih
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Babakan Tarogong	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Babakan Tarogong (%)	100,00	100,00	100,00	1.812.396.298,87	100,00	802.234.731,74	100,00	707.671.866,41	100,00	634.784.467,92	100,00	718.681.387,83	7.01.0.00.0.00.12.0003 - Kelurahan Babakan Tarogong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Jamika	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Jamika (%)	100,00	100,00	100,00	994.875.558,64	100,00	862.681.678,09	100,00	769.206.239,69	100,00	775.889.497,08	100,00	782.417.665,40	7.01.0.00.0.00.12.0004 - Kelurahan Jamika
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Kopo	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kopo (%)	100,00	100,00	100,00	829.917.039,09	100,00	841.787.785,40	100,00	746.137.493,12	100,00	850.592.998,06	100,00	842.858.041,83	7.01.0.00.0.00.12.0002 - Kelurahan Kopo
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Suka Asih	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Suka Asih (%)	100,00	100,00	100,00	859.834.078,19	100,00	883.575.570,79	100,00	645.871.756,39	100,00	801.185.996,11	100,00	709.890.220,53	7.01.0.00.0.00.12.0006 - Kelurahan Suka Asih
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Bojongloa Kaler	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	2.772.313.337,96	100,00	1.831.286.244,43	100,00	2.553.809.359,53	100,00	2.563.834.245,63	100,00	2.573.626.498,10	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Bojongloa Kidul	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	352.219.170,26	100,00	426.031.264,46	100,00	501.619.194,49	100,00	579.045.636,92	100,00	654.675.351,32	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cibaduyut	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cibaduyut (%)	100,00	100,00	100,00	503.099.991,26	100,00	503.099.991,26	100,00	503.099.991,26	100,00	503.099.991,26	100,00	503.099.991,26	7.01.0.00.0.00.13.0004 - Kelurahan Cibaduyut
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	534.852.393,26	100,00	534.852.393,26	100,00	534.852.393,26	100,00	534.852.393,26	100,00	534.852.393,26	7.01.0.00.0.00.13.0006 - Kelurahan Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	493.617.892,26	100,00	493.617.892,26	100,00	493.617.892,26	100,00	493.617.892,26	100,00	493.617.892,26	7.01.0.00.0.00.13.0007 - Kelurahan Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebonlega	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kebonlega (%)	100,00	100,00	100,00	847.528.897,03	100,00	847.528.897,03	100,00	847.528.897,03	100,00	847.528.897,03	100,00	847.528.897,03	7.01.0.00.0.00.13.0003 - Kelurahan Kebon Lega

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Mekarwangi	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Mekarwangi (%)	100,00	100,00	100,00	543.527.509,14	100,00	543.527.509,14	100,00	543.527.509,14	100,00	543.527.509,14	100,00	543.527.509,14	7.01.0.00.0.00.13.0005 - Kelurahan Mekarwangi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Situsaeur	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Situsaeur (%)	100,00	100,00	100,00	853.058.431,26	100,00	853.058.431,26	100,00	853.058.431,26	100,00	853.058.431,26	100,00	853.058.431,26	7.01.0.00.0.00.13.0002 - Kelurahan Situsaeur
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	241.560.899,22	100,00	246.392.117,20	100,00	251.319.959,55	100,00	256.346.358,74	100,00	261.473.285,91	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan	Persentase Pencapaian Kriteria kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Babakan (%)	0,00	0,00	100,00	1.063.803.924,67	100,00	1.082.722.978,79	100,00	1.102.101.153,87	100,00	1.121.954.951,83	100,00	1.141.304.286,81	7.01.0.00.0.00.14.0003 - Kelurahan Babakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan Ciparay	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Babakan Ciparay (%)	0,00	0,00	100,00	1.152.720.748,97	100,00	1.173.221.130,42	100,00	1.194.219.007,91	100,00	1.215.732.262,68	100,00	1.236.698.889,51	7.01.0.00.0.00.14.0002 - Kelurahan Babakan Ciparay
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cirangrang	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cirangrang (%)	0,00	0,00	100,00	414.179.836,23	100,00	421.545.752,59	100,00	429.090.422,43	100,00	436.820.270,57	100,00	444.353.711,84	7.01.0.00.0.00.14.0007 - Kelurahan Cirangrang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Margahayu Utara	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Margahayu Utara (%)	0,00	0,00	100,00	719.383.016,55	100,00	732.176.771,02	100,00	745.280.999,84	100,00	758.706.862,20	100,00	771.791.588,28	7.01.0.00.0.00.14.0005 - Kelurahan Margahayu Utara
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Margasuka	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Margasuka (%)	0,00	0,00	50,00	695.996.944,67	100,00	708.374.793,22	100,00	721.053.023,04	100,00	734.042.430,58	100,00	746.701.791,69	7.01.0.00.0.00.14.0006 - Kelurahan Margasuka
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sukahaji	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukahaji (%)	0,00	0,00	50,00	1.235.274.966,42	50,00	1.257.243.520,40	100,00	1.279.745.199,53	100,00	1.302.799.165,62	100,00	1.325.267.356,01	7.01.0.00.0.00.14.0004 - Kelurahan Sukahaji
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Caringin	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Caringin (%)	0,00	0,00	100,00	717.258.671,84	100,00	732.606.411,96	100,00	748.323.401,41	100,00	764.422.672,53	100,00	780.148.350,20	7.01.0.00.0.00.15.0005 - Kelurahan Caringin
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cibuntu	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cibuntu (%)	0,00	0,00	100,00	999.266.638,79	100,00	1.014.614.378,89	100,00	1.030.331.368,34	100,00	1.046.430.639,46	100,00	1.062.156.317,13	7.01.0.00.0.00.15.0003 - Kelurahan Cibuntu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler (%)	0,00	0,00	100,00	857.625.976,24	100,00	872.973.716,36	100,00	888.690.705,81	100,00	904.789.976,93	100,00	920.515.654,60	7.01.0.00.0.00.15.0006 - Kelurahan Cigondewah Kaler
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul (%)	0,00	0,00	100,00	674.619.650,84	100,00	689.967.390,96	100,00	705.684.380,41	100,00	721.783.651,53	100,00	737.509.329,20	7.01.0.00.0.00.15.0009 - Kelurahan Cigondewah Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu (%)	0,00	0,00	100,00	834.066.086,18	100,00	849.413.826,30	100,00	865.130.815,75	100,00	881.230.086,87	100,00	896.955.764,54	7.01.0.00.0.00.15.0008 - Kelurahan Cigondewah Rahayu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cijerah	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cijerah (%)	0,00	0,00	100,00	1.055.475.268,24	100,00	1.070.823.008,34	100,00	1.086.539.997,79	100,00	1.102.639.268,91	100,00	1.118.364.946,58	7.01.0.00.0.00.15.0002 - Kelurahan Cijerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Gempolsari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Gempolsari (%)	0,00	0,00	100,00	1.030.976.031,24	100,00	1.046.323.771,36	100,00	1.062.040.760,81	100,00	1.078.140.031,93	100,00	1.093.865.709,60	7.01.0.00.0.00.15.0007 - Kelurahan Gempolsari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Warung Muncang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Warung Muncang (%)	0,00	0,00	100,00	1.045.966.154,29	100,00	1.061.313.894,41	100,00	1.077.030.883,86	100,00	1.093.130.154,98	100,00	1.108.855.832,65	7.01.0.00.0.00.15.0004 - Kelurahan Warung Muncang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Bandung Kulon	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	509.577.419,24	100,00	524.925.159,36	100,00	540.642.148,85	100,00	556.741.419,97	100,00	572.467.097,67	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Ancol	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Ancol Lingkup Kelurahan Ancol (%)	0,00	0,00	100,00	961.343.502,06	100,00	978.533.526,89	100,00	996.137.124,30	100,00	1.014.168.891,12	100,00	1.031.782.219,70	7.01.0.00.0.00.16.0003 - Kelurahan Ancol
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Balonggede	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Balonggede (%)	0,00	0,00	100,00	877.963.816,15	100,00	893.662.907,85	100,00	909.739.702,00	100,00	926.207.529,30	100,00	942.293.210,60	7.01.0.00.0.00.16.0005 - Kelurahan Balonggede
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Ciateul	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Ciateul Lingkup Kelurahan Ciateul (%)	0,00	0,00	100,00	915.337.426,24	100,00	931.704.804,86	100,00	948.465.964,20	100,00	965.634.802,30	100,00	982.405.227,06	7.01.0.00.0.00.16.0007 - Kelurahan Ciateul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cigereleng	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cigereleng Lingkup Kelurahan Cigereleng (%)	0,00	0,00	100,00	1.009.924.033,28	100,00	1.027.982.738,80	100,00	1.046.475.916,00	100,00	1.065.418.900,48	100,00	1.083.922.300,98	7.01.0.00.0.00.16.0002 - Kelurahan Cigereleng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Ciseureuh	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Ciseureuh (%)	0,00	0,00	100,00	929.515.663,57	100,00	946.136.566,82	100,00	963.157.350,30	100,00	980.592.127,40	100,00	997.622.319,75	7.01.0.00.0.00.16.0006 - Kelurahan Ciseureuh
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Pasirluyu	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Pasirluyu (%)	0,00	0,00	100,00	980.672.515,69	100,00	998.208.167,46	100,00	1.016.165.707,27	100,00	1.034.560.025,19	100,00	1.052.527.491,84	7.01.0.00.0.00.16.0008 - Kelurahan Pasirluyu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Pungkur	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Pungkur (%)	0,00	0,00	100,00	905.883.747,72	100,00	922.082.082,74	100,00	938.670.131,40	100,00	955.661.648,50	100,00	972.258.866,90	7.01.0.00.0.00.16.0004 - Kelurahan Pungkur
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Regol	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	0,00	100,00	543.147.310,33	100,00	552.859.463,93	100,00	562.805.281,48	100,00	572.993.008,50	100,00	582.944.323,52	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kecamatan Lengkong	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	310.902.517,60	100,00	316.343.311,62	100,00	321.942.588,21	100,00	327.801.943,32	100,00	333.636.817,91	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Burangrang	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Burangrang (%)	0,00	0,00	42,85	1.049.376.383,85	57,14	1.067.740.470,44	71,42	1.086.639.476,69	85,71	1.106.416.315,16	85,71	1.126.110.525,57	7.01.0.00.0.00.17.0004 - Kelurahan Burangrang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cijagra	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cijagra (%)	0,00	0,00	42,85	874.534.363,08	57,14	889.838.714,32	71,42	905.588.859,50	85,71	922.070.576,75	85,71	938.483.433,01	7.01.0.00.0.00.17.0002 - Kelurahan Cijagra
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cikawao	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cikawao (%)	0,00	0,00	42,85	939.782.593,14	57,14	956.228.788,40	71,42	973.154.037,89	85,71	990.865.441,38	85,71	1.008.502.846,23	7.01.0.00.0.00.17.0008 - Kelurahan Cikawao
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan (%)	0,00	0,00	42,85	1.034.826.350,00	57,14	1.052.935.811,00	71,42	1.071.572.774,77	85,71	1.091.075.399,28	85,71	1.110.496.541,38	7.01.0.00.0.00.17.0003 - Kelurahan Lingkar Selatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Malabar	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Malabar (%)	0,00	0,00	42,85	1.011.740.000,00	57,14	1.029.445.449,87	71,42	1.047.666.634,26	85,71	1.066.734.167,01	85,71	1.085.722.035,18	7.01.0.00.0.00.17.0007 - Kelurahan Malabar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Paledang	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Paledang (%)	0,00	0,00	42,85	737.596.245,00	57,14	750.504.179,19	71,42	763.788.103,11	85,71	777.689.046,59	85,71	791.531.911,62	7.01.0.00.0.00.17.0005 - Kelurahan Paledang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Turangga	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Turangga (%)	0,00	0,00	42,85	1.147.674.760,00	57,14	1.167.759.068,16	71,42	1.188.428.403,58	85,71	1.210.057.800,52	85,71	1.231.596.829,37	7.01.0.00.0.00.17.0006 - Kelurahan Turangga
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Batununggal	Persentase Kelurahan Unggul (%)	75,00	100,00	100,00	605.000.000,00	100,00	614.000.000,00	100,00	615.984.172,00	100,00	619.360.803,00	100,00	616.067.189,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Binong	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Binong (%)	50,00	50,00	50,00	957.729.879,96	100,00	977.729.879,00	100,00	997.729.879,00	100,00	1.017.729.879,00	100,00	1.037.729.879,00	7.01.0.00.0.00.18.0009 - Kelurahan Binong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cibangkong	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cibangkong (%)	50,00	50,00	50,00	1.210.132.363,31	50,00	1.230.132.363,00	100,00	1.250.132.363,00	100,00	1.270.132.363,00	100,00	1.290.132.363,00	7.01.0.00.0.00.18.0004 - Kelurahan Cibangkong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Gumuruh	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Gumuruh (%)	100,00	100,00	100,00	1.170.961.500,96	100,00	1.190.971.500,00	100,00	1.210.971.500,00	100,00	1.230.971.500,00	100,00	1.250.971.500,00	7.01.0.00.0.00.18.0002 - Kelurahan Gumuruh
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kacapiring	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Kacapiring (%)	100,00	100,00	100,00	972.435.366,96	100,00	992.435.366,00	100,00	1.012.435.366,00	100,00	1.032.435.366,00	100,00	1.052.435.366,00	7.01.0.00.0.00.18.0005 - Kelurahan Kacapiring
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebon Gedang	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Kebon Gedang (%)	50,00	100,00	100,00	954.629.592,96	100,00	974.629.592,00	100,00	994.629.592,00	100,00	1.014.629.592,00	100,00	1.034.629.592,00	7.01.0.00.0.00.18.0007 - Kelurahan Kebon Gedang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebonwaru	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Kebonwaru (%)	50,00	50,00	50,00	1.021.626.628,96	100,00	1.041.626.628,00	100,00	1.061.626.628,00	100,00	1.081.626.628,00	100,00	1.101.626.628,00	7.01.0.00.0.00.18.0006 - Kelurahan Kebon Waru
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Maleer	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Maleer (%)	100,00	100,00	100,00	1.112.775.736,96	100,00	1.132.775.736,00	100,00	1.152.775.736,00	100,00	1.172.775.736,00	100,00	1.192.775.736,00	7.01.0.00.0.00.18.0003 - Kelurahan Maleer
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Samoja	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Samoja (%)	50,00	50,00	50,00	1.032.482.105,58	100,00	1.052.482.105,00	100,00	1.072.482.105,00	100,00	1.092.482.105,00	100,00	1.112.482.105,00	7.01.0.00.0.00.18.0008 - Kelurahan Samoja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Ujungberung	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	515.129.672,00	100,00	515.129.672,00	100,00	615.129.672,00	100,00	715.129.672,00	100,00	515.129.672,00	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cigending	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cigending (%)	0,00	4,00	100,00	1.033.619.173,00	100,00	1.033.619.173,00	100,00	1.033.619.173,00	100,00	1.033.619.173,00	100,00	1.083.619.173,00	7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Cigending

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pasanggrahan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasanggrahan (%)	0,00	4,00	100,00	1.080.575.040,00	100,00	1.080.575.040,00	100,00	1.080.575.040,00	100,00	1.080.575.040,00	100,00	1.130.575.040,00	7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Pasangrahan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pasir Endah	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasir Endah (%)	0,00	4,00	100,00	876.881.517,00	100,00	876.881.517,00	100,00	876.881.517,00	100,00	876.881.517,00	100,00	926.881.517,00	7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Pasir Endah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pasirjati	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasirjati (%)	0,00	4,00	100,00	1.115.287.489,00	100,00	1.115.287.489,00	100,00	1.115.287.489,00	100,00	1.115.287.489,00	100,00	1.165.287.489,00	7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Pasirjati
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pasirwangi	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasirwangi (%)	0,00	4,00	100,00	1.021.123.756,00	100,00	1.021.123.756,00	100,00	1.021.123.756,00	100,00	1.021.123.756,00	100,00	1.071.123.756,00	7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Pasirwangi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	50,00	2.154.308.240,39	66,67	2.033.694.013,78	83,33	2.222.638.251,26	100,00	2.262.871.762,88	100,00	2.302.171.631,22	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan Sari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Babakan Sari (%)	100,00	100,00	100,00	1.495.624.374,53	100,00	1.485.026.807,36	100,00	1.553.781.182,70	100,00	1.581.907.250,11	100,00	1.609.380.634,89	7.01.0.00.0.00.20.0006 - Kelurahan Babakansari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan Surabaya	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Surabaya (%)	100,00	100,00	100,00	1.014.626.636,85	100,00	1.062.977.184,72	100,00	1.050.849.838,65	100,00	1.069.871.998,09	100,00	1.088.452.736,67	7.01.0.00.0.00.20.0004 - Kelurahan Babakan Surabaya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cicaheum	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cicaheum (%)	100,00	100,00	100,00	895.902.255,11	100,00	962.240.050,89	100,00	926.029.760,37	100,00	942.792.465,27	100,00	959.166.181,35	7.01.0.00.0.00.20.0005 - Kelurahan Cicaheum
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebon Jayanti	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Jayanti (%)	100,00	100,00	100,00	972.900.053,18	100,00	1.058.586.183,90	100,00	1.008.763.144,38	100,00	1.027.023.463,47	100,00	1.044.860.040,67	7.01.0.00.0.00.20.0003 - Kelurahan Kebon Jayanti
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Kebon Kangkung	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kebon Kangkung (%)	100,00	100,00	100,00	813.170.397,78	100,00	848.418.951,03	100,00	837.990.629,37	100,00	853.159.677,10	100,00	867.976.717,79	7.01.0.00.0.00.20.0007 - Kelurahan Kebon Kangkung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sukapura	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sukapura (%)	100,00	100,00	100,00	1.212.108.758,47	100,00	1.250.946.941,02	100,00	1.258.382.366,91	100,00	1.281.161.216,12	100,00	1.303.411.468,19	7.01.0.00.0.00.20.0002 - Kelurahan Sukapura
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Arcamanik	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	1.050.371.801,96	100,00	540.234.200,00	100,00	570.234.200,00	100,00	521.349.662,80	100,00	540.234.200,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Kelurahan Cisaranten Bina Harapan (%)	0,00	100,00	100,00	581.443.472,00	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.164.610.234,10	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.160.374.810,00	7.01.0.00.0.00.21.0003 - Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Kelurahan Cisaranten Endah (%)	0,00	0,00	100,00	698.468.896,00	100,00	646.993.720,00	100,00	676.993.720,00	100,00	646.993.720,00	100,00	646.993.720,00	7.01.0.00.0.00.21.0005 - Kelurahan Cisaranten Endah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Kelurahan Cisaranten Kulon (%)	0,00	0,00	100,00	774.408.616,00	100,00	742.613.146,00	100,00	772.613.146,00	100,00	742.613.146,00	100,00	742.613.146,00	7.01.0.00.0.00.21.0004 - Kelurahan Cisaranten Kulon
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sukamiskin	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Kelurahan Sukamiskin (%)	0,00	0,00	100,00	912.555.574,00	100,00	998.865.911,76	100,00	978.192.146,80	100,00	1.166.662.995,00	100,00	1.221.380.781,22	7.01.0.00.0.00.21.0002 - Kelurahan Sukamiskin
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cibiru	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	467.341.635,98	100,00	672.574.411,98	100,00	756.027.895,98	100,00	841.511.204,98	100,00	925.010.820,98	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cipadung	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cipadung (%)	0,00	0,00	100,00	1.070.215.000,00	100,00	1.070.215.000,00	100,00	1.070.215.000,00	100,00	1.070.215.000,00	100,00	1.070.215.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0003 - Kelurahan Cipadung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisurupan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cisurupan (%)	0,00	0,00	100,00	820.147.840,00	100,00	820.147.840,00	100,00	820.147.840,00	100,00	820.147.840,00	100,00	820.147.840,00	7.01.0.00.0.00.22.0005 - Kelurahan Cisurupan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Palasari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Palasari (%)	0,00	0,00	100,00	1.104.677.086,00	100,00	1.104.677.086,00	100,00	1.104.677.086,00	100,00	1.104.677.086,00	100,00	1.104.677.086,00	7.01.0.00.0.00.22.0002 - Kelurahan Palasari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pasirbiru	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasirbiru (%)	0,00	0,00	100,00	971.325.632,02	100,00	971.325.632,02	100,00	971.325.632,02	100,00	971.325.632,02	100,00	971.325.632,02	7.01.0.00.0.00.22.0004 - Kelurahan Pasirbiru
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	0,00	50,00	352.365.499,52	50,00	352.365.499,52	75,00	352.365.499,52	100,00	354.928.653,52	100,00	307.425.187,98	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Antapani Kidul	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Antapani Kidul (%)	0,00	100,00	100,00	1.327.461.000,00	100,00	1.377.461.000,00	100,00	1.425.580.567,00	100,00	1.465.580.567,00	100,00	1.325.580.567,00	7.01.0.00.0.00.23.0005 - Kelurahan Antapani Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Antapani Kulon	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Antapani Kulon (%)	0,00	100,00	100,00	693.583.815,90	100,00	707.389.220,90	100,00	727.389.220,90	100,00	747.389.220,90	100,00	637.389.220,90	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Antapani Kulon
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Antapani Tengah	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Antapani Tengah (%)	1,00	100,00	100,00	1.399.596.556,84	100,00	1.449.596.556,84	100,00	1.499.596.556,84	100,00	1.559.596.556,84	100,00	1.409.596.556,84	7.01.0.00.0.00.23.0004 - Kelurahan Antapani Tengah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Antapani Wetan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Antapani Wetan (%)	0,00	100,00	100,00	1.020.506.627,74	100,00	1.050.506.627,74	100,00	1.080.506.627,74	100,00	1.110.506.627,74	100,00	990.506.627,74	7.01.0.00.0.00.23.0003 - Kelurahan Antapani Wetan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipamokolan	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cipamokolan (%)	100,00	100,00	100,00	1.211.033.394,64	100,00	1.232.688.187,20	100,00	1.254.863.969,68	100,00	1.277.579.129,95	100,00	1.299.767.171,01	7.01.0.00.0.00.24.0002 - Kelurahan Cipamokolan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Derwati	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Derwati (%)	100,00	100,00	100,00	1.187.020.650,40	100,00	1.208.246.065,05	100,00	1.229.982.139,27	100,00	1.252.246.896,32	100,00	1.273.994.986,06	7.01.0.00.0.00.24.0003 - Kelurahan Derwati
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Manjahlega	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Manjahlega (%)	100,00	100,00	100,00	1.359.041.713,36	100,00	1.383.343.079,88	100,00	1.408.229.109,90	100,00	1.433.720.438,60	100,00	1.458.620.225,41	7.01.0.00.0.00.24.0004 - Kelurahan Manjahlega
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Mekarjaya	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Mekarjaya (%)	100,00	100,00	100,00	1.092.277.183,21	100,00	1.111.808.466,10	100,00	1.131.809.649,66	100,00	1.152.297.318,61	100,00	1.172.309.558,65	7.01.0.00.0.00.24.0005 - Kelurahan Mekarjaya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	452.242.141,49	100,00	460.328.796,90	100,00	468.610.008,14	100,00	477.092.641,88	100,00	485.378.430,90	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Buahbatu	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	557.614.237,00	100,00	544.614.237,00	100,00	585.614.237,00	100,00	623.614.237,00	100,00	647.614.237,00	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cijawura	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cijawura (%)	100,00	100,00	100,00	1.278.017.921,00	100,00	1.278.017.921,00	100,00	1.278.017.921,00	100,00	1.278.017.921,00	100,00	1.308.017.921,00	7.01.0.00.0.00.25.0004 - Kelurahan Cijawura
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Jatisari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Jatisari (%)	100,00	100,00	100,00	786.054.921,00	100,00	786.054.921,00	100,00	786.054.921,00	100,00	787.054.921,00	100,00	816.054.921,00	7.01.0.00.0.00.25.0005 - Kelurahan Jatisari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Margasari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Margasari (%)	100,00	100,00	100,00	1.992.621.582,00	100,00	1.992.621.582,00	100,00	1.992.621.582,00	100,00	1.992.621.582,00	100,00	2.022.621.582,00	7.01.0.00.0.00.25.0003 - Kelurahan Margasari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sekejati	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sekejati (%)	100,00	100,00	100,00	1.325.806.000,00	100,00	1.326.806.000,00	100,00	1.327.806.000,00	100,00	1.328.806.000,00	100,00	1.355.806.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0002 - Kelurahan Sekejati
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Batununggal	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Batununggal (%)	100,00	100,00	100,00	1.166.662.995,00	100,00	1.166.662.995,00	100,00	1.166.662.995,00	100,00	1.166.662.995,00	100,00	1.166.662.995,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - Kelurahan Batununggal
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Kujangsari	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Kujangsari (%)	0,00	0,00	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.160.374.810,00	100,00	1.160.374.810,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - Kelurahan Kujangsari
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Mengger	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Mengger (%)	0,00	0,00	100,00	646.993.720,00	100,00	646.993.720,00	100,00	646.993.720,00	100,00	646.993.720,00	100,00	646.993.720,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - Kelurahan Mengger
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Wates	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Wates (%)	0,00	0,00	100,00	742.613.146,00	100,00	742.613.146,00	100,00	742.613.146,00	100,00	742.613.146,00	100,00	742.613.146,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - Kelurahan Wates
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Bandung Kidul	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	0,00	50,00	540.234.200,00	50,00	540.234.200,00	75,00	540.234.200,00	100,00	540.234.200,00	100,00	540.234.200,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Gedebage	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	699.037.976,00	100,00	745.150.599,75	100,00	796.451.207,00	100,00	848.796.982,00	100,00	900.028.094,00	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cimincrang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cimincrang (%)	100,00	100,00	100,00	636.778.928,00	100,00	689.566.875,00	100,00	728.007.100,07	100,00	737.907.442,00	100,00	744.265.724,39	7.01.0.00.0.00.27.0002 - Kelurahan Cimincrang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisaranten kidul	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Cisaranten Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	1.365.152.443,45	100,00	1.185.192.934,33	100,00	1.190.896.793,04	100,00	1.153.244.728,68	100,00	1.152.648.024,00	7.01.0.00.0.00.27.0003 - Kelurahan Cisaranten Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Rancabolang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Rancabolang (%)	100,00	100,00	100,00	644.837.933,00	100,00	747.122.976,00	100,00	736.398.573,02	100,00	806.466.745,00	100,00	762.996.213,39	7.01.0.00.0.00.27.0004 - Kelurahan Rancabolang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Rancanumpang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Rancanumpang (%)	100,00	100,00	100,00	648.695.437,00	100,00	698.896.042,67	100,00	687.320.908,04	100,00	667.582.934,05	100,00	727.246.363,39	7.01.0.00.0.00.27.0005 - Kelurahan Rancanumpang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul (%)	0,00	100,00	100,00	1.149.608.300,00	100,00	1.131.628.771,90	100,00	1.143.128.771,90	100,00	1.153.128.771,90	100,00	1.153.628.771,90	7.01.0.00.0.00.28.0004 - Kelurahan Cipadung Kidul
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon (%)	0,00	100,00	100,00	779.857.705,00	100,00	744.857.705,00	100,00	759.357.705,00	100,00	772.357.705,00	100,00	772.857.705,00	7.01.0.00.0.00.28.0002 - Kelurahan Cipadung Kulon
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan (%)	0,00	100,00	100,00	643.148.196,20	100,00	623.148.196,20	100,00	637.648.196,26	100,00	650.648.196,26	100,00	651.148.196,26	7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Cipadung Wetan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Mekarmulya	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Mekarmulya (%)	0,00	100,00	100,00	799.487.147,00	100,00	691.548.562,69	100,00	705.994.423,69	100,00	717.994.423,69	100,00	718.494.423,69	7.01.0.00.0.00.28.0005 - Kelurahan Mekarmulya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Panyileukan	Persentase Kelurahan Unggul (%)	0,00	100,00	100,00	427.971.030,70	100,00	418.971.030,70	100,00	428.971.030,70	100,00	447.496.558,91	100,00	510.478.321,48	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cinambo	Persentase Kelurahan Unggul (%)	100,00	100,00	100,00	683.061.345,63	100,00	695.086.630,32	100,00	716.556.055,75	100,00	721.520.591,58	100,00	735.023.996,79	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu (%)	100,00	100,00	100,00	710.996.500,00	100,00	722.996.500,00	100,00	732.996.500,00	100,00	754.996.500,00	100,00	766.996.500,00	7.01.0.00.0.00.29.0005 - Kelurahan Babakan Penghulu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	656.920.978,00	100,00	668.920.978,00	100,00	678.920.978,00	100,00	690.920.978,00	100,00	702.920.978,00	7.01.0.00.0.00.29.0004 - Kelurahan Cisaranten Wetan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Pakemitan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Pakemitan (%)	100,00	100,00	100,00	632.055.555,00	100,00	644.055.555,00	100,00	654.055.555,00	100,00	666.055.555,00	100,00	678.055.555,00	7.01.0.00.0.00.29.0002 - Kelurahan Pakemitan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Sukamulya	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Sukamulya (%)	100,00	100,00	100,00	673.849.511,00	100,00	685.849.511,00	100,00	695.849.511,00	100,00	707.849.511,00	100,00	719.849.511,00	7.01.0.00.0.00.29.0003 - Kelurahan Sukamulya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Jatihandap	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Jatihandap (%)	0,00	0,00	100,00	1.316.575.938,00	100,00	1.332.825.938,00	100,00	1.342.825.938,00	100,00	1.352.825.938,00	100,00	1.387.825.938,00	7.01.0.00.0.00.30.0002 - Kelurahan Jatihandap
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingkup Kelurahan Karang Pamulang	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Karang Pamulang (%)	0,00	0,00	100,00	1.008.666.959,00	100,00	1.024.916.959,00	100,00	1.034.916.959,00	100,00	1.044.916.959,00	100,00	1.079.916.959,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - Kelurahan Karangpamulang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Mandalajati	Persentase Kelurahan Unggul (%)	75,00	100,00	25,00	875.825.482,00	25,00	910.825.482,00	50,00	970.825.482,00	75,00	1.030.825.482,00	100,00	990.825.482,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasir Impun	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Pasir Impun (%)	0,00	0,00	100,00	808.582.456,00	100,00	824.832.456,00	100,00	834.832.456,00	100,00	844.832.456,00	100,00	879.832.456,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - Kelurahan Pasir Impun
Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sindangjaya	Persentase Kelurahan Unggul lingkup Kelurahan Sindangjaya (%)	0,00	0,00	100,00	734.069.888,00	100,00	750.319.888,00	100,00	760.319.888,00	100,00	770.319.888,00	100,00	805.319.888,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - Kelurahan Sindang Jaya
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					184.432.410.255,28		190.264.332.717,38		193.932.181.982,05		197.345.418.923,03		195.985.691.494,01	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Sukasari	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	0,00	100,00	111.000.000,00	100,00	111.800.000,00	100,00	112.600.000,00	100,00	113.900.000,00	100,00	115.200.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Gegerkalong	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Gegerkalong (%)	0,00	0,00	100,00	1.017.397.200,00	100,00	1.037.197.200,00	100,00	1.056.147.200,00	100,00	1.075.397.200,00	100,00	1.091.472.200,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Gegerkalong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Isola	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Isola (%)	0,00	0,00	100,00	821.174.765,35	100,00	835.743.178,92	100,00	854.660.436,31	100,00	874.040.026,10	100,00	905.124.609,22	7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Isola
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sarijadi	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sarijadi (%)	0,00	0,00	100,00	1.314.850.000,00	100,00	1.335.650.000,00	100,00	1.354.600.000,00	100,00	1.373.850.000,00	100,00	1.387.925.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Sarijadi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukarasa	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukarasa (%)	0,00	0,00	100,00	916.964.000,00	100,00	935.764.000,00	100,00	954.714.000,00	100,00	973.964.000,00	100,00	988.039.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Sukarasa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cidadap	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	66,67	100,00	100,00	122.214.218,75	100,00	122.214.218,75	100,00	122.214.218,75	100,00	122.214.218,75	100,00	222.214.218,75	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Cidadap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ciumbuleuit	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ciumbuleuit (%)	0,00	0,00	33,33	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Ciumbuleuit
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Hegarmanah	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Hegarmanah (%)	0,00	0,00	33,33	1.300.000.000,00	33,33	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	66,67	1.300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Hegarmanah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ledeng	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ledeng (%)	0,00	0,00	33,33	900.000.000,00	33,33	900.000.000,00	33,33	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Ledeng
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Sukajadi	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	300.335.448,88	100,00	297.515.707,00	100,00	302.813.740,17	100,00	308.843.967,96	100,00	314.094.315,41	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sukajadi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipedes	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cipedes (%)	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.060.234.524,55	100,00	1.079.318.745,99	100,00	1.098.746.483,42	100,00	1.117.851.377,34	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Cipedes
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasteur	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Pasteur (%)	100,00	100,00	100,00	1.100.000.000,00	100,00	1.060.234.524,55	100,00	1.079.318.745,99	100,00	1.098.746.483,42	100,00	1.117.851.377,34	7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Pasteur
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukabungah	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukabungah (%)	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.060.234.524,55	100,00	1.079.318.745,99	100,00	1.098.746.483,42	100,00	1.117.851.377,34	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Sukabungah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukagalih	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukagalih (%)	100,00	100,00	100,00	800.000.000,00	100,00	1.060.234.524,55	100,00	1.079.318.745,99	100,00	1.098.746.483,42	100,00	1.117.851.377,34	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Sukagalih
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukawarna	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukawarna (%)	100,00	100,00	100,00	900.000.000,00	100,00	1.060.234.524,55	100,00	1.079.318.745,99	100,00	1.098.746.483,42	100,00	1.117.851.377,34	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Sukawarna
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	213.882.813,27	100,00	217.707.305,62	100,00	221.623.810,95	100,00	225.635.576,77	100,00	229.554.247,11	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Arjuna	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Arjuna (%)	50,00	50,00	50,00	1.283.970.559,27	66,67	1.306.929.559,61	83,33	1.330.440.927,64	100,00	1.354.524.158,68	100,00	1.378.048.523,59	7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Arjuna
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Husen Sastranegara	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Husen Sastranegara (%)	33,33	33,33	50,00	1.734.293.721,68	66,67	1.765.305.063,69	83,33	1.797.062.503,65	100,00	1.829.592.374,44	100,00	1.861.367.369,65	7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Husen Sastranegara
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Pajajaran	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pajajaran (%)	33,33	33,33	50,00	1.560.237.991,17	50,00	1.588.136.998,90	66,67	1.616.707.225,34	83,33	1.645.972.360,55	100,00	1.674.558.380,36	7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Pajajaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Pamoyanan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pamoyanan (%)	33,33	33,33	33,33	1.023.888.723,57	50,00	1.042.197.135,22	66,67	1.060.946.026,64	83,33	1.080.150.944,16	100,00	1.098.910.199,80	7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Pamoyanan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Pasirkaliki	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirkaliki (%)	33,33	33,33	33,33	1.428.648.722,50	50,00	1.454.194.749,44	66,67	1.480.355.385,02	83,33	1.507.152.321,29	100,00	1.533.327.418,25	7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Pasir Kaliki
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan lingkup Kelurahan Sukaraja	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sukaraja (%)	50,00	50,00	50,00	1.519.892.716,00	66,73	1.547.070.299,73	83,33	1.574.901.745,51	100,00	1.603.410.130,82	100,00	1.631.256.961,59	7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sukaraja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Andir	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	0,00	33,33	267.922.233,00	50,00	272.650.436,00	66,67	277.632.160,00	83,33	282.655.605,00	100,00	287.561.904,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Campaka	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Campaka (%)	0,00	0,00	33,33	1.485.303.182,00	50,00	1.514.903.896,11	66,67	1.542.565.217,15	83,33	1.564.965.115,20	100,00	1.592.164.912,00	7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Campaka
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ciroyom	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ciroyom (%)	0,00	0,00	33,33	867.517.464,00	50,00	881.098.573,00	66,67	897.195.093,00	83,33	915.359.094,00	100,00	931.250.248,00	7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Ciroyom
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Dunguscariang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Dunguscariang (%)	0,00	0,00	33,33	1.114.665.311,00	50,00	1.134.269.594,00	66,67	1.154.994.319,00	83,33	1.176.890.263,00	100,00	1.197.314.762,00	7.01.0.00.0.00.05.0003 - Kelurahan Dungus Cariang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Garuda	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Garuda (%)			33,33	867.517.464,00	50,00	881.098.573,00	66,67	897.195.093,00	83,33	915.359.094,00	100,00	931.250.248,00	7.01.0.00.0.00.05.0006 - Kelurahan Garuda
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebon Jeruk	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Kebon Jeruk (%)	0,00	0,00	33,33	1.486.220.415,00	50,00	1.512.359.459,00	66,67	1.539.990.386,00	83,33	1.568.520.350,00	100,00	1.595.741.658,00	7.01.0.00.0.00.05.0005 - Kelurahan Kebon Jeruk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Maleber	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Maleber (%)	0,00	0,00	33,33	1.733.923.818,00	50,00	1.764.419.368,00	66,67	1.796.662.751,00	83,33	1.829.238.187,00	100,00	1.860.998.980,00	7.01.0.00.0.00.05.0002 - Kelurahan Maleber
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	95,70	98,00	100,00	340.929.110,00	100,00	357.302.066,84	100,00	374.068.938,59	100,00	391.243.628,10	100,00	408.019.768,43	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipaganti	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cipaganti (%)	100,00	100,00	100,00	751.608.210,52	100,00	767.981.167,37	100,00	784.748.039,11	100,00	801.922.728,63	100,00	818.698.868,96	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Cipaganti
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Dago	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Dago (%)	100,00	100,00	100,00	894.192.842,12	100,00	910.565.798,96	100,00	927.332.670,70	100,00	944.507.360,22	100,00	961.283.500,55	7.01.0.00.0.00.06.0005 - Kelurahan Dago
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Lebakgede	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Lebakgede (%)	100,00	100,00	100,00	895.632.842,12	100,00	912.005.798,96	100,00	928.772.670,70	100,00	945.947.360,22	100,00	962.723.500,55	7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Lebakgede
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi (%)	100,00	100,00	100,00	651.667.010,53	100,00	668.039.967,37	100,00	684.806.839,11	100,00	701.981.528,63	100,00	718.757.668,96	7.01.0.00.0.00.06.0007 - Kelurahan Lebak Siliwangi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sadangserang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sadangserang (%)	100,00	100,00	100,00	1.686.632.842,12	100,00	1.703.005.798,90	100,00	1.719.772.670,70	100,00	1.736.947.360,22	100,00	1.753.723.500,55	7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Sadangserang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sekeloa	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sekeloa (%)	100,00	100,00	100,00	1.188.882.842,12	100,00	1.205.255.798,96	100,00	1.222.022.670,70	100,00	1.239.197.360,22	100,00	1.255.973.500,55	7.01.0.00.0.00.06.0006 - Kelurahan Sekeloa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Bandung Wetan	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	100.785.871,65	100,00	100.785.871,65	100,00	100.785.871,65	100,00	100.785.871,65	100,00	100.785.871,65	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cihapit	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cihapit (%)	100,00	66,67	66,67	670.000.000,00	66,67	681.980.438,00	66,67	703.000.000,00	66,67	720.000.000,00	83,33	737.184.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Cihapit
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Citarum	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Citarum (%)	100,00	33,33	50,00	670.000.000,00	50,00	681.980.438,00	66,67	703.000.000,00	66,67	720.000.000,00	66,67	737.184.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Citarum
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Tamansari	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Tamansari (%)	100,00	33,33	66,67	1.310.000.000,00	66,67	1.335.226.617,68	66,67	1.343.558.383,04	66,67	1.361.154.434,99	66,67	1.377.185.168,96	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Taman Sari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	50,00	100,00	100,00	205.917.520,00	100,00	264.769.300,00	100,00	264.769.300,00	100,00	256.065.991,95	100,00	289.991.101,95	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Ciamis	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Babakan Ciamis (%)	4,00	0,00	50,00	1.153.200.000,00	75,00	1.164.697.000,00	75,00	1.164.697.000,00	100,00	1.203.636.642,39	100,00	1.237.561.752,39	7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Babakan Ciamis
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Braga	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Braga (%)	9,00	0,00	50,00	1.142.200.000,00	75,00	1.153.622.000,00	75,00	1.153.622.000,00	100,00	1.194.557.912,73	100,00	1.228.483.022,73	7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Braga
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebon Pisang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Kebon Pisang (%)	4,00	0,00	50,00	1.604.150.000,00	75,00	1.623.691.500,00	75,00	1.623.691.500,00	100,00	1.673.740.459,68	100,00	1.707.665.569,68	7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Kebon Pisang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Merdeka	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Merdeka (%)	7,00	0,00	50,00	1.270.020.000,00	75,00	1.282.720.200,00	75,00	1.282.720.200,00	100,00	1.326.183.993,25	100,00	1.360.109.103,25	7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Merdeka
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	0,00	33,33	700.097.435,00	50,00	726.733.009,09	66,67	741.267.669,27	83,33	800.510.838,71	100,00	832.531.272,26	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cicadas	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cicadas (%)	0,00	0,00	66,67	2.035.355.780,00	66,67	2.035.355.780,00	66,67	2.035.355.780,00	66,67	2.035.355.780,00	66,67	2.035.355.780,00	7.01.0.00.0.00.09.0004 - Kelurahan Cicadas
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cikutra	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cikutra (%)	0,00	0,00	66,67	2.010.750.835,00	66,67	2.010.750.835,00	66,67	2.010.750.835,00	66,67	2.010.750.835,00	66,67	2.010.750.835,00	7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Cikutra
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Padasuka	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Padasuka (%)	0,00	0,00	66,67	2.104.224.420,00	66,67	2.104.224.420,00	66,67	2.104.224.420,00	66,67	2.104.224.420,00	66,67	2.104.224.420,00	7.01.0.00.0.00.09.0002 - Kelurahan Padasuka
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasirlayung	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirlayung (%)	0,00	0,00	66,67	1.768.707.080,66	33,33	1.768.707.080,66	33,33	1.768.707.080,66	66,67	1.768.707.080,66	66,67	1.768.707.080,66	7.01.0.00.0.00.09.0007 - Kelurahan Pasirlayung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukamaju	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sukamaju (%)	0,00	0,00	66,67	1.674.532.920,42	66,67	1.674.532.920,42	66,67	1.674.532.920,42	66,67	1.674.532.920,42	66,67	1.674.532.920,42	7.01.0.00.0.00.09.0005 - Kelurahan Sukamaju
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukapada	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sukapada (%)	0,00	0,00	66,67	2.071.156.188,25	66,67	2.071.156.188,25	66,67	2.071.156.188,25	66,67	2.071.156.188,25	66,67	2.071.156.188,25	7.01.0.00.0.00.09.0006 - Kelurahan Sukapada
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cibeunying Kaler	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	50,00	50,00	733.233.635,00	75,00	733.233.635,00	75,00	863.233.635,00	100,00	863.233.635,00	100,00	863.233.635,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigadung	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cigadung (%)	100,00	100,00	100,00	925.615.641,00	100,00	925.615.641,00	100,00	1.125.615.641,00	100,00	1.125.615.641,00	100,00	1.125.615.641,00	7.01.0.00.0.00.10.0005 - Kelurahan Cigadung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis (%)	100,00	100,00	100,00	823.628.123,00	100,00	823.628.123,00	100,00	823.628.123,00	100,00	1.063.628.123,00	100,00	1.063.628.123,00	7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Cihaur Geulis
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Neglasari	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Neglasari (%)	100,00	100,00	100,00	662.725.116,00	100,00	662.725.116,00	100,00	862.725.116,00	100,00	862.725.116,00	100,00	862.725.116,00	7.01.0.00.0.00.10.0004 - Kelurahan Neglasari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukaluyu	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukaluyu (%)	100,00	100,00	100,00	813.236.972,00	100,00	813.236.972,00	100,00	1.043.236.972,00	100,00	1.043.236.972,00	100,00	1.043.236.972,00	7.01.0.00.0.00.10.0003 - Kelurahan Sukaluyu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Astana Anyar	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	117.909.020,00	100,00	117.909.020,00	100,00	117.909.020,00	100,00	117.909.020,00	100,00	157.909.020,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibadak	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cibadak (%)	0,00	0,00	100,00	1.282.470.805,00	100,00	1.357.470.805,00	100,00	1.407.470.805,00	100,00	1.457.470.805,00	100,00	1.507.470.805,00	7.01.0.00.0.00.11.0006 - Kelurahan Cibadak
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Karanganyar	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Karanganyar (%)	0,00	0,00	100,00	1.332.878.236,00	100,00	1.407.878.236,00	100,00	1.457.878.236,00	100,00	1.507.878.236,00	100,00	1.557.878.236,00	7.01.0.00.0.00.11.0004 - Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Karasak	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Karasak (%)	0,00	0,00	100,00	1.045.000.000,00	100,00	1.120.000.000,00	100,00	1.170.000.000,00	100,00	1.220.000.000,00	100,00	1.270.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0002 - Kelurahan Karasak
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Nyengseret	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Nyengseret (%)	0,00	0,00	100,00	1.069.580.399,99	100,00	1.144.580.399,99	100,00	1.194.580.399,99	100,00	1.244.580.399,99	100,00	1.294.580.399,99	7.01.0.00.0.00.11.0003 - Kelurahan Nyengseret
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Panjunan	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup kelurahan Panjunan (%)	0,00	0,00	100,00	1.003.436.740,00	100,00	1.078.436.740,00	100,00	1.128.436.740,00	100,00	1.178.436.740,00	100,00	1.228.436.740,00	7.01.0.00.0.00.11.0005 - Kelurahan Panjunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan (%)	0,00	0,00	100,00	1.430.516.300,00	100,00	1.505.516.300,00	100,00	1.555.516.300,00	100,00	1.605.516.300,00	100,00	1.655.516.300,00	7.01.0.00.0.00.11.0007 - Kelurahan Pelindung Hewan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Bojongloa Kaler	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	40,00	60,00	80,00	550.805.362,95	100,00	816.327.372,10	100,00	837.152.586,79	100,00	845.103.118,92	100,00	900.703.469,58	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Asih	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Babakan Asih (%)	40,00	60,00	80,00	1.178.155.201,11	100,00	1.451.862.276,45	100,00	1.556.393.222,00	100,00	1.661.034.372,97	100,00	1.565.567.823,19	7.01.0.00.0.00.12.0005 - Kelurahan Babakan Asih
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Tarogong	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Babakan Tarogong (%)	40,00	60,00	80,00	1.096.925.335,18	100,00	1.519.770.460,76	100,00	1.527.322.036,67	100,00	1.535.057.288,29	100,00	1.542.613.038,66	7.01.0.00.0.00.12.0003 - Kelurahan Babakan Tarogong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Jamika	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Jamika (%)	40,00	60,00	80,00	1.056.310.402,22	100,00	1.503.724.552,91	100,00	1.612.786.444,01	100,00	1.522.068.745,95	100,00	1.612.240.795,32	7.01.0.00.0.00.12.0004 - Kelurahan Jamika
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kopo	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Kopo (%)	40,00	60,00	80,00	1.037.540.268,15	100,00	1.635.816.368,61	100,00	1.441.857.629,34	100,00	1.548.045.830,63	100,00	1.554.090.430,93	7.01.0.00.0.00.12.0002 - Kelurahan Kopo
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Suka Asih	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Suka Asih (%)	40,00	60,00	80,00	1.018.770.134,07	100,00	1.467.908.184,30	100,00	1.570.928.814,67	100,00	1.589.836.409,07	100,00	1.677.045.215,46	7.01.0.00.0.00.12.0006 - Kelurahan Suka Asih
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibaduyut	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cibaduyut (%)	0,00	0,00	50,00	759.764.139,10	62,50	789.764.139,10	87,50	789.764.139,10	87,50	799.764.139,10	87,50	804.764.139,10	7.01.0.00.0.00.13.0004 - Kelurahan Cibaduyut
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul (%)	0,00	0,00	50,00	559.764.139,10	68,75	559.764.139,10	87,50	579.764.139,10	87,50	599.764.139,10	87,50	615.764.139,10	7.01.0.00.0.00.13.0006 - Kelurahan Cibaduyut Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan (%)	0,00	0,00	50,00	459.764.139,10	62,50	460.350.216,17	87,50	472.552.701,93	87,50	476.430.833,71	87,50	476.817.284,04	7.01.0.00.0.00.13.0007 - Kelurahan Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebonlega	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Kebonlega (%)	0,00	0,00	50,00	1.059.764.139,10	62,50	1.079.764.139,10	87,50	1.089.764.139,10	87,50	1.099.764.139,10	87,50	1.121.764.139,10	7.01.0.00.0.00.13.0003 - Kelurahan Kebon Lega
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Mekarwangi	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Mekarwangi (%)	0,00	0,00	50,00	659.764.139,10	68,75	659.764.139,10	87,50	679.764.139,10	87,50	699.764.139,10	87,50	708.764.139,10	7.01.0.00.0.00.13.0005 - Kelurahan Mekarwangi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Situsaeur	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Situsaeur (%)	0,00	0,00	50,00	759.764.139,10	68,75	779.764.139,10	87,50	789.764.139,10	87,50	799.764.139,10	87,50	818.764.139,10	7.01.0.00.0.00.13.0002 - Kelurahan Situsaeur
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Bojongloa Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	459.020.062,00	100,00	472.790.664,00	100,00	486.974.384,00	100,00	501.583.615,00	100,00	516.631.124,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Babakan Ciparay	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Babakan Ciparay (%)	83,13	0,00	33,33	163.399.151,95	50,00	166.667.134,99	66,66	170.000.477,66	83,33	173.400.487,21	100,00	176.868.496,98	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Babakan (%)	0,00	0,00	66,67	1.075.258.051,04	66,67	1.094.415.276,47	83,33	981.834.174,34	83,33	1.134.137.009,22	100,00	1.153.741.899,60	7.01.0.00.0.00.14.0003 - Kelurahan Babakan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Ciparay	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Babakan Ciparay (%)	0,00	0,00	66,67	1.165.132.255,28	66,67	1.185.890.715,31	83,88	1.010.916.787,80	83,33	1.228.932.543,28	100,00	1.250.176.085,82	7.01.0.00.0.00.14.0002 - Kelurahan Babakan Ciparay
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cirangrang	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cirangrang (%)	0,00	0,00	33,33	418.639.368,73	50,00	426.098.014,36	66,67	769.357.329,70	66,67	441.563.214,65	83,33	449.196.153,48	7.01.0.00.0.00.14.0007 - Kelurahan Cirangrang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Margahayu Utara	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Margahayu Utara (%)	0,00	0,00	50,00	727.128.714,59	66,67	740.083.529,19	66,67	869.182.151,28	83,33	766.944.813,74	83,33	780.202.355,71	7.01.0.00.0.00.14.0005 - Kelurahan Margahayu Utara
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Margasuka	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Margasuka (%)	0,00	0,00	33,33	703.490.841,59	33,33	716.024.514,44	50,00	861.533.114,17	66,67	742.012.578,58	66,67	754.839.137,58	7.01.0.00.0.00.14.0006 - Kelurahan Margasuka
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukahaji	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukahaji (%)	0,00	0,00	16,67	1.248.575.345,59	16,67	1.270.820.460,92	33,33	1.037.918.341,39	50,00	1.316.944.808,61	66,67	1.339.709.746,53	7.01.0.00.0.00.14.0004 - Kelurahan Sukahaji
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Bandung Kulon	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	343.066.044,02	100,00	355.855.827,53	100,00	368.953.318,76	100,00	382.369.378,03	100,00	395.474.109,46	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Caringin	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Caringin (%)	0,00	0,00	30,25	464.326.295,68	50,25	477.116.079,10	75,25	490.213.570,31	100,00	503.629.629,58	100,00	516.734.360,97	7.01.0.00.0.00.15.0005 - Kelurahan Caringin
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibuntu	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cibuntu (%)	0,00	0,00	30,25	771.665.195,18	50,25	784.454.978,60	75,25	797.552.469,81	100,00	810.968.529,08	100,00	824.073.260,47	7.01.0.00.0.00.15.0003 - Kelurahan Cibuntu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler (%)	0,00	0,00	30,25	1.154.587.156,68	50,25	1.167.376.940,10	75,25	1.180.474.431,31	100,00	1.193.890.490,58	100,00	1.206.995.221,97	7.01.0.00.0.00.15.0006 - Kelurahan Cigondewah Kaler
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul (%)	0,00	0,00	30,25	440.066.691,18	50,25	452.856.474,60	75,25	465.953.965,81	100,00	479.370.025,08	100,00	492.474.756,47	7.01.0.00.0.00.15.0009 - Kelurahan Cigondewah Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu (%)	0,00	0,00	30,25	797.854.031,30	50,25	810.643.814,72	75,25	823.741.305,93	100,00	837.157.365,20	100,00	850.262.096,59	7.01.0.00.0.00.15.0008 - Kelurahan Cigondewah Rahayu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cijerah	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cijerah (%)	0,00	0,00	30,25	842.666.988,68	50,25	855.456.772,10	75,25	868.554.263,31	100,00	881.970.322,58	100,00	895.075.053,97	7.01.0.00.0.00.15.0002 - Kelurahan Cijerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Gempolsari	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Gempolsari (%)	0,00	0,00	30,25	751.249.175,68	50,25	764.038.959,10	75,25	777.136.450,31	100,00	790.552.509,58	100,00	803.657.240,97	7.01.0.00.0.00.15.0007 - Kelurahan Gempolsari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Warung Muncang	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik Lingkup Kelurahan Warung Muncang (%)	0,00	0,00	30,25	871.878.335,68	50,25	884.668.119,10	75,25	897.765.610,31	100,00	911.181.669,56	100,00	924.286.400,95	7.01.0.00.0.00.15.0004 - Kelurahan Warung Muncang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Regol	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	0,00	100,00	400.095.299,54	100,00	407.249.504,17	100,00	414.575.830,90	100,00	422.080.354,63	100,00	429.410.731,30	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ancol	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ancol (%)	0,00	0,00	100,00	914.278.902,76	100,00	930.627.353,65	100,00	947.369.129,86	100,00	964.518.113,45	100,00	981.269.144,37	7.01.0.00.0.00.16.0003 - Kelurahan Ancol
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Balonggede	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Balonggede (%)	0,00	0,00	100,00	786.146.862,19	100,00	800.204.151,86	100,00	814.599.644,08	100,00	829.345.275,42	100,00	843.748.725,34	7.01.0.00.0.00.16.0005 - Kelurahan Balonggede
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ciateul	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ciateul (%)	0,00	0,00	100,00	846.934.785,72	100,00	862.079.039,53	100,00	877.587.647,03	100,00	893.473.467,75	100,00	908.990.648,27	7.01.0.00.0.00.16.0007 - Kelurahan Ciateul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigereleng	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cigereleng (%)	0,00	0,00	100,00	970.664.865,72	100,00	988.021.568,20	100,00	1.005.795.853,38	100,00	1.024.002.459,48	100,00	1.041.786.570,14	7.01.0.00.0.00.16.0002 - Kelurahan Cigereleng
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Ciseureuh	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Ciseureuh (%)	0,00	0,00	100,00	1.002.519.431,16	100,00	1.020.445.733,13	100,00	1.038.803.321,72	100,00	1.057.607.418,83	100,00	1.075.975.155,35	7.01.0.00.0.00.16.0006 - Kelurahan Ciseureuh
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasirluyu	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirluyu (%)	0,00	0,00	100,00	1.048.680.430,14	100,00	1.067.432.148,53	100,00	1.086.635.012,14	100,00	1.106.304.943,75	100,00	1.125.518.422,55	7.01.0.00.0.00.16.0008 - Kelurahan Pasirluyu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pungkur	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pungkur (%)	0,00	0,00	100,00	798.278.037,06	100,00	812.552.247,32	100,00	827.169.878,99	100,00	842.143.052,84	100,00	856.768.765,02	7.01.0.00.0.00.16.0004 - Kelurahan Pungkur
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Lengkong	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	77,50	80,50	85,00	179.350.080,00	85,00	182.488.706,39	85,00	185.718.756,47	85,00	189.098.837,84	85,00	192.464.797,15	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Burangrang	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Burangrang (%)	0,00	0,00	42,85	1.100.000.000,00	57,14	1.119.249.999,95	71,42	1.139.060.724,81	85,71	1.159.791.630,00	85,71	1.180.435.921,01	7.01.0.00.0.00.17.0004 - Kelurahan Burangrang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cijagra	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Cijagra (%)	0,00	0,00	42,85	900.000.000,00	57,14	915.749.999,96	71,42	931.958.774,84	85,71	948.920.424,55	85,71	965.811.208,10	7.01.0.00.0.00.17.0002 - Kelurahan Cijagra
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cikawao	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cikawao (%)	0,00	0,00	42,85	1.100.000.000,00	57,14	1.119.249.999,95	71,42	1.139.060.724,81	85,71	1.159.791.630,00	85,71	1.180.435.921,01	7.01.0.00.0.00.17.0008 - Kelurahan Cikawao
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan (%)	0,00	0,00	42,85	1.200.000.000,00	57,14	1.220.999.999,94	71,42	1.242.611.699,79	85,71	1.265.227.232,73	85,71	1.287.748.277,47	7.01.0.00.0.00.17.0003 - Kelurahan Lingkar Selatan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Malabar	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Malabar (%)	0,00	0,00	42,85	1.300.000.000,00	57,14	1.322.749.999,94	71,42	1.346.162.674,77	85,71	1.370.662.835,45	85,71	1.395.060.633,93	7.01.0.00.0.00.17.0007 - Kelurahan Malabar
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Paledang	Persentase Kelurahan Unggul Lingkup Kelurahan Paledang (%)	0,00	0,00	42,85	1.000.000.000,00	57,14	1.017.499.999,95	71,42	1.035.509.749,83	85,71	1.054.356.027,27	85,71	1.073.123.564,56	7.01.0.00.0.00.17.0005 - Kelurahan Paledang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Turangga	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Turangga (%)	0,00	0,00	42,85	1.300.000.000,00	57,14	1.322.749.999,94	71,42	1.346.162.674,77	85,71	1.370.662.835,45	85,71	1.395.060.633,93	7.01.0.00.0.00.17.0006 - Kelurahan Turangga
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Batununggal	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	25,00	50,00	75,00	169.060.968,70	100,00	204.064.758,00	100,00	230.509.058,00	100,00	260.515.297,00	100,00	287.040.550,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Binong	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Binong (%)	0,00	50,00	50,00	1.235.724.550,00	50,00	1.253.518.854,00	100,00	1.274.224.550,00	100,00	1.279.224.550,00	100,00	1.294.224.550,00	7.01.0.00.0.00.18.0009 - Kelurahan Binong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cibangkong	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cibangkong (%)	0,00	50,00	50,00	1.452.403.920,00	50,00	1.455.903.920,00	50,00	1.470.903.920,00	100,00	1.495.903.920,00	100,00	1.565.993.920,00	7.01.0.00.0.00.18.0004 - Kelurahan Cibangkong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Gumuruh	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Gumuruh (%)	0,00	100,00	100,00	1.366.993.070,00	100,00	1.390.493.070,00	100,00	1.399.493.070,00	100,00	1.449.493.070,00	100,00	1.475.493.070,00	7.01.0.00.0.00.18.0002 - Kelurahan Gumuruh
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kacapiring	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Kacapiring (%)	0,00	50,00	100,00	1.251.139.664,00	100,00	1.254.639.664,00	100,00	1.269.639.664,00	100,00	1.274.639.664,00	100,00	1.279.639.664,00	7.01.0.00.0.00.18.0005 - Kelurahan Kacapiring
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebon Gedang	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Kebon Gedang (%)	0,00	50,00	100,00	1.232.470.000,00	100,00	1.245.970.000,00	100,00	1.260.970.000,00	100,00	1.260.970.000,00	100,00	1.270.970.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0007 - Kelurahan Kebon Gedang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebonwaru	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Kebonwaru (%)	0,00	50,00	50,00	1.221.682.206,00	50,00	1.235.182.206,00	100,00	1.251.182.206,00	100,00	1.265.182.206,00	100,00	1.280.182.206,00	7.01.0.00.0.00.18.0006 - Kelurahan Kebon Waru
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Maleer	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Maleer (%)	0,00	100,00	100,00	1.324.988.138,63	100,00	1.363.346.716,00	100,00	1.398.346.716,00	100,00	1.448.346.716,00	100,00	1.448.346.716,00	7.01.0.00.0.00.18.0003 - Kelurahan Maleer
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Samoja	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Samoja (%)	0,00	50,00	50,00	1.228.094.000,00	50,00	1.241.594.000,00	100,00	1.266.594.000,00	100,00	1.271.594.000,00	100,00	1.286.594.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0008 - Kelurahan Samoja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Ujungberung	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	40,00	60,00	80,00	240.098.060,00	100,00	340.098.060,00	100,00	440.098.060,00	100,00	490.098.060,00	100,00	540.098.060,00	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cigending	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cigending (%)	0,00	6,00	66,67	1.100.000.000,00	66,67	1.100.000.000,00	66,67	1.100.000.000,00	66,67	1.100.000.000,00	66,67	1.100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Cigending
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasanggrahan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasanggrahan (%)	0,00	7,00	66,67	1.500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Pasangrahan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasir Endah	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasir Endah (%)	0,00	10,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Pasir Endah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasirjati	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirjati (%)	0,00	10,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Pasirjati
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasirwangi	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirwangi (%)	0,00	7,00	66,67	1.200.000.000,00	66,67	1.200.000.000,00	66,67	1.200.000.000,00	66,67	1.200.000.000,00	66,67	1.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Pasirwangi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	50,00	595.994.448,09	66,67	688.742.023,20	83,33	634.565.123,70	100,00	646.051.825,72	100,00	657.271.971,78	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Sari	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Babakan Sari (%)	100,00	100,00	100,00	2.460.129.393,52	100,00	2.498.746.388,33	100,00	2.580.956.923,95	100,00	2.627.676.609,59	100,00	2.673.312.136,31	7.01.0.00.0.00.20.0006 - Kelurahan Babakansari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Surabaya	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Surabaya (%)	100,00	100,00	100,00	2.214.942.315,14	100,00	2.265.424.405,84	100,00	2.323.282.006,50	100,00	2.365.337.340,32	100,00	2.406.416.754,35	7.01.0.00.0.00.20.0004 - Kelurahan Babakan Surabaya
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cicaheum	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cicaheum (%)	100,00	100,00	100,00	1.458.454.484,31	100,00	1.543.214.597,15	100,00	1.529.232.162,12	100,00	1.556.913.850,73	100,00	1.583.953.168,80	7.01.0.00.0.00.20.0005 - Kelurahan Cicaheum
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebon Jayanti	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Jayanti (%)	100,00	100,00	100,00	1.866.593.951,32	100,00	1.908.978.813,47	100,00	1.958.054.781,85	100,00	1.993.498.885,17	100,00	2.028.120.486,36	7.01.0.00.0.00.20.0003 - Kelurahan Kebon Jayanti
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kebon Kangkung	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Kebon Kangkung (Aduan)	100,00	100,00	100,00	1.811.031.056,30	100,00	1.760.565.280,56	100,00	1.899.753.699,87	100,00	1.934.142.455,00	100,00	1.967.733.198,00	7.01.0.00.0.00.20.0007 - Kelurahan Kebon Kangkung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukapura	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sukapura (%)	100,00	100,00	100,00	1.918.521.655,96	100,00	2.044.514.385,38	100,00	2.012.994.573,64	100,00	2.049.433.180,11	100,00	2.085.026.206,40	7.01.0.00.0.00.20.0002 - Kelurahan Sukapura
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Arcamanik	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	75,00	80,00	85,00	240.824.685,05	90,00	216.333.075,00	95,00	216.333.075,00	100,00	216.333.075,00	100,00	216.333.075,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan (%)	0,00	0,00	85,00	798.524.000,00	90,00	1.056.981.045,19	95,00	1.103.506.840,32	100,00	1.105.319.378,34	100,00	1.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.21.0003 - Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah (%)	0,00	0,00	85,00	786.972.000,00	90,00	700.000.000,00	95,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.21.0005 - Kelurahan Cisaranten Endah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon (%)	0,00	0,00	85,00	889.117.000,00	90,00	900.000.000,00	95,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.21.0004 - Kelurahan Cisaranten Kulon
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukamiskin	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukamiskin (%)	0,00	0,00	85,00	1.286.320.000,00	90,00	1.200.000.000,00	95,00	1.200.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.278.637.888,16	7.01.0.00.0.00.21.0002 - Kelurahan Sukamiskin
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cibiru	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	107.540.919,00	100,00	107.540.919,00	100,00	107.540.919,00	100,00	107.540.919,00	100,00	107.540.919,00	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipadung	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cipadung (%)	0,00	0,00	50,00	2.004.575.000,00	50,00	2.004.575.000,00	50,00	2.004.575.000,00	66,67	2.004.575.000,00	66,67	2.004.575.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0003 - Kelurahan Cipadung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisurupan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cisurupan (%)	0,00	0,00	50,00	1.203.079.000,00	50,00	1.203.079.000,00	66,67	1.203.079.000,00	66,67	1.203.079.000,00	66,67	1.203.079.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0005 - Kelurahan Cisurupan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Palasari	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Palasari (%)	0,00	0,00	66,67	1.602.125.000,00	66,67	1.602.125.000,00	66,67	1.602.125.000,00	66,67	1.602.125.000,00	66,67	1.602.125.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0002 - Kelurahan Palasari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasirbiru	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasirbiru (%)	0,00	0,00	50,00	1.406.420.000,00	66,67	1.406.420.000,00	66,67	1.406.420.000,00	66,67	1.406.420.000,00	66,67	1.406.420.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0004 - Kelurahan Pasirbiru
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Kelurahan Antapani Tengah	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Antapani Tengah (%)	0,00	0,00	100,00	2.608.890.000,00	100,00	2.690.512.594,00	100,00	2.697.161.271,00	100,00	2.782.280.681,00	100,00	1.472.391.605,95	7.01.0.00.0.00.23.0004 - Kelurahan Antapani Tengah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	25,00	0,00	25,00	170.090.590,00	50,00	170.090.590,00	75,00	351.713.184,00	100,00	351.713.184,00	100,00	321.713.184,00	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Antapani Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Antapani Kidul (%)	0,00	0,00	66,67	2.102.499.200,00	66,67	2.162.499.200,00	66,67	2.162.499.200,00	66,67	2.232.499.200,00	66,67	1.122.499.200,00	7.01.0.00.0.00.23.0005 - Kelurahan Antapani Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Antapani Kulon	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Antapani Kulon (%)	0,00	33,33	33,33	1.002.640.000,00	33,33	1.032.640.000,00	66,67	1.062.640.000,00	66,67	1.092.640.000,00	66,67	932.584.537,50	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Antapani Kulon
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Antapani Wetan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Antapani Wetan (%)	0,00	0,00	100,00	1.503.300.000,00	100,00	1.553.300.000,00	100,00	1.563.300.000,00	100,00	1.613.300.000,00	100,00	803.300.000,00	7.01.0.00.0.00.23.0003 - Kelurahan Antapani Wetan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	75,00	75,00	100,00	126.027.006,98	100,00	128.280.527,57	100,00	130.588.265,33	100,00	132.952.133,81	100,00	135.261.147,26	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipamokolan	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cipamokolan (%)	75,00	100,00	100,00	926.059.353,27	100,00	942.618.453,36	100,00	959.575.946,74	100,00	976.945.894,36	100,00	993.912.761,71	7.01.0.00.0.00.24.0002 - Kelurahan Cipamokolan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Derwati	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Derwati (%)	75,00	100,00	100,00	953.948.873,66	100,00	971.006.673,27	100,00	988.474.864,33	100,00	1.006.367.931,24	100,00	1.023.845.778,57	7.01.0.00.0.00.24.0003 - Kelurahan Derwati
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Manjahlega	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Manjahlega (%)	75,00	100,00	100,00	1.142.578.048,96	100,00	1.163.008.774,27	100,00	1.183.931.039,83	100,00	1.205.362.194,10	100,00	1.226.296.025,30	7.01.0.00.0.00.24.0004 - Kelurahan Manjahlega
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Mekarjaya	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Mekarjaya (%)	75,00	100,00	100,00	827.598.029,47	100,00	842.396.517,87	100,00	857.551.041,24	100,00	873.074.165,51	100,00	888.237.066,18	7.01.0.00.0.00.24.0005 - Kelurahan Mekarjaya
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cijawura	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cijawura (%)	0,00	0,00	66,67	1.465.000.000,00	66,67	1.465.000.000,00	66,67	1.465.000.000,00	66,67	1.465.000.000,00	66,67	1.465.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0004 - Kelurahan Cijawura
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Jatisari	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Jatisari (%)	0,00	0,00	33,33	865.000.000,00	33,33	865.000.000,00	33,33	865.000.000,00	66,67	865.000.000,00	66,67	865.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0005 - Kelurahan Jatisari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Margasari	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Margasari (%)	0,00	0,00	66,67	2.265.000.000,00	66,67	2.265.000.000,00	66,67	2.265.000.000,00	66,67	2.265.000.000,00	66,67	2.265.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0003 - Kelurahan Margasari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sekejati	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sekejati (%)	0,00	0,00	33,33	1.565.000.000,00	33,33	1.565.000.000,00	66,67	1.565.000.000,00	66,67	1.565.000.000,00	66,67	1.565.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0002 - Kelurahan Sekejati
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan BuahBatu	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	50,00	50,00	140.000.000,00	75,00	160.000.000,00	75,00	210.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	270.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Bandung Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	0,00	25,00	216.333.075,00	50,00	216.333.075,00	75,00	216.333.075,00	100,00	216.333.075,00	100,00	216.333.075,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Batununggal	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Batununggal (%)	0,00	0,00	33,33	1.400.000.000,00	33,33	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	66,67	1.400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - Kelurahan Batununggal
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Kujangsari					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - Kelurahan Kujangsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Mengger	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Mengger (%)	0,00	0,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	66,67	700.000.000,00	83,33	700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - Kelurahan Mengger
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Wates	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Wates (%)	0,00	0,00	66,67	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	66,67	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - Kelurahan Wates
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Gedebage	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	100,00	100,00	100,00	239.560.218,09	100,00	245.274.554,15	100,00	251.128.643,03	100,00	257.124.959,14	100,00	263.096.883,83	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cimincrang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cimincrang (%)	0,00	100,00	25,00	956.242.502,09	50,00	968.854.273,15	75,00	980.645.938,03	100,00	992.873.872,14	100,00	1.116.696.883,88	7.01.0.00.0.00.27.0002 - Kelurahan Cimincrang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul (%)	0,00	100,00	25,00	1.450.000.000,00	50,00	1.525.000.000,00	75,00	1.540.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	100,00	1.570.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0004 - Kelurahan Cipadung Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisaranten kidul	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Cisaranten kidul (%)	0,00	33,33	33,33	1.035.900.000,09	66,67	1.055.200.200,15	66,67	1.075.300.000,03	66,67	1.096.100.000,14	66,67	1.031.296.883,83	7.01.0.00.0.00.27.0003 - Kelurahan Cisaranten Kidul
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Mekarmulya	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Mekarmulya (%)	0,00	100,00	25,00	650.000.000,00	50,00	725.000.000,00	75,00	740.000.000,00	100,00	760.000.000,00	100,00	770.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0005 - Kelurahan Mekarmulya
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Rancabolang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Rancabolang (%)	0,00	66,67	66,67	955.600.000,09	66,67	973.800.200,15	66,67	992.900.000,03	66,67	1.012.200.000,14	83,33	872.096.883,83	7.01.0.00.0.00.27.0004 - Kelurahan Rancabolang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Rancanumpang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Rancanumpang (%)	0,00	33,33	33,33	807.200.000,09	33,33	822.800.200,15	33,33	839.100.000,05	66,67	855.700.000,14	66,67	100.399.688,38	7.01.0.00.0.00.27.0005 - Kelurahan Rancanumpang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Panyileukan	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	100,00	25,00	153.410.537,49	50,00	183.758.752,17	75,00	202.621.583,44	100,00	203.402.581,98	100,00	242.309.007,97	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon (%)	0,00	100,00	25,00	1.150.000.000,00	50,00	1.225.000.000,00	75,00	1.240.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	1.270.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0002 - Kelurahan Cipadung Kulon
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan (%)	0,00	100,00	25,00	650.000.000,00	50,00	725.000.000,00	75,00	740.000.000,00	100,00	760.000.000,00	100,00	770.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Cipadung Wetan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Cinambo	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	25,00	100,00	100,00	147.827.665,62	100,00	150.471.009,32	100,00	161.177.948,85	100,00	164.095.542,38	100,00	166.945.430,99	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu (%)	100,00	100,00	100,00	938.982.984,00	100,00	955.773.174,80	100,00	970.967.318,70	100,00	988.543.469,40	100,00	1.005.711.755,00	7.01.0.00.0.00.29.0005 - Kelurahan Babakan Penghulu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan (%)	100,00	100,00	100,00	843.100.056,00	100,00	858.175.740,00	100,00	871.614.128,00	100,00	887.391.817,90	100,00	902.803.376,90	7.01.0.00.0.00.29.0004 - Kelurahan Cisaranten Wetan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pakemitan	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Pakemitan (%)	100,00	100,00	100,00	665.545.128,00	100,00	677.445.907,70	100,00	687.633.006,80	100,00	700.080.327,30	100,00	712.238.800,10	7.01.0.00.0.00.29.0002 - Kelurahan Pakemitan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sukamulya	Persentase Pencapaian Kriteria Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukamulya (%)	100,00	100,00	100,00	761.428.056,00	100,00	775.043.342,50	100,00	786.986.197,40	100,00	801.231.978,60	100,00	815.147.177,80	7.01.0.00.0.00.29.0003 - Kelurahan Sukamulya
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan Mandalajati	Persentase Kelurahan Berdaya (%)	0,00	0,00	25,00	277.961.873,00	50,00	277.961.873,00	75,00	277.961.873,00	100,00	277.961.873,00	100,00	277.961.873,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Jatihandap	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Jatihandap (%)	0,00	0,00	66,67	1.902.164.670,00	66,67	1.927.164.670,00	66,67	1.952.164.670,00	66,67	1.977.164.670,00	66,67	2.002.164.670,00	7.01.0.00.0.00.30.0002 - Kelurahan Jatihandap
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Karang Pamulang	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Karang Pamulang (%)	0,00	0,00	33,33	1.452.526.597,00	33,33	1.477.526.597,00	66,67	1.502.526.597,00	66,67	1.527.526.597,00	66,67	1.552.526.597,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - Kelurahan Karangpamulang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Pasir Impun	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Pasir Impun (%)	0,00	0,00	33,33	1.226.889.030,00	66,67	1.251.889.030,00	66,67	1.276.889.030,00	66,67	1.301.889.030,00	83,33	1.326.889.030,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - Kelurahan Pasir Impun
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kelurahan Sindangjaya	Persentase Kelurahan Berdaya lingkup Kelurahan Sindangjaya (%)	0,00	0,00	33,33	1.339.547.831,00	33,33	1.364.547.830,00	33,33	1.389.547.830,00	66,67	1.414.547.830,00	66,67	1.439.547.830,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - Kelurahan Sindang Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					46.545.465.006,30		46.215.281.773,53		47.403.963.474,15		47.665.491.452,90		49.712.148.361,22	
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Kecamatan Sukasari	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	90,00	100,00	100,00	477.711.429,49	100,00	482.480.433,26	100,00	487.749.115,86	100,00	450.479.785,03	100,00	455.760.224,78	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sukasari
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	50,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Gegerkalong	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Gegerkalong (%)	0,00	100,00	100,00	172.936.000,00	100,00	176.936.000,00	100,00	180.936.000,00	100,00	236.250.000,00	100,00	240.250.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Gegerkalong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Isola	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Isola (%)	0,00	100,00	100,00	145.193.620,00	100,00	149.193.620,00	100,00	153.193.620,00	100,00	182.640.000,00	100,00	186.640.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Isola
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sarijadi	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Sarijadi (%)	0,00	100,00	100,00	189.520.750,00	100,00	193.520.750,00	100,00	197.520.750,00	100,00	220.050.000,00	100,00	224.050.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Sarijadi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cidadap	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	96,88	98,44	66,67	137.165.000,00	66,67	137.165.000,00	100,00	137.165.000,00	100,00	137.165.000,00	100,00	137.165.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Cidadap
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	66,67		66,67		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Cidadap
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ciumbuleuit	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Ciumbuleuit (%)	87,52	93,76	100,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	142.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Ciumbuleuit
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Hegarmanah	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Hegarmanah (%)	100,00	100,00	100,00	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00	100,00	137.500.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Hegarmanah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ledeng	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Ledeng (%)	100,00	100,00	100,00	67.065.000,00	100,00	67.065.000,00	100,00	67.065.000,00	100,00	67.065.000,00	100,00	167.065.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Ledeng
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukarasa	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Sukarasa (%)	0,00	100,00	100,00	176.134.302,00	100,00	180.134.302,00	100,00	184.134.302,00	100,00	135.900.000,00	100,00	139.900.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Sukarasa
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Sukajadi	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	8.571,00	87,76	91,84	1.053.225.958,02	93,88	824.237.902,70	95,92	839.058.282,30	97,87	854.322.325,95	100,00	868.680.250,64	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sukajadi
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	80,00	100,00	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sukajadi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipedes	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Cipedes (%)	100,00	100,00	100,00	129.498.000,00	100,00	199.426.920,00	100,00	203.016.604,56	100,00	206.670.903,44	100,00	210.390.979,70	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Cipedes
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasteur	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Pasteur (%)	76,92	84,76	84,62	49.266.000,00	92,31	75.869.640,00	92,31	77.235.293,52	100,00	78.625.528,80	100,00	80.040.788,32	7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Pasteur
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukabungah	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Sukabungah (%)	75,00	75,00	83,33	75.350.000,00	91,67	116.039.000,00	91,67	118.127.702,00	100,00	120.254.000,64	100,00	122.418.572,65	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Sukabungah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukagalih	Persentase Kelurahan Berdaya Lingkup Kelurahan Sukagalih (%)	100,00	100,00	100,00	79.525.000,00	100,00	122.468.500,00	100,00	124.672.933,00	100,00	126.917.045,79	100,00	129.201.552,62	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Sukagalih
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukawarna	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Sukawarna (%)	85,71	85,71	85,71	141.006.000,00	85,71	217.149.240,00	85,71	221.057.926,32	85,71	225.036.968,99	100,00	229.087.634,44	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Sukawarna
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cicendo	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	0,00	587.121.526,22	0,00	597.619.993,82	0,00	608.371.042,73	0,00	619.383.587,57	0,00	630.140.579,57	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cicendo
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Arjuna	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Arjuna (%)	100,00	100,00	100,00	145.026.512,23	100,00	147.619.767,75	100,00	150.275.414,08	100,00	152.995.653,25	100,00	155.652.767,60	7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Arjuna
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Husen Sastranegara	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Husen Sastranegara (%)	100,00	0,00	70,00	166.828.277,05	80,00	169.811.375,41	90,00	172.866.243,75	100,00	175.995.415,14	100,00	179.051.972,20	7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Husen Sastranegara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pajajaran	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Pajajaran (%)	100,00	0,00	70,00	175.142.294,44	80,00	178.274.057,84	90,00	181.481.167,93	100,00	184.766.284,02	100,00	187.975.166,98	7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Pajajaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pamoyanan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Pamoyanan (%)	100,00	0,00	83,33	157.524.139,32	83,33	160.340.868,05	83,33	163.225.364,11	100,00	166.180.019,27	100,00	169.066.109,85	7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Pamoyanan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasir kaliki	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Pasirkaliki (%)	100,00	0,00	90,00	196.183.188,79	100,00	199.691.189,71	100,00	203.283.589,18	100,00	206.963.365,97	100,00	210.557.751,28	7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Pasir Kaliki
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukaraja	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sukaraja (%)	100,00	0,00	70,00	277.903.022,15	80,00	282.872.275,95	90,00	287.961.084,40	100,00	293.173.667,07	100,00	298.265.288,57	7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sukaraja
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Andir	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,00	83,33	100,00	511.282.026,00	100,00	518.911.908,00	100,00	529.782.710,00	100,00	539.827.191,00	100,00	548.287.988,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Andir
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Campaka	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Campaka (%)	0,00	100,00	100,00	203.332.598,00	100,00	206.342.431,12	100,00	210.709.446,00	100,00	214.713.735,00	100,00	218.080.717,00	7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Campaka
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ciroyom	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Ciroyom (%)	0,00	100,00	100,00	103.031.634,00	100,00	104.569.624,00	100,00	106.759.110,00	100,00	108.783.314,00	100,00	110.488.233,00	7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Ciroyom
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Dunguscariang	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Dunguscariang (%)		100,00	100,00	145.550.119,00	100,00	147.723.051,00	100,00	150.820.342,00	100,00	153.678.146,00	100,00	156.086.113,00	7.01.0.00.0.00.05.0003 - Kelurahan Dungus Cariang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Garuda	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Garuda (%)	0,00	100,00	100,00	103.031.634,00	100,00	104.569.624,00	100,00	106.759.110,00	100,00	108.783.314,00	100,00	110.488.233,00	7.01.0.00.0.00.05.0006 - Kelurahan Garuda
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebon Jeruk	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Kebon Jeruk (%)	0,00	100,00	100,00	145.550.119,00	100,00	147.723.051,00	100,00	150.820.342,00	100,00	153.678.146,00	100,00	156.086.113,00	7.01.0.00.0.00.05.0005 - Kelurahan Kebon Jeruk
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Maleber	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Maleber (%)	0,00	100,00	100,00	246.663.640,00	100,00	250.342.844,00	100,00	255.592.124,00	100,00	260.438.616,00	100,00	264.520.686,00	7.01.0.00.0.00.05.0002 - Kelurahan Maleber
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Coblong	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	0,00	624.538.859,39	0,00	629.354.434,94	0,00	634.285.867,80	0,00	639.337.247,07	0,00	644.271.405,99	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	70,00	85,00	85,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Coblong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipaganti	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cipaganti (%)	65,00	100,00	100,00	182.377.867,73	100,00	187.193.443,28	100,00	192.124.876,14	100,00	197.176.255,41	100,00	202.110.414,33	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Cipaganti
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Dago	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Dago (%)	65,00	100,00	100,00	182.488.859,39	100,00	187.304.434,94	100,00	192.235.867,80	100,00	197.287.247,07	100,00	202.221.405,99	7.01.0.00.0.00.06.0005 - Kelurahan Dago
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Lebakgede	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Lebakgede (%)	65,00	100,00	100,00	218.240.226,35	100,00	223.055.801,90	100,00	227.987.234,76	100,00	233.038.614,03	100,00	237.972.772,95	7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Lebakgede
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Lebak Siliwangi (%)	65,00	100,00	100,00	246.236.968,19	100,00	251.052.543,74	100,00	255.983.976,60	100,00	261.035.355,87	100,00	265.969.514,79	7.01.0.00.0.00.06.0007 - Kelurahan Lebak Siliwangi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sadangserang	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sadangserang (%)	65,00	100,00	100,00	206.488.859,39	100,00	211.304.434,94	100,00	216.235.867,80	100,00	221.287.247,07	100,00	226.221.405,99	7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Sadangserang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sekeloa					224.788.859,39		229.604.434,94		234.535.867,80		239.587.247,07		244.521.405,99	7.01.0.00.0.00.06.0006 - Kelurahan Sekeloa
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Bandung Wetan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	83,33	86,11	88,89	180.516.564,01	91,67	183.744.200,17	97,22	187.051.584,85	100,00	190.465.863,56	100,00	193.748.428,15	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bandung Wetan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cihapit	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cihapit (%)	100,00	100,00	100,00	168.313.918,82	100,00	171.323.371,68	100,00	174.405.199,54	100,00	177.554.352,96	100,00	180.651.329,07	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Cihapit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Citarum	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Citarum (%)	62,50	75,00	75,00	151.066.168,82	87,50	153.768.215,45	87,50	156.533.253,47	100,00	159.359.701,49	100,00	162.116.623,15	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Citarum
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Tamansari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Tamansari (%)	85,00	90,00	90,00	286.042.168,82	100,00	291.156.602,79	100,00	296.394.034,91	100,00	301.745.883,89	100,00	307.009.059,79	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Taman Sari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	0,00	440.468.454,28	0,00	295.722.608,64	0,00	295.722.608,64	0,00	301.158.608,64	0,00	305.611.107,06	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	50,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sumur Bandung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Ciamis	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Babakan Ciamis (%)	37,50	50,00	50,00	290.975.000,00	50,00	114.032.797,84	62,50	114.032.797,84	62,50	119.468.797,84	62,50	123.921.296,26	7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Babakan Ciamis
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Braga	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Braga (%)	50,00	50,00	62,50	402.195.000,00	62,50	142.736.997,84	62,50	142.736.997,84	75,00	148.172.997,84	75,00	152.625.496,26	7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Braga
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebon Pisang	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Kebon Pisang (%)	100,00	100,00	100,00	332.375.000,00	100,00	218.567.797,84	100,00	218.567.797,84	100,00	224.003.797,84	100,00	228.456.296,26	7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Kebon Pisang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Merdeka	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Merdeka (%)	55,50	55,50	55,50	270.275.000,00	66,66	134.939.797,84	66,66	134.939.797,84	66,66	140.375.797,84	77,77	144.828.296,26	7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Merdeka
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	79,52	81,61	494.844.022,24	81,61	569.070.625,58	81,61	597.524.156,85	81,61	627.400.364,70	91,95	658.770.382,93	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	50,00	66,67	83,33		83,33		83,33		83,33		100,00		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Cibeunying Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cicadas	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Cicadas (%)	0,00	67,00	80,00	228.241.695,00	80,00	251.065.864,50	80,00	263.619.157,73	80,00	271.527.732,46	100,00	279.673.564,43	7.01.0.00.0.00.09.0004 - Kelurahan Cicadas
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cikutra	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Cikutra (%)	0,00	47,00	80,00	198.721.083,35	80,00	218.593.191,69	80,00	229.522.851,27	80,00	236.408.536,81	100,00	243.500.792,91	7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Cikutra
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Padasuka	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Padasuka (%)	0,00	63,00	81,25	230.521.360,46	81,25	253.573.496,51	81,25	266.252.171,33	81,25	274.239.736,47	100,00	282.466.928,57	7.01.0.00.0.00.09.0002 - Kelurahan Padasuka
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasirlayung	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Pasirlayung (%)	0,00	69,00	84,62	251.557.202,63	84,62	276.712.922,89	84,62	290.548.569,04	84,62	299.265.026,11	100,00	308.242.976,89	7.01.0.00.0.00.09.0007 - Kelurahan Pasirlayung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukamaju	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Sukamaju (%)	0,00	58,00	83,33	175.958.016,68	83,33	193.553.818,35	83,33	203.231.509,27	83,33	209.328.454,54	100,00	215.608.308,18	7.01.0.00.0.00.09.0005 - Kelurahan Sukamaju
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukapada	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Sukapada (%)	0,00	58,00	81,25	265.773.422,57	81,25	292.350.764,83	81,25	306.968.303,07	81,25	316.177.352,16	100,00	325.662.672,73	7.01.0.00.0.00.09.0006 - Kelurahan Sukapada
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cibeunying Kaler	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	82,60	86,96	93,48	461.080.734,00	97,83	642.761.587,00	100,00	772.316.668,00	100,00	421.239.897,00	100,00	485.494.185,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Cibeunying Kaler
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigadung	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cigadung (%)	86,67	86,67	87,50	288.659.645,00	97,83	388.659.645,00	100,00	398.659.645,00	100,00	218.659.645,00	100,00	218.659.645,00	7.01.0.00.0.00.10.0005 - Kelurahan Cigadung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cihaurgeulis (%)	86,96	86,96	91,67	236.259.705,00	97,83	236.259.705,00	100,00	236.259.705,00	100,00	206.259.705,00	100,00	206.259.705,00	7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Cihaur Geulis
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Neglasari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Neglasari (%)	86,96	86,96	87,50	216.000.000,00	97,83	216.000.000,00	100,00	216.000.000,00	100,00	116.000.000,00	100,00	116.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0004 - Kelurahan Neglasari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukaluyu	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sukaluyu (%)	86,96	86,96	90,90	228.000.000,00	97,83	228.000.000,00	100,00	268.000.000,00	100,00	217.000.000,00	100,00	217.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0003 - Kelurahan Sukaluyu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Astana Anyar	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	30,00	32,00	45,00	271.494.204,92	57,00	271.494.204,92	70,00	271.494.204,92	83,00	271.494.204,92	87,00	301.494.204,92	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Astana Anyar
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibadak	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cibadak (%)	0,00	0,00	100,00	113.977.490,00	100,00	113.977.490,00	100,00	113.977.490,00	100,00	113.977.490,00	100,00	123.977.490,00	7.01.0.00.0.00.11.0006 - Kelurahan Cibadak
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Karanganyar	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Karanganyar (%)	0,00	0,00	100,00	150.741.760,00	100,00	150.741.760,00	100,00	150.741.760,00	100,00	150.741.760,00	100,00	160.741.760,00	7.01.0.00.0.00.11.0004 - Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Karasak	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Karasak (%)	0,00	0,00	100,00	137.515.000,00	100,00	137.515.000,00	100,00	137.515.000,00	100,00	137.515.000,00	100,00	147.515.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0002 - Kelurahan Karasak
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Nyengseret	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Nyengseret (%)	0,00	0,00	100,00	119.822.993,00	100,00	119.822.993,00	100,00	119.822.993,00	100,00	119.822.993,00	100,00	129.822.993,00	7.01.0.00.0.00.11.0003 - Kelurahan Nyengseret
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Panjunan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Panjunan (%)	0,00	0,00	100,00	68.282.080,00	100,00	68.282.080,00	100,00	68.282.080,00	100,00	68.282.080,00	100,00	78.282.080,00	7.01.0.00.0.00.11.0005 - Kelurahan Panjunan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Pelindung Hewan (%)	0,00	0,00	100,00	134.445.680,00	100,00	134.445.680,00	100,00	134.445.680,00	100,00	134.445.680,00	100,00	144.445.680,00	7.01.0.00.0.00.11.0007 - Kelurahan Pelindung Hewan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Bojongloa Kaler	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	70,00	76,00	568.931.206,67	85,00	574.612.379,53	89,00	593.944.413,89	95,00	613.746.658,02	100,00	633.089.378,96	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	40,00	60,00	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Bojongloa Kaler
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Asih	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Babakan Asih (%)	0,00	70,00	76,00	139.590.044,69	85,00	140.297.964,23	89,00	141.022.915,52	95,00	141.765.499,68	100,00	142.490.851,71	7.01.0.00.0.00.12.0005 - Kelurahan Babakan Asih
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Tarogong	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan BabakanTarogong (%)	0,00	70,00	76,00	152.786.726,25	85,00	167.163.273,72	89,00	168.371.525,87	95,00	169.609.166,13	100,00	170.818.086,19	7.01.0.00.0.00.12.0003 - Kelurahan Babakan Tarogong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Jamika	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Jamika (%)	0,00	70,00	76,00	139.590.044,69	85,00	180.595.928,47	89,00	182.045.831,04	95,00	183.530.999,35	100,00	184.981.703,42	7.01.0.00.0.00.12.0004 - Kelurahan Jamika
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kopo	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kopo (%)	0,00	70,00	76,00	165.983.407,82	85,00	153.730.618,98	89,00	154.697.220,69	95,00	155.687.332,90	100,00	156.654.468,95	7.01.0.00.0.00.12.0002 - Kelurahan Kopo
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Suka Asih	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Suka Asih (%)	0,00	70,00	76,00	152.786.726,25	85,00	126.865.309,49	89,00	127.348.610,35	95,00	127.843.666,45	100,00	128.327.234,47	7.01.0.00.0.00.12.0006 - Kelurahan Suka Asih
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Bojongloa Kidul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	75,56	80,00	273.746.521,17	84,44	300.107.983,38	91,11	309.103.672,68	95,56	309.103.672,68	100,00	336.114.284,97	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	66,66	83,33		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bojongloa Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibaduyut	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cibaduyut (%)	0,00	75,00	87,50	204.120.968,17	100,00	204.120.968,17	100,00	207.120.968,17	100,00	207.120.968,17	100,00	207.120.968,17	7.01.0.00.0.00.13.0004 - Kelurahan Cibaduyut
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cibaduyut Kidul (%)	0,00	83,33	83,33	201.870.968,17	100,00	201.870.968,00	100,00	204.870.968,17	100,00	208.870.968,17	100,00	208.870.968,17	7.01.0.00.0.00.13.0006 - Kelurahan Cibaduyut Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cibaduyut Wetan (%)	0,00	60,00	60,00	158.618.168,17	80,00	158.618.168,00	100,00	161.618.168,17	100,00	178.270.469,04	100,00	178.270.469,04	7.01.0.00.0.00.13.0007 - Kelurahan Cibaduyut Wetan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebonlega	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kebonlega (%)	0,00	75,00	75,00	200.820.968,17	75,00	200.820.968,17	75,00	203.820.968,17	87,50	208.820.968,17	100,00	208.820.968,17	7.01.0.00.0.00.13.0003 - Kelurahan Kebon Lega
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Mekarwangi	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Mekarwangi (%)	0,00	71,43	85,71	230.820.968,17	85,71	230.820.968,17	100,00	233.820.968,17	100,00	233.820.968,17	100,00	233.820.968,17	7.01.0.00.0.00.13.0005 - Kelurahan Mekarwangi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Situsaeur	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Situsaeur (%)	0,00	75,00	75,00	204.252.968,17	87,50	204.252.968,17	87,50	207.252.968,17	100,00	209.252.968,17	100,00	209.252.968,17	7.01.0.00.0.00.13.0002 - Kelurahan Situsaeur
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	59,65	77,10	82,65	301.104.000,00	89,00	307.126.080,00	91,00	399.862.021,13	94,00	222.681.959,60	94,00	378.559.331,32	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	59,65	77,10	82,65		89,00		91,00		94,00		94,00		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Babakan Ciparay
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Babakan (%)	59,65	77,10	82,65	467.697.072,83	89,00	475.931.579,19	91,00	410.851.691,45	94,00	512.525.766,86	94,00	490.808.142,62	7.01.0.00.0.00.14.0003 - Kelurahan Babakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Ciparay	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Babakan Ciparay (%)	59,65	77,10	82,65	506.788.993,33	89,00	515.711.771,41	91,00	422.718.847,31	94,00	555.364.642,06	94,00	531.831.775,24	7.01.0.00.0.00.14.0002 - Kelurahan Babakan Ciparay
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cirangrang	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Cirangrang (%)	59,65	77,10	82,65	182.092.482,02	89,00	185.298.492,47	91,00	324.150.548,32	94,00	199.546.019,02	94,00	191.090.511,53	7.01.0.00.0.00.14.0007 - Kelurahan Cirangrang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Margahayu Utara	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Margahayu Utara (%)	59,65	77,10	82,65	316.273.820,09	89,00	321.842.293,65	91,00	364.884.051,11	94,00	346.588.618,14	94,00	331.902.368,47	7.01.0.00.0.00.14.0005 - Kelurahan Margahayu Utara
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Margasuka	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Kelurahan Margasuka (%)	59,65	77,10	82,65	305.992.228,62	89,00	311.379.679,38	91,00	361.762.862,72	94,00	335.321.537,67	94,00	321.112.716,13	7.01.0.00.0.00.14.0006 - Kelurahan Margasuka
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukahaji	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan lingkup Kelurahan Sukahaji (%)	59,65	77,10	82,65	543.083.619,58	89,00	552.645.418,83	91,00	433.736.827,02	94,00	595.138.102,77	94,00	569.919.886,39	7.01.0.00.0.00.14.0004 - Kelurahan Sukahaji
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Bandung Kulon	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	0,00	1.233.487.187,23	0,00	1.239.455.752,23	0,00	1.245.567.914,83	0,00	1.251.828.742,49	0,00	1.257.944.283,81	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Caringin	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Caringin (%)	0,00	0,00	85,25	308.010.526,69	85,75	313.979.092,29	86,75	320.091.254,85	87,75	326.352.082,51	88,75	332.467.623,83	7.01.0.00.0.00.15.0005 - Kelurahan Caringin
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibuntu	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cibuntu (%)	0,00	85,25	85,75	205.976.520,31	86,75	211.945.086,13	87,75	218.057.248,69	88,75	224.318.076,35	89,75	230.433.617,67	7.01.0.00.0.00.15.0003 - Kelurahan Cibuntu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cigondewah Kaler (%)	0,00	0,00	85,25	241.144.204,41	85,75	247.112.770,01	86,75	253.224.932,57	87,75	259.485.760,23	88,75	265.601.301,55	7.01.0.00.0.00.15.0006 - Kelurahan Cigondewah Kaler
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cigondewah Kidul (%)	0,00	0,00	85,25	270.228.492,71	85,75	276.197.058,31	86,75	282.309.220,87	87,75	288.570.048,53	88,75	294.685.589,85	7.01.0.00.0.00.15.0009 - Kelurahan Cigondewah Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cigondewah Rahayu (%)	0,00	0,00	85,25	181.722.757,92	85,75	187.691.323,52	86,75	193.803.486,08	87,75	200.064.313,74	88,75	206.179.855,06	7.01.0.00.0.00.15.0008 - Kelurahan Cigondewah Rahayu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cijerah	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cijerah (%)	0,00	85,25	85,75	203.500.095,45	86,75	209.468.661,44	87,75	215.580.824,00	88,75	221.841.651,66	89,75	227.957.192,98	7.01.0.00.0.00.15.0002 - Kelurahan Cijerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Gempolsari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Gempolsari (%)	0,00	0,00	85,25	156.215.894,31	85,75	162.184.459,91	86,75	168.296.622,47	87,75	174.557.450,13	88,75	180.672.991,45	7.01.0.00.0.00.15.0007 - Kelurahan Gempolsari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Warung Muncang	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Warung Muncang (%)	0,00	0,00	85,25	203.815.614,21	85,75	209.784.179,81	86,75	215.896.342,37	87,75	222.157.170,02	88,75	228.272.711,32	7.01.0.00.0.00.15.0004 - Kelurahan Warung Muncang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Regol	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	93,33	93,33	100,00	1.215.825.910,81	100,00	1.237.566.399,56	100,00	1.259.829.939,98	100,00	1.282.634.992,73	100,00	1.304.910.840,23	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	71,42	71,42	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Regol
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ancol	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Ancol (%)	93,33	100,00	100,00	135.885.273,33	100,00	138.315.072,06	100,00	140.803.329,01	100,00	143.352.107,42	100,00	145.841.739,86	7.01.0.00.0.00.16.0003 - Kelurahan Ancol
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Balonggede	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Balonggede (%)	93,33	93,33	100,00	116.901.280,09	100,00	118.991.621,27	100,00	121.132.253,70	100,00	123.324.952,37	100,00	125.466.768,12	7.01.0.00.0.00.16.0005 - Kelurahan Balonggede
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ciateul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Ciateul (%)	93,33	93,33	100,00	197.527.421,07	100,00	201.059.458,54	100,00	204.676.472,85	100,00	208.381.463,19	100,00	212.000.476,96	7.01.0.00.0.00.16.0007 - Kelurahan Ciateul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigereleng	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cigereleng (%)	93,33	100,00	100,00	136.139.782,22	100,00	138.574.131,89	100,00	141.067.049,27	100,00	143.620.601,45	100,00	146.114.896,90	7.01.0.00.0.00.16.0002 - Kelurahan Cigereleng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Ciseureuh	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Ciseureuh (%)	93,33	93,33	100,00	117.677.495,04	100,00	119.781.715,91	100,00	121.936.561,97	100,00	124.143.819,98	100,00	126.299.857,21	7.01.0.00.0.00.16.0006 - Kelurahan Ciseureuh
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasirluyu	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Pasirluyu (%)	93,33	93,33	100,00	129.199.971,42	100,00	131.510.228,59	100,00	133.876.067,94	100,00	136.299.451,20	100,00	138.666.598,37	7.01.0.00.0.00.16.0008 - Kelurahan Pasirluyu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pungkur	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Pungkur (%)	93,33	93,33	100,00	87.979.270,52	100,00	89.552.449,97	100,00	91.163.478,35	100,00	92.813.691,49	100,00	94.425.610,44	7.01.0.00.0.00.16.0004 - Kelurahan Pungkur
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Lengkong	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,50	76,92	80,00	182.273.562,00	84,61	185.463.349,34	87,69	188.746.050,62	92,30	192.181.228,74	95,38	195.602.054,61	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	75,00	75,00	75,00		80,00		80,00		85,00		90,00		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Lengkong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Burangrang	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Burangrang (%)	0,00	88,88	88,88	72.000.000,00	100,00	73.260.000,00	100,00	74.556.702,00	100,00	75.913.633,98	100,00	77.264.896,66	7.01.0.00.0.00.17.0004 - Kelurahan Burangrang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cijagra	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cijagra (%)	0,00	28,57	28,57	73.260.000,00	42,85	74.542.050,00	42,85	75.861.444,29	42,85	77.242.122,57	71,42	78.617.032,35	7.01.0.00.0.00.17.0002 - Kelurahan Cijagra
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cikawao	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cikawao (%)	0,00	88,88	88,88	61.912.080,00	88,88	62.995.541,40	100,00	64.110.562,48	100,00	65.277.374,72	100,00	66.439.311,99	7.01.0.00.0.00.17.0008 - Kelurahan Cikawao
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Lingkar Selatan (%)	0,00	50,00	70,00	90.000.000,00	80,00	91.575.000,00	90,00	93.195.877,50	100,00	94.892.042,47	100,00	96.581.120,83	7.01.0.00.0.00.17.0003 - Kelurahan Lingkar Selatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Malabar	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Malabar (%)	0,00	90,90	90,90	90.000.000,00	90,90	91.575.000,00	90,90	93.195.877,50	90,90	94.892.042,47	100,00	96.581.120,83	7.01.0.00.0.00.17.0007 - Kelurahan Malabar
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Paledang	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Paledang (%)	0,00	87,50	87,50	92.497.500,00	87,50	94.116.206,25	87,50	95.782.063,10	100,00	97.525.296,65	100,00	99.261.246,93	7.01.0.00.0.00.17.0005 - Kelurahan Paledang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Turangga	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Turangga (%)	0,00	90,90	90,90	113.860.800,00	90,90	115.853.364,00	90,90	117.903.968,55	100,00	120.049.820,77	100,00	122.186.707,58	7.01.0.00.0.00.17.0006 - Kelurahan Turangga
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Batununggal	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	79,52	79,52	80,72	468.653.192,66	81,92	472.834.598,04	83,13	477.116.597,74	84,33	481.502.749,30	84,33	485.787.113,36	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	50,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Batununggal
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Binong	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Binong (%)	79,52	79,52	80,72	185.509.480,00	81,92	189.690.877,00	83,13	193.972.874,00	84,33	198.359.021,00	84,33	202.643.385,00	7.01.0.00.0.00.18.0009 - Kelurahan Binong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cibangkong	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cibangkong (%)	79,52	79,52	80,72	245.270.737,00	81,92	249.452.134,00	83,13	253.734.131,00	84,33	258.120.278,00	84,33	262.404.642,00	7.01.0.00.0.00.18.0004 - Kelurahan Cibangkong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Gumuruh	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Gumuruh (%)	79,52	79,52	80,72	224.152.559,00	81,92	228.333.956,00	83,13	232.615.953,00	84,33	237.002.100,00	84,33	241.286.464,00	7.01.0.00.0.00.18.0002 - Kelurahan Gumuruh
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kacapiring	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kacapiring (%)	79,52	79,52	80,72	194.010.240,00	81,92	198.191.637,00	83,13	202.473.634,00	84,33	206.859.781,00	84,33	211.144.145,00	7.01.0.00.0.00.18.0005 - Kelurahan Kacapiring
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebon Gedang	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kebon Gedang (%)	79,52	79,52	80,72	149.500.000,00	81,92	153.681.397,00	83,13	157.963.394,00	84,33	162.349.541,00	84,33	166.633.905,00	7.01.0.00.0.00.18.0007 - Kelurahan Kebon Gedang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebonwaru	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kebonwaru (%)	79,52	79,52	80,72	167.629.441,00	81,92	171.810.838,00	83,13	176.092.835,00	84,33	180.478.982,00	84,33	184.763.346,00	7.01.0.00.0.00.18.0006 - Kelurahan Kebon Waru
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Maleer	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Maleer (%)	79,52	79,52	80,72	245.957.865,00	81,92	250.139.262,00	83,13	254.421.259,00	84,33	258.807.406,00	84,33	263.091.770,00	7.01.0.00.0.00.18.0003 - Kelurahan Maleer
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Samoja	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Samoja (%)	79,52	79,52	80,72	223.899.405,00	81,92	228.080.802,00	83,13	232.362.799,00	84,33	236.748.946,00	84,33	241.033.310,00	7.01.0.00.0.00.18.0008 - Kelurahan Samoja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Ujungberung	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	84,75	93,22	459.588.882,00	100,00	509.588.882,00	100,00	559.588.882,00	100,00	559.588.882,00	100,00	609.588.882,00	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ujungberung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cigending	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Cigending (%)	0,00	81,82	90,90	120.275.867,00	100,00	140.275.867,00	100,00	140.275.867,00	100,00	150.275.867,00	100,00	150.275.867,00	7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Cigending
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasanggrahan	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Pasanggrahan (%)	0,00	86,67	93,33	168.874.338,00	100,00	188.874.338,00	100,00	188.874.338,00	100,00	198.874.338,00	100,00	198.874.338,00	7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Pasangrahan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasir Endah	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Pasir Endah (%)	0,00	85,71	100,00	125.684.460,00	100,00	145.684.460,00	100,00	145.684.460,00	100,00	155.684.460,00	100,00	155.684.460,00	7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Pasir Endah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasirjati	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Pasirjati (%)	0,00	85,71	92,85	157.141.992,00	100,00	177.141.992,00	100,00	177.141.992,00	100,00	187.141.992,00	100,00	187.141.992,00	7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Pasirjati
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasirwangi	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Pasirwangi (%)	0,00	83,33	91,66	177.445.769,00	100,00	197.445.769,00	100,00	197.445.769,00	100,00	207.445.769,00	100,00	207.445.769,00	7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Pasirwangi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Kiaracondong	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	62,35	2.126.610.620,27	71,76	2.072.448.452,61	81,18	2.079.171.565,78	87,06	2.116.808.087,74	90,59	2.153.571.231,16	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Kiaracondong
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Sari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Babakan Sari (%)	0,00	0,00	5,88	40.256.933,15	11,76	40.356.551,82	17,65	39.358.907,52	21,18	40.071.370,31	21,18	40.767.299,97	7.01.0.00.0.00.20.0006 - Kelurahan Babakansari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Surabaya	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Surabaya (%)	0,00	0,00	10,59	41.552.040,96	11,76	41.654.864,47	12,94	40.625.124,90	14,12	41.360.508,37	15,29	42.078.826,82	7.01.0.00.0.00.20.0004 - Kelurahan Babakan Surabaya
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cicaheum	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cicaheum (%)	0,00	0,00	12,94	34.452.582,36	14,12	22.668.442,77	14,12	33.684.036,44	14,12	34.293.774,47	14,12	34.889.363,15	7.01.0.00.0.00.20.0005 - Kelurahan Cicaheum
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebon Jayanti	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Jayanti (%)	0,00	0,00	7,06	30.293.705,50	7,06	29.968.449,76	8,24	29.617.933,10	8,24	30.154.067,79	9,41	30.677.761,14	7.01.0.00.0.00.20.0003 - Kelurahan Kebon Jayanti
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kebon Kangkung	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Kebon Kangkung (%)	0,00	0,00	12,94	28.218.699,25	12,94	28.288.528,45	12,94	27.589.214,76	12,94	28.088.626,21	12,94	28.576.448,51	7.01.0.00.0.00.20.0007 - Kelurahan Kebon Kangkung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukapura	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sukapura (%)	0,00	0,00	12,94	53.038.744,33	14,12	25.838.182,65	15,29	51.855.590,32	16,47	52.794.264,21	17,65	53.711.155,60	7.01.0.00.0.00.20.0002 - Kelurahan Sukapura
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Arcamanik	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,00	85,00	90,00	1.725.859.793,07	95,00	1.269.266.763,72	100,00	1.304.203.824,20	100,00	1.339.990.652,88	100,00	1.374.947.026,28	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	80,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Arcamanik
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cisaranten Bina Harapan (%)	0,00	85,00	90,00	60.600.000,00	95,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	7.01.0.00.0.00.21.0003 - Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cisaranten Endah (%)	0,00	85,00	90,00	0,00	95,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	7.01.0.00.0.00.21.0005 - Kelurahan Cisaranten Endah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cisaranten Kulon (%)	0,00	85,00	90,00	62.100.000,00	95,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	7.01.0.00.0.00.21.0004 - Kelurahan Cisaranten Kulon
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukamiskin	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sukamiskin (%)	0,00	85,00	90,00	59.375.000,00	95,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	7.01.0.00.0.00.21.0002 - Kelurahan Sukamiskin
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cibiru	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	72,22	75,93	79,63	364.598.858,00	81,84	376.725.956,00	83,33	389.144.818,00	85,19	401.865.742,00	87,04	414.291.470,00	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cibiru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipadung	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Cipadung (%)	72,22	72,88	77,78	138.360.000,00	83,33	138.360.000,00	83,33	138.360.000,00	83,33	138.360.000,00	88,89	138.360.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0003 - Kelurahan Cipadung
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisurupan	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Cisurupan (%)	70,00	80,00	80,00	47.310.000,00	80,00	47.310.000,00	80,00	47.310.000,00	80,00	47.310.000,00	80,00	47.310.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0005 - Kelurahan Cisurupan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Palasari	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Palasari (%)	71,42	78,57	85,71	79.271.000,00	85,71	79.271.000,00	85,71	79.271.000,00	92,86	79.271.000,00	92,86	79.271.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0002 - Kelurahan Palasari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasirbiru	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Pasirbiru (%)	75,00	75,00	75,00	48.662.000,00	75,00	48.662.000,00	83,33	48.662.000,00	83,33	48.662.000,00	83,33	48.662.000,00	7.01.0.00.0.00.22.0004 - Kelurahan Pasirbiru
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Antapani	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	82,60	86,96	93,48	284.999.999,00	97,83	327.130.942,00	100,00	370.525.813,00	100,00	415.222.531,00	100,00	418.821.699,67	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Antapani
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Antapani Kidul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Antapani Kidul (%)	100,00	100,00	100,00	350.772.647,88	100,00	350.772.647,88	100,00	350.772.647,88	100,00	350.772.647,88	100,00	530.772.647,88	7.01.0.00.0.00.23.0005 - Kelurahan Antapani Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Antapani Kulon	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Antapani Kulon (%)	100,00	100,00	100,00	198.190.156,00	100,00	198.190.156,00	100,00	198.190.156,00	100,00	198.190.156,00	100,00	348.190.156,00	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Antapani Kulon
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Antapani Tengah	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Antapani Tengah (%)	100,00	100,00	100,00	350.108.033,16	100,00	350.108.033,16	100,00	350.108.033,16	100,00	350.108.033,16	100,00	550.108.033,16	7.01.0.00.0.00.23.0004 - Kelurahan Antapani Tengah
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Antapani Wetan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Antapani wetan (%)	87,52	93,76	100,00	220.293.928,96	100,00	220.293.928,96	100,00	220.293.928,96	100,00	220.293.928,96	100,00	370.293.928,96	7.01.0.00.0.00.23.0003 - Kelurahan Antapani Wetan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Rancasari	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	0,00	0,00	287.017.971,80	0,00	292.150.212,35	0,00	297.405.928,76	0,00	302.789.479,07	0,00	308.048.100,84	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	80,00	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Rancasari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipamokolan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cipamokolan (%)	85,00	90,00	100,00	264.014.281,73	100,00	268.735.187,47	100,00	273.569.672,88	100,00	278.521.746,67	100,00	283.358.904,55	7.01.0.00.0.00.24.0002 - Kelurahan Cipamokolan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Derwati	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Derwati (%)	85,00	90,00	100,00	414.879.585,57	100,00	422.298.151,74	100,00	429.895.200,25	100,00	437.677.030,48	100,00	445.278.278,57	7.01.0.00.0.00.24.0003 - Kelurahan Derwati
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Manjahlega	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Manjahlega (%)	85,00	90,00	100,00	188.581.629,81	100,00	191.953.705,34	100,00	195.406.909,20	100,00	198.944.104,76	100,00	202.399.217,53	7.01.0.00.0.00.24.0004 - Kelurahan Manjahlega
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Mekarjaya	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Mekarjaya (%)	85,00	90,00	100,00	170.910.301,84	100,00	173.966.391,91	100,00	177.096.008,07	100,00	180.301.745,35	100,00	183.433.091,53	7.01.0.00.0.00.24.0005 - Kelurahan Mekarjaya
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Buahbatu	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	69,09	72,73	78,18	568.890.000,00	81,82	588.890.000,00	85,45	608.890.000,00	89,09	618.890.000,00	100,00	628.890.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Buahbatu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cijawura	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cijawura (%)	0,00	72,73	78,18	283.200.000,00	81,82	283.200.000,00	85,45	303.200.000,00	89,09	313.200.000,00	90,91	323.200.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0004 - Kelurahan Cijawura
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Jatisari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Jatisari (%)	0,00	72,73	78,18	184.761.600,00	81,82	184.761.600,00	85,45	204.761.600,00	89,09	214.761.600,00	90,91	224.761.600,00	7.01.0.00.0.00.25.0005 - Kelurahan Jatisari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Margasari	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Margasari (%)	0,00	72,73	78,18	377.920.000,00	81,82	377.920.000,00	85,45	397.920.000,00	89,09	407.920.000,00	90,91	417.920.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0003 - Kelurahan Margasari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sekejati	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sekejati (%)	0,00	72,73	78,18	292.950.000,00	81,82	292.950.000,00	85,45	312.950.000,00	89,09	322.950.000,00	90,91	332.950.000,00	7.01.0.00.0.00.25.0002 - Kelurahan Sekejati
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Bandung Kidul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,00	82,00	88,00	492.403.665,00	92,00	492.403.665,00	100,00	492.403.665,00	100,00	492.403.665,00	100,00	492.403.665,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	75,00	75,00	75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Bandung Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Batununggal	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Batununggal (%)	0,00	82,00	88,00	237.557.433,00	92,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	100,00	237.557.433,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - Kelurahan Batununggal
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Kujangsari	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Kujangsari (%)	0,00	82,00	88,00	195.823.790,00	92,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	100,00	195.823.790,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - Kelurahan Kujangsari
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Mengger	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Mengger (%)	0,00	82,00	88,00	99.226.745,00	92,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	100,00	99.226.745,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - Kelurahan Mengger
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Wates	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Wates (%)	0,00	82,00	88,00	140.176.323,00	92,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	100,00	140.176.323,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - Kelurahan Wates
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Gedebage	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	0,00	82,00	88,00	745.201.023,65	92,00	745.201.023,65	100,00	754.953.710,78	100,00	764.943.610,84	100,00	774.701.690,45	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Gedebage
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cimincrang	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Cimincrang (%)	82,00	82,00	88,00	498.250.139,08	92,00	503.354.590,30	100,00	513.107.277,42	100,00	523.097.177,50	100,00	532.855.255,50	7.01.0.00.0.00.27.0002 - Kelurahan Cimincrang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisaranten Kidul	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Cisaranten Kidul (%)	82,00	82,00	88,00	422.050.372,75	92,00	517.954.590,30	100,00	527.707.277,42	100,00	537.697.177,50	100,00	547.455.255,50	7.01.0.00.0.00.27.0003 - Kelurahan Cisaranten Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Rancabolang	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Rancabolang (%)	82,00	82,00	88,00	506.050.139,08	92,00	510.154.590,30	100,00	519.907.277,42	100,00	529.897.177,50	100,00	539.655.255,50	7.01.0.00.0.00.27.0004 - Kelurahan Rancabolang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Rancanumpang	Persentase Satkamling Aktif lingkup Kelurahan Rancanumpang ()	82,00	82,00	88,00	491.450.139,08	92,00	433.954.823,95	100,00	443.707.511,07	100,00	453.697.411,15	100,00	463.455.489,15	7.01.0.00.0.00.27.0005 - Kelurahan Rancanumpang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Panyileukan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,00	72,97	75,68	691.414.336,37	78,38	197.868.161,89	81,78	198.507.151,97	83,78	201.258.975,41	86,49	203.900.529,88	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	75,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cipadung Kidul (%)	0,00	71,43	71,43	75.854.900,00	71,43	15.000.000,00	78,57	16.000.000,00	85,71	16.500.000,00	92,86	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0004 - Kelurahan Cipadung Kidul
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cipadung Kulon (%)	0,00	63,67	72,73	83.993.398,00	72,73	15.000.000,00	72,73	16.000.000,00	72,73	16.500.000,00	72,73	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0002 - Kelurahan Cipadung Kulon
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Cipadung Wetan (%)	0,00	66,67	66,67	61.000.000,00	83,33	15.000.000,00	83,33	16.000.000,00	83,33	16.500.000,00	83,33	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Cipadung Wetan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Mekarmulya	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Mekarmulya (%)	0,00	100,00	100,00	101.090.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	16.000.000,00	100,00	16.500.000,00	100,00	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.28.0005 - Kelurahan Mekarmulya
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Cinambo	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	80,00	100,00	100,00	783.452.836,92	100,00	797.461.954,04	100,00	811.808.114,74	100,00	826.503.214,67	100,00	840.857.305,76	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	75,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Cinambo
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Babakan Penghulu (%)	100,00	100,00	100,00	463.297.977,85	100,00	471.582.325,46	100,00	480.065.985,14	100,00	488.755.991,43	100,00	497.244.340,80	7.01.0.00.0.00.29.0005 - Kelurahan Babakan Penghulu
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Cisaranten Wetan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Cisaranten wetan (%)	100,00	100,00	100,00	360.678.308,12	100,00	367.127.687,62	100,00	373.732.231,92	100,00	380.497.417,43	100,00	387.105.612,70	7.01.0.00.0.00.29.0004 - Kelurahan Cisaranten Wetan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pakemitan	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Pakemitan (%)	100,00	100,00	100,00	291.835.560,75	100,00	297.053.945,78	100,00	302.397.879,27	100,00	307.871.792,35	100,00	313.218.679,90	7.01.0.00.0.00.29.0002 - Kelurahan Pakemitan
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sukamulya	Persentase Satkamling Aktif Lingkup Kelurahan Sukamulya (%)	0,00	100,00	100,00	338.657.909,44	100,00	344.713.536,65	100,00	350.914.855,43	100,00	357.267.007,84	100,00	363.471.754,70	7.01.0.00.0.00.29.0003 - Kelurahan Sukamulya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan Mandalajati	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan (%)	68,00	73,58	100,00	207.810.467,00	100,00	227.810.467,00	100,00	277.810.467,00	100,00	327.810.467,00	100,00	347.810.467,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan (%)	50,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Mandalajati
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Jatihandap	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Jatihandap (%)	0,00	26,42	100,00	149.000.000,00	100,00	169.000.000,00	100,00	181.500.000,00	100,00	194.000.000,00	100,00	214.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0002 - Kelurahan Jatihandap
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Karang Pamulang	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Karang Pamulang (%)	0,00	16,98	100,00	95.000.000,00	100,00	115.000.000,00	100,00	127.500.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	160.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - Kelurahan Karangpamulang
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Pasir Impun	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Pasir Impun (%)	0,00	11,32	100,00	77.000.000,00	100,00	97.000.000,00	100,00	109.500.000,00	100,00	122.000.000,00	100,00	142.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - Kelurahan Pasir Impun
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kelurahan Sindangjaya	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kelurahan Sindangjaya (%)	0,00	18,87	100,00	95.000.000,00	100,00	115.000.000,00	100,00	127.500.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	160.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - Kelurahan Sindang Jaya
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					64.888.646.092,74		66.048.936.285,49		67.237.141.753,18		68.454.247.740,82		69.643.110.038,51	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.213.897.542,30		19.756.346.929,75		21.330.984.509,07		22.168.304.091,04		23.713.939.402,61	
Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Lingkup Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,90	85,00	85,10	19.213.897.542,30	85,25	19.756.346.929,75	85,40	21.330.984.509,07	85,50	22.168.304.091,04	85,60	23.713.939.402,61	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.761.134.987,44		3.510.000.000,00		3.510.000.000,00		3.710.000.000,00		3.533.760.000,00	
Meningkatnya Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Indeks)	3,71	3,73	3,74	3.761.134.987,44	3,75	3.510.000.000,00	3,76	3.510.000.000,00	3,77	3.710.000.000,00	3,78	3.533.760.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					14.739.764.992,00		14.858.210.755,74		14.869.764.992,00		14.939.764.992,00		14.869.764.992,00	
Meningkatnya Stabilitas Politik Lingkup Bidang Politik Dalam Negeri	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Stabilitas Politik (Indeks)	4,50	4,82	4,83	14.739.764.992,00	4,84	14.858.210.755,74	4,85	14.869.764.992,00	4,86	14.939.764.992,00	4,87	14.869.764.992,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.875.000.000,00		1.875.000.000,00		1.875.000.000,00		1.875.000.000,00		1.875.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Organisasi Masyarakat Lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Organisasi Masyarakat (Indeks)	3,60	3,75	3,76	1.875.000.000,00	3,77	1.875.000.000,00	3,78	1.875.000.000,00	3,79	1.875.000.000,00	3,80	1.875.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.999.679.971,00		2.500.000.000,00		2.045.335.652,11		2.075.122.057,78		2.075.122.057,78	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Indeks)	3,60	3,75	3,76	1.999.679.971,00	3,77	2.500.000.000,00	3,78	2.045.335.652,11	3,79	2.075.122.057,78	3,80	2.075.122.057,78	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					23.299.168.600,00		23.549.378.600,00		23.606.056.600,00		23.686.056.600,00		23.575.523.586,12	
Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik (Indeks)	3,90	3,95	3,96	23.299.168.600,00	3,97	23.549.378.600,00	3,98	23.606.056.600,00	3,99	23.686.056.600,00	4,00	23.575.523.586,12	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					7.903.250.000.001,02		8.044.570.000.000,03		8.189.290.000.000,00		8.337.530.000.000,02		8.482.330.000.001,01	

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pencapaian visi dan misi pembangunan, diperlukan program perangkat daerah sebagaimana dimuat pada tabel di atas. Program tersebut dirinci menjadi kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum, pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggararan. Namun terdapat beberapa pelaksanaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan tahun jamak. Pelaksanaan kontrak tahun jamak *(multi years contract)* Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Adapun rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam bentuk kontrak tahun jamak adalah Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan kantor Inspektorat.

A. Revitalisasi RSUD Kota Bandung

Adapun rencana tahapan pelaksanaaan Revitalisasi RSUD mulai tahap I sampai tahap II dimuat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Rencana Tahapan Revitalisasi RSUD





Sumber: *Dinas Kesehatan, 2025*

B. Pembangunan Kantor Inspektorat

Rencana pembangunan gedung kantor Inspektorat akan dilakukan mulai tahun 2025 sampai 2028, dengan total kebutuhan anggaran Rp 131.822.534.520. Pelaksanaan pembangunan untuk tahap 1 selesai dalam 12 bulan, dan tahap 2 juga selesai 12 bulan.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Subbab ini disusun untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengukur kinerja dalam rangka rangka mewujudkan visi dan misi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Bandung. Indikator kinerja yang digunakan memerhatikan aspek keterukuran sehingga dapat dievaluasi melalui sistem kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Sementara Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Penetapan IKU dilakukan secara selektif, berdampak luas, dan dapat merepresentasikan pencapaian transformasi pembangunan secara menyeluruh. IKU tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga kontekstual terhadap tantangan lokal, inklusif terhadap kebutuhan warga, dan menjawab tren transformasi kota jangka menengah dan panjang.

Indikator-indikator disusun berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), serta didesain untuk menjaga korelasi antara tujuan RPJMD dengan penganggaran dan program lintas perangkat daerah. IKU menjadi dasar pengukuran kinerja kepala daerah dan sekaligus menjadi pengungkit utama reformasi tata kelola.

Berikut adalah daftar IKU utama yang merepresentasikan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Tahun 2025–2029

INDIKATOR		SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,84	75,87	76,05	76,22	76,39	76,57	76,72
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,07	11,08	11,09	11,11	11,13	11,15	11,17
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,3	14,31
4	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/ Tahun	18.795	18.969	19.152	19.334	19.425	20.110	20.373
5	Indeks Inovasi Daerah	Skor	57,15	58,15	59,15	61,15	63,15	65,14	67,15
6	Indeks Ketenteraman	Skor	7,56	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,67
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,87	3,68	3,58	3,48	3,38	3,28	3,18
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,40	7,35	7,23	7,11	6,99	6,87	6,75
9	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	75,81	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
10	Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi	Skor	82,61	82,68	82,69	82,7	82,72	82,73	82,74
11	Indeks Pembangunan Kepariwisataan	Skor	N/A	4,01	4,14	4,26	4,39	4,51	4,64
12	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Miliar Rp	10.791,00	11.077,05	11.363,22	12.022,39	12.737,01	13.512,31	14.362,51
13	Indeks Kapasitas Fiskal	Skor	1,846	2,061	2,275	2,323	2,402	2,476	2,553
14	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	44.362,19	71.790,19	109.952,00	162.070,42	239.181,24	388.294,46	580.143,54
15	Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur	Nilai	7,63	7,69	7,76	7,83	7,89	7,96	8,03
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,08	51,32	51,57	51,82	52,07	52,33	52,58
17	Indeks Risiko Bencana	Nilai	95,15	93,15	91,15	89,15	87,15	85,15	83,15
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	58,88	58,91	58,94	58,99	59,02	59,05	59,08
19	Indeks Harmoni Religius	Skor	N/A	7,06	7,11	7,16	7,21	7,26	7,31
20	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Skor	3,98	4	4,07	4,08	4,09	4,1	4,11

Sumber: *hasil proyeksi, 2025*

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator makro mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB), dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintahan. IKD tidak hanya menjadi refleksi kualitas birokrasi, tetapi juga menjadi alat akuntabilitas dalam menjamin efektivitas kebijakan, efisiensi belanja, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.

Pada tabel di bawah, dimuat indikator-indikator yang merupakan IKD sebagai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung tahun 2025–2029. Target yang ditetapkan setiap tahun memerhatikan hasil capaian beberapa tahun terakhir maupun target provinsi dan nasional, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bandung Tahun 2025–2029

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,08	51,32	51,57	51,82	52,07	52,33	52,58	
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq IDR Milyar	0,97	1,13	1,31	1,46	1,62	1,79	1,95	
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	44.362,19	71.790,19	109.952,00	162.070,42	239.181,24	388.294,46	580.143,54	
4	Indeks Risiko Bencana	Nilai	95,15	93,15	91,15	89,15	87,15	85,15	83,15	
5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	93,01	93,18	93,27	93,37	93,46	93,55	93,64	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,48	2,95	2,78	2,61	2,43	2,26	2,09	
8	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	N/A	6,42	6,94	7,46	7,98	8,5	9,02	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	18,1	23,22	28,34	33,46	38,58	43,70	
10	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	17,45	17,47	17,49	17,50	17,52	17,53	17,54	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	19,75	22,39	25,37	28,75	32,58	34,39	
12	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	80,82	84,57	88,5	92,61	96,91	100	100	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,99	5,10	5,35	5,59	5,84	6,08	6,33	

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi	Skor (Skala 0–100)	82,61	82,68	82,69	82,70	82,72	82,73	82,74	
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	147,08	154,04	161,19	168,33	175,48	182,62	189,77	
4	Indeks Kota Kreatif	Skor	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
5	Gini Ratio	Skor	0,440	0,440	0,430	0,430	0,420	0,410	0,400	
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,87	3,68	3,58	3,48	3,38	3,28	3,18	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,4	7,35	7,23	7,11	6,99	6,87	6,75	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	83,75	83,97	84,30	84,56	84,82	85,09	85,30	
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,84	75,87	76,05	76,22	76,39	76,57	76,72	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,07	11,08	11,09	11,11	11,13	11,15	11,17	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,3	14,31	
12	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/ Tahun	18.795	18.969	19.152	19.334	19.425	20.110	20.373	
13	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	27,00	27,00	25,65	24,37	23,15	21,99	20,89	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	22,8	20,54	18,61	16,95	15,52	14,28	13,11	
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	Persen	N/A	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*	Persen	N/A	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	N/A	99,34	99,38	99,43	99,47	99,51	99,55	

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Proporsi Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	N/A	17,40 - 18,32	17,80-18,70	18,21-19,08	18,61-19,46	19,01-19,85	19,41-20,23	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	N/A	61,26 - 62,76	62,69-64,54	63,04-66,32	61,26-68,1	66,96-69,88	61,26-71,66	
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	0,027	0,03	0,03	0,04	0,0408	0,04	
21	Persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi selama 3 bulan terakhir	Persen	N/A	85,24	85,61	85,99	86,36	86,73	87,10	
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Skor	N/A	74,79-74,85	75,22-75,32	75,65-75,79	76,08-76,26	76,51-76,72	76,94-77,19	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,258	4,263	4,268	4,273	4,278	4,283	4,288	
2	Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur	Skor	7,63	7,69	7,76	7,83	7,89	7,96	8,03	
3	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	N/A	6,81	6,86	6,91	6,96	7,01	7,06	
4	Indeks Harmoni Religius	Skor	N/A	7,06	7,11	7,16	7,21	7,26	7,31	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	58,88	58,91	58,94	58,99	59,02	59,05	59,08	
6	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,29	18,45	18,62	18,79	18,96	19,13	19,30	
7	Kontribusi PDRB Kota Bandung terhadap Provinsi	Persen	13,11	13,29	13,30	13,32	13,33	13,34	13,36	
8	Tingkat Inflasi	Persen	1,61	2,70 - 3,66	2,65-3,62	2,60-3,58	2,54-3,54	2,49-3,49	2,44-3,45	

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Miliar Rp	10.791,00	11.077,05	11.363,22	12.022,39	12.737,01	13.512,31	14.362,51	
10	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB	Persen	24,36	24,60	24,85	25,10	25,35	25,60	25,86	
11	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	N/A	1,50 - 1,60	1,51-1,61	1,52-1,62	1,53-1,63	1,54-1,63	1,55-1,64	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	0,67 - 0,7	0,70-0,73	0,73-0,76	0,75-0,79	0,78-0,81	0,81-0,84	
13	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	N/A	4,97	5,51	6,05	6,58	7,12	7,66	
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	51,96	53,60	53,65	53,70	53,75	53,80	53,85	
15	Indeks Inovasi Daerah	Skor	57,15	58,15	59,15	61,15	63,15	65,14	67,15	
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	N/A	43544 - 46434	49840-52297	56136-58160	62433-64023	68729-69886	75025-75749	
17	Indeks Pembangunan Kepariwisataan	Skor	N/A	4,01	4,14	4,26	4,39	4,51	4,64	
18	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	4,55	4,72	4,89	5,05	5,22	5,39	
19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,75	0,85	0,94	1,04	1,13	1,23	
20	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	3,34% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	3,43% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	3,52% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	3,61% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	3,71% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	3,80% WM Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	**Kategori & Nilai**	**A- (88,02)**	**A- (89,52)**	**A- (91,02)**	**A- (92,52)**	**A- (94,02)**	**A- (95,52)**	**A- (97,52)**	
2	Indeks Reformasi Birokrasi General	Skor	75,81	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	
3	Nilai SAKIP	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	
4	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	
6	Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	
7	Indeks SPBE	Skor	4,59	4,62	4,65	4,68	4,71	4,72	4,75	
8	Tingkat Maturitas SPIP	Skor	2,87	3	3	3	3	3	3	
9	Indeks Reformasi Hukum	Skor	87,44	87,45	87,46	87,47	87,48	87,49	87,50	
10	Survei Penilaian Integritas	Skor	69,14	70,14	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	
11	Indeks Ketenteraman	Skor	7,56	7,58	7,6	7,62	7,64	7,66	7,67	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Skor	N/A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
13	Indeks Kapasitas Fiskal	Skor	1,846	2,061	2,275	2,323	2,402	2,476	2,553	
14	Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	6,56	6,57	6,57	6,57	6,58	6,58	6,58	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
	Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	65,49	68,53	71,56	74,60	77,64	80,68	83,65	Dinas Pendidikan
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99,33	99,61	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	26,60	31,58	36,55	41,53	46,51	51,49	56,46	Dinas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,85	73,35	75,85	78,35	80,85	83,35	85,85	Dinas Pendidikan
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,12	61,02	63,92	66,82	69,72	72,62	75,52	Dinas Pendidikan
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	82,05	83,15	84,25	85,35	86,45	87,55	88,65	Dinas Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,71	71,21	72,71	74,21	75,71	77,21	78,71	Dinas Pendidikan
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	74,64	75,06	75,47	75,88	76,29	76,70	77,11	Dinas Pendidikan
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	80,82	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72	95,22	Dinas Pendidikan
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	76,25	77,15	78,05	78,95	79,85	80,75	81,65	Dinas Pendidikan
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	74,96	76,46	77,96	79,46	80,96	82,46	83,96	Dinas Pendidikan
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	73,60	74,60	75,60	76,60	77,60	78,60	79,60	Dinas Pendidikan
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	73,35	74,35	75,35	76,35	77,35	78,35	79,35	Dinas Pendidikan
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	60,02	62,52	65,02	67,52	70,02	72,52	75,02	Dinas Pendidikan
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	62,48	64,88	67,28	69,68	72,08	74,48	76,88	Dinas Pendidikan
16	Angka Putus Sekolah Jenjang SD (7-12 Tahun)	Orang	1.373	1.323	1.273	1.223	1.173	1.123	1.073	Dinas Pendidikan
17	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP (13-15 Tahun)	Orang	1.822	1.772	1.722	1.672	1.622	1.572	1.522	Dinas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	27	26	25	24	23	22	21	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	22,8	20,54	18,61	16,95	15,52	14,28	13,11	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	98,03	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	92,76	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	95,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,92	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	93,84	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,02	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) sesuai standar	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UOBK RSKGM Kota Bandung	Nilai	91	91,3	91,75	91,1	91,1	91,2	91,24	Dinas Kesehatan
16	Akreditasi Strata Paripurna	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinas Kesehatan
17	Indeks kepuasan masyarakat lingkup UOBK RSUD Bandung Kiwari	Nilai	90,02	90,03	90,04	90,05	90,06	90,07	90,08	Dinas Kesehatan
18	Akreditasi Strata Paripurna	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinas Kesehatan
19	Capaian Akreditasi Rumah Sakit Strata Paripurna Lingkup UOBK RSUD Kota Bandung	Persen	96,02	96,05	96,1	96,15	96,2	96,25	96,30	Dinas Kesehatan
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UOBK RSUD Kota Bandung	Nilai	87,79	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,76	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	95,01	92,72	90,70	89,01	87,35	85,73	84,12	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	86,61	87	87,5	87,7	88	88,2	88,4	Dinas Ciptabintar
3	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ciptabintar
4	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	80	80	80	81	82	83	84	Dinas Ciptabintar
5	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	81	82	82,5	83	83,5	84	84,5	Dinas Ciptabintar
6	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	Persen	91,68	91,73	91,94	92,14	92,35	92,56	92,77	DPKP
7	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	82,55	82,57	82,59	82,61	82,63	82,65	82,67	DPKP
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	51,83	42,08	43,71	47,05	48,71	50,38	52,05	DPKP

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Persen	13,19	13,73	7,95	8,64	9,46	10,45	11,66	DPKP
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPKP
	Trantibumlinmas									
1	Indeks Ketertiban Umum	Nilai	7,52	7,6	7,67	7,75	7,83	7,9	7,98	Satpol PP
2	Indeks Perlindungan Masyarakat	Nilai	7,65	7,73	7,81	7,88	7,96	8,04	8,12	Satpol PP
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdamkarmat
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
6	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
7	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	BPBD
8	Persentase penanganan pra bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	BPBD
9	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	BPBD

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	BPBD
	Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,59	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	Dinas Sosial
2	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	-	57,61	57,88	58,16	58,64	59,08	59,45	Dinas Sosial
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	64,14	3,42	3,48	3,54	3,60	3,66	3,72	Disnaker
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Tenaga Kerja	125.938,26	139.831,81	141.929,28	144.058,22	146.219,10	148.412,38	150.638,57	Disnaker
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	2,230	2,73	3,11	3,48	3,83	4,17	4,49	Disnaker

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	62,34	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	Disnaker
6	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	48,53	49,67	50,10	50,59	51,13	51,49	51,80	Disnaker
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,87	94,91	94,95	94,99	95,03	95,07	95,11	DP3A
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,244	0,239	0,234	0,229	0,224	0,219	0,214	DP3A
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,93	71,42	72,15	73,22	74,19	76,11	76,97	DP3A
4	Persentase ARG Daerah	Persen	17,04	18,20	18,70	19,20	19,70	20,20	20,70	DP3A
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	70,18	70,00	71,25	72,11	72,97	74,22	74,85	DP3A
6	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	70,35	71,00	71,63	72,49	73,35	74,60	75,23	DP3A
	Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	262,97	100	100	100	100	100	100	DKPP
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	90,73	91,02	91,30	91,59	91,87	92,16	92,44	DKPP
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	N/A	13,25	11,26	10,60	9,93	9,27	8,61	DKPP

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	99,97	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	DKPP
	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	57,16	51,32	51,57	51,82	52,07	52,33	52,58	Dinas LH
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	Persen	57,00	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	66,00	Dinas LH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	49,25	51,87	54,48	57,46	66,79	80,97	100,00	Dinas LH
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	DPPKB
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	9,70	9,49	9,28	9,08	8,88	8,69	8,50	DPPKB
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	61,18	62,57	63,99	65,44	66,93	68,45	70,00	DPPKB
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	56,26	56,18	58,11	59,06	60,02	61,00	62,00	DPPKB
	Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,63	0,63	0,61	0,69	0,79	0,86	0,86	Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota	Persen	36,81	58,20	66,56	74,92	83,28	91,64	100,00	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	1,66	7,14	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	13,09	30	100	100	100	100	100	Diskominfo
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	84	90	95	100	100	100	100	Diskominfo
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
1	Tingkat Kesehatan Koperasi	Persen	19,85	20,14	21,94	23,49	24,89	26,44	28,02	Dinas Koperasi UMKM
2	Persentase usaha mikro yang meningkat skala usahanya	Persen	6,92	15,55	17,78	20	22,22	24,44	26,66	Dinas Koperasi UMKM
3	Persentase usaha mikro yang berlanjut usahanya	Persen	7,74	8,31	10,22	11,18	12,14	12,78	13,90	Dinas Koperasi UMKM
	Penanaman Modal									
1	Nilai Realisasi Investasi	triliun	7,3	7,78	10,95	12	13,2	14,5		Dinas PMPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	6,30	6,.60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk pelatda Provinsi	Persen	-	0,02	-	-	2.1%	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,02	3.025	3,03	3.035	3,04	3.045	3,05	Diskominfo
	Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	Persen	91,47	67	69	72	75	77	80	Diskominfo
	Kebudayaan									
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	23,84	23,95	24,10	24,35	24,50	25,50	26,50	Disbudpar
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	Disbudpar
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	2,81%	3,67%	4,54%	5,40%	6,26%	7,13%	7,99%	Disbudpar
	Perikanan									
1	Produksi Perikanan Budi Daya	Persen	902,29	911,31	945,03	980	1045,66	1129,31	1225,3	DKPP
	Pariwisata									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	4,81	4,85	4,91	4,97	5,01	5,06	5,08	Disbudpar
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	Persen	3,45	3,5	3,8	4,2	3,8	3,9	3,8	Disbudpar
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	9,30%	12,72%	15,98%	18,20%	20,43%	22,65%	24,88%	Disbudpar
	Pertanian									
1	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perdagangan									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	81,41	81,41	81,61	82,00	82,67	83,67	84,30	Disdagin
	Perindustrian									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	29,43	18,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Disdagin
2	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	94,00	95,00	96,00	96,00	96,00	97,00	97,00	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Sekretariat Daerah									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	93,00	93,25	93,3	93,45	93,5	93,75	94	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Sekretariat DPRD
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bapperida
	Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	28%	31%	25%	23%	23%	21%	21%	BPKAD

No.	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	86,89	90%	90%	90%	90%	90%	90%	BPKAD
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	8,48	1,26%	1,34%	1,43%	1,44%	1,46%	1,46%	BPKAD
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	19,1	18,36	19,92%	21,72%	20,94%	22,26%	22,26%	BPKAD
5	Persentase Penurunan SILPA	Persen	11,81	0	0	0	0	0	0	BPKAD
	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	NA	50	75	100	100	100	100	Bapperida
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	54,17	56,06	58,9	62,69	67,42	73,11	79,73	Bapperida
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	92,88	93,17	93,45	93,72	93,98	94,23	94,47	BKPSDM
	Inspektorat									
1	Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja	Nilai	21,37	21,39	21,41	21,43	21,45	21,47	21,49	Inspektorat
2	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	4	4	Inspektorat
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Indeks	3,98	4	4,07	4,08	4,09	4,1	4,11	Kesbangpol

Sumber: *hasil proyeksi, 2025*



BAB

V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan wali kota dan wakil wali kota. Rencana dalam dokumen ini ditujukan untuk mewujudkan visi kota yakni "**Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional**".

Kata kunci **Unggul** diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada IPM, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. **Terbuka** bermakna pemerataan pembangunan dan inklusivitas, ditunjukkan melalui Indeks Daya Saing Daerah, penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. **Amanah** diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inovatif, diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. **Maju** terkait dengan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, peningkatan PDRB per kapita, investasi, pariwisata, dan infrastruktur berkelanjutan. Sementara **Agamis** mencerminkan penguatan karakter masyarakat yang religius, moderat, dan toleran melalui peningkatan Indeks Harmoni, Kebudayaan, dan Perlindungan Kebhinnekaan.

Visi ini mencerminkan arah pembangunan yang komprehensif, dengan penekanan pada kualitas hidup warga, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, serta penguatan identitas sosial dan budaya. Visi ini diterjemahkan lebih lanjut dalam misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki indikator terukur sehingga dapat dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah, diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Pengaturan kaidah pelaksanaan ditujukan untuk memastikan pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan guna mewujudkan visi dan misi daerah. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Wali Kota mempublikasikan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029.
2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, dan media.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
4. Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030. Selanjutnya, RKPD

akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Beberapa hal pengaturan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yaitu:
   a. Bappelitbang melakukan Evaluasi Hasil terhadap RPJMD secara periodik.
   b. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan Evaluasi hasil RKPD.
   c. Hasil evaluasi disampaikan Bappelitbang kepada wali kota sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya, yang selanjutnya dilaporkan ke gubernur.
6. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
7. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
8. Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanaakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan daerah.
9. Pemerintah Daerah mengupayakan pendanaan alternatif lainnya selain dari APBD Kota Bandung, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.
10. Pelaksanaan RPJMD melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunikasi publik secara berkesinambungan.
11. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan memedomani peraturan yang berlaku.

5.3. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 ini berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJMD akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045, dan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN.

Lebih lanjut, pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dilakukan dengan memedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2025-2029 serta memerhatikan permasalahan dan isu strategis daerah yang terkini. Dalam hal RPJMD periode berikutnya belum disusun, maka RKPD tahun 2030 juga memedomani arah kebijakan RPJPD Kota Bandung pada periode berkenaan, serta peraturan yang berlaku.

7. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
8. Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanaakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan daerah.
9. Pemerintah Daerah mengupayakan pendanaan alternatif lainnya selain dari APBD Kota Bandung, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.
10. Pelaksanaan RPJMD melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunikasi publik secara berkesinambungan.
11. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan memedomani peraturan yang berlaku.

5.2. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 ini berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJMD akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045, dan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN.

Lebih lanjut, pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dilakukan dengan memedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2025-2029 serta memerhatikan permasalahan dan isu strategis daerah yang terkini. Dalam hal RPJMD periode berikutnya belum disusun, maka RKPD tahun 2030 juga memedomani arah kebijakan RPJPD Kota Bandung pada periode berkenaan, serta peraturan yang berlaku.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002